



# RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2023



**KABUPATEN SOLOK SELATAN**





BUPATI SOLOK SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN  
NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;



8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 yang selanjutnya disingkat RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Solok Selatan untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.



## Pasal 2

RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 digunakan sebagai pedoman :

- a. penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2023;
- b. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

## Pasal 3

RKPD disusun dengan tujuan :

- a. mewujudkan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026;
- b. untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan, maupun antar tingkat pemerintahan;
- c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

## Pasal 4

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat:
  - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
  - b. prioritas pembangunan daerah;
  - c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
  - d. kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID19)*.
- (2) Selain muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RKPD juga memuat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.



## Pasal 5

(1) RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

### BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan tentang Kondisi Umum Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD sampai Tahun 2021 dan Realisasi RPJMD serta Permasalahan Pembangunan

### BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Mengemukakan tentang kondisi perekonomian nasional dan regional serta tantangan dan proyeksi perekonomian daerah tahun 2022 dan Berisikan uraian mengenai arah kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah,

### BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional, Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah, serta Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selata Tahun 2023

### BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara *eksplisit* rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Tahun 2023, beserta instansi pelaksana, indikator capaian masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif

### BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Mengemukakan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah direncanakan dalam pencapaian kinerja tahun 2023

### BAB VII PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam mengfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.



- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro  
pada tanggal 7 JULI 2022  
BUPATI SOLOK SELATAN,

  
KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro  
pada tanggal 7 JULI 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,



SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 42



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> ....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>I.1</b>
1.1 Latar Belakang. ....	I.1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	I.5
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	I.7
1.4 Maksud dan Tujuan. ....	I.9
1.5 Sistematika Dokumen RKPD. ....	I.9
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b> .....	<b>II.1</b>
2.1 Kondisi Umum Daerah.....	II.1
2.1.1 Aspek Administrasi, Geografi Dan Demografi.....	II.1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat. ....	II.31
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum. ....	II.54
2.1.4 Aspek Daya Saing. ....	II.95
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Tahun 2021 dan Realisasi RPJMD.....	II.98
2.2.1 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021....	II.98
2.2.2 Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2021....	II.99
2.2.3 Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimum Tahun 2021.. ....	II.108
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah. ....	II.111
<b>BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH</b> .....	<b>III.1</b>
3.1 Kerangka Ekonomi Daerah. ....	III.1
3.1.1 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Nasional.....	III.1
3.1.2 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Provinsi Sumatera Barat. ....	III.15
3.1.3 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Kabupaten Solok Selatan. ....	III.19
3.2 Kerangka Keuangan Daerah. ....	III.23
3.2.1 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. ....	III.28
3.2.2 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.....	III.42
<b>BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH</b> .....	<b>IV.1</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	IV.1
4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional. ....	IV.1
4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat.....	IV.4
4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Solok Selatan.....	IV.10
4.2 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah. ....	IV.17
4.2.1 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023..	IV.17
4.2.2 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Sumatera Barat Tahun 2023..	IV.23
4.2.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023.....	IV.28
4.4 Sinergitas Kegiatan RKPD Kabupaten Solok Selatan dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal .....	IV.33
4.5 Sinergitas Target Kinerja Makro Kabupaten Solok Selatan dengan Provinsi Sumatera Barat.....	IV.62
4.6 Rencana Inovasi Daerah. ....	IV.63
<b>BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH</b> .....	<b>V.1</b>



<b>BAB VI KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAH DAERAH. ....</b>	<b>VI.1</b>
6.1 Indikator Kinerja Utama. ....	VI.1
6.2 Indikator Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. ....	VI.2
6.3 Indikator Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. ....	VI.12
<b>BAB VII PENUTUP. ....</b>	<b>VII.1</b>



<b>DAFTAR TABEL</b>		<b>Hal</b>
<b>Tabel 2.1</b>	Perbandingan Luas Kecamatan di Kabupaten Solok Selatan	II.2
<b>Tabel 2.2</b>	Nama Kecamatan, Nagari Dan Jorong di Kabupaten Solok Selatan	II.3
<b>Tabel 2.3</b>	Klasifikasi lereng wilayah Kabupaten Solok Selatan	II.7
<b>Tabel 2.4</b>	Kondisi Geologi Kabupaten Solok Selatan	II.11
<b>Tabel 2.5</b>	Jenis Tanah Kabupaten Solok Selatan	II.11
<b>Tabel 2.6</b>	Jenis Morfologi Solok Selatan	II.12
<b>Tabel 2.7</b>	Satuan Bentuk Lahan Kabupaten Solok Selatan	II.12
<b>Tabel 2.8</b>	Sungai–Sungai dan Lokasinya	II.13
<b>Tabel 2.9</b>	Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017	II.16
<b>Tabel 2.10</b>	Rencana Pengembangan Sentra Industri Kabupaten Solok Selatan	II.24
<b>Tabel 2.11</b>	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021	II.30
<b>Tabel 2.12</b>	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Tahun 2021	II.30
<b>Tabel 2.13</b>	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2021	II.31
<b>Tabel 2.14</b>	PDRB Kabupaten Solok Selatan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Dan Atas Harga Konstan (ADHK) Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)	II.33
<b>Tabel 2.15</b>	Perkembangan Nilai dan Pertumbuhan Per Sektor PDRB Perlapangan Usaha Atas Harga Berlaku Tahun 2017-2021 (Rp. Milyar)	II.34
<b>Tabel 2.16</b>	Perkembangan Nilai dan Pertumbuhan Per Sektor PDRB Perlapangan Usaha Atas Harga Konstan Tahun 2017-2021 (Rp. Milyar)	II.35
<b>Tabel 2.17</b>	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Perlapangan Usaha Atas Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2017-2021 (%)	II.36
<b>Tabel 2.18</b>	Perkembangan Jumlah Kasus dan Kasus yang terselesaikan dan Angka Kriminalitas Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021	II.53
<b>Tabel 2.19</b>	Perkembangan Indikator Seni Budaya dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021	II.54
<b>Tabel 2.20</b>	Perkembangan Indikator Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021	II.55
<b>Tabel 2.21</b>	Perkembangan Indikator Pelayanan Pendidikan Dasar Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021	II.55
<b>Tabel 2.22</b>	Perkembangan Indikator Pelayanan Pendidikan Menengah Pertama Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021	II.56
<b>Tabel 2. 23</b>	Perkembangan Indikator Pelayanan Pendidikan Menengah Atas Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021	II.57
<b>Tabel 2. 24</b>	Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) serta Cakupan Layanan Kesehatan Ibu dan Anak Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021	II.58
<b>Tabel 2. 25</b>	Balita Gizi Buruk, Balita Gizi Kurang dan Balita Stunting Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021	II.60
<b>Tabel 2. 26</b>	Perkembangan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021	II.61



<b>Tabel 2. 27</b>	Perkembangan Indikator Pelayanan Kesehatan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021	II.63
<b>Tabel 2.28</b>	Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan Per Kecamatan Tahun 2021	II.64
<b>Tabel 2.29</b>	Panjang dan Kondisi Jalan Kabupaten Menurut Kepemilikannya	II.64
<b>Tabel 2.30</b>	Perkembangan Indikator Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021	II.65
<b>Tabel 2.31</b>	Perkembangan Indikator Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021	II.67
<b>Tabel 2.32</b>	Perkembangan Kinerja Pelayanan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021	II.67
<b>Tabel 2.33</b>	Perkembangan Kinerja Pelayanan Urusan Sosial Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021	II.69
<b>Tabel 2.34</b>	Perkembangan Kinerja Pelayanan Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021	II.70
<b>Tabel 2.35</b>	Perkembangan Kinerja Pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021	II.72
<b>Tabel 2.36</b>	Perkembangan Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021	II.73
<b>Tabel 2.37</b>	Perkembangan Indikator Kinerja Pelayanan Urusan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021	II.73
<b>Tabel 2.38</b>	Perkembangan Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021	II.75
<b>Tabel 2.39</b>	Perkembangan Indikator Kinerja Pelayanan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021	II.76
<b>Tabel 2.40</b>	Perkembangan Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021	II.77
<b>Tabel 2.41</b>	Perkembangan Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017 – 2021	II.78
<b>Tabel 2.42</b>	Perkembangan Jumlah Kendaraan Angkutan Umum, Jumlah Arus Penumpang Umum, Rasio Izin Trayek dan Jumlah Terminal Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021	II.78
<b>Tabel 2.43</b>	Perkembangan Jumlah Kepemilikan KIR Angkutan Umum, Lama dan Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021	II.79
<b>Tabel 2.44</b>	Perkembangan Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021	II.80
<b>Tabel 2.45</b>	Perkembangan Kinerja Koperasi Kabupaten Selatan Tahun 2017-2021	II.81
<b>Tabel 2.46</b>	Perkembangan UMKM Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021	II.81
<b>Tabel 2.47</b>	Perkembangan Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021	II.82
<b>Tabel 2.48</b>	Perkembangan Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021	II.83



<b>Tabel 2.49</b>	Perkembangan Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021	II.84
<b>Tabel 2.50</b>	Perkembangan Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021	II.84
<b>Tabel 2.51</b>	Perkembangan Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017 – 2021	II.85
<b>Tabel 2.52</b>	Perkembangan Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021	II.86
<b>Tabel 2.53</b>	Perkembangan Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017 – 2021	II.86
<b>Tabel 2.54</b>	Perkembangan Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021	II.88
<b>Tabel 2.55</b>	Perkembangan Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021	II.88
<b>Tabel 2.56</b>	Produksi Komoditi Tanaman Pangan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021 (Dalam Ton/Tahun)	II.89
<b>Tabel 2.57</b>	Perkembangan Produksi Buah-Buahan dan Perkebunan Utama Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021 (Dalam Ton/Tahun)	II.89
<b>Tabel 2.58</b>	Perkembangan Jumlah Ternak Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021 (Dalam Ekor)	II.90
<b>Tabel 2.59</b>	Perkembangan Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Solok Selatan tahun 2017-2021	II.91
<b>Tabel 2.60</b>	Perkembangan Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Solok Selatan tahun 2017-2021	II.91
<b>Tabel 2.61</b>	Perkembangan Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021	II.93
<b>Tabel 2.62</b>	Perkembangan Kinerja Fungsi Penujang Pemerintahan Kabupaten Solok selatantahun 2017-2021	II.93
<b>Tabel 2.63</b>	Capaian Kinerja Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP Dan Pembinaan Politik Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021	II.94
<b>Tabel 2.64</b>	Indek Kesulitan Geografis Kabupaten Solok Selatan	II.95
<b>Tabel 2.65</b>	Perkembangan Indikator Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021	II.96
<b>Tabel 2.66</b>	Perkembangan Indikator Infrastruktur Dasar Wilayah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021	II.97
<b>Tabel 2.67</b>	Perkembangan Indikator Fokus Iklim Berinvestasi Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021	II.98
<b>Tabel 2.68</b>	Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	II.98
<b>Tabel 2.69</b>	Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2021	II.100
<b>Tabel 2.70</b>	Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimum Tahun 2021	II.109
<b>Tabel 3.1</b>	Pertumbuhan PDB sisi Permintaan Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022	III.3
<b>Tabel 3.2</b>	Pertumbuhan PDB sisi Permintaan Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022	III.5
<b>Tabel 3.3</b>	Sasaran Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023	III.14
<b>Tabel 3.4</b>	Proyeksi Indikator Makro Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	III.18



<b>Tabel 3.5</b>	Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2017-2021	III.20
<b>Tabel 3.6</b>	Target Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Solok Selatan	III.22
<b>Tabel 3.7</b>	Perkembangan APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2017 – 2021	III.26
<b>Tabel 3.8</b>	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2017-2021 (Rp.000)	III.33
<b>Tabel 3.9</b>	Pertumbuhan dan Kontribusi per Komponen Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Solok Selatan 2017-2021 (Persen)	III.34
<b>Tabel 3.10</b>	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2017-2021 (Rp. 000)	III.36
<b>Tabel 3.11</b>	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2017-2021 (Rp.000)	III.40
<b>Tabel 3.12</b>	Pertumbuhan dan Komposisi Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan 2017-2021	III.41
<b>Tabel 3.13</b>	Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023	III.44
<b>Tabel 3.14</b>	Perbandingan Proyeksi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023 dengan Target RPJMD Pada Tahun 2023	III.46
<b>Tabel 4.1</b>	Target Indikator Makro Pembangunan Sumatera Barat Tahun 2023	IV.9
<b>Tabel 4.2</b>	Target Indikator Sasaran Pembangunan Sumatera Barat Tahun 2023	IV.9
<b>Tabel 4.3</b>	Tujuan dan Sasaran Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023-2024	IV.16
<b>Tabel 4.4</b>	Prioritas Dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	IV.24
<b>Tabel 4.5</b>	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Tahun 2023 Dengan RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026	IV.33
<b>Tabel 4.6</b>	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Solok Selatan dan Nasional	IV.34
<b>Tabel 4.7</b>	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Solok Selatan dan Provinsi Sumatera Barat	IV.34
<b>Tabel 4.8</b>	Sinergitas Kegiatan RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 Terhadap Prioritas Nasional	IV.35
<b>Tabel 4.9</b>	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 Dan Perkiraan Maju Tahun 2024	IV.43
<b>Tabel 4.10</b>	Sinergitas Kegiatan RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 Terhadap Prioritas Kabupaten	IV.51
<b>Tabel 4.11</b>	Sinergitas Program dan Kegiatan RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 Terhadap Pencapaian SPM	IV.59
<b>Tabel 4.12</b>	Sinergitas Taget Kinerja Makro Daerah	IV. 63
<b>Tabel 5.1</b>	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 Dan Perkiraan Maju Tahun 2024	V.2
<b>Tabel 6.1</b>	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023-2024	VI.1
<b>Tabel 6.2</b>	Indikator Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	VI.3
<b>Tabel 6.3</b>	Indikator Standar Pelayanan Minimum Pelayanan Publik	VI.12



**DAFTAR GAMBAR**

		<b>Hal</b>
<b>Gambar 1.1</b>	Hubungan dan Keterkaitan Rencana Kerja Pemerintah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I.8
<b>Gambar 2.1</b>	Peta Orientasi Perencanaan Wilayah	II.1
<b>Gambar 2.2</b>	Peta Batas Wilayah Kabupaten Solok Selatan	II.2
<b>Gambar 2.3</b>	Perbandingan PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2021	II.37
<b>Gambar 2.4</b>	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2021	II.39
<b>Gambar 2.5</b>	Perkembangan Indek Kedalaman Kemiskinan dan Indek Keparahan Kemiskinan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021	II.40
<b>Gambar 2.6</b>	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021	II.40
<b>Gambar 2.7</b>	Perbandingan Tingkat Pengangguran Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2021	II.41
<b>Gambar 2.8</b>	Perbandingan Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021	II.42
<b>Gambar 2.9</b>	Perbandingan Indek Gini Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2021	II.43
<b>Gambar 2.10</b>	Perbandingan Pengeluaran Perkapita Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2021	II.44
<b>Gambar 2.11</b>	Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Penduduk Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 (Rp.000)	II.44
<b>Gambar 2.12</b>	Komposisi Pengeluaran Per Kapita Penduduk Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021	II.45
<b>Gambar 2.13</b>	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2021	II.46
<b>Gambar 2.14</b>	Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2021	II.47
<b>Gambar 2.15</b>	Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021	II.47
<b>Gambar 2.16</b>	Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2021	II.48
<b>Gambar 2.17</b>	Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021	II.48
<b>Gambar 2.18</b>	Pembandingan Umur Harapan Hidup Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2020	II.49
<b>Gambar 2.19</b>	Perbandingan Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021	II.50
<b>Gambar 2.20</b>	Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Penduduk Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2021	II.51



<b>Gambar 2.21</b>	Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Penduduk Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021	II.51
<b>Gambar 2.22</b>	Pembandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2021	II.52
<b>Gambar 3.1</b>	Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku berdasarkan Lapangan Usaha Pada tahun 2021	III.22
<b>Gambar 3.2</b>	Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021	III.32

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan merupakan proses penetapan suatu tujuan setelah memperhatikan pembatas internal dan pengaruh eksternal, yang kemudian mengartikulasikannya dengan jelas strategi atau langkah-langkah yang seharusnya dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, dalam hal Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya guna pemanfaatan sumber daya yang ada dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan sosial dan pelayanan pemerintahan serta kualitas hidup masyarakat dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder). Perencanaan pembangunan daerah tersebut terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan / Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah 1 (satu) tahun sebelum tahun rencana. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah



(RPJMD) dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta mengikuti arah pembangunan pola ruang yang telah ditetapkan pada RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 berisikan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, sasaran dan program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, serta prakiraan pagu dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu

Berdasarkan hal tersebut, maka pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Solok Selatan melakukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. RKPD tahun 2023 Kabupaten Solok Selatan merupakan perencanaan tahun kedua yang disusun oleh periode Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan periode 2021-2024 dan merupakan tahun ke tiga dari penjabaran Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang disahkan tanggal 25 Oktober 2021.

RKPD Tahun 2023 disusun dengan mempedomani Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan serta Program yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026. Selain itu secara kontekstual dan substantif disusun dengan mengintegrasikan program-program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten maupun program-program hasil penjaringan aspirasi yang secara formal diformulasikan melalui Forum RKPD, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD dan penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang bersumber dari Reses, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 menggunakan 4 (empat) pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Teknokratis.

Pendekatan teknokratis adalah proses pendekatan yang mengedepankan penggunaan metode dan kerangka berpikir ilmiah dan sistematis dalam melakukan analisis masalah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dalam hal ini proses teknokratik digunakan pada proses penyusunan perkiraan ekonomi makro daerah dan menyusun rencana program dan kegiatan pembangunan. Pendekatan teknokratik dilakukan melalui forum diskusi dan konsultasi melalui forum SKPD yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk tenaga ahli dari

lembaga/institusi dan perguruan tinggi; serta pejabat yang menangani perencanaan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

2. Pendekatan Partisipatif.

Pendekatan partisipatif dalam hal ini adalah proses yang dilakukan dengan mengembangkan forum konsultasi publik yang melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat dalam merumuskan masalah dan prioritas pembangunan daerah tahun 2023. Hal ini dijalankan melalui Pelaksanaan Musrenbang dari Tingkat Nagari, Kecamatan, Kabupaten; Musrenbang Dunia Usaha; serta dialog interaktif dengan pemangku kepentingan melalui kunjungan kerja maupun kegiatan kemasyarakatan seperti Gowes dan Car Free Day yang dilakukan rutin setiap minggu. Pendekatan ini melibatkan semua pemangku kepentingan antara lain diikuti oleh unsur pemerintah dan masyarakat.

3. Pendekatan Politik

Pendekatan politik dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih dalam RKPD Tahun 2023 ini mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026. Pada prinsipnya pendekatan politik memandang bahwa proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah harus mengedepankan kehendak dan kepentingan rakyat pemilih yang sudah memberikan hak pilihnya kepada organisasi politik dan Kepala Daerah berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan.

4. Pendekatan Atas – Bawah dan Bawah – Atas.

Pendekatan atas bawah dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan mengacu pada prioritas pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan 2021-2026 serta agenda dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam rancangan RKP dan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan diantaranya melalui Forum Rapat Koordinasi Pembangunan serta penelaahan dokumen perencanaan Provinsi dan Nasional.



Selain hal diatas, penyusunan RKPD Kabupaten Solok juga telah mempedomani antara lain:

1. Dalam tata cara penyusunan RKPD Tahun 2023 mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017
2. Dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Kabupaten Solok Selatan sudah menggunakan aplikasi SIPD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dimana telah dimutakhirkan melalui dimutakhirkan melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
3. Dampak dari rencana perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana direncanakan penggabungan beberapa perangkat daerah atau pemindahan urusan antar perangkat daerah diantaranya Penggabungan (1).Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ke Dinas Pertanian, (2). Dinas Perhubungan ke Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkunga Hidup dan (3) Urusan Kepemudaan dan Olahraga ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Dokumen RKPD mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan pembangunan jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Secara umum, dokumen RKPD mempunyai nilai penting, antara lain

1. Merupakan instrumen pelaksanaan, keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021–2026.
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
3. Menjadi landasan pedoman penyusunan KUA dan PPAS dan penyusunan RAPBD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023.
4. Menjadi bahan evaluasi dari pencapaian kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan hal tersebut RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 merupakan acuan bagi seluruh perangkat daerah dan *stake holder* di daerah

dalam menyusun perencanaan pembangunan tahun 2023 pada instansi bersangkutan

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Solok dengan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
29. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026.

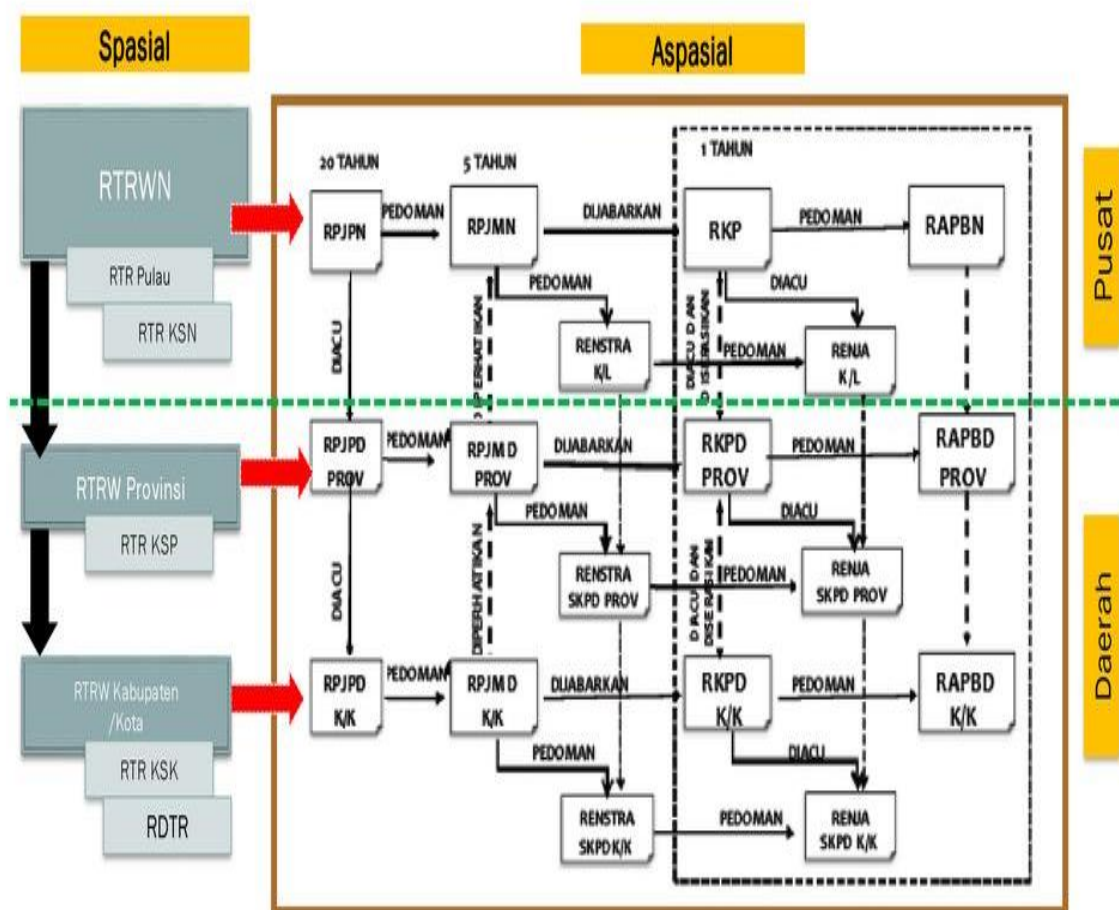
### **1.3 Hubungan Antar Dokumen**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023, selanjutnya disingkat dengan RKPD Tahun 2023, merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026. RKPD Tahun 2023 disusun berdasarkan tahap-tahap yang diamanatkan oleh Permendagri 86 Tahun 2017. Penyusunan RKPD dimulai dari penyusunan Rancangan Awal RKPD, Rancangan Renja OPD, Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan, Forum OPD/Lintas OPD, Musrenbang RKPD Kabupaten, Musrenbang RKPD Provinsi, Musrenbang RKP Nasional, Penelaahan Pokok-pokok pikiran DPRD, Evaluasi pencapaian kinerja RPJMD sampai dengan verifikasi dan asistensi Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rangkaian tahap tersebut ditujukan agar substansi RKPD Tahun 2023 dapat selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat, dokumen perencanaan tingkat provinsi dan dokumen perencanaan tingkat kabupaten serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan teknis Organisasi Perangkat Daerah, sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten. Secara diagram keterkaitan hubungan RKPD dengan



dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya dapat dilihat dari gambar dibawah ini:

**Gambar. 1.1.**  
**Hubungan dan Keterkaitan Rencana Kerja Pemerintah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**



Berdasarkan Gambar diatas dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD Tahun 2023 dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, sebagai berikut: RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011-2025, RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032 dan RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 yang yang di dalamnya memuat mengenai visi, misi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Solok Selatan serta telah mempertimbangkan perencanaan pola ruang dan wilayah dalam RTRW. Selain itu RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKP Nasional Tahun 2023 dan RKP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, dimana penyusunannya sama sama mempedomani dokumen perencanaan jangka panjang, perencanaan pengembangan wilayah dan perencanaan jangka menengah Nasional dan Provinsi.

RKPD tahun 2023 menjadi pedoman bagi penyusunan Renja OPD tahun 2023 yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD. Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat bagi OPD dalam rangka mewujudkan

keterpaduan dan mensinergikan perencanaan pembangunan dari berbagai tingkatan seperti Nasional dan Provinsi. Selanjutnya, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2023, menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Tahun 2023 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun 2023.

#### **1.4 Maksud dan Tujuan**

RKPD Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai dokumen perencanaan yang operasional untuk jangka periode 1 (satu) tahun. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, RKPD ini selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 adalah:

1. mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang tertuang dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026;
2. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
3. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
4. mewujudkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

#### **1.5 Sistematika Dokumen RKPD**

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

##### **Bab I Pendahuluan**

Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

##### **Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah**

###### **2.1. Kondisi Umum Daerah**

Menjelaskan tentang menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah



yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang dijabarkan dalam beberapa aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

## **2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Tahun 2022 dan Realisasi RPJMD**

Menjelaskan pencapaian realisasi, hasil realisasi program yang direncanakan dalam RPJMD sampai tahun 2022 terhadap capaian akhir RPJMD, Capaian Indikator Kunci Utama (IKU) Daerah tahun 2021, dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah/Indikator Kinerja Kunci (IKK) sampai 2021

## **2.3. Permasalahan Pembangunan**

Berisikan identifikasi permasalahan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

# **BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah**

## **3.1. Kerangka Ekonomi Daerah**

Mengemukakan tentang kondisi perekonomian Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Solok Selatan serta tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2023

## **3.2. Kerangka Keuangan Daerah**

Berisikan uraian mengenai arah kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah tahun 2023.

# **BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah**

## **4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah**

Menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan Nasional (RKP), Provinsi Sumatera Barat (RKPD Provinsi Sumatera Barat) dan Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2023.

## **4.2. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah**

Menjelaskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional (RKP), Provinsi Sumatera Barat (RKPD Provinsi

Sumatera Barat) dan Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2023.

**4.3. Sinergitas Kebijakan Prioritas Pembangunan Kabupaten Solok Selatan dengan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat**

Menjelaskan keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Solok Selatan dengan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat serta dukungan program Kabupaten Solok Selatan dalam mendukung prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

**4.4. Sinergitas Target Kinerja Makro Kabupaten Solok Selatan dengan Provinsi Sumatera Barat**

Menjelaskan keterkaitan target kinerja Pembangunan Kabupaten Solok Selatan dengan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023

**4.5. Inovasi Daerah**

Menjelaskan rencana inovasi yang akan tetap dilanjutkan atau rencana inovasi yang akan dilaksanakan untuk mendukung kebijakan dan prioritas daerah pada Tahun 2023.

**BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah**

Mengemukakan secara *eksplisit* rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Tahun 2023, beserta instansi pelaksana, indikator capaian masing-masing program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

**BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Mengemukakan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah direncanakan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada tahun 2023

**BAB VII Penutup**

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam mengfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

#### 2.1. Kondisi Umum Daerah

##### 2.1.1. Aspek Administrasi, Geografi Dan Demografi

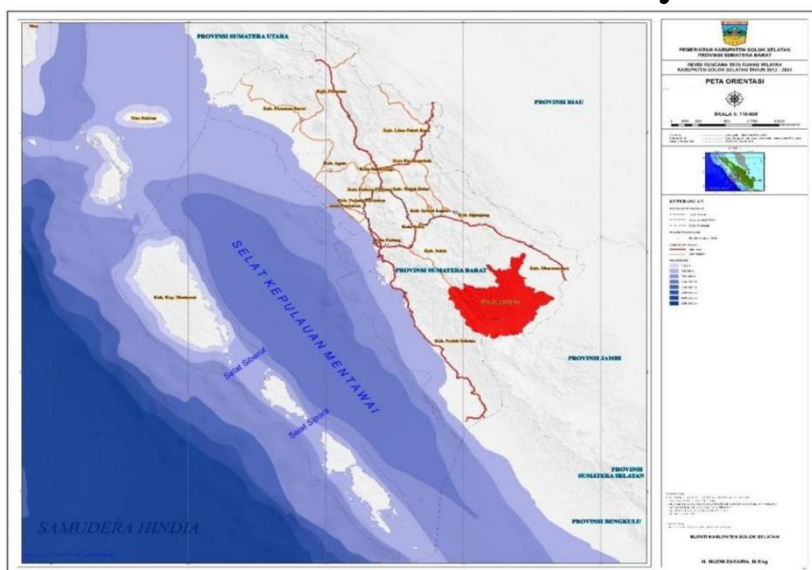
##### 2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

###### A. Administrasi Wilayah

Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. dan merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Solok. Kabupaten Solok Selatan adalah salah satu dari tiga kabupaten pemekaran yang terbentuk melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat. Secara geografis daerah ini berada pada  $01^{\circ} 17' 13''$  -  $01^{\circ} 46' 45''$  Lintang Selatan dan  $100^{\circ} 53' 24''$ -  $101^{\circ} 26' 27''$  Bujur Timur dengan luas wilayah 3.346,20 Km<sup>2</sup>. Tepatnya berada di bagian selatan Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas wilayah adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Solok.
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Kerinci (Provinsi Jambi).
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Sebelah Timur dengan wilayah Kabupaten Dharmasraya

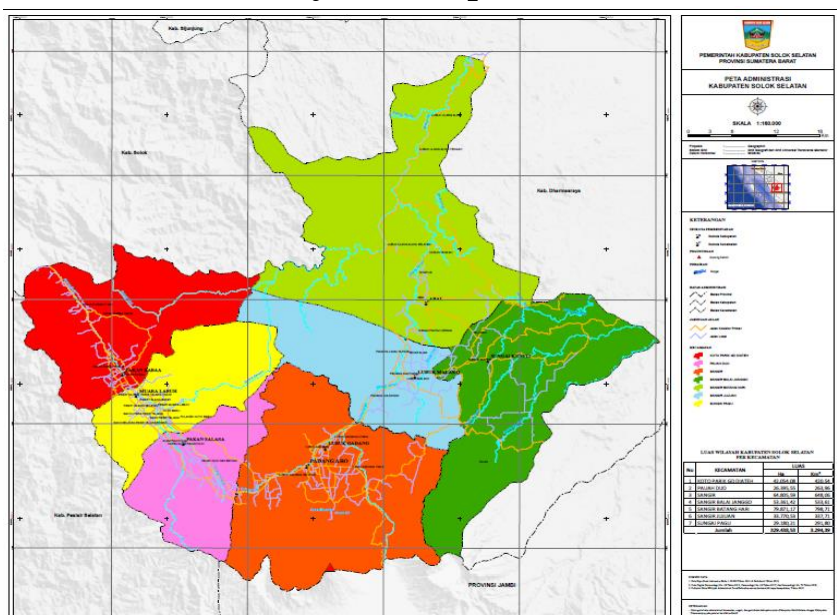
**Gambar 2.1.**  
**Peta Orientasi Perencanaan Wilayah**



Namun luas wilayah ini dikoreksi oleh beberapa peraturan perundang-undangan tentang penegasan batas wilayah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Solok dengan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, menyebabkan terjadinya penurunan luas wilayah administrasi Kabupaten Solok Selatan menjadi 3.294,39 Km<sup>2</sup>.

**Gambar 2.2.**  
**Peta Batas Wilayah Kabupaten Solok Selatan**



Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2018

Ibu Kota Kabupaten Solok Selatan berkedudukan di Padang Aro, yang berjarak 166 kilometer dari Kota Padang. Secara administratif, Kabupaten Solok Selatan terdiri dari tujuh kecamatan yaitu Sangir, Sangir Jujuan, Sangir Balai Janggo, Sangir Batang Hari, Sungai Pagu, Pauh Duo dan Koto Parik Gadang Diateh. Dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Sangir dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Pauh Duo. Saat ini Kabupaten Solok Selatan terdiri dari 39 Nagari dan 8 Nagari Persiapan yang terbagi 275 Jorong

**Tabel 2.1.**  
**Perbandingan Luas Kecamatan di Kabupaten Solok Selatan**

No	Kecamatan	Luas Daerah (Km <sup>2</sup> )
1.	Sangir	648,06
2.	Sungai Pagu	291,80
3.	Koto Parik Gadang Diateh	420,54
4.	Sangir Jujuan	337,71
5.	Sangir Batang Hari	798,71
6.	Pauh Duo	263,96
7.	Sangir Balai Janggo	533,61
<b>Jumlah</b>		<b>3.294.39</b>

Sumber: Bagian PUM Sekretariat Daerah dan Dinas PU dan TR

Tabel 2.2.

## Nama Kecamatan, Nagari Dan Jorong di Kabupaten Solok Selatan

Kecamatan	Desa / Nagari	Jorong
1 Sangir	1 Lubuk Gadang	1 Timbulun
		2 Padang Aro
		3 Durian Taruang
		4 Sungai Padi
		5 Bukik Malintang
		6 Rimbo Tengah
		7 Taratak
		8 Lubuk Gadang
		9 Sariak Taba
		10 Gunung Pasir
		11 Bukik Patanahan
		12 Bukit Malintang Barat
		13 Bukit Malintang Utara
		14 Sungai Padi Utara
		15 Sungai Padi Selatan
		16 Timbulun Atas
		17 Koto Tinggi
		18 Padang Alai
		19 Jujutan
	2 Lubuk Gadang Timur	1 Sungai Landeh
		2 Sungai Aro
		3 Maluih
		4 Gaduang
		5 Durian Tanjak
		6 Taratak Tinggi
		7 Tanjuang Harapan
		8 Kampung Tengah
	3 Lubuk Gadang Tenggara **	9 Sungai Lingkitang
1 Tandai		
2 Leter W		
3 Taluak Aia Putih		
4 Sungai Sanda		
5 Tandai Bukik Bulek		
6 Tandai Ateh		
7 Lubuak Rasak		
4 Lubuk Gadang Selatan	8 Tandai Simpang Tigo	
	1 Sungai Lambai	
	2 Pincuran Tujuh	
	3 Sungai Lambai Timur	
	4 Sungai Lambai Barat	
	5 Sungai Kapur	
	6 Pincuran Tujuh	
	7 Pincuran Tujuh Barat	
5 Lubuk Gadang Barat **	8 Pincuran Tujuh Selatan	
	1 Pasir putih	
	2 Sapan	
	3 Karang Putih	
6 Lubuk Gadang Barat Daya **	4 Aia Manyuruak	
	1 Liki	
	2 Liki Atas	
	3 Sungai Bangku	
7 Lubuk Gadang Utara	1 Bariang	
	2 Tanggo Aka	
	3 Sampu	
	4 Bariang Kampuang Dalam	
	5 Manggis	
	6 Koto Ramba	
	7 Bariang Palabihan	
2 Sungai Pagu	8 Koto Baru	1 Kampung Nan Limo
		2 Bariang Rao-Rao
		3 Lubuk Jaya
		4 Muaro Palak Gadang
		5 Kiambang Jaya
		6 Kiambang Sungai Aur



Kecamatan	Desa / Nagari	Jorong
	9 Pasar Muara Labuh	7 Bariang Kapalo Koto 1 Pasar Muara Labuh Timur 2 Pasar Muara Labuh Barat 3 Pasar Muara Labuh Selatan 4 Pasar Muara Labuh Utara
	10 Pulakek Koto Baru	1 Kapalo Bukit 2 Pulakek Tengah 3 Koto Birah 4 Air Batu 5 Mantirai Indah 6 Jolok Sungai Siriah 7 Kapalo Koto 8 Macang Masam 9 Ujuang Tanjung 10 Ipuah Pasir Jambu
	11 Sako Pasia Talang	1 Mudiak Lolo Barat 2 Mudiak Lolo Timur 3 Mudiak Lolo Selatan 4 Mudiak Lolo Utara
	12 Pasia Talang	1 Pasia Talang 2 Tigo Lareh Bakapanjangan 3 Melayu Palak Laweh 4 Batang Pagu 5 Panai 6 TLB Selatan 7 MPL Timur
	13 Bomas	1 Bangko 2 Mato Aia 3 Sungai Durian 4 Bolai Sungai Durian 5 Tanah Sirah Sei Durian 6 Simpang Tigo Sei Durian 7 Bangko Tengah 8 Bangko Ulu 9 Bangko Ampera
	14 Sako Selatan Pasia Talang	1 Sungai Talu 2 Sawah Siluak 3 Alai Sako 4 Lolo Kaciak
	15 Sako Utara Pasia Talang	1 Sipotu 2 Banda Gadang 3 Mudiak Lawe Barat 4 Mudiak Lawe Timur
	16 Pasia Talang Selatan	1 IV Jorong 2 Kampung Palak 3 Kalampaian 4 Rawang 5 IV Jorong Selatan
	17 Pasia Talang Barat	1 Lundang 2 Sungai Cangkar 3 Batang Lawe Barat 4 Batang Lawe Timur
	18 Pasia Talang Timur	1 Koto Kaciak 2 Sigintir 3 Banda Dalam 4 Pampangan
3 Koto Parik Gadang Diateh	19 Pakan Rabaa	1 Pakan Rabaa 2 Sungai Kapur 3 Sungai Pangkua 4 Sungai Bong Bandar Jelatang
	20 Pakan Rabaa Selatan **	1 Sungai Aro 2 Sungai Aro Aia Angek 3 Sungai Aro Sawa Lawe 4 Sungai Aro Aia Tajun
	21 Pakan Rabaa Timur	1 Pinti Kayu Gadang 2 Pinti Kayu Ketek

Kecamatan	Desa / Nagari	Jorong
		3 Sapan Salak 4 Tanjung Nan IV 5 Sapan Sungai Nan II 6 Pasia Putih 7 Ladang Konsi 8 Pinti Kayu Tengah 9 Manggih 10 Pasir Panjang
	22 Pakan Rabaa Utara	1 Sungai Kalu I 2 Sungai Kalu II 3 Batang Pasampan 4 Koto Baru Sungai Kalu 5 Pulai Bungkuak 6 Batuang Bajawek
	23 Pakan Rabaa Utara Duo **	1 Ulu Suliti I 2 Ulu Suliti II 3 Ulu Suliti III 4 Ulu Suliti IV 5 Tanjung Limau Kapeh 6 Pasampan Timur
	24 Pakan Rabaa Tengah	1 Batang Limpauang 2 Banchah 3 Banchah Anak Lolo 4 Bt Limpauang Tratak Panas 5 Bt Limpauang Kandang Bniah
	25 Balun Pakan Rabaa Tengah **	1 Balun 2 Balun Sungai Ipuh 3 Balun Sawahtau 4 Balun Balai Akad
	26 Batang Lolo **	1 Batang Lolo Sungai Rambutan 2 Batang Lolo Atas 3 Batang Lolo Panduang 4 Batang Lolo Batu Kulambai 5 Batang Lolo
4 Sangir Jujuan	27 Lubuk Malako	1 Koto Gadang 2 Koto Tuo 3 Padang Darek 4 Banchah Kapeh 5 Lubuk Batuang 6 Taratak Baru 7 Pangian Indah 8 Koto Tuo Mata Air
	28 Padang Air Dingin	1 Buluh Kasok 2 Sikayan Talang
	29 Bidar Alam	3 Padang Air Dingin 4 Koto Jepang 1 Pasar Bidar Alam 2 Batikan 3 Kapalo Koto 4 Simpang Tigo 5 Harapan Baru 6 Sungai Galugu Kapalo Koto 7 Bulian
	30 Padang Limau Sundai	1 Sibalabeh Ateh 2 Koto Ranah 3 Tanjung Durian 4 Ranah Sungai Bamban
	31 Padang Gantiang	1 Sirumbuk 2 Pidang 3 Padang Batu Bala 4 Sungai Barameh
5 Sangir Batang Hari	32 Abai	1 Kapalo Koto 2 Aur Duri 3 Pasar 4 Batu Nago 5 Batu Kadunduang

Kecamatan	Desa / Nagari	Jorong
	33 Ranah Pantai Cermin	6 Limo Suku 7 Simpang Ampek 8 Pasar Baru 1 Koto Tuo 2 Sungai Mintan 3 Talakiak 4 Simpang Tigo 5 Rawan
	34 Dusun Tengah	1 Sinuek 2 Koto Tengah 3 Sungai Cupak 4 Sungai Gadang 5 Bukik Indah 6 Koto Lingkek
	35 Sitapus	1 Bangkar Dalam 2 Padang Koto Tuo 3 Padang Beringin 4 Padang Osoli
	36 Lubuk Ulang Aling	1 Pulau Panjang 2 Koto Ranah 3 Kampung Baru 4 Batu Gajah
	37 Lubuk Ulang Aling Selatan	1 Limau Sundai 2 Muaro Sangir 3 Batu Lauang 4 Sungai Penuh 5 Gasiang 6 Ombak Kubu 7 Talantam
	38 Lubuk Ulang Aling Tengah	1 Tanah Galo 2 Pulau Karam 3 Rantau Limau Kapeh
6 Pauh Duo	39 Alam Pauh Duo	1 Pk Salasa 2 Ampalu 3 Simancung 4 Durian 3 Capang 5 Karang Hitam Simancuang
	40 Pekonina Alam Pauh Duo **	1 Pekonina 2 Taratak Tinggi Pekonina 3 Sapan Sari Pekonina 4 Kampuang Baru Pekonina 5 Lubuak Paraku
	41 Kapau Alam Pauh Duo	1 Lasuang Batu 2 Bulantik 3 Taratak Baru 4 Koto Kapau 5 Kampuang Nan Baru 6 Banuaran
	42 Luak Kapau Alam Pauh Duo	1 Pinang Sinawa 2 Ujung Jalan 3 Janjang Kambiang 4 Batu Jarang 5 Sungai Duo 6 Tubo Taratak Tinggi
	43 Pauh Duo Nan Batigo	1 Taratak Bukareh 2 Paninjauan 3 Jorong Pinang Awan 4 Bukik Sikumpa
7 Sangir Balai Janggo	44 Sungai Kunyit	1 Koto Sungai Kunyit 2 Taratak Sungai Sungkai 3 Sungai takuak 4 Mercu 5 Mukti Tama 6 Psr Sungai Sungai Sungkai 7 Sungai Tengah 8 Log Batu Sandi



Kecamatan	Desa / Nagari	Jorong
	45 Talunan Maju	1 Kurnia Maju
		2 Talunan Indah Sepakat
		3 Talunan I
		4 Talunan II
	46 Talao Sungai Kunyit	1 Talao
		2 Sungai Keruh
		3 Sungai Jerinjing
		4 Sungai Talang
	47 Sungai Kunyit Barat	1 Sungai Gadiang
		2 Ngalau Indah
		3 Sungai Lasuang
		4 Sinar Paninjauan
5 Ngalau Indah II		

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat da Desa  
Keterangan \*\* Nagari/ Desa Persiapan

## B. Topografi

Kabupaten Solok Selatan yang terletak di sepanjang jajaran Bukit Barisan memiliki bentang alam yang sebagian besar berbukit-bukit. Rata-rata pemukiman penduduk berada pada ketinggian 300-950 meter di atas permukaan laut, dengan topografi (bentang alam) bervariasi antara dataran lembah bergelombang, berbukit dan gunung yang merupakan rangkaian dari Bukit Barisan yang membujur dari Utara ke Selatan di sepanjang Pantai Barat Sumatera. Klasifikasi lerengnya, sebagian besar lerengnya curam (886,00 Km<sup>2</sup>) dan yang sangat curam (482,11 Km<sup>2</sup>) Keadaan ini memberi implikasi bahwa sebagian besar wilayah rawan terhadap bahaya longsor.

**Tabel 2.3.**  
**Klasifikasi lereng wilayah Kabupaten Solok Selatan**

No	Klasifikasi Lereng	Lereng (%)	Luas (Km <sup>2</sup> )
1	Datar, Agak Landai	0 – 8	792,12
2	Landai	8 – 15	530,68
3	Agak Curam	15 – 25	608,32
4	Curam	25 – 40	885,17
5	Sangat Curam	> 40	480,11
<b>Total</b>			<b>3.294,39</b>

Sumber : Hasil Olahan Peta Kontur RBI 1:50.000 Tahun 2017

Secara topografis wilayah Kabupaten Solok Selatan dapat diklasifikasikan menjadi tiga (3) kategori wilayah topografis:

1. Kawasan dataran tinggi bergelombang yang menempati bagian Timur daerah dan sedikit memanjang disekitar Muara Labuh. Wilayah ini menempati sekitar 25 % dari luas Kabupaten Solok Selatan, elevasi 50 m-100 m (dpl) dengan lereng berkisar antara 5%-15%. Litologi yang menempati satuan ini berupa Tos, Pbl, Pp, Qal. Aliran air melimpah dengan dilaluinya beberapa sungai besar, banyak cabang sungai sehingga mudah meresapkan air dan mudah digali. Pada dataran ini juga banyak dijumpai mata air terutama di Padang Aro dan sekitarnya. Kelemahan di

- daerah ini adalah dilaluinya zona patahan besar Sumatera dan beberapa patahan kecil akibat pergerakan patahan Sumatera (patahan Semangko);
2. Kawasan perbukitan, lebih mendominasi daerah dengan sebaran sekitar 60% dari luas Kabupaten Solok Selatan. Satuan ini menempati bagian tengah dan utara dengan elevasi antara 100 m–500 m (dpl) kelerengan berkisar 15 % -30 %. Litologi penyusun satuan ini pada umumnya berupa batuan dari Formasi Barisan (Pb. Pbl) serta batuan vulkanik terobosan maupun batuan gunung api tua, yang mempunyai sifat keras, (Kgr, Jgr) . Potensi di daerah ini adalah aliran air sangat baik, banyak cabang sungai. Kelemahannya mudah erosi, dengan kelerengan tinggi berpotensi terjadi gerakan tanah (longsor).;
  3. Kawasan lembah kaki pegunungan yang menempati bentang alam kaki pegunungan menempati tepi bagian Barat dan Selatan dari wilayah perencanaan dengan sebaran sekitar 15 % dari luas keseluruhan. Bentang alam ini mempunyai elevasi antara 500 m–3500 m (dpl) dengan kelerengan berkisar 30 % sampai lebih dari 40%. Litologi penyusun satuan ini pada umumnya berupa batuan vulkanik terobosan maupun batuan gunung api tua, yang mempunyai sifat keras, (Tomp, Qou, Qol dan Qyu). Potensi daerah ini berupa aliran air yang sangat baik dengan banyak cabang sungai.

### **C. Geologi**

Penamaan dan pengelompokan satuan batuan di Kabupaten Solok Selatan didasarkan pada peta geologi lembar Painan skala 1 : 250.000 yang disusun oleh *HMD Rosidi, S Tjokrosapoetro, B Pendowo, S Gafoer dan Suharsono, 1996*, dan berdasarkan Peta Geologi Lembar Painan Timur Laut, Sumatra, skala 1 : 250.000, oleh *Kastowo dan Gerhard, W.Leo, 1973* terbitan Direktorat Geologi Bandung, dimana satuan batuan di Kabupaten Solok Selatan dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) satuan yang urutan stratigrafi dari muda ke tua, sebagai berikut:

#### **a. Endapan Permukaan**

***Aluvium Sungai (Qal)***; berupa pasir kerikil dan bongkah batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf yang diendapkan sepanjang dataran banjir. Umumnya endapan ini tersebar di sekitar sungai-sungai besar dan daerah limbah banjir, misalnya Batang Hari, Batang Suliti, Batang Sangir dan lain-lain.

## b. Batuan Sedimen

**Formasi Sinamar (Tos);** Konglomerat, batu pasir kuarsa berbutir kasar berwarna abu-abu kekuning-kuningan, batu pasir kuarsa mengandung mika berwarna coklat sampai abu-abu kekuning-kuningan, batu pasir arkosan, batu lempung abu-abu, napal dan batu lempung pasiran. Di dalamnya termasuk juga lapisan-lapisan batubara dan batu gamping koral. Komponen konglomerat adalah kuarsit, kuarsa susu, dan pecahan-pecahan granit. Di dekat batuan granitan *Pratiesier*, batu pasir kuarsa condong membentuk susunan arkosa. Isi perbandingan batu lempung, serpih dan napal dalam formasi itu makin bertambah kearah atas. Formasi ini terletak tidak selaras di atas batuan pra tersier. Umumnya diperkirakan Oligosen dan dapat dikolerasikan dengan Formasi batu pasir kuarsa dari *Musper* (1994). Tebalnya mencapai  $\pm$  750 meter.

**Formasi Barisan(Pb) ;** Terdiri dari filit, batu sabak, batu gamping, *batu tanduk* dan greywacke meta. Rijang banyak sekali terdapat, juga urat kuarsa sulfida magmatik mengandung emas.

**Anggota Batu Gamping Formasi Barisan(Pbl);** Terpualamkan, berhablur, pejal berwarna abu-abu muda sampai tua. Urat-urat kalsit biasa terdapat dan batugamping ini sangat terpecah-pecah dalam jalur-jalur sesar seperti Sesar Besar Sumatera. Batugamping di deretan sebelah timur, yang mengandung *Schwagerina sp.* menunjukkan umur Perm-Awal. Di dalam batu gamping sepanjang Sesar Besar Sumtera tidak ditemukan fosil. Diabas dan serpentinit yang tergabung dengan batu gamping ini di lembar Solok, di anggap berumur Perm (Volz, 1904).

## c. Batuan Vulkanik

**Batuan Gunung Api yang Tak Dipisah-Pisahkan (Qyu);** berupa Breksi, endapan lahar, aliran lava, lapili dan tufa, semuanya bersusunan basal sampai andesit dengan plagioklas menengah sampai basa (oligoklas, andesin, labradorit), amfibol, biotit, dan piroksin; di dalam batuan basalt terdapat sedikit olivin. Batuan ini berasal dari Gunung Kerinci dan Gunung Tujuh. Tanah pelapukan berupa lempung lanauan hingga lempung pasiran, berwarna coklat kemerahan, plastisitas sedang-tinggi, konsistensi teguh-kaku, dengan ketebalan 0,5–2 meter

**Lava(Qyl) ;** Susunan dan asalnya sama dengan batuan gunung api yang tak terpisahkan. Alirannya terdapat disekitar Gunung Kerinci dan Gunung Tujuh.

**Breksi Vulkanik yang Tak Dipisah-Pisah (Qou) ;** Breksi tufa, lahar dan aliran lava: kebanyakan bersusunan andesitan. Batuan basalan



merupakan sebagian kecil dari satuan ini. Secara setempat batuan ini diterobos oleh retas dasitan dan terpropilitasikan. Pusat-pusat letusan batuan ini tidak dapat ditemukan, tetapi mungkin berasal dari gunung Kerinci yang tua, Gunung Tujuh, Gunung Runcing dan Gunung Api Panjang. Mereka dinyatakan berumur Kwartar Awal. Di sekitar Gunung Kerinci dan Gunung Tujuh tertutup oleh batuan gunung api menerobos Formasi Painan (Tmop) yang berumur Tersier-bawah, dan tertutup oleh batuan volkanik Kwartar, tersingkap di barat daya daerah ini.

**Lava (Qol)** ; Susunan dan asalnya sama dengan batuan gunung api yang tak terpisahkan. Alirannya terdapat disekitar lereng Gunung Runcing, Gunung Lumut dan Gunung Panenjolan.

#### **d. Batuan Terobosan (Batuan Intrusi)**

**Granodiorit (Tgdr)** ; Komposisi granit hornblenda sampai granodiorit, berumur Miosen Tengah karena menerobos Formasi Painan yang berumur Tersier Bawah.

**Batuan Granitan (Kgr)** ; Susunannya berkisar antara granodiorit sampai granit, berwarna biru muda dengan bintik-bintik mineral-mineral mafik abu-abu semu hijau. Terdapat sebagai *stok*. Secara setempat mineral-mineral mafik. Mineral-mineral mafik telah berubah secara setempat. Di jalur Sesar Sumatera batuan ini telah terkoyakkan kuat sekali dan bertekstur genes. Batuan ini menerobos baik batuan Mesozoikum maupun Paleozoikum dan karena itu dinyatakan berumur Mesozoikum-Akhir (Kapur) dan dapat dikorelasikan dengan Granit Lassi yang berumur Kapur Akhir ( $112 \pm 240$  juta tahun) di dataran tinggi padang (Katili, 1962, 1973).

**Granit (Jgr)** ; Berwarna biru muda sampai semu merah muda dengan bintik-bintik mineral mafik kehijau-hijauan. Terdapat sebagai *stok*. Susunannya berkisar antara granit biotit harnblenda sampai granodiorit; plagioklas dari jenis oligoklas, hornblenda telah mengalami kloritisasi dan secara setempat terdapat apatit.

Kabupaten Solok Selatan berada pada Sistem Patahan Besar Sumatera yang dikenal dengan Patahan Semangko serta sesar-sesar ikutannya, lipatan dan kelurusan. Sesar berarah utara-selatan, timur laut-barat daya dan barat laut-tenggara. Di bagian barat laut dan tenggara sumbu lipatan berarah utara-selatan. Kelurusan umumnya searah dengan sesar Semangko yaitu berarah barat laut-tenggara. Zona tumbukan lempeng Samudera Hindia dan Lempeng Benua Eurasia ini masih aktif, dengan laju pergerakan tanah 7 cm/tahun. Jika terjadi pergerakan yang cukup besar akan berpotensi menimbulkan gempa bumi.

Secara umum total luasan area geologi di Kabupaten Solok Selatan didominasi oleh batu sabak campur kuarsa (PCks) seluas 996,67 Km<sup>2</sup>, dan yang paling sedikit adalah batu andesit campur tufa (QTta) seluas 37,36 Km<sup>2</sup>. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.4.**  
**Kondisi Geologi Kabupaten Solok Selatan**

No	Jenis Batuan	Kode Geologi	Luas Area (Km <sup>2</sup> )
1	Batu granit	MPip	499,20
2	Batu sabak campur batu gamping	Pckl	120,71
3	Batu sabak campur kuarsa	PCks	996,67
4	Alluvium	Qh	228,44
5	Batu apung tufa	QPt	41,64
6	Batu andesit campur tufa	QTta	37,36
7	Batu lava/lahar	Qvte	224,22
8	Batu granodiorit	TMiab	517,10
9	Batu volcanic	Tmv	123,66
10	Batu napal campur andesit	Tos	505,39
<b>Jumlah</b>			<b>3.294,39</b>

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2018

#### D. Jenis dan Struktur Tanah

Komposisi jenis tanah di Kabupaten Solok Selatan terdiri atas 4 (empat) jenis tanah, yaitu tanah Aluvial, Gleis Humus, Latosol, dan Podsolik. Jenis tanah yang paling luas adalah tanah gleis humus dengan luasan seluas 2.659,78 Km<sup>2</sup>, dan yang paling sedikit adalah tanah aluvial dengan luasan seluas 0,25 Km<sup>2</sup>.

Jenis tanah seperti ini memiliki tingkat hara yang tinggi dan sangat subur, sehingga sangat cocok untuk pengembangan kegiatan pertanian, terutama tanaman hortikultura dan perkebunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.5.**  
**Jenis Tanah Kabupaten Solok Selatan**

No	Jenis Tanah	Luas (Km <sup>2</sup> )
1	Aluvial	0,25
2	Gleis Humus	2.659,78
3	Latosol	360,95
4	Podsolik	273,41
<b>Jumlah</b>		<b>3.294,39</b>

Sumber: RTRW Kabupaten Solok Selatan 2012-2032

#### E. Geomorfologi

Morfologi Kabupaten Solok Selatan cukup beragam, mulai dari dataran hingga gunung/pegunungan, adapun morfologi di Kabupaten Solok Selatan didominasi oleh tipikal bukit/perbukitan terjal dengan luasan seluas 885,17 Km<sup>2</sup>, dan yang paling sedikit adalah tipikal morfologi gunung/pegunungan dengan luasan seluas 480,11 Km<sup>2</sup>. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.6.**  
**Jenis Morfologi Solok Selatan**

No	Jenis Morfologi	Luas Area (Km <sup>2</sup> )
1	Bergelombang/ Perbukitan Sedang	608,32
2	Bukit/ Perbukitan Terjal	885,17
3	Datar	790,12
4	Gunung/ Pegunungan	480,11
5	Landai	530,68
<b>Jumlah</b>		<b>3.294,39</b>

Sumber : RTRW Kabupaten Solok Selatan 2012-2032

Sedangkan Geomorfologi Kabupaten Solok Selatan dapat dibagi atas beberapa bentuk lahan. Untuk tipe satuan bentuk lahan yang paling besar yaitu berupa igir pegunungan metamorf terkikis hujan (Denudasional) sebesar 888,30 Km<sup>2</sup>, dan tipe satuan bentuk lahan yang paling kecil yaitu dataran tufa gunung api dengan lahan bergelombang hingga berbukit (Denudasional) 1,34 Km<sup>2</sup>. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.7.**  
**Satuan Bentuk Lahan Kabupaten Solok Selatan**

No	Bentuk Lahan	Luas Area (Km <sup>2</sup> )
1	Bukit-bukit kapur pada batuan marmer dan batu gamping (karst)	11,70
2	Bukit-bukit terjal pada batuan beku masam (denudasional)	139,40
3	Dataran bertufa dengan lahan bergelombang (denudasional)	53,37
4	Dataran hingga perbukitan berbatuan beku masam (denudasional)	132,88
5	Dataran hingga perbukitan bersedimen tufa gunung api (denudasional, struktural)	50,27
6	Dataran hingga perbukitan diatas batuan metamorf campuran (denudasional)	42,55
7	Dataran hingga perbukitan lava basic (denudasional, volkanik)	88,35
8	Dataran hingga perbukitan berbatuan tufa masam gunung api (denudasional)	252,81
9	Dataran metamorf berlahan agak datar (denudasional)	2,45
10	Dataran tufa gunung api dengan lahan bergelombang hingga berbukit (denudasional)	1,34
11	Dataran tufa gunung api masam dengan lahan berbukit (denudasional)	269,16
12	Gunung api strato muda dengan batuan gunungapi basalt (volkanik)	229,22
13	Igir gunungapi pada batuan gunung api basalt (denudasional, volkanik)	222,81
14	Igir pegunungan granit terkikis hujan (denudasional)	232,53
15	Igir pegunungan metamorf terkikis hujan (denudasional)	888,30
16	Igir sangat panjang dari pegunungan kapur (karst)	137,13
17	Igir-igir dengan pola aliran paralel pada batuan tufa gunung (denudasional)	47,48
18	Igir-igir pegunungan terjal pada batuan beku sedang/basic (denudasional)	27,38
19	Igir-igir terjal pada satu sisinya pada batuan sedimen tufa (denudasional)	26,12
20	Igir-igir terjal pegunungan diatas batu metamorf (denudasional)	69,54
21	Kipas aluvial gunung api berlereng datar (fluvial)	129,53
22	Kipas aluvial gunung api berlereng sedang (fluvial)	106,50
23	Lereng lahar gunung api dengan kemiringan agak terjal (fluvial, volkanik)	73,48



No	Bentuk Lahan	Luas Area (Km <sup>2</sup> )
24	Pegunungan terkikis pada batuan tufa masam gunung api (denudasional)	60,08
<b>Jumlah</b>		<b>3.294,39</b>

Sumber : RTRW Kabupaten Solok Selatan 2012-2032

#### F. Kondisi Iklim

Secara umum Kabupaten Solok Selatan beriklim tropis dengan temperatur bervariasi antara 20°C hingga 33°C dengan curah hujan 1.600–4.000 mm/tahun. Curah hujan paling banyak terdapat pada Kecamatan Sangir terutama pada bulan April dan bulan September–Desember, sedangkan Kecamatan Sungai Pagu mempunyai curah hujan yang relatif paling sedikit.

#### G. Hidrologi

Posisi Kabupaten Solok Selatan pada dataran tinggi menyebabkan terdapatnya berbagai aliran air permukaan berupa sungai dan anak sungai, aliran sungai beserta anak sungai yang membentang dari arah selatan dan dari arah barat Kabupaten Solok Selatan menuju ke arah utara dan ke arah timur Kabupaten Solok Selatan yang akhirnya bermuara di Provinsi Jambi.

Secara keseluruhan Kabupaten Solok Selatan berada pada posisi bagian hulu sungai dari Sungai Batang Hari yang merupakan sungai lintas provinsi, dan bergabung ke Daerah Aliran Sungai Batang Hari, yang merupakan Wilayah Sungai Strategis Nasional.

Adapun sungai-sungai yang mengalir di Kabupaten Solok Selatan yang bergabung ke dalam Wilayah / Daerah Aliran Sungai Batang Hari tersebut pada umumnya mempunyai kedalaman yang cukup, dan bersifat permanen / berair disepanjang musim. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.8.**  
**Sungai–Sungai dan Lokasinya**

No.	Nama Sungai	Lokasi	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Ke dalam (m)	Debit Maks (m <sup>3</sup> /dtk)	Debit Mins (m <sup>3</sup> /dtk)
1	Bt. Timbulun	Kec. KPGD	7,50	8,00	2,00	2,30	0,80
2	Bt. Simancung	Kec. KPGD	3,50	2,00	1,00	1,25	0,30
3	Bt. Tanjung	Kec. KPGD	6,75	3,75	1,50	2,10	0,50
4	Bt. Air busuk	Kec. KPGD	5,25	3,10	1,00	2,10	0,30
5	Bt. Pasampan	Kec. KPGD	3,50	6,00	2,00	2,50	1,50
6	Bt. Sei. Kalu	Kec. KPGD	3,00	5,00	1,00	2,00	1,20
7	Bt. Sei. Manau	Kec. KPGD	3,00	6,00	2,50	3,60	2,50
8	Bt. Sei. Ipuh	Kec. KPGD	6,75	3,75	2,00	3,20	1,50
9	Bt. Limpauang	Kec. KPGD	5,25	2,10	1,50	2,00	0,75
10	Bt. Bancah	Kec. KPGD	2,00	3,50	1,50	2,50	1,25
11	Bt. Sei. Rambutan	Kec. KPGD	2,50	2,30	1,50	1,50	0,80
12	Bt. Sei. Rambun	Kec. KPGD	2,50	2,00	1,00	1,50	0,70
13	Bt. Sei. Kapur	Kec. KPGD	8,75	4,50	1,50	2,00	0,80
14	Bt. Sei. Bong	Kec. KPGD	2,00	2,00	1,50	1,30	0,20
15	Bt. Sei. Aro	Kec. KPGD	2,50	5,00	2,00	2,80	1,50
16	Bt. Sapan	Kec. KPGD	3,50	6,00	1,50	0,80	0,25
17	Bt. Bt. Pagu	Kec. KPGD	8,00	7,00	2,00	1,75	0,85
18	Bt. Sei Ratak	Kec. KPGD	2,75	1,60	1,00	0,45	0,10

No.	Nama Sungai	Lokasi	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Ke dalam (m)	Debit Maks (m <sup>3</sup> /dtk)	Debit Mins (m <sup>3</sup> /dtk)
19	Bt. Sei. Pangkua	Kec. KPGD	4,00	2,50	1,10	1,50	0,35
20	Bt. Sei. Binuang	Kec. KPGD	3,00	3,00	1,50	1,70	0,68
21	Bt. Sei. Jilatang	Kec. KPGD	3,00	3,00	1,00	1,60	0,65
22	Bt. Suliti	Kec. Sungai Pagu	37,50	25,00	2,50	10,50	2,75
23	Bt. Kula	Kec. Sungai Pagu	2,50	2,00	1,50	1,20	0,20
24	Bt. Sei. Cangkar	Kec. Sungai Pagu	8,00	14,50	2,00	2,90	0,50
25	Bt. Lawe	Kec. Sungai Pagu	6,00	4,50	2,00	2,38	1,45
26	Bt. Tembong	Kec. Sungai Pagu	12,00	2,50	1,20	1,20	0,80
27	Bt. Sipotu	Kec. Sungai Pagu	4,00	3,00	1,50	2,60	0,80
28	Bt. Lolo	Kec. Sungai Pagu	6,00	5,00	2,50	2,85	2,15
29	Bt. Bangko	Kec. Sungai Pagu	46,00	28,00	2,50	10,50	3,00
30	Bt. Sei. Languang	Kec. Sungai Pagu	3,00	3,00	1,00	1,25	0,25
31	Bt. Siluak	Kec. Sungai Pagu	6,00	3,00	2,25	1,50	0,35
32	Bt. Sei. Talu	Kec. Sungai Pagu	2,50	2,00	1,80	1,20	0,30
33	Bt. Bt. Bolai	Kec. Sungai Pagu	3,00	4,00	0,80	1,00	0,40
34	Bt. Sei. Durian	Kec. Sungai Pagu	3,00	2,50	2,00	0,85	0,35
35	Bt. Sei. Asahan	Kec. Sungai Pagu	3,50	2,50	1,50	0,75	0,25
36	Bt. Sei. Lundang	Kec. Pauh Duo	3,50	3,00	2,00	1,50	0,50
37	Bt. Bulantiak	Kec. Pauh Duo	2,50	4,75	2,50	1,25	0,60
38	Bt. Sei. Dareh	Kec. Pauh Duo	2,50	3,00	6,80	1,50	0,45
39	Bt. Bangko Ketek	Kec. Pauh Duo	9,00	11,00	2,00	15,50	2,50
40	Bt. Malinteh	Kec. Pauh Duo	7,00	6,00	1,00	1,20	0,45
41	Bt. Kumingking	Kec. Pauh Duo	12,00	3,00	1,50	1,50	0,77
42	Bt. Pulakek	Kec. Pauh Duo	17,00	8,00	2,00	2,75	1,50
43	Bt. Bangko Gadang	Kec. Pauh Duo	15,00	35,00	2,50	4,00	3,00
44	Bt. Liki	Kec. Sangir	28,00	40,00	2,50	3,25	1,50
45	Bt. Sei. Bangku	Kec. Sangir	8,00	13,00	2,50	2,25	1,20
46	Bt. Sei. Kapur	Kec. Sangir	9,00	20,00	2,00	3,00	1,50
47	Bt. Barame	Kec. Sangir	13,00	12,00	2,50	2,85	1,75
48	Bt. Sei. Lambai	Kec. Sangir	13,00	13,00	1,00	1,20	0,55
49	Bt. Sei. Rambutan	Kec. Sangir	7,00	6,00	2,50	2,25	0,98
50	Bt. Belangir	Kec. Sangir	15,00	10,00	9,00	3,00	1,25
51	Bt. Sei. Napa	Kec. Sangir	13,00	11,00	10,00	1,00	0,25
52	Bt. Timbulun	Kec. Sangir	13,00	20,00	4,50	15,00	0,85
53	Bt. Lompatan	Kec. Sangir	5,00	12,50	1,50	1,00	0,20
54	Bt. Lipek Patah	Kec. Sangir	6,00	12,50	1,00	1,20	0,25
55	Bt. Limau Puruik	Kec. Sangir	3,00	6,00	1,00	0,85	0,20
56	Bt. Sei. Aro	Kec. Sangir	11,00	15,00	1,50	2,25	1,20
57	Bt. Pasimpai	Kec. Sangir	12,00	12,00	1,50	1,50	0,50
58	Bt. Sei. Landeh	Kec. Sangir	3,00	3,00	1,50	3,00	1,20
59	Bt. Malus	Kec. Sangir	12,00	15,00	2,50	2,25	1,20
60	Bt. Palabian	Kec. Sangir	6,00	10,00	1,50	1,00	0,50
61	Bt. Sangir	Kec. Sangir	78,00	64,00	2,50	75,00	3,50
62	Bt. Uwau	Kec. SJJ	4,50	18,00	1,50	0,75	0,20
63	Bt. Alau	Kec. SJJ	5,00	18,00	2,00	1,20	0,50
64	Bt. Ekor	Kec. SJJ	5,00	18,00	4,00	2,50	1,35
65	Bt. Kinang	Kec. SJJ	3,00	7,00	0,50	1,00	0,50
66	Bt. Sei. Dahan	Kec. SJJ	14,00	20,00	1,50	2,25	1,20
67	Bt. Jujuan	Kec. SBJ	12,50	30,00	2,50	3,65	1,55
68	Bt. Sei. Gading	Kec. SBJ	13,00	25,00	2,00	2,00	1,10
69	Bt. Pangian	Kec. SBJ	18,50	20,00	2,50	3,50	1,75
70	Bt. Kulai	Kec. SBJ	29,50	20,00	2,50	2,50	1,50
71	Bt. Ganah	Kec. SBJ	10,00	6,00	2,50	1,50	0,50
72	Bt. Talantam	Kec. SBH	23,00	8,00	2,00	1,20	0,25
73	Bt. Hari	Kec. SBH	88,00	80,00	6,00	230,40	96,00
74	Bt. Talunan	Kec. SBH	18,00	12,00	1,50	1,20	0,80
75	Bt. Kapiu	Kec. SBH	1,50	8,00	1,50	1,00	0,60
76	Bt. Tiak	Kec. SBH	7,50	10,00	2,50	1,40	0,80
77	Bt. Pamong	Kec. SBH	12,00	15,00	2,00	3,00	1,50
78	Bt. Hari	Kec. SBH	120,00	50,00	3,00	200,00	5,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan

Disamping aliran air permukaan berupa sungai, di Kabupaten Solok Selatan juga memiliki potensi air tanah yang sangat baik. Gambaran potensi air di Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Akuifer Endapan Aluvium dan Danau, dijumpai di daerah dataran bergelombang terutama di daerah Muara Labuh serta daerah Lubuk Malako dan sekitarnya. Akuifer ini mempunyai permukaan air tanah dekat dengan permukaan tanah, beberapa muncul mata air debit mencapai lebih dari 500 l/dt dengan debit sumur diperkirakan lebih dari 10 l/dt.
- b. Akuifer Endapan Gunung Api tua; dijumpai di daerah Padang Aro-Lubuk Gadang dan sekitarnya. Debit sumur diperkirakan berkisar antara 5 l/dt sampai 10 l/dt, setempat dijumpai adanya kemunculan mata air dengan debit ada yang mencapai 100 l/dt.
- c. Akuifer Konglomerat dan Batupasir; dijumpai di bagian timur Lubuk Malako dan Abai (bagian timur daerah perencanaan), umumnya air tanah belum dimanfaatkan karena dalamnya muka air tanah.
- d. Akuifer Batu gamping Pejal dan Berongga; dijumpai di Daerah Talantam, Sungai Penuh (Kecamatan Sangir Batang Hari) dan disebelah utara Sungai Pangkur (Koto Parik Gadang Diateh). Kedudukan muka air tanah umumnya dalam, sumber air tanah umumnya dijumpai pada celahan atau daerah depresi.
- e. Akuifer Granit-Granodiorit; dijumpai di Bukit Batuang Bajawek, Balun (Koto Parik Gadang Diateh) dan di sekitar Koto Ranah (Sangir Batang Hari). Umumnya kelulusan sangat rendah setempat air tanah dangkal dalam jumlah terbatas dapat diperoleh di daerah rendah ataupun pada zona pelapukan.
- f. Akuifer Campuran Batuan Sedimen dan Gunung api; dijumpai di daerah kaki pegunungan bagian barat. Kelulusan sangat beragam umumnya rendah, terdapat air tanah dangkal.

#### **H. Penggunaan Lahan**

Penggunaan lahan merupakan suatu bentuk dari segala aktifitas yang saat ini dilakukan oleh masyarakat di atas suatu lahan. Aktifitas tersebut selanjutnya dikelompokkan dalam suatu guna lahan yang merupakan dominasi dari pemanfaatan ruang yang ada. Berdasarkan hasil analisis dengan sumber Citra spot 7 Tahun 2017 bahwa luas penggunaan lahan di Kabupaten Solok Selatan didominasi oleh hutan rimba dengan luasan  $\pm 2.143,74 \text{ Km}^2$  (65,07 %), sedangkan penggunaan lahan paling sedikit adalah danau/situ dengan luasan seluas  $\pm 0,03 \text{ Km}^2$  (0,001 %) dari luas seluruh Kabupaten Solok Selatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:



**Tabel 2.9.**  
**Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017**

No	Guna Lahan	Luas Area (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1	Danau/Situ	0,03	0,001
2	Empang	0,13	0,004
3	Gedung/Bangunan	0,26	0,008
4	Hutan	2.143,75	65,073
5	Pasir/Bukit Pasir Darat	0,71	0,021
6	Perkebunan/Kebun	686,77	20,847
7	Permukiman Pedesaan	6,28	0,191
8	Permukiman Perkotaan	8,90	0,270
9	Sawah	68,93	2,092
10	Sawah Irigasi	44,95	1,364
11	Semak Belukar	257,77	7,825
12	Sungai	19,09	0,579
13	Tanah Kosong	0,27	0,008
14	Tegalan/Ladang	56,56	1,717
<b>Jumlah</b>		<b>3.294,39</b>	<b>100</b>

Sumber : Hasil Analisis Citra Spot 7 Tahun 2017

#### 2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Sesuai dengan arahan kebijakan RTRW Kabupaten Solok Selatan, pengembangan wilayah Kabupaten Solok Selatan diarahkan pada “**Upaya Optimalisasi Lahan Produktif Bagi Pengembangan Wilayah Dengan Tetap Menjaga Keseimbangan Fungsi Perlindungan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan Hutan Lindung**”. Optimalisasi lahan produktif merupakan upaya ekonomisasi wilayah agar tercapai kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan melalui kreatifitas penyelenggaraan sumber daya buatan yang ramah lingkungan. Perlindungan TNKS dan hutan lindung sebagai upaya penjaminan kelangsungan hidup seluruh makhluk yang ada di lingkungan wilayah Kabupaten Solok Selatan serta wilayah hilir, terkait dalam hal dukungan penyediaan sumber daya alam. Dukungan untuk pengembangan pembangunan berkelanjutan Kabupaten Solok Selatan hanya mungkin terjadi kalau aset alam yang ada sekarang ini mendapat perlindungan sebaik mungkin. Kabupaten Solok Selatan termasuk kepada kawasan strategis Nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Kawasan strategis nasional yang berada di Kabupaten Solok Selatan adalah Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), yang merupakan kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli yang dikelola dengan sistem Zonasi dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan menunjang kebudayaan, dan berpotensi untuk rekreasi/pariwisata. Sedangkan fungsinya adalah sebagai perbandingan sistem penyangga kehidupan, pengawasan, serta pemanfaatan secara lestari keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. TNKS yang

mempunyai luas areal sekitar  $\pm 1.368.000$  ha membentang dipunggung Bukit Barisan yang meliputi 4 provinsi. Taman Nasional Kerinci Seblat yang berada pada wilayah Kabupaten Solok Selatan adalah seluas  $\pm 65.911,21$  hektar atau 20,01 % dari luas wilayah Kabupaten Solok Selatan, yang tersebar di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Pauh Duo, Kecamatan Sangir, dan Kecamatan Sangir Balai Janggo.

Selain itu Kabupaten Solok Selatan mempunyai Kawasan Strategis Provinsi yaitu Kawasan Saribu Rumah Gadang, yang merupakan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya. Kawasan Saribu Rumah Gadang terdapat di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu, merupakan kawasan pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa bangunan dan situs cagar budaya berupa Rumah Gadang.

Kegiatan pembangunan pada kawasan strategis akan menjadi prioritas penanganannya karena kawasan ini mempunyai karakteristik yang spesifik khususnya dalam memacu pengembangan wilayah di Kabupaten Solok Selatan maupun untuk pertimbangan strategis lainnya. Dengan menggarap suatu kawasan strategis secara multisektor dan terintegrasi diharapkan akan terjadi pengembangan wilayah sesuai karakteristiknya sehingga secara umum akan memberikan manfaat secara luas kepada masyarakat Kabupaten Solok Selatan.

Kawasan strategis ditetapkan dalam RTRW dimaksudkan untuk:

- 1) Mengarahkan perhatian seluruh pihak terhadap perlunya pemusatan sumber daya pembangunan yang ada, baik dari level pusat hingga daerah, maupun sumber-sumber donor lain yang memungkinkan ke kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan strategis. secara terintegrasi sehingga mampu memicu efek pengganda bagi perekonomian wilayah secara menyeluruh;
- 2) Memusatkan perhatian para pemangku kepentingan pembangunan daerah pada kawasan-kawasan strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam pembangunannya melihat potensi dan permasalahan yang ada.

Perencanaan Pengembangan Wilayah Kabupaten Solok Selatan diarahkan ke dalam tiga wilayah pengembangan yang didasarkan oleh karakteristik dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah tersebut:

- a. **Kecamatan Sangir** yang berpusat di Padang Aro sebagai pusat pengembangan I dengan *growth point* pelayanan pemerintahan, pelayanan umum, jasa dan perdagangan.
- b. **Kecamatan Sungai Pagu, Pauh Duo dan Koto Parik Gadang Diateh** sebagai pusat pengembangan II yang dipusatkan di Muara Labuh

dengan *growth point* pendidikan, kesehatan, perdagangan, pariwisata, budaya dan sentra produksi tanaman pangan.

- c. **Kecamatan Sangir Batang Hari, Sangir Jujuan dan Sangir Balai Janggo** sebagai pusat pengembangan III dengan *growth point* sektor perkebunan dan pertambangan.

Sekaitan dengan zonasi tersebut, maka pengembangan kawasan strategis di Wilayah Kabupaten Solok Selatan yang akan diangkat meliputi:

1) **Kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi**

Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Solok Selatan adalah:

- ❖ **Kawasan Perekonomian Padang Aro** merupakan kawasan ibukota Kabupaten Solok Selatan. Disamping sebagai pusat pelayanan administrasi dan pemerintahan, kawasan ini direncanakan sebagai pusat kegiatan ekonomi bagi masyarakat Kecamatan Sangir dan sekitarnya.
- ❖ **Kawasan Perekonomian Muara Labuh** sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Selatan bagian barat, dengan wilayah pelayanan Kecamatan Sungai Pagu, Pauh Duo, dan Koto Parik Gadang Diateh.
- ❖ **Kawasan Perekonomian Lubuk Malako** sebagai kawasan pusat ekonomi bagi masyarakat pada bagian timur Kabupaten Solok Selatan, dengan daerah pelayanan Kecamatan Sangir Jujuan dan Sangir Balai Janggo. Serta juga merupakan simpul menuju dan dari daerah tetangga dan lintas tengah Sumatera (Sungai Rumbai / Kabupaten Dharmasraya).
- ❖ **Kawasan Perekonomian Abai** sebagai pusat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di Kecamatan Sangir Batang Hari, sekaligus merupakan kawasan koridor masuk/keluar dari dan ke Kabupaten Solok Selatan dari daerah tetangga/lintas tengah Sumatera (Kabupaten Dharmasraya).

2) **Kawasan strategis untuk kepentingan sosial budaya**

Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis untuk kepentingan sosial budaya di Kabupaten Solok Selatan adalah :

- ❖ **Kawasan Koto Baru**, merupakan kawasan pengembangan adat istiadat dan budaya di Kabupaten Solok Selatan. Kawasan ini dikembangkan sebagai kawasan wisata budaya yang didukung oleh peninggalan rumah adat (rumah gadang) dalam jumlah yang banyak



dengan jarak yang berdekatan, serta didukung oleh situs Surau Menara dan Masjid Raya Koto Baru.

- ❖ **Kawasan Pasir Talang**, merupakan pusat dari Kerajaan Alam Surambi Sungai Pagu. Wilayah ini juga menyisakan banyak peninggalan berupa rumah gadang, dan masjid tua. Kawasan strategis ini meliputi wilayah Nagari Pasir Talang, Sako Pasir Talang di Kecamatan Sungai Pagu dan Pakan Rabaa Tengah di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh.
- ❖ **Kawasan Abai**, merupakan kawasan yang memiliki peninggalan unik berupa belasan rumah gadang panjang yang tidak dijumpai di daerah lainnya di Minangkabau. Kebudayaan unik yang berkembang di kawasan ini adalah kesenian batombe yang tidak dijumpai di daerah lainnya di Sumatera Barat. Kawasan strategis ini meliputi Nagari Abai dan Ranah Pantai Cermin di Kecamatan Sangir Batang Hari.
- ❖ **Kawasan Bidar Alam**, merupakan kawasan yang pernah menjadi tempat Mr. Syafruddin Prawiranegara mengkonsolidasikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada tahun 1948-1949. Sebagai Ketua PDRI, beliau menjalankan pemerintahannya dari nagari ini. Masih banyak peninggalan terutama rumah tempat berdiamnya Mr. Syafruddin Prawiranegara dapat ditemui di kawasan ini.
- ❖ **Kawasan Sungai Padi**, merupakan kawasan peninggalan sejarah yang lebih mengutamakan nilai religi, yaitu dengan terdapatnya Surau dan Makam Syekh Muhammad Arif Sampu serta adanya pengajian yang dinamakan dengan Ratik Zaman. Kawasan Strategis ini meliputi Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir.

### 3) **Kawasan strategis untuk kepentingan penyelamatan lingkungan hidup**

Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis untuk kepentingan penyelamatan lingkungan hidup di Kabupaten Solok Selatan adalah :

- ❖ **Kawasan Batang Sangir**, merupakan kawasan dengan aliran sungai yang berarus deras yang cocok dikembangkan sebagai objek wisata minat khusus seperti arung jeram dan kayak. Kawasan strategis ini meliputi Nagari Lubuk Gadang, Lubuk Gadang Timur, dan Lubuk Gadang Utara di Kecamatan Sangir.
- ❖ **Kawasan Sapan Maluluang**, merupakan kawasan yang berada di Kecamatan Pauh Duo dengan potensi wisata berupa sumber air

panas dan pemandangan alam. Kawasan ini telah dikembangkan menjadi kawasan wisata dengan objek wisata buatan berupa *hot water boom* dan objek wisata Puncak Laras.

- ❖ **Kawasan Golden Arm**, merupakan kawasan yang berada di kaki Gunung Kerinci, dimana merupakan kawasan yang perlu dijaga perkembangannya karena merupakan kawasan hulu sungai. Kawasan ini dikembangkan sebagai destinasi wisata alam, dengan atraksi berupa panorama Gunung Kerinci, jalur pendakian Gunung Kerinci, Danau Bontak, Situ Sutan Pamenan, perkebunan kopi, Bumi Perkemahan Camintoran, dan lain sebagainya.

### 2.1.1.3. Potensi Pengembangan Ekonomi

Potensi pengembangan ekonomi terkait erat dengan pengembangan dan ketersediaan kawasan budidaya yang ditetapkan berdasarkan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Penetapan kawasan budidaya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan, dan pemantauan kegiatan termasuk penyediaan prasarana dan sarana maupun penanganan dampak lingkungan akibat kegiatan budidaya. Potensi pengembangan ekonomi kabupaten Solok Selatan diarahkan kepada:

#### A. Kawasan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan budidaya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 830/Kpts/RC.040/12/2016 tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional, Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 521-848-2019 tentang Penetapan Kawasan Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan di Provinsi Sumatera Barat, serta Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 524-978-2016 tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Peternakan di Provinsi Sumatera Barat maka Kabupaten Solok Selatan termasuk kedalam lokasi pengembangan kawasan pertanian Nasional dan Provinsi Sumatera Barat dengan komoditi prioritas adalah:

1. Tanaman pangan: meliputi padi, jagung, kedelai, dan ubi kayu;
2. Hortikultura: meliputi bawang merah, cabai, jeruk, pisang dan manggis;
3. Perkebunan: meliputi tebu, kopi, teh, kakao, lada, cengkeh, pala, kelapa sawit, karet, dan kelapa; dan

4. Peternakan: meliputi sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba, babi, ayam buras, dan itik.

Rencana pengembangan kawasan pertanian meliputi hampir diseluruh wilayah Kabupaten Solok Selatan dengan sebaran sebagai berikut:

- ❖ Kawasan tanaman pangan tersebar di seluruh kecamatan dengan komoditi prioritas berupa padi (baik padi sawah maupun padi ladang), jagung, kacang-kacangan, ubi jalar, dan ubi kayu.
- ❖ Kawasan pertanian hortikultura tersebar di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Sungai Pagu, Pauh Duo, Sangir, Sangir Jujuan, dan Sangir Batang Hari dengan komoditi berupa sayuran, buah-buahan, tanaman biofarmako, dan tanaman hias. Rencana pengembangan kawasan peruntukan pertanian hortikultura di Kabupaten Solok Selatan diarahkan untuk pengembangan komoditi prioritas berupa jeruk, pisang, manggis, durian, sayuran, cabai, bawang dan tanaman hias
- ❖ Kawasan perkebunan tersebar diseluruh kecamatan dengan komoditi prioritas berupa tebu, kopi, teh, kakao, lada, cengkeh, pala, kelapa sawit, karet, dan kelapa
- ❖ Kawasan peternakan tersebar diseluruh kecamatan dengan komoditi unggulan ternak, berupa sentra ternak sapi, sentra ternak kerbau, sentra ternak kambing, dan sentra ternak unggas (ayam dan itik)
- ❖ Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan luas 9.162 Ha sawah, dengan rincian:
  - a. Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh seluas 2.027 Ha;
  - b. Kecamatan Sungai Pagu seluas 1.680 ha;
  - c. Kecamatan Pauh Duo seluas 1.538 Ha;
  - d. Kecamatan Sangir seluas 2.752 Ha;
  - e. Kecamatan Sangir Jujuan seluas 794 Ha;
  - f. Kecamatan Sangir Balai Janggo seluas 22 Ha; dan
  - g. Kecamatan Sangir Batang Hari seluas 349 Ha;

### **B. Kawasan Perikanan**

Kawasan perikanan yang dapat dikembangkan di Kabupaten Solok Selatan adalah kawasan perikanan budidaya perairan darat, dengan jenis ikan

yang berpotensi untuk dikembangkan berupa ikan nila, ikan mas, ikan lele, ikan bawal, ikan patin, dan ikan garing, serta belut.

Pengembangan kegiatan perikanan budidaya perairan darat di Kabupaten Solok Selatan dapat dikembangkan di kolam, saluran irigasi, sungai, dan embung, serta pada kawasan budidaya lainnya yang berpotensi untuk pengembangan perikanan tanpa mengganggu fungsi utama dari kawasan tersebut diseluruh kecamatan di Kabupaten Solok Selatan.

Berdasarkan potensi sumber daya air untuk perikanan, pengembangan kawasan perikanan di Kabupaten Solok Selatan direncanakan tersebar di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Pauh Duo, dan Kecamatan Sangir.

### **C. Kawasan pertambangan**

❖ **Kawasan pertambangan Mineral** tersebar di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Jujuan, dan Kecamatan Sangir Batang Hari . Merujuk pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3669 K/30/MEM/2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sumatera, maka potensi pengembangan kegiatan pertambangan mineral di Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai berikut :

1. Wilayah Pencadangan Negara (WPN) di Kabupaten Solok Selatan meliputi Taman Nasional Kerinci Seblat dengan luasan  $\pm 76.193,47$  (tujuh puluh enam ribu seratus sembilan puluh tiga dan empat tujuh perseratus) hektar atau 23,13 % dari luas wilayah Kabupaten Solok Selatan, dimana lokasinya tersebar di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Pauh Duo, Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Jujuan dan Kecamatan Sangir Balai Janggo.
2. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di Kabupaten Solok Selatan meliputi:
  - Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Logam dengan luasan  $\pm 192.666,67$  (seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus enam puluh enam dan enam tujuh perseratus) hektar atau 58,48 % dari luas wilayah Kabupaten Solok Selatan, dimana lokasinya tersebar diseluruh kecamatan;
  - Wilayah Usaha Pertambangan Batu Bara dengan luasan  $\pm 3.496,94$  (tiga ribu empat ratus sembilan puluh enam dan sembilan empat perseratus) hektar atau 1,06 % dari luas wilayah



Kabupaten Solok Selatan, dimana lokasinya terdapat di Kecamatan Sangir Balai Janggo;

- Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan/atau Batuan dengan luasan  $\pm 54.967,50$  (lima puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh tujuh dan lima nol perseratus) hektar atau 16,69 % dari luas wilayah Kabupaten Solok Selatan, dimana lokasinya tersebar diseluruh kecamatan.

3. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kabupaten Solok Selatan dengan luasan  $\pm 2.113,95$  (dua ribu seratus tiga belas dan sembilan lima perseratus) hektar atau 0,64 % dari luas wilayah Kabupaten Solok Selatan, yang tersebar diseluruh kecamatan.

- ❖ **Kawasan panas bumi**, Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3415 K / 30 / MEM / 2015 tentang Izin Panas Bumi PT. Supreme Energy Muara Labuh di Wilayah Kerja Liki Pinang Awan Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, maka rencana pengembangan kawasan panas bumi di Kabupaten Solok Selatan ditetapkan dengan luasan  $\pm 56.000$  (lima puluh enam ribu) hektar pada wilayah kerja panas bumi Liki Pinang Awan yang tersebar di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Pauh Duo, dan Kecamatan Sangir.
- ❖ **Kawasan pembangkitan tenaga listrik**, Kawasan pembangkitan tenaga listrik di Kabupaten Solok Selatan terdapat pada lokasi-lokasi pelaksanaan kegiatan pembangkitan tenaga listrik, baik yang bersumber dari energi air, maupun panas bumi. Kawasan pembangkitan tenaga listrik di Kabupaten Solok Selatan seluas  $\pm 169,25$  (seratus enam puluh sembilan dan dua lima perseratus) hektar atau 0,05 % dari luas Kabupaten Solok Selatan yang tersebar di Kecamatan Pauh Duo, dan Kecamatan Sangir.

#### **D. Kawasan hutan produksi**

Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang dibudidayakan dengan tujuan diambil hasil hutannya baik hasil hutan kayu maupun non kayu. Kawasan ini merupakan kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya pembangunan, mendukung pengembangan industri dan ekspor. Kawasan hutan produksi meskipun merupakan kawasan budidaya tetapi juga memiliki fungsi perlindungan sebagai daerah resapan air. Kawasan hutan produksi di Kabupaten Solok Selatan terdiri atas:

- ❖ Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), kawasan ini tersebar di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Pauh Duo, Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Jujuan, dan Kecamatan Sangir Batang Hari.
- ❖ Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), kawasan ini tersebar di Kecamatan Sangir Batang Hari dan Kecamatan Sangir Balai Janggo.
- ❖ Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK), kawasan ini tersebar di Kecamatan Sangir Batang Hari dan Kecamatan Sangir Balai Janggo.

### **E. Kawasan peruntukan industri**

Kawasan peruntukan industri membutuhkan hamparan areal yang cukup luas dan berpengaruh terhadap perubahan lingkungan, baik bentang alam, maupun kondisi sosial ekonomi dan lingkungannya. Kawasan industri diharapkan mampu menjadi stimulus percepatan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar dan wilayah lebih luas, dengan tetap memperhatikan upaya mencegah pencemaran fungsi lingkungan.

Rencana pengembangan kawasan peruntukan industri di Kabupaten Solok Selatan tersebar di Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kecamatan Sangir Jujuan, Kecamatan Sangir, Kecamatan Pauh Duo, Kecamatan Sungai Pagu, dan Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh

Dalam pengembangan sektor industri di Kabupaten Solok Selatan, direncanakan pengembangan sentra-sentra industri kecil dan menengah untuk mendukung perkembangan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Solok Selatan. Rencana Pengembangan Sentra Industri di Kabupaten Solok Selatan, antara lain:

**Tabel 2.10.**  
**Rencana Pengembangan Sentra Industri Kabupaten Solok Selatan**

<b>Jenis Industri/ Bahan Baku</b>	<b>Kawasan Sentra Produksi</b>	<b>Kawasan Sentra Bahan Baku</b>
<b>Industri Pengolahan Makanan dan Minuman</b>		
Umbi-umbian	1. Sungai Pagu 2. Pauh Duo 3. Sangir	1. Sungai pagu 2. Pauh Duo 3. Sangir
Kacang tanah	1. Koto Parik Gadang Diateh 2. Pauh Duo 3. Sangir	1. Koto Parik Gadang Diateh 2. Sangir
Pisang	1. Pauh Duo 2. Sangir	1. Sangir 2. Pauh Duo 3. Koto Parik Gadang Diateh 4. Sungai Pagu 5. Sangir Jujuan

Jenis Industri/ Bahan Baku	Kawasan Sentra Produksi	Kawasan Sentra Bahan Baku
Kopi	1. Sangir 2. Koto Parik Gadang Diateh	1. Sangir 2. Sangir Jujuan 3. Sangir Balai Janggo 4. Sangir Batang Hari 5. Sungai Pagu 6. Pauh Duo 7. Koto Parik Gadang Diateh
Kakao	Sangir Jujuan	1. Koto Parik Gadang Diateh 2. Sungai Pagu 3. Pauh Duo 4. Sangir 5. Sangir Jujuan 6. Sangir Batang Hari 7. Sangir Balai Janggo
Manggis	Sangir Batang Hari	1. Koto Parik Gadang Diateh 2. Sungai Pagu 3. Pauh Duo 4. Sangir 5. Sangir Jujuan 6. Sangir Batang Hari 7. Sangir Balai Janggo
Jahe Merah	Sangir Jujuan	1. Koto Parik Gadang Diateh 2. Sungai Pagu 3. Pauh Duo 4. Sangir Jujuan
Susu	Sangir	1. Koto Parik Gadang Diateh 2. Sungai Pagu 3. Pauh Duo 4. Sangir 5. Sangir Jujuan 6. Sangir Batang Hari 7. Sangir Balai Janggo
Jeruk	Pauh Duo	1. Koto Parik Gadang Diateh 2. Sungai Pagu 3. Pauh Duo 4. Sangir
Daging dan kulit	1. Sungai Pagu 2. Sangir	1. Koto Parik Gadang Diateh 2. Sungai Pagu 3. Pauh Duo 4. Sangir 5. Sangir Jujuan 6. Sangir Batang Hari 7. Sangir Balai Janggo
<b>Industri Pengolahan Minyak Atsiri</b>		
Minyak Atsiri	1. Koto Parik Gadang Diateh 2. Sangir	1. Koto Parik Gadang Diateh 2. Sungai Pagu
<b>Industri Tekstil dan produk tekstil (Sulaman dan Bordir)</b>		
Benang Sulam	Koto Parik Gadang Diateh	
Benang Sulam	Sungai Pagu	
<b>Industri Alat dan mesin pertanian</b>		
Besi	Koto Parik Gadang Diateh	Padang

Sumber : Dinas Koperindag Kabupaten Solok Selatan

## **F. Kawasan pariwisata**

Berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025, Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten Solok Selatan termasuk ke dalam DPP Tanah Datar dan sekitarnya yang mencakup wilayah Kabupaten

Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok dan Kabupaten Solok Selatan dengan tema utama sebagai kawasan pengembangan Minangkabau Tempo Dulu (*Ancient Minangkabau Tourism*). Kawasan tersebut lebih dikenal dengan kawasan seribu rumah gadang yang merupakan representasi perkampungan adat yang memiliki sebanyak 125 unit rumah gadang berbagai kaum dan suku, balai adat, surau dan sebuah makam. Berlokasi di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai pagu. Beberapa unit rumah gadang ini dapat *homestay* bagi wisatawan yang ingin menikmati sensasi kehidupan tradisional minang kabau tempo dulu.

Kawasan ini telah menjadi perhatian pemerintah pusat dengan adanya program revitalisasi rumah gadang oleh Kementerian PU PR Tahun 2019. Beberapa unit rumah gadang dilakukan renovasi dan melengkapi beberapa sarana fisik diantaranya pembangunan menara songket dan pembangunan jembatan untuk kelancaran arus transportasi sekitar kawasan. Selain di Kawasan Seribu Rumah Gadang, Rumah Gadang tersebar hampir di seluruh wilayah Solok Selatan yang desain dan bentuk bangunan sesuai dengan kearifan lokal masyarakat.

Berdasarkan pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Solok Selatan terkait dengan pembangunan kewilayahan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah ditetapkan 3 KPP yaitu :

1. KPP 1 Padang Aro, fokus pada pengembangan tema wisata ekowisata petualangan alam didukung Wisata budaya dan sejarah.

Ekowisata petualangan alam tersebut adalah :

- a. Air Terjun Tangsi Ampek (Kipas);
- b. Aia Malanca;
- c. Air Terjun Baskom;
- d. Air Terjun Kupitan;
- e. Air Terjun Kembar;
- f. Air Terjun Timbulun;
- g. Arung Jeram Sungai Batang Sangir;
- h. Pulau Mutiara;
- i. Danau Bontak;
- j. Pemandangan Gunung Api Kerinci;
- k. Lubuk Patamuan;
- l. Arung Jeram Sungai Batang Bangko;
- m. Arung Jeram Tangsi Ampek Atas;
- n. Panorama Camintoran;
- o. Danau Bontak; dan



p. Arung Jeram Batang Sangir.

Wisata budaya yang dikembangkan adalah rumah gadang durian taruang, batu buayo putih daguak, selanjutnya Wisata sejarah pada KPP ini adalah mesjid sampu dan makam syekh sampu.

2. KPP 2 Muara Labuh, fokus pada pengembangan tema Wisata budaya didukung Wisata alam.mencakup tiga kecamatan yaitu Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh dan Kecamatan Pauh Duo dengan pusat pelayanan di Muara Labuh.

Wisata budaya pada KPP 2 ini terdiri dari:

- a. Istana Rajo Balun;
- b. Rumah Gadang Tuan Raja Malenggang;
- c. Rumah Gadang Tuan Raja Batuah;
- d. Istana Raja Disambah “Raja Alam Surambi Sungai Pagu”; dan
- e. Kampung Adat Saribu Rumah Gadang.

Dan Wisata alam sebagai pendukung adalah:

- a. Sumber Air Panas Sapan Maluluang;
- b. Air Terjun Ulu Suliti;
- c. Air Terjun Lambe;
- d. Air Panas Sapan Balun;
- e. Air Terjun Mudiak Sako Batang Lolo;
- f. Air Terjun Ngalau Batang Pagu;
- g. Air Terjun Batu Lawe;
- h. Pacu Codang;
- i. Ekowisata Hutan Simancuang;
- j. Tubing Ducati;
- k. Air Terjun Batang Sungai Mangun;
- l. Air Terjun Jorong Sungai Duo;
- m. Air Terjun Batang Sungai Lundang; dan
- n. Air Terjun Tubo Taratak Tinggi.

3. KPP 3 Lubuk Malako. fokus pada pengembangan tema Wisata geowisata didukung wisata budaya mencakup tiga kecamatan yaitu Kecamatan Sangir Jujuan, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kecamatan Sangir Batang Hari dengan pusat pelayanan di Lubuk Malako.

Geowisata tersebut terdiri dari:

- a. Bukit Sangko Puyuah;
- b. Ngalau Lubuk Malako;
- c. Goa Batu Kapal (Ngalau Indah);
- d. Bukit Sungai Mintan RPC;

- e. Talang Sunyi RPC;
- f. Goa Intan RPC;
- g. Goa Kuda RPC;
- h. Goa Batang RPC;
- i. Goa Kering RPC;
- j. Goa Laba-Laba RPC;
- k. Bukit Cermin RPC;
- l. Bukit Pandam RPC;
- m. Bukit Selasih RPC;
- n. Bukit SMP RPC; Dan
- o. Goa Putih Lindung Bulan.

Dan Wisata budaya sebagai objek pendukung terdiri dari:

- a. Rumah PDRI;
- b. Tugu PDRI;
- c. Rumah Gadang 21 Ruang; dan
- d. Rumah Gadang Melayu 18 Ruang.

#### **2.1.1.4. Wilayah Rawan Bencana**

Kabupaten Solok Selatan telah ditetapkan menjadi kawasan rawan bencana alam. Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan budidaya ataupun lindung yang memiliki potensi resiko degradasi lingkungan dan bencana alam. Melihat kedudukan Kabupaten Solok Selatan yang berada pada suatu Sistem Patahan Besar dan jalur gunung api yang masih aktif sampai sekarang serta banyaknya dataran yang bergelombang dan curam menyebabkan sebagian besar daerahnya merupakan daerah rawan bencana baik gempa bumi, longsor maupun banjir. Secara kewilayahan, wilayah-wilayah kritis lingkungan di Kabupaten Solok Selatan meliputi lahan kritis, erosi, bencana tanah longsor dan banjir.

Secara garis besar pengelompokan daerah rawan bencana di Kabupaten Solok Selatan adalah:

1. **Letusan Gunung Api.** Kabupaten Solok Selatan didominasi oleh perbukitan dan pegunungan. Walaupun sebenarnya Kabupaten Solok Selatan secara administrasi daerah tidak memiliki gunung api, tetapi sebahagian besar wilayah kaki Gunung Kerinci berada diwilayahnya. Hal ini menyebabkan beberapa wilayah akan terkena imbas yang tidak langsung dari letusan dari gunung tersebut (awan panas dan lahar dingin) seperti wilayah Sangir dan Pauh Duo
2. **Gempa Bumi / Sempadan Aktif,** Keberadaan Gunung Kerinci dan Zona Patahan Semangko yang melintasi Kabupaten Solok Selatan

menyebabkan Kabupaten Solok Selatan termasuk dalam kawasan rawan gempa bumi, baik gempa vulkanik maupun gempa tektonik. Kawasan yang terletak pada patahan aktif di Kabupaten Solok Selatan terdapat pada Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, dan Kecamatan Pauh Duo

3. **Longsor.** Longsor umumnya terjadi pada daerah perbukitan yang bertebing terjal dan daerah tebing sungai terutama pada daerah *cut of slope* seperti pada daerah berlereng dengan kelerengan >15%, daerah perbukitan bergelombang, daerah perbukitan terjal dan daerah kaki pegunungan. Daerah ini meliputi sebahagian besar wilayah Kabupaten Solok Selatan terutama 1). Nagari Pakan Rabaa Utara, Nagari Pakan Rabaa Tengah dan Nagari Pakan Rabaa Timur di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh; 2). Nagari Sako Pasir Talang dan Nagari Sako Utara Pasir Talang di Kecamatan Sungai Pagu; 3). Nagari Alam Pauh Duo dan Nagari Kapau Alam Pauh Duo di Kecamatan Pauh Duo; 4). Nagari Lubuk Gadang Selatan, Nagari Lubuk Gadang Timur, dan Nagari Lubuk Gadang Utara di Kecamatan Sangir; 5). Bukik Manggiu, Bukik Kingkiang, Bukik Koto Jepang di Sangir Jujuan; 6). Nagari Ranah Pantai Cermin di Kecamatan Sangir Batang Hari.
4. **Banjir.** Banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi yang dialirkan melalui sungai-sungai besar yang mengalir di wilayah Kabupaten Solok Selatan. Selain itu juga daerah cekungan-cekungan dapat juga terjadi genangan yang menyebabkan banjir. Daerah yang perlu diwaspadai (berpotensi) rawan banjir terdapat di sepanjang Sungai Batang Hari, Sungai Batang Bangko, Sungai Batang Suliti, Sungai Batang Liki dan sepanjang Sungai Batang Sangir.

#### 2.1.1.5. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2017-2021 mengalami peningkatan dari tahun ketahun yaitu dari 165.603 jiwa pada tahun 2017 menjadi 184.854 jiwa pada tahun 2021. Dilihat dari laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Solok Selatan cukup berfluktuasi dengan peningkatan tertinggi pada tahun 2020 yaitu 6,40% dan yang terendah pada tahun 2021 yaitu 1,55%. Sedangkan untuk jenis kelamin (sex ratio) atau perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan Kabupaten Solok Selatan selama kurun waktu tahun 2017-2021, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada perempuan, hal ini dapat dilihat dari Rasio jenis kelamin penduduk Solok Selatan diatas 100%. Namun jika dilihat pada periode tahun 2017-2021 Sex

Rasio cenderung mengalami peningkatan yaitu dari 101,89 pada tahun 2018 menjadi 104,21% pada tahun 2021.

**Tabel 2.11.**  
**Jumlah dan Kepadatan Penduduk**  
**Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk (jiwa)	165.603	168.411	171.075	182.027	184.854
Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	50,3	51,1	51,9	55,3	56,1
Jumlah keluarga	39.805	40.480	40.976	43.297	44.199
Rata-rata jumlah anggota Keluarga	4,16	4,16	4,18	4,20	4,18
Laju pertumbuhan penduduk (%)	1,77	1,70	1,58	6,40	1,55
Sex ratio (%)	101,96	101,89	107,74	103,59	104,21

Sumber : Badan Pusat Statistik (Data diolah)

Tingkat kepadatan penduduk tahun 2021 berdasarkan luas wilayah adalah 56,11 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Sungai Pagu (113,60 jiwa/km<sup>2</sup>), menyusul Kecamatan Sangir (80,49 jiwa/km<sup>2</sup>), Pauh Duo (73,65 jiwa/km<sup>2</sup>), Koto Parik Gadang Diateh (69,69 jiwa/km<sup>2</sup>), Sangir Jujuan (43,01 jiwa/km<sup>2</sup>), Kecamatan Sangir Balai Janggo (37,01 jiwa/km<sup>2</sup>) dan Sangir Batang Hari (20,69 jiwa/km<sup>2</sup>).

**Tabel 2.12.**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk**  
**per Kecamatan Tahun 2021**

No	Kecamatan	Penduduk			Sex ratio (%)	Kepadatan (jiwa/km <sup>2</sup> )
		Laki-laki	Perempuan	Total		
1	Sangir	26.629	25.532	52.161	104,30	80,49
2	Sungai Pagu	16.570	16.578	33.148	99,95	113,60
3	Koto Parik Gadang Diateh	14.921	14.387	29.308	103,71	69,69
4	Sangir Jujuan	7.467	7.057	14.524	105,81	43,01
5	Sangir Batang Hari	8.496	8.029	16.525	105,82	20,69
6	Pauh Duo	9.843	9.597	19.440	102,56	73,65
7	Sangir Balai Janggo	10.408	9.340	19.748	111,43	37,01
<b>Jumlah</b>		<b>94.334</b>	<b>90.520</b>	<b>184.854</b>	<b>104,21</b>	<b>56,11</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik (Data diolah)

Ditinjau dari klasifikasi kepadatan penduduk. Kabupaten Solok Selatan tergolong daerah yang berpenduduk kurang padat (Undang-Undang Nomor: 56/PRP/1960 membagi empat klasifikasi kepadatan penduduk. yaitu: tidak padat dengan tingkat kepadatan 1-50 jiwa/Km<sup>2</sup>, kurang padat antara 51-250 jiwa/Km<sup>2</sup>, cukup padat 251-400 jiwa/Km<sup>2</sup>, dan sangat padat dengan tingkat kepadatan lebih besar dari 401 jiwa/Km<sup>2</sup>).

Sebaran penduduk menurut kelompok usia (umur) di Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2021 dapat menggambarkan Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) penduduk yang produktif dan non produktif Kabupaten Solok Selatan sebesar 52,40%, ini berarti setiap 100 orang yang berusia kerja



(dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 52-53 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

**Tabel 2.13.**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2021**

Kelompok Umur	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	8.216	7.890	16.106
05-9	7.819	7.385	15.204
10-14	8.280	7.772	16.052
15-19	8.739	8.269	17.008
20-24	8.819	8.028	16.847
25-29	7.796	7.436	15.232
30-34	7.788	7.729	15.517
35-39	7.378	7.109	14.487
40-44	6.869	6.554	13.423
45-49	5.883	5.634	11.517
50-54	4.987	4.665	9.652
55-59	3.826	3.781	7.607
60-64	2.937	3.044	5.981
65-69	2.246	2.255	4.471
70-74	1.480	1.477	2.957
75+	1.271	1.522	2.793
Jumlah	94.334	90.520	184.854

Sumber : Badan Pusat Statistik (Data diolah)

### 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

#### 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

##### A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator utama untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. PDRB dapat menggambarkan dominasi sektor-sektor pembentuk ekonomi, PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit usaha yang ada pada suatu wilayah. Dalam melihat perkembangan PDRB dapat dihitung melalui 2 pendekatan yaitu Atas Dasar harga Berlaku yang menghitung nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun dan Atas Dasar Harga Konstan yang menghitung nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar (tahun 2010).

Jika dilihat perkembangan dan peningkatan PDRB Kabupaten Solok Selatan baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) berfluktuasi dari tahun ketahun namun peningkatan ini diikuti oleh perlambatan pertumbuhannya cenderung mengalami perlambatan. Untuk PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) meskipun pada periode tahun 2017-2019 secara jumlah terus mengalami peningkatan dari Rp. 4.893.870,69- juta pada

tahun 2017 menjadi Rp 5.571.732,28 juta pada tahun 2019, namun jika dilihat dari pertumbuhannya terus mengalami penurunan yaitu dari 6,54% menjadi 5,08. Hal ini juga terjadi pada Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) yang juga mengalami peningkatan dari Rp. 3.612.139,52 juta pada tahun 2017 menjadi Rp. 3.977.409,14 juta pada tahun 2019, dengan tingkat pertumbuhan dari 5,18% menjadi 4,80%. Penurunan ini terjadi seiring dengan perlambatan dari pertumbuhan ekonomi Nasional dan Provinsi Sumatera Barat yang diiringi oleh penurunan harga beberapa komoditi unggulan daerah terutama hasil pertanian.

Namun pada tahun 2020 terjadi kontraksi (pertumbuhan dibawah 0%) dalam perekonomian yang ditandai oleh menurunnya PDRB dari tahun sebelumnya dari Rp. 5,571,732,28 juta pada tahun 2019 menjadi Rp. 5.528,507,31 juta pada tahun 2020 (mengalami penurunan 0,78%) untuk PDRB berdasarkan ADHB dan dari Rp. 3.977.409,14 juta menjadi Rp. 3.928.031,94 juta (mengalami penurunan -1,24%) untuk PDRB berdasarkan ADHK. Penurunan ini merupakan dampak dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dalam penanganan pandemi Covid 19 yaitu melalui *social distancing* dan *physical distancing*, yang diikuti oleh kebijakan yang lebih luas di beberapa daerah yang salah satunya Provinsi Sumatera Barat yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar sangat berdampak terhadap terganggunya aktifitas perekonomian masyarakat dan dunia usaha baik dari penawaran (supply) dan sektor permintaan (demand).

Namun pada tahun 2021, seiring dengan menurunnya kasus covid 19 serta keberhasilan program herd immunity melalui program vaksinasi, baik pemerintah pusat, provinsi dan daerah melakukan beberapa kebijakan antara lain pelonggaran level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berdasarkan tingkatan kasus covid. Selain itu membaiknya harga dan produksi unggulan daerah seperti kelapa sawit, kopi dan karet. Kondisi ini berdampak terhadap peningkatan aktivitas ekonomi yang dapat dilihat dari meningkatnya PDRB menjadi Rp. 5.777.977,93,- (mengalami peningkatan 4,51%) untuk PDRB berdasarkan ADHB dan Rp. 4.059.514,72 juta (mengalami penurunan 3,35%) untuk PDRB berdasarkan ADHK. Pertumbuhan ini terjadi di hampir seluruh sektor perekonomian terutama sektor utama yang merupakan pembentuk perekonomian daerah seperti sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; Pertambangan dan Penggalian; Transportasi dan Pergudangan.

Tabel 2.14.

**PDRB Kabupaten Solok Selatan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Harga Konstan (ADHK) Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)**

Tahun	PDRB (harga berlaku)		PDRB (harga konstan)	
	Jumlah (juta Rp)	Pertumbuhan (%)	Jumlah (juta Rp)	Pertumbuhan (%)
2017	4.893.870,69	6,54	3.612.139,52	5,18
2018	5.302.502,22	6,59	3.795.200,14	5,04
2019	5.571.732,28	5,08	3.977.409,14	4,80
2020	5.528.507,31	-0,78	3.928.031,94	-1,24
2021	5.777.977,93	4,51	4.059.514,72	3,35

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan

Dilihat dari struktur perekonomian periode tahun 2017-2021, perekonomian Kabupaten Solok Selatan masih didominasi oleh sektor primer, hal ini dapat dilihat dari besarnya kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; dengan rata-rata kontribusi 39,49% pertahun. Namun dominasi sektor primer ini terus mengalami penurunan dari 42,12% (pada tahun 2017) menjadi 37,57% (pada tahun 2021). Penurunan ini terjadi seiring dengan melambatnya pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; serta Pertambangan dan Penggalian yang diikuti oleh peningkatan pertumbuhan dari sektor-sektor sekunder dan tersier seperti sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Konstruksi, Informasi dan Komunikasi, Transportasi dan Pergudangan, Informasi dan Komunikasi, Industri Pengolahan Jasa Keuangan dan Asuransi, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

Tabel 2.15.

## Perkembangan Nilai dan Pertumbuhan Per Sektor PDRB Perlapangan Usaha Atas Harga Berlaku Tahun 2017-2021 (Rp. Milyar)

No	Uraian	2017		2018		2019		2020		2021	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.597,08	3,28	1.626,26	1,83	1.626,72	0,03	1.590,98	-2,20	1.641,94	3,20
2	Pertambangan dan Penggalian	462,68	1,90	491,03	6,13	527,66	7,46	519,50	-1,55	540,98	4,13
3	Industri Pengolahan	246,59	-0,21	246,80	0,09	234,85	-4,84	237,70	1,21	254,41	7,03
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,56	28,14	1,81	16,03	2,20	21,55	2,11	-4,09	2,21	4,74
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,24	6,51	2,38	6,25	2,59	8,82	2,63	1,54	2,73	3,80
6	Konstruksi	584,08	10,49	648,48	11,03	724,26	11,69	707,20	-2,36	733,25	3,68
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	915,33	9,83	1.014,21	10,80	1.126,05	11,03	1.116,73	-0,83	1.160,98	3,96
8	Transportasi dan Pergudangan	295,99	8,73	326,62	10,35	367,31	12,46	337,83	-8,03	360,36	6,67
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	38,41	10,91	41,75	8,70	47,98	14,92	43,53	-9,27	47,27	8,59
10	Informasi dan Komunikasi	209,48	13,37	233,54	11,49	265,85	13,83	285,31	7,32	307,03	7,61
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	38,92	-2,11	40,50	4,06	43,55	7,53	44,30	1,72	47,59	7,43
12	Real Estate	39,78	5,65	42,52	6,89	46,18	8,60	46,60	0,91	47,72	2,40
13	Jasa Perusahaan	0,73	8,78	0,77	6,05	0,84	9,09	0,83	-1,19	0,85	2,41
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	239,72	12,07	255,91	6,75	278,46	8,81	304,84	9,47	323,56	6,14
15	Jasa Pendidikan	110,85	11,42	119,22	7,55	136,66	14,63	144,40	5,66	152,40	5,54
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	53,40	10,67	59,63	11,67	66,18	10,98	73,28	10,73	80,28	9,55
17	Jasa lainnya	57,03	5,53	64,74	13,52	74,38	14,89	70,76	-4,87	74,42	5,17
	<b>Jumlah</b>	<b>4.893,87</b>	<b>6,54</b>	<b>5.571,73</b>	<b>6,59</b>	<b>5.571,72</b>	<b>5,08</b>	<b>5.528,53</b>	<b>-0,78</b>	<b>5.777,98</b>	<b>4,51</b>

Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan



Tabel 2.16.

## Perkembangan Nilai dan Pertumbuhan Per Sektor PDRB Perlapangan Usaha Atas Harga Konstan Tahun 2017-2021 (Rp. Milyar)

No	Uraian	2017		2018		2019		2020		2021	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1126,25	1,81	1150,9	2,19	1170,07	1,67	1172,98	0,25	1212,85	3,40
2	Pertambangan dan Penggalian	290,32	0,83	301,87	3,98	317,35	5,13	310,48	-2,16	318,57	2,61
3	Industri Pengolahan	200,45	-0,46	201,94	0,74	196,76	-2,57	193,26	-1,78	197,35	2,12
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,87	8,75	0,95	9,20	1,01	6,32	0,96	-4,95	1,00	4,17
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,85	6,32	1,94	4,86	2,01	3,61	2,02	0,50	2,10	3,96
6	Konstruksi	437,29	9,01	469,84	7,44	499,48	6,31	467,56	-6,39	469,85	0,49
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	698,89	8,49	744,43	6,52	795,87	6,91	796,62	0,09	829,12	4,08
8	Transportasi dan Pergudangan	234,79	7,88	253,7	8,05	276,32	8,92	247,21	-10,53	259,79	5,09
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	26,49	9,33	28,64	8,12	31,13	8,69	27,88	-10,44	29,61	6,21
10	Informasi dan Komunikasi	208,55	11,71	227,61	9,14	246,43	8,27	264,77	7,44	281,34	6,26
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	29,03	-3,52	29,44	1,41	30,07	2,14	30,12	0,17	31,54	4,71
12	Real Estate	29,51	4,91	30,81	4,41	32,49	5,45	32,5	0,03	33,22	2,22
13	Jasa Perusahaan	0,55	7,84	0,58	5,45	0,61	5,17	0,59	-3,28	0,60	1,69
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	167,47	7,54	178,64	6,67	189,03	5,82	188,04	-0,52	191,77	1,98
15	Jasa Pendidikan	79,04	9,78	84,61	7,05	91,95	8,68	96,23	4,65	99,66	3,56
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	41,53	9,06	45,25	8,96	48,67	7,56	52,27	7,40	55,62	6,41
17	Jasa lainnya	40,25	3,98	44,06	9,47	48,16	9,31	44,53	-7,54	45,54	2,27
	<b>Jumlah</b>	<b>3.612,13</b>	<b>5,18</b>	<b>3.795,21</b>	<b>5,04</b>	<b>3.977,41</b>	<b>4,80</b>	<b>3.928,02</b>	<b>-1,24</b>	<b>4.059,51</b>	<b>3,35</b>

Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

**Tabel 2.17.**  
**Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Perlapangan Usaha Atas Harga Berlaku (ADHB)**  
**dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2017-2021 (%)**

No	Uraian	2017		2018		2019		2020		2021	
		ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	32,63	31,17	31,18	30,33	29,20	29,42	28,78	29,86	28,42	29,88
2	Pertambangan dan Penggalian	9,45	8,04	9,41	7,95	9,47	7,98	9,40	7,90	9,36	7,85
3	Industri Pengolahan	5,04	5,55	4,73	5,32	4,22	4,95	4,30	4,92	4,40	4,86
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,02	0,03	0,03	0,04	0,03	0,04	0,02	0,04	0,02
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
6	Konstruksi	11,93	12,10	12,43	12,38	13,00	12,56	12,79	11,90	12,69	11,57
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,70	19,34	19,44	19,61	20,21	20,01	20,20	20,28	20,09	20,42
8	Transportasi dan Pergudangan	6,05	6,50	6,26	6,68	6,59	6,95	6,11	6,29	6,24	6,40
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,78	0,73	0,80	0,75	0,86	0,78	0,79	0,71	0,82	0,73
10	Informasi dan Komunikasi	4,28	5,77	4,48	6,00	4,77	6,20	5,16	6,74	5,31	6,93
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,80	0,80	0,78	0,78	0,78	0,76	0,80	0,77	0,82	0,78
12	Real Estate	0,81	0,82	0,82	0,81	0,83	0,82	0,84	0,83	0,83	0,82
13	Jasa Perusahaan	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,90	4,64	4,91	4,71	5,00	4,75	5,51	4,79	5,60	4,72
15	Jasa Pendidikan	2,27	2,19	2,29	2,23	2,45	2,31	2,61	2,45	2,64	2,45
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,09	1,15	1,14	1,19	1,19	1,22	1,33	1,33	1,39	1,37
17	Jasa lainnya	1,17	1,11	1,24	1,16	1,33	1,21	1,28	1,13	1,29	1,12
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

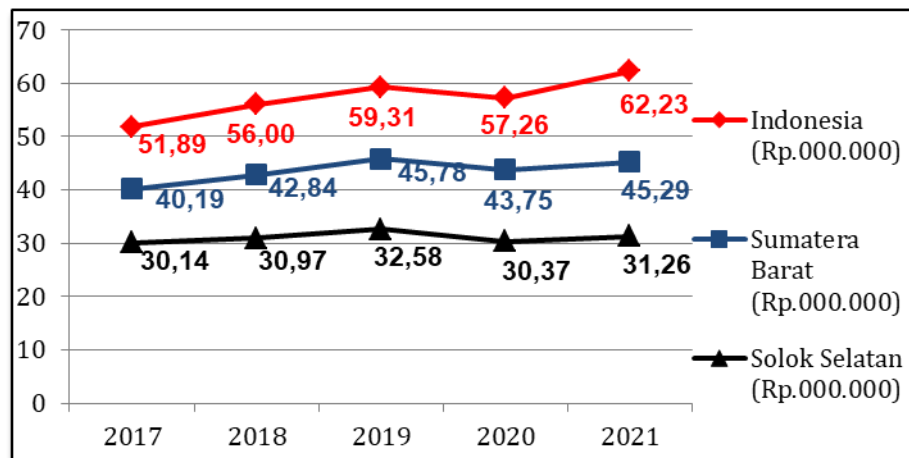
Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

## B. Produk Domestik Regional Bruto Perkapita (PDRB Perkapita)

Besarnya PDRB per kapita dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan dan daya beli masyarakat. Meski belum mencerminkan tingkat pemerataan, PDRB perkapita dapat dijadikan salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu daerah. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Solok Selatan rata-rata mampu menciptakan PDRB (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut. PDRB per kapita merupakan perbandingan antara total nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Solok Selatan. Dari gambar dibawah dapat dilihat bahwa pada periode 2017-2019 PDRB perkapita Kabupaten Solok Selatan terus mengalami peningkatan yaitu dari Rp 30,14 juta pada tahun 2017 menjadi Rp.32,58 juta pada tahun 2019. Namun pada tahun 2021, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2020 hingga menjadi 30,37 juta pertahun namun pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan perekonomian daerah hingga menjadi 31,26 juta.

**Gambar 2.3.**

### Perbandingan PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan

Jika dibandingkan dengan PDRB perkapita Provinsi dan Nasional dapat dilihat bahwa PDRB Perkapita Kabupaten Solok Selatan berada dibawah rata-rata Provinsi dan Nasional. Rendahnya peningkatan PDRB perkapita Kabupaten Solok Selatan ini disebabkan karena struktur perekonomian Kabupaten Solok Selatan masih didominasi oleh sektor primer. Selain sektor ini memiliki nilai tambah yang relative kecil untuk mendongkrak perekonomian daerah, pertumbuhanya juga terus mengalami perlambatan. Jika dikaitkan dengan kontribusi PDRB Kabupaten Solok Selatan dalam membentuk PDRB Provinsi Sumatera Barat sampai tahun 2021 baru sebesar 2,29%.

### C. Angka Kemiskinan

Secara umum definisi kemiskinan mengacu kepada ide dasar bahwa kemiskinan adalah masalah “kekurangan” dalam “kesejahteraan”. Di lain pihak Badan Pusat Statistik (BPS) secara lebih spesifik mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu kondisi yang dialami seseorang yang mempunyai pengeluaran per kapita selama sebulan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar minimum. Kebutuhan standar minimum ini digambarkan dengan Garis Kemiskinan (GK) yaitu batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan. Pertumbuhan jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan suatu daerah. Jika pertumbuhan ekonominya tinggi, serta diiringi distribusi pendapatan yang merata, maka hasil pembangunan dapat dinikmati oleh semua warganya. Angka kemiskinan diartikan sebagai suatu perbandingan antara persentase jumlah penduduk miskin dibandingkan dengan jumlah penduduk di suatu daerah. Jumlah penduduk miskin ini bervariasi sesuai dengan jumlah unit yang menghitungnya, serta kriteria yang ditetapkan.

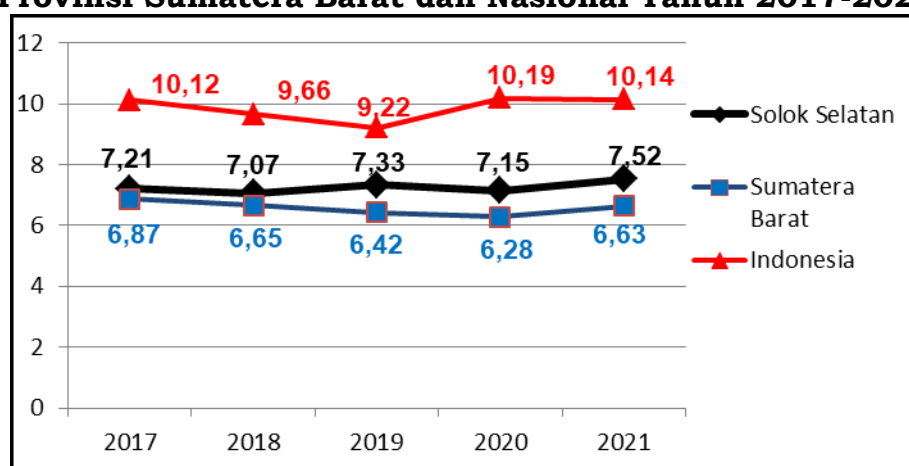
Dilihat dari perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Solok Selatan berfluktuasi dari tahun ketahun dan berada dibawah rata-rata Nasional tetapi masih berada diatas rata-rata Provinsi Sumatera. Pada tahun 2018 tingkat kemiskinan penduduk Solok Selatan mengalami penurunan dari 7,21% pada tahun 2017 menjadi 7,07% pada tahun 2018. Namun pada tahun 2019 tingkat kemiskinan Kabupaten Solok Selatan kembali mengalami kenaikan menjadi 7,33%, kenaikan ini disebabkan karena melemahnya harga-harga komoditas unggulan Kabupaten Solok Selatan seperti Sawit dan Karet serta pemberantasan *illegal mining*. Selain itu faktor bencana yang melanda Kabupaten Solok Selatan selama tahun 2019 yang menyebabkan rusaknya sarana dasar masyarakat serta sarana perekonomian masyarakat seperti sawah, kebun, tenak. Kemudian pada tahun 2020 tingkat kemiskinan mengalami penurunan menjadi 7,15% dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 7,52%. Peningkatan tingkat kemiskinan pada tahun 2021 ini diikuti oleh meningkatnya jumlah penduduk miskin dari 13.080 jiwa menjadi 13.410 atau meningkat 2,52%% dan peningkatan garis kemiskinan (rata-rata pengeluaran perkapita masyarakat untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan) dari Rp. 419.442 per bulan menjadi Rp. 438.187 perbulan.

Jika dilihat dari penyebab penurunan tingkat kemiskinan pada tahun 2020 lebih disebabkan karena perhitungan tingkat kemiskinan pada tahun



tersebut didasarkan pada hasil survey yang dilakukan pada bulan Maret (seharusnya rata-rata bulan Maret dan Agustus), dimana dampak pandemic covid 19 belum berdampak besar terhadap sektor perekonomian. Hal inilah yang menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan tidak dengan perkembangan kondisi perekonomian dimana pada tahun 2020 pertumbuhan perekonomian Nasional, Provinsi dan Daerah mengalami kontraksi (pertumbuhan negative/dibawah nol).

**Gambar 2.4.**  
**Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2021**

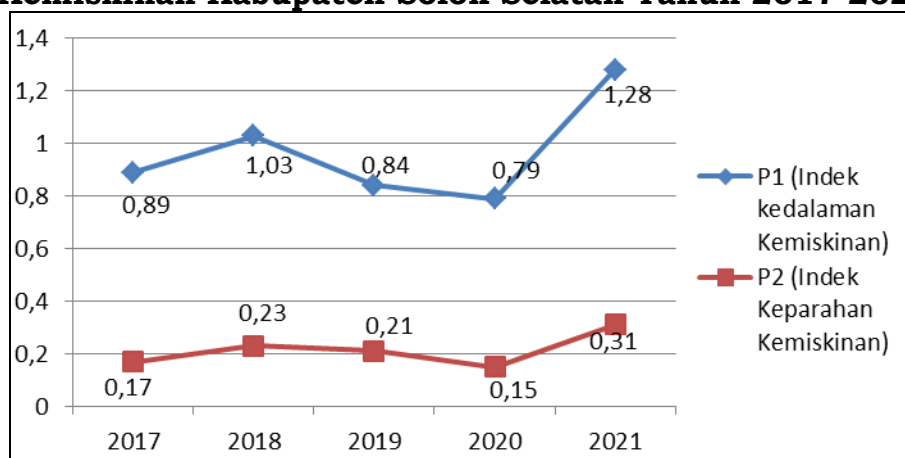


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan

Catt : Tahun 2020 berdasarkan susesnas bulan Maret Tahun 2020

Penurunan tingkat kemiskinan ini diikuti oleh penurunan dari kesejahteraan penduduk miskin yang dapat dilihat dari peningkatan dari indikator pendukungnya yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dari 0,79 pada tahun 2020 menjadi 1,28 pada tahun 2021 dan Keparahan Kemiskinan (P2) dari 0,15 pada tahun 2020 menjadi 0,31 pada tahun 2021. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index* (P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan atau dengan kata lain semakin menurun tingkat kesejahteraan penduduk miskin. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index/P2*) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi indek keparahan kemiskinan (P2) menggambarkan semakin lebar ketimpangan pengeluaran antara penduduk sangat miskin dengan garis kemiskinan.

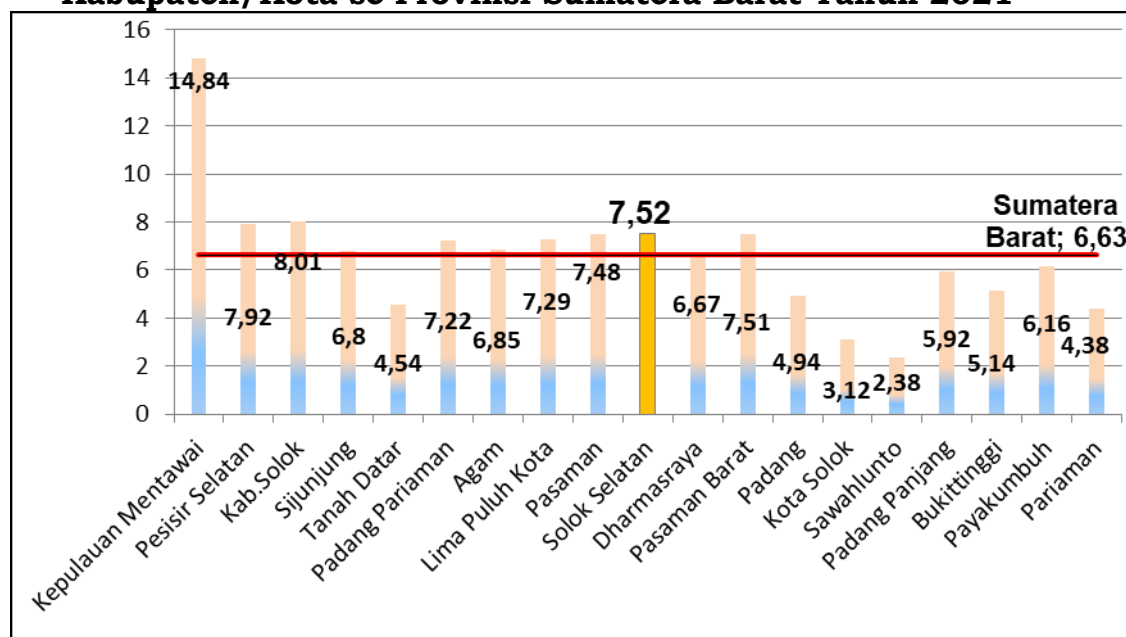
**Gambar 2.5.**  
**Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan

Jika dibandingkan dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat tingkat kemiskinan Kabupaten Solok Selatan berada diatas rata-rata Provinsi Sumatera Barat dan berada pada peringkat 16 yaitu dibawah Kabupaten Mentawai, Kabupaten Solok, dan Pesisir Selatan

**Gambar 2.6.**  
**Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021**



Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

#### D. Tingkat Pengangguran

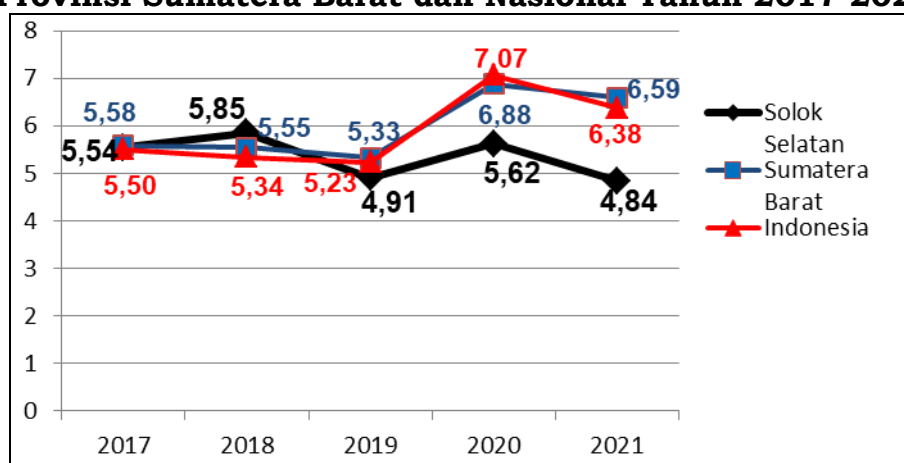
Aspek ketenagakerjaan dapat dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan persentase penduduk yang aktif mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dari sejumlah angkatan kerja yang ada. TPT bermanfaat untuk melihat keterjangkauan pekerjaan (kesempatan kerja). Semakin tinggi angka

pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkannya.

Dilihat dari perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Solok Selatan pada periode tahun 2017-2019 TPT di Kabupaten Solok Selatan berfluktuasi cenderung mengalami penurunan yaitu dari 5,54% pada tahun 2017, menjadi 4,91% pada tahun 2019, meskipun pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 5,85%. Pada tahun 2020 TPT mengalami peningkatan menjadi 5,62%, peningkatan ini seiring dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam upaya penanggulangan bencana sosial Covid-19, sehingga berdampak negatif pada seluruh sektor perekonomian dari nasional dan daerah. Namun pada tahun 2021 TPT kembali mengalami penurunan menjadi 4,84%. Penurunan ini sejalan dengan meningkatnya aktifitas perekonomian seiring dengan pengurangan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang ditunjang regulasi/kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam upaya peningkatan aktifitas ekonomi serta daya beli masyarakat.

**Gambar 2.7.**

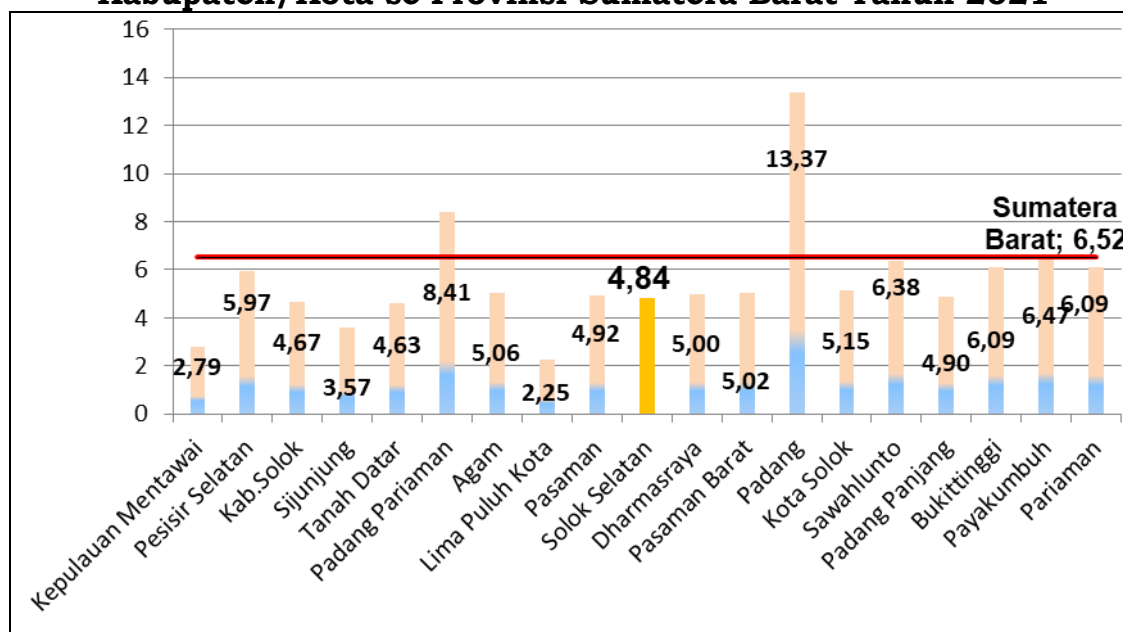
**Perbandingan Tingkat Pengangguran Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2021**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan

Jika dibandingkan dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat tingkat pengangguran Kabupaten Solok Selatan berada dibawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat dan pada peringkat 6 yaitu dibawah Kabupaten Lima puluh Kota, Mentawai, Sijunjung, Tanah Datar dan Solok

**Gambar 2.8.**  
**Perbandingan Tingkat Pengangguran**  
**Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021**



Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

### E. *Indek Gini Ratio*

Koefisien indeks gini digunakan sebagai alat ukur tingkat pemerataan distribusi pendapatan. Koefisien gini adalah ukuran ketidakseimbangan atau ketimpangan distribusi pendapatan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Menurut definisinya, koefisien gini adalah perbandingan luas daerah antara kurva lorenz dan garis lurus 45 derajat terhadap luas daerah di bawah garis 45 derajat tersebut. Hal ini berarti semakin besar indeks gini berarti kesenjangan kesejahteraan (dari aspek pendapatan) semakin besar, sehingga dapat terjadi kerawanan/kecemburuan sosial. Ketimpangan pendapatan ini dibagi atas 3 tingkatan yaitu: 1. Tingkat ketimpangan rendah (Indek Gini <0,4); 2. Tingkat ketimpangan sedang (Indek Gini 0,4-0,5); 3. Tingkat ketimpangan tinggi (Indek Gini >0,5)

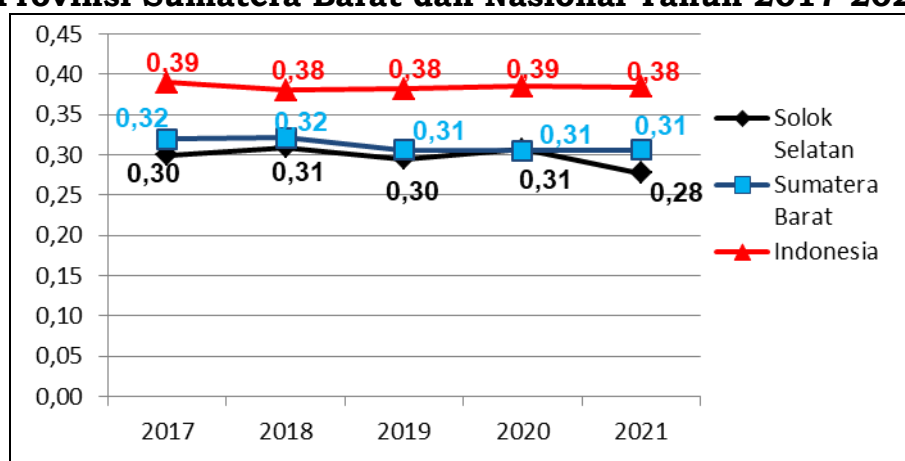
Dilihat dari perkembangan, Indeks Gini Kabupaten Solok Selatan tahun 2017-2021 berfluktuasi setiap tahunnya yaitu dari 0,300 pada tahun 2017, mengalami kenaikan menjadi 0,310 pada tahun 2018 dan mengalami penurunan menjadi 0,295 pada tahun 2019. Pada tahun 2020 Indek Gini Kabupaten Solok Selatan kembali mengalami kenaikan menjadi 0,307 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 0,277. Penurunan ini menunjukkan distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Solok Selatan semakin membaik dengan kata lain *gap* antara penduduk pendapatan tertinggi dengan terendah semakin menurun.



Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi dan Nasional Indeks Gini Kabupaten Solok Selatan lebih baik dari rata-rata Nasional dan Provinsi (berada dibawah rata-rata Nasional dan Provinsi). Dilihat dari perkembangan indeks gini, distribusi Kabupaten Solok Selata masih berada pada kategori ketimpangan rendah karena indeknya masih berada diantara  $\leq 0,4$

**Gambar 2.9.**

**Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2021**



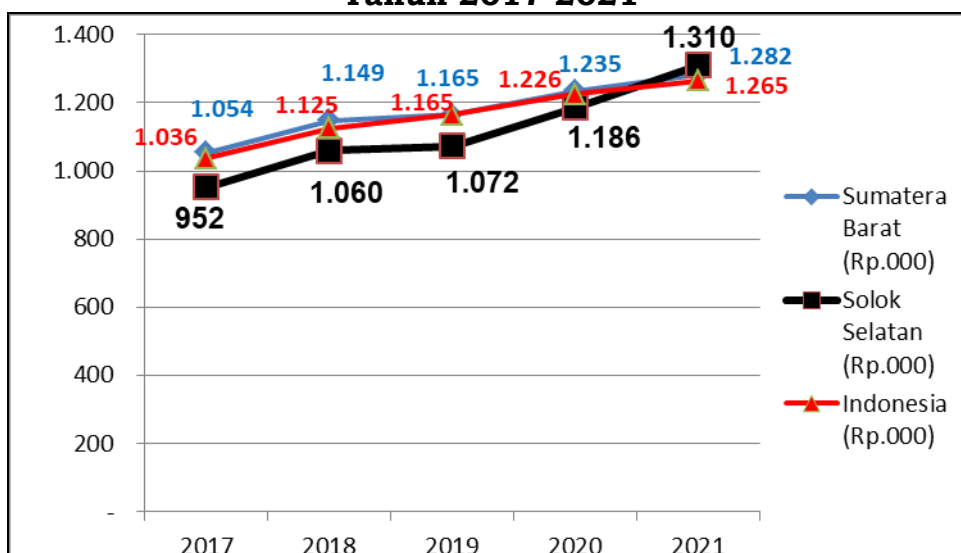
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan

**F. Pengeluaran Konsumsi Perkapita**

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran Konsumsi Perkapita Penduduk menggambarkan berapa rata-rata pengeluaran penduduk perbulan dalam pemenuhan kebutuhannya baik kebutuhan berupa makanan maupun non makanan baik berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri . Angka pengeluaran perkapita ini merupakan angka perkapita yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli dengan menggunakan 96 komoditas (66 Komoditas makanan, dan 30 komoditas non makanan).

Jika dilihat dari pertumbuhan rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Solok Selatan dari tahun 2017-2021 terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun yaitu dari Rp. 952.329,- perbulan pada tahun 2017 menjadi Rp. 1.309.857,- per bulan pada tahun 2021. Peningkatan ini diikuti oleh peningkatan pemenuhan kebutuhan makanan dan bukan makanan dari Rp. 571.105,- untuk makanan dan Rp. 381.224,- untuk bukan makanan pada tahun 2017 menjadi Rp. 674.664,- untuk makanan dan Rp. 635.193,- untuk non makanan pada tahun 2021.

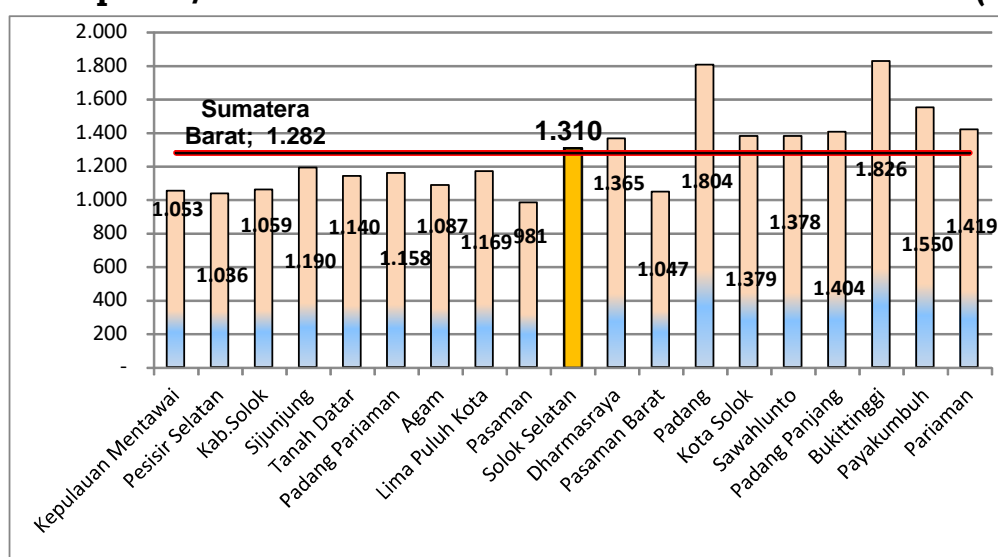
**Gambar 2.10.**  
**Perbandingan Pengeluaran Perkapita**  
**Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional**  
**Tahun 2017-2021**



Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

Dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran perkapita penduduk kabupaten Solok Selatan tahun 2021 sebesar Rp. 1.309.857,-, berada diatas rata-rata Provinsi Sumatera Barat yaitu sebesar Rp. 1.281.658,- dan Nasional yaitu sebesar Rp. 1.264.590,-. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat rata-rata Pengeluaran Perkapita penduduk Kabupaten Solok Selatan berada pada peringkat 9 dibawah Kota dan Kabupaten Dharmasraya

**Gambar 2.11.**  
**Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Penduduk**  
**Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 (Rp.000)**

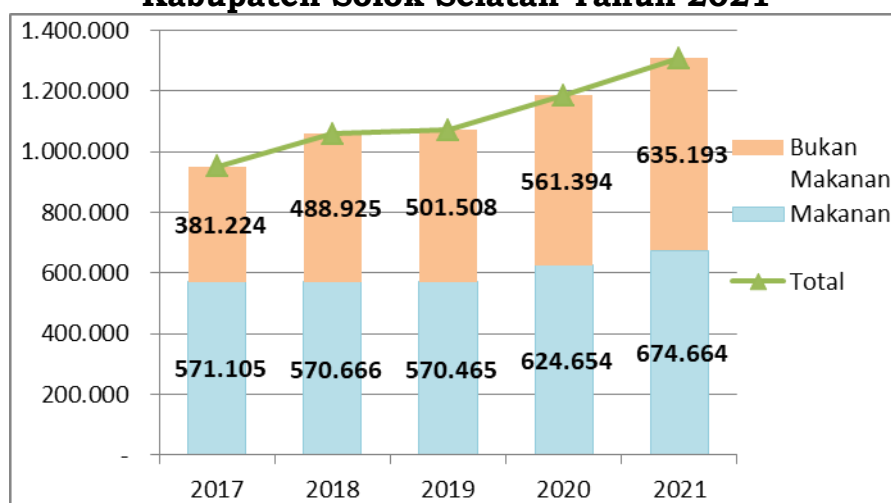


Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

Sesuai dengan **Teori Hukum Engel** menyatakan bahwa semakin meningkat kesejahteraan masyarakat maka semakin meningkat proporsi atau persentase penggunaan belanja non makanan atau sebaliknya. Jika dilihat dari penggunaan pengeluaran masyarakat Solok Selatan untuk pemenuhan

kebutuhan baik makanan maupun non makanan mengalami peningkatan. Namun jika dilihat dari komposisi penggunaannya terdapat penurunan pengeluaran perkapita masyarakat untuk makanan yaitu dari 60,0% pada tahun 2017 menjadi 51,5% pada tahun 2021. Penurunan ini lebih disebabkan oleh peningkatan pengeluaran untuk non makanan dari 40,0% menjadi 48,5%.

**Gambar 2.12.**  
**Komposisi Pengeluaran Per Kapita Penduduk**  
**Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021**



Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

## 2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

### A. *Indek Pembangunan Manusia (IPM)*

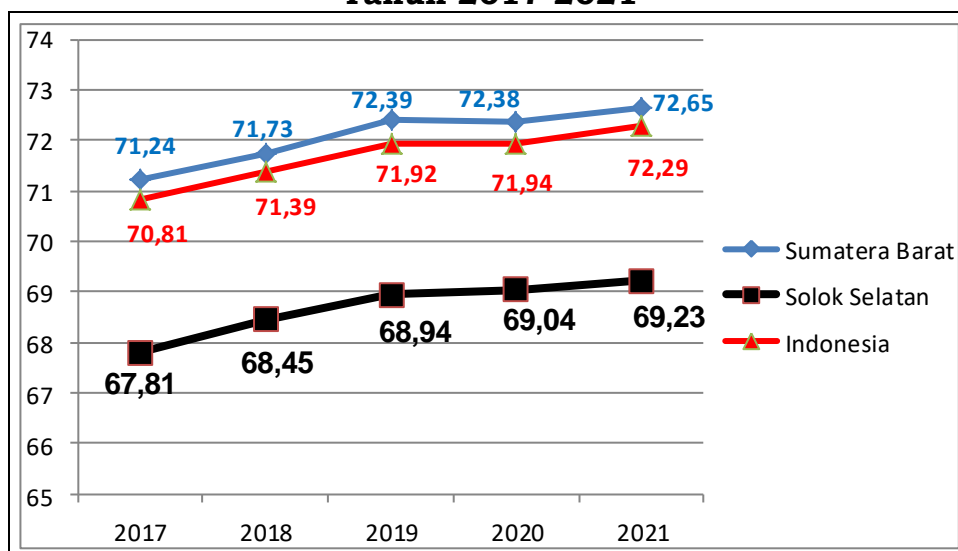
Konsep pembangunan manusia muncul untuk memperbaiki kelemahan konsep pertumbuhan ekonomi karena selain memperhitungkan aspek pendapatan juga memperhitungkan aspek kesehatan dan pendidikan. Dalam konsep ini, manusia dipandang sebagai kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan hanya alat dari pembangunan dan didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan serta merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia suatu daerah.

Jika dilihat dari perkembangan Indeks pembangunan Manusia selama tahun 2017-2021 dapat dilihat bahwa IPM Kabupaten Solok Selatan menunjukkan trend peningkatan dari tahun ketahun yaitu dari 67,81 pada tahun 2017 menjadi 69,23 pada tahun 2021. Meskipun mengalami peningkatan dari tahun ketahun namun angkanya masih dibawah IPM provinsi yaitu 72,65 dan Nasional yaitu 72,29 pada tahun 2021. Angka IPM Kabupaten Solok Selatan di Provinsi Sumatera Barat berada pada rangking 15

berada diatas Kabupaten Sijunjung, Pasaman Barat, Pasaman dan Kepulauan Mentawai.

**Gambar 2.13.**  
**Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**  
**Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional**  
**Tahun 2017-2021**



Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditujukan untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu:

### 1. Dimensi Pendidikan

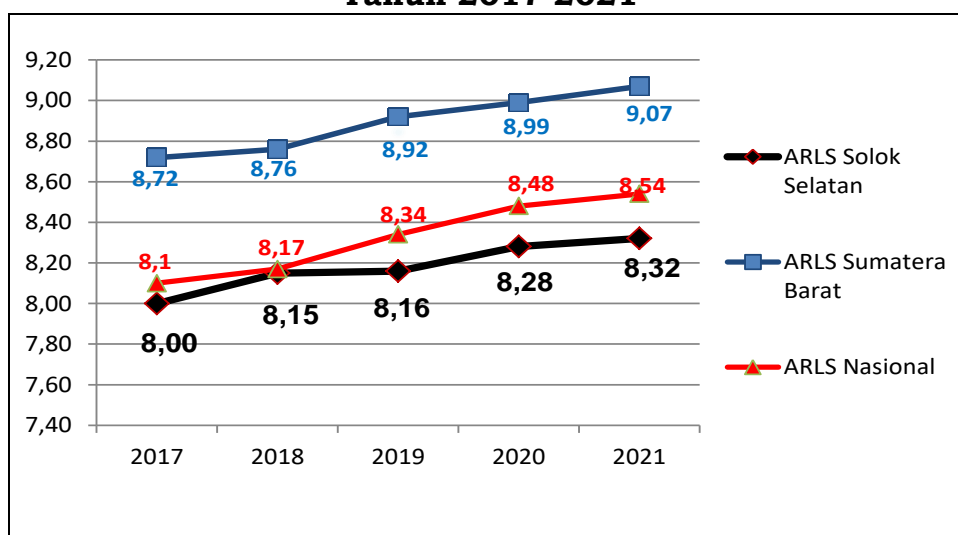
Pada dimensi pendidikan perhitungan indikator Indek Pembangunan Manusia dilihat 2 (dua) indikator yaitu Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah. Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani, sedangkan Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) atau lamanya sekolah yang diharapkan dan dirasakan oleh anak yang berusia 7 tahun keatas yang akan bersekolah dan menamatkan sekolah dimasa mendatang.

Jika dilihat dari perkembangan ARLS, terjadi peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Solok Selatan yaitu dari 8,00 tahun pada tahun 2017 menjadi 8,32 tahun pada tahun 2020. ARLS Kabupaten Solok Selatan sebesar 8,32 tahun dapat diartikan rata-rata pendidikan penduduk usia 25 tahun keatas menamatkan pendidikan setara kelas 2-3 SMP. Meskipun terus mengalami peningkatan namun ARLS penduduk Kabupaten Solok Selatan masih berada dibawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Lambatnya peningkatan rata-rata lama



sekolah antara lain disebabkan rendahnya tingkat pendidikan penduduk usia diatas 45 tahun serta relatif banyaknya penduduk yang telah menamatkan pendidikan tinggi maupun Sekolah Menengah Atas (SLTA/SMK/MA) yang cenderung mencari pekerjaan atau melanjutkan sekolah diluar Kabupaten Solok Selatan.

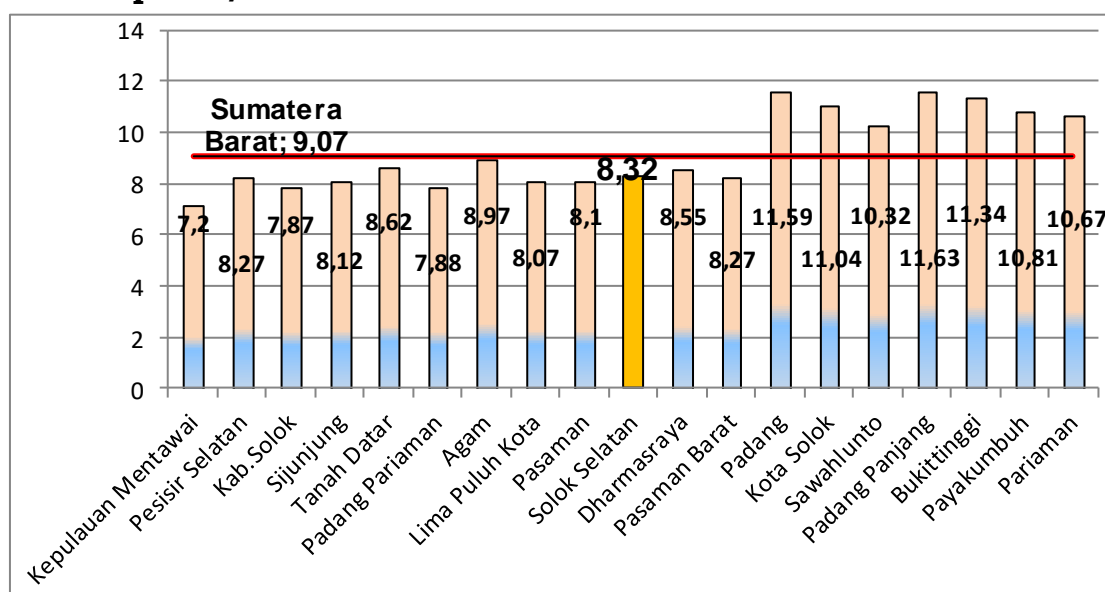
**Gambar 2.14.**  
**Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah**  
**Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional**  
**Tahun 2017-2021**



Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat ARLS Kabupaten Solok Selatan berada pada peringkat 11 yaitu dibawah rata-rata Kota di Sumatera Barat dan dibawah Kabupaten Agam, Tanah Datar dan Dharmasraya.

**Gambar 2.15.**  
**Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah**  
**Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021**

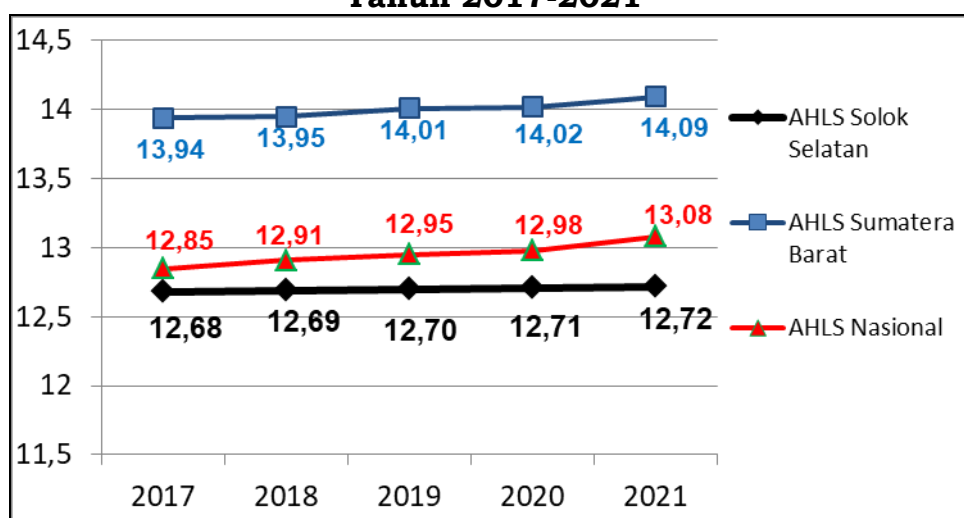


Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

Sedangkan untuk AHLS juga terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun yaitu dari 12,68 tahun pada tahun 2017 menjadi 12,72 tahun

pada tahun. Ini berarti rata rata harapan lama sekolah penduduk yang akan masuk sekolah (usia 7 tahun) diprediksi bersekolah sampai tingkat SMA-D1. Meskipun terus mengalami peningkatan, namun AHLS penduduk Kabupaten Solok Selatan masih berada dibawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat yaitu 14,09 tahun dan Nasional yaitu 13,08 tahun. Hal ini diikuti oleh rendahnya peningkatan AHLS penduduk Kabupaten Solok Selatan yang hanya berkisar 0,01 pertahun, lebih rendah dari peningkatan AHLS Provinsi yaitu 0,38 pertahun dan Nasional sebesar 0,58 pertahun

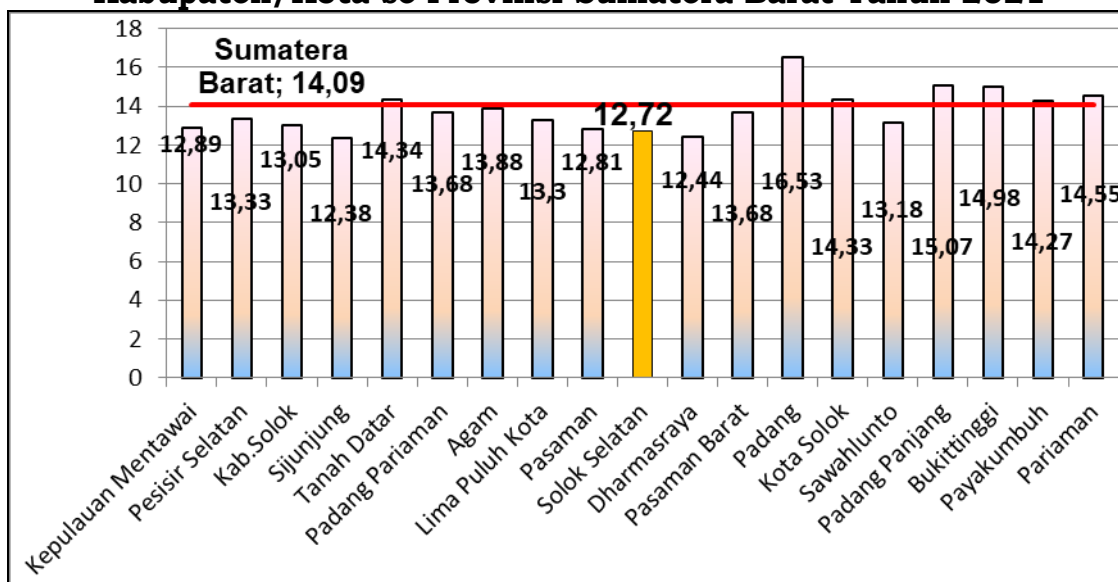
**Gambar 2.16.**  
**Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah**  
**Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional**  
**Tahun 2017-2021**



Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat AHLS Kabupaten Solok Selatan berada pada peringkat 17 yaitu diatas Kabupaten Dharmasraya dan Sijunjung.

**Gambar 2.17.**  
**Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah**  
**Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021**



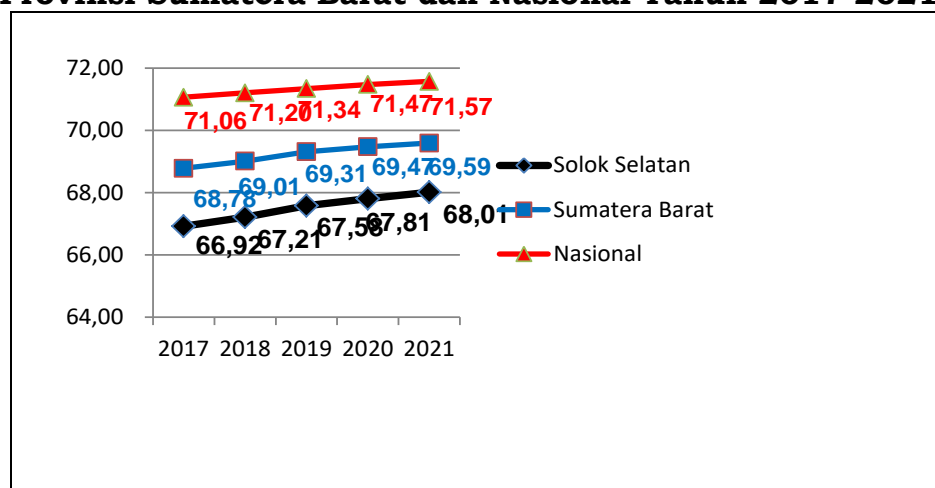
Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

## 2. Dimensi Kesehatan

Pada dimensi kesehatan perhitungan indikator Indek Pembangunan Manusia dilihat indikator Umur Harapan Hidup. Umur Harapan Hidup merupakan indikator kesehatan yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat. Umur Harapan Hidup (UHH) adalah rata-rata usia tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu di suatu daerah. Dilihat dari perkembangan UHH penduduk Kabupaten Solok Selatan pada periode tahun 2017-2021 terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Pada tahun 2017 adalah 66,92 tahun dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2021 menjadi 68,01 tahun. Jika dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional UHH penduduk Kabupaten Solok Selatan masih berada dibawah rata-rata Provinsi dan Nasional, namun jika dilihat peningkatan pertahun peningkatan UHH Kabupaten Solok Selatan sebesar 0,27 tahun berada diatas rata-rata peningkatan Provinsi yaitu 0,20 tahun dan Nasional 0,13 tahun.

**Gambar 2.18.**

### **Pembandingan Umur Harapan Hidup Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2021**

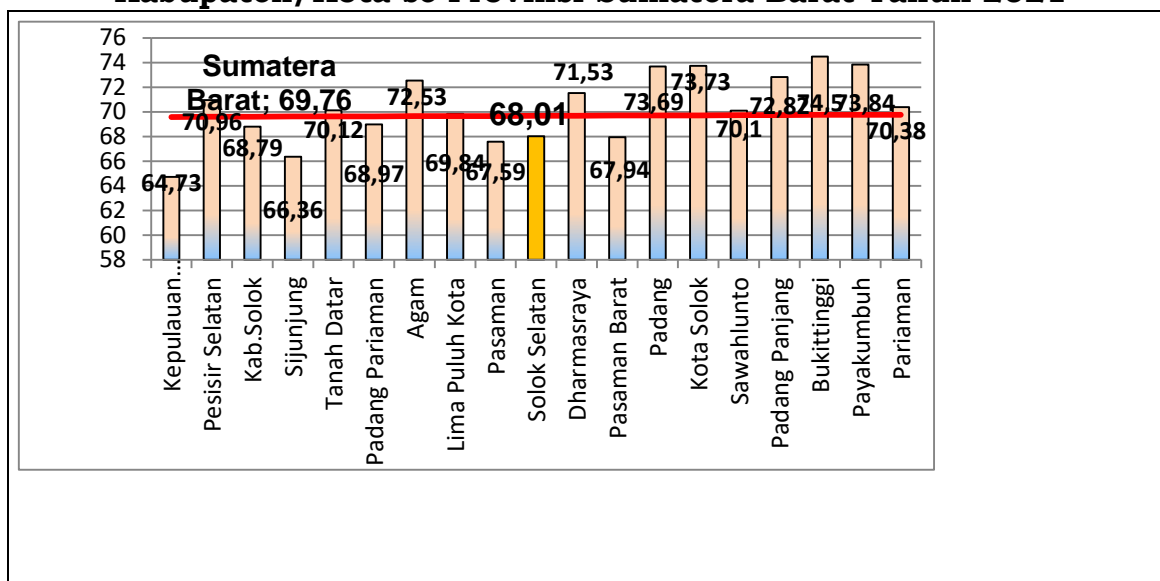


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat UHH Kabupaten Solok Selatan berada pada peringkat 15 yaitu diatas Kabupaten Pasaman Barat, Pasaman, Sijunjung dan Mentawai.

Gambar 2.19.

**Perbandingan Umur Harapan Hidup  
Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021**



Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

### 3. Dimensi Kehidupan Layak

Pada dimensi kehidupan yang layak perhitungan indikator Indeks Pembangunan Manusia dilihat indikator Pengeluaran perkapita penduduk yang disesuaikan. Pengeluaran konsumsi perkapita disesuaikan penduduk merupakan indikator ekonomi yang digunakan untuk melihat rata-rata kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan menggambarkan berapa rata-rata daya beli masyarakat atau rata-rata kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa.

Jika dilihat dari pertumbuhan rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan penduduk Kabupaten Solok Selatan dari tahun 2017-2019 terjadi peningkatan yang cukup tinggi yaitu dari Rp. 9.891.000,- pertahun (rata-rata Rp.824.250 per bulan) pada tahun 2017 menjadi Rp. 10.505.000,- (rata-rata Rp. 875.417 per bulan) pada tahun 2019. Namun tahun 2020 sedikit mengalami penurunan menjadi Rp.10.325.000 (rata-rata Rp. 860.417 per bulan). Penurunan ini merupakan dampak dari kebijakan yang diambil pemerintah dalam mengatasi Pandemi Covid 19 yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar yang mengakibatkan terbatasnya akses masyarakat untuk melakukan aktifitas perekonomian. Seiring dengan meningkatnya aktifitas perekonomian akibat kebijakan pelonggaran pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar serta beberapa kebijakan ekonomi dan sosial yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah pada tahun 2021

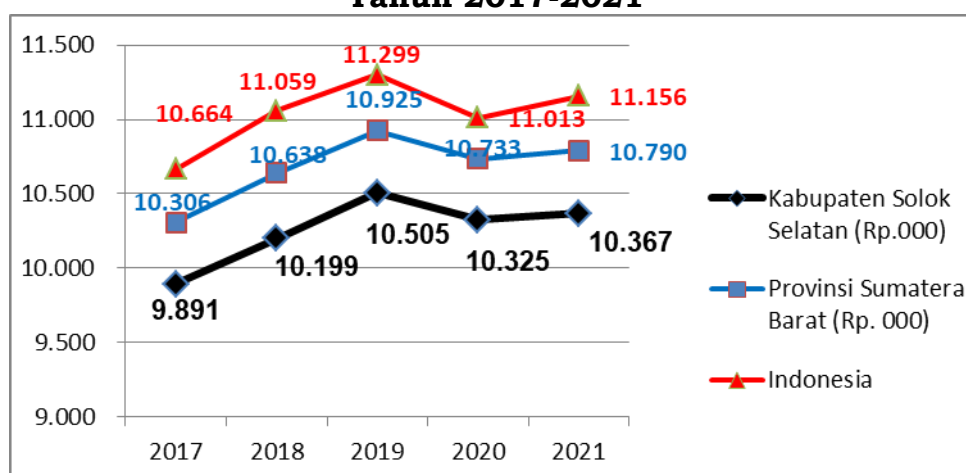


pengeluaran perkapita masyarakat kembali mengalami sedikit peningkatan menjadi Rp.10.367.000 (rata-rata Rp. 863.917) per bulan.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, Pengeluaran perkapita penduduk Kabupaten Solok Selatan tahun 2017-2021 masih berada dibawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dengan jarak deviasi semakin melebar yaitu dari Rp. 415.000,- pada tahun 2017 menjadi Rp. 423.000,- Tahun 2021 dengan Provinsi dan dari Rp. 358.000,- pada tahun 2017 menjadi Rp. 366.000,- Tahun 2021 dengan Nasional.

**Gambar 2.20.**

**Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Penduduk Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2021**

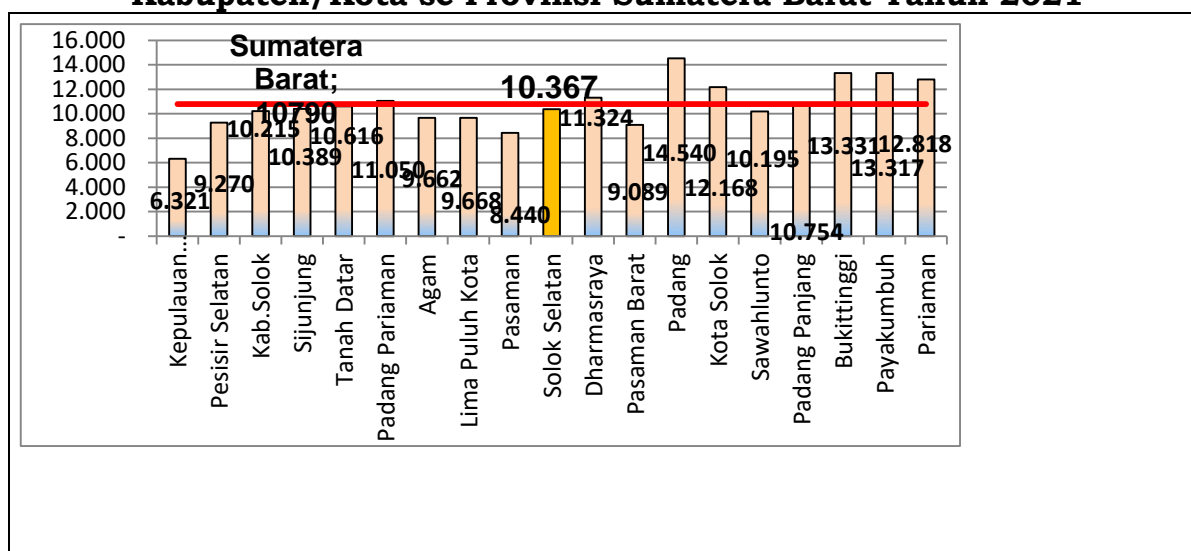


Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat pengeluaran perkapita Kabupaten Solok Selatan berada pada peringkat 12 dibawah rata-rata Kota di Sumatera Barat dan dibawah Kabupaten Sijunjung, Tanah Datar, Padang Pariaman, Dharmasraya.

**Gambar 2.21.**

**Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Penduduk Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021**



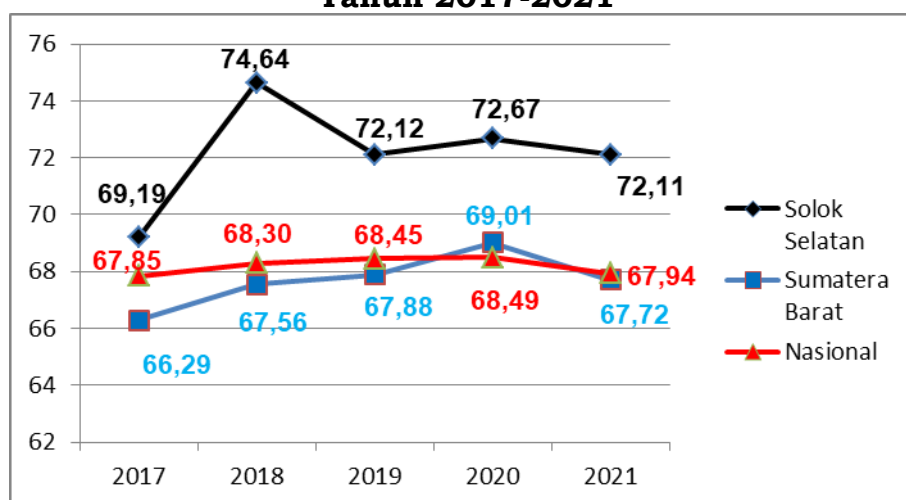
Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

## B. Ketenagakerjaan

Salah satu Aspek ketenagakerjaan dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK merupakan persentase angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK menunjukkan keterlibatan penduduk dalam kegiatan-kegiatan ekonomi berdasarkan proporsi penduduk yang masuk dalam pasar kerja.

Dilihat dari perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Solok Selatan selama periode tahun 2017-2021 berfluktuasi dari tahun ketahun. Meskipun pada periode tahun 2017-2018 mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu dari 69,19% pada tahun 2017 menjadi 74,64% pada tahun 2018. Namun pada periode 2019-2021 cenderung mengalami penurunan meskipun sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 72,11% pada tahun 2021. Penurunan ini seiring dengan meningkatnya kesadaran penduduk untuk melanjutkan pendidikan

**Gambar 2.22.**  
**Pembandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**  
**Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional**  
**Tahun 2017-2021**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan

## G. Angka Kriminalitas

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga angka kriminalitas dapat diminimalisir.

Untuk melihat tingkat keamanan masyarakat maka dapat dilihat dari perkembangan angka kriminalitas. Jika dilihat dari perkembangan angka kriminalitas di Kabupaten Solok Selatan dari tahun 2017-2021 mengalami

penurunan yaitu dari 28,67 per 10.000 penduduk pada tahun 2017 menjadi 11,79 per 10.000 penduduk pada tahun 2021. Penurunan ini seiring dengan menurun kasus kriminalitas dari 528 kasus menjadi 218 kasus.

Penurunan angka kriminalitas dapat diartikan tingkat keamanan masyarakat di Kabupaten Solok Selatan semakin meningkat seiring dengan menurunnya angka kriminalitas di Kabupaten Solok Selatan.

**Tabel 2.18.**

**Perkembangan Jumlah Kasus dan Kasus yang terselesaikan dan Angka Kriminalitas Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021**

No	Uraian	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Kasus Kriminal ditangani	528	458	443	342	218
2.	Persentase Kasus yang Terselesaikan	64,77	50,65	68,39	100	49,54
3.	Angka Kriminalitas (per 10.000 penduduk)	29,67	25,31	24,32	18,69	11,79

*Sumber: BPS dan Kantor Kesbangpol Kabupaten Solok Selatan*

### 2.1.2.3. Fokus Seni dan Budaya

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Dilihat dari ketersediaan dan pelaku seni budaya dan olahraga periode tahun 2017-2021 tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini disebabkan masih rendahnya sisi pengelolaan baik group kesenian maupun klub olahraga sebahagian besar belum dikelola secara profesional sehingga sering tumbuh, hilang dan berganti. Sedangkan untuk ketersediaan Gedung Kesenian masih belum ada karena sampai tahun 2021 Kabupaten Solok Selatan belum memiliki Gedung Kesenian, namun untuk penyelenggaraan festival seni dan budaya diselenggarakan di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Muaralabuh, Ruang Terbuka Hijau (RTH) Padang Aro, Balai Adat Koto Baru dan Kawasan Saribu Rumah Gadang. Sedangkan untuk ketersediaan sarana olahraga terus mengalami peningkatan yaitu dari 0,51% pada tahun 2017 mejadi 3,89% pada tahun 2021, Meskipun mengalami peningkatan namun sebahagian besar tidak permanen dan dikelola oleh kelompok masyarakat dan nagari sehingga pengelolaannya belum optimal.

**Tabel 2.19.**  
**Perkembangan Indikator Seni Budaya dan Olahraga**  
**Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio Group Kesenian per 10.000 penduduk	5,4	5,3	4,0	5,2	5,1
2	Rasio Gedung Kesenian per 10.000 penduduk	0	0	0	0	0
3	Rasio Klub Olahraga per 10.000 penduduk	7,53	7,41	9,61	9,62	9,52
4	Rasio Gedung/Lapangan Olahraga per 10.000 penduduk	0,51	0,50	0,55	3,94	3,89

Sumber: Dinas Pariwisata & Kebudayaan dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan

### 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

#### 2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

##### A. Urusan Wajib Pendidikan

Pendidikan merupakan aset sosial yang strategis dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia dalam pembangunan. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan bermartabat. Pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kompetensi masyarakat terutama kemampuan memecahkan masalah.

Berikut ini diuraikan gambaran perkembangan indikator kinerja di Urusan Wajib Pendidikan Kabupaten Solok Selatan tahun 2017-2021:

##### 1) Pendidikan Anak Usia Dini (TK/PAUD)

Jika dilihat kinerja jenjang pendidikan TK/PAUD pada periode 2017-2019, terjadi penurunan Angka Partisipasi Kasar TK/PAUD dari 68,13 pada tahun 2017 menjadi 47,42% pada tahun 2019. Namun periode 2020-2021 kembali mengalami peningkatan hingga menjadi 79,25.. Masih rendahnya APK TK/PAUD ini disebabkan karena masih rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan TK/PAUD yang dapat dilihat dari rasio ketersediaan sekolah per 10.000 penduduk usia sekolah masih berada pada angka 20,18 Per 10.000 penduduk usia sekolah atau 1 (satu) TK/PAUD melayani 495 penduduk usia sekolah. Hal ini juga diikuti oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada TK/PAUD serta masih terdapatnya anak usia 6 tahun yang sudah bersekolah pada tingkat SD/MI.



**Tabel 2.20.**  
**Perkembangan Indikator Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini**  
**Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021**

No	Uraian	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka Partisipasi Kasar	68,13	52,03	47,42	54,88	79,25
2	Rasio Ketersediaan Sekolah (Per 10000 penduduk usia Sekolah)	15,25	18,73	19,42	20,45	20,18
3	Rasio Ketersediaan Ruang Kelas (Jumlah murid Per Ruang Kelas)	18,55	16,95	16,95	13,97	15,04
4	Rasio Guru Per Murid (Per 1000 siswa)	1:15	1:15	1:10	1:10	1:12

Sumber: BPS dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan

## 2) Pendidikan Dasar (SD/MI/Paket A)

Untuk pelayanan Pendidikan Dasar di Kabupaten Solok Selatan pada periode tahun 2017-2021 terus mengalami perbaikan dari tahun ketahun. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja pendidikan yang terus mengalami peningkatan seperti Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni, Angka Partisipasi Sekolah, Angka Putus Sekolah, Angka Kelulusan dan Angka Melanjutkan.

Disisi dari ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan cukup baik hal ini dapat dilihat dari Rasio Ketersediaan Sekolah per 10.000 penduduk usia sekolah yaitu 1 sekolah melayani 120-121 penduduk usia sekolah serta Rasio Ketersediaan Ruang Kelas 1 ruang kelas:18-19 siswa. Disisi ketersediaan tenaga pengajar terdapat kenaikan Rasio Guru per murid dari 68,23 per 1000 siswa pada tahun 2017 menjadi 89,45 per 1000 siswa pada tahun 2021. Peningkatan ini diiringi oleh peningkatan kualitas yang dapat dilihat dari Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV yaitu 92,68% pada tahun 2021. Namun disisi ketersediaan sarana dan prasarana yang layak masih terdapat ruang kelas yang berkondisi rusak sedang dan berat yaitu 13,14% rusak sedang dan 1,45% rusak berat.

**Tabel 2.21.**  
**Perkembangan Indikator Pelayanan Pendidikan Dasar**  
**Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021**

No	Uraian	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka Partisipasi Kasar (APK)	116,30	117,50	117,47	115,50	115,41
2	Angka Partisipasi Murni (APM)	99,46	99,46	99,10	99,20	99,08
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	99,46	100	99,10	99,42	99,08
5	Angka Kelulusan (AL)	100	100	100	100	100
6	Rasio Ketersediaan Sekolah (Per 10000 penduduk usia Sekolah)	77,86	73,14	78,16	80,59	83,15
7	Rasio Ketersediaan Ruang Kelas (Jumlah murid Per Ruang Kelas)	18,94	19,18	19,12	14,65	18,04
8	Rasio Guru Per Murid (Per 1000 siswa)	68,23	68,23	64,44	62,46	89,45
9	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	82,41	91,26	91,40	91,94	92,68

Sumber: BPS dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan

### 3) Pendidikan Menengah Pertama (SMP/MTs/Paket B)

Untuk pelayanan Pendidikan Menengah Pertama di Kabupaten Solok Selatan pada periode tahun 2017-2021 cenderung mengalami perbaikan meskipun terdapat beberapa indikator seperti Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni dan Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV yang sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020

Disisi dari ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan cukup baik hal ini dapat dilihat dari Rasio Ketersediaan Sekolah per 10.000 penduduk usia sekolah yaitu 1 sekolah melayani 194-195 penduduk usia sekolah serta Rasio Ketersediaan Ruang Kelas 1 ruang kelas 21-22 siswa.. Disisi ketersediaan tenaga pengajar meskipun mengalami peningkatan pada tahun 2020 yaitu 73,13 per 1000 siswa menjadi 89,45 per 1000 siswa pada tahun 2021 namun disisi kualitas yang dapat dilihat dari Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV cenderung mengalami penurunan dari 95,54% pada tahun 2020 menjadi 92,68% pada tahun 2021. Sedangkan untuk ketersediaan sarana dan prasarana belajar/ruang kelas masih terdapat 9,23% ruang kelas berondisi rusak sedang.

**Tabel 2.22.**

**Perkembangan Indikator Pelayanan Pendidikan Menengah Pertama Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021**

No	Uraian	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka Partisipasi Kasar (APK)	81.84	84.02	87.34	90,33	89,26
2	Angka Partisipasi Murni (APM)	76.32	74.36	77.44	76,90	76.32
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	99.25	97,91	97.27	96,75	97,52
4	Angka Kelulusan (AL)	100	99,07	100	100	100
7	Rasio Ketersediaan Sekolah (Per 10000 penduduk usia Sekolah)	58,80	59,11	50,50	50,50	51,49
8	Rasio Ketersediaan Ruang Kelas (Jumlah murid Per Ruang Kelas)	20,38	20,75	24,08	18,79	21,43
9	Rasio Guru Per Murid (Per 1000 siswa)	62,54	43,47	77,83	73,13	89,45
10	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	87,86	95,35	95,80	95,54	92,68

Sumber: BPS dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan

### 4) Pendidikan Menengah Atas (SMA/SMK/MA/Paket C)

Untuk pelayanan Pendidikan Menengah Atas di Kabupaten Solok Selatan pada periode tahun 2020-2021 cenderung mengalami penurunan yang dapat dilihat dari hanya indikator Angka Partisipasi Kasar yang mengalami peningkatan dari 79,71% menjadi 83,57%.

Disisi dari ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan cukup baik hal ini dapat dilihat dari Rasio Ketersediaan Sekolah per 10.000 penduduk usia sekolah yaitu 1 sekolah melayani 420-421 penduduk usia sekolah serta Rasio Ketersediaan Ruang Kelas 1 ruang kelas 18,79 siswa..

Disisi ketersediaan tenaga pengajar pada tahun 2021 yaitu 70,53 per 1000 siswa dengan Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV sebesar 97,40%

**Tabel 2.23.**  
**Perkembangan Indikator Pelayanan Pendidikan Menengah Atas Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021**

No	Uraian	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka Partisipasi Kasar (APK)	70,10	73,32	78,87	79,71	83,57
2	Angka Partisipasi Murni (APM)	67,31	64,54	63,82	64,30	63,53
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	73,46	75,50	76,33	76,33	75,94
5	Angka Kelulusan (AL)	100	100	100	100	100
6	Rasio Ketersediaan Sekolah (Per 10.000 penduduk usia Sekolah)	26,80	26,47	20,94	23,79	23,79
7	Rasio Ketersediaan Ruang Kelas (Jumlah murid Per Ruang Kelas)	28,43	24,77	23,16	18,79	18,79
8	Rasio Guru Per Murid (Per 1000 siswa)	75,01	63,29	67,93	70,53	70,53
9	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	95,83	97,75	97,40	97,40	97,40

Sumber: BPS dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan

## **B. Urusan Wajib Kesehatan**

Pelayanan kesehatan merupakan pelayan dasar yang harus diperoleh oleh seluruh masyarakat, peningkatan kuantitas dan kualitas dari sarana dan pelayanan masyarakat sangat menentukan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Gambaran kinerja pelayanan Urusan Wajib Kesehatan Kabupaten Solok Selatan tahun 2017-2021 diuraikan sebagai berikut:

### **1) Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA) dan Angka Kematian Ibu (AKI).**

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0-1 Tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun. Angka Kematian Balita adalah jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun (0-59 Bulan) yang dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Balita mempresentasikan resiko terjadinya kematian pada fase antara kelahiran dan sebelum umur 5 tahun. Sedangkan Angka Kematian Ibu (AKI) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian ibu hamil, melahirkan sampai nifas per 100.000 kelahiran hidup. AKB dan AKI merupakan tolak ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Dilihat dari perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA) dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2017-2020 cenderung berfluktuasi namun cenderung

mengalami peningkatan yaitu dari 6,46 per 1000 kelahiran hidup menjadi 7,92 per 1000 kelahiran hidup untuk AKB, 7,04 per 1000 kelahiran hidup menjadi 4,2 per 1000 kelahiran hidup untuk AKBA dan 88,03 per 100.000 kelahiran hidup menjadi 198,08 per 100.000 kelahiran hidup untuk AKI. Namun pada tahun 2021 AKB dan AKBA kembali mengalami penurunan menjadi 4,2 per 1000 kelahiran hidup. Sedangkan untuk AKI terus mengalami kenaikan menjadi 242 per 100.000 kelahiran hidup.

Sedangkan untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak pada tahun 2021 meskipun terdapat beberapa indikator yang mengalami peningkatan seperti Cakupan kompilasi kebidanan yang ditangani, Cakupan pelayanan nifas, Cakupan neonates dengan komplikasi yang ditangani, Cakupan balita pneumonia yang ditangani namun terdapat beberapa indikator pelayanan yang mengalami penurunan yaitu Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, Cakupan imunisasi lengkap bayi, Cakupan kunjungan Ibu hamil K4, Cakupan kunjungan bayi, Cakupan pelayanan anak balita. Meskipun terdapat beberapa indikator yang mengalami peningkatan namun jika dilihat secara menyeluruh dapat disimpulkan bahwa cakupan pelayanan kesehatan Ibu dan balita di Solok Selatan relative rendah. Hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran orang tua dalam memeriksakan kesehatan ke pelayanan kesehatan, rendahnya aksesibilitas masyarakat kesarana kesehatan dan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk penanganan Pandemic Covid 19 mengakibatkan terbatasnya akses ke sarana kesehatan serta kurang optimalnya pelayanan kesehatan.

**Tabel 2.24.**

**Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) serta Cakupan Layanan Kesehatan Ibu dan Anak Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021**

No	Uraian	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran hidup	6,46	4,76	3,17	7,92	4,2
2	Angka Kematian Balita (AKBA) per 1.000 Kelahiran hidup	7,04	5,1	3,5	8,56	4,2
3	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran hidup	88,03	254,04	126,86	198,08	242
4	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	75,16	79,00	77,8	73	68,1
5	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	46,2	46,1	16,0	41,3	65,8
6	Cakupan imunisasi lengkap bayi (%)	97,21	96,7	95,7	74,2	70,1

No	Uraian	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
7	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)	82,7	78,3	76,0	69,5	66,9
8	Cakupan pelayanan nifas (%)	81,7	79,0	78,4	68,4	69
9	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	7,8	8,5	19,0	22,2	24,9
10	Cakupan kunjungan bayi (%)	90,65	91,04	85,3	83,8	75,27
11	Cakupan pelayanan anak balita (%)	72,62	87,79	70,6	85,9	72,54
12	Cakupan balita pneumonia yang ditangani (%)	8,11	10	19,6	4,7	5,6

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan (berdasarkan angka yang dilaporkan)

## 2) Persentase Balita Gizi Buruk, Balita Gizi Kurang dan Balita Stunting

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan keluarga menurut SDG's adalah Status Gizi Balita. Status Gizi Balita dapat diukur berdasarkan tiga perhitungan yaitu 1). Berat Badan menurut Umur, memberikan indikasi masalah gizi secara umum, dapat dilihat melalui indikator Persentase Balita Gizi Buruk, 2). Tinggi Badan menurut Umur, memberikan indikasi masalah gizi yang sifatnya kronis sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung lama, ini dapat dilihat melalui indikator Persentase Balita Stunting dan, 3). Berat Badan menurut Tinggi Badan, memberikan indikasi masalah gizi yang sifatnya akut sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi dalam waktu yang tidak lama, indikator ini dapat dilihat melalui Persentase Balita Gizi Kurang.

Dilihat dari perkembangan persentase balita gizi buruk, Persentase Balita Gizi Kurang, Prevalensi Balita Stunting cenderung mengalami penurunan terutama pada tahun 2021. Pada tahun 2021 persentase balita gizi buruk di Kabupaten Solok Selatan sebesar 0,01%, atau tidak mengalami perubahan dari tahun 2020. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan menurut standar WHO (<1%) maka persentase balita gizi buruk di Kabupaten Solok Selatan masih dibawah standar WHO.

Sedangkan untuk persentase balita gizi kurang dan Prevalensi Balita Stunting meskipun pada tahun 2020 menjadi 6,6% untuk persentase balita gizi kurang dan 13,7% Prevalensi Balita Stunting namun pada tahun 2021 kembali mengalami perbaikan yakni menurun hingga menjadi 3,16% persentase balita gizi kurang dan 6,09% untuk Prevalensi Balita Stunting

Masih terdapatnya Persentase Balita Gizi Buruk, Balita Gizi Kurang dan Balita Stunting di Kabupaten Solok Selatan sebahagian besar disebabkan oleh rendahnya asupan makanan bergizi, rendahnya asupan vitamin dan mineral, dan buruknya keragaman pangan dan sumber protein hewani. Selain itu faktor orang tua dan pola asuh yang kurang baik



terutama pada perilaku dan praktik pemberian makan yang tidak memberikan asupan gizi yang cukup dan baik. Ibu yang masa remajanya kurang nutrisi, bahkan di masa kehamilan, dan laktasi akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan tubuh dan otak anak.

**Tabel 2.25.**  
**Balita Gizi Buruk, Balita Gizi Kurang dan Balita Stunting**  
**Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021**

No	Uraian	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Balita Gizi Buruk	0,03	0,03	0,03	0,01	0,01
2	Persentase Balita Gizi Kurang	0,7	3,55	4,6	6,6	3,16
3	Prevalensi Balita Stunting	14,6	16,46	9,5	13,7	6,09
4	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan

### 3) Kondisi derajat kesehatan masyarakat

Dilihat dari perkembangan indikator kualitas kesehatan di Kabupaten Solok Selatan cenderung mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dapat dilihat penurunan beberapa indikator penyakit menular terbanyak yaitu:

- ❖ Tingkat prevalensi tuberkulosis mengalami peningkatan yang signifikan pada periode 2017-2019 yaitu dari 50,12 per 100.000 penduduk tahun 2017 menjadi 162,5 per 100.000 penduduk tahun 2019, namun kembali mengalami penurunan hingga tahun 2021 menjadi 105,49 per 100.000 penduduk. Meskipun mengalami penurunan namun dilihat dari jumlah kasus mengalami peningkatan dari tahun 2020 yaitu dari 215 kasus menjadi 256 kasus pada tahun 2021. Dilihat dari tingkat kematian Tingkat kematian karena Tuberkulosis meskipun mengalami keaikan pada tahun 2020 hingga 3,4 per 100.000 penduduk namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 1,08 per 100.000 penduduk. Menurunnya tingkat kematian ini siring dengan meningkatnya Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS dari 83,4% menjadi 92,3% pada tahun 2021
- ❖ Tingkat prevalensi DBD periode 2017-2021 terus mengalami penurunan yaitu dari 60,22 per 100.000 penduduk menjadi 7,0 per 100.000 penduduk.
- ❖ Tingkat Prevalensi Diare penduduk periode tahun 2017-2021 meskipun mengalami peningkatan hingga tahun 2019 menjadi 22,49 per 1000 penduduk namun kembali mengalami penurunan menjadi 13,17 per 1000 penduduk pada tahun 2021.

- ❖ Tingkat Prevalensi HIV/AIDS penduduk di Kabupaten Solok Selatan periode 2017-2021 berfluktuasi dengan tingkat prevalensi tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu 0,0059%. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2019 namun pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 0,0034% dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 0,0005%.

**Tabel 2.26.**  
**Perkembangan Kesehatan Masyarakat**  
**Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	50,12	155,57	162,5	121,57	105,49
2.	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	1,21	2,7	1,75	3,4	1,08
3.	Prevalensi DBD(per 100.000 penduduk)	60,22	61,2	43,25	16,47	7,0
4.	Prevalensi Diare (per 1000 penduduk)	18,92	18,9	22,49	17,49	13,17
5.	Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi (persen)	0,0012	0,0059	0,0029	0,0034	0,0005
6.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	100	100	100	100	100
7.	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	96,38	93,2	89,5	83,4	92,3
8.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan.

#### 4) Perkembangan Indikator Pelayanan Kesehatan

Untuk melihat ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Solok Selatan dapat dilihat dari beberapa indikator ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yaitu:

- ❖ Rasio jumlah posyandu per satuan balita (per 1000 balita) dari tahun 2017-2021 mengalami peningkatan yaitu dari 15,3 per 1000 balita pada tahun 2017 menjadi 20,50 per 1000 balita pada tahun 2021. Jika dibandingkan dengan rasio ideal pelayanan 1 unit posyandu melayani balita adalah antara 75–100 balita (10,0-13,3 per 1000 balita), maka cakupan pelayanan posyandu Kabupaten Solok Selatan masih diatas rasio ideal yaitu 1 unit posyandu melayani 48-49 balita. Peningkatan rasio posyandu diikuti oleh peningkatan kualitas pelayanan yaitu persentase Posyandu Mandiri (Posyandu yang melaksanakan kegiatan minimal 8 kali dalam setahun, mempunyai kader 5 orang dan cakupan kegiatan utamanya lebih dari 50%) yaitu 40,8% pada tahun 2020 menjadi 79,25% pada tahun 2021.
- ❖ Rasio jumlah puskesmas untuk per satuan penduduk di Kabupaten Solok Selatan dari tahun 2017-2020 mengalami kenaikan yaitu dari

0,054 per 1000 penduduk tahun 2017 menjadi 0,057 per 1000 penduduk pada tahun 2020, namun pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk yaitu menjadi 0,054 per 1000 penduduk atau 1 puskesmas melayani 18.485 penduduk (dengan standar rasio 1 puskesmas per 16.000 penduduk). Dilihat dari cakupan pelayanan puskesmas per kecamatan terjadi juga peningkatan yakni dari 114,28% pada tahun 2017 (8 Puskesmas) menjadi 142,85% pada tahun 2021 (10 Puskesmas) ( dengan standar rasio 1 puskesmas per 1 kecamatan). Dengan rasio puskesmas untuk per satuan penduduk dan cakupan pelayanan puskesmas dapat disimpulkan bahwa kebutuhan sarana pelayanan kesehatan setingkat puskesmas sudah mencukupi dengan standar rasio 1 puskesmas per 16.000 penduduk, dan untuk cakupan 1 puskesmas per 1 kecamatan. Sedangkan untuk cakupan pelayanan puskesmas pembantu meskipun mengalami penurunan sebagai akibat terjadinya pemekaran nagari menjadi 47 Nagari namun jumlahnya masih diatas standar pelayanannya 1 per desa (nagari) yaitu 108,51% (51 Puskesmas Pembantu).

- ❖ Rasio tenaga medis (dokter) dan paramedis (perawat, bidan) per 1000 penduduk secara umum belum terpenuhi yang tersebar Puskesmas, Pustu dan Poskesdes. Pada tahun 2021 Rasio dokter di Puskesmas dan jaringannya sebesar 0,15 per 1000 penduduk / 1 dokter melayani 5.883 penduduk masih dibawah standar (standar 0,4 per 1000 penduduk/ 1 dokter : 2500 penduduk). Sementara itu untuk rasio tenaga paramedis yang terdiri dari perawat dan bidan baru mencapai 2,51 per 1000 penduduk atau 1 tenaga medis melayani 398 penduduk.
- ❖ Selama periode 2017-2021 pelayanan RSUD Kabupaten Solok Selatan belum optimal disebabkan standar pelayanan RSUD baru akreditasi C dengan Rasio Ketersediaan Rumah Sakit adalah 0,0055 per 1000 penduduk. Untuk capaian *Bed Occupancy Rate/BOR* (persentase pemakaian tempat tidur pada satu-satuan waktu tertentu) pada periode tahun 2019- 2021 cenderung mengalami penurunan yaitu dari 45,1% pada tahun 2019 menjadi 39,58% pada tahun 2021. Meskipun BOR mengalami penurunan namun terjadi peningkatan *Gross Death Rate/GDR* (angka kematian umum) dari 15,4 per 1000 pasien keluar pada tahun 2019 menjadi 36,8 per 1000 pasien keluar pada tahun 2021. Peningkatan *Gross Death Rate/GDR* diikuti oleh penurunan Net

Death Rate/NDR (angka kematian  $\geq$  48 jam setelah dirawat) yang pada tahun dari 18,6 per 1000 pasien keluar pada tahun 2019 menjadi 21,28 per 1000 pasien keluar pada tahun 2021.

- ❖ Sedangkan untuk cakupan pelayanan dasar melalui Program Jamkesmas dan Jamkesda pada tahun 2017-2020 cenderung mengalami penurunan yaitu dari 54,9% menjadi 47,3%. Penurunan ini seiring dengan kebijakan BPJS untuk meningkatkan iuran asuransi kesehatan serta penurunan sharing pendanaan dari provinsi dari 40% menjadi 30%, namun pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan menjadi 56,59% seiring dengan meningkatnya pendanaan sharing dari pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Dilihat dari kepesertaan penduduk Kabupaten Solok Selatan dalam Jaminan Kesehatan Nasional sudah berada pada angka 85,17% dengan total penduduk 154.714 jiwa.

**Tabel 2.27.**  
**Perkembangan Indikator Pelayanan Kesehatan**  
**Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2020
1.	Rasio posyandu per 1000 balita	15,3	16,1	15,74	16,5	20,50
2.	Persentase Posyandu Mandiri	58,21	59,1	56,6	40,8	79,25
3.	Rasio puskesmas per 1000 penduduk	0,054	0,053	0,053	0,057	0,54
4.	Rasio puskesmas pembantu per 1000 penduduk	0,29	0,29	0,29	0,29	0,28
5.	Cakupan puskesmas	114,28	114,28	128,57	142,85	142,85
6.	Cakupan puskesmas pembantu	125,64	130,77	130,77	108,51	108,51
7.	Rasio dokter per 1000 penduduk di Puskesmas dan jaringannya	0,21	0,1	0,18	0,12	0,15
8.	Rasio tenaga medis per 1000 penduduk Puskesmas dan jaringannya	2,58	2,27	2,0	1,66	2,51
9.	Rasio Rumah Sakit per 1000 penduduk	0,0060	0,0059	0,0058	0,0057	0,0055
10.	Gross Death Rate (per 1000 pasien keluar)	18,04	12,7	15,4	19,2	36,8
11.	Net Death Rate (per 1000 pasien keluar)	11,38	18,0	18,6	16	21,8
12.	Bed Occupancy Rate (BOR)	52,66	55,5	45,1	45,7	39,58
13.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	100	100	70,2	26,24
14.	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	97,92	97,31	97,5	87,2	95,7
15.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar melalui jamkesda dan jamkesmas	54,9	54,2	58,20	47,3	57,59

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan

### C. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Ketersediaan infrastruktur yang layak dan memadai merupakan aspek dasar yang diperlukan dalam proses pembangunan. Gambaran kinerja pelayanan sub Urusan Wajib Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan tahun 2017-2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sampai tahun 2021 panjang jalan di Kabupaten Solok Selatan sepanjang 1430,77 km yang terdiri dari 99,2 km jalan Nasional, 153,44 jalan Provinsi, dan 1178,13 km jalan Kabupaten, dengan jumlah ruas jalan kabupaten sebanyak 527 ruas. Sedangkan untuk jembatan, hingga tahun 2021 Kabupaten Solok Selatan memiliki 253 jembatan dengan kondisi baik sebesar 73,91%.

**Tabel 2.28.**  
**Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan Per Kecamatan Tahun 2021**

No	KECAMATAN	Panjang	JENIS PERKERASAN					Tanah
			Aspal HTX	Beton	Burda	Burtu	Telford /Kerikil	
1	Koto Parik Gadang Diateh	129,69	51,55	39,50	-	-	23,27	15,37
2	Sungai Pagu	136,62	58,19	37,78	0,40	-	11,84	28,41
3	Pauh Duo	111,16	42,36	10,43	3,00	-	28,89	26,48
4	Sangir	312,50	62,79	24,72	20,51	-	106,55	97,94
5	Sangir Jujuan	108,44	27,23	12,70	5,60	-	33,30	29,61
6	Sangir Balai Janggo	204,93	8,40	9,95	19,10	-	136,00	31,48
7	Sangir Batang Hari	174,79	4,90	7,56	9,10	-	109,43	43,80
<b>JUMLAH</b>		<b>1.178,13</b>	<b>255,42</b>	<b>142,63</b>	<b>57,71</b>	-	<b>449,28</b>	<b>273,09</b>

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Solok Selatan

**Tabel 2.29.**  
**Panjang dan Kondisi Jalan Kabupaten Menurut Kepemilikannya**

No	Indikator	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
<b>1</b>	<b>Jalan Nasional</b>					
	% Kondisi Baik	31,34	25,02	26,46	20,40	20,40
	% Kondisi Sedang	59,89	51,10	52,09	70,62	70,62
	% Kondisi Rusak Ringan	8,47	19,00	16,28	7,76	7,76
	% Kondisi Rusak Berat	0,30	4,89	5,17	1,22	1,22
<b>2</b>	<b>Jalan Provinsi</b>					
	% Kondisi Baik	7,60	13,24	37,12	30,63	40,45
	% Kondisi Sedang	63,32	60,32	21,62	13,87	11,2
	% Kondisi Rusak Ringan	1,81	2,14	4,32	14,41	31,6
	% Kondisi Rusak Berat	27,27	24,29	36,94	41,08	18,89
<b>3</b>	<b>Jalan Kabupaten</b>					
	% Kondisi Baik	15,54	19,20	19,83	28,89	26,78
	% Kondisi Sedang	16,33	17,22	17,29	30,38	23,28
	% Kondisi Rusak Ringan	49,89	47,20	46,51	22,91	31,05
	% Kondisi Rusak Berat	18,23	16,38	16,37	17,82	18,89

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Solok Selatan



2. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan lainnya di Kabupaten Solok Selatan selama tahun 2020-2021 mengalami peningkatan. Meskipun disisi luas daerah irigasi teknis kabupaten dari 9.613,06 hektar yang berkondisi kondisi baik mengalami penurunan dari 21,36 pada tahun 2020 menjadi 18,69% tahun 2021 namun disisi rasio layanan irigasi (luas daerah irigasi/luas sawah yang terlayani) di Kabupaten Solok Selatan sedikit mengalami peningkatan dari 0,94 menjadi 0,97.
3. Untuk aspek tempat tinggal, diketahui bahwa rumah tinggal yang bersanitasi layak di Kabupaten Solok Selatan mengalami peningkatan selama periode 2017–2021 yaitu dari 39,47% pada tahun 2017 menjadi 59,57% pada tahun 2021. Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi (1) Fasilitas air bersih (2) Pembuangan tinja (3) Pembuangan air limbah.
4. Perkembangan cakupan rumah tangga pengguna air minum layak di Kabupaten Solok Selatan cukup meningkat pada setiap tahunnya. Pada tahun 2017 rumah tangga sudah mengakses air minum layak sudah mencapai 53,40% dan terus meningkat pada tahun 2021 menjadi 81,01%.
5. Dilihat dari Rata-rata Indek kesulitan geografis daerah Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2020-2021 mengalami penurunan dari 29,43 pada tahun 2020 menjadi 28,97 pada tahun 2021. Indek kesulitan geografis merupakan indeks komposit yang disusun menggunakan beberapa dimensi dan indikator kuantitatif untuk menggambarkan tingkat kesulitan geografis desa yang dialami masyarakat desa dalam mengakses layanan dasar (Nilai maksimal 100). Dilihat dari komponen perhitungan indik kesulitan geografis bahwa permasalahan utama Kabupaten Solok Selatan berada pada komponen pelayanan dasar masyarakat dengan rata-rata indik infrastruktur 46,04 dan diikuti oleh aksesibilitas masyarakat, dengan indeks 25,61 serta pelayanan dasar dengan indik 21,65

**Tabel 2.30.**

**Perkembangan Indikator Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap (%)	31,88	37,13	46,17	41,54	41,54
2	Persentase Jembatan dalam kondisi baik (%)	67	70	71,94	78,26	78,26

No	Indikator	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
3	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )	456,13	531,25	543,92	488,73	488,73
4	Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (Ha)	75,32	70,02	45,87	21,36	18,69
5	Luas Irigasi Teknis (Ha)	7.750	7.750	7.750	9.199	9.199
6	Rasio Jaringan Irigasi	0,76	0,76	0,76	0,94	0,97
7	Akses Air Minum Layak (%)	53,40	62,78	69,02	77,04	81,01
8	Akses Sanitasi Layak (%)	39,47	49,38	51,14	59,17	59,57
9	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten	na	na	Na	25	48,44
10	Rata-Rata Indek Kesulitan Geografis	na	na	28,11	29,43	28,97
	a) Pelayanan_Dasar	na	na	13,55	20,75	21,65
	b) Infrastruktur	na	na	47,78	46,77	46,04
	c) Aksesibilitas	na	na	28,21	26,81	25,61

Sumber Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Solok Selatan

#### **D. Urusan Wajib Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Penyelenggaraan urusan perumahan dilaksanakan agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam kondisi yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan. Gambaran kinerja pelayanan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2017-2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam hal penggunaan listrik, jumlah rumah tangga pengguna listrik PLN dan Non PLN selama periode 2017-2019 di Kabupaten Solok Selatan mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2017 persentase rumah tangga yang menggunakan listrik berjumlah 97,69%, dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi sebesar 98,46%. Meskipun sudah 98,46% rumah yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan utama namun masih terdapat 3,89% rumah tangga pengguna listrik non PLN yang pada umumnya menggunakan genset, PLTMH dan Tenaga Surya (panel surya) baik dikelola oleh perorangan atau kelompok masyarakat.
2. Dilihat dari perkembangan rumah tidak layak huni di Kabupaten Solok Selatan tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi. Namun jika dilihat pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan dari 3.458 rumah menjadi 3354 rumah pada tahun 2021
3. Untuk kawasan pemukiman kumuh di Kabupaten Solok Selatan mengalami penurunan yaitu dari 2 lokasi pada tahun 2019 yaitu Kampung Palak dan Kampung Tarandam menjadi 1 lokasi pada tahun 2021 yaitu Kampung Tarandam.

**Tabel 2.31.**  
**Perkembangan Indikator Perumahan dan Kawasan Pemukiman**  
**Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021**

No	Uraian	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Akses Rumah Penerangan utama listrik (%)	97,69	98,36	97,85	96,18	98,46
2.	Rasio Elektrifikasi	97,69	98,36	97,85	99,57	99,63
3.	Rumah Tidak Layak Huni	3.337	2.539	3.384	3.458	3.384
4.	Jumlah Kawasan Pemukiman Kumuh	2	2	2	1	1

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Perumkim & LH

### **E. Urusan Wajib Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Gambaran kinerja pelayanan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan Damkar, Kesbangpol Linmas, dan Badan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021 sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.32.**  
**Perkembangan Kinerja Pelayanan Urusan Ketentraman, Ketertiban**  
**Umum dan Perlindungan Masyarakat**  
**Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	9,78	8,68	8,30	8,49	8,70
2.	Jumlah Linmas	0	0	0	0	0
3.	Persentase Jorong Memiliki Pos Kamling	98,14	97,06	97,45	98,53	98,53
4.	Cakupan Penegakan Perda dan Perkada	77	84,21	100	100	100
5.	Cakupan Patroli Petugas Satpol PP (Siaga Tribun dan Tramas)	0,43	0,57	0,60	0,29	0,35
6.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 di Kabupaten	92,59	94,74	100	100	100
7.	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran (%)	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84
8.	Cakupan layanan WMK	42,86	42,86	42,86	42,86	42,86
9.	Capaian Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (%)	60,00	68,18	64,10	53,85	37,93
10.	Persentase Nagari Tangguh Bencana	53,84	74,36	92,31	92,31	15,38
11.	Persentase Kejadian Bencana yang bisa ditangani sesuai dengan Kapasitas Bencana	100	100	100	100	100
12.	Indek Resiko Bencana Solok Selatan (berdasarkan IRBI)	137.20	137.20	137.20	137.20	137.20
13.	Indeks Ketahanan Daerah	na	na	na	0,30	0.29

Sumber: BPBD dan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Selatan

Data pada tabel diatas menunjukkan beberapa indikator pelayanan aspek ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat mengalami perbaikan yaitu Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk, Persentase Jorong Memiliki Pos Kamling kenaikan ini diikuti oleh kenaikan Cakupan Penegakan Perda dan Perkada dan Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3. Namun untuk Cakupan Patroli Petugas Satpol PP (Siaga Tribun dan Tramas) mengalami penurunan seiring dengan adanya pembatasan

diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Solok Selatan.

Disisi pelayanan kebakaran terjadi penurunan Capaian Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (%) terutama dari tahun 2018-2021 dari 68,18% menjadi 37,93%. Penurunan ini disebabkan karena pengembangan wilayah pemukiman tidak diiringi dengan penambahan infrastruktur yang dapat dilihat dari cakupan layanan WMK sehingga menyebabkan baru 15,84% wilayah Kabupaten Solok Selatan yang terlayani. Sampai tahun 2020 Kabupaten Solok Selatan baru memiliki 3 pos pemadam kebakaran (SPM 7 unit) dengan jumlah mobil pemadam kebakaran 3 unit.

Sedangkan untuk pelayanan penanganan bencana cukup baik meskipun disisi penanganan bencana yaitu kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai dengan kapasitas bencana seluruhnya dapat ditangani dan ditindaklanjuti. Namun disisi Indeks Ketahanan Bencana dari 0,30 menjadi 0,29 (Instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap/Indek Resiko Bencana tetap). Penurunan ini lebih disebabkan karena terjadinya penurunan dari Persentase Nagari Bencana dari 92,31% menjadi 0,29% Nagari yang Tagguh Bencana. Penurunan Nagari Tangguh Bencana ini lebih disebabkan karena perubahan indikator dari perhitungan Nagari Tangguh Bencana yang awalnya hanya kelompok siaga bencana menjadi 20 indikator perhitungan.

Meskipun demikian, jika dilihat dari perkembangan Indeks Resiko Bencana (indeks yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian di wilayah Indonesia) Kabupaten Solok Selatan masih berada pada kategori resiko sedang dengan indeks 137,20.

#### **F. Urusan Sosial**

Dilihat dari jumlah PPKS di Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi setiap tahunnya dengan jumlah tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebanyak 35.449 orang atau mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 111,56%. Peningkatan ini disamping merupakan efek dari bencana Covid 19 juga disebabkan oleh verifikasi dan pendataan untuk meningkatkan kevalidan data PPKS yang dilakukan pemerintah daerah. Meskipun mengalami peningkatan yang cukup tinggi namun diiringi oleh cakupan pelayanan terhadap PPKS yaitu 100%.

Ketersediaan sarana sosial bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan merupakan salah satu pelayanan yang wajib didorong oleh

pemerintah daerah. Sarana sosial seperti panti asuhan hingga tahun 2021 berjumlah 4 unit. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) hingga kini terus diupayakan dengan berbagai cara, salah satunya pemberian bantuan, pendampingan serta pemberian pekerjaan agar menjadi produktif. Gambaran kinerja pelayanan urusan sosial Kabupaten Solok Selatan tahun 2017-2021 dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 2.33.**  
**Perkembangan Kinerja Pelayanan Urusan Sosial**  
**Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah PPKS	25.380	15.193	26.974	16.756	35.449
2	Persentase PPKS yang ditangani	70	75	70,28	57,62	100
3	Ketersediaan Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	2	2	4	4	4
4	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	12,34	56,72	69,3	57,62	100
5	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100	100	100	100	100
6	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Solok Selatan

### 2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

#### A. Urusan Tenaga Kerja

Gambaran kinerja pelayanan Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Solok Selatan tahun 2017-2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dilihat dari perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Solok Selatan selama periode tahun 2017-2021 berfluktuasi dari tahun ketahun. Meskipun pada periode tahun 2017-2018 mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu dari 69,19% pada tahun 2017 menjadi 74,64% pada tahun 2018. Namun pada periode 2019-2021 cenderung mengalami penurunan hingga menjadi 72,11% pada tahun 2021. Disisi tingkat pengangguran meskipun mengalami peningkatan pada tahun 2018 dan 2020 yaitu 5,85% dan 5,62%, namun pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan menjadi 4,84%. Jika dibandingkan perkembangan TPAK dengan Tingkat pengangguran dapat dilihat sejalan yaitu disaat TPAK mengalami kenaikan maka tingkat pengangguran mengalami kenaikan atau sebaliknya. Hal ini terjadi karena penciptaan lapangan pekerjaan dan wirausaha baru tidak sebanding dengan



pertumbuhan angkatan kerja. Sedangkan untuk produktifitas tenaga kerja meskipun mengalami penurunan yang cukup tinggi pada tahun 2020 sebagai akibat kebijakan pemerintah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam penanganan Covid 19 yang membatasi hampir sebahagian besar kegiatan perekonomian baik disisi supply dan demand menyebabkan rata-rata produktifitas tenaga kerja turun menjadi Rp.64,81 juta per tenaga kerja. Namun pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan menjadi Rp.66,25 juta per tenaga kerja seiring dengan membaiknya perekonomian nasional dan daerah.

2. Sedangkan perkembangan tingkat kaptuhan perusahaan terhadap aturan dapat dilihat dari indikator pemenuhan tingkat keselamatan dan persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur dapat dilihat pada periode 2017-2021. Persentase perusahaan yang menerapkan standar keselamatan dan perlindungan cenderung mengalami perubahan yaitu dari 83% pada tahun 2017 dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 57,69%. Rendahnya perusahaan yang menerapkan keselamatan dan perlindungan sesuai dengan standar keselamatan disebabkan karena sebahagian besar perusahaan atau 76,37% merupakan perusahaan milik perseorangan. Sedangkan untuk persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur pada lembaga formal terus mengalami penurunan yaitu dari 3,4% tahun 2017 menjadi 0% tahun 2021 .
3. Untuk penyelesaian sengketa atau perselisihan antara tenaga kerja dengan perusahaan selalu di mediasi oleh pemerintahan daerah melalui forum Tripartit (pemerintah, pengusaha dan perserikatan tenaga kerja) yang ditandai dengan persentase kasus tenaga kerja yang ditangani 100%.

**Tabel 2.34.**  
**Perkembangan Kinerja Pelayanan Urusan Tenaga Kerja**  
**Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	69,19	74,64	72,12	72,67	72,11
	Jumlah angkatan kerja	76.546	78.485	84.899	90.390	91.644
2	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	0,34	11,67	13,22	19,6	0
3	Tingkat pengangguran terbuka	5,54	5,85	4,91	5,62	4,84
4	Jumlah pengangguran	4.240	4.345	4.168	5.085	4.434
5	Produktifitas tenaga kerja terhadap PDRB berdasarkan ADHB (Rp. juta)	66,01	62,07	66,32	64,81	66,25
6	Persentase Perusahaan yang menerapkan standar Keselamatan dan perlindungan	83	72	80	57,69	57,69
7	Persentase kasus tenaga kerja yang ditangani	100	100	100	100	100
8	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja	na	na	na	9,26	9,26

No	Indikator	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
	yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar					

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan

## B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Gambaran kinerja pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Solok Selatan tahun 2017-2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk melihat keberhasilan pembangunan gender di Kabupaten Solok Selatan dapat dilihat dari indikator Indek Pembangunan Gender (IPG). Indek Pembangunan Gender (IPG) bertujuan untuk melihat indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia antara laki-laki dengan perempuan. Dilihat dari selama periode tahun 2017-2021 IPG di Kabupaten Solok Selatan relative baik dan terus mengalami peningkatan yaitu dari 94,54 pada tahun 2017 menjadi 95,14 pada tahun 2021. Peningkatan IPG ini diiringi oleh penurunan Indek Ketimpangan Gender dari 0,819 pada tahun 2017 menjadi 0,795 pada tahun 2020. Meskipun disisi IPG terus mengalami peningkatan namun dilihat peran aktif perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik (Indek Pemberdayaan Gender/IDG) cenderung mengalami penurunan 51,14 pada tahun 2017 menjadi 47,86 pada tahun 2021. Hal ini dapat dilihat rendahnya posisi perempuan dalam jabatan public maupun swasta, keterlibatan perempuan dalam kegiatan politik, anggota DPRD dan kegiatan sosial, ekonomi dan politik lainnya.
2. Dalam konteks ketenagakerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja wanita pada umumnya dipengaruhi oleh perubahan dalam struktur ekonomi yang terjadi dalam proses pembangunan. Jika dilihat perkembangannya pada tahun 2018-2021 partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Solok Selatan berfluktuasi namun cenderung mengalami penurunan. Meskipun mengalami peningkatan pada tahun 2020 dari 57,87% menjadi 59,42%, namun pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan menjadi 58,07%. Pola penurunan dan peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja wanita seperti ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu terkait dengan ketersediaan lapangan kerja baru dan tingginya kecenderungan wanita melanjutkan pendidikan atau menjadi ibu rumah tangga. Peningkatan partisipasi angkatan kerja wanita ini diikuti oleh pertumbuhan partisipasi perempuan di lembaga pemerintah yaitu dari 65,33% pada tahun 2017 menjadi 68,89% pada tahun 2020.

3. Penanganan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Solok Selatan selama periode tahun 2017-2021 berfluktuasi namun pada tahun 2021 seluruh pengaduan perlindungan perempuan dan anak dan tindakan kekerasan mencapai angka 100% (seluruhnya ditangani), dengan jumlah kasus 6 kasus (dengan rasio KDRT 0,032 per 1000 penduduk)

Tabel 2.35.

**Perkembangan Kinerja Pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Indek Pembangunan Gender	94,54	94,92	95,03	95,08	95,14
2	Indek Ketimpangan Gender	0,819	0,794	0,798	0,795	na
3	Indek Pemberdayaan Gender	51,17	51,40	50,23	49,19	47,86
4	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan	54,73	63,37	57,87	59,42	58,07
5	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	65,33	67,08	68,03	68,45	68,89
6	Rasio KDRT (per 1000 penduduk)	0,054	0,052	0,054	0,021	0,032
7	Persentase pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan yang ditangani	100	89	89,5	89,7	100

Sumber: BPS dan Dinas P2KB&P3A Kabupaten Solok Selatan

### C. Urusan Pangan

Ketahanan pangan merupakan upaya sistematis dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi pangan setiap individu dalam suatu wilayah yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Dilihat dari tingkat ketersediaan bahan pangan utama cenderung mengalami penurunan kecuali daging, telur, susu dan ikan. Penurunan ini seiring dengan penurunan produksi pertanian sektor ketahanan pangan, serta alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan ke sektor hortikultura.

Sedangkan untuk melihat pemenuhan, mutu gizi dan keanekaragaman konsumsi pangan yang dikonsumsi penduduk dapat dilihat dari indikator skor pola pangan harapan. Skor pola pangan harapan merupakan perbandingan keanekaragaman dengan mempertimbangkan angka kecukupan energy tingkat asupan dengan bobot tiap sumber pangan yang telah ditentukan (angka maksimal 100). Dilihat dari perkembangan skor pola pangan harapan penduduk kabupaten Solok Selatan dapat dilihat terjadi peningkatan dari 73,6 pada tahun 2017 menjadi 77,6 pada tahun 2021. Peningkatan ini

menggambarkan bahwa terjadi peningkatan pemenuhan, mutu gizi dan keanekaragaman konsumsi pangan yang dikonsumsi penduduk.

**Tabel 2.36.**  
**Perkembangan Kinerja Urusan Pangan**  
**Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021**

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Ketersediaan Pangan Utama, berupa:						
	• Padi	ton	147.747	147.898	152.488	142.581	98.065
	• Jagung		95.862	76.630	103.323	82.909	81.230
	• Kacang Hijau		18	12	13	13,86	13,2
	• Kacang Tanah		2.560	1.260	1.281	1.189	738
	• Kedelai		12	76	137	26,79	0
	• Ubi Jalar		2.247	1.891	2.683	3.551	3.994
	• Ubi Kayu		3.720	3.720	3.546	4.538,4	8.712
	<b>Pangan Hewani</b>						
	• Daging	ton	981,71	1.034,19	1.082,86	757,0	2.439,5
	• Telur		208,23	222,73	231,7	248,04	439,01
	• Susu		9,07	28,22	32,56	18,14	18,14
	• Ikan		1.231	1.340	1.731	1.661,5	2441,5
	2	Skor Pola Pangan Harapan	%	73,6	76,5	77,6	77,8

Sumber: Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan

#### D. Urusan Pertanahan

Gambaran kinerja pelayanan Urusan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan tahun 2017-2021 dapat dilihat dari perkembangan jumlah tanah bersertifikat yang diterbitkan seperti pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.37.**  
**Perkembangan Indikator Kinerja Pelayanan Urusan Pertanahan**  
**Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021**

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
	<b>Jumlah tanah yang bersertifikat yang dikeluarkan</b>	<b>bidang</b>	<b>1.520</b>	<b>3.539</b>	<b>6.516</b>	<b>6.101</b>	<b>2.539</b>
1	Hak Milik	bidang	1.514	3.483	6.480	6.079	2.476
2	Hak Guna Bangunan	bidang	3	51	33	17	5
3	Hak Pakai	bidang	3	5	3	5	58

Sumber: BPN dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok Selatan

Berdasarkan data pada tabel diatas, terlihat bahwa selama tahun 2017-2019 jumlah sertifikat yang dikeluarkan berfluktuasi setiap tahunnya dengan trend meningkat, yaitu dari 1.520 bidang tanah pada tahun 2017, menjadi 6.416 bidang tanah pada 2019, namun pada tahun 2020 dan 2021 kembali mengalami penurunan menjadi 6.101 bidang tanah pada tahun 2020 dan 2.539 bidang tanah pada tahun 2021. Fluktuasi jumlah sertifikat yang dikeluarkan dipengaruhi oleh jumlah kegiatan sertifikat prona yang dibiayai oleh pemerintah pusat, selain permintaan pribadi masyarakat.

## E. Urusan Lingkungan Hidup

Gambaran kinerja pelayanan Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan sampai tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Untuk capaian pengelolaan lingkungan hidup dapat dilihat dari indeks kualitas lingkungan hidup yang mengalami peningkatan dari 79,72 pada tahun 2020 menjadi 73,59 pada tahun 2021. Penurunan terjadi di hampir seluruh indikator pendukung dari Indeks kualitas udara, air, dan lahan dari 93,26% (IKU), 67,50% (IKA) dan 75,64% (IKL) pada tahun 2020 menjadi 92,64% (IKU), 52,22% (IKA) dan 75,07% (IKL) pada tahun 2021. Penurunan ini seiring dengan meningkatnya pertumbuhan industri, pertambangan, perkebunan, dan sampah.
2. Persoalan pengelolaan sampah di Kabupaten Solok Selatan harus mendapat perhatian khusus. Bila dilihat dari sudut pandang pemberian layanan (*service provider*) di Kabupaten Solok Selatan yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 184.854 orang. Dilihat dari pelayanan terhadap persampahan dari 2017-2019 terus mengalami penurunan hal ini dapat dilihat dari perkiraan produksi sampah yang terangkut dan terkelola yaitu dari 46,57 sampah terangkut dan 67,27% sampah yang terkelola pada tahun 2019 menjadi 11,33% sampah terangkut dan 11,33% % sampah yang terkelola pada tahun 2021. Meskipun mengalami peningkatan pada tahun 2020 seiring dengan meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana persampahan namun pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan menjadi 19,2% sampah terangkut dan 20,82% sampah yang terkelola dari 26.708,66 M<sup>3</sup> perkiraan proyeksi sampah. Untuk meningkatkan cakupan layanan persampahan dibutuhkan penambahan sarana dan prasarana persampahan dan mempercepat beroperasinya TPA Jujutan.
3. Dilihat dari cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL meskipun pada tahun 2020 mengalami peningkatan hingga 80% namun pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan menjadi 50% dari objek yang diawasi. Meskipun cakupan pengawasan terhadap AMDAL masih belum optimal namun dengan berkat kerja sama dengan masyarakat dan pemangku kepentingan, penegakan hukum lingkungan yang dapat dilihat dari persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat tentang dugaan pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup dapat ditindaklanjuti seluruhnya yaitu 100%.



**Tabel 2.38.**  
**Perkembangan Kinerja Lingkungan Hidup**  
**Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	79,58	79,62	79,53	79,72	73,59
	➤ Indek Kualitas Udara	84,68	87,54	81,82	93,26	92,64
	➤ Indek Kualitas Air	76,41	73,44	79,38	67,50	52,22
	➤ Indek Kualitas Lahan	75,59	75,61	75,57	75,64	75,07
2	Cakupan Pelayanan Persampahan					
	➤ Terangkut (%)	46,57	37,98	11,33	27,78	19,2
	➤ Terkelola (%)	67,27	45,40	11,33	27,78	20,82
3	Cakupan Pengawasan pelaksanaan AMDAL (%)	75,0	70,58	68,18	80,0	50,0
4	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Perumkim dan LH Kabupaten Solok Selatan

#### **F. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Gambaran kinerja pelayanan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan tahun 2017-2021 berfluktuasi di setiap tahunnya. Hal ini terjadi seiring diberlakukannya pembersihan dan penghapusan data ganda dan verifikasi data kependudukan disetiap tahunnya, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Capaian Rumah Tangga di Kabupaten Solok Selatan yang memiliki Kartu Keluarga mengalami peningkatan dari tahun 2017-2019 yaitu dari 88,5% pada tahun 2017 menjadi 100% pada tahun 2019. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 92,66, namun pada tahun 2021 kemali mengalami peningkatan menjadi 95,47%.
2. Tingkat kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Solok Selatan pada pada tahun 2017-2019 terus mengalami kenaikan dari 77,18% pada tahun 2017 menjadi 98,94% pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 Tingkat kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kembali mengalami penurunan seiring dengan dilakukannya pembersihan dan penghapusan data ganda menjadi 88,93%. Pada tahun 2020 kepemilikan KTP ini kembali mengalami peningkatan menjadi 92,31%. Peningkatan ini seiring peningkatan pelayanan serta kebijakan pendataan dan perekaman e-KTP bagi penduduk usia 15-16 tahun dengan melibatkan sekolah sehingga pada usia 17 tahun KTP secara otomatis bisa dicetak.

3. Untuk kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Solok Selatan periode 2017-2021 terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun yaitu dari 66,1% pada tahun 2017 menjadi 93,87% pada tahun 2021. Peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengurus akte kelahiran terutama untuk bayi yang baru lahir.
4. Sedangkan untuk rasio pasangan yang berakte perkawinan (ditujukan bagi pasangan non muslim) yang diukur dari jumlah pasangan nikah berakte perkawinan pada periode 2017-2021 mengalami peningkatan dari 14,00% pada tahun 2017, menjadi 67,78% pada tahun 2021.

**Tabel 2.39.**

**Perkembangan Indikator Kinerja Pelayanan Urusan Administrasi  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase rumah tangga yang memiliki Kartu Keluarga (KK)	88,5	100	100	92,66	95,47
2	Persentase penduduk ber KTP	77,18	84,69	98,94	88,93	92,31
3	Persentase penduduk yang memiliki akte kelahiran (usia 0-18 tahun)	66,1	75,27	78,13	85,94	93,87
4	Persentase Penduduk yang memiliki akte perkawinan	14,00	15,27	51,97	68,45	67,78

Sumber: Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan

### **G. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**

Pemberdayaan masyarakat dan desa adalah proses pembangunan sosial, budaya dan ekonomi agar tercipta masyarakat yang berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial agar mampu memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Dilihat dari perkembangan indikator rata-rata Indeks Desa Membangun terus mengalami peningkatan yaitu dari 0,6538 pada tahun 2017 menjadi 0,7297 pada tahun 2021. Peningkatan ini diikuti oleh peningkatan seluruh komponen pembentuk Indeks Desa Membangun yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan. Dilihat dari ketiga rata-rata indeks pembentuk diatas permasalahan utama masih terletak pada Indeks Ketahanan Ekonomi yang masih berada pada angka 0,6769 dan Indeks Ketahanan Lingkungan sebesar 0,6974. Peningkatan Indeks Desa Membangun merupakan dampak langsung dari peningkatan dari status desa/nagari dari tertinggal menjadi berkembang, berkembang menjadi maju, maju menjadi mandiri. Nagari yang masih dikategorikan tertinggal adalah Nagari Lubuk Ulang Aling, Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan, Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah. Permasalahan utama dari tiga nagari tersebut disebabkan

rendahnya rendahnya aksesibilitas ke pusat pertumbuhan dan rendahnya kualitas lingkungan.

**Tabel 2.40.**  
**Perkembangan Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Ketahanan Desa Membangun	indeks	0,6538	0,6786	0,7024	0,7133	0,7297
	➤ Indeks Ketahanan Sosial	indeks	0,7141	0,7410	0,7733	0,8022	0,8147
	➤ Indeks Ketahanan Ekonomi	indeks	0,6156	0,6650	0,6346	0,6590	0,6769
	➤ Indeks Ketahanan Lingkungan	indeks	0,6316	0,6160	0,6991	0,6786	0,6974
2	Persentase Desa Mandiri	%	7.69	10.26	7.69	17,95	17,95
3	Persentase Desa Maju	%	43.59	38.46	48.72	43.59	43,59
4	Persentase Desa Berkembang	%	38.46	43.59	30.77	30,77	30,77
5	Persentase Desa tertinggal	%	10.26	7.69	0.00	0.00	0,00
6	Persentase Desa sangat tertinggal	%	0.00	0.00	7.69	7.69	7,69

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

## H. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keluarga merupakan penopang dasar perkembangan individu dalam masyarakat. Meningkatnya kualitas individu dalam masyarakat pada awal selalu ditopang oleh peningkatan kualitas institusi keluarga. Keluarga yang bahagia dan sejahtera akan membentuk masyarakat Kabupaten Solok Selatan yang saling kasih, bergotong royong dan terdorong untuk maju. Gambaran kinerja pelayanan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Solok Selatan tahun 2017-2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jika dilihat perkembangannya akseptor KB aktif periode 2017-2021 di Kabupaten Solok Selatan kecuali tahun 2017 persentase akseptor KB terus mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2017, akseptor KB aktif sebesar 73,66%, menjadi 86,49% pada tahun 2021. Peningkatan ini seiring meningkatnya jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi akseptor KB aktif dari 18.660 pasangan menjadi 31.652 pasangan.
2. Dilihat dari laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Solok Selatan meskipun mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2020 menjadi 6.40% namun sampai tahun 2021 kembali mengalami penurunan hingga menjadi 1.55%. Peningkatan pada tahun 2020 lebih disebabkan penyesuaian data kependudukan seiring dengan dilakukannya sensus penduduk pada tahun 2020. Jika dilihat dari rata-rata keluarga per rumah tangga kabupaten Solok Selatan mengalami peningkatan dari 3,46 orang per rumah tangga pada tahun 2017 menjadi 4,18 orang per rumah tangga pada tahun 2021

Tabel 2.41.

**Perkembangan Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017 – 2021**

Indikator	Capaian Kinerja				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Akseptor KB Aktif	18.660	18.656	27.110	27.810	31.652
Cakupan Akseptor KB aktif (%)	73,66	80,21	81,27	80,26	86,49
Laju pertumbuhan penduduk	1,77	1,70	1,58	6,40	1,55
Rata-rata jumlah anggota keluarga per Rumah Tangga	3,46	3,45	3,72	3,46	4,18

Sumber : BPS dan P2KB&P3A (Data diolah)

### I. Urusan Perhubungan

Gambaran kinerja pelayanan Urusan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan tahun 2017-2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belum terdapat transportasi umum yang representatif di Kabupaten Solok Selatan, selain itu volume kendaraan angkutan penumpang dalam jangka waktu tahun 2017-2021 tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Layanan angkutan umum masih didominasi oleh kendaraan yang tidak resmi dan tidak terdaftar yang beroperasi dan melayani angkutan penumpang di wilayah Kabupaten Solok Selatan, Selain itu rendahnya standard kelayakan dan kondisi terminal angkutan umum di Kabupaten Solok Selatan baik dari ketersediaan sarana dan prasarana yang belum dapat difungsikan. Untuk menunjang pelayanan arus penumpang ke daerah yang belum memiliki moda transportasi angkutan umum. Masih rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan merupakan salah satu penyebab meningkatnya angka kecelakaan dari 1,20 per 10.000 pada tahun 2017 penduduk menjadi 1,9 per 10.000 penduduk pada tahun 2021. Dilihat dari cakupan layanan, cakupan layanan angkutan sungai lebih baik dari pada cakupan layanan angkutan per 100 penduduk yaitu untuk angkutan sungai 29,48 per 100 penumpang melayani sedangkan untuk layanan angkutan darat baru 0,044 per 100 penumpang

Tabel 2.42.

**Perkembangan Jumlah Kendaraan Angkutan Umum, Jumlah Arus Penumpang Umum, Rasio Izin Trayek dan Jumlah Terminal Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Kendaraan Angkutan Umum (Angkutan penumpang)	Unit	15	15	20	20	26
2.	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	Orang	52.350	51.212	44.401	48.451	51.967
3.	Rasio Izin Trayek/jumlah penduduk (10.000 penduduk)	Rasio	0,843	0,829	0,714	0,70	0,82
4.	Rasio angka kecelakaan per 10.000	Rasio	1,20	2,43	2,14	2,40	1,9

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
	peduduk						
5.	Jumlah Terminal	Unit	2	2	2	2	2
6.	Jumlah Dermaga	Unit	1	1	1	2	3
7.	Jumlah angkutan Sungai	Unit	315	351	311	326	332
8.	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Sungai	Orang	1.345	1.118	997	1045	1126
9.	Rasio layanan angkutan darat (per 100 penumpang)	Rasio	0,0287	0,0293	0,0450	0,0413	0,044
10	Rasio layanan angkutan sungai (per 100 penumpang)	Rasio	23,42	31,40	31,19	31,20	29,48
11.	Jumlah orang melalui dermaga / terminal per tahun	orang	5.435	5.269	5.013	5.132	5.263

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Selatan

2. Kinerja pada urusan perhubungan juga dapat dilihat dari cakupan layanan terhadap kendaraan umum. Persentase jumlah kendaraan angkutan umum yang memiliki KIR mengalami penurunan yaitu dari 91%% pada tahun 2019 menjadi 46% pada tahun 2021. Rendahnya capaian ini selain terbatasnya peralatan KIR yang tersedia di UPTD diikuti oleh masih rendahnya kesadaran pemilik kendaraan angkutan umum penumpang/barang dalam melakukan uji kelayakan kendaraannya sesuai ketentuan yang berlaku cukup tinggi.

**Tabel 2.43.**

**Perkembangan Jumlah Kepemilikan KIR Angkutan Umum, Lama dan Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021**

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	87	89	91	90	46
2.	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	Kendaraan /Menit	20	20	20	20	20
3.	Biaya KIR:						
	PNP	Rp.	43.500 61.000 (Ganti buku)	43.500 61.000 (Ganti buku)	43.500 61.000 (Ganti buku)	43.500 61.000 (Ganti buku)	43.500 61.000 (Ganti buku)
	Bus dan Barang	Rp.	53.500 61.000 (Ganti Buku)	53.500 61.000 (Ganti Buku)	53.500 61.000 (Ganti Buku)	53.500 61.000 (Ganti Buku)	53.500 61.000 (Ganti Buku)

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Selatan

**J. Urusan Komunikasi dan Informatika**

Gambaran kinerja pelayanan urusan komunikasi dan informatika Kabupaten Solok Selatan tahun 2017-2021 dapat dilihat dari perkembangan jumlah Jaringan Telekomunikasi, Rasio Wartel/Warnet terhadap Penduduk, Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal, Jumlah Penyiaran Radio /TV Lokal, Website Milik Pemerintah Daerah, Pameran/Expo, Jumlah OPD yang mengaplikasikan Sistem Informasi layanan Publik. Dilihat dari indikator



kinerja untuk mendukung pelayanan publik perkembangan komunikasi dan informatika dan cakupan layanan telekomunikasi masih kurang maksimal. Sampai tahun 2021 jumlah OPD yang mengaplikasikan Sistem Informasi Layanan Publik baru 14 OPD dan untuk cakupan layanan telekomunikasi baru 86,9% yang dilayani oleh 3 Provider (dengan jumlah kawasan pemukiman yang termasuk *Blank Spot Area* sebanyak 36 Jorong). Sedangkan untuk PDRB sektor informasi dan komunikasi cenderung mengalami perlambatan pertumbuhan dari 11,78% pada tahun 2017 menjadi 7,61% pada tahun 2021.

**Tabel 2.44.**  
**Perkembangan Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika**  
**Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021**

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Jaringan Telekomunikasi	Provider	5	4	4	3	3
2.	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal	Surat Kabar	17	17	17	18	18
3.	Jumlah Penyiaran Radio	Stasiun	2	2	2	2	2
4.	Website Milik Pemerintah Daerah	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.	Pameran/Expo	Kegiatan	1	0	1	1	0
6.	Jumlah OPD yang mengaplikasikan Sistem Informasi layanan Publik	OPD	6	6	7	9	14
7.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	100	100	100	86	86
8.	Indeks SPBE	Indek	nd	1,92	1,74	1,70	1,21
9.	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	71,38	76,87	76,87	83,28	86,9
10	Pertumbuhan PDRB sektor Informasi dan Komunikasi	RP. Milyar	11,78	9,07	8,27	7,44	7,61

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Solok Selatan

## K. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Gambaran kinerja pelayanan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Solok Selatan tahun 2017-2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Secara umum keberadaan Koperasi dan UKM sudah terbukti bertahan terhadap gejolak eksternal, sehingga kontribusinya bagi perekonomian daerah memegang peran strategis dan memberikan peluang yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja. Secara kuantitas meskipun tidak signifikan jumlah koperasi di Kabupaten Solok Selatan terus mengalami peningkatan yaitu dari 1017 unit pada tahun 2017 menjadi 119 unit pada tahun 2021. Rendahnya peningkatan koperasi disebabkan karena kebijakan pemerintah untuk melakukan pembubaran dan pencabutan badan hukum koperasi yang bermasalah oleh Kementerian Koperasi

Republik Indonesia. Kebijakan ini menyebabkan terjadinya peningkatan dari persentase koperasi aktif dari 49,5% pada tahun 2017 menjadi 60,5% pada tahun 2021. Namun dari tahun tahun 2020 peningkatan koperasi aktif tidak diiringi koperasi aktif yang melakukan RAT yang mengalami penurunan dari 61,3% pada tahun 2019 menjadi 39,4% pada tahun 2021.

**Tabel 2.45.**  
**Perkembangan Kinerja Koperasi**  
**Kabupaten Selatan Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Koperasi Berbadan Hukum	Unit	107	109	114	115	119
2.	Jumlah Koperasi Aktif	Unit	67	54	62	65	71
3.	Persentase Koperasi Aktif	%	62,6	49,5	54,4	56,5	60,5
4.	Jumlah Koperasi Aktif yang RAT	Unit	30	26	38	28	28
5.	Persentase Koperasi Aktif yang RAT	%	44,8	48,1	61,3	43,1	39,4

Sumber: Dinas Perindagkop Kabupaten Solok Selatan

- Selain Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan potensi ekonomi yang besar karena dapat menyerap tenaga kerjanya yang cukup banyak, serta memiliki resistensi terhadap gejolak eksternal. Dari dibawah dapat dilihat terjadinya peningkatan UMKM yang cukup sangat signifikan dari 3.375 unit pada tahun 2017 menjadi 9.907 unit pada tahun 2021. Peningkatan ini didorong oleh peningkatan UMKM yang bergerak di bidang pengolahan makanan dan perdagang kecil.

**Tabel 2.46.**  
**Perkembangan UMKM Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021**

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah UMKM	Unit	3927	4047	4240	9907	9907
2.	Jumlah BPR/LKM	Unit	5	3	3	3	3
3.	Persentase UMKM Non BPR/LKM	%	99,1	98,9	99,1	99,6	99,6

Sumber: Dinas Perindagkop Kabupaten Solok Selatan

#### L. Urusan Penanaman Modal

Perkembangan kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Solok Selatan tahun 2017-2021 dapat dilihat pertumbuhan investasi yang ditanamkan di Kabupaten Solok Selatan. Jika dilihat perkembangan investasi pada tahun 2018-2021 dapat dilihat cenderung mengalami penurunan baik yang berasal dari PMDN maupun PMA yaitu dari Rp.518.726 juta (PMDN) dan \$52,265 ribu (PMA) pada tahun 2018 menjadi Rp. 357.804,8 Juta (PMDN) dan \$9.334,9 (PMA) pada tahun 2021 penurunan ini seiring dengan selesainya

pengerjaan investasi sektor pertambangan (PT Supreme Energi, PT Bumi Indonesia Bersinar) dan investasi pabrik kelapa sawit (PT Mas Unggul Sejagat). Selain itu menurunnya kondisi perekonomian terutama pada tahun 2020 menyebabkan investasi di Kabupaten Solok Selatan ditopang oleh investasi pemerintah, UMKM dan perseorangan serta tambahan dari investasi dari perusahaan yang telah beroperasi. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 meskipun disisi investasi yang berasal dari PMA mengalami penurunan namun jumlah investasi PMDN cenderung mengalami peningkatan dari Rp.234.850 juta menjadi Rp.357.804 juta pada tahun 2021. Peningkatan ini seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian di Kabupaten Solok Selatan sebagai akibat meningkatnya aktifitas ekonomi sebagai pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar yang dilakukan pemerintah pusat.

Gambaran kinerja urusan penanaman modal dapat dilihat dari perkembangan investasi selama tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.47.**  
**Perkembangan Kinerja Urusan Penanaman Modal**  
**Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021**

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Sistem Informasi Pelayanan Perizinan	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional:						
	➢ PMDN	Rp (juta)	100.128	518.726	339.618	234.850	357.804,8
	➢ PMA	\$ (ribu)	167.093	52.265	72.407	13.847	9.334,9
3.	Rata-rata lama pelayanan perizinan	Hari	1-5	1-5	1-5	1-5	1-3
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Solok Selatan

#### **M. Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

Kebutuhan sarana bagi generasi muda untuk dapat mengaktualisasikan diri secara positif merupakan salah satu kebutuhan yang perlu disediakan oleh pemerintah daerah. Kebutuhan akan sarana kepemudaan, seperti gelanggang seni yang permanen hingga saat ini dirasakan masih belum optimal. Oleh karena itu, bantuan dalam penyediaan gelanggang seni masih perlu ditingkatkan. Sampai tahun 2019 terdapat 2 gelanggang tempat petunjuk seni di Kabupaten Solok Selatan meskipun dari segi ketersediaan sarana dan prasarana perlu ditingkatkan yaitu RTH Muaralabuh dan RTH Padang Aro. Dalam penyediaan sarana olahraga, diketahui bahwa perkembangan jumlah lapangan olahraga per satuan penduduk di Kabupaten Solok Selatan selama periode 2017-2021 mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2017 rasio

lapangan olahraga sebesar 0,51 per 10.000 penduduk dan mengalami penurunan menjadi 3,89 per 10.000 pada tahun 2021.

Sedangkan disisi keterlibatan pemuda dalam perekonomian serta organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan meskipun masih relatif kecil namun mengalami peningkatan pada periode tahun 2020-2021 yaitu dari 0,060% pada tahun 2020 menjadi 0,062% pada tahun 2021 untuk Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan 0,26% pada tahun 2020 menjadi 0,31 pada tahun 2021 untuk tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan.

**Tabel 2.48.**  
**Perkembangan Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga**  
**Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021**

No.	Indikator	Perkembangan (Tahun)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Organisasi Pemuda	10	10	10	34	34
2.	Jumlah Organisasi Olahraga	34	34	45	40	40
3.	Rasio Gelanggang Remaja/ Gelanggang Seni (per 10.000 penduduk)	0,060	0,059	0,12	0,11	0,11
4.	Rasio Lapangan Olahraga (per 10.000 penduduk)	0,51	0,50	0,55	3,94	3,89
5.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	na	na	na	0,060	0,062
6.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	na	na	na	0,26	0,31

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan

## N. Urusan Statistik

Gambaran kinerja pelayanan Urusan Statistik Kabupaten Solok Selatan tahun 2017-2021 adalah disusun dan diterbitkannya dokumen/buku statistik sebagai berikut:

1. Ketersediaan Buku Daerah Dalam Angka (DDA) Kabupaten Solok Selatan selama periode 2017-2021 dokumen ini selalu tersedia setiap tahunnya. Jenis data yang ditampilkan meliputi sektor pemerintahan, kependudukan, dan tenaga kerja, kesejahteraan, pertanian, industri serta ekonomi dan keuangan. Buku ini merupakan sumber data dan informasi terkait Kabupaten Solok Selatan dan dapat digunakan, baik oleh pemerintah maupun swasta dan masyarakat sebagai bahan informasi yang akurat dan acuan dalam perencanaan.
2. Demikian juga ketersediaan Buku PDRB Kabupaten Solok Selatan tahun 2017-2021 yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi makro hasil pembangunan ekonomi di Kabupaten Solok Selatan.

**Tabel 2.49.**  
**Perkembangan Kinerja Urusan Statistik**  
**Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021**

No.	Indikator	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Buku "kabupaten dalam angka"	ada	ada	ada	ada	ada
2.	Buku "PDRB kabupaten"	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan

## O. Urusan Persandian

Selama periode tahun 2017-2021 penyelenggaraan Urusan Persandian belum optimal dilaksanakan di Kabupaten Solok Selatan, dan masih menyiapkan kerangka dan regulasi untuk pelaksanaan urusan meskipun organisasi perangkat daerah yang menangani urusan Persandian sudah dibentuk melalui demikian Peraturan daerah Nomor:15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

**Tabel 2.50.**  
**Perkembangan Kinerja Urusan Persandian**  
**Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021**

No.	Indikator	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah aplikasi informasi daerah	9	9	10	12	12
2	Persentase aplikasi informasi daerah yang diamankan	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan

## P. Urusan Kebudayaan

Gambaran kinerja pelayanan urusan kebudayaan Kabupaten Solok Selatan tahun 2017-2021 dapat dilihat dari jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya, jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya dan persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, Jumlah Sanggar Budaya yang berprestasi. Dari tahun 2017-2021 Kabupaten Solok Selatan rutin menyelenggarakan festival seni dan budaya yang disebut dengan Festival Sarantau Sasurambi. Kegiatan ini berupa pementasan potensi seni dan budaya anak nagari dan pameran atau bazar usaha-usaha kecil dan menengah serta produk-produk kerajinan dan kuliner Kabupaten Solok Selatan. Selain itu terdapat festival-festival rutin yang diselenggarakan oleh masyarakat dan nagari untuk memperingati momen-momen penting yang menjadi budaya masyarakat Kabupaten Solok Selatan. Selain festival seni dan budaya Minangkabau seperti Maarak Bungo Lamang, Balimau Adat, Mambantai Kabau Nan Gadang terdapat juga festival etnis Jawa seperti wiwitan, sedekah bumi dan kuda kepang.



Sampai tahun 2021 Kabupaten Solok Selatan sudah mempunyai 1 kawasan cagar budaya yang sudah diakui oleh provinsi dan nasional yaitu Kawasan Saribu Rumah Gadang berada di Kenagarian Koto Baru. Pada tahun 2018-2019 Kabupaten Solok Selatan mendapatkan 2 penghargaan yaitu tahun 2018 Kawasan Saribu Rumah Gadang pemenang pada Nominasi Kampung adat yang terpopuler dan 2019 Rumah Adat Panjang pemenang Situs Sejarah Terpopuler di Indonesia pada Festival Anugrah Pesona Indonesia yang diadakan oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

Disisi pelestarian Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan yang sudah teridentifikasi terus mengalami peningkatan dari 14,29% pada tahun 2017 menjadi 30,76% pada tahun 2021.

**Tabel 2.51.**  
**Perkembangan Kinerja Urusan Kebudayaan**  
**Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017 – 2021**

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	8	8	12	7	5
2.	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Unit	2	3	4	4	4
3.	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	14,29	15	28,08	30,76	30,76
4.	Jumlah Sanggar Budaya yang berprestasi	sanggar	0	3	3	0	0

Sumber : Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Solok Selatan

## Q. Urusan Perpustakaan

Hingga saat ini, peran perpustakaan masih kurang dalam menarik minat baca masyarakat agar mau membaca di perpustakaan. Selain itu, ketersediaan sarana prasarana yang kurang memadai serta makin mudahnya akses internet dan pesatnya perkembangan teknologi informasi juga menjadi salah satu penyebab makin rendahnya pengunjung perpustakaan.

Jika dilihat dari rasio koleksi buku perpustakaan (perbandingan antara judul buku dengan jumlah buku) di Perpustakaan Daerah terjadi peningkatan yaitu dari 0,37 pada tahun 2017 menjadi 0,41 pada tahun 2021. Peningkatan ini diiringi dengan penambahan jumlah judul maupun jumlah buku yang tersedia dari 4.375 judul buku dengan jumlah koleksi 11.757 buku pada tahun 2017 menjadi 6.697 judul buku dengan jumlah koleksi 16.520 buku pada tahun 2021. Meskipun dari sisi jumlah buku dan koleksi mengalami peningkatan namun diikuti oleh penurunan kunjungan ke perpustakaan menjadi menjadi 221 orang pada tahun 2021.

**Tabel 2.52.**  
**Perkembangan Kinerja Urusan Perpustakaan**  
**Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021**

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Perpustakaan	Unit	144	171	171	171	171
2.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	Orang	2.566	2.850	1.155	698	225
4.	Rasio Kunjungan Perpustakaan	Rasio	1,88	2,09	0,85	0,51	0,97
5.	Jumlah Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah						
	• Jumlah Judul	Judul	4.375	5.090	5.395	6.555	6.697
	• Jumlah Buku	Buah	11.757	12.624	13.901	16.467	16.520

*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok Selatan*

### R. Urusan Kearsipan

Pengelolaan arsip yang baik harus dapat menjamin ketersediaan arsip yang memberikan kepuasan bagi pengguna, serta menjamin keselamatan arsip itu sendiri. Gambaran kinerja pelayanan urusan kearsipan Kabupaten Solok Selatan tahun 2017-2021 dapat dilihat melalui indikator persentase pengelolaan arsip secara baku, peningkatan SDM pengelola kearsipan. Dilihat persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku meskipun mengalami peningkatan tetapi pencapaiannya masih relatif rendah. Sampai tahun 2021 perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku baru 66,67% (26 OPD). Dilihat dari Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat pada tahun 2021 baru berada pada angka 31,14% (range tertinggi 100) dan 2,83 (range tertinggi 10)

**Tabel 2.53.**  
**Perkembangan Kinerja Urusan Kearsipan**  
**Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017 - 2021**

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	6,06	6,06	15,15	33,33	66,7
2.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	na	na	na	na	31,14

3	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Nilai	na	na	na	na	2,83
---	---	-------	----	----	----	----	------

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Solok Selatan

### 2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

#### A. Urusan Pariwisata

Sektor pariwisata menjadi menjadi alternatif pilihan untuk dikembangkan dimasa depan, ditopang oleh ketersediaan wisata alam Kabupaten Solok Selatan yang masih alami serta potensi kearifan lokal di sektor kebudayaan yang relatif original dengan ikon **Nagari Seribu Rumah Gadang** yang merupakan representasi perkampungan adat yang memiliki sebanyak 125 unit rumah gadang berbagai kaum dan suku, balai adat, surau dan sebuah makam yang berlokasi di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai pagu. Pengembangan potensi pariwisata ini diawali dengan perubahan cara berfikir eksploitatif yang mengandalkan sektor perkebunan dan pertambangan menjadi berfikir konservasi produktif dengan menjadikan sektor pariwisata berbasis potensi alam dan budaya sebagai pendorong sektor ekonomi lain. Disisi objek wisata terjadi peningkatan dari jumlah objek wisata di Kabupaten Solok Selatan yaitu dari 2 lokasi objek wisata yang dikelola menjadi 10 objek wisata. Diantara objek wisata unggulan daerah adalah, Jalur Pendakian Gunung Kerinci terintegrasi dengan Bumi Perkemahan Camin Toran, Kawasan Saribu Rumah Gadang, Rumah Gadang Panjang, Goa Batu Kapal, Hot Water Boom Sapan Maluluang, Kebun Teh Liki (Desa Wisata Wonorejo), Kawasan PDRI, Puncak Laras, Air Terjun Kembar.

Peningkatan jumlah lokasi wisata ini berdampak terhadap peningkatan kunjungan ke obek wisata dari 35.320 orang pada tahun 2017 menjadi 61.199 orang pada tahun 2021. Selain itu peningkatan ini ditunjang oleh peningkatan jumlah event-event promosi daerah dan meningkatnya pengelolaan objek wisata unggulan daerah baik yang dikelola pemerintah maupun kelompok masyarakat. Jika kita lihat dari persentase Objek Wisata yang dikelola oleh pokdarwis mengalami peningkatan yaitu 33,33% pada tahun 2017 menjadi 35,0% pada tahun 2021. Disisi jumlah terjadi peningkatan dari objek wisata yang sudah dikelola oleh Pokdarwis yaitu dari 20 Objek Wisata menjadi 21 Objek Wisata.

**Tabel 2.54.**  
**Perkembangan Kinerja Urusan Pariwisata**  
**Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021**

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah kunjungan ke objek wisata						
	Wisatawan Nusantara	Orang	35.200	68.149	67.761	36.196	61.199
	Wisatawan Manca Negara	Orang	120	249	241	0	0
2.	Objek wisata unggulan yang dikelola	Objek	7	7	10	10	10
3	Jumlah Objek wisata	Objek	60	60	60	70	70
4	Persentase Objek Wisata yang dikelola oleh pokdarwis	Objek	33,33	33.33	33.33	35,0	35,0

Sumber: Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Solok Selatan.

## B. Urusan Pertanian

Kabupaten Solok Selatan merupakan Kabupaten yang mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber pendapatan utama masyarakat, dimana 51,4% penduduk berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja bergerak disektor pertanian. Sektor pertanian meliputi sub sektor tanaman pangan, subsektor perkebunan, sub sektor peternakan, sub sektor kehutanan dan sub sektor perikanan. Dalam pembentukan struktur ekonomi, sektor ini merupakan sektor andalan Kabupaten Solok Selatan. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Solok Selatan tahun 2017-2021, yaitu sebesar 30,34%. Meskipun kontribusinya terus mengalami penurunan dari 32,59% pada tahun 2017 menjadi 28,42% pada tahun 2021 namun nilai produksinya tetap mengalami pertumbuhan rata-rata 3,38% pertahun. Sub sektor yang paling dominan di sektor pertanian adalah sektor perkebunan, tanaman pangan, peternakan dan tanaman hortikultura.

**Tabel 2.55.**  
**Perkembangan Kinerja Urusan Pertanian**  
**Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021**

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Produktivitas padi atau bahan pangan lainnya utama lokal	Ton/Ha	5,4	5,4	5,48	5,43	4,1
2	Nilai PDRB Sektor sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	Rp. Milyar	4.893,87	5.571,73	5.571,72	5.528,53	5.777,98
3	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	%	32,59	31,18	29,20	28,78	28,42
4	Cakupan bina kelompok petani	%	80,95	80,95	38,84	38,84	38,84
5	Ketersediaan Penyuluh Pertanian	%	59,29	59,00	73,11	57,43	57,43

Sumber: Dinas Pertanian dan BPS kabupaten Solok Selatan

Dilihat dari produksi tanaman pangan utama seperti padi, jagung Kabupaten Solok Selatan pada tahun periode 2019- 2021 terus mengalami penurunan yaitu dari 152.488 ton padi dan 80.773 ton jagung pada tahun 2019 menjadi 98.066 ton padi dan 80.773 ton jagung pada tahun 2021. Penurunan ini disebabkan karena masih terdapatnya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, perubahan iklim dan bencana alam yang melanda lahan pertanian seperti longsor dan banjir. Untuk produksi padi Kabupaten Solok Selatan memiliki luas baku 10.225 Ha dengan Indek Pertanaman (IP) 2,59 pertahun dapat memproduksi 98.066 ton atau tingkat produktivitas 4,25 ton/hektar. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.56.**  
**Produksi Komoditi Tanaman Pangan**  
**Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021 (Dalam Ton/Tahun)**

No	Komoditi	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Padi	147.747	147.898	152.488	142.581	98.066
2	Jagung	95.862	76.630	103.323	82.909	80.773
3	Kacang Hijau	19	12	13	13,86	0
4	Kacang Tanah	1.459	1.260	1.281	757,0	737
5	Kedelai	12	76	137	26,79	0
6	Ubi Jalar	2.247	1.891	2.683	3.551	3.994
7	Ubi Kayu	3.720	3.720	3.546	4.538,4	8.712

*Sumber Dinas Pertanian Kabupaten Solok Selatan*

Untuk menjamin ketersediaan cadangan pangan Kabupaten Solok Selatan telah mencadangkan kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan **lahan pertanian pangan berkelanjutan** dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan luas 9.162 Ha sawah.

Sedangkan untuk perkembangan produksi buah-buahan utama di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021 terdiri dari jeruk, pisang dan manggis sedangkan untuk produksi perkebunan terdiri dari karet, kelapa sawit dan kopi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.57.**  
**Perkembangan Produksi Buah-Buahan dan Perkebunan Utama**  
**Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021 (Dalam Ton/Tahun)**

No	Komoditi	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jeruk	7.107,2	3.882,8	3.383,3	5.845,2	8.942,60
2	Manggis	95,9	147,8	458,7	898,9	2.227,60
3	Pisang	3.065,4	759,1	599,6	4.508	1.622,30



No	Komoditi	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
4	Karet	12.226,37	14.606,39	14.624,80	10.192,81	10.308,78
5	Kelapa Sawit	44.233	41.739,84	42.059,58	43.515,98	43.878,92
6	Kopi	2.014,21	2.483,31	2.784,36	2.754	1.461,36

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Solok Selatan

Perkembangan jumlah ternak di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.58.**  
**Perkembangan Jumlah Ternak**  
**Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021 (Dalam Ekor)**

No	Ternak	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Sapi Potong	10.117	10.361	10.571	10.795	10.903
2	Sapi Perah	17	28	32	18	18
3	Kerbau	6.727	6.748	6,951	5.177	5.190
4	Kambing	8.917	9.073	9.346	8.560	8.640
5	Ayam Petelur	5.000	5.150	5.000	7.699	7.699
6	Ayam Pedaging	83.879	84.245	86.773	173.980	174.284
7	Ayam Buras	92.988	94.958	97.807	99.823	115.297
8	Itik	30.126	30.616	31.250	32.029	34.751

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Solok Selatan

### C. Urusan Perdagangan

Dilihat dari kecenderungan perkembangan urusan perdagangan selama tahun 2017-2021 terus mengalami peningkatan yang cukup tinggi yang dapat dilihat dari perkembangan PDRB yaitu dari Rp. 915,33 milyar pada tahun 2017 menjadi 1.160,98 milyar pada tahun 2021. Peningkatan ini diiringi dengan meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB kabupaten yaitu dari 18,70% pada tahun 2017 menjadi 20,42% pada tahun 2021. Untuk inflasi daerah Kabupaten Solok Selatan mengacu pada Inflasi Kota Padang, Hal ini disebabkan karena di Sumatera Barat, BPS hanya menerbitkan inflasi untuk dua daerah yaitu Kota Padang dan Bukittinggi. Dilihat dari perkembangan indikator inflasi tahun 2021 cukup stabil, hal ini dapat dilihat dari perkembangan realisasi inflasi yang mengalami penurunan dari 2,12 pada tahun 2020 menjadi 1,37 pada tahun 2021.

Dilihat dari ketersediaan sarana perdagangan dari tahun 2017-2021 tidak mengalami pertumbuhan yakni terdapat 2 pasar Kabupaten (pasar Padang Aro dan Pasar Muaralabuh) serta 33 Pasar Nagari. Gambaran kinerja pelayanan Urusan Perdagangan Kabupaten Solok Selatan tahun 2017-2021 dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 2.59.**  
**Perkembangan Kinerja Urusan Perdagangan**  
**Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021**

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	18,70	19,44	20,21	20,20	20,42
2	Tingkat Inflasi	%	2,11	2,55	1,72	2,12	1,37
3	Jumlah sarana perdagangan (pasar)	unit					
	➢ Pasar Kabupaten		2	2	2	2	2
	➢ Pasar Tradisional		31	31	31	31	31

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan BPS Kabupaten Solok Selatan

#### D. Urusan Perindustrian

Dilihat dari perkembangan urusan industri selama tahun 2017-2021 nilainya mengalami terus mengalami peningkatan yang dapat dilihat dari perkembangan PDRB yaitu dari Rp. 246,59 milyar pada tahun 2017, menjadi Rp 254,41 milyar pada tahun 2021. Rendahnya peningkatan nilai produksi industri ini disebabkan karena sebahagian besar industri di Kabupaten Solok Selatan merupakan industri kecil atau rumahan. Kondisi ini menyebabkan kontribusi sektor industri terhadap PDRB cukup rendah yaitu rata-rata 4,53%. Jika dilihat dari pertumbuhan industri kecil dan menengah terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya meskipun angka pertumbuhannya berfluktuasi setiap tahunnya dengan peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 26,63%, namun pada tahun 2020 kembali penurunan menjadi 4,63% seiring dengan menurunnya kondisi perekonomian daerah mengalami kontraksi (pertumbuhan minus). Seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian daerah pada tahun 2021 pertumbuhan industri kecil dan menengah kembali mengalami peningkatan sebesar 15,94%.

Sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Solok Selatan, pengembangan sektor perindustrian adalah pengembangan industri berbasis pertanian dan perkebunan, seperti pengolahan produk. Gambaran kinerja pelayanan Urusan Perindustrian Kabupaten Solok Selatan tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.60.**  
**Perkembangan Kinerja Urusan Perindustrian**  
**Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021**

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	5,04	4,73	4,20	4,30	4,40
2.	Pertumbuhan Industri kecil dan menengah	%	1,81	4,88	26,63	4,63	15,94
3.	IKM yang memiliki HAKI	IKM	3	11	16	17	22

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan BPS Kabupaten Solok Selatan

**E. Urusan Transmigrasi**

Pelayanan bidang transmigrasi tidak terlepas dari upaya penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Selama tahun 2017-2021 tidak ada kegiatan transmigrasi swakarsa. Kegiatan Urusan Transmigrasi hanya dalam bentuk fasilitasi beberapa kegiatan pendukung perkembangan eks UPT transmigrasi yang dibangun sebelum tahun 2014 di Kabupaten Solok Selatan, yaitu dengan fokus pada penyelesaian masalah tanah, pengembangan ekonomi warga UPT Dusun Tangah Kecamatan Sangir Batang Hari serta persiapan perencanaan pembentukan Kawasan Perkotaan Baru.

**F. Urusan Kelautan dan Perikanan**

Kabupaten Solok Selatan memiliki potensi perikanan darat yang cukup menjanjikan, karena didukung oleh banyak sungai dan daerah ini juga dikenal dengan sebutan sebagai Nagari Saribu Sungai yang keberadaan debit airnya cukup terjamin dengan terlindunginya Taman Nasional Kerinci Seblat. Disamping potensi sungai, juga terdapat beberapa potensi embung yang salah satunya berfungsi untuk lahan budidaya perikanan darat. Kemudian, pola budidaya perikanan berupa kolam, empang dan juga mina padi juga telah dilakukan oleh masyarakat di kawasan pertanian.

Namun pada sisi lain, kegiatan pengembangan budidaya perikanan belum berkembang dengan baik, meskipun dilihat dari produksi sektor perikanan terus mengalami peningkatan yaitu dari 1.017 ton pada tahun 2017 menjadi 2.441 ton pada tahun 2021. Namun peningkatan tersebut belum dapat menutupi kebutuhan ikan di Kabupaten Solok Selatan, hal ini dapat dilihat dari masih besarnya impor kebutuhan ikan dari luar daerah untuk dikonsumsi masyarakat Kabupaten Solok Selatan. Data menunjukkan bahwa impor ikan yang masuk ke Kabupaten Solok Selatan, untuk jenis ikan tawar (ikan mas dan ikan nila) berasal dari Maninjau Kabupaten Agam dan Koto Panjang Kabupaten Lima Puluh Kota, Singkarak Kabupaten Solok yang membudidayakan ikan tawar (perikanan darat). Sedangkan untuk jenis ikan laut berasal dari Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan. Peningkatan ini seiring dengan peningkatan tingkat konsumsi ikan masyarakat Solok Selatan dari 27,00 kg/perkapita tahun 2017 menjadi 31,70 kg perkapita tahun 2021.

**Tabel 2.61.**  
**Perkembangan Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan**  
**Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021**

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah produksi Ikan	Ton	1.017	1.340	1.731	1.661	2.441
2	Persentase Produksi perikanan Budidaya	%	92,0	98,0	94,0	97,25	86,20
3	Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/ kapita	27,00	28,06	30,80	31,58	31,70

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

#### 2.1.3.4. Fokus Layanan Fungsi Penunjang

Pelayanan Fungsi Penunjang merupakan fungsi pelayanan pemerintah yang bertugas atau menjalani tugas dan fungsi mengatur dan mengurus pelayanan urusan pemerintahan guna menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*). Fungsi penunjang ini terdiri atas beberapa unsur:

- 1) Unsur Pendukung Urusan Pemerintah terdiri atas Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
- 2) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan terdiri atas Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Pengelolaan Perbatasan
- 3) Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan terdiri atas Inspektorat Daerah
- 4) Unsur Kewilayahan terdiri atas Kecamatan
- 5) Unsur Pemerintahan Umum terdiri atas Kesatuan Bangsa

Dari tabel dibawah dapat dilihat perkembangan dan capaian kinerja Fungsi Penunjang Pelayanan Pemerintah sebagai berikut:

**Tabel 2.62.**  
**Perkembangan Kinerja Fungsi Penujang Pemerintahan**  
**Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021**

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
<b>Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan</b>						
<b>I Sekretariat Daerah</b>						
1.	Nilai LAKIP/SAKIP	CC	CC	CC	CC	CC
2.	Nilai LKPJ/LPPD	2,5547 Tinggi	2,8656 Tinggi	3,0293 Sangat tinggi	na	na
3.	Persentase pencapaian SPM per-urusan	70	95	83,60	83,60	82,32
4.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
5.	Jumlah Kerjasama Pembangunan antar Lembaga dan Swasta yang disepakati	16	0	3	0	18
6.	Peringkat MTQ Nasional Tingkat Provinsi	15	-	14	-	-
<b>II Sekretariat DPRD</b>						
1.	Persentase Usulan Ranperda OPD yang dibahas oleh DPRD menjadi Perda	20	22	16	12	
2.	Jumlah Perda Inisiatif DPRD	1	1	1	1	0
<b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan</b>						
<b>I Perencanaan</b>						
1.	Dokumen Perencanaan Rutin Tepat waktu (RKPD dan RKPD Perubahan)	50	50	100	100	100
2.	Persentase pencapaian kinerja Daerah	na	na	na	na	50,71

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
3.	Pencapaian Nilai Perencanaan pada SAKIP	57,97	57,13	55,93	57,23	57,23
<b>II</b>	<b>Keuangan</b>					
1.	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Persentase Pencapaian Target PAD	95	87,8	88,79	109,29	94,29
3.	Kontribusi PAD Terhadap Belanja Daerah	9,18	7,67	7,83	10,07	9,74
<b>III</b>	<b>Kepegawaian</b>					
1.	Indek Merit	na	na	na	154	114,5
2.	Persentase penempatan aparatur sesuai dengan bidang keahlian berdasarkan Analisa Jabatan	35	50	88,26	88,26	88,26
<b>IV</b>	<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>					
1.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	na	na	na	47,76	50,03
2.	Persentase Eselonering yang mengikuti Diklat Struktural					
	- Eselon II	65	43,3	17	17	5,43
	- Eselon III	21	15,3	21	21	24,03
	- Eselon IV	30	18,3	22	22	70,54
3.	Persentase Aparatur yang berijazah Sarjana dan Pasca Sarjana:					
	- S1	55,26	55,34	58,73	65,89	67,42
	- S2	4,30	4,55	4,62	4,86	5,19
	- S3	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09
<b>V</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>					
1.	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam perumusan kebijakan daerah	100	100	100	0	0
2.	Inovasi Daerah dalam Pelayanan Pemerintah	-	-	26	6	6
<b>VI</b>	<b>Pengelolaan Perbatasan</b>					
1.	Persentase tapal batas antar nagari yang ditetapkan	na	na	15,38	35,89	35,89
2.	Persentase tapal batas antar kecamatan yang ditetapkan	na	na	na	na	na
3.	Jumlah Nagai yang telah ditetapkan Tapal Batas antar Nagari	na	na	6	14	14
<b>Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan</b>						
<b>I</b>	<b>Inspektorat Daerah</b>					
1.	Level Kapabilitas Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP)	II	II+	II+	II+	II+

Sumber: Bappeda, Inspektorat, BPKD, BKSDM, Sekretariat Daerah dan Sekwan

Selanjutnya dapat pula digambarkan kinerja pelayanan sub urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri tahun 2017-2021 seperti terdapat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.63.**  
**Capaian Kinerja Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP dan Pembinaan Politik Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021**

No	Uraian	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Penyuluhan wasbang					
	a) Pelaksanaan (kali) b) Peserta (orang)	1 70	1 70	1 70	1 70	1 70
2	FKUB					
	a) Pelaksanaan (kali) b) Peserta (orang)	2 20	2 20	2 26	1 23	1 23
3	Sosialisasi P4GN					
	a) Pelaksanaan (kali) b) Peserta (orang)	1 100	1 100	2 100	- -	1 100
4	Pendidikan Politik bagi warga Negara					
	a) Pelaksanaan (kali)	-	1	3	1	1



No	Uraian	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
	b) Peserta (orang)	-	39	258	75	40
5	Pembinaan Politik Daerah					
	a) Jumlah Parpol	12	12	16	16	16
	b) Parpol yang mendapat bantuan	11	11	12	10	10
	c) Jumlah LSM / Ormas	17	18	24	34	34

Sumber: Kantor Kesbangpol Kabupaten. Solok Selatan

#### 2.1.4. Aspek Daya Saing

##### A. Infrastruktur perhubungan

Aspek daya saing daerah dari fokus fasilitas infrastruktur aksesibilitas dapat diukur melalui indikator Indek Kesulitan Geografis Daerah. Indek Kesulitan Geografis Daerah Nagari di Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.64.**  
**Indek Kesulitan Geografis Kabupaten Solok Selatan**

Kecamatan	Nagari	Dimensi Pelayanan Dasar	Dimensi Infrastruktur	Dimensi Aksesibilitas	IKG 2021
Sangir	Lubuk Gadang	24,65	13,56	0,00	14,62
Sangir	Lubuk Gadang Timur	27,97	47,25	17,01	28,94
Sangir	Lubuk Gadang Selatan	27,79	39,16	18,50	27,49
Sangir	Lubuk Gadang Utara	43,60	57,47	18,50	39,03
Sangir Jujuan	Lubuk Malako	7,34	20,22	17,01	13,18
Sangir Jujuan	Padang Air Dingin	29,61	53,43	0,00	25,89
Sangir Jujuan	Bidar Alam	26,04	43,21	22,73	28,87
Sangir Jujuan	Padang Limau Sundai	33,84	55,45	37,26	39,73
Sangir Jujuan	Padang Gantiang	25,93	55,45	20,25	30,81
Sangir Balai Janggo	Sungai Kunyit	32,47	35,39	0,00	23,19
Sangir Balai Janggo	Talunan Maju	26,32	47,89	28,75	31,90
Sangir Balai Janggo	Talao Sungai Kunyit	37,07	58,14	28,75	39,25
Sangir Balai Janggo	Sungai Kunyit Barat	31,10	48,52	18,50	31,15
Sangir Batang Hari	Abai	27,97	58,88	17,01	31,54
Sangir Batang Hari	Ranah Pantai Cermin	27,97	43,21	21,24	29,32
Sangir Batang Hari	Dusun Tangah	30,96	45,21	34,01	35,09
Sangir Batang Hari	Sitapus	27,04	41,38	17,01	27,19
Sangir Batang Hari	Lubuk Ulang Aling	17,03	55,45	47,35	34,92
Sangir Batang Hari	Lubuk Ulang Aling Selatan	36,29	53,09	53,14	45,21
Sangir Batang Hari	Lubuk Ulang Aling Tengah	25,06	66,18	43,59	39,95
Sungai Pagu	Koto Baru	5,91	36,26	17,01	16,11
Sungai Pagu	Pasar Muara Labuh	9,38	40,95	17,01	18,79

Kecamatan	Nagari	Dimensi Pelayanan Dasar	Dimensi Infrastruktur	Dimensi Aksesibilitas	IKG 2021
Sungai Pagu	Pulakek Koto Baru	24,41	41,04	17,01	25,87
Sungai Pagu	Sako Pasia Talang	37,51	57,47	17,01	35,71
Sungai Pagu	Pasir Talang	19,43	41,94	4,23	19,83
Sungai Pagu	Bomas	24,35	55,45	21,24	30,37
Sungai Pagu	Sako Selatan Pasia Talang	26,84	53,43	21,27	31,10
Sungai Pagu	Sako Utara Pasia Talang	23,69	55,45	34,01	33,97
Sungai Pagu	Pasir Talang Selatan	16,21	20,28	22,73	19,12
Sungai Pagu	Pasir Talang Barat	29,19	38,65	21,24	28,88
Sungai Pagu	Pasir Talang Timur	21,32	50,77	25,51	29,20
Pauah Duo	Alam Pauh Duo	20,78	37,52	17,01	23,38
Pauah Duo	Kapau Alam Pauh Duo	21,17	55,45	17,01	27,58
Pauah Duo	Luak Kapau Alam Pauh Duo	21,37	52,57	21,24	28,32
Pauah Duo	Pauh Duo Nan Batigo	35,99	52,79	17,01	33,95
Koto Parik Gadang Diateh	Pakan Rabaa	22,82	30,46	21,24	24,05
Koto Parik Gadang Diateh	Pakan Rabaa Timur	26,50	54,15	25,51	32,40
Koto Parik Gadang Diateh	Pakan Rabaa Utara	26,13	36,13	25,51	28,18
Koto Parik Gadang Diateh	Pakan Rabaa Tengah	19,68	46,09	21,24	26,08
<b>Rata-rata</b>		<b>25,61</b>	<b>46,04</b>	<b>21,66</b>	<b>28,97</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan

## B. Infrastruktur Wilayah

Aspek daya saing daerah dari fokus fasilitas wilayah/infrastruktur dapat diukur melalui empat indikator yaitu: jenis dan jumlah bank dan cabangnya, jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabangnya, jenis, kelas dan jumlah restoran, jenis, kelas dan jumlah penginapan/hotel. Perkembangan indikatornya di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021 dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 2.65.**  
**Perkembangan Indikator Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**  
**Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021**

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	<b>Jenis dan jumlah bank dan cabangnya</b>						
	Jumlah Bank	Buah	12	12	12	12	12
	Bank Umum	Buah	5	5	5	5	5
	Bank Syariah	Buah	2	2	2	2	2
	BPR	Buah	5	5	5	5	5

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
2.	<b>Jenis dan jumlah perusahaan asuransi</b>						
	Jumlah perusahaan asuransi	Buah	3	3	3	3	3
	Asuransi jiwa	Buah	1	1	1	1	1
	Asuransi lainnya	Buah	2	2	2	2	2
3.	<b>Jenis, kelas dan jumlah restoran</b>						
	Rumah Makan/Restoran	Buah	48	48	40	40	67
4.	<b>Jenis, dan kelas dan jumlah penginapan/hotel</b>						
	Jumlah Penginapan/Hotel	Buah	16	16	16	26	29
	Kelas Wisma	Buah	10	10	10	20	23
	Hotel Melati	Buah	5	5	5	5	5
	Hotel Bintang 1	Buah	1	1	1	1	1

Sumber: BPS; Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Solok Selatan

Aspek daya saing daerah dari fokus fasilitas wilayah/infrastruktur untuk urusan komunikasi, informatika dan energi dapat diukur melalui tiga indikator yaitu: rasio ketersediaan daya listrik, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik dan jumlah daerah *blank spot*. Perkembangan indikator urusan komunikasi, informatika dan energi di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021 sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.66.**  
**Perkembangan Indikator Infrastruktur Dasar Wilayah**  
**Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Rasio Elektrifikasi	persen	97,69	98,36	97,85	96,18	98,46
2	Persentase Rumah tangga yang menggunakan listrik (PLN dan Non PLN)	%	97,69	98,36	97,85	99,57	99,63
3	Jumlah Jorong Blank Spot	Jorong	46	46	46	46	36

Sumber: Dinas Kominfo, Dinas Perumkim & LH, BPS Kabupaten Solok Selatan dan Ranting PLN Muara Labuh

### C. Iklim Investasi

Untuk melihat fokus iklim berinvestasi dalam mengukur aspek daya saing daerah dilakukan dengan mengukur enam indikator yaitu: 1) angka kriminalitas, 2) jumlah demo, 3) lama proses perizinan, 4) jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, 5) jumlah perda yang mendukung iklim investasi, dan 6) persentase desa berstatus swasembada/mandiri terhadap total desa. Perkembangan fokus iklim berinvestasi di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021 sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.67.**  
**Perkembangan Indikator Fokus Iklim Berinvestasi**  
**Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021**

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Rasio Angka kriminalitas,	per 10.000 penduduk	29,67	25,31	24,32	18,69	11,79
3.	Lama Proses Perizinan,	Hari	1-5	1-5	1-5	1-5	1-3
4.	Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah						
	Jumlah Pajak Daerah	(Milyar Rp)	6.961	7.617	8.420	6.801	16.500
	Jenis Pajak Daerah	Jenis	7	7	7	7	7
	Jumlah Retribusi Daerah	(Milyar Rp)	1.231	903	1.378	1.199	1.235
	Jenis Retribusi Daerah	Jenis	14	10	10	10	10
5.	Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Investasi	Dokumen	2	2	2	2	2
6.	Persentase Desa Berstatus Maju dan Mandiri Terhadap Total Desa	%	51,28	48,72	56,41	61,54	61,54

Sumber: Kantor Kesbang Pol, BPKD, Dinas Penanaman modal dan PTSP dan Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Solok Selatan

## 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Tahun 2021 dan Realisasi RPJMD

### 2.2.1. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Untuk melihat keberhasilan kinerja pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tahun 2021 dapat dilihat dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah. Target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut telah ditetapkan pertahun dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 berdasarkan tujuan dan sasaran dari pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati. Berdasarkan data kinerja pembangunan tahun 2021 dapat dilihat capaian kinerja Indikator Utama Kabupaten Solok Selatan tahun 2021 sebagaimana berikut:

**Tabel 2.68.**  
**Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021**

Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
<b>Misi 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkarakter, Produktif dan Kompetitif</b>				
<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>	<b>Indeks</b>	<b>69,44</b>	<b>69,23</b>	<b>99,70</b>
Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,39	8,32	99,17
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,97	12,72	98,07
Persentase Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar (7 -15) Hafiz Qur'an				
a). 1 Juz	Persen	3,33	13,68	410,87
b). 2 Juz	Persen	0,39	3,20	819,51
c). Lebih atau sama 3 Juz	Persen	0,42	3,13	744,22
Angka Harapan Hidup	Tahun	68,01	68,01	100
Prevalensi Balita Stunting	Persen	13,6	6,09	223,47
Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	Rp. Juta /Tahun	66,08	66,25	100,26
<b>Misi 2. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Daerah</b>				
<b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b>	<b>Persen</b>	<b>5,44</b>	<b>4,88</b>	<b>112,43</b>

Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
<b>Persentase Penduduk Miskin</b>	<b>Persen</b>	<b>7,32</b>	<b>7,52</b>	<b>97,34</b>
<b>Indeks Gini Ratio</b>	<b>Indeks</b>	<b>0,297</b>	<b>0,28</b>	<b>106,07</b>
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	2,4	3,35	139,50
<b>Misi 3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani</b>				
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	64	42,08*	65,75
Indeks SPBE	Indeks	1,94	1,21*	62,37
Nilai/Predikat SAKIP	Nilai/ Prediket	60 CC	54,24* CC	90,4
Opini BPK terhadap LKPD	Opini	WTP	WTP	100
Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai	3,04	na	na
<b>Indek Pelayanan Publik</b>	<b>Indeks</b>	<b>2,75</b>	<b>3,16*</b>	<b>114,91</b>
Indek Pelayanan Publik	Indeks	2,75	3,16*	114,91
<b>Misi 4. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pertumbuhan, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana</b>				
<b>Indek Infastruktur Wilayah</b>	<b>Indeks</b>	<b>37</b>	<b>38,03</b>	<b>102,78</b>
Indeks Ketersediaan Infrastruktur dasar	Indeks	70,75	72,51	102,45
Indeks Kesulitan Geografis (IKG) /Rata-Rata Kab	Indeks	28,5	28,97	98,37
Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,32	0,29	90,63
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	79,73	73,59	92,30
<b>Misi 5. Pelestarian Seni, Budaya, Olahraga dan Penanganan Permasalahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat</b>				
<b>Peningkatan jumlah lembaga kesenian</b>	<b>Persen</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>25</b>
<b>Peningkatan jumlah Klub/ Perkumpulan Olahraga</b>	<b>Persen</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Persentase lembaga Adat yang aktif (KAN, LKAAM dan Bundo Kanduang)	Persen	47,37	100	211,10
Persentase lembaga Seni dan budaya yang aktif	Persen	37,63	53,19	141,35
Persentase Klub/ Perkumpulan Olahraga yang aktif	Persen	100	94	94
<b>Persentase PPKS yang Ditangani</b>	<b>Persen</b>	<b>71,3</b>	<b>100</b>	<b>140,25</b>
Persentase PPKS yang Ditangani	Persen	71,3	100	140,25
<b>Indeks Desa Membangun</b>	<b>Indeks</b>	<b>0,742</b>	<b>0,73</b>	<b>98,27</b>
Persentase Nagari Mandiri	Persen	17,9	17,9	100
<b>Indeks Pembangunan Gender</b>	<b>Indeks</b>	<b>96,2</b>	<b>95,14</b>	<b>98,90</b>
Indeks Pembangunan Gender	Indeks	96,2	95,14	98,90
<b>Persentase Perusahaan yang memenuhi kewajibannya dalam bentuk CSR</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>93,33</b>	<b>93,33</b>
Persentase pemamfaatan CSR yang mendukung program pemerintah daerah	Persen	85	75	88,30

Cat : \* Data yang dikeluarkan pada tahun 2021 terhadap kinerja 2020

Sumber: Bappeda Tahun 2021

### 2.2.2. Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2021

Untuk melihat keberhasilan kinerja pencapaian penyelenggaraan pemerintah daerah pada tahun 2021 dapat dilihat dari pencapaian Indikator kinerja Kunci (IKK) daerah. Target capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) tersebut telah ditetapkan pertahun dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan data kinerja pembangunan tahun 2021 dapat dilihat capaian Kinerja Indikator Kunci Kabupaten Solok Selatan tahun 2021 sebagaimana tabel dibawah ini



**Tabel 2.69.**  
**Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2021**

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021		Capaian
			Target	Realisasi	
<b>ASPEK KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI</b>					
1	Indek Pembangunan Manusia	Indeks	69,44	69,23	99,70
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	2,4	3,35	139,47
3	PDRB per kapita (Harga Berlaku)	Juta/ Tahun	32,4	31,26	96,47
4	PDRB per kapita (Harga Konstan)	Juta/ Tahun	22,13	21,96	99,23
5	Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan	Ribu/ Tahun	10.452	10.365	99,17
6	Indek Gini Ratio	Indek	0,297	0,28	106,07
7	Tingkat Pengangguran	%	5,44	4,84	112,44
8	Tingkat Kemiskinan	%	7,32	7,52	97,34
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>					
<b>I</b>	<b>Pelayanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>				
<b>1.</b>	<b>Pendidikan</b>				
1	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,39	8,32	99,17
2	Angka harapan lama sekolah	Tahun	12,97	12,72	98,07
3	Angka Melanjutkan				
	a.SD/MI ke SMP/MTs	%	96,71	99,11	102,48
	b.SMP/MTs ke SMA/AM/SMK	%	99,11	99,11	100,00
4	Angka Melek Huruf	%	95,75	99,5	103,92
5	Angka Partisipasi Kasar (APK)				
	a. TK/PAUD	%	55,88	53,43	95,62
	b.SD/MI/SDLB/Paket A	%	100	115,41	115,41
	c.SMP/MTs/SMPLB/Paket B	%	100	89,06	89,06
	d.SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C	%	79,71	83,57	104,84
6	Angka Partisipasi Murni (APM)				
	a.SD/MI/SDLB/Paket A	%	99,2	99,08	99,88
	b.SMP/MTs/SMPLB/Paket B	%	76,9	76,32	99,25
	c.SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C	%	64,3	63,53	98,80
7	Persentase guru bersertifikat Pendidik				
	a. SD/MI	%	91,94	92,68	100,80
	b. SMP/MTs	%	95,54	95,54	100,00
	c. SMA/MA	%	97,4	97,4	100,00
8	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	93	79,25	85,22
9	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	96	109,25	113,81
10	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	78	95,7	122,74
11	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	1,7	2,6	153,03
<b>2.</b>	<b>Kesehatan</b>				
1	Umur Harapan Hidup; (UHH)	Tahun	68,01	68,01	100,00
2	Angka Kematian Ibu	Orang per 100.000 KH	192	242	79,34

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021		Capaian
			Target	Realisasi	
3	Angka Kematian Bayi;	Bayi per 1.000 KH	7,3	4,2	173,81
4	Prevalensi Gizi Buruk pada Anak Balita	%	0,01	0,01	100,00
5	Prevalensi Balita Stunting	%	13,6	6,09	223,32
6	Peningkatan Type Rumah Sakit	Type	C	C	100,00
7	Rasio daya tampung RS Rujukan	%	0,78	0,78	100,00
8	Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	%	100	100	100,00
9	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	74,2	66,94	90,22
10	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	76	68,10	89,61
11	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	85	75,27	88,56
12	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	87	72,54	83,38
13	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	89,2	95,66	107,25
14	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	88,5	34,37	38,84
15	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	71	89,08	125,47
16	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	58	43,43	74,87
17	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	92,69	92,69
18	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	65	71,01	109,25
19	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100,00
20	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	10,5	48,44	461,29
<b>3.</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>				
1	Persentase kesesuaian pemamfaatan ruang dengan rencana tata ruang	%	100	#DIV/0!	
2	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten	%	30	48,44	161,45
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	27	11,33	41,98
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kota (Akses air minum layak)	%	78	81,01	103,86

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021		Capaian
			Target	Realisasi	
5	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (akses sanitasi layak)	%	60,47	58,57	96,86
6	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten	%	100	100	100,00
7	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	%	44,09	60,79497034	137,89
8	Tingkat Kemantapan jembatan	%	79	#DIV/0!	
9	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	0	0	
<b>4.</b>	<b>Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>				
1	Persentase Rumah layak huni	%	91	90,73	99,71
2	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	%	96,75	98,46	101,77
3	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	%	100	88	88,00
4	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	%	100	0	0,00
5	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%	100	0	0,00
6	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	9	9,27	102,98
7	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	50,89	100	196,50
<b>5</b>	<b>Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>				
1	Cakupan Penanganan Perda	%	100	100	100,00
2	Persentase Ketersediaan Satlinmas	%	0	0	0,00
3	Pencapaian Respon time	%	54,85	37,93	69,15
4	Persentase Penurunan Jiwa terdampak bencana	%	11	6,64	60,33
5	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100,00
6	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	0	5300	#DIV/0!
7	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	0	3044	#DIV/0!
8	Persentase daerah pasca bencana yang ditindaklanjuti	%	80	100	125,00
9	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100,00
<b>6</b>	<b>Urusan Sosial</b>				
1	Persentase Cakupan Pelayanan PPKS	%	70	100	142,86
2	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	100	100	100,00
3	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	%	100	100	100,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021		Capaian
			Target	Realisasi	
<b>II</b>	<b>Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar</b>				
<b>1</b>	<b>Urusan Ketenagakerjaan</b>				
1	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	1,8	0,30	16,63
2	Persentase tenaga kerja yang terdaftar ditempatkan	%	19,82	0	0,00
3	Persentase Kasus Tenaga Kerja yang ditangani	%	100	100	100,00
4	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100,00
5	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Berdasarkan ADHK)	Juta/Tenaga kerja	46,3	46,549	100,54
6	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	12,82	9,3	72,30
<b>2</b>	<b>Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Masyarakat</b>				
1	Indek Pembangunan Gender	indeks	96,2	95,14	98,90
2	Persentase Penyelesaian Kasus Terhadap Anak dan Perempuan	%	100	100	100,00
3	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	%	12,65	8,16	64,54
4	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	%	100	100	100,00
5	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	1,05	4,42	23,76
<b>3</b>	<b>Urusan Pangan</b>				
1	Penguatan Cadangan Pangan	ton	5	5	100,00
2	Skor Pola Pangan Harapan	%	77	77,6	100,78
3	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	122,66	611,74	498,73
<b>4</b>	<b>Urusan Pertanahan</b>				
1	Persentase tanah garapan yang telah diselesaikan masyarakat dengan perusahaan/ pemerintah)	%	0	0	#DIV/0!
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	100	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>3</b>	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	100,00
<b>5</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>				
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	79,73	73,59	92,30
2	Persentase pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	%	30	20,82	69,40
3	Persentase pengurangan sampah diwilayah kab	%	5	-0,002	-0,03
4	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	%	100	100,00	100,00
<b>6</b>	<b>Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil</b>				

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021		Capaian
			Target	Realisasi	
1	Persentase rumah tangga yang memiliki Kartu Keluarga (KK)	%	94	95,47	101,56
2	Perekaman KTP Elektronik	%	100	101,927468	101,93
3	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) yang memiliki KIA	%	30	33,89076937	112,97
4	Persentase penduduk yang memiliki akte kelahiran (usia 0-18 tahun)	%	95	93,87	98,81
5	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	OPD	6	23	383,33
<b>7</b>	<b>Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>				
1	Jumlah Desa Mandiri	Desa /Nagari	9	9,00	100,00
2	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	7,69	7,69	100,03
3	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	23,33	0	0,00
<b>8</b>	<b>Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>				
1	Cakupan akseptor KB aktif	%	82	86,49	105,48
2	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,4	1,55	25,76
3	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	2,5	2,5	100,00
4	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	66	71,52	108,36
5	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	0	6,98	0,03
<b>9</b>	<b>Urusan Perhubungan</b>				
1	Penurunan Rasio Fatalitas Kecelakaan lalin	Korban Meninggal Per 100 Kecelakaan	0,27	35,9	0,75
2	Rasio konektivitas Kabupaten	Rasio	0,48	0,23	48,75
3	Persentase kinerja lalu lintas (V/C Ratio di jalan Kabupaten)	%	29,7	30	101,01
<b>10</b>	<b>Urusan Komunikasi dan Informasi</b>				
1	Nilai Indeks SPBE	Nilai	1,94	1,21	62,37
2	Persentase Jorong Yang dilayani akses telekomunikasi	%	87	86,91	99,90
3	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100,00
4	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	30,3	42,42	140,01
5	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten	%	28	68,47	244,53
<b>11</b>	<b>Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</b>				
1	Persentase Pertumbuhan Koperasi yang meningkat kekuatan usaha dan kelembagaannya (Koperasi Berkualitas)	%	1,34	21,26	1586,56



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021		Capaian
			Target	Realisasi	
2	Persentase KSP/USP Koperasi berprestasi	%	2,7	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	5	1,66	33,27
<b>12</b>	<b>Urusan Penanaman Modal</b>				
1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	%	0,6	13,95	2324,25
<b>13</b>	<b>Urusan Kepemudaan dan Olahraga</b>				
1	Persentase Organisasi Kepemudaan aktif	%	25	#DIV/0!	
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,5	0,062	12,38
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	1,56	0,31	
4	Peningkatan prestasi olahraga				
	Ø emas	Buah	n.a	0	
	Ø Perak	Buah	n.a	0	
	Ø Perunggu	Buah	n.a	0	
<b>13</b>	<b>Urusan Statistik</b>				
1	Persentase jumlah elemen data sektoral yang dikelola	%	100	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100,00
3	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100,00
<b>14</b>	<b>Urusan Persandian</b>				
1	Persentase perangkat daerah yang memiliki keamanan informasi	%	0	0	100,00
2	Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	%	100	0	0,00
<b>15</b>	<b>Urusan Kebudayaan</b>				
1	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	CB	131	130	99,24
2	Jumlah Sanggar Budaya dibina	Sanggar	35	20	57,14
3	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	100	30,77	30,77
<b>16</b>	<b>Urusan Perpustakaan</b>				
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Orang	2700	225	8,33
2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	67	39,15	58,43
3	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	19	19,23	101,21
<b>17</b>	<b>Urusan Kearsipan</b>				
1	Persentase OPD yang menerapkan arsip secara baku	%	21,21	33,33	157,16
2	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Nilai Rata	26	31,14	119,77
3	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan	Nilai Rata	2,75	2,83	103,03

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021		Capaian
			Target	Realisasi	
	kesejahteraan rakyat				
<b>III</b>	<b>Urusan Pilihan</b>				
<b>1</b>	<b>Urusan Kelautan dan Perikanan</b>				
1	Kontribusi Subsektor Perikanan thd Sektor Pertanian	Persen	1,08	0,99	91,79
2	Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/kapita/tahun	31,58	31,70	100,38
3	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Ton	1991	2441,52	122,63
<b>2</b>	<b>Urusan Pariwisata</b>				
1	Jumlah Objek Wisata Unggulan yang siap dipasarkan	Objek	10	10	100,00
2	Persentase Pelaku ekraf yang dibina	%	11	50	454,55
3	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	5	0	0,00
4	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kota	%	5	69,08	1381,53
5	Tingkat hunian akomodasi	%	45	41,66	92,58
6	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	25,4	18,28	71,96
7	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	1,61	2,60	161,37
<b>3</b>	<b>Urusan Pertanian</b>				
1	Kontribusi sektor pertanian	Persen	30,22	28,42	94,03
2	Jumlah Produksi Pertanian dan Perkebunan dan Peternakan Unggulan				
	- Padi	Ton	100072	98066	98,00
	- Jagung	Ton	86259	80773	93,64
	- Kacang tanah	Ton	870	737,7	84,79
	- Manggis	Ton	448	2227,6	497,23
	- Cabe	Ton	7026	8571,9	122,00
	- Bawang Merah	Ton	4305	2819	65,48
	- Kopi	Ton	3139	2923	93,12
	- Porang	Ton	150	0	0,00
	- Kelapa sawit	Ton	52654	43873	83,32
	- Populasi ternak besar	ekor	20757	16111	77,62
	- Telor	Ton	434,24	417,88	96,23
3	Jumlah Kelompok Tani berdasarkan kelas:				
	a. Pemula	Keltan	978	1339	136,91
	b. Lanjut	Keltan	324	154	47,53
	c. Madia	Keltan	35	5	14,29
	d. Utama	Keltan	2	2,00	100,00
4	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	5,1	4,25	83,33
5	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	29,18	-27,36	-93,77
<b>4</b>	<b>Urusan Energi Sumber Daya Mineral</b>				
1	Cakupan pemanfaatan langsung panas bumi yang dibina	%	100	100	100,00
<b>5</b>	<b>Urusan Perdagangan</b>				
1	Kontribusi Sektor Perdagangan	%	20,3	20,09	98,98
2	Persentase peningkatan produk unggulan daerah (Lokal)	%	40	#DIV/0!	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021		Capaian
			Target	Realisasi	
3	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	71	65	91,55
4	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	20	31,59	157,93
5	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	52	29,78	57,27
<b>6</b>	<b>Urusan Perindustrian</b>				
1	Kontribusi Sektor Perindustrian	%	4,4	4,40	100,07
2	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kota	%	4,8	18,96	395,07
3	Persentase pertumbuhan izin Industri	%	5	-83,3	-1666,67
4	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industry dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	35	0	0,00
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	60	100	166,67
6	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100,00
7	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kota	%	100	100	100,00
8	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	100	0	0,00
<b>IV</b>	<b>Fungsi Penunjang</b>				
<b>1</b>	<b>Perencanaan</b>				
1	Persentase Pencapaian Nilai SAKIP (Perencanaan)	%	60	57,23	95,39
2	Persentase Capaian Sasaran Pembangunan Daerah (IKU)	%	82	76	92,68
3	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah RKPD dan RPJMD	%	100	100	100,00
4	Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100,00
5	Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Daerah	%	80	76	95,00
6	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	100,00
<b>2</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>				
1	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam perumusan kebijakan daerah	%	0	0	100,00
<b>3</b>	<b>Keuangan</b>				
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	100,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021		Capaian
			Target	Realisasi	
2	Persentase Pencapaian Target PAD	%	100	94,29	94,29
3	Kontribusi PAD Terhadap Belanja Daerah	%	8,7	9,74	111,95
4	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	30,7	33,39	108,76
5	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	2	1,39	69,63
6	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	64,1	71,99	112,31
7	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	0,93	#DIV/0!	#DIV/0!
8	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	0	#DIV/0!	#DIV/0!
9	Assets Management	Nilai	4	4	100,00
10	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	8,05	11,86	147,38
11	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	100	#DIV/0!	
12	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100	100	100,00
<b>4</b>	<b>Kepegawaian</b>				
1	Indeks Sistem Merit	indeks	176	114	64,77
2	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	55	50,03	90,96
3	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	28,77	72,45	251,82
4	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	32,5	7,82	24,07
5	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	51,13	100	195,58
<b>5</b>	<b>Pelayanan Pemerintahan lainnya</b>				
1	Nilai LAKIP/SAKIP	Nilai	64	54,24	84,75
2	Nilai LPPD	Nilai	3,04	na	
3	Persentase pencapaian SPM per-urusan	%	100	#DIV/0!	
4	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indek	baik	baik	100,00
5	Persentase Usulan Ranperda OPD yang dibahas oleh DPRD menjadi Perda	%	100	#DIV/0!	
6	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	%	20	100	500,00
7	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	95	21,07517226	22,18
8	Jumlah Perda Inisiatif DPRD	Perda	1	0	0,00
9	Maturitas SPIP	nilai	2,6	2	100,00
10	Level Kapabilitas Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP)	Level	II+	II+	100,00

Sumber: Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 (Bappeda)

### 2.2.3. Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimum Tahun 2021

Untuk melihat keberhasilan kinerja daerah dalam mencapai standar minimal pelayanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, sebagai mana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal maka dapat dilihat dari Indikator Standar Pelayanan Minimal dibawah ini

**Tabel 2.70.**  
**Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimum Tahun 2021**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Pendidikan Dasar	Persentase Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTS)	100	97,24	97,24
2	Pendidikan Kesetaraan	Persentase Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	95,7	95,7
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	79,25	79,25
4	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100	66,94	66,94
5	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100	68,10	68,10
6	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100	75,27	75,27
7	Pelayanan kesehatan balita	Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100	72,27	72,27
8	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100	72,55	72,55
9	Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100	95,66	95,66
10	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100	89,08	89,08
11	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	Persentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	43,43	43,43
12	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Persentase Warga Negara penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100	92,66	92,66
13	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Warga Negara dengan Gangguan Jiwa Berat yang Terlayani Kesehatan	100	71,01	71,01
14	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Warga Negara Terduga Tuberculosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100	100	100
15	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persentase Warga Negara dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100	48,44	48,44



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
16	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga	100	81,01	81,01
17	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase rumah tangga yang memiliki akses pengolahan air limbah domestik	100	58,57	58,57
18	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Persentase rumah korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	88	88
19	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	Persentase rumah tangga yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	100	0	0
20	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda dan perkara	100	100	100
21	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100
22	Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar diluar panti	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya diluar panti	100	100	100
23	Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar diluar panti	Persentase Penyandang Disabilitas yang Terpenuhi Kebutuhannya diluar panti	100	100	100
24	Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar diluar panti;	% Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya diluar panti	100	100	100
25	Rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis diluar panti	% Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya diluar panti	100	100	100
26	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / Kota	% Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya diluar panti	100	100	100

Sumber: Laporan Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Daerah Tahun 2021

### **2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Perumusan permasalahan pembangunan harus dapat menjelaskan permasalahan pokok yang dihadapi dan akar masalah. Selanjutnya, permasalahan pokok dan akar masalah menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah.

Permasalahan pembangunan diklasifikasi berdasarkan beberapa aspek yaitu permasalahan yang berhubungan dengan sasaran prioritas pembangunan daerah dan Aspek Pelayanan Urusan Perangkat Daerah. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari: (i) kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal; (ii) kelemahan yang tidak diatasi; (iii) peluang yang tidak dimanfaatkan, dan (iv) ancaman yang tidak diantisipasi

#### **2.3.1. Permasalahan Daerah Terkait Dengan Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah**

Berdasarkan analisis terhadap capaian kinerja sasaran pembangunan daerah, terdapat permasalahan terkait tujuan dan sasaran prioritas pembangunan daerah, yaitu:

##### **❖ Misi 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkarakter, Produktif dan Kompetitif.**

Permasalahan utama terkait dari pencapaian tujuan dan sasaran dari Misi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkarakter, Produktif dan Kompetitif adalah:

1. Rendahnya ketersediaan sarana pendidikan dan kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal.
2. Masih rendahnya pemenuhan hak terhadap pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan.
3. Relatif tingginya biaya yang dikeluarkan masyarakat sebagai akibat rendahnya aksesibilitas ke sarana pendidikan dan kesehatan
4. Belum berkembangnya rumah-rumah tahfiz di setiap jorong
5. Belum selarasnya pengembangan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja
6. Rendahnya kualitas tenaga kerja

##### **❖ Misi 2. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Daerah.**

Permasalahan utama terkait dari pencapaian tujuan dan sasaran dari Misi Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Daerah adalah:

1. Masih terbatasnya ketersediaan sarana penunjang perekonomian
2. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya alam dan hilirisasi / turunan produk yang dihasilkan.
3. Rendahnya kualitas SDM pelaku usaha baik dari sisi produksi maupun pemasaran sehingga menyebabkan daya saing produk-produk yang dihasilkan relatif rendah.
4. Terbatasnya pemasaran dari hasil produksi dari dunia usaha yang disebabkan masih rendahnya penggunaan sistem informasi perdagangan untuk mendukung pemasaran distribusi barang.
5. Terbatasnya penggunaan teknologi dalam penggunaan teknologi tepat guna dalam proses pengolahan sumber daya alam dan industri.
6. Rendahnya akses pelaku usaha ke sumber-sumber pembiayaan dan permodalan
7. Meningkatnya angka kemiskinan yang diikuti oleh menurunnya tingkat kesejahteraan penduduk miskin

❖ **Misi 3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani.**

Permasalahan utama terkait dari pencapaian tujuan dan sasaran dari Misi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani adalah:

1. Rendahnya kualitas dan kuantitas ASN Daerah
2. Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana ASN
3. Belum maksimalnya penerapan *reward* dan *punishment* bagi aparatur pemerintahan terhadap pencapaian kinerja
4. Masih minimnya penerapan teknologi dalam pelayanan birokrasi pemerintah
5. Belum maksimalnya fungsi koordinasi antar OPD dan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan

❖ **Misi 4. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pertumbuhan, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana**

Permasalahan utama terkait dari pencapaian tujuan dan sasaran dari Misi Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pertumbuhan, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana adalah:

1. Masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur dasar masyarakat dan infrastruktur penunjang daerah terutama di daerah-daerah pusat pertumbuhan dan ekonomi
2. Menurunnya kualitas daya tampung dan daya dukung lingkungan sebagai akibat pembangunan wilayah dan aktifitas ekonomi.

3. Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana, ketersediaan sumber daya manusia serta keterpaduan pengurangan resiko dan penanganan bencana (alam dan non alam).

❖ **Misi 5. Pelestarian Seni, Budaya, Olahraga dan Penanganan Permasalahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.**

Permasalahan utama terkait dari pencapaian tujuan dan sasaran dari Misi **Pelestarian Seni, Budaya, Olahraga dan Penanganan Permasalahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat** adalah:

1. Menurunnya pengembangan dan pengaplikasian nilai budaya daerah dalam kehidupan bermasyarakat
2. Rendahnya partisipasi generasi muda dalam pengembangan, dan pelestarian seni dan budaya
3. Belum berkembangnya budaya berorganisasi dan berolahraga terutama bagi penduduk usia produktif
4. Belum optimalnya penanganan dan meningkatnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
5. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dan dunia dalam pembangunan daerah dan pemeliharaan hasil pembangunan daerah
6. Masih belum sinerginya kebijakan pembangunan antara pemerintah Kabupaten dan Nagari.

**2.3.2. Permasalahan Terkait Dengan Aspek Pelayanan Umum**

No	Aspek/Urusan	Permasalahan
<b>I</b>	<b>Fokus Pelayanan Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>	
1	Pendidikan	<p><b>Permasalahan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Rendahnya ketersediaan sekolah yang sesuai dengan standar pendidikan</li> <li>❖ Masih rendahnya pemenuhan hak terhadap pelayanan dasar pendidikan</li> </ul> <p><b>Penyebab:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum meratanya pendistribusian guru dan masih rendahnya profesionalitas guru dan tenaga kependidikan.</li> <li>2. Rendahnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan dilihat dari <i>subject knowledge</i> dan <i>pedagogical knowledge</i> pada seluruh tingkatan pendidikan (dilihat dari persentase guru yang bersertifikasi pendidik dan nilai kompetensi pengetahuan dan keterampilan pendidik).</li> <li>3. Rendahnya ketersediaan, mutu dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan (dilihat dari ketersediaan mobiler, alat peraga pendidikan, labor, pustaka, dan pagar; untuk mutu dan kualitas adalah ruang kelas, sanitasi sekolah dll) yang disebabkan rendahnya tata kelola pendidikan dalam menciptakan iklim dan motivasi.</li> <li>4. Relatif tingginya biaya pendidikan yang dikeluarkan masyarakat sebagai akibat rendahnya aksesibilitas</li> </ol>

No	Aspek/Urusan	Permasalahan
		masyarakat kesarana pendidikan (akibat keterbatasan sarana perhubungan).
2	Kesehatan	<p><b>Permasalahan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat</li> <li>❖ Masih tingginya prevalensi stunting</li> </ul> <p><b>Penyebab:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya rasio ketersediaan tenaga kesehatan</li> <li>2. Belum meratanya tenaga kesehatan berkualitas pada setiap tingkatan fasilitas kesehatan (dokter dan tenaga keperawatan)</li> <li>3. Rendahnya mutu dan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.</li> <li>4. Masih cakupan layanan kesehatan masyarakat</li> <li>5. Belum optimalnya pelayanan dan penanganan gizi dan kesehatan bagi wanita usia subur, ibu hamil, ibu menyusui dan balita</li> <li>6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat dan memeriksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan</li> <li>7. Masih terdapatnya masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan</li> </ol>
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<p><b>Permasalahan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Rendahnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar dan kewilayahan</li> <li>❖ Belum optimalnya fungsi jaringan Irigasi Teknis dalam mendukung produksi pertanian</li> <li>❖ Belum maksimalnya peran penataan ruang</li> </ul> <p><b>Penyebab:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih banyaknya jalan dan jembatan dengan kondisi rusak dan kurang baik (jalan kabupaten/Prov/Negara/non status)</li> <li>2. Banyaknya jaringan irigasi baik primer atau sekunder yang rusak</li> <li>3. Terbatasnya ketersediaan saluran drainase (primer, sekunder, tersier) yang dibangun, sehingga terjadinya genangan air yang cukup tinggi</li> <li>4. Belum adanya rencana pengembangan infrastruktur berbasis kawasan yang didasarkan pada pola ruang (termasuk kawasan ibukota kabupaten).</li> <li>5. Rendahnya ketersediaan sarana sanitasi serta layanan air bersih yang layak bagi masyarakat</li> <li>6. Belum optimalnya pengelolaan perizinan pemanfaatan ruang dan pengaturan ruang.</li> </ol>
4	Perumahan Rakyat dan Pemukiman	<p><b>Permasalahan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Belum optimalnya pengelolaan kawasan permukiman</li> </ul> <p><b>Penyebab:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Banyaknya terdapatnya rumah tidak layak huni</li> <li>2. Belum tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan perumahan.</li> <li>3. Kurangnya pengawasan dalam penertiban pembangunan perumahan (seperti lokasi rawan bencana, kelaikan</li> </ol>



No	Aspek/Urusan	Permasalahan
		<p>fungsi bangunan gedung).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya penanganan kawasan kumuh.</li> <li>Masih rendahnya ketersediaan RTH terutama dikawasan perkotaan.</li> </ol>
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<p><b>Permasalahan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Perda</li> <li>Masih Rendahnya Pelayanan Penanganan Kebakaran</li> <li>Belum Optimalnya Keterpaduan pengurangan resiko bencana</li> </ul> <p><b>Penyebab:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Belum efektifnya penegakan hukum dan peraturan daerah yang disebabkan rendahnya ketersediaan aparatur, sarana dan prasarana</li> <li>Rendahnya koordinasi antar OPD dan instansi yang terkait dengan Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat..</li> <li>Terbatasnya sarana dan prasarana serta SDM yang terkait dengan mitigasi bencana.</li> <li>Belum optimalnya pencegahan dan penanggulangan bencana alam (banjir, longsor, gempa).</li> </ol>
6	Sosial	<p><b>Permasalahan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial</li> </ul> <p><b>Penyebab:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Belum akuratnya data DTKS tingkat Kabupaten</li> <li>Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang disebabkan menurunnya kondisi sosial, ekonomi dan bencana alam</li> <li>Rendahnya jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesejahteraan sosial.</li> </ol>
<b>II</b>	<b>Fokus Pelayanan Urusan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>	
1	Tenaga Kerja	<p><b>Permasalahan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rendahya perlindungan tenaga kerja</li> <li>Rendahnya daya saing tenaga kerja</li> </ul> <p><b>Penyebab:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya fungsi Bipartit ketenagakerjaan.</li> <li>Kurangnya pengawasan dan perlindungan terhadap tenaga kerja, penanganan permasalahan tenaga kerja hanya berdasarkan laporan dari tenaga kerja.</li> <li>Kualitas dan daya saing calon tenaga kerja belum sesuai kebutuhan pasar (<i>link and match</i> belum terbangun)</li> <li>Belum berkembangnya sistem informasi ketenagakerjaan.</li> </ol>
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<p><b>Permasalahan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya peran serta gender dalam pembangunan</li> <li>Rendahnya pencapaian Kabupaten Layak Anak</li> </ul> <p><b>Penyebab:</b></p>

No	Aspek/Urusan	Permasalahan
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih terdapatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).</li> <li>2. Masih terdapatnya kasus kriminalisasi dan eksploitasi anak yang dikarenakan rendahnya pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.</li> <li>3. Masih minimnya ketersediaan kebijakan serta belum optimalnya pelaksanaan kebijakan pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak</li> <li>4. Belum optimalnya peran lembaga pengarusstaaan gender dan anak dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.</li> <li>5. Kurangnya wawasan, pengetahuan, kecakapan dan keterampilan perempuan dalam mengelola dan mengembangkan usaha</li> <li>6. Kurangnya kebijakan daerah yang mengatur kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, sehingga implementasi kebijakan masih dilakukan secara parsial</li> </ol>
3	Pangan	<p><b>Permasalahan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Rendahnya tingkat kualitas dan keanekaragaman pangan yang dikonsumsi masyarakat</li> </ul> <p><b>Penyebab:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurang meratanya konsumsi bahan pangan utama terutama bahan-bahan pangan yang ketersediaannya tergantung pada lokasi geografis.</li> <li>2. Belum beragamnya pola konsumsi pangan dan gizi masyarakat serta masih rendahnya skor pola pangan harapan.</li> <li>3. Belum terjamahnya tingkat keamanan pangan masyarakat (berkaitan dengan zat kimia, pengawet dan kadaluarsa).</li> <li>4. Kurangnya regulasi daerah tentang ketahanan pangan dan lahan pertanian berkelanjutan.</li> <li>5. Terbatasnya Informasi tentang Harga Komoditi Pangan</li> </ol>
4	Pertanahan	<p><b>Permasalahan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Belum optimalnya pengelolaan dan penatagunaan tanah</li> </ul> <p><b>Penyebab:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya kepemilikan sertifikat hak milik (persentase tentang luas tanah yang telah memiliki sertifikat hak milik).</li> <li>2. Sulitnya sertifikasi tanah ex Erpacht untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat.</li> <li>3. Penyelesaian konflik HGU dan tanah terlantar untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat (perubahan sertifikat HGU dan penerbitan sertifikat baru).</li> <li>4. Sulitnya proses pembebasan tanah yang akan digunakan untuk kepentingan umum.</li> </ol>
5	Lingkungan Hidup	<p><b>Permasalahan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Menurunnya kualitas lingkungan hidup</li> </ul> <p><b>Penyebab:</b></p>

No	Aspek/Urusan	Permasalahan
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dan limbah rumah tangga.</li> <li>2. Banyaknya kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan akibat Penambangan Tanpa Izin (PETI).</li> <li>3. Belum optimalnya perlindungan terhadap kawasan lindung, daerah tangkapan air, dan sumber air serta penanganan wilayah bencana.</li> <li>4. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</li> <li>5. Banyaknya ex lokasi investasi pertambangan, kehutanan yang belum dipulihkan/reklamasi.</li> <li>6. Belum optimalnya fasilitasi dan sinergi pemerintah daerah dengan komunitas penggiat lingkungan.</li> </ol>
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<p><b>Permasalahan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Masih belum optimalnya layanan administrasi kependudukan</li> <li>❖</li> </ul> <p><b>Penyebab:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pelayanan dan pengelolaan administrasi kependudukan terutama bagi daerah terpencil, perbatasan Kabupaten dan Kawasan Perusahaan.</li> <li>2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pentingnya pengurusan administrasi kependudukan.</li> <li>3. Sulitnya aksesibilitas dan jaringan komunikasi bagi masyarakat dalam kepengurusan dokumen kependudukan.</li> <li>4. Rendahnya dukungan stakeholder terkait pengumpulan data kependudukan.</li> </ol>
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<p><b>Permasalahan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Rendahnya tingkat kemandirian desa (rendahnya indek desa membangun)</li> </ul> <p><b>Penyebab:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya kapasitas dan sumberdaya lembaga pemberdayaan masyarakat dan perangkat nagari dalam pembangunan Desa/Nagari.</li> <li>2. Belum optimalnya pelayanan pemerintahan Nagari kepada masyarakat.</li> <li>3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat diperantauan dalam mendorong kemajuan daerah dan nagari.</li> <li>4. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara hasil-hasil pembangunan seiring menurunnya budaya gotong royong di masyarakat.</li> <li>5. Rendahnya sinkronisasi pembangunan antara kabupaten dan Nagari</li> </ol>
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<p><b>Permasalahan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Belum optimalnya pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana</li> </ul> <p><b>Penyebab:</b></p>

No	Aspek/Urusan	Permasalahan
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam ber KB hal ini dapat dilihat dari rasio akseptor KB dan Cakupan peserta KB Aktif.</li> <li>2. Tingginya angka kelahiran terutama pada rumah tangga miskin.</li> <li>3. Masih terbatasnya Kapasitas tenaga dan kelembagaan program KB.</li> <li>4. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan KB.</li> <li>5. Belum optimalnya advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE).</li> </ol>
9	Perhubungan	<p><b>Permasalahan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Rendahnya ketersediaan angkutan umum</li> <li>❖ Belum tercapai <i>Zero Accident</i></li> </ul> <p><b>Penyebab:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan dalam meningkatkan keamanan, keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.</li> <li>2. Berkurangnya kualitas prasarana perhubungan (rambu-rambu, marka jalan, pagar pengaman).</li> <li>3. Belum tersedianya sarana dan prasarana angkutan umum yang representative.</li> <li>4. Moda transportasi AKDP <i>illegal</i> (travel liar) lebih diminati oleh masyarakat daripada moda transportasi AKDP legal (bus).</li> </ol>
10	Komunikasi dan Informatika	<p><b>Permasalahan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Belum optimalnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi</li> <li>❖ Masih adanya daerah yang belum terjangkau oleh akses telekomunikasi</li> </ul> <p><b>Penyebab:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih terdapatnya <i>Blank Spot Area</i></li> <li>2. Belum terintegrasi sistem informasi manajemen dalam penyelenggaraan pemerintah daerah antara SKPD Kabupaten, Kecamatan dan Nagari (<i>e-Government</i>).</li> <li>3. Masih minimnya infrastruktur telekomunikasi seperti jaringan telepon, fax, free wi-fi area pada kawasan tertentu.</li> <li>4. Minimnya pemanfaatan website solselkab.go.id dalam penyebarluasan informasi kebijakan pemerintah daerah dan promosi potensi daerah.</li> </ol>
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	<p><b>Permasalahan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Masih rendahnya ketersediaan koperasi yang berkualitas</li> <li>❖ Masih rendahnya kualitas Usaha Mikro dalam perekonomian daerah</li> </ul> <p><b>Penyebab:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lemahnya kelembagaan, dan Badan Usaha Koperasi, terutama menyangkut aspek legalitas usaha, manajemen, SDM serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga</li> </ol>

No	Aspek/Urusan	Permasalahan
		<p>(AD/ART).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Belum optimalnya kemitraan antara UMKM, koperasi dengan lembaga lainnya.</li> <li>3. Masih banyaknya Usaha Mikro yang belum memiliki Legalitas usaha/izin Usaha.</li> <li>4. Masih rendahnya SDM dalam inovasi, diversifikasi dan pengembangan produk sesuai permintaan pasar (jaminan mutu, standarisasi).</li> <li>5. Masih kurangnya ketersediaan penunjang usaha, terutama pemasaran dan informasi pasar, ketersediaan bahan baku dan sarana teknologi produksi</li> </ol>
12	Penanaman Modal	<p><b>Permasalahan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Rendahnya pertumbuhan investasi</li> <li>❖ Belum optimalnya partisipasi dan kontribusi perusahaan swasta dalam pembangunan daerah</li> </ul> <p><b>Penyebab:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya kualitas infrastruktur (jalan dan telekomunikasi) untuk menghubungkan kantong-kantong potensi ekonomi dengan jalur utama.</li> <li>2. Terbatasnya ketersediaan sarana pendukung penanaman modal seperti hotel, restoran, lembaga keuangan.</li> <li>3. Belum lengkapnya SOP/SPP perizinan terkait beberapa kewenangan sekaitan UU 23 Tahun 2014.</li> <li>4. Belum adanya regulasi yang mengatur pemanfaatan tanah ulayat untuk investasi.</li> <li>5. Rendahnya kesadaran penanam modal memberikan laporan kegiatan penanaman modal.</li> <li>6. Minimnya kepastian hukum dan jaminan keamanan dalam penanaman modal bagi investor</li> </ol>
13	Kepemudaan dan Olahraga	<p><b>Permasalahan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Rendahnya peran aktif pemuda dalam pembangunan .</li> <li>❖ Masih rendahnya prestasi olahraga Solok Selatan.</li> <li>❖ Belum optimalnya penggalian potensi olahraga tradisional.</li> </ul> <p><b>Penyebab:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih minimnya akses dan kesempatan bagi pemuda memperoleh pendidikan dan keterampilan.</li> <li>2. Rendahnya jiwa kewirausahawan (<i>entrepreneurship</i>) generasi muda.</li> <li>3. Terbatasnya sarana dan prasarana pengembangan pemuda dan olahraga.</li> <li>4. Belum optimalnya peran pemerintah dan organisasi olahraga dalam pembinaan serta pembibitan atlet yang berpotensi.</li> <li>5. Masih relatif rendahnya prestasi di bidang olahraga yang dilihat dari prestasi atlet daerah.</li> <li>6. Masih rendahnya minat pemuda/masyarakat terhadap olahraga tradisional.</li> </ol>
14	Statistik	<p><b>Permasalahan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Ketersediaan data yang tidak cukup, belum berkualitas dan belum up to date serta belum dapat diakses secara</li> </ul>



No	Aspek/Urusan	Permasalahan
		luas <b>Penyebab:</b> 1. Lemahnya kemampuan aparatur di OPD, sehingga ketersediaan dan keakuratan data primer dan sektoral sangat rendah 2. Tidak tersedianya publikasi data untuk evaluasi, pengendalian dan perencanaan pembangunan pada waktu yang ditentukan (data tidak tersedia tepat waktu).
15	Persandian	<b>Permasalahan:</b> ❖ Belum optimalnya pengamanan data informasi daerah <b>Penyebab:</b> 1. Belum optimalnya OPD yang menangani persandian yang disebabkan keterbatasan SDM dibidang persandian.
16	Kebudayaan	<b>Permasalahan:</b> ❖ Belum optimalnya pengelolaan budaya dalam penunjang pariwisata <b>Penyebab:</b> 1. Kemajuan informasi teknologi bisa mengusur kearifan lokal (warisan Budaya). 2. Belum optimalnya pengelolaan, pemeliharaan, pengembangan nilai dan situs cagar budaya daerah. 3. Rendahnya partisipasi generasi muda dalam pengembangan, dan pelestarian seni dan budaya.
17	Perpustakaan	<b>Permasalahan:</b> ❖ Rendahnya minat baca <b>Penyebab:</b> 1. Minimnya ketersediaan sarana dan prasarana, tenaga perpustakaan dan buku bahan bacaan di perpustakaan baik pustaka daerah maupun nagari (Pengembangan perpustakaan berbasis digital/e-Book) 2. Rendahnya tingkat budaya literasi masyarakat 3. Belum Optimalnya penyelamatan dan pelestarian dokumen koleksi perpustakaan. 4. Kurangnya jumlah perpustakaan sekolah yang representative
18	Kearsipan	<b>Permasalahan:</b> ❖ Belum optimalnya pengelolaan arsip daerah <b>Penyebab:</b> 1. Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana kearsipan. 2. Belum optimalnya penyelamatan dan pelestarian dokumen dan arsip daerah. 3. Rendahnya penataan arsip dan dokumen OPD 4. Terbatasnya sumber daya dalam pengelolaan kearsipan
<b>III</b>	<b>Fokus Pelayanan Urusan Pilihan</b>	
1	Kelautan dan Perikanan	<b>Permasalahan:</b> ❖ Rendahnya produksi perikanan

No	Aspek/Urusan	Permasalahan
		<p>❖ Rendahnya tingkat konsumsi ikan</p> <p><b>Penyebab:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum maksimalnya pengelolaan perikanan budidaya</li> <li>2. Tingginya biaya produksi perikanan budidaya</li> <li>3. Masih rendahnya kemampuan SDM dalam kegiatan perikanan budidaya</li> <li>4. Masih banyaknya praktek <i>illegal fishing</i> dip perairan umum (sungai, embung)</li> <li>5. Rendahnya daya saing produk perikanan.</li> <li>6. Terbatasnya sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.</li> <li>7. Belum tersosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya Manfaat Makan ikan</li> </ol>
2	Pariwisata	<p><b>Permasalahan:</b></p> <p>❖ Masih Rendahnya Kunjungan Wisatawan</p> <p><b>Penyebab:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata</li> <li>2. Terbatasnya akses transportasi dan telekomunikasi di destinasi wisata</li> <li>3. Belum optimalnya promosi pariwisata berbasis IT</li> <li>4. Peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan dan pengelolaan sektor pariwisata masih rendah.</li> <li>5. Kurangnya ketersediaan akomodasi dan rumah makan di lokasi wisata.</li> <li>6. Belum maksimalnya pengelolaan ikon wisata unggulan.</li> <li>7. Minimnya SDM pelaku pariwisata dan ekraf yang profesional (bersertifikat)</li> </ol>
3	Pertanian	<p><b>Permasalahan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya produksi dan produktifitas hasil pertanian</li> </ol> <p><b>Penyebab:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabupaten solok selatan belum mampu memproduksi benih unggul pertanian dan bibit ternak secara mandiri yang disebabkan Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan UPT balai benih</li> <li>2. Masih terbatasnya tenaga penyuluh dan tenaga teknis (pertanian, peternakan dan keswan)</li> <li>3. Tingginya alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian</li> <li>4. Rendahnya nilai tambah produk pertanian</li> <li>5. Lemahnya penguasaan inovasi teknologi pertanian dengan aspek-aspek sosial ekonominya, sehingga peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perkebunan masih rendah</li> <li>6. Belum adanya pengembangan kawasan pertanian yang terintegrasi.</li> <li>7. Lemahnya akses petani terhadap teknologi, informasi, pasar dan permodalan serta keterbatasan sarana dan prasarana pertanian</li> </ol>

No	Aspek/Urusan	Permasalahan
		<p>8. Rendahnya SDM kelembagaan petani dan kelembagaan penyuluh.</p> <p>9. Masih tingginya frekuensi kelangkaan pupuk bersubsidi</p>
4	Perdagangan	<p><b>Permasalahan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Belum maksimalnya pengendalian harga barang dan jasa</li> <li>❖ Masih rendahnya kontribusi sektor perdagangan dalam pembentuk PDRB</li> </ul> <p><b>Penyebab:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya sarana dan prasarana pasar perdagangan yang representatif.</li> <li>2. Rendahnya aksesibilitas masyarakat ke pasar tradisional.</li> <li>3. Belum terbangunnya sistem informasi perdagangan untuk mendukung distribusi barang kebutuhan masyarakat secara merata.</li> <li>4. Lambatnya pertumbuhan sektor jasa dan perdagangan.</li> </ol>
5	Perindustrian	<p><b>Permasalahan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Lambatnya perkembangan usaha industri</li> </ul> <p><b>Penyebab:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih belum optimalnya penggunaan teknologi tepat guna dalam proses industri, baik kecil maupun menengah karena belum ada standarisasi mutu hasil industri, sehingga daya saing masih rendah dibandingkan daerah lain.</li> <li>2. Belum terdapatnya sentra industri yang kompetitif.</li> <li>3. Masih rendahnya SDM pelaku IKM dalam pengembangan Usaha industri.</li> <li>4. Belum tersedianya <i>Master Plan</i> kawasan industri (<i>One Village One Product/OVOP</i>)</li> </ol>
6	Kehutanan	<p><b>Permasalahan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Meningkatnya lahan kritis</li> </ul> <p><b>Penyebab:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingginya alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan</li> <li>2. Masih terdapatnya ex lokasi investasi pertambangan, kehutanan yang belum dipulihkan/reklamasi</li> <li>3. Masih rendahnya fungsi koordinasi antara pemerintah dengan instansi vertical pengelola sumber daya kehutanan</li> <li>4. Masih belum optimalnya pengelolaan hutan berbasis masyarakat</li> </ol>
7	Energi dan Sumber Daya Mineral	<p><b>Permasalahan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Belum Optimalnya Pemanfaatan langsung Panas Bumi</li> </ul> <p><b>Penyebab:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum ada minat investor untuk pengembangan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi</li> </ol>
8	Transmigrasi	<p><b>Permasalahan:</b></p>

No	Aspek/Urusan	Permasalahan
		1. Belum tuntasnya penyelesaian permasalahan lahan warga transmigrasi  <b>Penyebab:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Kurang optimalnya perkembangan wilayah eks Unit Pemukiman Transmigrasi</li> </ul>
<b>IV</b>	<b>Fokus Pelayanan Fungsi Penunjang</b>	
<b>A</b>	<b>Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan</b>	
	Sekretariat Daerah	<b>Permasalahan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Masih Rendahnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah</li> <li>❖ Belum optimalnya pelayanan birokrasi daerah</li> </ul> <b>Penyebab:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya nilai laporan kinerja pemerintah daerah</li> <li>2. Pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) pelayanan pemerintah masih rendah.</li> <li>3. Rendahnya ketersediaan aturan daerah dan ketepatan waktu penerbitan aturan daerah dalam pelaksanaan pelayanan pemerintahan.</li> <li>4. Kurangnya fasilitasi sarana dan prasarana pembangunan bidang keagamaan, pembinaan organisasi serta kesejahteraan masyarakat.</li> <li>5. Masih terdapatnya OPD yang belum menyusun SOP pelayanan, sehingga masih terdapat tumpang tindih tupoksi antar OPD.</li> <li>6. Masih lemahnya fungsi koordinasi Sekretariat Daerah terhadap OPD</li> </ol>
	Sekretariat DPRD	<b>Permasalahan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Belum optimalnya peran legislatif dalam inovasi penyelenggaraan pemerintah daerah</li> </ul> <b>Penyebab:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya inisiatif legislatif dalam inovasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah</li> </ol>
<b>B</b>	<b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	
1	Perencanaan Pembangunan	<b>Permasalahan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Belum memadainya kualitas perencanaan pembangunan daerah</li> </ul> <b>Penyebab:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya SDM Perencana baik secara kualitas maupun kuantitas.</li> <li>2. Belum optimalnya pemanfaatan dan ketersediaan data sebagai analisis untuk perencanaan pembangunan.</li> <li>3. Belum optimalnya kegiatan pengendalian dan evaluasi program/kegiatan pembangunan yang dilakukan dan pemanfaatannya sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang</li> <li>4. Belum terintegrasinya sistem informasi perencanaan dengan sistem informasi pengendalian, monitoring dan evaluasi.</li> </ol>

No	Aspek/Urusan	Permasalahan
		5. Rendahnya inovasi daerah dalam mendukung pencapaian target perencanaan
2	Keuangan	<p><b>Permasalahan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Rendahnya kontribusi PAD dalam pembiayaan pembangunan</li> <li>❖ Kualitas pengelolaan Keuangan</li> </ul> <p><b>Penyebab:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya peran dari pendapatan asli daerah dalam penunjang pembiayaan pembangunan daerah.</li> <li>2. Rendahnya pengelolaan asset daerah baik dari pemeliharaan dan mutu dari aset daerah</li> <li>3. Minimnya ketersediaan aparatur pengelola keuangan daerah dan OPD sesuai dengan bidang keilmuannya.</li> </ol>
3	Kepegawaian	<p><b>Permasalahan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Masih Rendahnya Tata kelola ASN</li> </ul> <p><b>Penyebab:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya kapasitas dan kapabilitas kinerja pegawai dan organisasi sehingga berdampak kepada kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah masih rendah.</li> <li>2. Manajemen kepegawaian yang belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme</li> </ol>
4	Pendidikan dan Pelatihan	<p><b>Permasalahan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Masih Rendahnya Profesionalisme ASN</li> </ul> <p><b>Penyebab:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya tingkat produktivitas ASN yang disebabkan minimnya pendidikan dan pengembangan aparatur (diklat) baik diklat struktural maupun fungsional</li> <li>2. Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Manusia aparatur belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai kebutuhan yang nyata</li> </ol>
5	Penelitian dan Pengembangan	<p><b>Permasalahan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Minimnya penelitian untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan</li> <li>❖ Minimnya Inovasi Daerah</li> </ul> <p><b>Penyebab:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum tersedianya SDM kelitbangan baik secara kuantitas, kapasitas maupun kualitas.</li> <li>2. Minimnya pelibatan OPD penanggungjawab urusan kelitbangan dalam penyusunan kajian-kajian yang ada pada OPD lain.</li> </ol>
6	Pengelolaan Perbatasan	<p><b>Permasalahan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Belum tuntasnya masalah penegasan batas wilayah dan desa/nagari.</li> </ul> <p><b>Penyebab:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya koordinasi penyelesaian batas Wilayah dan Desa/Nagari</li> <li>2. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap wilayah</li> </ol>



No	Aspek/Urusan	Permasalahan
		administrasi Desa/Nagari 3. Sulitnya memperoleh kesepakatan dengan pemangku adat tentang batas Desa/Nagari
<b>C</b>	<b>Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan</b>	
	Inspektorat Daerah	<b>Permasalahan:</b> ❖ Masih Rendahnya Kapabilitas APIP ❖ Masih rendahnya penyelenggaraan Sistem Pengendalian internal Pemerintahan (SPIP) <b>Penyebab:</b> 1. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas APIP 2. Rendahnya respon dan tindak lanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan (TLHP) 3. Belum optimalnya OPD yang menerapkan SPIP
<b>D</b>	<b>Unsur Kewilayahan</b>	
1	Kecamatan	<b>Permasalahan:</b> ❖ Belum optimalnya pelayanan birokrasi kecamatan <b>Penyebab:</b> 1. Belum jelasnya pembagian kewenangan daerah dan kecamatan dalam pelayanan publik 2. Belum adanya payung yang mengatur tentang pembagian kewenangan 3. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM ASN Kecamatan
<b>E</b>	<b>Unsur Pemerintahan Umum</b>	
	Kesatuan Bangsa	<b>Permasalahan:</b> 1. Masih relatif tingginya angka kriminalitas di daerah. <b>Penyebab:</b> 1. Belum maksimalnya pencegahan dini 2. Belum maksimalnya fungsi koordinasi forum komunikasi pimpinan daerah (FKDM, Forkopimda, FKUB, Tim Terpadu penanganan konflik sosial)

## **BAB III**

### **KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

Kerangka ekonomi makro dan keuangan daerah merupakan proyeksi gambaran kondisi makro ekonomi dan keuangan daerah Kabupaten Solok Selatan dalam RKPD tahun 2023. Kerangka ekonomi dan pendanaan ini didasari dari realisasi pencapaian kondisi makro dan keuangan tahun 2021, perkiraan pencapaian tahun 2022, serta proyeksi tahun 2023. Untuk indikator makro ekonomi terdiri dari beberapa indikator makro yang menggambarkan kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan serta indeks pembangunan manusia. Sedangkan untuk keuangan daerah menggambarkan kemampuan keuangan dalam pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya sampai tahun berjalan yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Gambaran proyeksi pencapaian indikator makro ekonomi untuk tahun 2023 akan dipengaruhi oleh kondisi internal dan faktor eksternal secara regional, nasional, maupun global. Sedangkan pencapaian target kinerja makro ekonomi daerah tersebut sangat dipengaruhi dari kontribusi kerangka keuangan dan pendanaan pembangunan daerah. Realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun lalu dan kebijakan penganggaran hingga tahun berjalan akan menjadi basis untuk mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien. Selanjutnya terdapat analisis terhadap potensi sumber-sumber pendapatan daerah serta proyeksi belanja dan pembiayaan daerah untuk tahun 2023.

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah Tahun 2023 diharapkan bisa menjadi jembatan antara fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien untuk mencapai target kinerja pembangunan daerah serta menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kabupaten Solok Selatan

#### **3.1. Kerangka Ekonomi Daerah**

##### **3.1.1. Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Nasional**

Penyebaran Covid 19 pada awal tahun 2020 yang berawal dari kota Wuhan, China, terus berlanjut sampai akhir tahun 2021 dan memberi tekanan terhadap ekonomi dunia sampai akhir tahun 2021. Episentrum pandemi tidak lagi di Cina, tetapi beralih ke Amerika Serikat (AS), Eropa, serta negara-negara berkembang, diantaranya Brasil, India, Rusia, Peru, Chili, Meksiko, Pakistan, Afrika Selatan, dan Turki. Meskipun pada awal sampai dengan pertengahan

tahun 2021 kasus Covid sudah mulai melandai sebagai akibat peningkatan kesadaran masyarakat dalam melakukan *social distancing* dan *physical distancing* yang diikuti dengan masifnya pelaksanaan vaksinasi dalam program *herd immunity* diseluruh negara membawa dampak positif terhadap kinerja perekonomian dunia secara meyeluruh.

Setelah mengalami pemulihan kuat pada tahun 2021, ekonomi global diperkirakan mengalami perlambatan pada tahun 2022. Perekonomian dunia diperkirakan belum mampu kembali menuju trend sebelum pandemi pada tahun 2022, *International Monetary Fund* (IMF, Januari 2022) menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi global menjadi sebesar 4,4% dari 4,9% pada tahun 2022, yang utamanya didorong oleh risiko seperti perkembangan varian *Omicron*, keberlanjutan gangguan rantai pasok, krisis energi, konflik Ukraina-Rusia, serta tekanan peningkatan inflasi. Lembaga internasional lain, *World Bank* dan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2022 masing-masing sebesar 4,1 dan 4,5%.

Meski demikian, ekonomi global tetap mengalami pemulihan karena tingkat vaksinasi yang tinggi di beberapa negara, terjadinya peningkatan permintaan dan volume perdagangan, serta pemulihan pasar tenaga kerja. Negara-negara cenderung telah beradaptasi pada pandemi dengan menerapkan kebijakan pengetatan yang fleksibel untuk mengendalikan pandemi dan mengupayakan pemulihan ekonomi.

#### **A. Pertumbuhan Ekonomi**

Tidak berbeda dari negara lain, dinamika perekonomian Indonesia tahun 2020-2021 sangat dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia. Pandemi Covid-19 berdampak luar biasa (*extraordinary*) terhadap Indonesia, tidak hanya kepada aspek kesehatan dan kemanusiaan, tetapi juga aspek sosial dan ekonomi. Namun perekonomian Indonesia pada tahun 2021 terus mengalami pemulihan dan lepas dari tekanan besar akibat pandemi Covid-19. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 3,7% pada tahun 2021.

Perbaikan tersebut dapat dilihat dari peningkatan PDB per kapita Indonesia yang mengalami peningkatan sebesar 8,6%, menjadi Rp 62,2 juta atau setara US\$ 4.349,5 tahun 2021. Dengan laju pemulihan PDB Indonesia tahun 2021 berhasil melampaui level pra pandemi. Pemulihan di Indonesia relatif lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara lain yang belum

mampu kembali ke level sebelum pandemi, seperti Filipina, Malaysia, Thailand, Meksiko, Jerman, Perancis, dan Italia.

Dari sisi PDB pengeluaran, berhasilnya pengendalian pandemi Covid-19 mendorong fenomena terjadinya *“pent up demand”* atau peningkatan secara drastis pada konsumsi masyarakat yang diikuti dengan peningkatan aktivitas pada sektor investasi. Secara keseluruhan tahun 2021, konsumsi rumah tangga mampu tumbuh secara progresif sebesar 2,0%. Sementara itu, aktivitas investasi yang sempat tertahan, juga kembali dapat meningkat yang ditunjukkan oleh pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 3,8% pada 2021. Keberlanjutan Program Strategis Nasional (PSN), akselerasi pada belanja modal pemerintah, serta mulai membaiknya kinerja investasi sektor swasta menjadi penopang perbaikan laju pertumbuhan investasi. Sementara itu, konsumsi pemerintah juga mampu tumbuh mencapai 4,2% secara keseluruhan tahun 2021, sejalan dengan peningkatan realisasi belanja negara, khususnya terkait akselerasi program vaksinasi, keberlanjutan program perlindungan sosial, dan pelaksanaan layanan publik pemerintah.

Untuk ekspor barang dan jasa pada tahun 2021 mencatatkan pertumbuhan tertinggi sejak krisis Asia di tahun 2018, yakni mencapai 24,0%. Adapun kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDB tahun 2021 sebesar 21,6%. Seiring dengan kenaikan ekspor dan peningkatan aktivitas ekonomi domestik, impor barang dan jasa juga mengalami kenaikan sebesar 23,3%, dengan kontribusi sebesar 18,9% terhadap PDB.

**Tabel 3.1.**  
**Pertumbuhan PDB sisi Permintaan Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022**

No	Uraian	2021 <sup>1)</sup>	2022	
			RPJMD <sup>2)</sup>	Proyeksi <sup>3)</sup>
<b>Pertumbuhan PDB</b>		<b>3,7</b>	<b>5,4-5,7</b>	<b>5,2-5,8</b>
1	Konsumsi Rumah tangga dan LNPRRT	2,0	5,2-5,4	5,0-5,2
2	Konsumsi Pemerintah	4,2	4,5-4,6	2,2-3,0
3	Investasi	3,8	5,8-6,2	5,4-6,3
4	Ekspor Barang dan Jasa	24,0	3,9-4,2	5,4-5,7
5	Impor Barang dan Jasa	23,3	4,4-4,6	7,5-8,2

Sumber: 1) BPS Tahun 2021, 2) RPJMD Tahun 2020-2024, dan 3). Proyeksi Kementerian PPN/Bappenas 2022

Dari sisi lapangan usaha, hampir semua sektor mampu tumbuh positif selama tahun 2021. Industri pengolahan yang merupakan sektor memiliki kontribusi terbesar pada PDB tumbuh 3,4% selama tahun 2021. Peningkatan sektor industri pengolahan ini juga diikuti oleh peningkatan sektor perdagangan dengan pertumbuhan sebesar 4,7% pada tahun 2021.

Untuk sektor konstruksi dan real estate juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 2,8%. Peningkatan ini didorong oleh membaiknya kinerja

konstruksi gedung, berkurangnya restitusi, dan menurunnya pembayaran royalti. Selain itu, berlanjutnya pembangunan infrastruktur prioritas dan peningkatan pengeluaran dari pihak swasta dan pemerintah juga mendorong pertumbuhan di sektor ini.

Selain itu, seiring dengan menurunnya kasus pandemi Covid 19 kinerja sektor penunjang pariwisata juga mulai menunjukkan perbaikan secara signifikan, walaupun masih di bawah level pra pandemi. Sektor transportasi dan pergudangan, serta sektor penyediaan akomodasi makan-minum tumbuh masing-masing sebesar 3,2 dan 3,9% secara keseluruhan tahun 2021. Relaksasi pembatasan kegiatan masyarakat dan aturan perjalanan, serta peningkatan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penanganan pandemi mendorong aktivitas pariwisata untuk mulai pulih.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan meningkat pada kisaran 5,2–5,5%. Keberhasilan pengendalian COVID-19 dan kebijakan penanganannya akan menjadi kunci peningkatan keyakinan masyarakat serta dunia usaha yang kemudian dapat meningkatkan komponen pertumbuhan. Konsumsi masyarakat diperkirakan meningkat dengan tumbuh sebesar 5,0-5,2%, yang ditopang oleh terkendalinya penyebaran COVID-19 seiring dengan tercapainya imunitas massal dan berangsur pulihnya mobilitas masyarakat. Kinerja ekspor barang dan jasa juga tetap akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dengan masih akan tingginya permintaan dan harga komoditas global, dengan pertumbuhan sebesar 5,4-5,7%. Investasi pada tahun 2022 diperkirakan akan meningkat dan tumbuh sebesar 5,4–6,3%, sebagai kunci peningkatan kapasitas produktif perekonomian. Konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh sebesar 2,2-3,0%, didorong oleh masih berlanjutnya program stimulus fiskal pemerintah, serta program vaksinasi yang diprediksi mencapai 99% total populasi penduduk dewasa Indonesia pada Maret 2022.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi akan didukung oleh sejumlah sektor yang diperkirakan tumbuh kuat, seperti pertambangan, industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Industri pengolahan diperkirakan akan menjadi motor penggerak pertumbuhan didukung oleh keberlanjutan pengembangan 7 sektor prioritas (makanan dan minuman, tekstil, kimia, otomotif, elektronika, farmasi, dan alat kesehatan), program industri hijau dan berkelanjutan, serta perluasan penerapan industri 4.0. Kinerja industri pengolahan diperkirakan meningkat pada tahun 2022 yang didukung oleh peningkatan permintaan baik dari domestik maupun eksternal.



Perluasan pembukaan aktivitas ekonomi mendorong sektor transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, dan perdagangan tumbuh meningkat. Di sisi lain, sektor konstruksi terus meningkat sejalan dengan aktivitas konstruksi pemerintah dan swasta, yang didukung oleh stimulus kebijakan dan meningkatnya pendanaan yang bersumber dari akselerasi belanja modal pemerintah dan peningkatan kinerja kredit properti. Sementara itu, sektor pertanian dan pertambangan diperkirakan akan tetap tinggi sejalan dengan permintaan ekspor terutama dari AS dan Cina dan harga komoditas yang tetap tinggi.

**Tabel 3.2.**  
**Pertumbuhan PDB sisi Permintaan Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022**

No	Uraian	2021 <sup>1)</sup>	2022	
			RPJMD <sup>2)</sup>	Proyeksi <sup>3)</sup>
<b>Pertumbuhan PDB</b>		<b>3,7</b>	<b>5,4-5,7</b>	<b>5,2-5,8</b>
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,8	3,7-3,8	3,7-3,9
2	Pertambangan dan Penggalian	4,0	1,9-1,9	3,7-3,8
3	Industri Pengolahan	3,4	5,2-5,5	5,3-5,7
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,5	5,2-5,2	5,5-5,8
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,0	4,3-4,4	5,2-5,4
6	Konstruksi	2,8	5,8-6,1	6,1-6,3
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,7	5,6-6,0	4,9-5,1
8	Transportasi dan Pergudangan	3,2	7,1-7,4	6,5-7,0
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,9	6,1-6,3	4,9-5,3
10	Informasi dan Komunikasi	6,8	7,7-8,8	7,5-8,0
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,6	6,4-6,9	3,2-3,6
12	Real Estate	2,8	5,0-5,0	4,0-4,4
13	Jasa Perusahaan	0,7	8,4-8,4	4,0-4,4
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	(0,3)	4,8-5,1	1,9-2,2
15	Jasa Pendidikan	0,1	5,2-5,2	2,9-3,5
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,5	7,6-8,0	8,2-8,7
17	Jasa lainnya	2,1	9,3-9,5	5,4-5,7

Sumber: 1) BPS Tahun 2021, 2) RPJMD Tahun 2020-2024, dan 3). Proyeksi Kementerian PPN/Bappenas 2022

Kinerja perekonomian Indonesia yang telah membaik, diharapkan akan berlanjut hingga tahun 2022, sehingga dapat mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023. Pengembangan ekonomi diarahkan untuk mengatasi dampak jangka-menengah pasca pandemi COVID-19, mengakomodir berbagai perubahan yang terjadi akibat pandemi COVID-19, serta mengatasi permasalahan-permasalahan struktural yang ada sehingga berkontribusi pada peningkatan kapasitas produktif perekonomian yang turun akibat pandemi COVID-19. Peningkatan kapasitas produktif tersebut diharapkan dapat bersumber dari peningkatan stok kapital dan produktivitas. Berdasarkan hal tersebut pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 diharapkan akan mampu tumbuh 5,3–5,9%.

Disisi PDB berdasarkan pengeluaran, investasi dan ekspor diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi tahun 2023 untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian Indonesia. Tren investasi hijau akan semakin menguat pada tahun 2023 seiring dengan adanya komitmen global untuk mencapai pembangunan rendah karbon, investasi (PMTB) diperkirakan tumbuh sebesar 6,4-7,1%, dengan target realisasi PMA dan PMDN sebesar Rp1.250–1.350 triliun pada tahun 2023.

Disisi PDB per lapangan usaha peningkatan ini didorong oleh sektor industri pengolahan diperkirakan tumbuh sebesar 5,4–6,0%. Faktor-faktor pendorong pertumbuhan industri pengolahan pada tahun 2023 antara lain (a) pemulihan industri makanan dan minuman seiring dengan pemulihan mobilitas dan daya beli masyarakat, (b) pemulihan daya beli masyarakat terutama untuk produk makanan, minuman, tekstil dan pakaian jadi, serta produk-produk tahan lama (durable), (c) dukungan belanja pemerintah dan pemerintah daerah untuk produk dalam negeri, (d) peningkatan utilisasi produksi, dan (e) peningkatan efisiensi sejalan dengan adopsi teknologi dalam proses produksi, serta (f) percepatan transisi penerapan industri hijau.

Sektor pertanian diperkirakan dapat tumbuh pada kisaran 4,0–4,2%. Pertumbuhan sektor pertanian didorong oleh berlanjutnya kebijakan pengembangan Food Estate (FE) serta program Gerakan 3 Kali Ekspor (Gratieks) Pertanian dalam upaya meningkatkan investasi dan ekspor produk sektor pertanian. Sementara itu, sektor konstruksi diperkirakan akan tumbuh tinggi pada kisaran 6,3–6,9%, didukung oleh pembangunan infrastruktur IKN pada 2023 dan berlanjutnya pembangunan infrastruktur prioritas lainnya. Sektor pertambangan akan meningkat pada kisaran 3,2–3,5%, seiring dengan peningkatan produksi pertambangan non-migas dan operasionalisasi Kawasan Industri (KI) yang memerlukan logam dasar. Sektor perdagangan akan pulih dan diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,0–5,6%, didorong oleh semakin pulihnya aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat serta semakin kuatnya peran UMKM. Sementara itu, sektor informasi dan komunikasi diperkirakan akan tumbuh sebesar 7,9-8,3%, didorong oleh tren digitalisasi, peningkatan konsumsi digital, serta peningkatan kebutuhan SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Peningkatan produktivitas di sektor pariwisata akan didorong oleh pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sejalan dengan pemulihan mobilitas masyarakat. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum akan meningkat pada kisaran 5,2–5,6%, didukung oleh pelaksanaan event dan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) internasional,

beserta pelaksanaan festival nasional sebagai pendorong kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Peningkatan sektor pariwisata berdampak positif terhadap peningkatan produktivitas di sektor ekonomi kreatif diperkirakan akan lebih cepat tumbuh seiring dengan penguatan industri berbasis konten dan peningkatan konsumsi produk kreatif lokal.

## **B. Neraca Pembayaran**

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tahun 2021 mencatatkan surplus tinggi mencapai US\$ 13,5 miliar. Capaian tersebut dikontribusikan oleh surplus neraca transaksi berjalan sebesar US\$ 3,3 miliar atau 0,3% dari PDB. Surplus pada neraca transaksi berjalan tersebut didorong oleh surplus tinggi pada neraca barang mencapai US\$ 43,8 miliar dan neraca pendapatan sekunder sebesar US\$ 6,3 miliar. Namun peningkatan ini masih tertahan oleh meningkatnya defisit neraca jasa-jasa mencapai US\$ 14,8 miliar dan neraca pendapatan primer dengan defisit mencapai US\$ 32,0 miliar.

Pada Tahun 2022 Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) diperkirakan akan melanjutkan kinerja positif tahun sebelumnya terutama didorong dengan semakin terkendalinya pandemi COVID-19 serta semakin tingginya tingkat vaksinasi baik di tingkat global maupun domestik. Outlook NPI tahun 2022 akan berkontribusi dalam mendorong momentum pemulihan ekonomi domestik melalui stabilitas eksternal yang terus menguat. Neraca secara keseluruhan akan berada pada kisaran US\$ 6,7–7,5 miliar dengan kinerja neraca transaksi berjalan yang mengalami defisit terbatas sekitar US\$ 4,0–6,0 miliar atau setara dengan 0,3–0,5 % dari PDB. Perkembangan neraca barang akan sedikit menurun sebesar US\$ 38,2–38,0 miliar, seiring dengan fenomena *commodity supercycle* yang berakhir. Neraca jasa-jasa akan mengalami perbaikan defisit menjadi US\$ 14,0–14,3 miliar. Sementara neraca pendapatan primer masih akan menjadi komponen yang menyumbang defisit paling tinggi pada neraca transaksi berjalan mencapai kisaran US\$ 34,7–36,2, sejalan dengan meningkatnya imbal hasil investasi di tengah meningkatnya investasi langsung dan investasi portofolio. Adapun neraca pendapatan sekunder akan mengalami peningkatan mencapai sekitar US\$ 6,4–6,6 miliar.

Selanjutnya, neraca transaksi modal dan finansial akan mengalami akselerasi dengan perkiraan mencapai sekitar US\$ 12,0–14,8 miliar. Kenaikan tersebut terutama didorong oleh investasi langsung yang akan mencapai kisaran US\$ 17,7–19,5 miliar sejalan dengan target investasi langsung yang terus meningkat serta berbagai proyek strategis nasional yang ditawarkan

kepada investor dalam rangka mendorong penguatan integrasi ekonomi domestik dan daya saing nasional. Lebih lanjut, kondisi pasar keuangan yang kondusif dan terus berkembang akan mendorong investasi portofolio pada kisaran US\$ 6,7–8,3 miliar. Cadangan devisa diperkirakan akan terus berkembang mencapai sekitar US\$ 151,6–152,4 miliar atau setara dengan pembiayaan impor selama 7,5–7,4 bulan.

Pada Tahun 2023 diperkirakan stabilitas eksternal terus mengalami penguatan. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) secara keseluruhan diperkirakan mencapai US\$ 7,3–8,5 miliar. Capaian tersebut akan ditopang oleh neraca transaksi berjalan yang akan mengalami defisit yang terjaga sekitar US\$ 6,2–8,4 miliar atau setara dengan 0,4–0,6% dari PDB. Sementara itu, transaksi modal dan finansial akan mencapai kisaran US\$ 14,8–18,1 miliar. Perkembangan tersebut kemudian akan mendorong cadangan devisa meningkat mencapai sekitar US\$ 158,9–160,9 miliar yang cukup untuk membiayai 7,5–7,4 bulan impor serta berada di atas standar kecukupan internasional.

### **C. Keuangan Negara**

Seiring dengan mulai pulihnya perekonomian Indonesia dari dampak Pandemi COVID-19, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tahun 2021 berhasil melampaui target yang ditetapkan dalam APBN 2021, serta menunjukkan perbaikan kinerja dibandingkan tahun 2020. Pendapatan negara dan hibah di tahun 2021 terealisasi sebesar Rp 2.003,1 triliun atau mencapai 114,9% dari target APBN 2021, dan meningkat sebesar 21,6% dibanding realisasi tahun 2020. Dari sisi komponen, penerimaan perpajakan terealisasi sebesar Rp 1.546,5 triliun (9,1% PDB) atau mencapai 107,1% dari target APBN 2021, tumbuh sebesar 20,3% dibandingkan realisasi tahun 2020. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp 452,0 triliun (2,7% PDB) atau mencapai 151,6% dari target APBN 2021 dan tumbuh 31,5% dibandingkan realisasi tahun 2020.

Disisi belanja negara, realisasi di tahun 2021 juga menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun 2020. Realisasi belanja negara tahun 2021 mencapai Rp 2.786,8 triliun (16,4% PDB) atau 101,3 % dari pagu APBN, lebih tinggi 7,4% dari realisasi belanja negara di tahun 2020. Berdasarkan komponennya, realisasi belanja pemerintah pusat ialah sebesar Rp 2.001,1 triliun atau 11,8% PDB dan antara lain terdiri dari realisasi belanja non-K/L sebesar Rp 812,0 triliun atau 4,8% PDB dan belanja subsidi sebesar Rp243,1

triliun atau 1,4% PDB, dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 785,7 triliun atau 4,6% PDB

Pada tahun 2022, fokus APBN diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Pendapatan negara dan hibah ditargetkan mencapai Rp 1.846,1 triliun. Penerimaan perpajakan pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp 1.510,0 triliun atau 8,4% PDB. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditargetkan mencapai Rp 335,6 triliun atau 1,9% PDB. Belanja negara diperkirakan mencapai Rp 2.714,2 triliun atau 15,2% PDB, dengan belanja pemerintah pusat diperkirakan sebesar Rp 1.944,5 triliun atau 10,9% PDB terdiri dari belanja non-K/L yang diperkirakan sebesar Rp 998,8 triliun atau 5,6% PDB dan belanja subsidi sebesar Rp 207,0 triliun atau 1,2% PDB, serta belanja TKDD diperkirakan mencapai Rp 769,6 triliun atau 4,3% PDB. Program PC-PEN tetap dilakukan dan direncanakan dialokasikan sebesar Rp 455,6 triliun, yang direncanakan terbagi dalam tiga klaster, yaitu (a) penanganan kesehatan sebesar Rp 122,5 triliun; (b) perlindungan masyarakat sebesar Rp 154,8 triliun; dan (c) penguatan pemulihan ekonomi sebesar Rp 178,3 triliun. Dengan pendapatan dan belanja negara tersebut, defisit anggaran pada tahun 2022 ditargetkan mencapai 4,9% PDB atau sebesar Rp 868,0 triliun. Pembiayaan anggaran masih didominasi oleh pembiayaan utang sebesar Rp 973,6 triliun, pembiayaan investasi sebesar negatif Rp182,3 triliun dan SAL sekitar Rp 77,3 triliun.

Postur makro fiskal 2023 diarahkan dengan mempertimbangkan defisit kembali pada maksimal 3 % PDB, namun pelaksanaan konsolidasi fiskal yang akomodatif tetap diperlukan untuk pemantapan recovery dan transformasi ekonomi. Dimana Pendapatan negara dan hibah ditargetkan mencapai 12,1–12,8 % dari PDB, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 10,2–10,6% dan PNBP sebesar 1,9–2,1% dari PDB. Untuk belanja negara ditargetkan mencapai 15,0–15,5% PDB, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 10,5–10,7% PDB dan TKDD sebesar 4,6–4,8% PDB. Dari sisi belanja pemerintah pusat, belanja non-K/L ditargetkan sebesar 4,5–4,7% PDB dan terdiri antara lain oleh subsidi yang ditargetkan sebesar 1,0–1,0% PDB.

#### **D. Moneter**

Pada tahun 2021, secara keseluruhan stabilitas nilai tukar Rupiah dan inflasi terjaga stabil ditopang oleh kondisi perekonomian domestik yang baik. Inflasi umum sepanjang tahun 2021 terjaga rendah dan berada di bawah rentang target inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah bersama Bank Indonesia, yaitu sebesar  $3,0 \pm 1$  % (yoy). Pada akhir tahun 2021, realisasi inflasi



tahunan tercatat 1,87% (yoy), meningkat dibandingkan inflasi pada akhir tahun 2020 sebesar 1,68% (yoy). Peningkatan ini mengindikasikan geliat pemulihan ekonomi sejalan dengan peningkatan mobilitas yang mendorong konsumsi masyarakat. Pada tahun 2022 inflasi diperkirakan mengalami kenaikan namun masih terkendali pada kisaran 3,0% (yoy), berada pada rentang sasaran inflasi yang ditetapkan yaitu sebesar 2,0–4,0% (yoy).

Tahun 2023, kebijakan pengendalian inflasi diarahkan pada upaya menjaga 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta efektivitas komunikasi) yang mendukung upaya meningkatkan daya saing perekonomian pasca pandemi COVID-19. Kebijakan 4K tersebut menekankan akselerasi perbaikan struktural melalui digitalisasi secara komprehensif dari hulu ke hilir. Kebijakan pengendalian inflasi tersebut mencakup upaya menjaga (a) Kestabilan Harga yang berfokus pada stabilisasi harga dan pengelolaan permintaan; (b) Ketersediaan pasokan yang berfokus pada produksi dalam negeri, CPP, dan penguatan kelembagaan; (c) Kelancaran Distribusi yang berfokus pada penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dan infrastruktur perdagangan; serta (d) Komunikasi Efektif yang berfokus pada perbaikan kualitas data, koordinasi pusat-daerah, dan pengelolaan ekspektasi.

## **E. Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkesinambungan**

### **❖ Tingkat Pengangguran Terbuka**

Pada tahun 2021 pandemi COVID-19 masih berdampak pada pasar kerja. Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya Tingkat pengangguran terbuka (TPT) yaitu sebesar 6,49%, meskipun telah turun dibandingkan dengan angka pada tahun 2020, yaitu 9,10 juta orang (Agustus, 2021).

Memasuki tahun 2022, seiring dengan tren beralihnya status pandemi menjadi endemi serta kelanjutan proses pemulihan perekonomian, TPT diperkirakan dapat diturunkan ke kisaran 5,5–6,3%. Agar peluang para pencari kerja mendapatkan kembali pekerjaannya dapat meningkat Program Kartu Prakerja terus dilanjutkan dan ditingkatkan dengan penambahan skema “semi-bantuan sosial”.

Pada Tahun 2023, gambaran positif perkiraan pertumbuhan ekonomi yang disokong oleh upaya pemulihan ekonomi akan berdampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Berdasarkan hal tersebut TPT pada tahun 2023 diperkirakan akan berada di kisaran 5,3–6,0%. Untuk mendukung proses pemulihan ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia, upaya strategis ketenagakerjaan diarahkan pada program peningkatan keahlian tenaga kerja melalui revitalisasi pendidikan vokasi dan

pelatihan vokasi, pembangunan sistem informasi pasar kerja yang terintegrasi, dan penguatan sistem perlindungan sosial bagi para pekerja.

#### ❖ **Kemiskinan**

Angka kemiskinan nasional pada tahun 2021 mengalami penurunan meskipun dampak krisis dari pandemi COVID-19 masih belum sepenuhnya terpulihkan. Per September 2021, angka kemiskinan menjadi 9,71%, turun sebesar 0,48% poin dibandingkan September 2020, atau sebanyak 1,02 juta penduduk. Penurunan terjadi baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan. Namun demikian, masih diperlukan usaha keras pemerintah untuk dapat mencapai target angka kemiskinan ekstrem sebesar nol % pada tahun 2024.

Terkait dengan hal tersebut, pemerintah melaksanakan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial yang telah dimulai sejak tahun 2021, beberapa aspek akan diperkuat pelaksanaannya, yaitu (i) perluasan pendataan penduduk miskin dan rentan dengan pengembangan Registrasi sosial-ekonomi dan Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan, khususnya di lokasi penghapusan kemiskinan ekstrem; (ii) pengembangan skema perlindungan sosial adaptif terhadap bencana alam maupun non-alam; (iii) pengembangan mekanisme penyaluran bantuan melalui pemanfaatan berbagai platform pembayaran digital; (iv) reformasi skema pembiayaan yang inovatif, ekspansif dan berkesinambungan; (v) integrasi program untuk meningkatkan kecukupan manfaat dan efektivitas dampak terhadap kemiskinan; dan (vi) pengembangan mekanisme graduasi terintegrasi dan berkelanjutan untuk program-program bantuan sosial. Melalui pelaksanaan agenda pembangunan reformasi perlindungan sosial yang didukung pemulihan kondisi ekonomi diharapkan angka kemiskinan berada pada kisaran 8,5–9,0% di tahun 2022.

Pada tahun 2023, angka kemiskinan ditargetkan berada pada kisaran 7,5–8,5%. Sebagai prasyarat utama dibutuhkan kondisi ekonomi yang mendukung yaitu, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, inflasi yang stabil terutama pada komoditas pokok penduduk miskin, akses terhadap kesempatan kerja, serta perbaikan infrastruktur dasar terutama di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan. Untuk mencapai hal tersebut strategi penurunan tingkat kemiskinan diterjemahkan dalam arah kebijakan yang mencakup (a) perluasan Registrasi Sosial Ekonomi melalui Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan di 400 kab/kota untuk memperbaiki pengelolaan data penduduk, meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran program, dan menurunkan kemiskinan ekstrem; (b) modifikasi program perlindungan sosial menjadi lebih adaptif; (c) penyempurnaan pelaksanaan bantuan sosial, melalui

1) integrasi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP), 2) perluasan penyaluran bantuan sosial secara digital, 3) pelaksanaan transformasi subsidi energi (LPG 3 kg dan listrik), 4) pengembangan graduasi terintegrasi dan berkelanjutan bagi seluruh program bantuan sosial; (d) penguatan kapasitas pendamping pembangunan untuk mendorong penjangkauan, pemberdayaan, perubahan perilaku, dan integrasi program di lapangan; (e) penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) kesehatan dan ketenagakerjaan yang komprehensif dan terintegrasi; (f) penyempurnaan program kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan, antara lain anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, pekerja sektor informal, korban bencana, korban perdagangan orang, korban penyalahgunaan Narkoba, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), penderita HIV/AIDS, dan kelompok rentan lainnya; serta (g) peningkatan program-program ketenagakerjaan dan pemberdayaan ekonomi untuk penghapusan kemiskinan ekstrem, antara lain melalui peningkatan kapasitas dan kemudahan akses informasi ke pasar kerja, pendampingan usaha, peningkatan kualitas produksi usaha kecil dan mikro, kemudahan akses permodalan, keberantaraan usaha, serta pelaksanaan reforma agraria dan perhutanan sosial untuk penataan penguasaan lahan.

#### ❖ **Ratio Gini**

Sejalan dengan penurunan dampak pandemi Covid 19 dan peningkatan aktifitas perekonomian nasional pada tahun 2021, Indek Gini pada bulan Maret 2021 berada pada level 0,384 atau menurun sebanyak 0,001 dari bulan September 2020. Kemudian, rasio gini berhasil turun di angka 0,381 pada bulan September 2021 atau turun sebesar 0,003 dibandingkan dengan kondisi 6 bulan sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut pada tahun 2022 Rasio Gini ditargetkan berada dalam range 0,376-0,378 dan tahun 2023 berada pada range 0,375–0,378. Untuk mencapai target tersebut, kebijakan terus diarahkan tidak hanya pada kelompok masyarakat pendapatan menengah ke bawah, tetapi juga pada masyarakat pendapatan menengah ke atas. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah diharapkan akan memperkecil jarak ketimpangan antarkelompok pendapatan. Tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengurangi angka rasio gini demi mencapai target RPJMN mencakup kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar (kesehatan, gizi masyarakat, pendidikan, dan perumahan) yang belum merata dan belum terstandardisasi; belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat miskin; serta keterbatasan pranata sosial dan infrastruktur untuk penguatan UMKM dan pelatihan vokasi.

### ❖ **Indek Pembangunan Manusia**

Munculnya varian Delta dan omicron dari Covid 19 di pertengahan tahun 2021 memberikan tekanan terhadap perekonomian. Meskipun demikian, perluasan vaksinasi, penerapan protokol kesehatan, dan penguatan sistem kesehatan mampu menjaga aktivitas perekonomian dan memberikan bantalan pada perekonomian Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mampu meningkat sebanyak 0,35 basis poin dari tahun 2020 menjadi 72,29, peningkatan ini terjadi di ketiga komponen perhitungan IPM yaitu kesehatan, pendidikan maupun ekonomi.

Perbaikan ekonomi pada tahun 2022 diharapkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan perkapita yang disesuaikan. Selanjutnya pelonggaran Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat seiring dengan penurunan kasus Covid 19 diharapkan mampu meningkatkan pelayanan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan yang sebelumnya sangat dibatasi, pada tahun 2022 Indek Pembangunan Manusia ditargetkan mengalami peningkatan sehingga berkisar pada angka 72,67-72,69.

Mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi pada tahun 2023, IPM Indonesia ditargetkan mencapai 73,31–73,49, peningkatan tersebut dicapai melalui kebijakan: (a) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang difokuskan pada penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, pelayanan gizi, pelayanan kesehatan usia lanjut, serta pengendalian penyakit didukung dengan percepatan penguatan sistem kesehatan nasional dan pembudayaan masyarakat hidup sehat; (b) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas melalui peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran termasuk pembelajaran jarak jauh dan pemanfaatan teknologi dalam pendidikan, peningkatan akses di semua jenjang pendidikan terutama dalam percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun dan pendidikan tinggi, dengan perhatian khusus pada penanganan anak tidak sekolah dan keberpihakan pada anak dari keluarga kurang mampu; dan (c) Bidang ekonomi melalui peningkatan produktivitas di seluruh sektor, penguatan pemulihan sosial yang inklusif melalui distribusi bantuan sosial dan subsidi kepada masyarakat kelompok berpenghasilan rendah, dan insentif kepada dunia usaha. Selain itu, UU Cipta Tenaga Kerja dan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) diharapkan dapat menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan kondisi realisasi perkembangan ekonomi tahun 2021 serta proyeksi capaian ekonomi tahun 2022, maka sasaran ekonomi pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rancangan RKP pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.3.**  
**Sasaran Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023**

No	Uraian	2021	2022	2023	
				RPJMD	Proyeksi
<b>1</b>	<b>Perekonomian Negara</b>				
a	Pertumbuhan PDB (% , yoy)	3,7	5,2-5,5	5,7-6,0	5,3-5,9
b	Laju inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (% , yoy): Akhir Periode	1,87	3,0	2,8	3±1
<b>2</b>	<b>Neraca Pembayaran</b>				
a	Cadangan Devisa (US\$ milyar)	144,9	151,6-152,4	146,8	158,9-160,9
b	Defisit Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	0,3	(0,3)-(0,5)	(1,9)	(0,4)-(0,6)
<b>3</b>	<b>Keuangan Negara</b>				
a	Penerimaan Perpajakan (% PDB)	9,1	8,4	10,5-11,7	10,2-10,6
b	Keseimbangan Primer (% PDB)	(2,6)	(2,6)	0,2-0,0	(0,7)-(0,5)
c	Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(4,6)	(4,9)	(1,6)-(1,7)	(2,9)-(2,8)
d	Stok Utang Pemerintah (% PDB)	40,7	43,8	28,9-29,6	41,7-42,4
<b>4</b>	<b>PMTB/Investasi</b>				
a	Pertumbuhan investasi (PMTB) (%)	3,8	5,4-6,3	7,2-7,8	6,4-7,1
b	Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	901,0	968,4	1294,1	1250-1350
<b>5</b>	<b>Target Pembangunan</b>				
a	Tingkat Pengangguran	6,49	5,5-6,3	4,0-4,6	5,3-6,0
b	Tingkat Kemiskinan	9,71	8,5-9,0	7,0-7,5	7,5-8,5
c	Rasio Gini	0,381	0,376-0,378	0,374-0,377	0,375-0,378
d	Indek Pembangunan Manusia	72,29	72,67-72,69	74,77	73,31-73,49
<b>6</b>	<b>Penurunan Emisi GRK</b>	23,55	26,87	26,80	27,02

Sumber: Proyeksi Kementerian PPN/Bappenas 2022

Untuk mencapai target diatas maka beberapa arah kebijakan yang dilakukan dalam upaya mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mengejar sasaran jangka menengah-panjang serta menghadapi tantangan yang ada pascapandemi, difokuskan pada:

### 1. Peningkatan produktivitas

Peningkatan produktivitas diarahkan untuk mengembalikan trajectory pertumbuhan ekonomi ke level sebelum pandemi dan mengangkat trajectory tersebut ke level yang lebih baik lagi. Peningkatan produktivitas perlu dilakukan pada sektor itu sendiri (within sectors) diiringi dengan pergeseran struktur ekonomi menuju sektor-sektor bernilai tambah tinggi (between sectors). Upaya peningkatan produktivitas dilakukan melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan IKN, dan peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas.



## **2. Penguatan pemulihan sosial dan ekonomi yang inklusi**

Dampak pandemi COVID-19 yang masih dirasakan, khususnya bagi pembangunan sosial, menegaskan kembali perlunya penguatan pemulihan sosial. Penguatan pemulihan sosial ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing. Penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM merupakan bagian terpenting dari pembangunan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kapasitas produktif suatu perekonomian. Upaya penguatan pemulihan sosial yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak

## **3. Pembangunan yang berkelanjutan**

Pembangunan perlu memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga sumber daya dapat dikembangkan secara optimal untuk kebutuhan saat ini maupun untuk generasi yang akan datang. Pembangunan yang berkelanjutan diarahkan pada penciptaan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah karbon dan meminimalkan eksploitasi sumber daya alam. Arah pembangunan berkelanjutan difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan dari perubahan iklim.

### **3.1.2. Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Provinsi Sumatera Barat**

Dilihat dari perkembangan perekonomian Provinsi Sumatera Barat mengalami tren yang positif, searah dengan tren pemulihan ekonomi Nasional. Secara keseluruhan tahun, perekonomian Sumatera Barat tumbuh positif pada tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada tahun 2021 tumbuh sebesar 3,29% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang kontraksi -1,62% (yoy). Peningkatan tersebut terutama didorong oleh aktivitas ekonomi yang lebih baik seiring dengan pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas sejalan dengan kasus COVID-19 yang lebih terkendali di tahun 2021.

Sementara itu tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Barat cenderung stabil dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tidak terlalu terpengaruh oleh COVID-19. Proses pemulihan ekonomi pada tahun 2021 berjalan dengan baik sehingga pertumbuhan ekonomi tahun 2021 mencapai angka 3,29%. Hingga data terkini di triwulan I 2022 pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tercatat pada angka

3,64% jika dibandingkan dengan triwulan I tahun 2021. Secara kumulatif pertumbuhan ekonomi dalam 4 triwulan terakhir dibandingkan dengan 4 triwulan sebelumnya mencapai angka 4,25%.

Dari sisi ketimpangan, ketimpangan pendapatan yang diukur dengan Gini Ratio walaupun cenderung mengalami penurunan secara lambat dalam 5 tahun terakhir justru mengalami tren positif yang menurun 0,001 poin ke angka 0,300 pada tahun 2021 yang lalu. Pandemi COVID-19 justru menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Barat. Angka ketimpangan ini berada di bawah angka Gini Ratio Nasional pada kisaran 0,381 yang menunjukkan bahwa baik Sumatera Barat maupun Indonesia berada pada tingkat ketimpangan pendapatan yang sedang. Sedangkan dari sisi ketimpangan wilayah yang diukur dengan Indeks Williamson, dari tahun 2016 hingga tahun 2019 cenderung meningkat dari 0,266 ke angka 0,274. Kondisi pandemi COVID-2019 memperparah ketimpangan wilayah hingga angkanya naik menjadi 0,314. Proses pemulihan ekonomi pada tahun 2021 berjalan dengan baik sehingga ketimpangan wilayah ini bertahan di angka 0,315.

Untuk aspek kemiskinan dan pengangguran, kondisi pandemi COVID-19 menambah jumlah penduduk miskin baru sebanyak 16,57 ribu jiwa sehingga meningkatkan angka kemiskinan dari 6,40% menjadi 6,56%. Jumlah pengangguran pun bertambah 44,85 ribu orang, meningkat dari 5,33% menjadi 6,88%. Secara umum berdasarkan karakteristik wilayah kemiskinan cenderung berada di kawasan perdesaan dan pengangguran berada di kawasan perkotaan. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang lebih berdampak di kawasan perkotaan menyebabkan peningkatan angka pengangguran lebih tinggi dari peningkatan angka kemiskinan. Pemulihan ekonomi di tahun 2021 berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6,04% dan angka pengangguran menjadi 6,52%. Perkembangan awal tahun 2022 di bulan Februari tercatat tingkat pengangguran kembali turun ke angka 6,17%.

Pemulihan ekonomi Sumatera Barat tahun 2022 akan sangat dipengaruhi oleh peningkatan jumlah kasus harian COVID-19. Walaupun sempat menurun diakhir tahun 2021, jumlah kasus harian kembali meningkat di awal tahun 2022.

Berdasarkan hasil Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Sumatera Barat periode Februari 2022 yang dilakukan oleh Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi penahan pertumbuhan ekonomi tahun 2022, antara lain yakni masih dimungkinkannya muncul risiko adanya beberapa varian baru COVID-19 sehingga dikhawatirkan

akan munculnya kembali pengetatan kebijakan aktifitas luar ruang yang akan berdampak kepada aktifitas ekonomi, belum ada satu pihak pun yang mampu menjamin berakhirnya pandemic Covid atau turun status menjadi endemic serta disamping itu juga semakin berkurangnya kurangnya perhatian berbagai pihak terhadap protokol COVID yang membuka peluang risiko masih berlanjutnya status pandemi di tahun 2022 masih dimungkinkan, adanya Konflik Ukraina-Rusia memburuk yang memberikan tekanan kepada perekonomian global, termasuk inflasi yang lebih tinggi serta proyek konstruksi khususnya JJTS Padang-Sicincin kembali ditunda karena progress pembebasan lahan yang minim kemajuan.

Untuk tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sesuai dengan Rancangan Awal RKP 2023 diperkirakan berada pada angka 4,2-5,2%. Hal ini didorong oleh trend positif harga CPO dan karet dunia yang akan mendorong pertumbuhan di sektor pertanian dan perkebunan. Kondisi lain yang berpengaruh adalah pembangunan jalan Tol Padang – Pekanbaru yang mendorong investasi di koridor pertumbuhan ekonomi utama Sumatera Barat.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, Sumatera Barat perlu mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru sebagai lokomotif perekonomian ke depan, disamping terus memperkuat dan mengoptimalkan kinerja pertanian dan industri pengolahan yang telah lama menjadi tulang punggung perekonomian Sumatera Barat.

Sektor Pariwisata diharapkan dapat menjadi lokomotif baru perekonomian Sumatera Barat karena memiliki *multiplier effect* yang luas dan keseluruhan. Kedatangan wisatawan memiliki dampak yang luar biasa dalam menggerakkan begitu banyak kegiatan sektor lain, seperti perhotelan dan restoran, transportasi, produk kerajinan dan industri olahan makan/minum, dan jasa-jasa.

Pemerintah daerah juga telah mencanangkan *Visit Beautiful West Sumatra 2023* yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2023. Angka pertumbuhan ekonomi tahun 2023 didasarkan pada pencapaian ekonomi triwulan I 2022, sehingga diprediksi mencapai angka 4,65%.

Tingkat pengangguran diharapkan bisa turun ke angka 6,15% dan secara bertahap di tahun 2023 bisa kembali ke angka sebelum pandemi. Sementara itu kinerja penurunan angka kemiskinan berjalan baik walaupun dalam kondisi pandemi. Namun demikian Pemerintah Daerah perlu mewaspadaikan anomali pertumbuhan ekonomi tinggi yang berdampak pada peningkatan angka kemiskinan. Tingkat kemiskinan diharapkan mampu turun

ke angka 5,70% di tahun 2022 dan secara bertahap turun ke angka 5,37% di tahun 2023.

Sementara itu tingkat ketimpangan pendapatan dan ketimpangan wilayah diharapkan mampu berkurang secara signifikan pasca pandemi. Gini Rasio diprediksi turun ke angka 0,298 di tahun 2022 dan berkurang ke angka 0,296 di tahun 2023. Tingkat ketimpangan wilayah juga diprediksi turun ke angka 0,208 di tahun 2022 sejalan dengan pemulihan ekonomi dan diharapkan mampu bertahan di angka yang sama 0,213 di tahun 2023. Secara lengkap proyeksi indikator makro daerah tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.4.**  
**Proyeksi Indikator Makro Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023**

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Realisasi		Target	
		2020	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,60	3,29	4,72	4,65
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	30,64	31,58	32,47	33,58
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	43,75	45,41	47,13	48,86
4	TPT (%)	6,88	6,52	6,15	5,72
5	IPM	72,38	72,65	72,95	73,46
	- Usia Harapan Hidup (Tahun)	69,47	69,59	69,79	69,97
	- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,02	14,09	14,26	14,43
	- Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,99	9,07	9,16	9,25
	- Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	10.733	10.790	10.841	10.997
6	Kemiskinan (%)	6,56	6,04	5,70	5,37
7	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	364,79	339,92	321,86	306,71
8	Gini Rasio	0,301	0,300	0,298	0,296
9	Indeks Williamson	0,311	0,315	0,208	0,213

Sumber : RKPD Provinsi Sumatera Barat

Untuk mencapai target-target pada proyeksi makro daerah tahun 2023 maka terdapat beberapa arah kebijakan pembangunan ekonomi Sumatera Barat ke depannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 akan sangat dipengaruhi oleh proses vaksinasi yang belum berjalan sesuai dengan target nasional untuk menjamin pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat di beberapa pusat kegiatan nasional dan wilayah.
2. Transformasi struktural ekonomi daerah menjadi titik krusial dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat secara nasional. Ketergantungan terhadap sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi

menjadi prasyarat penting agar tidak terjebak dalam *middle income trap*. Berkaca pada sektor industri pengolahan yang tidak menjadi sektor ekonomi unggulan di Sumatera Barat, maka penting bagi Pemerintah Daerah untuk bertumpu pada sektor pariwisata yang memiliki *backward* dan *forward linkage* yang besar.

3. Tingkat inflasi akan terjaga pada level yang sama dalam 5 tahun terakhir. Beberapa program pengendalian inflasi selama pandemi COVID-19 terbukti mampu menahan laju inflasi. Program ini akan berlanjut di tahun 2022 dan 2023 untuk menjaga tingkat inflasi tetap stabil.
4. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diarahkan untuk meningkatkan nilai IPM dan menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta ketimpangan pendapatan dan wilayah.

### **3.1.3. Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Kabupaten Solok Selatan**

Dilihat dari perkembangan ekonomi makro Kabupaten Solok Selatan sampai tahun 2019 secara umum menunjukkan kondisi yang cukup baik walaupun mengalami pelambatan pertumbuhan ekonomi, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi tahun-tahun sebelumnya yang meliputi tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan indikator-indikator lain. Namun pada tahun 2020, hampir seluruh kinerja indikator ekonomi Kabupaten mengalami penurunan, yang disebabkan kondisi bencana Covid-19 yang melanda dunia. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat yang diikuti oleh Provinsi Sumatera Barat untuk mengatasi penyebaran Covid 19 yaitu melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar sangat berdampak terhadap kinerja perekonomian Kabupaten Solok Selatan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten mengalami kontraksi (pertumbuhan dibawah nol) yaitu -1,24% seiring dengan menurunnya kinerja perekonomian Provinsi Sumatera Barat sebesar -1,60% dan Nasional sebesar -2,07%. Lebih baiknya pertumbuhan sektor perekonomian Kabupaten Solok Selatan disebabkan karena sektor utama perekonomian Kabupaten Solok Selatan masih ditopang dari sektor primer yaitu sebesar 38,21%, meskipun sektor ini juga terdampak kebijakan pemerintah PSBB namun dampaknya tidak separah sektor sekunder (pengolahan) dan tersier (perdagangan dan jasa). Penurunan kinerja perekonomian ini diikuti oleh penurunan kinerja ekonomi lainnya seperti kenaikan tingkat pengangguran menjadi 5,62% (meningkat 0,71%), Indek Gini menjadi 0,305 (meningkat 0,01). Namun untuk tingkat kemiskinan mengalami penurunan menjadi 7,15% (menurun 0,18%).



Penurunan tingkat kemiskinan ini menjadi kontraproduktif dengan penurunan pertumbuhan ekonomi serta dampak sosial ekonomi yang diakibatkan kebijakan pembatasan social yang diambil oleh pemerintah dalam penanganan pandemic Covid-19 selama tahun 2020, dimana akses masyarakat kesektor ekonomi sangat dibatasi. Penurunan ini lebih disebabkan karena data yang disajikan pada tahun 2020 merupakan hasil perhitungan Bulan Maret dimana pandemic Covid-19 belum berdampak negative terhadap perekonomian.

**Tabel 3.5.**  
**Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Solok Selatan**  
**Tahun Anggaran 2017-2021**

INDIKATOR	Realisasi				
	2017	2018	2019	2020	2021
Laju pertumbuhan Ekonomi (%)	5,18	5,04	4,80	-1,24	3,35
PDRB ADHB (Rp.Juta)	4.893.870,69	5.302.502,22	5.571.732,28	5.528.507,31	5.777.977,93
PDRB ADHK (Rp.Juta)	3.612.139,52	3.795.200,14	3.977.409,14	3.928.031,94	4.059.514,72
PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp.Juta)	30,14	30,97	32,58	30,37	31,26
Persentase Penduduk Miskin (%)	7,21	7,07	7,33	7,15	7,52
Indeks Gini	0,30	0,31	0,30	0,31	0,28
Tingkat Pengangguran (%)	5,54	5,85	4,91	5,62	4,84

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

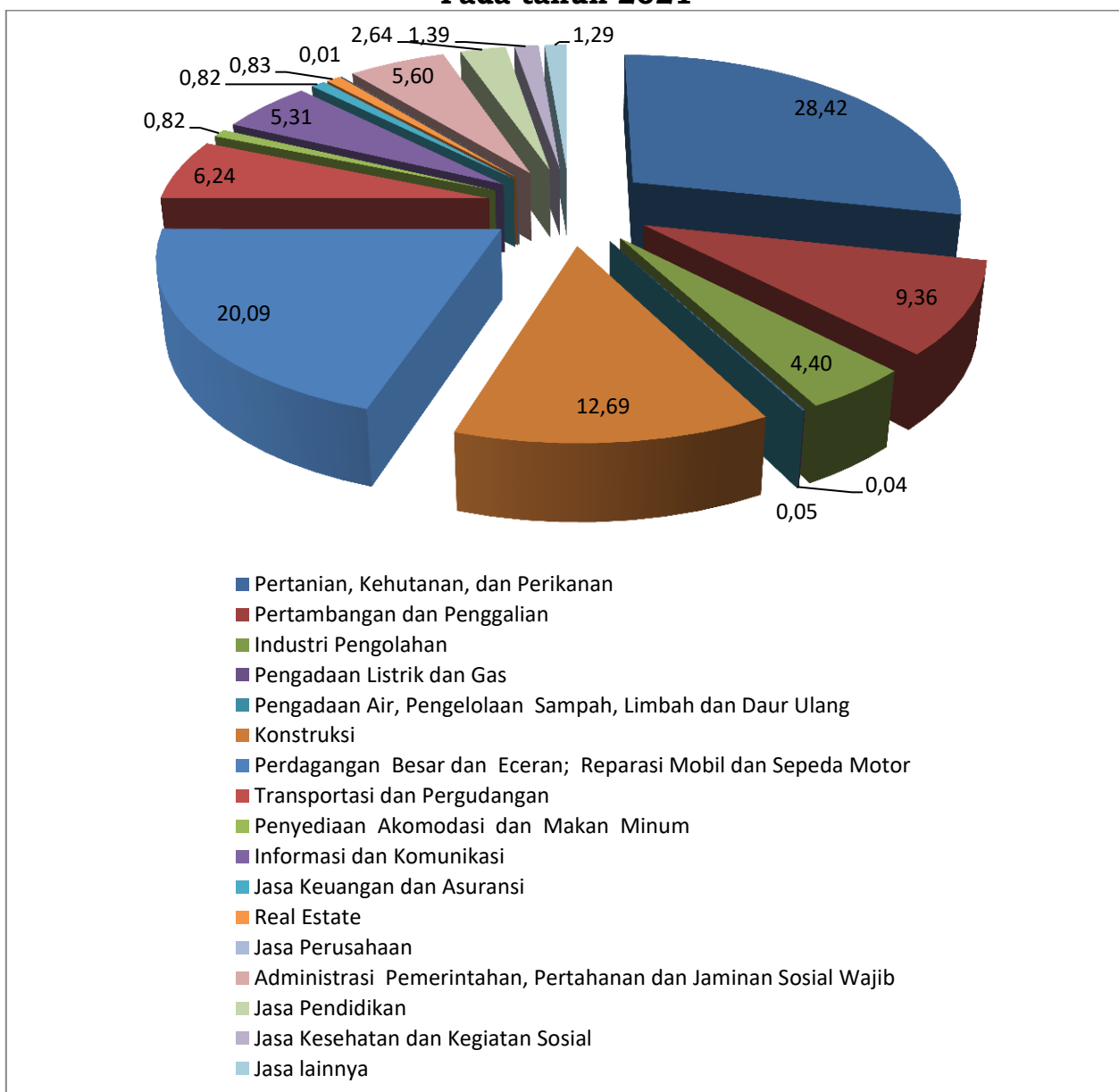
Pada tahun 2021, meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemic covid 19 namun perekonomian daerah kembali trend pertumbuhan positif seiring dengan menurunnya kasus covid 19 serta keberhasilan program herd immunity melalui program vaksinasi, di daerah serta beberapa kebijakan pusat, provinsi dan daerah antara lain pelonggaran pelonggaran level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berdasarkan tingkatan kasus covid, peningkatan daya beli masyarakat melalui program bantuan sosial tunai kepada masyarakat terdampak covid 19 serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang diikuti oleh membaiknya harga dan produksi unggulan daerah seperti kelapa sawit, kopi dan karet. Kebijakan ini berdampak kepada peningkatan aktifitas ekonomi yang dapat dilihat dari peningkatan PDRB baik berdasarkan ADHB dan ADHK menjadi Rp. 5.777.977,93,- juta (mengalami peningkatan 4,51%) untuk PDRB berdasarkan ADHB dan Rp. 4.059.514,72,- juta (mengalami peningkatan 3,35%) untuk PDRB berdasarkan ADHK. Peningkatan ini terjadi di hampir seluruh sektor perekonomian terutama sektor utama yang merupakan pembentuk perekonomian daerah seperti sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran;

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; Pertambangan dan Penggalian; Transportasi dan Pergudangan.

Peningkatan aktivitas ekonomi ini berdampak kepada membaiknya kinerja indikator ekonomi lainnya seperti Tingkat Pengangguran dari 5,62% menjadi 4,84%, Indek Gini 0,31 menjadi 0,28. Satu-satunya indikator makro daerah yang tidak mengalami peningkatan yaitu tingkat kemiskinan yang mengalami peningkatan dari 7,15% menjadi 7,52%

Dalam menilai kemajuan perekonomian daerah PDRB per lapangan usaha dapat dikelompokkan menjadi tiga sektor perekonomian yang terdiri atas 1). Sektor primer, merupakan sektor ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam secara langsung, seperti pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan 2). Sektor Sekunder, merupakan sektor ekonomi yang mengolah hasil sektor primer menjadi barang jadi, seperti Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi dan 3) Sektor tersier merupakan menghasilkan suatu jasa daripada produk akhir sektor sekunder dan sektor primer seperti penyediaan jasa-jasa ekonomi, perdagangan, dll. Dilihat dari hal diatas dapat dilihat bahwa sebahagian besar aktifitas ekonomi di Kabupaten Solok Selatan masih bergerak pada sektor primer yaitu 37,78% sedangkan sektor sekunder hanya sebesar 17,18%. Meskipun sektor tersier berkontribusi 45,04% terhadap pembentuk PDRB namun hal tersebut sebahagian besar lebih disebabkan karena pengaruh dari penjualan barang-barang hasil pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar dibawah ini:

**Gambar 3.1.**  
**Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku berdasarkan Lapangan Usaha Pada tahun 2021**



Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan dari perkembangan indikator makro daerah sampai tahun 2021 serta mempertimbangkan kondisi perekonomian global, nasional dan provinsi Sumatera Barat serta proyeksi indikator makro yang ditetapkan oleh Provinsi Sumatera Barat pada RKPD Tahun 2023 maka pada tahun 2022-2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Selatan diproyeksikan mengalami pertumbuhan 3,57% pada tahun 2022 dan 4,03% pada tahun 2023. Proyeksi target ini diikuti oleh proyeksi indikator makro lainnya seperti dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 3.6.**  
**Target Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Solok Selatan**

No	Indikator	Baseline 2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023
1	Indek Pembangunan Manusia (Indek)	69,23	69,60	70,09
2	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,35	3,57	4,03
3	PDRB per kapita ADHK (Rp juta/tahun)	21,96	22,63	23,05

No	Indikator	Baseline 2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023
4	Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan (Rp ribu/tahun)	10.916	10,416	10.565
5	Indek Gini Ratio (indek)	0,28	0,295	0,291
6	Tingkat Pengangguran (%)	4,84	5.19	4,78
7	Tingkat Kemiskinan (%)	7,52	6,29	5,87

Sumber : Rancangan Akhir RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Untuk mencapai target-target pada proyeksi Makro Daerah Tahun 2023 maka terdapat beberapa arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Solok Selatan ke depannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengembangan kawasan berdasarkan potensi, peruntukan dan komoditi unggulan dengan konsep pembangunan wilayah berbasis kawasan sesuai dengan arah pengembangan wilayah.
2. Penciptaan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha, melalui Perluasan akses masyarakat dalam kegiatan perekonomian dan penciptaan lapangan kerja dalam upaya peningkatan produktifitas daerah melalui kemudahan layanan perizinan, mendekatkan pada akses permodalan, pendidikan dan pelatihan calon tenaga kerja, pembinaan usaha serta meningkatkan program-program penunjang perekonomian agar memberikan kemudahan bagi dunia usaha.
3. Meningkatkan penyediaan dan kualitas infrastruktur dan aksesibilitas antar kawasan serta pemukiman untuk memberikan daya ungkit yang besar terhadap pembangunan sektor lainnya.
4. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui akses pendidikan yang bermutu, dukungan beasiswa serta sarana Pendidikan yang kuat.
5. Meningkatkan dan menciptakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang memberikan efek terhadap aktifitas perekonomian masyarakat.

### 3.2. Kerangka Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan dalam kerangka desentralisasi fiskal di Indonesia sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004. Dalam Undang-undang tersebut pemerintah daerah diamanatkan agar keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Sebagai implementasinya pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan berdasarkan pendekatan kinerja yang berorientasi pada prestasi kerja, dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan kekuatan (*output*) dan dampak hasil (*outcome*) diharapkan dari kegiatan dan program, serta mempertimbangkan Undang-

Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur hak dan kewajiban dari pemerintah daerah. Dengan demikian APBD tidak hanya berperan sebagai dokumen anggaran dan pelaksanaannya, namun merupakan alat kebijakan publik dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang optimal dan peningkatan kesejahteraan

Keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengawasi daerah untuk mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan dalam kerangka desentralisasi fiskal di Indonesia dimana sumber-sumber pembiayaan desentralisasi fiskal tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang sah. Menurut Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menghendaki pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Sebagai implementasinya pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan berdasarkan pendekatan kinerja yang berorientasi pada prestasi kerja, dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran (*output*), dampak hasil (*outcome*) dan efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran, serta mempertimbangkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur hak dan kewajiban dari pemerintah daerah. Dengan demikian APBD tidak hanya berperan sebagai dokumen anggaran dan pelaksanaannya, namun merupakan alat kebijakan publik dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang optimal dan peningkatan kesejahteraan.



Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Dalam pengelolaan keuangan daerah unsur pertama yang menentukan kemampuan keuangan daerah adalah penerimaan daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, penerimaan daerah terdiri atas: (a). Pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, (b). Penerimaan pembiayaan yang meliputi: penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan pelunasan piutang, (c). dan penerimaan daerah lainnya, termasuk penerimaan perhitungan pihak ketiga.

Selain mempertimbangkan prinsip-prinsip umum anggaran, seperti partisipatif, transparansi dan akuntabilitas, ketepatan waktu, keadilan, efisiensi dan efektifitas, serta taat azas, maka pengelolaan keuangan juga sedapat mungkin diarahkan pada format APBD *balance* (berimbang) antara Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Dengan kata lain tidak lagi defisit dan kalau perlu surplus.

Untuk melihat perkembangan kemampuan APBD dalam menjalankan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah dapat dilihat dari besaran belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya. Secara umum perkembangan belanja Kabupaten Solok Selatan berfluktuasi dari tahun ketahun. Pada tahun 2017-2018 trend anggaran belanja daerah cenderung mengalami penurunan yaitu dari Rp. 869.380.036.079,- pada tahun 2017 menjadi Rp, 831.424.635.064,- pada tahun 2018 dan kembali mengalami peningkatan hingga menjadi Rp. 998.194.358.064,- pada tahun 2019. Namun periode 2019-2021 kembali mengalami penurunan hingga menjadi Rp. 919.633.509.773,-, dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi Rp. 931.207.536.702,- (APBD Awal 2022) Dari tabel perkembangan APBD Kabupaten Solok Selatan dibawah ini dapat dilihat bahwa naik turunnya perkiraan anggaran belanja daerah sangat dipengaruhi oleh perkiraan pendapatan terutama pendapat transfer (pemerintah pusat dan provinsi) dan penerimaan pembiayaan daerah. Hal ini disebabkan masih rendahnya rata-rata pertumbuhan dan kontribusi dari pendapatan asli daerah dalam membiayai belanja daerah yaitu rata-rata 1,28% untuk pertumbuhan dan 8,30% untuk kontribusi.

**Tabel 3.7.**  
**Perkembangan APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2017 – 2021**

KODE	URAIAN		2017	2018	2019	2020	2021	2022 (APBD Awal)
<b>4</b>		<b>PENDAPATAN DAERAH</b>						
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>78.860.456.111</b>	<b>68.939.543.222</b>	<b>76.429.704.083</b>	<b>70.333.349.257</b>	<b>85.332.160.294</b>	<b>73.535.025.000</b>
4	1	01 Pajak Daerah	9.235.467.451	11.263.000.000	12.908.000.000	6.599.221.993	18.526.000.000	12.059.775.000
4	1	02 Restribusi Daerah	1.599.000.000	2.085.000.000	2.940.000.000	996.875.000	1.458.750.000	2.084.500.000
4	1	03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.914.000.000	1.500.000.000	2.500.000.000	1.843.023.859	1.700.551.019	2.700.000.000
4	1	04 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	66.111.988.660	54.091.543.222	58.081.704.083	60.894.228.405	63.646.859.275	56.690.750.000
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>737.505.886.000</b>	<b>722.721.369.961</b>	<b>876.551.897.261</b>	<b>771.212.972.031</b>	<b>719.028.134.291</b>	<b>759.660.803.760</b>
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>699.299.654.000</b>	<b>677.743.839.821</b>	<b>830.732.843.000</b>	<b>736.640.149.552</b>	<b>664.615.572.319</b>	<b>711.713.855.939</b>
		Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam	19.923.449.000	18.543.104.000	23.286.137.000	30.756.946.757	25.247.665.000	42.488.464.200
		Dana Alokasi Umum	480.406.179.000	480.406.179.000	494.405.575.000	445.646.713.000	437.174.072.000	437.443.271.000
		Dana Alokasi Khusus	163.543.902.000	143.073.155.821	233.334.897.000	191.618.262.795	145.937.529.319	194.160.969.739
		Dana Insentif Daerah			36.296.683.000	24.095.009.000	8.567.934.000	
		Dana Otonomi Khusus						
		Dana Desa	35.426.124.000	35.721.401.000	43.409.551.000	44.523.218.000	47.688.372.000	37.621.151.000
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>02 Pendapatan Tansfer Antar Daerah</b>	<b>38.206.232.000</b>	<b>44.977.530.140</b>	<b>45.819.054.261</b>	<b>34.572.822.479</b>	<b>54.412.561.972</b>	<b>47.946.947.821</b>
		Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	36.156.232.000	41.597.530.140	43.756.376.470	34.572.822.479	51.912.561.972	47.946.947.821
		Bantuan Keuangan	2.050.000.000	3.380.000.000	2.062.677.791	-	2.500.000.000	
<b>4</b>	<b>3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah</b>	<b>5.200.000.000</b>	<b>24.617.028.932</b>	<b>28.708.400.000</b>	<b>24.839.170.000</b>	<b>46.199.895.605</b>	<b>9.875.150.000</b>
4	3	01 Pendapatan Hibah	5.200.000.000	24.617.028.932	28.708.400.000	24.839.170.000	22.750.000.000	
4	3	02 Dana Darurat						
4	3	03 Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan					23.449.895.605	9.875.150.000
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>			<b>821.566.342.111</b>	<b>816.277.942.115</b>	<b>981.690.001.344</b>	<b>866.385.491.288</b>	<b>850.560.190.190</b>	<b>843.070.978.760</b>
<b>5</b>		<b>BELANJA DAERAH</b>						
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>529.677.399.567</b>	<b>524.769.556.589</b>	<b>597.101.230.275</b>	<b>612.005.427.549</b>	<b>651.490.428.465</b>	<b>638.714.101.891</b>
5	1	01 Belanja Pegawai	300.168.333.594	325.387.739.329	360.438.357.095	365.112.375.936	380.470.171.065	378.809.700.393
5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	223.370.840.973	193.461.817.260	227.031.473.180	213.988.202.113	262.567.458.456	250.947.775.994
5	1	03 Belanja Hibah	5.301.600.000	5.920.000.000	6.501.400.000	32.204.849.500	8.304.798.944	8.956.625.504
5	1	04 Belanja Bantuan Sosial	836.625.000	-	3.130.000.000	700.000.000	148.000.000	-
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>249.660.117.369</b>	<b>217.614.380.733</b>	<b>301.666.389.574</b>	<b>156.252.380.478</b>	<b>170.062.407.94</b>	<b>202.986.437.365</b>
5	2	01 Belanja Modal Tanah	8.774.418.542	9.086.950.000	6.480.160.000	3.386.540.000	21.402.330.000	4.635.737.400
5	2	02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.027.869.186	18.279.305.437	33.826.267.581	47.936.819.598	26.819.627.908	32.542.816.150
5	2	03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.366.791.755	37.849.565.656	111.423.320.243	68.831.953.481	33.971.967.543	76.469.328.219

KODE			URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (APBD Awal)
5	2	04	Belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	156.094.499.386	146.932.513.040	146.266.479.890	34.419.213.412	86.583.770.843	87.626.172.045
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.396.538.500	5.466.046.600	3.670.161.860	1.677.853.987	1.284.711.650	1.174.983.551
5	2	06	Belanja Modal Aset Lainnya						537.400.000
<b>5</b>	<b>3</b>		<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>2.233.068.551</b>	<b>855.126.514</b>	<b>1.869.000.000</b>	<b>68.298.692.590</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.487.204.646</b>
5	3	01	Belanja Tidak Terduga	2.233.068.551	855.126.514	1.869.000.000	68.298.692.590	2.000.000.000	2.487.204.646
<b>5</b>	<b>4</b>		<b>Belanja Transfer Keuangan</b>	<b>87.809.450.592</b>	<b>88.185.571.228</b>	<b>97.557.738.215</b>	<b>93.654.352.584</b>	<b>96.080.673.364</b>	<b>87.019.792.800</b>
5	4	01	Belanja Bagi Hasil	1.082.246.745	1.334.800.000	1.987.580.587	1.035.305.140	2.150.127.664	1.414.424.700
5	4	02	Belanja Bantuan Keuangan	86.727.203.847	86.850.771.228	95.570.157.628	92.619.047.444	93.930.545.700	85.605.368.100
<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>				<b>869.380.036.079</b>	<b>831.424.635.064</b>	<b>998.194.358.064</b>	<b>930.210.853.201</b>	<b>919.633.509.773</b>	<b>931.207.536.702</b>
<b>SURPLUS / DEFISIT ANGGARAN</b>				<b>(47.813.693.968)</b>	<b>(15.146.692.949)</b>	<b>(16.504.356.720)</b>	<b>(63.825.361.913)</b>	<b>(69.073.319.583)</b>	<b>(88.136.557.942)</b>
<b>6</b>			<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>						
<b>6</b>	<b>1</b>		<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>50.813.693.968</b>	<b>19.646.692.949</b>	<b>22.004.356.720</b>	<b>66.825.361.913</b>	<b>69.573.319.583</b>	<b>88.136.557.942</b>
6	1	01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	48.374.912.054	19.646.692.949	22.004.356.720	66.825.361.913	69.573.319.583	88.136.557.942
6	1	02	Pencairan Dana Cadangan						
6	1	03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan						
6	1	04	Penerimaan Pembiayaan Daerah	2.438.781.914					
6	1	05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah						
6	1	06	Penerimaan Kembali Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan						
<b>6</b>	<b>2</b>		<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>4.500.000.000</b>	<b>5.500.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	
6	2	01	Pembentukan Dana Cadangan						
6	2	02	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000	4.500.000.000	5.500.000.000	3.000.000.000	500.000.000	
6	2	03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo						
6	2	04	Pemberian Pinjaman Daerah						
6	2	05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan						
<b>SURPLUS / DEFISIT PEMBIAYAAN DAERAH</b>				<b>47.813.693.968</b>	<b>15.146.692.949</b>	<b>16.504.356.720</b>	<b>63.825.361.913</b>	<b>69.073.319.583</b>	<b>88.136.557.942</b>
<b>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA)</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sumber: APBD Perubahan tahun 2017-2021 dan APBD Tahun 2022

### **3.2.1. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

#### **3.2.1.1. Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah merupakan sumber utama dari pembiayaan pembangunan daerah. Semakin besar pendapatan daerah sangat berpengaruh terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah atau sebaliknya. Dalam perencanaan penganggaran pendapatan daerah dalam APBD harus dilakukan secara terukur, rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Kinerja pendapatan daerah dapat menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat yang diukur melalui penerimaan pendapatan daerah.

Jika dilihat dari perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Solok Selatan cukup berfluktuasi periode tahun 2017-2019 terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari Rp. 795.830.635.612,- pada tahun 2017 menjadi Rp 913.258.324.428,- pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi Rp. 861.998.332.754,-. Penurunan ini merupakan dampak dari perubahan struktur dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mengalami penurunan sebagai akibat bencana pandemic *Corona virus disease (Covid-19)* yang mengakibatkan menurunnya kemampuan negara dalam membiayai belanja.

Dampak dari penurunan belanja negara ini akhirnya juga berdampak terhadap penurunan dana perimbangan daerah, yang dilakukan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* dan atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020. Selain itu

kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 60 Tahun 2020 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang bertujuan memberikan insentif kepada pemilik kendaraan pada masa pandemic Covid 19 dalam membayar pajak sehingga dalam jangka pendek juga berdampak terhadap penurunan pendapatan pajak kendaraan bermotor Provinsi Sumatera Barat yang akhirnya berdampak terhadap penurunan Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya.

Selain berpengaruh negatif terhadap perekonomian dan pendapatan nasional dan provinsi Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) tentu juga berpengaruh terhadap perekonomian daerah. Berdasarkan hal tersebut Kabupaten Solok Selatan juga melakukan penyesuaian anggaran APBD yaitu merasionalisasi perkiraan target pendapatan. Rasionalisasi tersebut dilakukan pada hampir semua pos pendapatan daerah yang terimbas secara langsung maupun tidak langsung akibat pelemahan perekonomian daerah sebagai akibat dampak pandemic Covid-19, baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer (pusat dan provinsi) serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selain Rasionalisasi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga berupaya memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang tidak terimbas oleh pandemi Covid 19 terutama yang berasal dari seperti pendapatan BLUD, Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta Bagi Hasil Pengelolaan Sumber Daya Alam. Dampak dari hal tersebut adalah pada perubahan tahun 2020 target pendapatan mengalami penurunan sebesar 5,9% atau Rp. 54.162.896.208,- dari target awal tahun 2020 menjadi Rp. 866.385.491.288,-. Hal ini terus berlanjut pada tahun 2021 dimana pandemic Covid 19 belum ada tanda-tanda berakhir sehingga mulai dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan penyusunan keuangan. Kondisi ini menyebabkan Kabupaten Solok Selatan melakukan revisi target pendapatan lebih rendah dari tahun 2020 menjadi Rp. 850.560.190.190,-. Meskipun pada tahun 2021 disisi target mengalami penurunan namun jika dilihat dari realisasi pendapatan mengalami peningkatan 0,492% jika dibandingkan dengan realisasi 2020 yaitu menjadi Rp. 866.235.598.985,-

Dilihat dari pencapaian dari kinerja pendapatan daerah Kabupaten Solok Selatan periode 2017-2021 dapat dilihat cukup baik yaitu rata-rata realisasi 97,72%, dengan realisasi terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu



sebesar 93,03% dan tertinggi pada tahun 2021 yaitu 101,84%. Sedangkan untuk pertumbuhan realisasi pendapatan daerah meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan, akan tetapi secara keseluruhan pada periode 2017-2021 pendapatan daerah Kabupaten Solok Selatan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,71%.

Disisi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode 2017-2021 meskipun masih berkontribusi relatif kecil yaitu rata-rata 8,55% terhadap realisasi pendapatan daerah. Namun dari tahun 2018 kontribusinya terus mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan dari realisasi PAD yaitu dari 7,62% dengan jumlah realisasi Rp. 60.545.296.360,- pada tahun 2018 menjadi 9,29% dengan jumlah realisasi Rp. 80.459.853.847,- pada tahun 2021 atau rata-rata peningkatan 18,74% pertahun.

Jika dilihat dari kontribusi komponen PAD terhadap pembentukan PAD dapat dilihat bahwa sumber pendapatan utama berasal dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dengan kontribusi rata-rata 83,26%. Pendapatan ini terutama berasal dari Dana Kapitasi Kesehatan yang berasal dari BPJS yang diterima oleh puskesmas dan penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD), Jasa Giro, Bunga serta penjualan asset daerah. Sedangkan untuk pajak dan retribusi daerah yang seharusnya merupakan sumber utama dari PAD baru berkontribusi rata-rata sebesar 12,76 untuk pajak dan 1,60 untuk retribusi daerah.

Sampai tahun 2021 pendapatan transfer masih merupakan sumber utama pembiayaan belanja daerah dengan kontribusi rata-rata 89,68%. Meskipun memiliki kontribusi yang besar namun pertumbuhannya cenderung mengalami penurunan terutama periode tahun 2019-2021 yaitu dari Rp. 821.250.271.081,- pada tahun 2019 menjadi Rp. 741.085.202.403,- pada tahun 2021. Penurunan ini seiring dengan menurunnya kemampuan keuangan negara dan perekonomian nasional yang terdampak covid 19 yang akhirnya berdampak terhadap penerimaan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Intensif Daerah yang dialokasikan oleh pemerintah pusat ke Kabupaten Solok Selatan. Sedangkan untuk komponen Pendapatan Transfer Antar Daerah yang merupakan pendapatan transfer bagi hasil pajak dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat meskipun berfluktuasi pada periode 2017-2021 namun cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan 5,31%.

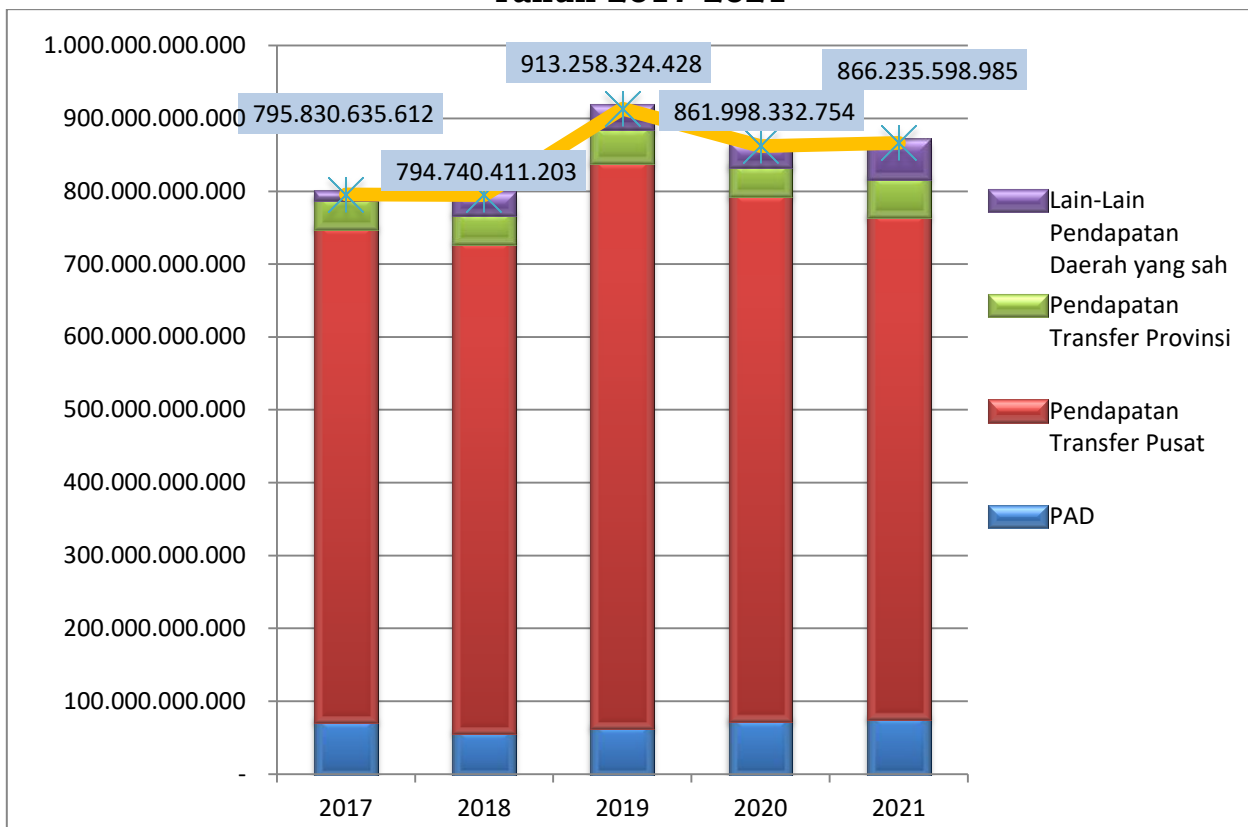
Sedangkan untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan sumber pembiayaan belanja daerah yang memiliki kontribusi terkecil yaitu rata-rata 2,77%, meskipun pada periode tahun 2018-2021 cenderung

mengalami peningkatan dari Rp. 22.805.713.899,- pada tahun 2018 menjadi Rp. 44.690.542.735,- pada tahun 2021. Sumber pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah berasal dari pemerintah pusat yang penggunaannya sudah terikat yaitu Bantuan Operasional Sekolah. Pada tahun 2021 terdapat peningkatan yang cukup signifikan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, peningkatan ini berasal dari pemerintah pusat yang diperuntukan penanganan rehab rekon daerah pasca bencana sebesar Rp. 21.750.000.000,-.

Jika dilihat dari realisasi pendapatan daerah sampai tahun 2021 meskipun kontribusi pendapatan transfer terus mengalami penurunan dari 90,19% pada tahun 2017 menjadi 89,68% pada tahun 2021 namun sumber pembiayaan belanja daerah Kabupaten Solok Selatan masih bersumber dari dana transfer, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun provinsi. Sedangkan untuk PAD hanya berkontribusi rata-rata sebesar 8,55% dari total pendapatan daerah. Hal ini dapat diartikan tingkat ketergantungan Kabupaten Solok Selatan dalam membiayai belanja daerah cukup tinggi, terutama dari: 1). Dana Transfer Pemerintah Pusat baik dana bagi hasil pajak/bukan pajak dan bagi hasil sumber daya alam; dana alokasi umum; dan dana alokasi khusus; dana insentif daerah serta dana desa, 2) Dana Transfer Antar Daerah yaitu Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintahan daerah lainnya.

Rendahnya penerimaan dan kontribusi pendapatan asli daerah terutama untuk pajak dan retribusi menggambarkan masih lemahnya aktifitas perekonomian pada masyarakat yang dapat dijadikan objek pungut, serta belum tergalinya dan terkelolanya sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru baik yang berasal dari pajak maupun retribusi daerah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah. Penggalan sumber-sumber pendapatan dari aset dan potensi daerah yang dimiliki dan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah perlu terus ditingkatkan dengan tetap mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi daerah, agar ketergantungan terhadap pemerintahan pusat dapat dikurangi. Penggalan sumber pendapatan tersebut dapat dilakukan melalui intensifikasi pajak dan retribusi daerah terutama ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan (*compliance*) dan memperkuat basis pajak dan retribusi daerah, serta ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah terutama ditujukan untuk memperluas basis pajak daerah dan retribusi daerah.

**Gambar 3.2.**  
**Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Solok Selatan**  
**Tahun 2017-2021**



Sumber: Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tahun 2017-2021

**Tabel 3.8.**  
**Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2017-2021 (Rp.000)**

KODE	URAIAN	2017		2018		2019		2020		2021		Rata-rata Realisasi
		Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>											-
<b>4 1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>75.505.888</b>	<b>95,7</b>	<b>60.545.296</b>	<b>87,8</b>	<b>67.842.786</b>	<b>88,8</b>	<b>76.864.311</b>	<b>109,3</b>	<b>80.459.854</b>	<b>94,29</b>	<b>95,18</b>
4 1 01	Pajak Daerah	6.991.350	75,7	7.618.652	67,6	8.435.032	65,3	6.800.569	103,1	16.500.169	89,06	80,16
4 1 02	Restribusi Daerah	1.047.276	65,5	922.009	44,2	1.362.801	46,4	1.199.290	120,3	1.235.018	84,66	72,21
4 1 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.984.390	103,7	1.470.319	98,0	1.677.245	67,1	1.843.024	100,0	1.700.551	100,00	93,76
4 1 04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	65.482.872	99,0	50.534.316	93,4	56.367.708	97,0	67.021.428	110,1	61.024.115	95,88	99,09
<b>4 2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>717.774.678</b>	<b>97,3</b>	<b>711.389.401</b>	<b>98,4</b>	<b>821.250.271</b>	<b>93,7</b>	<b>760.455.717</b>	<b>99,0</b>	<b>741.085.202</b>	<b>103,07</b>	<b>98,22</b>
<b>4 2 01</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>677.599.019</b>	<b>96,9</b>	<b>672.016.315</b>	<b>99,2</b>	<b>775.072.868</b>	<b>93,3</b>	<b>720.618.426</b>	<b>98,3</b>	<b>689.048.371</b>	<b>103,68</b>	<b>98,17</b>
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam	14.713.777	73,9	18.494.085	99,7	13.309.793	57,2	23.408.771	76,1	52.374.955	207,44	102,86
	Dana Alokasi Umum	480.406.179	100,0	480.406.179	100,0	490.084.500	99,1	441.989.749	99,2	437.174.072	100,00	99,66
	Dana Alokasi Khusus	146.846.571	89,8	137.314.856	96,0	191.972.341	82,3	186.601.679	99,1	143.243.038.	98,15	92,71
	Dana Insentif Daerah	-	-	-	-	36.296.683	100,0	24.095.009	100,0	8.567.934	100,00	60,00
	Dana Otonomi Khusus	206.368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dana Desa	35.426.124	100,0	35.721.401	100,0	43.409.551	100,0	44.523.218	100,0	47.688.372	100,00	100,00
<b>4 2 02</b>	<b>Pendapatan Tansfer Antar Daerah</b>	<b>40.175.659</b>	<b>105,2</b>	<b>39.373.086</b>	<b>87,5</b>	<b>46.177.403</b>	<b>100,8</b>	<b>39.837.291</b>	<b>115,2</b>	<b>52.036.830</b>	<b>95,63</b>	<b>100,87</b>
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	38.125.659	105,4	39.373.086	94,7	46.177.403	105,5	39.837.291	115,2	49.536.830	95,42	103,26
	Bantuan Keuangan	2.050.000	100,0	-	-	-	-	-	-	2.500.000	100,00	40,00
<b>4 3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah</b>	<b>2.550.070</b>	<b>49,0</b>	<b>22.805.714</b>	<b>92,6</b>	<b>24.165.268</b>	<b>84,2</b>	<b>24.678.305</b>	<b>99,4</b>	<b>44.690.543</b>	<b>96,73</b>	<b>84,39</b>
4 3 01	Pendapatan Hibah	2.550.070	49,0	22.805.714	92,6	24.165.268	84,2	24.678.305	99,4	21.750.000	95,60	84,16
4 3 02	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 3 03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	22.940.543	97,83	19,57
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>		<b>795.830.636</b>	<b>96,9</b>	<b>794.740.411</b>	<b>97,4</b>	<b>913.258.324</b>	<b>93,0</b>	<b>861.998.333</b>	<b>99,9</b>	<b>866.235.599</b>	<b>101,84</b>	<b>97,72</b>

Sumber: Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tahun 2017-2021

**Tabel 3.9.**  
**Pertumbuhan dan Kontribusi per Komponen Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Solok Selatan 2017-2021 (Persen)**

KODE	URAIAN	2017		2018		2019		2020		2021		Rata-rata Realisasi	
		Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>												
<b>4 1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>47,65</b>	<b>9,49</b>	<b>(19,81)</b>	<b>7,62</b>	<b>12,05</b>	<b>7,43</b>	<b>13,3</b>	<b>8,92</b>	<b>4,65</b>	<b>9,29</b>	<b>1,28</b>	<b>8,55</b>
4 1 1	Pajak Daerah	40,88	0,88	8,97	0,96	10,72	0,92	(19,38)	0,79	142,63	1,90	18,74	1,09
4 1 2	Restribusi Daerah	(84,16)	0,13	(11,96)	0,12	47,81	0,15	(12,00)	0,14	2,98	0,14	3,35	0,14
4 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	53,76	0,25	(25,91)	0,19	14,07	0,18	9,88	0,21	(7,73)	0,20	(3,04)	0,21
4 1 4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	71,08	8,23	(22,83)	6,36	11,54	6,17	18,9	7,78	(8,95)	7,04	1,40	7,12
<b>4 2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>(0,94)</b>	<b>90,19</b>	<b>(0,89)</b>	<b>89,51</b>	<b>15,44</b>	<b>89,93</b>	<b>(7,40)</b>	<b>88,22</b>	<b>(2,55)</b>	<b>85,55</b>	<b>0,64</b>	<b>89,68</b>
<b>4 2 1</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>(0,61)</b>	<b>85,14</b>	<b>(0,82)</b>	<b>84,56</b>	<b>15,34</b>	<b>84,87</b>	<b>(7,03)</b>	<b>83,6</b>	<b>(4,38)</b>	<b>79,55</b>	<b>0,34</b>	<b>83,54</b>
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam	(29,99)	1,85	25,69	2,33	(28,03)	1,46	75,88	2,72	123,74	6,05	28,91	2,88
	Dana Alokasi Umum	(1,76)	60,37	0	60,45	2,01	53,66	(9,81)	51,28	(1,09)	50,47	(1,87)	55,25
	Dana Alokasi Khusus	33,16	18,45	(6,49)	17,28	39,8	21,02	(2,80)	21,65	(23,24)	16,54	(0,50)	18,99
	Dana Insentif Daerah	-	-	-	-	-	3,97	(33,62)	2,8	(64,44)	0,99	(38,20)	2,59
	Dana Otonomi Khusus	(99,39)	0,03	(61,33)	0,01	(100)	-	-	-	-	0,00	(100)	0,01
	Dana Desa	27,76	4,45	0,83	4,49	21,52	4,75	2,57	5,17	7,11	5,51	6,13	4,87
<b>4 2 2</b>	<b>Pendapatan Tansfer Antar Daerah</b>	<b>(6,21)</b>	<b>5,05</b>	<b>(2,00)</b>	<b>4,95</b>	<b>17,28</b>	<b>5,06</b>	<b>(13,73)</b>	<b>4,62</b>	<b>30,62</b>	<b>6,01</b>	<b>5,31</b>	<b>5,14</b>
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	8,24	4,79	3,27	4,95	17,28	5,06	(13,73)	4,62	24,35	5,72	5,38	5,03
	Bantuan Keuangan	(73,07)	0,26	(100)	-	-	-	-	-	-	0,29	4,06	0,11
<b>4 3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah</b>	<b>226,93</b>	<b>0,32</b>	<b>794,32</b>	<b>2,87</b>	<b>5,96</b>	<b>2,65</b>	<b>2,12</b>	<b>2,86</b>	<b>81,09</b>	<b>5,16</b>	<b>77,31</b>	<b>2,77</b>
4 3 1	Pendapatan Hibah	226,93	0,32	794,32	2,87	5,96	2,65	2,12	2,86	(11,87)	2,51	53,53	2,24
4 3 2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 3 3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	100	2,65	-	0,52
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2,49</b>	<b>100</b>	<b>(0,14)</b>	<b>100</b>	<b>14,91</b>	<b>100</b>	<b>(5,61)</b>	<b>100</b>	<b>0,49</b>	<b>100</b>	<b>1,71</b>	<b>100</b>

Sumber: Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tahun 2017-2021 (data diolah)



### 3.2.1.2. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dilihat pada periode 2017-2018 dapat dilihat terjadi penurunan dari surplus pembiayaan daerah dari Rp. 46.733.486.387,- pada tahun 2017 menjadi Rp. 16.099.532.949,- pada tahun 2018. Penurunan ini lebih disebabkan karena terjadinya penurunan SILPA tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2018-2021 kembali mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan SILPA tahun sebelumnya sehingga surplus pembiayaan menjadi Rp. 69.005.673.547,-

Dari data diatas dapat dilihat bahwa besar kecilnya dari surplus nya pembiayaan daerah lebih dipengaruhi oleh besar atau kecilnya dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu yang utamanya baik yang berasal dari efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran tahun sebelumnya serta tidak atau kurang optimalnya pelaksanaan program atau kegiatan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan daerah hanya digunakan untuk peningkatan penyertaan Modal ke Bank Nagari yang bertujuan untuk meningkatkan *car ratio* perbankan dan PDAM yang ditujukan untuk peningkatan pelayanannya kepada masyarakat.

**Tabel 3.10.**  
**Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2017-2021 (Rp. 000)**

KODE	URAIAN	2017		2018		2019		2020		2021		Rata-rata Realisasi
		Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>											<b>-</b>
<b>6 1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>48.423.486</b>	<b>95,3</b>	<b>19.654.533</b>	<b>100,0</b>	<b>22.004.357</b>	<b>100,0</b>	<b>66.816.901</b>	<b>100,0</b>	69.505.673	99,9	<b>99,1</b>
6 1 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	48.371.280	100,0	19.646.693	100,0	22.004.357	100,0	66.816.901	100,0	69.505.673	99,9	99,9
6 1 02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 1 03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 1 04	Penerimaan Pembiayaan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 1 05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	52.206	-	7.840	-	-	-	-	-	-	-	-
6 1 06	Penerimaan Kembali Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6 2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>1.690.000</b>	<b>56,3</b>	<b>3.555.000</b>	<b>79,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>18,2</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>	500.000	100,0	<b>70,7</b>
6 2 01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 2 02	Penyertaan Modal Daerah	1.690.000	56,3	3.555.000	79,0	1.000.000	18,2	3.000.000	100,0	500.000	100,0	70,7
6 2 03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 2 04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 2 05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SURPLUS / DEFISIT DAERAH</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>46.733.486</b>	<b>97,7</b>	<b>16.099.533</b>	<b>106,3</b>	<b>21.004.357</b>	<b>127,3</b>	<b>63.816.901</b>	<b>100,0</b>	<b>69.005.673</b>	<b>100,0</b>	<b>106,2</b>

Sumber: Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tahun 2017-2021 (data diolah)

### **3.2.1.3. Belanja Daerah**

Belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan fungsi, tanggung jawab dan tugas pemerintah itu sendiri. Sumber dari belanja daerah berasal dari pendapatan daerah tahun bersangkutan serta surplus pelaksanaan APBD tahun sebelumnya. Belanja daerah digunakan untuk mendanai semua kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, dan urusan pilihan serta urusan penunjang pelayanan pemerintahan (unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan) , yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer keuangan. Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi perangkat daerah, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.

Dilihat dari perkembangan realisasi belanja daerah Kabupaten Solok Selatan dari tahun 2017-2021 berfluktuasi namun cenderung mengalami peningkatan yaitu dari Rp. 822.917.429.051,- pada tahun 2017 menjadi Rp. 826.137.833.974,- pada tahun 2021 atau mengalami peningkatan rata-rata 0,08%. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2018 dari Rp. 822.917.429.051,- pada tahun 2017 menjadi Rp. 788.835.387.432,- pada tahun 2018, namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi Rp. 867.437.319.235,-. Pada periode 2020-2021 belanja daerah kembali mengalami penurunan hingga menjadi Rp. 826.088.136.474,- pada tahun 2021. Penurunan ini secara umum sejalan dengan penurunan pendapatan daerah dan surplus pembiayaan daerah yang merupakan sumber pendanaan dari dari belanja daerah.

Disisi tingkat realisasi belanja daerah dapat kita lihat bahwa realisasi belanja Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2017-2021 berfluktuasi dengan rata-rata realisasi 91,1%, dengan realiasi terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu 86,90% dan tahun 2021 yaitu 89,93. Khusus pada tahun 2021 rendahnya realisasi belanja daerah terutama disebabkan rendahnya serapan dari belanja modal daerah sebagai efek kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan seperti belanja pengadaan tanah untuk penataan kawasan ibu kota, pembangunan gedung data bangunan untuk Rumah Sakit Daerah, serta penundaan pengerjaan program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Rehab Rekon dari BNPB yang masuk pada APBD Perubahan.

Selain itu beberapa kebijakan daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan belanja daerah khususnya untuk menekan belanja operasional pemerintah seperti penertipan perjalanan dinas, penataan dan memaksimalkan penggunaan dan pemamfaatan asset daerah.

Sedangkan untuk penggunaan belanja daerah yang dapat dilihat melalui rata-rata komposisi realisasi belanja daerah pada periode 2017-2021 dimana rata-rata 66,04% belanja daerah digunakan belanja operasional, belanja modal 21,42%, belanja transfer 11,06%, dan belanja tidak terduga 1,47%.

Dilihat dari perkembangan belanja operasional periode 2017-2021 terus mengalami peningkatan yaitu dari Rp. 503.469.860.804,- pada tahun 2017 menjadi Rp. 602.877.207.254,- pada tahun 2021 atau rata-rata mengalami peningkatan Rp. 3,67%. Peningkatan belanja operasi ini seiring dengan terjadinya peningkatan dari belanja pegawai (rata-rata 4,95%) dan belanja kebutuhan barang dan jasa (rata-rata 1,54%) untuk pemenuhan belanja program dan kegiatan serta operasioal kantor, peningkatan belanja hibah daerah sebesar (rata-rata 9,79%). Untuk belanja pegawai peningkatan dikarenakan oleh kebijakan penerimaan CPNS, kenaikan pangkat dan gaji berkala serta kebijakan peningkatan tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang akhirnya menyebabkan belanja pegawai mengalami peningkatan dari Rp. 292.765.272.924,- pada tahun 2017 menjadi Rp. 372.832.719.871,- pada tahun 2021, dengan komposisi realisasi belanja pegawai terhadap belanja daerah pada tahun 2021 mencapai 45,13%. Sedangkan peningkatan belanja hibah lebih disebabkan karena pada tahun 2020 Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak sehingga harus menganggarkan belanja hibah untuk pelaksanaan Pilkada, serta kebijakan pemerintah pusat memasukan belanja bantuan operasional TK/PAUD swasta kedalam DAK non fisik sehingga pemerintah daerah harus menganggarkan kembali dalam bentuk belanja hibah ke TK/PAUD swasta.

Untuk realisasi belanja modal daerah pada periode 2017-2021 berfluktuatif namun cenderung mengalami penurunan yaitu dari Rp. 230.734.913.890,- pada tahun 2017 menjadi Rp. 127.046.936.090,- pada tahun 2021 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -11,25%. Penurunan seiring dengan peningkatan belanja operasional pemerintah daerah yang diikuti oleh menurunnya kemampuan keuangan daerah dalam mendanai pembangunan.

Sedangkan untuk belanja transfer keuangan yang merupakan belanja transfer keuangan pemerintah daerah ke Desa atau Nagari periode 2017-2021

terus mengalami peningkatan yaitu dari Rp. 86.972.591.391,- pada tahun 2017 menjadi Rp. 95.571.875.630,- pada tahun 2021 dengan rata-rata peningkatan 1,90%. Peningkatan ini seiring dengan kebijakan pengalokasian dana desa oleh pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah daerah untuk mengalokasikan 10% dari dana alokasi umum; dan dana bagi hasil pajak/bukan pajak dan bagi hasil sumber daya alam dari pemerintah pusat ke Desa atau Nagari.



**Tabel 3.11.**  
**Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2017-2021 (Rp.000)**

KODE	URAIAN	2017		2018		2019		2020		2021		Rata-rata Realisasi
		Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>											
<b>5 1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>503.469.861</b>	<b>95,1</b>	<b>503.917.691</b>	<b>96,0</b>	<b>558.625.718</b>	<b>93,6</b>	<b>580.350.641</b>	<b>95,4</b>	<b>602.877.207</b>	92,5	<b>94,4</b>
5 1 01	Belanja Pegawai	292.765.273	97,5	316.931.115	97,4	341.301.328	94,7	348.620.480	95,5	372.832.720	97,9	96,6
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	205.528.038	92,0	181.141.399	93,6	208.116.229	91,7	200.106.981	95,1	221.928.878	84,5	91,1
5 1 03	Belanja Hibah	4.995.800	94,2	5.845.176	98,7	6.246.161	96,1	31.473.430	97,7	7.969.923	95,9	96,6
5 1 04	Belanja Bantuan Sosial	180.750	21,6	-	-	2.962.000	94,6	149.750	21,4	145.686	98,4	47,2
<b>5 2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>230.734.914</b>	<b>92,4</b>	<b>196.414.121</b>	<b>90,3</b>	<b>210.375.471</b>	<b>69,7</b>	<b>124.585.199</b>	<b>79,7</b>	<b>127.046.936</b>	74,7	<b>81,4</b>
5 2 01	Belanja Modal Tanah	6.081.543	69,3	4.933.039	54,3	2.253.843	34,8	1.646.375	48,6	18.254.517	85,3	58,5
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.278.558	97,7	16.923.032	92,6	30.013.601	88,7	45.530.195	119,5	24.095.966	89,8	92,7
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.738.196	96,7	35.803.303	94,6	59.276.348	53,2	54.832.639	80,2	20.649.987	60,8	76,9
5 2 04	Belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	142.255.443	91,1	133.431.112	90,8	115.276.142	78,8	20.898.146	51,9	62.852.042	72,6	79,9
5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.381.173	99,4	5.323.635	97,4	3.555.537	96,9	1.677.844	27,0	1.194.424	93,0	97,3
<b>5 3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>1.740.063</b>	<b>77,9</b>	<b>793.071</b>	<b>92,7</b>	<b>1.832.664</b>	<b>98,1</b>	<b>57.805.877</b>	<b>84,6</b>	<b>641.815</b>	32,1	<b>77,1</b>
5 3 01	Belanja Tidak Terduga	1.740.063	77,9	793.071	92,7	1.832.664	98,1	57.805.877	84,6	641.815	32,1	77,1
<b>5 4</b>	<b>Belanja Transfer Keuangan</b>	<b>86.972.591</b>	<b>99,0</b>	<b>87.710.505</b>	<b>99,5</b>	<b>96.603.465</b>	<b>99,0</b>	<b>93.511.697</b>	<b>99,8</b>	<b>95.571.876</b>	99,5	<b>99,4</b>
5 4 01	Belanja Bagi Hasil	584.205	54,0	859.852	64,4	1.055.974	53,1	892.650	86,2	1.641.330	76,3	66,8
5 4 02	Belanja Bantuan Keuangan	86.388.386	99,6	86.850.653	100,0	95.547.492	100,0	92.619.047	100,0	93.930.545	100,0	99,9
<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>		<b>822.917.429</b>	<b>94,7</b>	<b>788.835.387</b>	<b>94,9</b>	<b>867.437.319</b>	<b>86,9</b>	<b>856.253.414</b>	<b>92,4</b>	<b>826.137.834</b>	<b>89,8</b>	<b>91,1</b>

Sumber: Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tahun 2017-2021 (data diolah)

**Tabel 3.12.**  
**Pertumbuhan dan Komposisi Belanja Daerah**  
**Kabupaten Solok Selatan 2017-2021**

KODE	URAIAN	2017		2018		2019		2020		2021		Rata-rata Realisasi	
		Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>												
<b>5 1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>0,39</b>	<b>61,18</b>	<b>0,09</b>	<b>63,88</b>	<b>10,86</b>	<b>64,40</b>	<b>3,89</b>	67,78	3,88	72,98	3,67	66,04
5 1 01	Belanja Pegawai	(1,79)	35,58	8,25	40,18	7,69	39,35	2,14	40,71	6,95	45,13	4,95	40,19
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4,85	24,98	(11,87)	22,96	14,89	23,99	(3,85)	23,37	10,91	26,86	1,55	24,43
5 1 03	Belanja Hibah	(32,45)	0,61	17,00	0,74	6,86	0,72	403,88	3,68	(74,68)	0,96	9,79	1,34
5 1 04	Belanja Bantuan Sosial	1.105,00	0,02	(100,00)	-	#DIV/0!	0,34	(94,94)	0,02	(2,71)	0,02	(4,22)	0,08
<b>5 2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>(1,49)</b>	<b>28,04</b>	<b>(14,87)</b>	<b>24,90</b>	<b>7,11</b>	<b>24,25</b>	<b>(40,78)</b>	<b>14,55</b>	1,98	15,38	(11,25)	21,42
5 2 01	Belanja Modal Tanah	56,75	0,74	(18,89)	0,63	(54,31)	0,26	(26,95)	0,19	1008,77	2,21	24,59	0,81
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34,10	3,92	(47,57)	2,15	77,35	3,46	51,70	5,32	(47,07)	2,92	(5,68)	3,55
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26,49	5,80	(25,00)	4,54	65,56	6,83	(7,50)	6,40	(62,34)	2,50	(15,43)	5,22
5 2 04	Belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	(14,99)	17,29	(6,20)	16,91	(13,61)	13,29	(81,87)	2,44	200,75	7,61	(15,07)	11,51
5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	99,24	0,29	123,57	0,67	(33,21)	0,41	(52,81)	0,20	(28,81)	0,14	(12,89)	0,34
<b>5 3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>(15,30)</b>	<b>0,21</b>	<b>(54,42)</b>	<b>0,10</b>	<b>131,08</b>	<b>0,21</b>	<b>3.054,20</b>	<b>6,75</b>	(98,89)	0,08	(18,08)	1,47
5 3 01	Belanja Tidak Terduga	(15,30)	0,21	(54,42)	0,10	131,08	0,21	3.054,20	6,75	(98,89)	0,08	(18,08)	1,47
<b>5 4</b>	<b>Belanja Transfer Keuangan</b>	<b>13,69</b>	<b>10,57</b>	<b>0,85</b>	<b>11,12</b>	<b>10,14</b>	<b>11,14</b>	<b>(3,20)</b>	<b>10,92</b>	2,20	11,57	1,90	<b>11,06</b>
5 4 01	Belanja Bagi Hasil	68,34	0,07	47,18	0,11	22,81	0,12	(15,47)	0,10	83,87	0,20	22,95	0,12
5 4 02	Belanja Bantuan Keuangan	13,44	10,50	0,54	11,01	10,01	11,01	(3,06)	10,82	1,42	11,37	1,69	10,94
<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>		<b>1,06</b>	<b>100,00</b>	<b>(4,14)</b>	<b>100,00</b>	<b>9,96</b>	<b>100,00</b>	<b>(1,29)</b>	<b>100,00</b>	<b>(3,52)</b>	<b>100</b>	<b>0,08</b>	100,00

Sumber: Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tahun 2017-2021 (data diolah)

### **3.2.2. Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Untuk melihat kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan maka yang perlu diperhitungkan adalah pendapatan daerah yang merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan daerah.

Dalam memproyeksi perencanaan belanja daerah hal yang paling utama yang harus dilakukan adalah memproyeksikan kemampuan keuangan daerah baik yang berasal dari pendapatan daerah maupun penerimaan pembiayaan daerah. Dalam memproyeksikan hal tersebut harus dilakukan berdasarkan perkiraan yang terukur secara rasional yang didasari perkembangan realisasi pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya, proyeksi pencapaian pendapatan tahun berjalan, serta mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah mempunyai dasar hukum penerimaannya serta kondisi perekonomian Nasional, Provinsi dan Daerah.

Berdasarkan dari Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016-2021, Target APBD Tahun 2022 dan mempertimbangkan prinsip penyusunan anggaran maka pada tahun 2023 diperkirakan Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah di proyeksikan sebesar Rp. 751.663.947.186,- atau mengalami penurunan 10,84% dari tahun 2022 dengan asumsi
  - ❖ Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar Rp 75.000.000.000,- atau peningkatan sebesar 1,99%. Peningkatan tersebut diproyeksikan berasal pajak daerah sebesar 8,21%, Retribusi daerah

sebesar 30,30% dan bagi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 11,11%. Sedangkan untuk Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 0,81%

- ❖ Pendapatan Transfer proyeksikan sebesar Rp. 659.288.797.186,- atau mengalami penurunan sebesar 13,21%. Penurunan ini lebih disebabkan dengan asumsi belum dianggarkannya pendapatan transfer pemerintah pusat yang berasal dari Dana Alokasi Khusus Daerah. Untuk Dana Bagi hasil pajak/Bukan pajak baik yang berasal dari pusat dan provinsi masih di asumsikan sama dengan APBD Tahun 2022. Sedangkan untuk Trasfer pusat yang berasal dari Dana Alokasi Umum diasumsikan mengalami peningkatan sebesar 1,83%. Sedangkan untuk Bantuan Keuangan diproyeksikan pada tahun 2023 sebesar Rp. 85.788.963.165,-, yang berasal dari bantuan keuangan Provinsi Sumatera Barat.
- ❖ Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 75,95%. Peningkatan ini diproyeksikan berasal dari pendapatan Hibah yang diterima oleh Kabupaten Solok Selatan, sebagai akibat ditunjuknya Kabupaten Solok Selatan sebagai Tuan Rumah MTQ Nasional Tingkat Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023.

## 2. Pembiayaan Daerah

Surplus Pembiayaan Daerah diproyeksikan sebesar Rp. 58.923.776.097,- atau mengalami penurunan sebesar -33,14%. Penurunan disebabkan karena menurunnya proyeksi penerimaan pembiayaan yang berasal SILPA tahun lalu dari Rp. 88.136.557.942,- pada tahun 2022 menjadi Rp. 58.923.776.097.

## 3. Belanja Daerah

Belanja Daerah diproyeksikan sebesar Rp.810.587.723.283,- atau mengalami penurunan sebesar 12,95%. Penurunan ini sejalan dengan menurunnya proyeksi sumber pendanaan pembangunan, terutama belum dianggarkannya pendapatan dana Alokasi Khusus Daerah (Fisik dan Non Fisik). Selain itu penurunan belanja ini berdampak terhadap rasionalisasi kegiatan rutin dan operasional penunjang SKPD serta reschedule beberapa program-program prioritas SKPD.

**Tabel 3.13.**  
**Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023**

KODE	Uraian	Ralisasi APBD 2020	Realisasi APBD 2021	APBD 2022	Proyeksi RKPD 2023
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4 1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>76.864.310.842</b>	<b>80.459.853.847</b>	<b>73.535.025.000</b>	<b>75.000.000.000</b>
4 1 01	Pajak Daerah	6.800.569.116	16.500.169.327	12.059.775.000	13.050.000.000
4 1 02	Restribusi Daerah	1.199.290.190	1.235.018.343	2.084.500.000	2.716.000.000
4 1 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.843.023.859	1.700.551.019	2.700.000.000	3.000.000.000
4 1 04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	67.021.427.678	61.024.115.158	56.690.750.000	56.234.000.000
<b>4 2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>760.455.717.407</b>	<b>741.085.202.403</b>	<b>759.660.803.760</b>	<b>659.288.797.186</b>
<b>4 2 01</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>720.618.426.239</b>	<b>689.048.371.983</b>	<b>711.713.855.939</b>	<b>525.552.886.200</b>
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam	23.408.771.495	52.374.955.481	42.488.464.200	42.488.464.200
	Dana Alokasi Umum	441.989.749.000	437.174.072.000	437.443.271.000	445.443.271.000
	Dana Alokasi Khusus	186.601.678.744	143.243.038.502	194.160.969.739	
	Dana Insentif Daerah	24.095.009.000	8.567.934.000		
	Dana Desa	44.523.218.000	47.688.372.000	37.621.151.000	37.621.151.000,00
<b>4 2 02</b>	<b>Pendapatan Tansfer Antar Daerah</b>	<b>39.837.291.168</b>	<b>52.036.830.420</b>	<b>47.946.947.821</b>	<b>133.735.910.986</b>
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	39.837.291.168	49.536.830.420	47.946.947.821	47.946.947.821
	Bantuan Keuangan		2.500.000.000		85.788.963.165
<b>4 3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah</b>	<b>24.678.304.505</b>	<b>44.690.542.735</b>	<b>9.875.150.000</b>	<b>17.375.150.000</b>
4 3 01	Pendapatan Hibah	24.678.304.505	21.750.000.000		7.500.000.000
4 3 03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan		22.940.542.735	9.875.150.000	9.875.150.000
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>		<b>861.998.332.754</b>	<b>866.235.598.985</b>	<b>843.070.978.760</b>	<b>751.663.947.186</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>				
<b>5 1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>580.349.141.160</b>	<b>602.877.207.254</b>	<b>638.714.101.891</b>	<b>549.798.443.707</b>
5 1 01	Belanja Pegawai	348.620.480.143	372.832.719.871	378.809.700.393	336.536.370.742
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	200.105.481.056	221.928.878.307	250.947.775.994	208.531.824.021
5 1 03	Belanja Hibah	31.473.429.961	7.969.922.995,00	8.956.625.504	4.730.248.944
5 1 04	Belanja Bantuan Sosial	149.750.000	145.686.080,00	0	0
<b>5 2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>124.575.198.868</b>	<b>127.046.936.090</b>	<b>202.986.437.365</b>	<b>171.826.623.276</b>
5 2 01	Belanja Modal Tanah	1.646.375.000	18.254.516.800	4.635.737.400	4.648.095.000
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.520.194.621	24.095.966.388	32.542.816.150	9.257.241.170
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.832.639.480	20.649.986.739	76.469.328.219	35.465.760.942
5 2 04	Belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	20.898.145.980	62.852.041.713	87.626.172.045	121.708.126.164
5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.677.843.787	1.194.424.450	1.174.983.551	210.000.000
5 2 06	Belanja Modal Aset Lainnya			537.400.000	537.400.000

KODE			Uraian	Ralisasi APBD 2020	Realisasi APBD 2021	APBD 2022	Proyeksi RKPD 2023
<b>5</b>	<b>3</b>		<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>57.805.877.089</b>	<b>641.815.000</b>	<b>2.487.204.646</b>	<b>1.000.000.000</b>
5	3	01	Belanja Tidak Terduga	57.805.877.089	641.815.000	2.487.204.646	1.000.000.000
<b>5</b>	<b>4</b>		<b>Belanja Transfer Keuangan</b>	<b>93.511.697.167</b>	<b>95.571.875.630</b>	<b>87.019.792.800</b>	<b>87.962.656.300</b>
5	4	01	Belanja Bagi Hasil	892.649.723	1.641.329.910	1.414.424.700	1.548.331.780
5	4	02	Belanja Bantuan Keuangan	92.619.047.444	93.930.545.720	85.605.368.100	86.414.324.520
<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>				<b>856.241.914.284</b>	<b>826.137.833.974</b>	<b>931.207.536.702</b>	<b>810.587.723.283</b>
<b>SURPLUS / DEFISIT ANGGARAN</b>				<b>5.756.418.470</b>	<b>40.097.765.011</b>	<b>(88.136.557.942)</b>	<b>-58.923.776.097</b>
<b>6</b>			<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
<b>6</b>	<b>1</b>		<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>66.816.901.113</b>	<b>69.505.673.547</b>	<b>88.136.557.942</b>	<b>58.923.776.097</b>
6	1	01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	66.816.901.113	69.505.673.547	88.136.557.942	58.923.776.097
<b>6</b>	<b>2</b>		<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>500.000.000</b>		
6	2	02	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000	500.000.000		
<b>SURPLUS / DEFISIT PEMBIAYAAN DAERAH</b>				<b>63.816.901.113</b>	<b>69.005.673.547</b>	<b>88.136.557.942</b>	<b>58.923.776.097</b>
<b>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA)</b>				<b>69.573.319.583</b>	<b>109.103.438.558</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sumber: APBD Tahun 2022, RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 (diolah)



Untuk konsistensi target anggaran pembangunan daerah dapat dilihat dari perbandingan target pendapatan dan belanja daerah dalam RPJMD dengan proyeksi dalam pendapatan dan belanja daerah yang ditetapkan dalam RKPD dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp. 741.863.947.186,- atau mengalami penurunan sebesar 9.87% dari target yang ditetapkan dalam RPJMD pada tahun 2023. Penurunan ini lebih disebabkan belum dianggarkannya Dana Alokasi Khusus Daerah serta Dana Intesif Daerah yang besaran belum dapat diproyeksi besaran dan penggunaannya. Meskipun demikian pada RKPD tahun 2023 sudah dimasukan proyeksikan pendapatan anggaran BKK dari Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 85.788.963.165,- yang diperuntukan untuk lanjutan kegiatan BKK tahun 2022 dan beberapa kegiatan lainnya serta Pendapatan Hibah dari Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 7.500.000.000,-.
2. Surplus pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp. 58.923.776.097,- atau mengalami peningkatan sebesar 516,15% dari proyeksi RPJMD pada tahun 2023. Peningkatan ini diproyeksikan dari penerimaan yang bersumber dari SILPA tahun 2022.
3. Sejalan dengan penurunan sumber pembiayaan pembangunan daerah menyebabkan terjadinya penyesuaian besaran belanja sebahagian besar program, kegiatan dan sub kegiatan. Penyesuaian ini berdampak terhadap penurunan belanja daerah yakni 9,37% dari proyeksi belanja RPJMD menjadi Rp. 810.587.723.283,-. Penurunan tersebut mengakibatkan terjadinya penurunan di hampir seluruh pos belanja daerah, kecuali belanja modal yang sudah mengakomodir belanja modal yang sumber pendanaanya berasal dari BKK Provinsi Sumatera barat.

**Tabel 3.14.**

**Perbandingan Proyeksi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023 dengan Target RPJMD Pada Tahun 2023**

KODE	Uraian	RPJMD	RKPD 2023	(%)
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>4 1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>83.217.553.641</b>	<b>75.000.000.000</b>	<b>-9,87</b>
4 1 01	Pajak Daerah	11.869.813.750	13.050.000.000	9,94
4 1 02	Restribusi Daerah	1.716.075.000	2.716.000.000	58,27
4 1 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.890.000.000	3.000.000.000	58,73
4 1 04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	67.741.664.891	56.234.000.000	-16,99
<b>4 2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>780.143.821.492</b>	<b>659.288.797.186</b>	<b>-15,46</b>
<b>4 2 01</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>733.575.626.912</b>	<b>525.552.886.200</b>	<b>-28,33</b>

KODE			Uraian	RPJMD	RKPD 2023	(%)
			Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam	27.731.689.035	42.488.464.200	53,21
			Dana Alokasi Umum	454.674.365.737	445.443.271.000	-1,97
			Dana Alokasi Khusus	193.114.000.000		-100,00
			Dana Insentif Daerah	10.367.200.140		-100,00
			Dana Desa	47.688.372.000	37.621.151.000,00	-21,11
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>Pendapatan Tansfer Antar Daerah</b>	<b>46.568.194.580</b>	<b>133.735.910.986</b>	<b>187,18</b>
			Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	46.568.194.580	47.946.947.821	2,96
			Bantuan Keuangan		85.788.963.165	
<b>4</b>	<b>3</b>		<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah</b>	<b>21.693.180.268</b>	<b>17.375.150.000</b>	<b>-19,91</b>
4	3	01	Pendapatan Hibah		7.500.000.000	
4	3	03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan	21.693.180.268	9.875.150.000	-54,48
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>				<b>885.054.555.402</b>	<b>751.663.947.186</b>	<b>-15,05</b>
<b>5</b>			<b>BELANJA DAERAH</b>			
<b>5</b>	<b>1</b>		<b>Belanja Operasi</b>	<b>639.622.870.952</b>	<b>549.798.443.707</b>	<b>-14,04</b>
5	1	01	Belanja Pegawai	383.488.564.421	336.536.370.742	-12,24
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	247.565.098.484	208.531.824.021	-15,77
5	1	03	Belanja Hibah	8.412.254.048	4.730.248.944	-43,77
5	1	04	Belanja Bantuan Sosial	156.954.000		-43,77
<b>5</b>	<b>2</b>		<b>Belanja Modal</b>	<b>155.471.582.141</b>	<b>171.826.623.276</b>	<b>10,52</b>
<b>5</b>	<b>3</b>		<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>-50,00</b>
5	3	01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	1.000.000.000	-50,00
<b>5</b>	<b>4</b>		<b>Belanja Transfer Keuangan</b>	<b>97.261.375.475</b>	<b>87.962.656.300</b>	<b>-9,56</b>
5	4	01	Belanja Bagi Hasil	1.358.588.875	1.548.331.780	13,97
5	4	02	Belanja Bantuan Keuangan	95.902.786.600	86.414.324.520	-9,89
<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>				<b>894.355.828.568</b>	<b>810.587.723.283</b>	<b>-9,37</b>
<b>SURPLUS / DEFISIT ANGGARAN</b>				<b>-9.563.181.943</b>	<b>-58.923.776.097</b>	<b>516,15</b>
<b>6</b>			<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
<b>6</b>	<b>1</b>		<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>11.063.181.943</b>	<b>58.923.776.097</b>	<b>432,61</b>
6	1	01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	11.063.181.943	58.923.776.097	432,61
<b>6</b>	<b>2</b>		<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>1.500.000.000</b>		
6	2	02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000		
<b>SURPLUS / DEFISIT PEMBIAYAAN DAERAH</b>				<b>9.563.181.943</b>	<b>58.923.776.097</b>	<b>516,15</b>
<b>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	

Sesuai Proyeksi diatas, maka Arah kebijakan Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun 2023 adalah:

#### A. Pendapatan Daerah:

- a. Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi, peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana, pengawasan, penyempurnaan prosedur pembayaran pajak serta peningkatan akurasi data objek pajak dan wajib pajak.

- b) Meningkatkan pelayanan dengan upaya meningkatkan SDM pengelola, sarana dan prasarana serta penyempurnaan dasar hukum, tarif dan mekanisme prosedur penerimaan pendapatan daerah.
- c) Meningkatkan sosialisasi dan pengawasan terhadap efektifitas pajak dan retribusi dengan tujuan meningkatnya kesadaran wajib pajak dan retribusi dalam melunasi kewajibanya.
  - a. Memberikan *reward* dan *punishment* terkait hak dan kewajiban petugas maupun wajib pajak/retribusi sesuai dengan aturan berlaku
- d) Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah disamping pajak dan retribusi daerah, terutama dari pengelolaan kekayaan alam dan pendapatan lain yang sah
- e) Mengoptimalisasi penggunaan aset daerah yang dapat dijadikan sumber pendapatan daerah
- f) Meningkatkan peran dan fungsi perangkat daerah penghasil dan BUMD dalam pelayanan guna pencapaian pendapatan daerah.
- g) Meningkatkan sistem koordinasi dan informasi pendapatan dan akurasi usulan kegiatan prioritas ke pemerintah atasan baik Provinsi dan Pemerintah Pusat dengan memberikan data akurat, cepat dan tepat baik dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, bantuan keuangan bersifat khusus maupun hibah.

**B. Belanja Daerah:**

- a) Pemenuhan pengeluaran wajib, mengikat serta prioritas utama, yang merupakan belanja dasar bagi terlaksananya pelayanan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi melalui realokasi dan penggabungan beberapa sub kegiatan.
- b) Mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah dan Alokasi belanja lainnya yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang penggunaannya tetap mempedomani pencapaian kinerja daerah yang ditetapkan dalam RPJMD dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- c) Alokasi Belanja Daerah untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan daerah diarahkan untuk mendanai dan mendukung program prioritas pencapaian Visi dan Misi Bupati / Wakil Bupati.
- d) Belanja Daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan nasional dan provinsi setiap tahunnya sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan kemampuan keuangan daerah.

- e) Pemenuhan penganggaran belanja tidak terduga yang penggunaannya untuk penanganan masalah darurat, bencana dan kegiatan yang tidak dapat direncanakan
- f) Untuk belanja daerah yang terikat penggunaannya seperti DAK, BOS, BKK, dll dianggarkan sesuai dengan alokasi anggaran dan penggunaannya disesuaikan dengan aturan yang berlaku dengan tetap mempedomani pencapaian kinerja daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.

## **BAB IV**

### **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Rancangan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 disusun mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan tahun 2021 dan proyeksi pencapaian kinerja tahun 2022 terhadap pencapaian RPJMD Kabupaten Solok Selatan. Sedangkan untuk masalah dan tantangan pembangunan merujuk pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi sebagaimana termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Selanjutnya Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, juga memperhatikan usulan-usulan Perangkat Daerah, masyarakat dan stake holder lainnya dengan memperhatikan:

1. Relevansi dan keterkaitan terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan Nasional, dan Provinsi Sumatera Barat .
2. Relevansi dan keterkaitan terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026.
3. Relevansi dan keterkaitan terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah.
4. Relevansi dan keterkaitan terhadap isu strategis daerah

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah**

##### **4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional**

Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah “mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing”. Terdapat 4 (empat) pilar untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, diantaranya sebagai berikut Pilar Pertama Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; Pilar Kedua Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;

Pilar Ketiga Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan Pilar Kempat Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Sejalan dengan sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020–2024, Visi dan Misi Presiden/Wakil Presiden pada RPJMN Tahun 2020–2024 adalah: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Untuk mencapai Visi tersebut, ditetapkan sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi (1). Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (2). Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; (3). Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; (4). Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; (5). Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; (6). Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; (7). Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; (8). Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; (9). Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Pelaksanaan RPJMN Tahun 2019-2024 diarahkan menjadi momentum awal atau peta jalan dari Visi menuju 100 Tahun Indonesia Merdeka pada tahun 2045 yaitu Indonesia Maju yang terdiri atas 4 pilar pembangunan (1). Pembangunan Manusia dan Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; (2). Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan; (3). Pemerataan Pembangunan; (4). Pemerataan ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan.

Sebagai strategi dalam melaksanakan misi tersebut dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan lima arahan utama, mencakup:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), yang fokus kepada membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur, dengan fokus kepada melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan Regulasi, dengan focus kepada menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.



4. Penyederhanaan Birokrasi, dengan fokus kepada memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi (jabatan struktural).
5. Transformasi Ekonomi, dengan focus kepada transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, yang disusun berlandaskan RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden terpilih, selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Menindaklanjuti hal tersebut dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2021 dan proyeksi kinerja pembangunan tahun 2022, kerangka ekonomi makro nasional serta sasaran RPJMD tahun 2020-2024 maka tema pembangunan RKP tahun 2023 adalah: **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, dengan sasaran pembangunan:

1. Mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas, dengan sasaran indikator dan target sebagai berikut:
  - Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3-5,9%
  - Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,3-6,0%
  - Ratio Gini sebesar 0,375-0,378
  - Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 27,02%
  - Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103-105

- Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 105-107
- 2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif, dengan sasaran indikator dan target sebagai berikut:
  - Indek Pembangunan Manusia sebesar 73,29-73,35
  - Tingkat Kemiskinan 7,0-8,0%

#### 4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Dengan mempertimbangkan potensi, capaian pembangunan daerah satu tahun sebelumnya, kondisi saat ini, permasalahan, isu strategis, tantangan dan peluang serta kondisi sosial budaya masyarakat Sumatera Barat dimaksud, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2023 mengacu kepada Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu: **“Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan”**

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2023 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan, memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan sebagai berikut:

1. **Misi 1:** Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing.

**Tujuan :** Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing

Sasaran :

- a. Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat
- b. Menurunnya prevalensi stunting
- c. Meningkatnya kualitas pendidikan
- d. Meningkatnya daya saing masyarakat

2. **Misi 2:** Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah

**Tujuan :** Mewujudkan ABS-SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat

Sasaran:

- a. Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS-SBK
  - b. Meningkatnya budaya *literasi* masyarakat
  - c. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3. **Misi 3:** Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

**Tujuan :** Meningkatkan pendapatan petani

Sasaran:

- a. Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)
  - b. Meningkatnya ketahanan dan
  - c. keamanan pangan
  - d. Meningkatnya pendapatan petani hutan
4. **Misi 4:** Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital .

**Tujuan :** Mewujudkan perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing

Sasaran:

- a. Sumatera barat sebagai pusat perdagangan
  - b. Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah
  - c. Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera
  - d. Terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sektor
  - e. Meningkatnya pertumbuhan investasi
  - f. Meningkatnya peran ekonomi digital
5. **Misi 5 :** Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan

**Tujuan:** Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif

Sasaran:

- a. Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat
  - b. Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat
6. **Misi 6 :** Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan

**Tujuan:** Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan rata

Sasaran:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegasi
  - b. Meningkatkan Kesiapsiagaan
  - c. Menghadapi Bencana
  - d. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas
  - e. Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian
  - f. Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan
7. **Misi 7:** Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

**Tujuan :** Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani

Sasaran:

- a. Terwujudnya kualitas tata Kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel
- b. Meningkatnya kapabilitas birokrasi
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Visi dan Misi pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 juga didukung dengan Program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Sumbar Sehat dan Cerdas, menitik beratkan kepada tujuan:
  - ❖ Meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan dalam pengujian, pelacakan, isolasi dan pengobatan untuk penanganan, pencegahan dan pengendalian COVID-19.
  - ❖ Menyediakan sanitasi layak di sekolah dan fasilitas umum lainnya serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung adaptasi kebiasaan baru,
  - ❖ Menjadikan stadion utama Sikabu sebagai pusat kegiatan olahraga dan pembinaan olahraga prestasi serta mendorong kebiasaan berolahraga sebagai adaptasi kebiasaan baru,
  - ❖ Tunjangan khusus sebesar 2,5 juta rupiah untuk Guru dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK/SLB di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal),
  - ❖ Menjamin siswa tidak mampu diterima di SMA/SMK Negeri minimal 20 Persen,

- ❖ Membangun SMA/SMK baru berdasarkan potensi daerah dan Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk pemerataan akses pendidikan,
- ❖ Seribu beasiswa kuliah di Perguruan Tinggi terbaik di dalam dan luar negeri,
- ❖ Memberikan dukungan bantuan hibah penelitian untuk mahasiswa dan dosen Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta untuk hilirisasi hasil-hasil penelitian sesuai dengan prioritas pembangunan

2. Sumbar Religius dan Berbudaya, menitik beratkan kepada tujuan:

- ❖ Menjadikan Kawasan Masjid Raya Sumatera Barat (Mesjid Raya, gedung LKAAM dan gedung MUI) sebagai pusat pembelajaran ABS SBK dan wisata religi.
- ❖ Dukungan peningkatan sarana dan prasarana serta bantuan operasional bagi kegiatan keagamaan, rumah ibadah , lembaga pendidikan agama.
- ❖ Menjadikan Gedung Kebudayaan, Museum, dan Perpustakaan Provinsi sebagai pusat pendidikan dan wisata IPTEKS (*education tourism*).
- ❖ Mengalokasikan anggaran untuk pembinaan kepada seniman dan budayawan.

3. Sumbar Sejahtera

- ❖ Meningkatkan pendapatan petani & nelayan serta mengalokasikan 10% anggaran pemerintah provinsi untuk sektor pertanian,
- ❖ Mewujudkan Sumatera Barat sebagai salah satu lumbung padi dan jagung serta mandiri beberapa komoditas ternak,
- ❖ Memperbaiki tata kelola BUMD dan mendirikan BUMD profesional di bidang pertanian,
- ❖ Mencetak 100 ribu *millennial entrepreneur* dan *women entrepreneur* serta pelaku ekonomi kreatif,
- ❖ Meningkatkan akses keuangan perbankan dan non perbankan bagi UMKM dan pengusaha pemula,
- ❖ Meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital,
- ❖ Membangun industri pariwisata melalui 1 destinasi wisata berkelas dunia dan 19 destinasi wisata unggulan,

- ❖ Membangun 3 pusat pertunjukan seni dan budaya bertaraf Internasional.
4. Sumbar Berkeadilan, menitik beratkan kepada tujuan:
- ❖ Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pertanian dan perikanan berupa irigasi, bendungan dan pelabuhan serta akses transportasi ke sentrasentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan.
  - ❖ Percepatan, pemerataan, konektivitas dan integrasi sistem infrastruktur transportasi (darat, laut, dan udara) untuk meningkatkan efisiensi pergerakan orang dan barang.
  - ❖ Mengembangkan kota dan kabupaten yang tangguh bencana berbasis masyarakat & komunitas.
  - ❖ Optimalisasi pengelolaan sampah yang berkelanjutan pada TPA Regional dengan pendekatan sampah sebagai sumber energy alternatif (waste to energy), dan tersedianya tempat pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3),
  - ❖ Meningkatkan inovasi dan digitalisasi pelayanan publik berbasis elektronik (*e-government*).

Sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD, dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2021 dan proyeksi kinerja pembangunan tahun 2022, kerangka ekonomi makro nasional dan daerah serta sasaran RPJMD Tahun 2021-2026, serta dukungan terhadap pencapaian Tema Pembangunan RKP Tahun 2023, maka Tema RKPD Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2023: **“Peningkatan Produktivitas Sektor Strategis Menuju Transformasi Ekonomi”**.

Peningkatan produktivitas melalui sektor strategis daerah ini diarahkan kepada sektor pertanian (lima sub sektor pertanian), industri pengolahan (Perdagangan, UMKM dan Industri Kecil Menengah), dan akomodasi makan-minum (pariwisata). Ketiga sektor strategis ini juga tergambar dalam program unggulan yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, dan sangat perlu dijaga peningkatan momentum produktivitasnya, sehingga diharapkan peningkatan produktivitas sektor strategis ini berbanding lurus dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor tersebut. Selain itu, pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2023 tetap tidak mengabaikan upaya pencegahan, pengendalian serta penanganan akibat pandemi covid-19 yang tidak akan bisa diprediksi kapan akan berakhir, serta dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib



dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanat pada Pasal 18 dan pasal 298 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Berdasarkan hal diatas maka sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1.**  
**Target Indikator Makro Pembangunan Sumatera Barat Tahun 2023**

Indikator Pembangunan	Target RPJMD	RKPD 2023
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,57	4,71
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	6,45	5,97
Tingkat Kemiskinan (%)	6,16	5,37
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,23	73,46
Indeks Gini (ratio)	0,293	0,296

Sumber Data : RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

**Tabel 4.2.**  
**Target Indikator Sasaran Pembangunan Sumatera Barat Tahun 2023**

No	INDIKATOR	TARGET 2023
<b>Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing</b>		
1	Indeks Pembangunan manusia (IPM)	73,23
2	Angka Harapan Hidup (AHH)	69,98
3	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	15,43
4	Rata-rata lama sekolah	9,28
5	Harapan Lama Sekolah	14,06
6	Persentase Angkatan kerja berpendidikan menengah keatas	49,75
<b>Misi 2 : Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah</b>		
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	60,90
2	Indeks Ketahanan Sosial Budaya (Dimensi IPK BPS)	62,80
3	Indeks Pembangunan Literasi masyarakat	14
4	Indeks Pembangunan keluarga	61,38
5	Indek Pembangunan Gender (IPG)	94,25
6	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	60,01
7	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	65,95
<b>Misi 3 : Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan</b>		
1	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani (%)	5
2	Nilai Tukar Petani (NTP)	101,19
3	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	103,98
4	Pendapatan pembudidaya ikan (Rp. Jt)	48.590
5	Pendapatan nelayan (Rp. Jt)	41.611
6	Pendapatan Peternak (Rp. Jt)	50.265
7	Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura (%)	5
8	Indeks Ketahanan Pangan	80,21
<b>Misi 4 : Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital</b>		
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	16,70
2	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	8,88

No	INDIKATOR	TARGET 2023
3	Laju pertumbuhan sektor perdagangan (%)	-1,00
4	Jumlah sentra industri kecil dan menengah (sentra)	379
5	Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi (%)	2,18
6	Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil	3,1
7	Jumlah enterpreneur baru tercipta (orang)	130.482
8	Persentase peningkatan Investasi di provinsi (%)	8,00
9	Kontribusi Ekonomi Digital (%)	6,70
<b>Misi 5 : Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan</b>		
1	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dari Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	13,89
2	Persentase Kontribusi Pariwisata pada PDRB (%)	1,24
3	Persentase Kontribusi Ekonomi Kreatif pada PDRB (%)	6,02
<b>Misi 6 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan</b>		
1	Indeks Kinerja Infrastruktur	0,731
2	Rasio Konektivitas (Rasio)	0,676
3	Kemantapan Jalan (%)	77,00
4	Indeks Ketahanan Daerah (Indeks)	0,63
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	77,95
6	Akses Air Minum (%)	84,00
7	Akses Sanitasi Layak (%)	84,00
8	Persentase Bangunan Strategis Terbangun (%)	55,55
9	Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%)	71,92
10	Persentase Volume tampungan sumber-sumber air (%)	55,28
11	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)	68,27
12	Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW (%)	87,00
<b>Misi 7 : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas</b>		
1	Indeks reformasi birokrasi	69,50
2	Nilai SAKIP (predikat)	BB (78,00)
3	Nilai EPPD (skor)	3,0020
4	Opini laporan keuangan (opini)	WTP
5	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	38,25
6	Indeks SPBE (indeks)	3,30
7	Indeks Profesionalitas ASN (indeks)	76,00
8	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (indeks)	86

Sumber Data : RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

#### 4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Solok Selatan

Penyusunan RKPD Tahun 2023 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan dokumen RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2023 harus mengacu Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati yang telah dituangkan dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 yaitu:

**“Mewujudkan Solok Selatan Maju Dan Sejahtera”**

Dalam Visi Kabupaten Solok Selatan terdapat 2 (dua) kata yang membentuk atau yang menjadi tujuan akhir dari tujuan pembangunan daerah tahun 2021-2026 Solok Selatan Maju dan Solok Selatan Sejahtera yaitu:

Penjelasan Visi:

- ❖ **Solok Selatan** : meliputi wilayah dan seluruh isinya, yakni Kabupaten Solok Selatan yang terdiri dari 7 Kecamatan, 47 Nagari serta 275 Jorong, serta seluruh warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat dan telah ditegaskan oleh beberapa peraturan perundang-undangan tentang penegasan batas wilayah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Solok dengan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.
- ❖ **Solok Selatan Maju**, memiliki arti menjadi lebih baik atau berkembang. Hal ini ditunjukkan dengan adanya progres untuk mencapai tingkat yang lebih baik dari sebelumnya, terutama dicirikan oleh semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik, ketersediaan infrastruktur daerah dan kawasan pertumbuhan.
- ❖ **Solok Selatan Sejahtera** memiliki arti: meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia, meningkatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya tingkat kemiskinan, menurunnya tingkat pengangguran, serta meningkatnya keamanan dan ketentraman masyarakat.

Visi tersebut diwujudkan dalam 5 (lima) Misi yang merupakan fokus dari kebijakan pembangunan untuk periode 2021-2026, yang terdiri atas:

**1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif**

Misi ini menitikberatkan kepada penciptaan peningkatan kualitas sumberdaya manusia masyarakat Kabupaten Solok Selatan yang berdaya saing dengan fokus utama adalah peningkatan kualitas

pendidikan masyarakat, derajat kesehatan masyarakat dan penyediaan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing dalam peningkatan produktifitas tenaga kerja.

Terdapat beberapa program prioritas daerah yang merupakan program unggulan Bupati/Wakil Bupati dalam pencapaian misi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkarakter, Produktif dan Kompetitif berkaitan dengan 3 (tiga) bidang pembangunan yaitu:

1) Bidang Pendidikan

- ❖ Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik TK, SD dan SLTP
- ❖ Beasiswa unggulan daerah untuk perguruan tinggi didalam dan luar negeri
- ❖ Bantuan pengembangan Madrasah, SMA, SMK dan perguruan tinggi
- ❖ Pembangunan satu rumah tahfiz Quran per Jorong
- ❖ Peningkatan kualitas pendidikan non formal

2) Bidang Kesehatan

- ❖ Peningkatan kepemilikan jaminan kesehatan (*total coverage*)
- ❖ Pemberdayaan kader kesehatan melalui posyandu
- ❖ Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan

3) Bidang Ketenagakerjaan

- ❖ Penciptaan Wirausahawan Baru

## **2. Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah**

Misi ini menitikberatkan kepada pengembangan ekonomi kerakyatan untuk dijadikan penopang utama perekonomian daerah serta peningkatan daya saing produk-produk daerah dalam upaya peciptaan kemandirian dan swasembada daerah dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif dan kompetitif daerah. Pengembangan ekonomi diprioritaskan kepada pengembangan UMKM, peningkatan nilai tambah produk-produk pertanian dalam menunjang sektor pariwisata.

Terdapat beberapa program prioritas daerah yang merupakan program unggulan Bupati/Wakil Bupati dalam pencapaian misi Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Daerah, berkaitan dengan bidang ekonomi yaitu:

- ❖ Peningkatan pemanfaatan inovasi teknologi hasil komoditi pertanian untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan

- ❖ Penguatan ekonomi petani melalui program satu sapi satu keluarga
- ❖ Penguatan tata niaga dan informasi pasar
- ❖ Penciptaan wirausahawan baru dan peningkatan daya saing UMKM yang terintegrasi dengan pengembangan destinasi pariwisata.
- ❖ Pengembangan destinasi wisata unggulan yang berbasis agrowisata, ekowisata dan budaya di setiap nagari
- ❖ Pengelolaan perhutanan sosial dan penurunan status kawasan hutan untuk peningkatan ekonomi

### **3. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani**

Misi ini menitikberatkan pada peningkatan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa-jasa layanan publik pemerintah, meningkatkan akses masyarakat ke sumber-sumber informasi yang dimiliki pemerintah, menangani keluhan masyarakat dan juga persamaan kualitas layanan yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Terdapat beberapa program prioritas daerah yang merupakan program unggulan Bupati/Wakil Bupati dalam pencapaian misi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani, berkaitan dengan bidang pemerintahan yaitu:

- ❖ Peningkatan manajemen pemerintah dalam pembangunan daerah
- ❖ Peningkatan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi dengan peningkatan kompetensi aparatur pelayanan publik yang terpercaya, cepat, tepat dan tanggap serta didukung oleh peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik
- ❖ Peningkatan kompetensi aparatur pelayanan publik
- ❖ Perkuatan peran pemerintah kecamatan dan percepatan kemandirian nagari dalam pembangunan daerah
- ❖ Penyediaan kendaraan operasional jorong

### **4. Pembangunan infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana**

Misi ini menitikberatkan pada penyediaan dan pemerataan ketersediaan infrastruktur daerah dan pusat-pusat pertumbuhan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga tercipta penataan ruang daerah yang terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan

daya tampung dan daya dukung lingkungan. Selain itu dalam pelaksanaan pembangunan daerah harus mempertimbangkan aspek pelestarian lingkungan hidup serta mengurangi dampak resiko bencana (mitigasi bencana).

Terdapat beberapa program prioritas daerah yang merupakan program unggulan Bupati/Wakil Bupati dalam pencapaian misi daerah Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pertumbuhan, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana, berkaitan dengan bidang infrastruktur dan lingkungan hidup yaitu:

- ❖ Percepatan pembangunan kawasan ibu kota dan kawasan pertumbuhan yang didukung oleh peningkatan akses perhubungan dan telekomunikasi
- ❖ Peningkatan jalan strategis antar nagari dan kecamatan
- ❖ Pengadaan satu unit ekskavator satu kecamatan
- ❖ Peningkatan kualitas kawasan perumahan (bedah rumah, air bersih, sanitasi dan persampahan)
- ❖ Pelestarian lingkungan hidup dan penguatan mitigasi bencana alam dan sosial

#### **5. Pelestarian seni, budaya, olahraga dan penanganan permasalahan sosial dan pemberdayaan masyarakat**

Misi ini menitikberatkan pada beberapa hal yaitu:

- a) Pelestarian seni dan budaya daerah terutama dalam mendukung prioritas pariwisata daerah untuk itu kawasan cagar budaya, koleksi-koleksi budaya dan kepurbakalaan yang amat berharga, serta kesenian terus dilestarikan dengan tujuan diwariskan kepada generasi berikutnya. Selain itu peningkatan peran dan fungsi kelembagaan lembaga adat kebudayaan dalam kehidupan masyarakat
- b) Membudayakan olahraga bagi masyarakat. Selain untuk peningkatan prestasi olahraga titik berat dari misi ini adalah membudayakan olah raga dalam masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan persepsi bahwa olah raga hanya ditujukan untuk peningkatan prestasi, tetapi tujuan utamanya adalah peningkatan derajat kesehatan masyarakat
- c) Penanganan permasalahan sosial menitikberatkan pada penanganan masyarakat untuk keluar dari permasalahan yang dihadapinya. Penanganan permasalahan sosial tidak lagi hanya dipandang sekedar memberikan bantuan sosial saja, akan tetapi



lebih memberdayakan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) agar dapat hidup layak dan setara dengan masyarakat lainnya.

- d) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah menitikberatkan pada peningkatan peran nagari, masyarakat (termasuk perantau) dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan. Dalam hal ini masyarakat tidak hanya dianggap objek dari pembangunan saja tetapi juga dijadikan subjek dalam pembangunan. Hal ini akan mendorong bahwa dalam pelaksanaan pembangunan daerah tidak hanya bertumpu dengan pendanaan yang berasal dari APBD saja, akan tetapi dengan pemanfaatan seluruh potensi yang ada. Pemanfaatan potensi ini dioptimalkan selain melalui peningkatan sinkronisasi perencanaan antara pusat, provinsi, kabupaten dan nagari juga memanfaatkan keterlibatan masyarakat, perantau serta dunia usaha.

Terdapat beberapa program prioritas daerah yang merupakan program unggulan Bupati/Wakil Bupati dalam pencapaian misi daerah Pelestarian Seni, Budaya, Olahraga dan Penanganan Permasalahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, berkaitan dengan beberapa bidang yaitu

- 1) Bidang Pendidikan dan Olahraga:
  - ❖ Penguatan mata pelajaran muatan lokal pada kurikulum SD dan SMP
  - ❖ Pelaksanaan event-event olah raga
  - ❖ Penyediaan sarana dan prasarana olahraga di setiap Nagari
- 2) Bidang Kebudayaan
  - ❖ Pelestarian cagar budaya daerah
  - ❖ Pelaksanaan event-event seni dan budaya
  - ❖ Peningkatan fasilitasi operasional KAN
- 3) Bidang Sosial
  - ❖ Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
  - ❖ Pemberdayaan zakat dalam pengentasan kemiskinan
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
  - ❖ Peningkatan peran perantau dalam pembangunan nagari
  - ❖ Peningkatan peran CSR dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

Selanjutnya Visi dan Misi tersebut diwujudkan dan bentuk tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2021-2026 yaitu:

**Tabel 4.3.**  
**Tujuan dan Sasaran Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023-2024**

Misi/Tujuan Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja	
			2023	2024
<b>Misi 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkarakter, Produktif dan Kompetitif</b>				
<b>Tujuan 1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berkarakter, Produktif dan Kompetitif</b>	<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>	<b>Indeks</b>	<b>70,37</b>	<b>70,92</b>
<b>Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat</b>	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,57	8,66
	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,20	13,31
	Persentase Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar (7 - 15) Hafiz Qur'an			
	a). 1 Juz	Persen	5,00	5,83
	b). 2 Juz	Persen	0,56	0,62
<b>Sasaran 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat</b>	Angka Harapan Hidup	Tahun	68,41	68,61
	Prevalensi Stunting	Persen	13,4	13,3
<b>Sasaran 3 : Meningkatkan Produktifitas Tenaga Kerja</b>	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	Rp. Juta /Tahun	73,20	77,20
<b>Misi 2. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Daerah</b>				
<b>Tujuan 1 : Meningkatkan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat</b>	<b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b>	<b>Persen</b>	<b>5,26</b>	<b>5,17</b>
	<b>Persentase Penduduk Miskin</b>	<b>Persen</b>	<b>7,07</b>	<b>6,94</b>
	<b>Indeks Gini Ratio</b>	<b>Indeks</b>	<b>0,291</b>	<b>0,286</b>
<b>Sasaran 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah</b>	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,07	4,41
<b>Misi 3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani</b>				
<b>Tujuan 1 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan baik, bersih dan melayani</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>Indeks</b>	<b>72,00</b>	<b>76,00</b>
<b>Sasaran 1 : Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih</b>	Indeks SPBE	Indeks	2,34	2,54
	Nilai/Predikat SAKIP	Indeks	70 B	80 BB
	Opini BPK terhadap LKPD	Opini	WTP	WTP
	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai	3,08	3,10
<b>Sasaran 2 : Terciptanya tata kelola pemerintahan yang melayani</b>	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,9	4,3
<b>Misi 4. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pertumbuhan, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana</b>				
<b>Tujuan 1 : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Daerah dalam Mendukung Kawasan Pertumbuhan</b>	<b>Indeks Infrastruktur Wilayah</b>	<b>Indeks</b>	<b>44</b>	<b>46</b>
<b>Sasaran 1 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar masyarakat dan kewilayahan</b>	Indeks Ketersediaan Infrastruktur Dasar	Indeks	74,30	76,28
	Indeks Kesulitan Geografis (IKG) /Rata-Rata Kab	Indeks	25,1	23,4
	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,36	0,38
<b>Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup</b>	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	79,75	79,76
<b>Misi 5. Pelestarian Seni, Budaya, Olahraga dan Penanganan Permasalahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat</b>				
<b>Tujuan 1 : Meningkatnya</b>	<b>Pertumbuhan jumlah lembaga</b>	<b>Persen</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

Misi/Tujuan Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja	
			2023	2024
<b>aktualisasi nilai seni, budaya, olahraga dan kearifan lokal dalam interaksi kehidupan masyarakat</b>	<b>kesenian</b>			
	<b>Pertumbuhan jumlah klub / perkumpulan olahraga</b>	<b>Persen</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Sasaran 1</b> : Meningkatkan peran lembaga adat ,seni dan budaya dalam interaksi sosial masyarakat	Persentase lembaga Adat yang aktif (KAN, LKAAM dan Bundo Kanduang)	persen	68,42	78,95
	Persentase lembaga Seni dan Budaya yang aktif	persen	48,39	53,76
<b>Sasaran 2</b> : Meningkatkan Budaya Berolahraga masyarakat	Persentase klub / perkumpulan olahraga aktif	persen	100	100
<b>Tujuan 2 : Peningkatan pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)</b>	<b>Persentase PPKS yang Ditangani</b>	<b>Persen</b>	<b>76,00</b>	<b>79,00</b>
<b>Sasaran 1</b> : Meningkatkan pelayanan terhadap PPKS	Persentase PPKS yang Ditangani	Persen	76,00	79,00
<b>Tujuan 3 : Meningkatkan peran Nagari, masyarakat dan Swasta dalam pembangunan</b>	<b>Indeks Desa Membangun Persentase</b>	<b>Indeks</b>	<b>0,8125</b>	<b>0,8345</b>
	<b>Indeks Pembangunan Gender</b>	<b>Indeks</b>	<b>97,15</b>	<b>97,70</b>
	<b>Persentase Perusahaan yang memenuhi kewajibannya dalam bentuk CSR</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Sasaran 1.</b> Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan nagari dan daerah	Persentase Nagari Mandiri	Persen	29,78	36,17
<b>Sasaran 2.</b> Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	97,15	97,70
<b>Sasaran 3.</b> Peningkatan Partisipasi swasta dan perusahaan dalam pembangunan	Persentase pemanfaatan CSR yang mendukung program pemerintah daerah	Persen	100,00	100,00

Sumber: RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026

## 4.2. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah

### 4.2.1. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023.

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2023, maka ditetapkan 8 (delapan) arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2023 yaitu:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan strategi utama pencapaian dilakukan melalui:
  - 1). Penguatan sistem jaminan sosial;
  - 2). Percepatan modernisasi pertanian;
  - 3). Peningkatan pemerataan pembangunan, dengan sasaran pencapaiannya adalah sebagai berikut:
    - a. Penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar 1,5-2,0%;
    - b. Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial sebesar 91%;
    - c. Nilai Tukar Petani sebesar 103-105; dan
    - d. Nilai Tukar Nelayan sebesar 105-107.

2. Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan, dengan strategi utama pencapaian dilakukan melalui: 1). Penguatan sistem kesehatan nasional; 2). Peningkatan kualitas pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter), dengan sasaran pencapaiannya adalah sebagai berikut:
  - a. Prevelansi stunting (penduk dan sangat pendek) pada balita sebesar 17,5%;
  - b. Insidensi TB 211 per 100.000 penduduk;
  - c. Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar sebesar 71%;
  - d. Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 43%;
  - e. Persentase sumber daya manusia (SDM) ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3 sebesar 17,48%;
  - f. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 9,24 tahun; dan
  - g. Angka partisipasi kasar Perguruan Tinggi (PT) sebesar 31,89%.
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, dengan strategi utama pencapaian dilakukan melalui: Perluasan penyediaan lapangan usaha, dengan sasaran pencapaiannya adalah sebagai berikut:
  - a. Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 43%;
  - b. Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas sebesar 48%;
  - c. Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional sebanyak 50.000 orang; dan
  - d. Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan sebesar 60,71%.
4. Mendorong pemulihan dunia usaha, dengan strategi utama pencapaian dilakukan melalui: 1). Percepatan revitalisasi pariwisata; 2). Memperkuat peran UMKM dalam perekonomian nasional, dengan sasaran pencapaiannya adalah sebagai berikut:
  - a. Pertumbuhan wirausaha sebesar 3,50%;
  - b. Pertumbuhan PDB pertanian sebesar 3,9-4,2%;
  - c. Nilai devisa pariwisata sebesar US\$ 1,76-6,06 Miliar;

- d. Kontribusi PDB pariwisata sebesar 4,3%; dan
  - e. Nilai tambah ekonomi kreatif sebesar Rp. 1.279 triliun.
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, dengan strategi utama pencapaian dilakukan melalui: 1). Percepatan revitalisasi dan hilirisasi industri; 2). Penguatan pemamfaatan riset dan inovasi dalam pembangunan, dengan sasaran pencapaiannya adalah sebagai berikut:
- a. Pertumbuhan industri pengolahan sebesar 5,4-5,9%;
  - b. Kontribusi PDB industri pengolahan 20,6%;
  - c. Produk inovasi dan produk prioritas riset nasional yang dihasilkan sebesar 10;
  - d. Peringkat Global Innovation Index 75-80;
  - e. Pertumbuhan PDB industri pengelolaan nonmigas sebesar 5,55-6,6,08%; dan
  - f. Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas sebesar 18,80%.
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respons terhadap perubahan iklim), dengan strategi utama pencapaian dilakukan melalui: 1). Mendorong aktivitas ekonomi rendah karbon; 2). Percepatan transisi energi, dengan sasaran pencapaiannya adalah sebagai berikut:
- a. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%;
  - b. Kapasitas terpasang pembangkit EBT-kumulatif sebesar 1.778,2 GW;
  - c. Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan sebesar 61 perusahaan; dan
  - d. Efisiensi perusahaan yang menerapkan industri hijau sebesar 6%.
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi, dengan strategi utama pencapaian dilakukan melalui: 1). Peningkatan penyediaan air bersih dan sanitasi; 2). Percepatan pemerataan infrastruktur digital; 3). Percepatan pemerataan infrastruktur konektivitas, dengan sasaran pencapaiannya adalah sebagai berikut:
- a. Volume tampungan air per kapita sebesar 54,50 m<sup>3</sup>/detik;
  - b. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (82,07 layak, termasuk 11,5 aman);

- c. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak sebesar 97,5%;
  - d. Masyarakat pengguna internet sebesar 80,7%; dan
  - e. Kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik kumulatif sebesar 50%.
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara, dengan strategi utama pencapaian dilakukan melalui percepatan penyediaan fasilitas dasar di IKN, dengan sasaran pencapaiannya adalah sebagai berikut:
- a. Inisiasi pembangunan KIPP-IKN tahap 1A; dan
  - b. Luas area pembangunan Ibu Kota Negara seluas 5.600 Ha.

Dalam pelaksanaan arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 maka ditetapkan 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional yang merupakan agenda prioritas pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan menjadi koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan untuk tahun 2023 yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, dengan agenda utama yaitu:
  - 1) Meningkatkan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
  - 2) Meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian

Agenda pembangunan ini diturunkan kedalam program prioritas yaitu:

- a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT).
  - b. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
  - c. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan.
  - d. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan.
  - e. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi.
  - f. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi.
  - g. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).
  - h. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, dengan agenda utama utama yaitu:



- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI)
- 2) Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI)

Agenda pembangunan ini diturunkan kedalam program prioritas yaitu:

- a. pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
  - b. distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
  - c. peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
  - d. memperkuat kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
  - e. meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, dengan agenda utama yaitu:
- 1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan
  - 2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk
  - 3) Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan
  - 4) Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda
  - 5) Meningkatnya asset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan miskin
  - 6) Meningkatnya produktifitas dan daya saing

Agenda pembangunan ini diturunkan kedalam program prioritas yaitu:

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
  - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial
  - c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
  - d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
  - e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
  - f. Pengentasan kemiskinan; dan
  - g. Peningkatan produktivitas dan daya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dengan agenda utama yaitu:
- 1) Menguatnya revolusi mental dalam sistem pendidikan
  - 2) Menguatnya revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan
  - 3) Menguatnya revolusi mental dalam sistem sosial

Agenda pembangunan ini diturunkan kedalam program prioritas yaitu:

- a. Revolusi mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter
  - b. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia
  - c. Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial
  - d. Peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, dan berkarakter
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, dengan agenda utama yaitu:
- 1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah
  - 2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
  - 3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
  - 4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
  - 5) Mempermudah perizinan pembangunan infrastruktur

Agenda pembangunan ini diturunkan kedalam program prioritas yaitu:

- a. Peningkatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar
  - b. Peningkatan penyediaan infrastruktur ekonomi
  - c. Peningkatan penyediaan infrastruktur perkotaan
  - d. Peningkatan penyediaan energi dan ketenagalistrikan
  - e. Percepatan transformasi digital
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, dengan agenda utama yaitu:
- 1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
  - 2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim
  - 3) Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap base line

Agenda pembangunan ini diturunkan kedalam program prioritas yaitu:

- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
- b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim
- c. Pembangunan rendah karbon

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dengan agenda utama yaitu:

- 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas
- 2) Meningkatkan hak politik dan kebebasan sipil
- 3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber
- 4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi
- 5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri

Agenda pembangunan ini diturunkan kedalam program prioritas yaitu:

- a. Meningkatkan konsolidasi demokrasi
- b. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
- c. Reformasi birokrasi dan tata kelola
- d. Menjaga stabilitas keamanan nasional

#### **4.2.2. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Sumatera Barat Tahun 2023.**

Arah kebijakan pembangunan tahun 2023 disesuaikan dengan Visi dan Misi RPJMD 2021- 2026 yang tetap difokuskan kepada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai hasil akhir pelaksanaan Visi RPJMD 2021-2026, namun demikian arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 juga adaptif dan responsif terhadap dampak pandemi Covid- 19 sekaligus juga mendukung pencapaian Tema RKP dalam rangka Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, yang juga menjadi penekanan dalam penentuan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2022. Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023 akan difokuskan pada peningkatan produktivitas melalui sektor strategis daerah, yakni kepada sektor pertanian (lima sub sektor pertanian), industri pengolahan (Perdagangan, UMKM dan Industri Kecil Menengah), dan akomodasi makan-minum (pariwisata). Ketiga sektor strategis ini juga tergambar dalam program unggulan yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, dan sangat perlu dijaga peningkatan momentum produktivitasnya.

**Tabel 4.4.**  
**Prioritas Dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2023**

NO	MISI/PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efektifitas dan efisiensi pemanfaatan alokasi anggaran Pendidikan dan kesehatan</li> <li>2. Pemenuhan terhadap pencapaian Imunisasi Dasar dengan melakukan kampanye dan edukasi kepada keluarga kelompok sasaran</li> <li>3. Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) kepada seluruh masyarakat pada semua kelompok umur</li> <li>4. Meningkatkan akses dan pemerataan Pendidikan dengan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) serta pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/SMK/SLB</li> <li>5. Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Sosial</li> <li>6. Percepatan penurunan prevalensi stunting melalui pelaksanaan Aksi Konvergensi dengan pelibatan semua pihak secara intensif dan berkelanjutan serta peningkatan komitmen Pemerintah daerah, desa dan nagari.</li> <li>7. Fokus pada intervensi gizi spesifik yang ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas yakni Ibu hamil dan Ibu menyusui dan anak 0 – 23 bulan serta Intervensi gizi sensitif yang ditujukan pada sasaran penting yakni Remaja putri dan wanita usia subur, dan Anak berusia 24-59 guna pencegahan balita stunting</li> <li>8. Melakukan Intervensi gizi sensitif yang ditujukan pada kelompok umum yakni keluarga dan masyarakat umum dalam penanganan stunting.</li> <li>9. Meningkatkan kualitas dan keterampilan Angkatan Kerja terutama berpendidikan menengah keatas</li> <li>10. Meningkatkan hasil penelitian yang berorientasi pada kebijakan strategis daerah</li> </ol>
2	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Trantibumlinmas (Sub bidang Trantib dan Damkar)</li> <li>2. Meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan objek Pemajuan Kebudayaan</li> <li>3. Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah serta pelibatan aktif peran serta masyarakat dalam pelestarian objek Pemajuan Kebudayaan dan cagar Budaya</li> <li>4. Meningkatkan ketahanan keluarga secara optimal melalui program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana dengan melibatkan seluruh pihak, baik pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.</li> <li>5. Menjadikan Kawasan Masjid Raya Sumatera Barat sebagai pusat pembelajaran ABS SBK dengan meningkatkan aktifitas keagamaan dan kebudayaan</li> </ol>

NO	MISI/PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Menjadikan perpustakaan daerah menjadi pusat kegiatan literasi masyarakat</li> <li>7. Penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan serta kerukunan antar umat beragama</li> <li>8. Meningkatkan ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</li> <li>9. Memperkuat perencanaan dan penganggaran responsive gender dan perlindungan dan pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas sebagai bagian dari Pengarusutamaan Pembangunan Untuk Semua</li> </ol>
3	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alokasi anggaran sektor pertanian sebesar 10% dari APBD</li> <li>2. Menyiapkan benih/bibit bermutu (pertanian, kelautan perikanan dan peternakan)</li> <li>3. Meningkatkan pengawasan agroinput dan atau sumber daya kelautan, perikanan dan hutan</li> <li>4. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian, peternakan dan kelautan dan perikanan</li> <li>5. Peningkatan upaya minimalisasi resiko kerugian usaha tani terutama kegagalan panen atau produksi baik oleh hama penyakit dan bencana alam</li> <li>6. Meningkatkan efisiensi usaha pasca panen pengolahan hasil dan peningkatan mutu dan nilai tambah produksi pertanian, peternakan kelautan dan perikanan serta kehutanan</li> <li>7. Diversifikasi pangan dan usaha produktif yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi</li> <li>8. Meningkatkan kelancaran akses distribusi pangan dan aksesibilitas produksi pangan</li> <li>9. Optimalisasi penanganan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk mendukung pertanian</li> <li>10. Mempertahankan produksi padi sebagai lumbung nasional</li> <li>11. Meningkatkan produksi jagung, ternak unggas dan kambing</li> </ol>
4	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjaga tingkat inflasi tetap pada batas wajar</li> <li>2. Penciptaan iklim investasi dan kemudahan berinvestasi yang diberikan oleh pemerintah untuk pelaku usaha PMA dan dan PMDN dalam mendapatkan perizinan dan non perizinan.</li> <li>3. Fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi pelaku usaha PMA dan PMDN dengan tujuan agar permasalahan yang dihadapi pelaku usaha PMA dan PMDN dapat diselesaikan dan perusahaan dapat merealisasikan investasinya</li> <li>4. Pemberian insentif-insentif dari pemerintah kepada pelaku usaha untuk menumbuhkan minat investasi baru seperti kemudahan pajak/pembebasan pajak.</li> <li>5. Tersedianya data yang akurat terkait dengan</li> </ol>

NO	MISI/PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
		<p>potensi investasi, proses perizinan dan kemudahan berusaha.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Memperbaiki tata kelola BUMD dan mendirikan BUMD profesional di bidang pertanian</li> <li>7. Mencetak 100 ribu <i>millennial entrepreneur</i> dan <i>women entrepreneur</i> serta pelaku ekonomi kreatif</li> <li>8. Meningkatkan akses keuangan perbankan dan nonperbankan bagi UMKM dan pengusaha pemula</li> <li>9. Mendorong Koperasi untuk konversi ke koperasi syariah</li> <li>10. Meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital</li> </ol>
5	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun industri pariwisata melalui 1 destinasi wisata berkelas dunia dan 19 destinasi wisata unggulan</li> <li>2. Membangun 3 pusat pertunjukan seni dan budaya bertaraf Internasional</li> <li>3. Meningkatkan fasilitas dan sarana prasarana pada destinasi wisata terutama air bersih dan sanitasi</li> <li>4. Meningkatkan atraksi seni dan budaya serta membangun suasana festival yang meriah pada pusat keramaian dan obyek wisata unggulan</li> <li>5. Meningkatkan kunjungan wisatawan terutama wisatawan domestik</li> <li>6. Penguatan <i>Brand Image</i> Pariwisata di Sumatera Barat</li> <li>7. Memperjelas segmentasi Wisatawan pada masing-masing daerah</li> <li>8. Melakukan Strategi promosi efektif yang terpadu melalui public campaign dan promosi besar-besaran untuk membangun awareness masyarakat.</li> <li>9. Mendorong semua pelaku usaha pariwisata Sumbar (terutama obyek wisata unggulan) agar segera memenuhi sertifikasi CHSE, sertifikasi Halal serta sertifikasi/ standar internasional lainnya</li> </ol>
6	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Pekerjaan Umum serta Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>2. Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Trantimbumlinmas (Sub bidang kebencanaan)</li> <li>3. Meningkatkan konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan barang pada Kawasan sentra pertanian, industry dan pariwisata</li> <li>4. Membangun jalan Provinsi baru menuju kawasan sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan</li> <li>5. Membangun jalan Provinsi baru pada daerah</li> </ol>



NO	MISI/PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
		<p>yang belum berkembang, terisolir dan perbatasan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Menurunkan biaya produksi dan pemasaran komoditas pertanian dan industry melalui efisiensi biaya logistic</li> <li>7. Mendukung akses pada destinasi wisata guna peningkatan daya saing Kawasan wisata</li> <li>8. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah menghadapi bencana</li> <li>9. Meningkatkan indeks ketahanan daerah</li> <li>10. Meningkatkan indeks kinerja sistem irigasi pendukung sector pertanian guna meningkatkan produksi pertanian</li> <li>11. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi</li> <li>12. Mengurangi luasan Kawasan kumuh</li> <li>13. Mengoptimalkan pengurangan dan penanganan sampah melalui pengelolaan sampah terpadu</li> <li>14. Pemenuhan terhadap infrastruktur pelayanan dasar</li> <li>15. Rehabilitasi dan Rekonstruksi dampak bencana akibat gempa bumi Pasaman dan Pasaman Barat</li> </ol>
7	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas ASN dalam menunjang tugas dan fungsi perangkat daerah melalui peningkatan kompetensi ASN dan stakeholder melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.</li> <li>2. Meningkatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan Kelas Jabatan dengan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya</li> <li>3. Mengoptimalkan penerapan 8 Area Perubahan Reformasi Birokasi</li> <li>4. Meningkatkan kinerja Indeks SPBE dengan menyusun dan menetapkan kebijakan yang mengatur tentang Kebijakan Internal Manajemen Data, Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi, Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkup Pemerinta Provinsi Sumatera Barat</li> <li>5. Melakukan sosialisasi dan komunikasi serta advokasi dengan Perangkat Daerah dalam memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).</li> <li>6. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat</li> <li>7. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial</li> <li>8. Meningkatkan Optimalisasi penggunaan dan pengamanan aset daerah</li> <li>9. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan</li> </ol>

NO	MISI/PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
		daerah 10. Optimalisasi penerimaan pajak daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD Yang Sah 11. Implementasi Inovasi dan digitalisasi pada Unit kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi Sumatera Barat. 12. Dukungan terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024

#### 4.2.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD, penentuan tema dan prioritas pembangunan pada tahun 2023 mempertimbangkan beberapa kebijakan sebagai berikut

1. Kebijakan penanganan dan dampak Covid 19 dimana sampai awal tahun 2022 dampak dari pandemic Covid-19 masih mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, nasional, provinsi Sumatera Barat termasuk Kabupaten Solok Selatan sampai awal tahun 2022.
2. Sinkronisasi tujuan, sasaran, prioritas dana arah kebijakan pembangunan dengan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat.
3. Penunjukan Kabupaten Solok Selatan menjadi tuan rumah MTQ Tingkat Sumatera Barat tahun 2023.
4. Pelaksanaan Pilpres, Pileg dan Pilkada tahun 2024 dimana tahapannya sudah dimulai pada akhir tahun 2023.
5. Kondisi pencapaian kinerja daerah tahun 2021 dan perkiraan pencapaian target tahun 2022 terhadap target kinerja tahunan dan akhir RPJMD.

Berdasarkan pertimbangan diatas maka tema pembangunan yang akan menjadi dasar penetapan prioritas dan arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 adalah: **“Pengembangan SDM, Inovasi Pengelolaan SDA dan Pengembangan Kawasan Pertumbuhan”**.

Berdasarkan tema diatas maka prioritas pembangunan daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.

Sasaran kinerja:

- 1) Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat
- 2) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
- 3) Meningkatnya Produktifitas Tenaga Kerja

- 4) Meningkatnya peran lembaga adat ,seni dan budaya dalam interaksi sosial masyarakat
- 5) Meningkatnya Budaya Berolahraga masyarakat
- 6) Meningkatnya pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- 7) Meningkatnya kesetaraan Gender dalam pembangunan

Untuk mendukung prioritas pembangunan dan mencapai sasaran kinerja pembangunan diatas maka arah kebijakan pembangunan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kompetensi guru, kepala sekolah dan pengawas melalui pemanfaatan teknologi
- 2) Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan
- 3) Pengembangan rumah tahfiz berbasis sekolah, masyarakat
- 4) Meningkatkan kualitas pendidikan kesetaraan dan kecakapan hidup (keterampilan)
- 5) Pengembangan budaya literasi dan kelompok literasi penduduk usia sekolah.
- 6) Peningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas
- 7) Integrasi muatan lokal dalam kurikulum sekolah
- 8) Penguatan kemitraan strategis antara dunia Pendidikan dengan masyarakat dan dunia usaha
- 9) Meningkatkan standarisasi sarana dan prasarana kesehatan serta kompetensi tenaga kesehatan
- 10) Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan akses layanan kesehatan
- 11) Meningkatkan pelayanan gizi dan kesehatan bagi wanita produktif, ibu hamil, ibu menyusui dan balita
- 12) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat dengan memperhatikan sasaran promosi kesehatan serta mengembangkan upaya kesehatan berbasis masyarakat.
- 13) Mengoptimalkan preventif, promotif, pencegahan dan pengendalian penyakit menular bagi masyarakat
- 14) Meningkatkan ketersediaan pangan yang berkualitas.
- 15) Menggali dan melestarikan potensi budaya dan kearifan lokal sebagai dasar untuk memperkuat karakter bangsa
- 16) Mendorong pengembangan klub kesenian lokal

- 17) Membudayakan dan mengembangkan olah raga berbasis masyarakat dan rekreasi
  - 18) Meningkatkan pembinaan olahraga prestasi berdasarkan cabang unggulan dan potensi daerah
  - 19) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana olahraga
  - 20) Mengurangi beban hidup masyarakat miskin dan hampir miskin dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
  - 21) Mewujudkan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
  - 22) Mengupayakan pendanaan untuk panti melalui sektor swasta secara berkelanjutan
  - 23) Peningkatan responsif gender dalam pembangunan
2. Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta pengembangan ekonomi kreatif.

Sasaran kinerja:

- 1) Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah
- 2) Peningkatan partisipasi swasta dan perusahaan dalam pembangunan

Untuk mendukung prioritas pembangunan dan mencapai sasaran kinerja pembangunan diatas maka arah kebijakan pembangunan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kompetensi dan keahlian tenaga kerja untuk menumbuhkan wirausahawan baru
- 2) Meningkatkan jaminan serta perlindungan hak-hak tenaga kerja
- 3) Menjaga iklim investasi yang baik dan kenyamanan berusaha
- 4) Meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian melalui ekstensifikasi dan intensifikasi
- 5) Meningkatkan kompetensi penyuluh dan optimalisasi pemberdayaan
- 6) Meningkatkan kualitas bibit dari penangkar lokal sesuai komoditi unggulan
- 7) Menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi
- 8) Meningkatkan kualitas produk UMKM melalui fasilitasi permodalan dan peningkatan SDM pelaku UMKM
- 9) Meningkatkan pemanfaatan produk lokal melalui system PBJ dan keg pemerintahan
- 10) Meningkatkan implementasi program integrasi ternak dan pertanian
- 11) Melakukan kualitas dan kapasitas pelaku UMKM melalui kerja sama dengan platform digital (e-Comerce)

- 12) Meningkatkan fasilitasi kerjasama antara pelaku UMKM dengan perusahaan besar
- 13) Mengembangkan ekonomi kreatif
- 14) kualitas sarana dan prasarana objek wisata
- 15) Meningkatkan fasilitasi dan pemberdayaan pemanfaatan perhutanan sosial

3. Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana.

Sasaran kinerja:

- 1) Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar masyarakat dan kewilayahan
- 2) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Untuk mendukung prioritas pembangunan dan mencapai sasaran kinerja pembangunan diatas maka arah kebijakan pembangunan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kawasan pusat pemerintahan, perekonomian dan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan Ibu Kota Padang Aro dan Muara Labuh
2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur jaringan transportasi antar Kecamatan dan nagari dan pusat pertumbuhan
3. Meningkatkan kualitas layanan air bersih PDAM
4. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi layak
5. Meningkatkan akses terhadap hunian layak dan menurunkan jumlah Rumah Tidak Layak Huni
6. Penguatan mitigasi bencana dalam pengurangan resiko bencana (alam, sosial dan kesehatan) dan penanganan pasca bencana
7. Peningkatan peran serta masyarakat mulai dari mitigasi, penanganan dan penanggulangan bencana
8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan sasaran utama pada peningkatan kualitas Air
9. Menerapkan pembangunan berbasis pola ruang dan ramah lingkungan
10. Peningkatan cakupan layanan persampahan dan pengurangan sampah yang memenuhi prinsip 3R (reuse, reduce, dan recycle) melalui pemberdayaan masyarakat.

4. Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.

Sasaran kinerja:

- 1) Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
- 2) Terciptanya tata kelola pemerintahan yang melayani

- 3) Peningkatan peran Pemerintah Nagari dan Masyarakat dalam pembangunan daerah

Untuk mendukung prioritas pembangunan dan mencapai sasaran kinerja pembangunan diatas maka arah kebijakan pembangunan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan revitalisasi dan restrukturisasi organisasi untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna melalui prinsip efisiensi, efektifitas, dan pemberdayaan menuju profesionalisme
- 2) Menciptakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik
- 3) Menciptakan layanan publik berbasis Teknologi Informasi
- 4) Meningkatkan manajemen kinerja ASN melalui model pengembangan kompetensi yang inovatif
- 5) Membangun pola karier ASN berdasarkan Rencana Suksesi dan Talent Pool
- 6) Membangun sistem reward dan punishment yang objektif
- 7) Melakukan penguatan terhadap Sistem Pengendalian internal pemerintah (SPIP)
- 8) Melakukan peningkatan kualitas terhadap perencanaan, penganggaran dan pelaporan
- 9) Meningkatkan kualitas proses pengadaan barang dan jasa
- 10) Perbaiki manajemen pengelolaan barang milik daerah
- 11) Meningkatkan kapabilitas APIP
- 12) Membangun Zona Integritas menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
- 13) Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pelayanan publik, termasuk untuk yang masyarakat berkebutuhan khusus
- 14) Menciptakan inovasi pelayanan publik
- 15) Menyediakan media konsultasi dan pengaduan publik
- 16) Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi dana desa/nagari dan alokasi dana desa/nagari
- 17) Meningkatkan peran serta dan keterlibatan masyarakat termasuk perantau dalam pembangunan

#### **4.3. Sinergitas Kebijakan Prioritas Pembangunan Kabupaten Solok Selatan dengan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat.**

Sesuai dengan arahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam



Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Berdasarkan hal tersebut maka dalam penyusunan prioritas kebijakan pembangunan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 diharuskan memiliki sinergitas dan sinkron terhadap RPJMD, prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2023. Sinergitas dan sinkronisasi prioritas kebijakan pembangunan Kabupaten Solok Selatan tahun 2023 dengan RPJMD serta prioritas Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.5.**  
**Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Tahun 2023**  
**Dengan RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026**

Prioritas Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023		Misi Daerah (RPJMD)
Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia		Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif
Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta pengembangan ekonomi kreatif		Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Daerah
Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani
Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.		Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pertumbuhan, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana Pelestarian Seni, Budaya, Olahraga dan Penanganan Permasalahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

**Tabel 4.6.**  
**Sinkronisasi Prioritas Pembangunan**  
**Kabupaten Solok Selatan dan Nasional**

Prioritas Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023		Agenda/Prioritas Nasional
Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta pengembangan ekonomi kreatif		Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
		Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik

**Tabel 4.7.**  
**Sinkronisasi Prioritas Pembangunan**  
**Kabupaten Solok Selatan dan Provinsi Sumatera Barat**

Prioritas Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023		Prioritas Provinsi Sumatera Barat
Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing
Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta pengembangan ekonomi kreatif		Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' - Syara' Basandi Kitabullah
Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana		Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.		Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital
		Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan
		Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.	

Secara lebih konret, kegiatan yang dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 juga mendukung secara langsung terhadap masing-

masing Kegiatan Prioritas Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Prioritas Kabupaten, yang dijabarkan sebagai berikut.

**Tabel 4.8.**  
**Sinergitas Kegiatan RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023**  
**Terhadap Prioritas Nasional**

Kegiatan	Perangkat Daerah
<b>PN 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan</b>	
3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.26.04.2.01 Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian
3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Pertanian
3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian
3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian
3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian
3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian
3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian
3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang	Dinas Pertanian

Kegiatan	Perangkat Daerah
Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian
2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Sekretariat Daerah
<b>PN 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan</b>	
1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)	Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan

Kegiatan	Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota	
1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
5.06.02.2.02 Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Sekretariat Daerah
<b>PN 3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing</b>	
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan



<b>Kegiatan</b>	<b>Perangkat Daerah</b>
1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan
1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan
1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	RSUD
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD
1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Kegiatan	Perangkat Daerah
2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kegiatan	Perangkat Daerah
<b>PN 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan</b>	
2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik
<b>PN 5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar</b>	
1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kegiatan	Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika
4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah
<b>PN 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim</b>	
1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
2.11.07.2.01 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
<b>PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik</b>	
1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kegiatan	Perangkat Daerah
2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Sekretariat Daerah
4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Sekretariat DPRD
5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektorat

Kegiatan	Perangkat Daerah
6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat
6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat
6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan

**Tabel 4.9.**  
**Sinergitas Kegiatan RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023**  
**Terhadap Prioritas Provinsi**

Program	Perangkat Daerah
<b>PP 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil &amp; Berdaya Saing</b>	
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan



<b>Program</b>	<b>Perangkat Daerah</b>
1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan
1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan
1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	RSUD
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD
1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan



Program	Perangkat Daerah
2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
<b>PP 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' - Syara' Basandi Kitabullah</b>	
2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang	Dinas Pariwisata dan

Program	Perangkat Daerah
Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kebudayaan
2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kesatuang Bangsa dan Politik
8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kesatuang Bangsa dan Politik
8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kesatuang Bangsa dan Politik
8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kesatuang Bangsa dan Politik
8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kesatuang Bangsa dan Politik
1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
<b>PP 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan</b>	
3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian
3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Pertanian
3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian
3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian
3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian
3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian
3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian

Program	Perangkat Daerah
3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian
3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian
<b>PP 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital</b>	
2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
<b>PP 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan</b>	
3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.26.04.2.01 Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber	Dinas Pariwisata dan

Program	Perangkat Daerah
Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kebudayaan
<b>PP 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan</b>	
1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
2.11.07.2.01 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup

Program	Perangkat Daerah
2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
5.06.02.2.02 Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Sekretariat Daerah
1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
<b>PP 7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas</b>	
2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika



Program	Perangkat Daerah
2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika
4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Sekretariat daerah
4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat daerah
2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Sekretariat Daerah
4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Sekretariat DPRD
5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan



Program	Perangkat Daerah
	Daerah
5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektorat
6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat
6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat
6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan

**Tabel 4.10.**  
**Sinergitas Kegiatan RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023**  
**Terhadap Prioritas Kabupaten**

Program	Perangkat Daerah
<b>PK. 1. Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia</b>	
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Dinas Pendidikan Pemuda dan

<b>Program</b>	<b>Perangkat Daerah</b>
Olahraga	Olah Raga
2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan
1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan
1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	RSUD
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD
1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

<b>Program</b>	<b>Perangkat Daerah</b>
2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Program	Perangkat Daerah
Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kesatuan Bangsa dan Politik
<b>PK. 2. Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta pengembangan ekonomi kreatif</b>	
3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian
3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Pertanian
3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian
3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian
3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian
3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian
3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian

<b>Program</b>	<b>Perangkat Daerah</b>
3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian
3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian
2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.26.04.2.01 Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



Program	Perangkat Daerah
<b>PK. 3. Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana</b>	
1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
2.11.07.2.01 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup



<b>Program</b>	<b>Perangkat Daerah</b>
2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
5.06.02.2.02 Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Sekretariat Daerah
1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
<b>PK. 4. Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan</b>	
1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kesatuan Bangsa dan Politik
2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Program	Perangkat Daerah
2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika
4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Sekretariat daerah
4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat daerah
2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Sekretariat Daerah
4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Sekretariat DPRD
5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program	Perangkat Daerah
5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektorat
6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat
6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat
6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan

#### **4.4. Sinergitas Kegiatan RKPD Kabupaten Solok Selatan dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.**

Sesuai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Yang Mengamanatkan Agar Penyelenggara Pemerintahan Daerah Memprioritaskan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Dengan Berpedoman Pada Standar Pelayanan Minimal Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat, Yang Kemudian Ditegaskan Juga Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat, Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat sinergitas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

**Tabel 4.11.**  
**Sinergitas Program dan Kegiatan RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023**  
**Terhadap Pencapaian SPM**

No	Bidang Urusan/Indikator SPM	Program/Kegiatan
<b>I Bidang Pendidikan</b>		
1.	100% warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini;	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan
2.	100% warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	
3.	100% warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama.	
4.	100%warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	
<b>II Bidang Kesehatan</b>		
1.	100% Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan;	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.02.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.	100% Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan Kesehatan	
3.	100% Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan Kesehatan	
4.	100% Balita yang mendapatkan layanan Kesehatan	
5.	100% Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan Kesehatan	
6.	100% Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan Kesehatan	
7.	100% warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan Kesehatan	
8.	100% Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan Kesehatan	
9.	100% Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan Kesehatan	
10.	100% Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	
11.	100% Warga Negara terduga tuberculosi yang mendapatkan layanan Kesehatan	
12.	100% Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	
<b>III Bidang Pekerjaan Umum</b>		
1.	100% Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari;	1.03.03 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air
2.	100% Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah	

No	Bidang Urusan/Indikator SPM	Program/Kegiatan
	domestic	Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 1.03.05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
<b>IV Bidang Perumahan Rakyat</b>		
1.	100% Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni;	2.10.05 Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan 2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.	100% Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	1.04.02 Program Pengembangan Perumahan 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 1.04.04 Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
<b>V Bidang Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat</b>		
1.	100% Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara;	1.05.02 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.	100% Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dan Peraturan Bupati/Wali Kota
3.	100% Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Kabupaten/Kota
4.	100% Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, Dan Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota
5.	100% Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran 1.05.03 Program Penanggulangan Bencana 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan



No	Bidang Urusan/Indikator SPM	Program/Kegiatan
		Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana
<b>VI</b>	<b>Bidang Sosial</b>	
1.	100% Warga Negara penyandang disabilitas telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;	1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya Bukan Korban Hiv/Aids Dan Napza Di Luar Panti Sosial 1.06.05 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.06.06 Program Penanganan Bencana 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/Kota
2.	100% Warga Negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;	
3.	100% Warga Negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti;	
4.	100% Warga Negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti;	
5.	100% Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.	

#### 4.5. Sinergitas Target Kinerja Makro Kabupaten Solok Selatan dengan Provinsi Sumatera Barat

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Untuk memenuhi hal tersebut selain sinkronisasi prioritas dana arah kebijakan pembangunan maka diperlukan sinkronisasi target kinerja makro pembangunan daerah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan hal tersebut maka setiap tingkatan pemerintah menetapkan target kinerja makro pembangunan bagi daerah dibawahnya.



Berdasarkan hal tersebut Provinsi Sumatera Barat dalam Bab VII RKPD Tahun 2023 telah menetapkan target kinerja makro pembangunan daerah bagi Kabupaten/Kota se Sumatera Barat yang akan menjadi target kinerja daerah dalam RKPD.

**Tabel 4.12.**  
**Sinergitas Target Kinerja Makro Daerah**

No	Indikator	Nasional	Sumatera Barat	Kabupaten Solok Selatan	
				RPJMD	RKPD
1.	Pertumbuhan Ekonomi	5,3-5,9	4,65	4,07	4,03
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,3-6,0	5,72	5,26	4,78
3.	Tingkat Kemiskinan	7,5-8,5	5,37	7,07	5,87
4.	Rasio Gini	0,375-0,378	0,296	0,291	0,291
5.	Indeks Pembangunan Manusia	73,31-73,49	73,46	70,37	70,09

Sumber : RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 dan Rancangan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Merujuk pada target kinerja makro yang ditetapkan oleh Provinsi Sumatera Barat melalui RKPD tahun 2023 lebih besar dari yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 pada tahun 2023. Hal tersebut akan berdampak terhadap perubahan target kinerja pembangunan Kabupaten Solok Selatan untuk Tahun 2023.

Peningkatan dari target kinerja tersebut akan menyebabkan terjadinya peningkatan sumber pembiayaan pembangunan dari target yang direncanakan. Untuk memenuhi hal tersebut maka sangat diperlukan sinergitas, kolaborasi, sharing pendanaan maupun bantuan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan antara Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Solok Selatan terutama yang berdampak terhadap pencapaian kinerja Provinsi Daerah.

#### **4.6. Rencana Inovasi Daerah**

Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah pasal 386 menyebutkan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, pemerintah daerah dalam melakukan inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana bentuk pembaharuan antara lain penerapan hasil Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), atau temuan baru dalam menyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi dijelaskan inovasi daerah dapat meningkatkan kinerja OPD, meningkatkan daya saing dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Bentuk-bentuk inovasi daerah Inovasi tata kelolah pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Kriteria inovasi daerah antara lain:

1. Mengandung pembaharuan seluruh atau sebahagian unsur dari inovasi artinya bahwa rancangan dalam inovasi daerah tersebut seluruhnya atau sebahagian berbeda dengan rancangan yang telah ada sebelumnya.
2. Memberikan manfaat bagi daerah atau masyarakat yang mengakibatkan menambah pendapatan daerah, menghemat belanja daerah, meningkatkan capaian kinerja pemerintah daerah dan meningkatkan mutu pelayanan publik atau ditunjuk bukan kepentingan pribadi /kelompok.
3. Tidak mengakibatkan pembebanan atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
5. Dapat direplikasikan oleh daerah lain melalui tahapan prosedur dan mekanisme tertentu dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, kondisi sosiologis dan kebudayaan serta potensi daerah yang akan mereplikasikan inovasi daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka untuk tahun 2023 dalam mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah serta perbaikan pelayanan pemerintah daerah maka pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Solok Selatan beberapa inovasi baik inovasi baru atau yang telah dilakukan tetapi masih terdapat pembaharuan antara lain:

#### 1. Bidang Birokrasi Pemerintahan

- ❖ Penerapan Sistem Manajemen Kinerja (SIMANJA) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) berbasis Android
- ❖ Sinkronisasi Perencanaan, Penganggaran dan Penatausahaan Keuangan Daerah (Sinkronisasi Aplikasi SIPD dengan SIMD Keuangan)
- ❖ Google Form pelaksanaan dan pelaporan Dana BOS
- ❖ Pengembangan Aplikasi Si Bijak Daerah (Sistem Informasi Berbagi Integrasi Pajak Daerah)
- ❖ SIM BPHTB (Sistem Informasi Manajemen Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)
- ❖ Pengembangan Klinik Inovasi, Klinik Data, dan Klinik Pengendalian dan perencanaan Perangkat Daerah
- ❖ Optimalisasi peran Nagari dan Jorong dalam upaya peningkatan pendapatan daerah
- ❖ Layanan Pembuatan Gambar gratis untuk kepengurusan IMB

- ❖ Musrenbang Terintegrasi dengan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

## **2. Bidang Sumber Daya Manusia**

- ❖ Bantuan Seragam Gratis bagi Siswa Baru di Seluruh tingkatan (SD, MI, SMP, Mts, SMA, SMK, dan MA)
- ❖ Pencapaian Total Coverage
- ❖ Pengembangan Klinik Pelayanan Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak
- ❖ Program Satu Rumah Tahfidz Satu Jorong.
- ❖ Car Free Day (Olah raga bersama masyarakat setiap hari Minggu)
- ❖ Monitoring Pembangunan melalui kegiatan Gowes Sepeda (setiap hari Sabtu)

## **3. Bidang Kesejahteraan Masyarakat**

- ❖ Program Satu Sapi Satu KK (Suka Sapi) terintegrasi dengan pengembangan hilirisasi produk turunanya
- ❖ Integrasi Nagari Tagedh dengan Ketahanan Ekonomi Masyarakat

**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH**

Berpijak kepada Visi dan Misi Daerah, Prioritas serta Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026, capaian kinerja pembangunan sampai tahun 2021, perkiraan capaian kinerja tahun 2022 , sinkronisasi kebijakan perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 serta serta perkiraan perkembangan pembangunan di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023, sebagaimana telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka disusunlah matrik Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 Berdasarkan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan per OPD penanggungjawab. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.1.**  
**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 Dan Perkiraan Maju Tahun 2024**

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
<b>1 01</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>131,914,656,923</b>							<b>234,068,948,296</b>	
1 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Layanan Operasional Kantor	Persen		Persen	100 Persen	<b>119,884,360,442</b>						100 Persen	<b>187,757,754,496</b>	
1 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>119,194,033,963</b>						100 Persen	<b>186,174,929,496</b>	
1 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1882 Orang/bulan	118,797,133,963		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Disdikpora Kabupaten Solok Selatan	1882 Orang/bulan	185,495,714,496	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi keuangan disediakan				29 Orang	396,900,000		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Disdikpora Kabupaten Solok Selatan	29 Orang	644,215,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1 01 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase Barang Milik Daerah terinventarisir	Persen		Persen	100 Persen	<b>29,995,000</b>						100 Persen	<b>50,000,000</b>	
1 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				10 Laporan	29,995,000		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Disdikpora Kabupaten Solok Selatan	10 Laporan	50,000,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>284,983,349</b>						100 Persen	<b>660,825,000</b>	
1 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	4,990,309		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Disdikpora Kabupaten Solok Selatan	5 Paket	10,200,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100 Paket	35,000,000		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Disdikpora Kabupaten Solok Selatan	100 Paket	225,750,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				16 Paket	4,999,140		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Disdikpora Kabupaten Solok Selatan	16 Paket	7,875,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	24,999,900		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Disdikpora Kabupaten Solok Selatan	10 Paket	42,000,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	4,995,000		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Disdikpora Kabupaten Solok Selatan	12 Laporan	15,750,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				130 Laporan	174,999,000		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Disdikpora Kabupaten Solok Selatan	130 Laporan	257,250,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				10 Dokumen	35,000,000		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Disdikpora Kabupaten Solok Selatan	10 Dokumen	102,000,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
<b>1.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketersediaan jasa penunjang	Persen		Persen	100 Persen	<b>205,348,900</b>						100 Persen	<b>92,000,000</b>	
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai disediakan				0 Laporan 300 Buah	3,000,000		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Disdikpora Kabupaten Solok Selatan	0 Laporan 300 Buah	3,250,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah pemakaian air Jumlah Pemakaian Jasa Listrik Jumlah pemakaian telepon/internet				0 Laporan 14520 Kubik 40796 KWh 219969 Menit	192,348,900		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Disdikpora Kabupaten Solok Selatan	0 Laporan 14520 Kubik 40796 KWh 219969 Menit	78,750,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa perbaikan Peralatan Kantor disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Unit 0 Laporan	10,000,000		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Disdikpora Kabupaten Solok Selatan	20 Unit 0 Laporan	10,000,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
<b>1.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Persen		Persen	100 Persen	<b>169,999,230</b>						100 Persen	<b>310,000,000</b>	
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	140,000,000		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Disdikpora Kabupaten Solok Selatan	12 Unit	160,000,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	29,999,230		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Disdikpora Kabupaten Solok Selatan	1 Unit	150,000,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1 01 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA APK PAUD APK SD/MI APK SMP/MTs APM SD/MI APM SMP/MTs	Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen		Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen	99,15 Persen 100 Persen 63,48 Persen 100,25 Persen 100 Persen 99,75 Persen 80,75 Persen	<b>11,344,085,081</b>						99,15 Persen 100 Persen 63,48 Persen 100,25 Persen 100 Persen 99,75 Persen 80,75 Persen	<b>45,811,193,800</b>	
1 01 02 2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	APM SD/MI	Persen		Persen	100,25 Persen	<b>7,193,857,107</b>						100,25 Persen	<b>23,570,035,000</b>	
1 01 02 2.01 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				9 Ruang	2,449,998,288		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Penduduk Kabupaten Solok Selatan berusia 7 - 12 Tahun	9 Ruang	1,977,600,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1 01 02 2.01 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	249,900,978		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Penduduk Kabupaten Solok Selatan berusia 7 - 12 Tahun	1 Ruang	688,000,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1 01 02 2.01 06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				19 Unit	1,874,999,741		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Penduduk Kabupaten Solok Selatan berusia 7 - 12 Tahun	19 Unit	2,850,000,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1 01 02 2.01 14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				106 Paket	124,999,600		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Penduduk Kabupaten Solok Selatan berusia 7 - 12 Tahun	106 Paket	504,000,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1 01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				2390 Peserta Didik	1,244,855,000		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Penduduk Kabupaten Solok Selatan berusia 7 - 12 Tahun	2390 Peserta Didik	1,470,340,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				136 Satuan Pendidikan	956,000,000		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Penduduk Kabupaten Solok Selatan berusia 7 - 12 Tahun	136 Satuan Pendidikan	10,826,000,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Kegiatan Proses Belajar Mengajar disekolah di pantau dan ditindaklanjuti Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				5 Jenis 136 Satuan Pendidikan	48,886,900		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Penduduk Kabupaten Solok Selatan berusia 7 - 12 Tahun	5 Jenis 136 Satuan Pendidikan	145,000,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				42 Peserta Didik	151,088,000		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Penduduk Kabupaten Solok Selatan berusia 7 - 12 Tahun	42 Peserta Didik	90,000,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan Proses Belajar Mengajar disekolah dibina Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				3 Jenis 25 Orang	43,128,800		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Penduduk Kabupaten Solok Selatan berusia 7 - 12 Tahun	3 Jenis 25 Orang	150,000,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				25 Satuan Pendidikan	14,999,800		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Penduduk Kabupaten Solok Selatan berusia 7 - 12 Tahun	25 Satuan Pendidikan	55,000,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				136 Satuan Pendidikan	35,000,000		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Penduduk Kabupaten Solok Selatan berusia 7 - 12 Tahun	136 Satuan Pendidikan	25,000,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA APK SMP/MTs APM SMP/MTs	Persen Persen Persen	Persen Persen Persen	100 Persen 100 Persen 80.75 Persen		<b>3,020,237,080</b>						100 Persen 100 Persen 80.75 Persen	<b>17,046,654,000</b>	
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				6 Unit	824,995,580		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Penduduk Kabupaten Solok Selatan berusia 13 - 15 Tahun	6 Unit	700,000,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				5241 Peserta Didik	1,715,989,800		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Penduduk Kabupaten Solok Selatan berusia 13 - 15 Tahun	5241 Peserta Didik	2,091,420,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian Jumlah Satuan Pendidikan disediakan Bantuan Operasional Sekolah				0 Peserta Didik 32 Satuan Pendidikan	215,040,000		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Penduduk Kabupaten Solok Selatan berusia 13 - 15 Tahun	0 Peserta Didik 32 Satuan Pendidikan	3,424,120,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1 01 02 2.02 37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				32 Satuan Pendidikan	34,999,800		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Penduduk Kabupaten Solok Selatan berusia 13 - 15 Tahun	32 Satuan Pendidikan	95,000,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1 01 02 2.02 38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				42 Peserta Didik	151,088,000		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Penduduk Kabupaten Solok Selatan berusia 13 - 15 Tahun	42 Peserta Didik	150,000,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1 01 02 2.02 40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				0 Orang	43,128,900		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Penduduk Kabupaten Solok Selatan berusia 13 - 15 Tahun	0 Orang	120,000,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1 01 02 2.02 41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				32 Satuan Pendidikan	15,000,000		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Penduduk Kabupaten Solok Selatan berusia 13 - 15 Tahun	32 Satuan Pendidikan	65,000,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	19,995,000		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Penduduk Kabupaten Solok Selatan berusia 13 - 15 Tahun	35 Satuan Pendidikan	25,000,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
<b>1 01 02 2.03</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	APK PAUD	Persen		Persen	63.48 Persen	<b>959,995,094</b>						63.48 Persen	<b>3,598,779,000</b>	
1 01 02 2.03 01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun				2 Unit	499,995,094		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Penduduk Kabupaten Solok Selatan Berusia 4 - 6 Tahun	2 Unit	221,679,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1 01 02 2.03 13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah TK/PAUD yang menerima BOP				0 Peserta Didik 163 Lembaga	70,000,000		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Penduduk Kabupaten Solok Selatan Berusia 4 - 6 Tahun	0 Peserta Didik 163 Lembaga	2,550,600,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi					59 Orang	95,000,000	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Penduduk Kabupaten Solok Selatan Berusia 4 - 6 Tahun	59 Orang	115,000,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen					159 Satuan Pendidikan	270,000,000	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Penduduk Kabupaten Solok Selatan Berusia 4 - 6 Tahun	159 Satuan Pendidikan	90,000,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP					159 Satuan Pendidikan	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Penduduk Kabupaten Solok Selatan Berusia 4 - 6 Tahun	159 Satuan Pendidikan	25,000,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.04</b>		<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	Angka Melek Huruf Angka Rata - Rata Lama Sekolah	Persen Tahun		Persen Tahun		100 Persen 8.48 Tahun	<b>169,995,800</b>					100 Persen 8.48 Tahun	<b>1,595,725,800</b>	
1	01	02	2.04	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun					1 Unit	49,996,000	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Penduduk Kabupaten Solok Selatan berusia 7 - 18 Tahun yang putus sekolah	1 Unit	309,780,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penerima BOP Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar					12 Lembaga 0 Peserta Didik	49,999,800	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Penduduk Kabupaten Solok Selatan berusia 7 - 18 Tahun yang putus sekolah	12 Lembaga 0 Peserta Didik	768,653,800	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen					12 Satuan Pendidikan	70,000,000	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Penduduk Kabupaten Solok Selatan berusia 7 - 18 Tahun yang putus sekolah	12 Satuan Pendidikan	75,000,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal (SD, SMP)	Persen		Persen		19.55 Persen	<b>74,500,000</b>					19.55 Persen	<b>200,000,000</b>	
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	2.01		<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</b>	Persentase Sekolah Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	Persen		Persen		19.55 Persen	<b>74,500,000</b>					19.55 Persen	<b>130,000,000</b>	
1	01	03	2.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun					1 Dokumen	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Peserta Didik tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	1 Dokumen	35,000,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
1	01	03	2.01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya				40 Orang	39,500,000	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Peserta Didik tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	40 Orang	40,000,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	
1	01	04			<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Persentase Guru bersertipikat Pendidik Persentase Kepala Bersertipikat Persentase Pengawas Berstipikat	Persen Persen persen	Persen Persen persen	96,75 Persen 95,75 Persen 75,25 persen	<b>611,711,400</b>						96,75 Persen 95,75 Persen 75,25 persen	<b>300,000,000</b>		
1	01	04	2.01		<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	Asesmen Pengawas Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Kegiatan Pembinaan KKG Monitoring dan Verifikasi Guru Profesional Pelatihan Guru Pembelajaran Berbasis TIK Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pemngawas Pembekalan Guru Penggerak Penilaian PAK Fungsional Guru Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah Seleksi Guru Berprestasi Sertifikasi Asesor Penilai Angka Kredit Guru	Orang Orang Kelompok Orang Orang Orang Orang Dokumen Orang Orang Orang	Orang Orang Kelompok Orang Orang Orang Orang Dokumen Orang Orang Orang	26 Orang 15 Orang 56 Kelompok 1122 Orang 150 Orang 15 Orang 85 Orang 332 Dokumen 260 Orang 60 Orang 6 Orang	<b>611,711,400</b>					26 Orang 15 Orang 56 Kelompok 1122 Orang 150 Orang 15 Orang 85 Orang 332 Dokumen 260 Orang 60 Orang 6 Orang	<b>300,000,000</b>			
1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				33 Dokumen	611,711,400	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Pendidik dan Tenaga Pendidikan	33 Dokumen	175,000,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
2	19				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>					<b>6,469,477,504</b>								<b>2,400,000,000</b>	
2	19	02			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	Jumlah Wirausaha Muda	Orang	Orang	1750 Orang	<b>663,179,500</b>							1750 Orang	<b>200,000,000</b>	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 02 2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Wirausaha Muda	Orang		Orang	250 Orang	663,179,500						250 Orang	200,000,000	
2 19 02 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				47 Orang	99,999,800		Dana Perimbangan		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Penduduk Kabupaten Solok Selatan Berusia 16 - 30 Tahun	47 Orang	200,000,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
2 19 02 2.01 09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan				67 Orang	563,179,700		Dana Perimbangan		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Penduduk Kabupaten Solok Selatan Berusia 16 - 30 Tahun	67 Orang	0	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
2 19 03	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	Jumlah Atlit Berprestasi Jumlah Atlit Berprestasi	Orang Orang		Orang Orang	12 Orang 20 Orang	5,556,298,004						12 Orang 20 Orang	1,900,000,000	
2 19 03 2.01	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Satuan Pendidikan Dasar	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	1,399,999,204						10 Dokumen	400,000,000	
2 19 03 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				1 Unit	1,399,999,204		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Kelompok Cabang Olahraga di Kabupaten Solok Selatan	1 Unit	250,000,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
2 19 03 2.02	<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota Persentase Perkumpulan/Klub Olahraga Aktif	Dokumen Persen		Dokumen Persen	5 Dokumen 100 Persen	116,999,900						5 Dokumen 100 Persen	500,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 03 2.02 01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Pembinaan Olahraga Berkembang di Masyarakat (PERWOSI) Terlaksananya Kompetisi Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten Tersedianya Operasional Kegiatan Pengembangan Olahraga Lanjut Usia dan Penyandang Cacat (SOIna)				1 Kegiatan 2 Event 1 Kegiatan	116,999,900		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Perkumpulan Olahraga se-Kabupaten Solok Selatan	1 Kegiatan 2 Event 1 Kegiatan	350,000,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
2 19 03 2.03	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	Jumlah Atlit Daerah terseleksi dibina	Orang		Orang	300 Orang	<b>2,299,999,900</b>						300 Orang	<b>400,000,000</b>	
2 19 03 2.03 03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Cabang Olahraga Atlet Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan				28 Cabor	2,299,999,900		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Kelompok Cabang Olahraga (Cabor) Dikabupaten Solok Selatan	28 Cabor	100,000,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
2 19 03 2.04	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>	Persentase Cabang Olahraga dibina	Persen		Persen	100 Persen	<b>1,200,000,000</b>						100 Persen	<b>250,000,000</b>	
2 19 03 2.04 03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Cabang Olahraga Kabupaten/Kota yang dibina KONI				28 Cabor	1,200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Cabang Olahraga Aktif di Kabupaten Solok Selatan	28 Cabor	250,000,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
2 19 03 2.05	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	<b>539,299,000</b>						5 Dokumen	<b>350,000,000</b>	
2 19 03 2.05 01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi Jumlah Event olahraga rekreasi difasilitasi				0 Dokumen 2 Dokumen 1 Event	539,299,000		Dana Perimbangan		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Masyarakat Kabupaten Solok Selatan	0 Dokumen 2 Dokumen 1 Event	350,000,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
2 19 04	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	Persentase Gugus Depan yang Aktif	Persen		Persen	100 Persen	<b>250,000,000</b>						100 Persen	<b>300,000,000</b>	
2 19 04 2.01	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>	Prestasi Bidang Kepramukaan	Buah		Buah	3 Buah	<b>250,000,000</b>						3 Buah	<b>300,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 04 2.01 03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				45 Orang	50,000,000		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Kwarti Cabang Kabupaten Solok Selatan	45 Orang	52,500,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
2 19 04 2.01 05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				3 Laporan	200,000,000		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Kwarti Cabang Kabupaten Solok Selatan	3 Laporan	247,500,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
<b>1 02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						<b>60,860,657,499</b>						<b>78,057,808,500</b>		
<b>1 02 01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan layanan operasional kantor	persen		persen	100 persen	<b>35,629,456,501</b>						100 persen	<b>36,828,000,000</b>	
<b>1 02 01 2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah	persen		persen	100 persen	<b>35,027,996,937</b>						100 persen	<b>35,420,000,000</b>	
1 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan				451 orang	34,696,596,937	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Dinas Kesehatan	451 orang	35,000,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan honorinya				35 orang	331,400,000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Dinas Kesehatan	35 orang	390,000,000	Dinas Kesehatan
<b>1 02 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum perangkat daerah	persen		persen	100 persen	<b>252,559,671</b>						100 persen	<b>680,000,000</b>	
1 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peralatan listrik yang disediakan				16 Jenis	4,999,921	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Dinas Kesehatan	16 Jenis	75,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK yang disediakan				5 Jenis	37,100,000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Dinas Kesehatan	5 Jenis	160,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga yang disediakan				5 Jenis	5,000,000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Dinas Kesehatan	5 Jenis	70,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bahan cetak yang disediakan Jumlah penggandaan yang disediakan				14 Jenis 10000 Lembar	25,459,750	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Dinas Kesehatan	14 Jenis 10000 Lembar	69,000,000	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
1	02	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum tamu yang disediakan				200 Kotak	5,000,000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Dinas Kesehatan	200 Kotak	6,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makan minum rapat yang disediakan Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan				97 kotak 55 Kali	175,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Dinas Kesehatan	97 kotak 55 Kali	300,000,000	Dinas Kesehatan
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia	persen		persen	100 persen	<b>88,900,000</b>						100 persen	<b>183,000,000</b>	
1	02	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia				1300 Buah	2,100,000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Dinas Kesehatan	1300 Buah	3,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah pemakaian jasa listrik Jumlah Pemakaian Pemakaian Air Jumlah pemakaian telepon/ internet				0 Laporan 82609 KWH 7200 Kubik 180 GB	76,800,000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Dinas Kesehatan	0 Laporan 82609 KWH 7200 Kubik 180 GB	115,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor				20 Unit	10,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Dinas Kesehatan	20 Unit	65,000,000	Dinas Kesehatan
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	persen		persen	100 persen	<b>259,999,893</b>						100 persen	<b>300,000,000</b>	
1	02	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah kendaran dinas operasional yang terpelihara Jumlah perizinan kendaran dinas/ operasional				0 Unit 5 Unit 5 Unit	259,999,893	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Dinas Kesehatan	0 Unit 5 Unit 5 Unit	300,000,000	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Angka Mortalitas Penduduk (Angka Kematian Kasar) API Malaria Kasus baru TB BTA+ Persentase balita gizi buruk Persentase balita kurang gizi Persentase penanganan kasus pneumonia pada balita Prevalensi kasus diare Prevalensi kasus HIV Rata-rata kesakitan DBD	per 100 ribu penduduk persen per 100 ribu penduduk per 1000 penduduk per 1000 penduduk per 1000 penduduk per 10 ribu penduduk per 100 ribu penduduk per 10 ribu penduduk per 100 ribu penduduk per 100 ribu penduduk		per 100 ribu penduduk persen per 100 ribu penduduk per 1000 penduduk per 1000 penduduk per 1000 penduduk per 10 ribu penduduk per 100 ribu penduduk per 10 ribu penduduk per 100 ribu penduduk per 100 ribu penduduk	13,1 per 100 ribu penduduk 4,4 persen 25 per 100 ribu penduduk 0,1 per 1000 penduduk 19,39 per 1000 penduduk 0,1 per 10 ribu penduduk 25 per 100 ribu penduduk 0,1 per 10 ribu penduduk 21,5 per 100 ribu penduduk	<b>24,975,800,998</b>						13,1 per 100 ribu penduduk 4,4 persen 25 per 100 ribu penduduk 0,1 per 1000 penduduk 19,39 per 1000 penduduk 0,1 per 10 ribu penduduk 25 per 100 ribu penduduk 0,1 per 10 ribu penduduk 21,5 per 100 ribu penduduk	<b>40,674,808,500</b>	
1 02 02 2.01	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota yang tersedia	persen		persen	100 persen	<b>2,500,000,000</b>						100 persen	<b>12,750,000,000</b>	
1 02 02 2.01 06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	100,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Dinas Kesehatan	1 Unit	2,000,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Pustu yang direhabilitasi Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				4 Pustu 0 Unit	300,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Dinas Kesehatan	4 Pustu 0 Unit	700,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan Jumlah Pengadaan Obat, Vaksin				0 Paket 1 Paket	1,500,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Dinas Kesehatan	0 Paket 1 Paket	3,000,000,000	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan Jumlah Pengadaan Bahan Habis Pakai				0 Paket 1 Paket	500,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Dinas Kesehatan	0 Paket 1 Paket	700,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar Jumlah paket pemeliharaan rutin dan berkala Alkes				0 Unit 10 Paket	100,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Dinas Kesehatan	0 Unit 10 Paket	150,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase orang terduga berisiko terinfeksi virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase orang terduga Tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen persen persen		persen persen persen	100 persen 100 persen 100 persen	<b>22,395,800,998</b>						100 persen 100 persen 100 persen	<b>27,804,808,500</b>	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3234 orang 0 Orang	60,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Dinas Kesehatan	3234 orang 0 Orang	70,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1954 orang 0 Orang	52,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Dinas Kesehatan	1954 orang 0 Orang	70,000,000	Dinas Kesehatan



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				954 orang 0 Orang	50,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Dinas Kesehatan	954 orang 0 Orang	60,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				18903 orang 0 Orang	40,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Dinas Kesehatan	18903 orang 0 Orang	50,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan				0 Orang 21678 orang	40,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Dinas Kesehatan	0 Orang 21678 orang	50,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan				0 Orang 79835 orang	40,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Kesehatan	0 Orang 79835 orang	50,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan				0 Orang 4675 orang	40,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Kesehatan	0 Orang 4675 orang	50,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Jumlah Penderita TB yang mendapatkan pelayanan kesehatan				0 Orang 25 Orang	40,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Dinas Kesehatan	0 Orang 25 Orang	50,000,000	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				3505 Orang 0 Orang	35,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Dinas Kesehatan	3505 Orang 0 Orang	35,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar Jumlah penduduk yang dilayani pada kondisi KLB				0 Dokumen 5067 orang	496,520,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Dinas Kesehatan	0 Dokumen 5067 orang	1,800,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah masyarakat yang mendapat pelayanan gizi				0 Dokumen 405 orang	50,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Dinas Kesehatan	0 Dokumen 405 orang	50,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Tersusunnya Laporan Studi EHRA				0 Dokumen 1 Dokumen	460,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Dinas Kesehatan	0 Dokumen 1 Dokumen	460,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya				0 Dokumen 4 Puskesmas	45,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Kesehatan	0 Dokumen 4 Puskesmas	60,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	50,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Dinas Kesehatan	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jumlah penyuluhan Kesehatan Jiwa dan NAPZA				0 Orang 2 Kali	30,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Dinas Kesehatan	0 Orang 2 Kali	30,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen 5 Puskesmas	60,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Dinas Kesehatan	0 Dokumen 5 Puskesmas	70,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan				0 Dokumen 45.625 Jiwa	19,800,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Dinas Kesehatan	0 Dokumen 45.625 Jiwa	18,500,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah pelayanan fasilitas kesehatan lainnya yang melalukan operasional				1 Unit	957,280,998	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Dinas Kesehatan	1 Unit	2,989,808,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah kasus KIPI				20 Orang	50,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Dinas Kesehatan	20 Orang	50,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.04	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	persen		persen	100 persen	<b>80,000,000</b>						100 persen	<b>60,000,000</b>	
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				4 Kali 0 Unit	30,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Dinas Kesehatan	4 Kali 0 Unit	30,000,000	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan Jumlah Pembinaan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				0 Unit 4 Kali	50,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Dinas Kesehatan	0 Unit 4 Kali	30,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	"Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota" Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan kompetensi	persen persen		persen persen	100 persen 32 persen	<b>34,000,000</b>						100 persen 32 persen	<b>130,000,000</b>	
1.02.03.2.03	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota	persen		persen	100 persen	<b>34,000,000</b>						100 persen	<b>90,000,000</b>	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDM Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				30 Orang 0 Orang	34,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Dinas Kesehatan	30 Orang 0 Orang	90,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.04	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	Cakupan pengawasan PIRT Persentase ketersediaan Alkes Persentase ketersediaan farmasi Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	persen persen persen persen		persen persen persen persen	92 persen 63 persen 98,5 persen 100 persen	<b>135,000,000</b>						92 persen 63 persen 98,5 persen 100 persen	<b>295,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 04 2.01	<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	persen		persen	100 persen	<b>50,000,000</b>						100 persen	<b>150,000,000</b>	
1 02 04 2.01 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				0 Dokumen 4 Kali 4 Kali	50,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Dinas Kesehatan	0 Dokumen 4 Kali 4 Kali	150,000,000	Dinas Kesehatan	
1 02 04 2.03	<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	persen		persen	100 persen	<b>45,000,000</b>						100 persen	<b>45,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah P-IRT yang dikendalikan dan diawasi				0 Dokumen 125 PIRT	45,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Dinas Kesehatan	0 Dokumen 125 PIRT	45,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.04.2.04	<b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>	Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	persen persen		persen persen	100 persen 100 persen	<b>40,000,000</b>						100 persen 100 persen	<b>50,000,000</b>	
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Jumlah sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang diterbitkan				0 Dokumen 421 TPM	40,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Dinas Kesehatan	0 Dokumen 421 TPM	50,000,000	Dinas Kesehatan



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Persentase Pelaksanaan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota  Persentase Rumah tangga yang menerapkan standar PHBS	persen persen		persen persen	100 persen 79 persen	<b>86,400,000</b>					100 persen 79 persen	<b>130,000,000</b>		
1 02 05 2.01	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Pelaksanaan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	persen		persen	100 persen	<b>50,000,000</b>					100 persen	<b>60,000,000</b>		
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat  Jumlah Puskesmas yang dibina dalam upaya promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				0 Dokumen 8 Puskesmas	50,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Dinas Kesehatan	0 Dokumen 8 Puskesmas	60,000,000	Dinas Kesehatan	
1 02 05 2.02	<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase terlaksananya upaya Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	persen		persen	100 persen	<b>36,400,000</b>					100 persen	<b>70,000,000</b>		
1 02 05 2.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat  Jumlah puskesmas yang dibina dalam melaksanakan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat				0 Dokumen 4 Puskesmas	36,400,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Dinas Kesehatan	0 Dokumen 4 Puskesmas	70,000,000	Dinas Kesehatan	
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						<b>1,518,783,689</b>						<b>2,000,000,000</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Angka Mortalitas penduduk (Angka kematian kasar) API Malaria Kasus baru TB BTA+ Persentase balita gizi buruk Persentase balita kurang gizi Persentase balita stunting Persentase penanganan kasus pneumonia pada balita prevalensi kasus diare prevalensi kasus HIV Rata-rata kesakitan DBD	per 1000 penduduk per 1000 penduduk per 100 ribu penduduk persen persen persen per 100 ribu penduduk per 10 ribu penduduk per 100 ribu penduduk		per 1000 penduduk per 1000 penduduk per 100 ribu penduduk per 100 ribu penduduk persen persen persen persen per 100 ribu penduduk per 10 ribu penduduk per 100 ribu penduduk	19,39 per 1000 penduduk 0,01 per 1000 penduduk 25 per 100 ribu penduduk 0,01 persen 6,30 persen 13,40 persen 4,4 persen 21,5 per 100 ribu penduduk 0,1 per 10 ribu penduduk 13,1 per 100 ribu penduduk	<b>1,518,783,689</b>					19,39 per 1000 penduduk 0,01 per 1000 penduduk 25 per 100 ribu penduduk 0,01 persen 6,30 persen 13,40 persen 4,4 persen 21,5 per 100 ribu penduduk 0,1 per 10 ribu penduduk 13,1 per 100 ribu penduduk	<b>2,000,000,000</b>		
1 02 02 2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	persen		persen	100 persen	<b>1,518,783,689</b>					100 persen	<b>2,000,000,000</b>		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya operasional Puskesmas Pakan Rabaa				1 Tahun	1,518,783,689	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Puskesmas Pakan Rabaa	1 Tahun	2,000,000,000	Dinas Kesehatan
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
<b>1 02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						<b>1,905,928,008</b>						<b>1,254,365,000</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Angka Mortalitas penduduk (Angka kematian kasar) API Malaria Kasus baru TB BTA+ Persentase balita gizi buruk Persentase balita kurang gizi Persentase balita stunting Persentase penanganan kasus pneumonia pada balita Prevalensi Kasus diare Prevalensi kasus HIV Rata-rata kesakitan DBD Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	per 1000 penduduk per 1000 penduduk per 1000 penduduk per 100 ribu penduduk persen persen persen persen per 100 ribu penduduk per 10 ribu penduduk per 100 ribu penduduk Tahun		per 1000 penduduk per 1000 penduduk per 1000 penduduk per 100 ribu penduduk persen persen persen persen per 100 ribu penduduk per 10 ribu penduduk per 100 ribu penduduk Tahun	19,39 per 1000 penduduk 0,01 per 1000 penduduk 25 per 100 ribu penduduk 0,01 persen 6,30 persen 13,40 persen 4,4 persen 21,5 per 100 ribu penduduk 0,1 per 10 ribu penduduk 13,1 per 100 ribu penduduk 1 Tahun	<b>1,905,928,008</b>					19,39 per 1000 penduduk 0,01 per 1000 penduduk 25 per 100 ribu penduduk 0,01 persen 6,30 persen 13,40 persen 4,4 persen 21,5 per 100 ribu penduduk 0,1 per 10 ribu penduduk 13,1 per 100 ribu penduduk 1 Tahun	<b>1,254,365,000</b>		
1 02 02 2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	persen		persen	100 persen	<b>1,905,928,008</b>					100 persen	<b>1,254,365,000</b>		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya operasional puskesmas muara labuh				1 Tahun	1,905,928,008	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Puskesmas Muara Labuh	1 Tahun	1,254,365,000	Dinas Kesehatan
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						<b>1,112,199,995</b>						<b>1,254,365,000</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	0Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas Angka Mortalitas penduduk (Angka kematian kasar) API Malaria Kasus baru TB BTA+ Persentase balita gizi buruk Persentase balita kurang gizi Persentase balita stunting Persentase penanganan kasus pneumonia pada balita Prevalensi kasus diare Prevalensi kasus HIV Rata-rata kesakitan DBD	Tahun per 1000 penduduk per 1000 penduduk per 100 ribu penduduk persen persen persen persen per 100 ribu penduduk per 10 ribu penduduk per 100 ribu penduduk		Tahun per 1000 penduduk per 1000 penduduk per 100 ribu penduduk persen persen persen persen per 100 ribu penduduk per 10 ribu penduduk per 100 ribu penduduk	1 Tahun 19,39 per 1000 penduduk 0,01 per 1000 penduduk 25 per 100 ribu penduduk 0,01 persen 6,30 persen 13,40 persen 4,4 persen 21,5 per 100 ribu penduduk 0,1 per 10 ribu penduduk 13,1 per 100 ribu penduduk	<b>1,112,199,995</b>						1 Tahun 19,39 per 1000 penduduk 0,01 per 1000 penduduk 25 per 100 ribu penduduk 0,01 persen 6,30 persen 13,40 persen 4,4 persen 21,5 per 100 ribu penduduk 0,1 per 10 ribu penduduk 13,1 per 100 ribu penduduk	<b>1,254,365,000</b>	
1 02 02 2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	persen		persen	100 persen	<b>1,112,199,995</b>						100 persen	<b>1,254,365,000</b>	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya operasional puskesmas pakan selasa				1 Tahun	1,112,199,995	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Puskesmas Pakan Selasa	1 Tahun	1,254,365,000	Dinas Kesehatan
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
<b>1 02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>							<b>2,426,488,225</b>						<b>1,254,365,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Angka Mortalitas penduduk (Angka kematian kasar) API Malaria Kasus baru TB BTA+ Persentase balita gizi buruk Persentase balita kurang gizi Persentase balita stunting Persentase penanganan kasus pneumonia pada balita Prevalensi Kasus diare Prevalensi kasus HIV Rata-rata kesakitan DBD Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	per 1000 penduduk per 1000 penduduk per 1000 penduduk per 100 ribu penduduk persen persen persen persen per 100 ribu penduduk per 10 ribu penduduk per 100 ribu penduduk per 100 ribu penduduk Tahun		per 1000 penduduk per 1000 penduduk per 1000 penduduk per 100 ribu penduduk persen persen persen persen per 100 ribu penduduk per 10 ribu penduduk per 100 ribu penduduk Tahun	19,39 per 1000 penduduk 0,01 per 1000 penduduk 25 per 100 ribu penduduk 0,01 persen 6,30 persen 13,40 persen 4,4 persen 21,5 per 100 ribu penduduk 0,1 per 10 ribu penduduk 13,1 per 100 ribu penduduk 1 Tahun	<b>2,426,488,225</b>					19,39 per 1000 penduduk 0,01 per 1000 penduduk 25 per 100 ribu penduduk 0,01 persen 6,30 persen 13,40 persen 4,4 persen 21,5 per 100 ribu penduduk 0,1 per 10 ribu penduduk 13,1 per 100 ribu penduduk 1 Tahun	<b>1,254,365,000</b>		
1 02 02 2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	persen		persen	100 persen	<b>2,426,488,225</b>					100 persen	<b>1,254,365,000</b>		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Terlaksananya operasional puskesmas lubuk gadang				0 Dokumen 1 Tahun	2,426,488,225	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Puskesmas Lubuk Gadang	0 Dokumen 1 Tahun	1,254,365,000	Dinas Kesehatan
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						<b>1,433,223,812</b>						<b>2,210,409,248</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Angka Mortalitas penduduk (Angka kematian kasar) API Malaria Kasus baru TB BTA+ Persentase balita gizi buruk Persentase balita kurang gizi Persentase balita stunting Persentase penanganan kasus pneumonia pada balita Prevalensi Kasus diare Prevalensi kasus HIV Rata-rata kesakitan DBD Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	per 1000 penduduk per 1000 penduduk per 1000 penduduk per 100 ribu penduduk persen persen persen persen per 100 ribu penduduk per 10 ribu penduduk per 100 ribu penduduk per 100 ribu penduduk Tahun		per 1000 penduduk per 1000 penduduk per 1000 penduduk per 100 ribu penduduk persen persen persen persen per 100 ribu penduduk per 10 ribu penduduk per 100 ribu penduduk Tahun	19,39 per 1000 penduduk 0,01 per 1000 penduduk 25 per 100 ribu penduduk 0,01 persen 6,30 persen 13,40 persen 4,4 persen 21,5 per 100 ribu penduduk 0,1 per 10 ribu penduduk 13,1 per 100 ribu penduduk 1 Tahun	<b>1,433,223,812</b>					19,39 per 1000 penduduk 0,01 per 1000 penduduk 25 per 100 ribu penduduk 0,01 persen 6,30 persen 13,40 persen 4,4 persen 21,5 per 100 ribu penduduk 0,1 per 10 ribu penduduk 13,1 per 100 ribu penduduk 1 Tahun	<b>2,210,409,248</b>		
1 02 02 2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	persen		persen	100 persen	<b>1,433,223,812</b>					100 persen	<b>2,210,409,248</b>		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Terlaksananya operasional puskesmas Bidar Alam				0 Dokumen 1 Tahun	1,433,223,812	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujan, Semua Kelurahan		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia. Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Puskesmas Bidar Alam	0 Dokumen 1 Tahun	2,210,409,248	Dinas Kesehatan	
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						<b>1,102,662,998</b>						<b>1,254,365,000</b>		



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Angka Mortalitas penduduk (Angka kematian kasar) API Malaria Kasus baru TB BTA+ Persentase balita gizi buruk Persentase balita kurang gizi Persentase balita stunting Persentase penanganan kasus pneumonia pada balita Prevalensi Kasus diare Prevalensi kasus HIV Rata-rata kesakitan DBD Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	per 1000 penduduk per 1000 penduduk per 1000 penduduk per 100 ribu penduduk persen persen persen persen per 100 ribu penduduk per 10 ribu penduduk per 100 ribu penduduk per 100 ribu penduduk Tahun		per 1000 penduduk per 1000 penduduk per 1000 penduduk per 100 ribu penduduk persen persen persen persen per 100 ribu penduduk per 10 ribu penduduk per 100 ribu penduduk Tahun	19,39 per 1000 penduduk 0,01 per 1000 penduduk 25 per 100 ribu penduduk 0,01 persen 6,30 persen 13,40 persen 4,4 persen 21,5 per 100 ribu penduduk 0,1 per 10 ribu penduduk 13,1 per 100 ribu penduduk 1 Tahun	<b>1,102,662,998</b>					19,39 per 1000 penduduk 0,01 per 1000 penduduk 25 per 100 ribu penduduk 0,01 persen 6,30 persen 13,40 persen 4,4 persen 21,5 per 100 ribu penduduk 0,1 per 10 ribu penduduk 13,1 per 100 ribu penduduk 1 Tahun	<b>1,254,365,000</b>		
1 02 02 2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	persen		persen	100 persen	<b>1,102,662,998</b>					100 persen	<b>1,254,365,000</b>		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Terlaksananya operasional puskesmas mercu				0 Dokumen 1 Tahun	1,102,662,998	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Puskesmas Mercu	0 Dokumen 1 Tahun	1,254,365,000	Dinas Kesehatan
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>							<b>884,694,080</b>						<b>1,254,365,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Angka Mortalitas penduduk (Angka kematian kasar) API Malaria Kasus baru TB BTA+ Persentase balita gizi buruk Persentase balita kurang gizi Persentase balita stunting Persentase penanganan kasus pneumonia pada balita Prevalensi Kasus diare Prevalensi kasus HIV Rata-rata kesakitan DBD Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	per 1000 penduduk per 1000 penduduk per 1000 penduduk per 100 ribu penduduk persen persen persen persen per 100 ribu penduduk per 10 ribu penduduk per 100 ribu penduduk per 100 ribu penduduk Tahun		per 1000 penduduk per 1000 penduduk per 1000 penduduk per 100 ribu penduduk persen persen persen persen per 100 ribu penduduk per 10 ribu penduduk per 100 ribu penduduk Tahun	19,39 per 1000 penduduk 0,01 per 1000 penduduk 25 per 100 ribu penduduk 0,01 persen 6,30 persen 13,7 persen 4,4 persen 21,5 per 100 ribu penduduk 0,1 per 10 ribu penduduk 13,1 per 100 ribu penduduk 1 Tahun	<b>884,694,080</b>					19,39 per 1000 penduduk 0,01 per 1000 penduduk 25 per 100 ribu penduduk 0,01 persen 6,30 persen 13,7 persen 4,4 persen 21,5 per 100 ribu penduduk 0,1 per 10 ribu penduduk 13,1 per 100 ribu penduduk 1 Tahun	<b>1,254,365,000</b>		
1 02 02 2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	persen		persen	100 persen	<b>884,694,080</b>					100 persen	<b>1,254,365,000</b>		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Terlaksananya operasional Puskesmas Abai				0 Dokumen 1 Tahun	884,694,080	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Puskesmas Abai	0 Dokumen 1 Tahun	1,254,365,000	Dinas Kesehatan
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>							<b>391,254,980</b>						<b>1,254,365,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Angka Mortalitas penduduk (Angka kematian kasar) API Malaria Kasus baru TB BTA+ Persentase balita gizi buruk Persentase balita kurang gizi Persentase balita stunting Persentase penanganan kasus pneumonia pada balita Prevalensi Kasus diare Prevalensi kasus HIV Rata-rata kesakitan DBD Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	per 1000 penduduk per 1000 penduduk per 1000 penduduk per 100 ribu penduduk persen persen persen persen per 100 ribu penduduk per 10 ribu penduduk per 100 ribu penduduk Tahun		per 1000 penduduk per 1000 penduduk per 1000 penduduk per 100 ribu penduduk persen persen persen persen per 100 ribu penduduk per 10 ribu penduduk per 100 ribu penduduk Tahun	19,39 per 1000 penduduk 0,01 per 1000 penduduk 25 per 100 ribu penduduk 0,01 persen 6,30 persen 13,40 persen 4,4 persen 21,5 per 100 ribu penduduk 0,1 per 10 ribu penduduk 13,1 per 100 ribu penduduk 1 Tahun	<b>391,254,980</b>					19,39 per 1000 penduduk 0,01 per 1000 penduduk 25 per 100 ribu penduduk 0,01 persen 6,30 persen 13,40 persen 4,4 persen 21,5 per 100 ribu penduduk 0,1 per 10 ribu penduduk 13,1 per 100 ribu penduduk 1 Tahun	<b>1,254,365,000</b>		
1 02 02 2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	persen		persen	100 persen	<b>391,254,980</b>					100 persen	<b>1,254,365,000</b>		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Terlaksananya operasional puskesmas lubuk ulang aling				0 Dokumen 1 Tahun	391,254,980	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Puskesmas Lubuk Ulang Aling	0 Dokumen 1 Tahun	1,254,365,000	Dinas Kesehatan	
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						<b>23,386,962,460</b>						<b>27,839,023,223</b>		
1 02 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Layanan Operasional Kantor	Persen		Persen	100 Persen	<b>23,136,962,460</b>					100 Persen	<b>20,500,000,000</b>		
1 02 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>23,136,962,460</b>					100 Persen	<b>20,500,000,000</b>		
1 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dibayarkan Gaji dan Tunjangan				230 Orang/bulan	22,044,015,560		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Tenaga ASN	230 Orang/bulan	19,420,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokter Referral yang dibayarkan honorinya Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan honorinya				427 Kunjungan 10 Orang	1,092,946,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Tenaga ASN	427 Kunjungan 10 Orang	1,080,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
1 02 02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Cakupan Layanan RSUD Menuju Akreditasi Paripurna	Persen		Persen	80 Persen	<b>250,000,000</b>						80 Persen	<b>7,339,023,223</b>	
1 02 02 2.01	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rumah Sakit	Persen		Persen	80 Persen	<b>250,000,000</b>						80 Persen	<b>7,339,023,223</b>	
1 02 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan yang dikalibrasi				220 Unit	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Alat Kesehatan Rumah Sakit	220 Unit	250,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						<b>44,887,400,000</b>							<b>43,160,976,777</b>	
1 02 02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Cakupan Layanan RSUD Menuju Akreditasi Paripurna	Persen		Persen	80 Persen	<b>44,887,400,000</b>						80 Persen	<b>43,160,976,777</b>	
1 02 02 2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah di Rumah Sakit	Tahun		Tahun	1 Tahun	<b>44,887,400,000</b>						1 Tahun	<b>43,160,976,777</b>	
1 02 02 2.02 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Tersedianya Biaya Operasional Pelayanan Penunjang dan Pelayanan BLUD Rumah Sakit				1 Tahun	44,887,400,000		Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Masyarakat Umum, Khususnya Masyarakat Kabupaten Solok Selatan	1 Tahun	43,160,976,777	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 03	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>						<b>155,857,916,498</b>							<b>121,180,986,160</b>	
1 03 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah	%		%	100 %	<b>14,080,647,133</b>						100 %	<b>12,971,000,000</b>	
1 03 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Presentase tertib administrasi keuangan	%		%	100 %	<b>7,369,383,428</b>						100 %	<b>8,440,289,451</b>	
1 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				68 Orang/bulan	7,017,883,428		Dana Perimbangan		Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertahanan	68 Orang/bulan	7,737,289,451	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertahanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pendukung administrasi kantor Jumlah tenaga pengelola keuangan yang dibayarkan honorariumnya				30 Orang 13 Orang	351,500,000		Dana Perimbangan		Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertahanan	30 Orang 13 Orang	693,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
<b>1.03.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase tertib Administrasi umum Perangkat daerah	%		%	100 %	<b>258,894,955</b>						100 %	<b>1,016,000,000</b>	
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Item	4,988,201		Dana Perimbangan		Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan	5 Item	10,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket 2 Item	38,923,904		Dana Perimbangan		Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan	2 Paket 2 Item	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Item	4,991,850		Dana Perimbangan		Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan	10 Item	15,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan yang disediakan Jumlah penggandaan yang disediakan				9 Item 55000 Lembar	30,000,000		Dana Perimbangan		Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan	9 Item 55000 Lembar	35,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	4,995,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan	10 Laporan	6,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jamuan makan dan minum rapat serta tamu Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				430 Porsi 240 Laporan 0 Laporan	174,996,000		Dana Perimbangan		Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan	430 Porsi 240 Laporan 0 Laporan	800,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
<b>1.03.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	<b>5,644,956,500</b>						100 %	<b>2,579,010,549</b>	
1.03.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				4 Unit	5,644,956,500		Dana Perimbangan		Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan	4 Unit	2,079,010,549	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
1	03	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	%		%	100 %	<b>47,479,750</b>					100 %	<b>57,500,000</b>		
1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				250 Buah	2,500,000		Dana Perimbangan		Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan	250 Buah	5,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bandwidth yang terpakai Jumlah daya listrik yang terpakai Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah volume air yang terpakai				300 MBPS 8400 KWH 8400 KWH/MBPS/M3 880 M3	34,999,750		Dana Perimbangan		Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan	300 MBPS 8400 KWH 8400 KWH/MBPS/M3 880 M3	36,750,000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Unit	9,980,000		Dana Perimbangan		Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan	25 Unit	15,750,000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	%		%	100 %	<b>759,932,500</b>						100 %	<b>768,700,000</b>	
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional				8 Unit	259,940,000		Dana Perimbangan		Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan	8 Unit	348,700,000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				10 Unit	399,992,500		Dana Perimbangan		Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan	10 Unit	220,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	100,000,000		Dana Perimbangan		Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan	2 Unit	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan kabupaten	0 %		0 %	29.13 0 40 %	<b>3,673,419,800</b>					29.13 0 40 %	<b>10,737,500,000</b>		
1 03 02 2.01	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Luas Wilayah Sungai yang di kelola	Ha		Ha	360 Ha	<b>1,260,179,800</b>					360 Ha	<b>2,450,000,000</b>		
1 03 02 2.01 01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				1 Dokumen	99,999,800		Dana Perimbangan		Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Jaringan Irigasi Kabupaten	1 Dokumen	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1 03 02 2.01 10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				3 KM	807,680,000		Dana Perimbangan		Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Jaringan Irigasi Kabupaten	3 KM	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1 03 02 2.01 46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				2.5 KM	352,500,000		Dana Perimbangan		Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Jaringan Irigasi Kabupaten	2.5 KM	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1 03 02 2.02	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Jaringan Irigasi kondisi baik	%		%	30.02 %	<b>2,413,240,000</b>						30.02 %	<b>8,287,500,000</b>	
1 03 02 2.02 01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun				2 Dokumen	150,000,000		Dana Perimbangan		Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Jaringan Irigasi Kabupaten	2 Dokumen	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1 03 02 2.02 03	Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendungan yang Dibangun				1 Bendungan	501,440,000		Dana Perimbangan		Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Jaringan Irigasi Kabupaten	1 Bendungan	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1 03 02 2.02 08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				400 M	909,020,000		Dana Perimbangan		Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Jaringan Irigasi Kabupaten	400 M	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 02 2.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				300 M	502,780,000		Dana Perimbangan Dana Perimbangan		Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Jaringan Irigasi Kabupaten	300 M	5,537,500,000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1 03 02 2.02 22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara				600 Ha	350,000,000		Dana Perimbangan		Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Jaringan Irigasi Kabupaten	600 Ha	600,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1 03 03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	Akses air minum layak	%		%	82.5 %	<b>121,249,900</b>						82.5 %	<b>8,981,875,000</b>	
1 03 03 2.01	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase SPAM yang dikelola	%		%	100 %	<b>121,249,900</b>						100 %	<b>8,981,875,000</b>	
1 03 03 2.01 05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu				800 SR	101,250,000		Dana Perimbangan		Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Jaringan Air Minum Kabupaten	800 SR	1,100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1 03 03 2.01 06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Tersedianya air bersih yang layak				0 800 SR	19,999,900		Dana Perimbangan Dana Perimbangan		Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Jaringan Air Minum Kabupaten	0 800 SR	2,958,375,000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1 03 05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	Akses sanitasi layak	%		%	55.11 %	<b>321,440,000</b>						55.11 %	<b>3,651,875,000</b>	
1 03 05 2.01	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase jumlah MCK yang di kelola	%		%	55 %	<b>321,440,000</b>						55 %	<b>3,651,875,000</b>	
1 03 05 2.01 03	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota				2 Unit	20,000,000		Dana Perimbangan Dana Perimbangan		Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Pengelolaan Air Limbah Kabupaten	2 Unit	2,574,975,000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1 03 05 2.01 06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik				5 MCK	301,440,000		Dana Perimbangan		Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Pengelolaan Air Limbah Kabupaten	5 MCK	1,076,900,000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1 03 06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	Presentase sistem drainase yang berfungsi dengan baik	%		%	30 %	<b>3,511,270,000</b>						30 %	<b>7,700,000,000</b>	
1 03 06 2.01	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Pesentase panjang sistem drainase yang dikelolal	%		%	1 %	<b>3,511,270,000</b>						1 %	<b>7,700,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 06 2.01 08	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan				7 KM	3,106,270,000		Dana Perimbangan		Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Pengelolaan dan Pengembangan Drainase Kabupaten	7 KM	3,300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1 03 06 2.01 13	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan				0.5 M	405,000,000		Dana Perimbangan		Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Pengelolaan dan Pengembangan Drainase Kabupaten	0.5 M	1,100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1 03 08	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	Persentase Bangunan gedung pemerintah yang layak fungsi	%		%	3.75 %	<b>22,604,960,000</b>						3.75 %	<b>2,000,000,000</b>	
1 03 08 2.01	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	Jumlah Bangunan gedung pemerintah yang memiliki sertifikat laik fungsi	Unit		Unit	1 Unit	<b>22,604,960,000</b>						1 Unit	<b>2,000,000,000</b>	
1 03 08 2.01 01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG				4 Dokumen	99,750,000		Dana Perimbangan		Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Bangunan Gedung Kabupaten	4 Dokumen	550,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1 03 08 2.01 02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				3 Unit	22,505,210,000		Dana Perimbangan		Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Bangunan Gedung Kabupaten	3 Unit	1,200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1 03 10	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	Tingkat kemantapan jalan kabupaten Tingkat kemantapan jembatan kabupaten	% %		% %	47.1 % 82 %	<b>111,314,936,665</b>						47.1 % 82 %	<b>74,771,875,000</b>	
1 03 10 2.01	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Jembatan Kabupaten kabupaten dalam kondisi baik dan sedang Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi baik dan sedang	Unit Km		Unit Km	554.9 Unit 207 Km	<b>111,314,936,665</b>						554.9 Unit 207 Km	<b>74,771,875,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 10 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian				10 Dokumen	100,000,000		Dana Perimbangan		Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Jalan Kabupaten	10 Dokumen	600,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1 03 10 2.01 04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan				2 Dokumen	405,320,000		Dana Perimbangan		Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Jalan Kabupaten	2 Dokumen	650,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1 03 10 2.01 08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan				33.17 KM	104,239,143,165		Dana Perimbangan Bantuan Keuangan			Jalan Kabupaten	33.17 KM	39,021,875,000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1 03 10 2.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				32 KM	1,000,000,000		Dana Perimbangan		Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Jalan Kabupaten	32 KM	2,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1 03 10 2.01 12	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan Yang dibangun Panjang Jembatan yang Dibangun				4 Unit 0 M	4,506,280,000		Dana Perimbangan Dana Perimbangan		Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Jalan Kabupaten	4 Unit 0 M	20,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1 03 10 2.01 18	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang di rehab Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi				4 Unit 0 M	353,840,000		Dana Perimbangan		Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Jalan Kabupaten	4 Unit 0 M	2,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1 03 10 2.01 19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang direhab secara rutin Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				20 Unit 0 M	710,353,500		Dana Perimbangan		Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Jalan Kabupaten	20 Unit 0 M	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1 03 11	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	Persentase Sumberdaya Manusia Jasa Konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi	%		%	100 %	<b>15,000,000</b>						100 %	<b>41,861,160</b>	
1 03 11 2.02	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terselenggranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten	Laporan		Laporan	1 Laporan	<b>15,000,000</b>						1 Laporan	<b>41,861,160</b>	
1 03 11 2.02 07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan				1 Dokumen	15,000,000		Dana Perimbangan		Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Penyelenggara an Jasa Konstruksi Kabupaten	1 Dokumen	16,861,160	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1 03 12	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	Presentase kesesuaian pemamfaatan ruang dengan rencana tata ruang	%		%	100 %	<b>214,993,000</b>						100 %	<b>325,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 12 2.01	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Dokumen tata ruang yang telah ditetapkan dengan peraturan bupati	dokumen		dokumen	0 dokumen	<b>174,993,000</b>						0 dokumen	<b>245,000,000</b>	
1 03 12 2.01 01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	25,000,000		Dana Perimbangan		Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Penataan Ruang Kabupaten	1 Dokumen	38,700,000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1 03 12 2.01 02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	149,993,000		Dana Perimbangan		Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Penataan Ruang Kabupaten	1 Dokumen	170,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1 03 12 2.03	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah lporan koodinasi dan sinkronisasi pemamfaatan ruang daerah kabupaten	Laporan		Laporan	1 Laporan	<b>40,000,000</b>						1 Laporan	<b>50,000,000</b>	
1 03 12 2.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah Jumlah rekomendasi pemfaatan ruang daerah yang dikeluarkan oleh forum penataan ruang daerah				0 Dokumen 10 Rekomendasi	40,000,000		Dana Perimbangan		Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Penataan Ruang Kabupaten	0 Dokumen 10 Rekomendasi	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
2 10	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>							<b>5,007,670,000</b>						<b>5,300,000,000</b>	
2 10 05	<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	Persentase masalah ganti kerugian dan santunan tanah yang difasilitasi dapat digunakan untuk pembangunan	%		%	100 %	<b>5,007,670,000</b>						100 %	<b>5,250,000,000</b>	
2 10 05 2.01	<b>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah dokumen permasalahan pertanahan yang telah dilaksanakan	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	<b>5,007,670,000</b>						3 Dokumen	<b>5,250,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 10 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen penyerahan hasil pengadaaan tanah Jumlah dokumen perencanaan tanah Luas Pengadaaan tanah untuk pembangunan				0 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Ha	5,007,670,000		Dana Perimbangan		Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Pembebasan Lahan Kabupaten	0 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Ha	5,222,500,000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 04	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>						<b>18,156,393,418</b>						<b>18,536,625,000</b>		
1 04 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>4,019,474,418</b>						100 Persen	<b>4,559,000,000</b>	
1 04 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>3,491,991,237</b>						100 Persen	<b>3,820,000,000</b>	
1 04 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan				60 Orang	3,244,631,237	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	ASN di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	60 Orang	3,655,286,500	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
1 04 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan honoronya				21 Orang	247,360,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	ASN di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	21 Orang	164,713,500	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
1 04 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>244,983,881</b>						100 Persen	<b>386,000,000</b>	
1 04 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peralatan listrik yang disediakan				20 Jenis	4,997,281	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	ASN Dinas Perumahan kawasan permukiman dan lingkungan Hidup	20 Jenis	15,000,000	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup





**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 04 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemakaian jasa listrik				28000 kwh	30,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	ASN Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan hidup	28000 kwh	30,000,000	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
1 04 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki				29 unit	10,000,000		Dana Perimbangan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	ASN Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan hidup	29 unit	10,000,000	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
1 04 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Persen		Persen	100 Persen	<b>239,999,300</b>						100 Persen	<b>310,000,000</b>	
1 04 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara				15 unit	209,999,300	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	ASN Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan Lingkungan Hidup	15 unit	210,000,000	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
1 04 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara				2 Unit	30,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	ASN Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan Lingkungan Hidup	2 Unit	100,000,000	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
1 04 02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	Persentase ketersediaan Rumah bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah Kabupaten/kota	Persen		Persen	100 Persen	<b>149,622,000</b>						100 Persen	<b>500,000,000</b>	
1 04 02 2.03	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit		Unit	4 Unit	<b>149,622,000</b>						4 Unit	<b>450,000,000</b>	
1 04 02 2.03 01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah bagi korban bencana yang direhabilitasi				4 unit	149,622,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Masyarakat Terdampak Bencana di kabupaten Solok Selatan	4 unit	165,000,000	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
1 04 03	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha Kabupaten/Kota yang ditangani	Persen		Persen	100 Persen	<b>350,000,000</b>						100 Persen	<b>2,100,625,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 04 03 2.01	<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</b>	Jumlah Regulasi yang diterbitkan Persentase Perbaikan RTLH dan PSU di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha	Dokumen Persen		Dokumen Persen	1 Dokumen 20 Persen	<b>350,000,000</b>						1 Dokumen 20 Persen	<b>25,000,000</b>	
1 04 03 2.01 02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun				1 Dokumen	350,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Masyarakat Kabupaten Solok Selatan	1 Dokumen	25,000,000	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
1 04 04	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	Persentase Rumah Layak Huni	Persen		Persen	91,50 Persen	<b>1,229,737,000</b>						91,50 Persen	<b>357,000,000</b>	
1 04 04 2.01	<b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>	Berkurangnya jumlah unit RTLH	Unit		Unit	0 Unit	<b>1,229,737,000</b>						0 Unit	<b>357,000,000</b>	
1 04 04 2.01 01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah RTLH yang diperbaiki di luar kawasan kumuh				40 unit	1,229,737,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Masyarakat Kabupaten Solok Selatan	40 unit	357,000,000	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
1 04 05	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	% Rumah yang mendapatkan akses PSU	Persen		Persen	1.25 Persen	<b>12,407,560,000</b>						1.25 Persen	<b>11,000,000,000</b>	
1 04 05 2.01	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	Jumlah rumah yang sudah dilengkapi PSU	Unit		Unit	500 Unit	<b>12,407,560,000</b>						500 Unit	<b>11,000,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 04 05 2.01 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian Jumlah LPJU yang dimeterisasi Jumlah LPJU yang dipelihara Jumlah Mobil Crane PJU Jumlah penyediaan LPJU panjang Drainase lingkung yang dibangun Panjang Jalan Lingkung yang dibangun Sarana Prasarana Persampahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Taman Kabupaten yang dibangun Taman Kabupaten yang dipelihara Tegihan Rek Listrik LPJU yang dibayar				0 Lokasi 100 unit 100 unit 0 unit 50 unit 1000 Meter 3000 Meter 200 unit 5 Lokasi 5 lokasi 100 Kwh	12,407,560,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Masyarakat kabupaten Solok Selatan	0 Lokasi 100 unit 100 unit 0 unit 50 unit 1000 Meter 3000 Meter 200 unit 5 Lokasi 5 lokasi 100 Kwh	10,600,000,000	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
2 11	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>						<b>2,849,298,201</b>							<b>3,659,305,800</b>	
2 11 03	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	IKA IKTL IKU	Indeks Indeks Indeks		Indeks Indeks Indeks	67,59 Indeks 75,64 Indeks 93,26 Indeks	<b>358,436,950</b>						67,59 Indeks 75,64 Indeks 93,26 Indeks	<b>390,000,000</b>	
2 11 03 2.01	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	Persentase objek yang teridentifikasi pencemaran dan/atau perusakan terhadap lingkungan hidup yang ditangani Terlaksananya pemulihan fungsi lingkungan hidup	Persen Dokumen		Persen Dokumen	100 Persen 0 Dokumen	<b>335,846,950</b>						100 Persen 0 Dokumen	<b>340,000,000</b>	
2 11 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Pemantauan Kualitas Air Jumlah Pemantauan Kualitas Udara Jumlah Pemantaun Kualitas Tanah				50 Titik Sampel 0 Titik 21 Titik Sampel	163,689,400	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Usaha/Kegiata n di Kabupaten Solok Selatan	50 Titik Sampel 0 Titik 21 Titik Sampel	215,000,000	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
															Nasional					Daerah	
2	11	03	2.01	02		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Pengembangan Teknologi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim				15 kelompok	22,664,250	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Usaha/Kegiatan di Kabupaten Solok Selatan	15 kelompok	25,000,000	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup	
2	11	03	2.01	03		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah laboratorium lingkungan hidup yang dikelola				1 UPT	149,493,300	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Usaha/Kegiatan di Kabupaten Solok Selatan	1 UPT	100,000,000	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup	
2	11	03	2.02			<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	% Ketersediaan informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup % pengisolasian dan penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persen Persen	Persen Persen		80 Persen 75 Persen	<b>22,590,000</b>						80 Persen 75 Persen	<b>25,000,000</b>		
2	11	03	2.02	01		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah dokumen lingkungan hidup yang dipublikasikan				1 Dokumen	22,590,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Usaha/Kegiatan yang ada di Kabupaten Solok Selatan	1 Dokumen	25,000,000	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup	
2	11	05				<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	Persentase Limbah B3 yang terkelola usaha dan/atau perusahaan	Persen	Persen		0100 Persen	<b>25,000,000</b>						0100 Persen	<b>26,163,225</b>		
2	11	05	2.01			<b>Penyimpanan sementara Limbah B3</b>	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang melakukan penyimpanan sementara limbah B3 sesuai persyaratan administrasi dan teknis	Usaha/Kegiatan	Usaha/Kegiatan		10 Usaha/Kegiatan	<b>25,000,000</b>							10 Usaha/Kegiatan	<b>26,163,225</b>	
2	11	05	2.01	02		Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Usaha Kegiatan yang diverifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara LB3				10 usaha/kegiatan	25,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Kelompok Usaha/Kegiatan yang ada di Kabupaten Solok Selatan	10 usaha/kegiatan	26,163,225	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persen		Persen	100 Persen	48,755,000						100 Persen	104,652,900	
2 11 06 2.01	<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat implementasi PPLH	usaha/kegiatan		usaha/kegiatan	5 usaha/kegiatan	48,755,000						5 usaha/kegiatan	104,652,900	
2 11 06 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi atau izin lingkungan yang dikeluarkan				3 Dokumen	15,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	usaha dan/atau kegiatan yang ada dikabupaten solok selatan	3 Dokumen	25,000,000	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
2 11 06 2.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha kegiatan yang memiliki izin lingkungan yang terawasi				7 Usaha/Kegiatan	33,755,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	usaha dan/atau kegiatan yang ada dikabupaten solok selatan	7 Usaha/Kegiatan	54,652,900	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
2 11 07	<b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>	% Keberadaan MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang diakui 0	Persen		Persen	100 Persen	22,780,000						100 Persen	26,163,225	
2 11 07 2.01	<b>Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH</b>	Jumlah Pengakuan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	kelompok masyarakat		kelompok masyarakat	4 kelompok masyarakat	22,780,000						4 kelompok masyarakat	26,163,225	
2 11 07 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH				1 Dokumen	22,780,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	kelompok masyarakat yang ada di kabupaten solok selatan	1 Dokumen	26,163,225	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
2 11 08	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	Persentase Kader Lingkungan yang mendapat pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup	Persen		Persen	53 Persen	20,904,500						53 Persen	60,000,000	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 08 2.01	<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	kelompok masyarakat		kelompok masyarakat	25 kelompok masyarakat	20,904,500						25 kelompok masyarakat	60,000,000	
2 11 08 2.01 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat Peduli Lingkungan				6 kelompok masyarakat	20,904,500	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Kelompok masyarakat di kabupaten solok selatan	6 kelompok masyarakat	30,000,000	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup
2 11 09	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diterima Jumlah Penghargaan LH	Persen		Persen	50 Persen	25,000,000						50 Persen	26,163,225	
2 11 09 2.01	<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Penghargaan lingkungan hidup yang diterima	penghargaan		penghargaan	12 penghargaan	25,000,000						12 penghargaan	26,163,225	
2 11 09 2.01 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	jumlah perorangan atau kelompok yang mengikuti penilaian kalpataru jumlah perusahaan yang mengikuti penilaian proper jumlah sekolah yang mengikuti penilaian adiwiyata skala provinsi dan nasional				2 kelompok masyarakat 5 perusahaan 5 sekolah	25,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	sekolah/perusahaan/kelompok masyarakat	2 kelompok masyarakat 5 perusahaan 5 sekolah	26,163,225	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup
2 11 10	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Persentase tindak lanjut aduan masyarakat/penegakan hukum lingkungan	Persen		Persen	100 Persen	33,733,400						100 Persen	26,163,225	
2 11 10 2.01	<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	Jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH	aduan		aduan	2 aduan	33,733,400						2 aduan	26,163,225	
2 11 10 2.01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota				2 Laporan Pengaduan	33,733,400	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup	2 Laporan Pengaduan	26,163,225	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup
2 11 11	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	Cakupan Layanan Persampahan	Persen		Persen	80 Persen	2,314,688,351						80 Persen	3,000,000,000	
2 11 11 2.01	<b>Pengelolaan Sampah</b>	Persentase pengurangan sampah Persentase timbulan sampah yang ditangani	Persen Persen		Persen Persen	5 Persen 40 Persen	2,314,688,351						5 Persen 40 Persen	3,000,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 11 2.01 02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Pengurangan sampah di TPS 3R Jumlah Pengurangan timbunan sampah di Nagari Jumlah Produk ramah lingkungan yang teregister				500 M3 3100 M3 10 Produk	25,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Sampah di kabupaten solok selatan	500 M3 3100 M3 10 Produk	75,000,000	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
2 11 11 2.01 03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Pengurangan sampah di TPA Jumlah timbunan sampah yang ditangani				6000 M3 16425 M3	2,066,931,151	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Sampah di kabupaten solok selatan	6000 M3 16425 M3	2,125,000,000	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
2 11 11 2.01 04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kelompok Peduli Sampah aktif Pelatihan persampahan				5 kelompok masyarakat 7 kelompok masyarakat	75,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Sampah di kabupaten solok selatan	5 kelompok masyarakat 7 kelompok masyarakat	150,000,000	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
2 11 11 2.01 07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan				5 Unit	147,757,200	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Sampah di kabupaten solok selatan	5 Unit	650,000,000	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman , dan Lingkungan Hidup
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 05	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>						<b>9,062,615,431</b>						<b>11,356,618,114</b>		
1 05 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>6,812,616,169</b>						100 Persen	<b>6,906,618,114</b>	
1 05 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Jasa Administrasi Daerah Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Umum Kantor	Persen persen Persen Persen		Persen persen Persen Persen	100 Persen 100 persen 100 Persen 100 Persen	<b>6,412,818,113</b>						100 Persen 100 persen 100 Persen 100 Persen	<b>6,425,618,114</b>	
1 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya				64 Orang/bulan	6,308,058,113	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	ASN Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	64 Orang/bulan	6,308,058,114	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
1	05	01	2.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan honorinya				12 orang	104,760,000		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	ASN Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	12 orang	112,560,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.06			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Jasa Administrasi Umum Kantor	Persen persen		Persen persen	100 Persen 100 persen	<b>187,798,635</b>						100 Persen 100 persen	<b>244,000,000</b>	
1	05	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peralatan Listrik yang disediakan				10 Jenis	4,999,275		Dana Perimbangan	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan. Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	10 Jenis	5,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Disediakan				15 Jenis	25,000,000		Dana Perimbangan	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	15 Jenis	30,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Jenis	4,999,360		Dana Perimbangan	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan. Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	10 Jenis	5,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bahan Cetak yang Disediakan Jumlah penggandaan yang disediakan				5 Jenis 50500 Lembar	27,800,000		Dana Perimbangan	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5 Jenis 50500 Lembar	24,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makan minum rapat yang disediakan Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan				6500 Kotak 5 Kali	125,000,000		Dana Perimbangan	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	6500 Kotak 5 Kali	180,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.07			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Mebeleur yang disediakan Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia	Unit Persen		Unit Persen	20 Unit 100 Persen	<b>19,999,764</b>						20 Unit 100 Persen	<b>30,000,000</b>	
1	05	01	2.07	05		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan				20 Unit	19,999,764		Dana Perimbangan	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	20 Unit	30,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.08			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia	Persen		Persen	100 Persen	<b>32,000,000</b>						100 Persen	<b>32,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
															Nasional					Daerah	
1	05	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan				200 Buah	2,000,000		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	200 Buah	2,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	05	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemakaian beban air Jumlah pemakaian beban listrik Jumlah pemakaian beban telpon/internet				2400 kubik 8000 kwh 1200 Gb	20,000,000		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2400 kubik 8000 kwh 1200 Gb	20,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	05	01	2.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor				5 Unit	10,000,000		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5 Unit	10,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	05	01	2.09			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Persen	Persen		100 Persen	<b>159,999,657</b>						100 Persen	<b>160,000,000</b>		
1	05	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya				15 Unit	140,000,000		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Kendaraan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	15 Unit	140,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	05	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang terpelihara				1 Unit	19,999,657		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Kendaraan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1 Unit	20,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	05	02				<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Cakupan penegakkan perda dan perkara	Persen	Persen		100 Persen	<b>1,059,999,262</b>							100 Persen	<b>1,250,000,000</b>	
1	05	02	2.01			<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum Linmas	Persen	Persen		100 Persen	<b>979,999,262</b>							100 Persen	<b>1,170,000,000</b>	
1	05	02	2.01	01		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Anggota Satpol-PP yang melaksanakan Piket pada tempat-tempat penting dan strategis Jumlah Patroli Wilayah/Patroli Rutin Penertiban dan Operasi Gabungan Jumlah Pengawasan dan Pengamanan Kepala Daerah serta Pejabat lainnya dan Pengamanan kegiatan dan Hari-hari Nasional				70 orang 120 Kali 60 Kali	719,999,900		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Seluruh Masyarakat Kabupaten Solok Selatan	70 orang 120 Kali 60 Kali	700,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
1	05	02	2.01	02		Penindakan Atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Cakupan Penanganan Pelanggaran Perda/Perkada				45 Kasus	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Seluruh Masyarakat Kabupaten Solok Selatan	45 Kasus	115,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	02	2.01	03		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Dokumen Kerja Sama Penyelenggaraan Trantibum Linmas				20 Kali	70,000,000		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Seluruh Masyarakat Kabupaten Solok Selatan	20 Kali	90,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	02	2.01	04		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Satlinmas yang terbentuk				47 orang	49,999,570		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Seluruh Masyarakat Kabupaten Solok Selatan	47 orang	100,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	02	2.01	05		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Terlaksananya Pelatihan Anggota Satpol-PP Terlaksananya Pembinaan Jabatan Fungsional Satpol-PP				40 Orang 7 Orang	39,999,792		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Seluruh Masyarakat Kabupaten Solok Selatan	40 Orang 7 Orang	70,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	02	2.01	06		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Penanganan Pelanggaran Perda/Perkada Jumlah Operasi Gabungan Tim SK-4				100 Persen 6 Kali	50,000,000		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Seluruh Masyarakat Kabupaten Solok Selatan	100 Persen 6 Kali	30,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>			<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	Cakupan Penanganan Pelanggaran Perda/Perkada yang terselesaikan	Persen	Persen		100 Persen	<b>50,000,000</b>						100 Persen	<b>45,000,000</b>	
1	05	02	2.02	02		Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda/Perkada				20 Kasus	50,000,000		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Seluruh Masyarakat Kabupaten Solok Selatan	20 Kasus	45,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>02</b>	<b>2.03</b>			<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Penyidik Persentase Pembinaan PPNS	Orang Persen	Orang Persen		1 Orang 100 Persen	<b>30,000,000</b>						1 Orang 100 Persen	<b>35,000,000</b>	
1	05	02	2.03	01		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Penyidik				1 Orang	30,000,000		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	1 Orang	35,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>04</b>				<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	Capaian Waktu Tanggap (Response Time)	Persen	Persen		54,85 Persen	<b>1,190,000,000</b>						54,85 Persen	<b>3,200,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1 05 04 2.01	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Capaian Waktu Tanggap (Response Time)	Persen		Persen	100 Persen	<b>1,165,000,000</b>						100 Persen	<b>3,140,000,000</b>		
1 05 04 2.01 01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Piket Damkar Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran				36 Orang 5 Unit 54.85 Persen	1,125,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Masyarakat Kabupaten Solok Selatan	36 Orang 5 Unit 54.85 Persen	3,000,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1 05 04 2.01 03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Penyelamatan dan Evakuasi Korban dan Non Kebakaran				15 Kali	40,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Masyarakat Kabupaten Solok Selatan	15 Kali	40,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1 05 04 2.04	<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>	Cakupan Layanan Pemadam Kebakaran	Persen		Persen	100 Persen	<b>25,000,000</b>						100 Persen	<b>60,000,000</b>		
1 05 04 2.04 01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Peserta Sosialisasi				50 Orang	25,000,000		Dana Perimbangan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Jumlah Relawan Kebakaran	50 Orang	60,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
1 05	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>							<b>6,059,647,791</b>							<b>5,471,140,000</b>	
1 05 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>4,205,345,767</b>							100 Persen	<b>3,271,140,000</b>	
1 05 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>3,496,849,044</b>							100 Persen	<b>2,423,140,000</b>	
1 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan				28 Orang	3,379,869,044	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	BPBD	28 Orang	2,294,640,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan honor				13 Orang	116,980,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	BPBD	13 Orang	121,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>209,998,768</b>						100 Persen	<b>270,000,000</b>	
1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peralatan listrik yang disediakan				6 Jenis	4,999,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	bpbd	6 Jenis	7,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan				10 Jenis	27,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	bpbd	10 Jenis	30,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Peralatan rumah tangga yang disediakan				0 Paket 10 Jenis	2,999,968	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	bpbd	0 Paket 10 Jenis	8,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bahan cetak yang disediakan Jumlah penggandaan yang disediakan				9 Jenis 31075 Lembar	20,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	bpbd	9 Jenis 31075 Lembar	24,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum tamu yang disediakan				100 kotak	4,999,800	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	bpbd	100 kotak	5,400,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah makan minum rapat yang disediakan Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan				0 Laporan 200 Kotak 100 Kali	150,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	bpbd	0 Laporan 200 Kotak 100 Kali	194,600,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang yang tersedia	Persen		Persen	100 Persen	<b>38,500,000</b>						100 Persen	<b>39,500,000</b>	
1 05 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai yang tersedia				0 Laporan 250 Buah	2,500,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	BPBD	0 Laporan 250 Buah	3,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
															Nasional					Daerah		
1	05	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bandwith yang terpakai Jumlah pemakaian air Jumlah pemakaian jasa listrik				50 Gb 880 M3 11200 Kwh	36,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	BPBD	50 Gb 880 M3 11200 Kwh	36,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1	05	01	2.09			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Barang Milik Daerah yang yang terpelihara	Persen		Persen	100 Persen	<b>459,997,955</b>							100 Persen	<b>450,000,000</b>		
1	05	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang yang terpelihara Jumlah perizinan kendaraan dinas/operasional				18 Unit 18 Unit	229,999,903	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	BPBD	18 Unit 18 Unit	235,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1	05	01	2.09	03		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat berat yang terpelihara				1 Unit	149,998,500	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	BPBD	1 Unit	150,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1	05	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang terpelihara				10 Unit	30,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	BPBD	10 Unit	35,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1	05	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara				1 Unit	49,999,552	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	BPBD	1 Unit	30,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1	05	03				<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	% daerah pasca bencana yang ditindaklanjuti penanganannya % jumlah masyarakat yang memperoleh layanan informasi bencana % penduduk terdampak bencana yang ditangani	Persen Persen Persen		Persen Persen Persen	80 Persen 37 Persen 100 Persen	<b>1,854,302,024</b>							80 Persen 37 Persen 100 Persen	<b>2,200,000,000</b>		
1	05	03	2.01			<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	Persentase (%) jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Persen		Persen	37 Persen	<b>64,999,998</b>								37 Persen	<b>100,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 03 2.01 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya Jumlah penduduk yang memperoleh informasi rawan bencana				0 Orang 1000 Orang	64,999,998	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Penduduk Kabupaten Solok Selatan	0 Orang 1000 Orang	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.02	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	% penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	Persen		Persen	0.1 Persen	<b>1,258,075,625</b>						0.1 Persen	<b>1,275,000,000</b>	
1 05 03 2.02 01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang disusun				1 Dokumen	492,387,299	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Penduduk Kabupaten Solok Selatan	1 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.02 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk yang memperoleh pelatihan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana				50 Orang 0 Orang	54,816,250	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Penduduk Kabupaten Solok Selatan	50 Orang 0 Orang	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.02 03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Petugas Pusdalops PB yang difasilitasi Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan				0 Dokumen 15 Orang 2 Item	399,407,994	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Penduduk Kabupaten Solok Selatan	0 Dokumen 15 Orang 2 Item	350,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1 05 03 2.02 06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Destana yang dibentuk Jumlah Destana yang dibina Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Jumlah KSB yang dibina				1 Destana 6 Destana 0 Kawasan 10 KSB	122,499,900	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Penduduk Kabupaten Solok Selatan	1 Destana 6 Destana 0 Kawasan 10 KSB	150,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 03 2.02 07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan/Pengawasan Pekerjaan Rehab Rekon yang disusun Jumlah laporan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana				0 0 5 Laporan	120,439,102	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Penduduk Kabupaten Solok Selatan	0 0 5 Laporan	250,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 03 2.02 08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga TRC Kabupaten yang dibina/dibentuk				35 Orang	68,525,080	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Penduduk Kabupaten Solok Selatan	35 Orang	150,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 03 2.03	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	% penduduk terdampak bencana yang ditangani	Persen		Persen	100 Persen	<b>531,226,401</b>						100 Persen	<b>775,000,000</b>		
1 05 03 2.03 02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase kecepatan respon kurang 24 jam untuk setiap status darurat bencana				100 Persentase	286,226,606	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Penduduk Kabupaten Solok Selatan	100 Persentase	350,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 03 2.03 03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana				100 Persentase	44,999,796	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Penduduk Kabupaten Solok Selatan	100 Persentase	75,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 03 2.03 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan logistik untuk penyelamatan dan evakuasi korban bencana Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				5 Item 0 Orang	199,999,999	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Penduduk Kabupaten Solok Selatan	5 Item 0 Orang	350,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
1 06	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>							<b>9,315,096,557</b>							<b>4,113,000,544</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
1	06	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Layanan Operasional Kantor	%		%	100 %	<b>2,999,097,107</b>					100 %	<b>3,498,000,544</b>		
1	06	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan perangkat Daerah	%		%	100 %	<b>2,573,168,909</b>					100 %	<b>2,936,500,000</b>		
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Dibayarkan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang 0 Orang/bulan	2,465,288,909	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	ASN DINSOSPMD	29 Orang 0 Orang/bulan	2,826,500,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Tenaga Admiinistrasi Keuangan yang Dibayarkan Honorinya				0 Dokumen 12 Orang	107,880,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	ASN DINSOSPMD	0 Dokumen 12 Orang	110,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	% Pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	<b>210,529,108</b>					100 %	<b>260,788,972</b>		
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Peralatan Listrik yang Disediakan				0 Paket 10 Jenis	4,987,098	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0 Paket 10 Jenis	5,099,400	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Jenis 0 Paket	25,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia. Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20 Jenis 0 Paket	24,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket 12 Jenis	4,990,510	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0 Paket 12 Jenis	4,589,572	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
1	06	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bahan Cetak yang Disediakan Jumlah Penggandaan yang Disediakan				6 Jenist 22000 Lembar	20,569,500	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6 Jenist 22000 Lembar	20,100,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan dan Minum Tamu yang Disediakan				200 Kotak	4,995,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	200 Kotak	7,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makan dan Minum yang Disediakan Jumlah Rakor dan Konsultasi yang Dilaksanakan				450 Kotak 200 Kali	149,987,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	450 Kotak 200 Kali	200,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	% Cakupan Layanan Perkantoran	%	%		100 %	<b>24,500,000</b>						100 %	<b>13,700,000</b>	
1	06	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang Disediakan				300 Buah	3,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	300 Buah	3,500,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pemakaian Air Jumlah Pemakaian Internet Jumlah Pemakaian Jasa Listrik				1000 Kubik 6 Giga 5217 KWH	16,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1000 Kubik 6 Giga 5217 KWH	4,200,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	01	2.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20 Unit	5,500,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20 Unit	6,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	% Barang Milik Daerah yang Terpelihara	%	%		100 %	<b>190,899,090</b>						100 %	<b>205,401,572</b>	
1	06	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional				20 Unit 20 Unit	170,900,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Barang Milik Daerah	20 Unit 20 Unit	185,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor/Bangunan lainnya yang dipelihara				1 Unit	19,999,090	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Barang Milik Daerah	1 Unit	20,401,572	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 06 02	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	Persentase ketersediaan pendamping pemberdayaan sosial	%		%	40 %	<b>155,999,800</b>						40 %	<b>150,000,000</b>	
1 06 02 2.03	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase SDM PSKS yang ditingkatkan Kemampuannya	%		%	100 %	<b>155,999,800</b>						100 %	<b>150,000,000</b>	
1 06 02 2.03 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang ditingkatkan kemampuannya dalam usaha kesejahteraan sosial				3 Lembaga	155,999,800	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Pendamping Sosial	3 Lembaga	150,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 06 04	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Persentase PPKS yang ditangani	%		%	76 %	<b>5,919,999,900</b>						76 %	<b>170,000,000</b>	
1 06 04 2.01	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	Jumlah PPKS yang Mendapat Pelayanan Sosial	Orang		Orang	50 Orang	<b>589,999,900</b>						50 Orang	<b>130,000,000</b>	
1 06 04 2.01 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah PPKS yang mendapatkan Pelayanan dan Bantuan Sosial				50 Orang	49,999,900	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	PPKS	50 Orang	55,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 06 04 2.01 03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah PPKS yang mendapatkan bantuan Alat Bantu				1000 Orang	540,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	PPKS	1000 Orang	50,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 06 04 2.02	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	Jumlah PPKS yang Mendapat Pelayanan Sosial	Orang		Orang	50 Orang	<b>5,330,000,000</b>						50 Orang	<b>40,000,000</b>	
1 06 04 2.02 03	Penyediaan Permakanan	Jumlah PPKS lainnya yang mendapatkan Bantuan Permakanan				35000 Orang	5,330,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	PPKS	35000 Orang	40,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 05	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	Persentase PPKS yang mendapat perlindungan dan memiliki jaminan sosial	%		%	100 %	<b>150,000,000</b>						100 %	<b>200,000,000</b>	
1 06 05 2.02	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	% Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Yang Tervalidasi	%		%	100 %	<b>150,000,000</b>						100 %	<b>200,000,000</b>	
1 06 05 2.02 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data DTKS, BPNT dan PBI JKN Yang Tervalidasi				100 %	150,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	100 %	200,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 06 06	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	persentase korban bencana yang ditangani	%		%	100 %	<b>89,999,750</b>						100 %	<b>50,000,000</b>	
1 06 06 2.01	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	% Korban Bencana alam dan sosial yang Terlayani	%		%	100 %	<b>89,999,750</b>						100 %	<b>50,000,000</b>	
1 06 06 2.01 01	Penyediaan Makanan	Jumlah Gudang yang Disewa Persentase Penanganan Korban Bencana Sosial dan Korban Bencana Alam				1 Unit 100 %	69,999,800	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Korban Bencana Alam dan Sosial	1 Unit 100 %	50,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 06 06 2.01 02	Penyediaan Sandang	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Menerima Bantuan Sandang				100 Orang	19,999,950	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Korban Bencana Alam dan Sosial	100 Orang	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
2 13	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>							<b>414,999,200</b>						<b>380,000,000</b>	
2 13 02	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	Jumlah nagari pemekaran Persentase Nagari Mandiri	Nagari %		Nagari %	3 Nagari 29,73 %	<b>49,999,900</b>						3 Nagari 29,73 %	<b>50,000,000</b>	
2 13 02 2.01	<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>	% Penataan Desa	%		%	100 %	<b>49,999,900</b>						100 %	<b>50,000,000</b>	
2 13 02 2.01 01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Nagari Pemekaran yang Difasilitasi				5 Nagari	30,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Nagari	5 Nagari	30,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 02 2.01 03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Regulasi yang ditetapkan tentang penataan Kewenangan nagari				1 Dokumen	19,999,900	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Nagari	1 Dokumen	20,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 13 05 2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	% Lembaga Pemberdayaan dan keuangan Aktif	%		%	75 %	164,999,600						75 %	100,000,000	
2 13 05 2.01 02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Adat yang Terbina				100 Persen	49,999,900	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen	30,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 05 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Anggota LPMN dan KPM yang Dibina				100 Orang	19,999,900	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Lembaga Kemasyarakatan	100 Orang	30,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 05 2.01 05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Bumrag yang Dibina Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat yang Dibina Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat yang dibina				39 BUMNAG 10 Kelompok UEM 47 Lembaga	94,999,800	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Lembaga Kemasyarakatan	39 BUMNAG 10 Kelompok UEM 47 Lembaga	20,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
2 07	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>						<b>3,503,244,020</b>							<b>5,597,773,060</b>	
2 07 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Layanan Operasional Kantor	%		%	100 %	3,058,244,022						100 %	4,536,773,060	
2 07 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah			Persen	100 Persen	2,652,285,654						100 Persen	3,661,760,000	
2 07 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan				20 Orang/bulan	2,565,535,654		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	ASN	20 Orang/bulan	3,575,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.07.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan honorinya				0 Dokumen 7 Orang/bulan	86,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	ASN	0 Dokumen 7 Orang/bulan	86,760,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
<b>2.07.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>182,493,910</b>						100 Persen	<b>265,500,000</b>	
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Peralatan listrik yang disediakan				1 Jenis	4,998,910		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Administrasi Umum Dinas	1 Jenis	5,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK serta Kertas dan Cover yang Disediakan				2 Jenis	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Administrasi Umum Dinas	2 Jenis	20,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan				8 Unit	2,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Administrasi Umum Dinas	8 Unit	5,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bahan cetak yang disediakan Jumlah penggandaan yang disediakan				1000 Jenis 80 Lembar	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Administrasi Umum Dinas	1000 Jenis 80 Lembar	30,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah makanan dan minuman tamu yang disediakan				1 Laporan 111 Porsi	4,995,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Administrasi Umum Dinas	1 Laporan 111 Porsi	5,400,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makan minum rapat Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan				360 Porsi 125 Kali	125,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Administrasi Umum Dinas	360 Porsi 125 Kali	194,600,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
<b>2.07.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang	Persen		Persen	100 Persen	<b>53,464,458</b>						100 Persen	<b>72,263,060</b>	
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Penyediaan Materai				0 Laporan 250 Laporan	2,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Tersedianya jasa penunjang urusan dinas	0 Laporan 250 Laporan	4,290,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemakaian air Jumlah pemakaian internet Jumlah pemakaian jasa listrik Jumlah pemakaian telepon				1743 m3 23000 kB 10101 kWh 250	38,464,458		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Tersedianya jasa penunjang urusan dinas	1743 m3 23000 kB 10101 kWh 250	38,464,460	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 07 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Unit 0 Laporan	12,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Tersedianya jasa penunjang urusan dinas	10 Unit 0 Laporan	29,508,600	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	Persen		Persen	100 Persen	<b>170,000,000</b>						100 Persen	<b>317,250,000</b>	
2 07 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara Jumlah perizinan kendaraan dinas/operasional				0 Unit 7 Unit 7 Unit	140,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Tersedianya jasa penunjang urusan dinas	0 Unit 7 Unit 7 Unit	151,250,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan yang dipelihara				1 Unit	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Tersedianya jasa penunjang urusan dinas	1 Unit	66,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 02	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	Ketersediaan Dokumen Tanaga Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	<b>100,000,000</b>						1 Dokumen	<b>0</b>	
2 07 02 2.01	<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>	Tersedianya Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	<b>100,000,000</b>						1 Dokumen	<b>0</b>	
2 07 02 2.01 01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Tersedianya Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	1 Dokumen	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 03	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	Persentase Peserta Pelatihan yang diterima di Dunia Kerja	Persen		Persen	45 Persen	<b>264,999,998</b>						45 Persen	<b>771,000,000</b>	
2 07 03 2.01	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	Jumlah Pencari Kerja yang Dilatih dan Bersertifikasi	Orang		Orang	48 Orang	<b>249,999,998</b>						48 Orang	<b>756,000,000</b>	
2 07 03 2.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta yang Dididik/Dilatih Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				48 Orang 48 Orang	249,999,998		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Jumlah Pencari Kerja yang Dilatih dan Bersertifikasi	48 Orang 48 Orang	700,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 07 03 2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga		Lembaga	5 Lembaga	15,000,000						5 Lembaga	15,000,000	
2 07 03 2.02 01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				3 Lembaga	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	3 Lembaga	15,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 04	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	Persentase tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen		Persen	20,82 Persen	30,000,000						20,82 Persen	90,000,000	
2 07 04 2.03	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar di Bursa Kerja Online	Orang		Orang	440 Orang	30,000,000						440 Orang	55,000,000	
2 07 04 2.03 02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Cakupan Layanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online				12 Bulan	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar di Bursa Kerja Online	12 Bulan	20,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 04 2.03 03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah perusahaan yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Job Fair (Pameran Kesempatan Kerja)				15 Perusahaan	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar di Bursa Kerja Online	15 Perusahaan	35,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 05	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	Persentase Pencegahan dan Tindak Lanjut Penyelesaian Hubungan Industrial	Persen		Persen	100 Persen	50,000,000						100 Persen	200,000,000	
2 07 05 2.01	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah, LKS Bipartit, BPJS, SP/SB yang tercatat	Perusahaan		Perusahaan	5 Perusahaan	50,000,000						5 Perusahaan	100,000,000	
2 07 05 2.01 03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah, LKS Bipartit, BPJS, SP/SB yang tercatat				5 Perusahaan	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Persentase Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah, LKS Bipartit, BPJS, SP/SB yang tercatat	5 Perusahaan	100,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
2 09	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>												<b>3,872,300,000</b>		
2 09 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Layanan Operasional Kantor	%		%	100 %	2,708,892,072						100 %	3,625,300,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
2	09	01	2.02			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	<b>2,482,408,048</b>						100 %	<b>2,551,000,000</b>	
2	09	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	2,462,408,048	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	23 Orang/bulan	2,430,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Adminsitration Keuangan Yang Dibayarkan Honor				23 Orang	20,000,000		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	23 Orang	121,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.06			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Adminsitration Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	<b>2,995,403</b>						100 %	<b>377,300,000</b>	
2	09	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket 0 Paket	2,995,403		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	0	1 Paket 0 Paket	38,500,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.08			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Materai Yang Tersedia Jumlah Materai Yang Tersedia Jumlah Pemakaian Air Jumlah Pemakaian Jasa Listrik Jumlah Pemakaian Telepon/Internet Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang	Paket Buah Buah Paket Paket Paket %		Paket Buah Buah Paket Paket Paket %	1 Paket 50 Buah 100 Buah 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 %	<b>68,500,000</b>						1 Paket 50 Buah 100 Buah 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 %	<b>70,000,000</b>	
2	09	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Yang Disediakan				50 Materai	500,000		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Dinas Ketahanan dan Perikanan	50 Materai	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pemakaian Jasa Air Jumlah Pemakaian Jasa Listrik Jumlah Pemakaian Jasa Telepon				500 Kubik 3954 KWH 100 Giga	58,000,000		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Dinas Ketahanan dan Perikanan	500 Kubik 3954 KWH 100 Giga	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.09.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30 Unit	10,000,000		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Dinas Ketahanan dan Perikanan	30 Unit	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Yang Terpelihara Persentase BArang Milik DAerah Yang Terpelihara	Unit Unit %		Unit Unit %	2 Unit 11 Unit 100 %	<b>154,988,621</b>						2 Unit 11 Unit 100 %	<b>550,000,000</b>	
2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Yang Terpelihara Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas/Jabatan				10 Unit 10 Unit	125,000,000		Dana Perimbangan		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	0	10 Unit 10 Unit	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	29,988,621		Dana Perimbangan		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	0	1 Unit	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN</b>	Persentase Nagari Yang Memiliki Infrastruktur Kemandirian Pangan	%		%	2 %	<b>56,780,800</b>						2 %	<b>0</b>	
2.09.02.2.01	<b>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Nagari Yang Memiliki Infrastruktur Kemandirian Pangan	%		%	21 %	<b>56,780,800</b>						21 %	<b>0</b>	
2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Ketersediaan Infrastruktur Pendukung Kemnadirian Pangan lainnya				1 Unit	56,780,800		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1 Unit	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	Persentase Nagari Yang Memiliki Infrastruktur Kemandirian Pangan Skor Pola Pangan Harapan	% KKCL		% KKCL	2 % 79 KKCL	<b>551,644,048</b>						2 % 79 KKCL	<b>142,000,000</b>	
2.09.03.2.01	<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	KKCL		KKCL	79 KKCL	<b>295,827,398</b>						79 KKCL	<b>82,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 09 03 2.01 01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Dokumen Buku Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				1 Dokumen	85,057,400		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1 Dokumen	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2 09 03 2.01 02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kelompok Penerima MAnfaat Pengembangan Pangan Pekarangan				7 Kecamatan	100,770,248		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	7 Kecamatan	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2 09 03 2.01 04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Pasokan Pangan Yan Distabilisasi				9 Komoditi	109,999,750		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	9 Komoditi	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2 09 03 2.02	<b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</b>	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	KKCL		KKCL	77 KKCL	<b>99,999,850</b>						77 KKCL	<b>0</b>	
2 09 03 2.02 03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				20 Ton	99,999,850		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	20 Ton	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2 09 03 2.04	<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	KKCL		KKCL	77 KKCL	<b>155,816,800</b>						77 KKCL	<b>60,000,000</b>	
2 09 03 2.04 01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Jumlah Buku PPH Yang Tersedia				1 Buku	14,999,900		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1 Buku	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2 09 03 2.04 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				2 Kelompok	140,816,900		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2 Kelompok	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2 09 04	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	Persentase Nagari Rawan Pangan Yang Ditangani	%		%	100 %	<b>169,999,800</b>						100 %	<b>0</b>	
2 09 04 2.01	<b>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</b>	Jumlah Dokumen Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	<b>69,999,900</b>						1 Dokumen	<b>0</b>	
2 09 04 2.01 01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Dokumen Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan Pangan				1 Dokumen	69,999,900		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1 Dokumen	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2 09 04 2.02	<b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Fasilitas Penanganan Kerawanana Pangan	Kali		Kali	7 Kali	<b>99,999,900</b>						7 Kali	<b>0</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 09 04 2.02 02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kepala Keluarga (KK) penerima dalam penanganan daerah rawan pangan				250 KK	99,999,900		Dana Perimbangan		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	250 KK	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2 09 05	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	Persentase Temuan Pelaku Usaha menggunakan Zat Berbahaya (Per 100 Sampel)	Sampel		Sampel	8 Sampel	<b>72,085,300</b>						8 Sampel	<b>105,000,000</b>	
2 09 05 2.01	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Wilayah Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Kecamatan		Kecamatan	4 Kecamatan	<b>72,085,300</b>						4 Kecamatan	<b>105,000,000</b>	
2 09 05 2.01 02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sampel Analisis Mutu, Gizi, Keamanan Produk dan Konsumsi Pangan				8 Sampel	72,085,300		Dana Perimbangan		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	8 Sampel	105,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>														
3 25	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>							<b>1,264,061,465</b>						<b>150,000,000</b>	
3 25 04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton/Tahun		Ton/Tahun	2343 Ton/Tahun	<b>1,189,062,615</b>						2343 Ton/Tahun	<b>150,000,000</b>	
3 25 04 2.02	<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	Jumlah Kelompok Pembudidaya Yang Dibina	Kelompok		Kelompok	35 Kelompok	<b>389,998,800</b>						35 Kelompok	<b>0</b>	
3 25 04 2.02 01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Calon Induk Bersertifikat untuk kebutuhan UPR				1800 Ekor	259,998,800		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1800 Ekor	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 25 04 2.02 02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kali pertemuan pelaku usaha perikanan Jumlah Kelompok Pembinaan Pokdakan Jumlah Pembinaan Poklashar Kelompok Jumlah Pembinaan Pokmaswas				2 Kali 10 pokdakan 1 Poklashar 20 Pokmaswas	40,000,000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2 Kali 10 pokdakan 1 Poklashar 20 Pokmaswas	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 25 04 2.02 04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pelatihan Bagi Petugas dan Meningkatnya Kualitas SDM Pembudidaya				2 Kali	90,000,000		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2 Kali	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 25 04 2.04	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	Jumlah Unit Perikanan Yang Beroperasi	Pokdakan		Pokdakan	20 Pokdakan	<b>799,063,815</b>						20 Pokdakan	<b>150,000,000</b>	





**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>200,052,996</b>						100 Persen	<b>272,692,500</b>	
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peralatan Listrik yang disediakan				15 Jenis	4,999,606	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15 Jenis	8,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor Yang disediakan				17 Jenis	35,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17 Jenis	39,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga yang disediakan				10 Paket	4,998,590	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10 Paket	15,427,500	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bahan Cetak yang disediakan Jumlah Penggandaan yang disediakan				5 jenis 83348 lembar	25,203,800	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5 jenis 83348 lembar	50,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman tamu yang disediakan				200 kotak	4,995,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	200 kotak	9,300,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makan minum rapat yang disediakan Jumlah rapat koordinasi dan Konsultasi yang disediakan				250 kotak 20 kali	124,856,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	250 kotak 20 kali	150,965,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia	Persen		Persen	100 Persen	<b>57,000,000</b>						100 Persen	<b>74,094,000</b>	
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan				200 buah	2,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	200 buah	3,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pemakaian Air Jumlah Pemakaian Listrik Jumlah pemakaian Telpon Internet				2500 Kubik 14000 Kwh 240 GB	42,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2500 Kubik 14000 Kwh 240 GB	56,300,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor				20 unit	13,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20 unit	14,794,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Persen		Persen	100 Persen	<b>201,410,641</b>						100 Persen	<b>219,020,000</b>	
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional				8 Unit 8 Unit	151,520,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8 Unit 8 Unit	159,020,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	49,890,641	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Unit	60,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.02	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak Persentase penduduk wajib KTP yang memiliki KTP Persentase penduduk wajib KTP yang memiliki KTP Persentase rumah tangga yang memiliki KK	persen persen persen		persen persen persen	50 persen 100 persen 98 persen	<b>775,789,460</b>						50 persen 100 persen 98 persen	<b>1,612,271,000</b>	
2.12.02.2.01	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persen		Persen	100 Persen	<b>640,789,460</b>						100 Persen	<b>1,081,791,000</b>	
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	jumlah penduduk non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				10000 orang	40,790,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Masyarakat Kabupaten Solok Selatan	10000 orang	100,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Pendaftaran Penduduk yang di terbitkan				62920 Dokumen	249,999,900	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Masyarakat Kabupaten Solok Selatan	62920 Dokumen	300,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Nagari yang melaksanakan Pelayanan terpadu				47 Nagari	199,999,760	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Masyarakat Kabupaten Solok Selatan	47 Nagari	427,122,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	02	2.01	07	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Data untuk pengambilan kebijakan pendaftaran penduduk				15000 Dokumen	149,999,800	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Masyarakat Kabupaten Solok Selatan	15000 Dokumen	226,669,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>02</b>	<b>2.03</b>		<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	Persentase penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang terfasilitasi	Persen		Persen	100 Persen	<b>135,000,000</b>						100 Persen	<b>530,480,000</b>	
2	12	02	2.03	01	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di kab/kota dalam penerbitan pelayanan pendaftaran penduduk				55 kali	35,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Masyarakat Kabupaten Solok Selatan	55 kali	300,480,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	02	2.03	05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah peserta sosialisasi pendaftaran penduduk				100 orang	100,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Masyarakat Kabupaten Solok Selatan	100 orang	230,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan sipil	persen		persen	100 persen	<b>207,554,700</b>						100 persen	<b>243,066,000</b>	
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>		<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	Persentase Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	Persen		Persen	100 Persen	<b>114,554,900</b>						100 Persen	<b>127,566,000</b>	
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen pencatatan sipil yang di terbitkan				9975 Dokumen	29,774,900	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Masyarakat Kabupaten Solok Selatan	9975 Dokumen	40,775,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Nagari yang melaksanakan pelayanan terpadu				47 Nagari	64,780,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Masyarakat Kabupaten Solok Selatan	47 Nagari	65,791,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	03	2.01	03	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumlah Data untuk pengambilan Kebijakan Pencatatan Sipil				7 Paket Data	20,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Masyarakat Kabupaten Solok Selatan	7 Paket Data	21,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 12 03 2.02	<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	Persentase jumlah penduduk yang terasilitasi penyelenggaraan pencatatan sipil	Persen		Persen	100 Persen	<b>92,999,800</b>						100 Persen	<b>115,500,000</b>	
2 12 03 2.02 03	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah koordinasi antar lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintah di kabupaten/kota dalam penertiban pelayanan pencatatan sipil				45 kali	34,999,800	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Masyarakat Kabupaten Solok Selatan	45 kali	40,500,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2 12 03 2.02 06	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah sidang isbat yang dilaksanakan				7 kali	25,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Masyarakat Kabupaten Solok Selatan	7 kali	35,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2 12 03 2.02 08	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah peserta sosialisasi pencatatan sipil				55 orang	33,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Masyarakat Kabupaten Solok Selatan	55 orang	40,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2 12 04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	Persentase Perangkat Derah yang Memiliki Akses pemanfaatan Data kependudukan	persen		persen	100 persen	<b>194,473,100</b>						100 persen	<b>240,000,000</b>	
2 12 04 2.01	<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	Persentase Ketersediaan data Administrasi Kependudukan	Persen		Persen	100 Persen	<b>40,000,000</b>						100 Persen	<b>50,000,000</b>	
2 12 04 2.01 02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah MOU atauPKS pemanfaatan data kependudukan Jumlah OPD dan Instansi yang memiliki hak akses				37 MOU 72 OPD	40,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan	37 MOU 72 OPD	50,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2 12 04 2.03	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	Persentase Pengelolaan Informasi Adm Kependudukan	Persen		Persen	100 Persen	<b>154,473,100</b>						100 Persen	<b>190,000,000</b>	
2 12 04 2.03 01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah koordinasi dalam penertiban SIAK				30 Kali	39,999,800	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Masyarakat Kabupaten Solok Selatan	30 Kali	50,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 12 04 2.03 03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jenis Perangkat untuk pengembangan dan pemeliharaan perangkat SIAK				15 Jenis	60,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Masyarakat Kabupaten Solok Selatan	15 Jenis	70,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2 12 04 2.03 05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah peserta sosialisasi SIAK				100 orang	54,473,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Masyarakat Kabupaten Solok Selatan	100 orang	70,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2 12 05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	Ketersediaan Dokumen Profil Kependudukan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	<b>39,450,000</b>						1 Dokumen	<b>45,000,000</b>	
2 12 05 2.01	<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>	Jumlah Buku Profil Kependudukan Yang Diterbitkan	Buku		Buku	200 Buku	<b>39,450,000</b>						200 Buku	<b>45,000,000</b>	
2 12 05 2.01 02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah buku profil kependudukan yang diterbitkan				200 Buku	39,450,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Masyarakat Kabupaten Solok Selatan	200 Buku	45,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
2 08	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>							<b>1,049,998,550</b>						<b>1,160,000,000</b>	
2 08 02	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks		Indeks	55,3 Indeks	<b>449,999,800</b>						55,3 Indeks	<b>500,000,000</b>	
2 08 02 2.01	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Persentase OPD Responsif Gender	Persen		Persen	54.54 Persen	<b>49,999,850</b>						54.54 Persen	<b>55,000,000</b>	
2 08 02 2.01 03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG				5 Kali	49,999,850	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota	5 Kali	25,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 02 2.03	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	jumlah lembaga yang difasilitasi	Lembaga		Lembaga	3 Lembaga	<b>399,999,950</b>						3 Lembaga	<b>445,000,000</b>	
2 08 02 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga yang difasilitasi				3 lembaga	399,999,950	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota	3 lembaga	445,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 03	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	Rasio KDRT (per 1000 penduduk)	Rasio		Rasio	0,015 Rasio	<b>24,999,900</b>						0,015 Rasio	<b>30,000,000</b>	
2 08 03 2.01	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	persentase kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	Persen		Persen	100 Persen	<b>24,999,900</b>						100 Persen	<b>30,000,000</b>	
2 08 03 2.01 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten kota				5 kali	24,999,900	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Penduduk Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota	5 kali	30,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 04	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	Persentase Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) sesuai standar	Persen		Persen	30 Persen	<b>514,999,450</b>						30 Persen	<b>550,000,000</b>	
2 08 04 2.01	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	persentase peningkatan kualitas keluarga	Persen		Persen	100 Persen	<b>514,999,450</b>						100 Persen	<b>550,000,000</b>	
2 08 04 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak kewenangan kabupaten Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Kali 0 Perangkat Daerah	24,999,800	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Kab Solok Selatan	5 Kali 0 Perangkat Daerah	25,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 04 2.01 02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan KIE Kesetaraan Gender				3 Kali	39,999,800	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Kab Solok Selatan	3 Kali	25,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 04 2.01 03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten				12 Kali	449,999,850	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Kab Solok Selatan	12 Kali	500,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	Persentase OPD yang responsif Gender	Persen		Persen	54.54 Persen	<b>19,999,800</b>						54.54 Persen	<b>25,000,000</b>	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 05 2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase ketersediaan data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten	Persen		Persen	100 Persen	19,999,800						100 Persen	25,000,000	
2 08 05 2.01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah data gender dan anak yang tersedia				1 Dokumen	19,999,800	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Data Gender dan Anak	1 Dokumen	25,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 06	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	Status kabupaten layak anak	status		status	sudah status	19,999,800						sudah status	30,000,000	
2 08 06 2.02	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Status kabupaten layak anak	status		status	1 status	19,999,800						1 status	30,000,000	
2 08 06 2.02 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan KLA (Kabupaten Layak Anak yang terselenggara)				1 Kali	19,999,800	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten Kota	1 Kali	30,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 07	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	Persentase pengaduan tindakan kekerasan anak yang ditangani	Persen		Persen	100 Persen	19,999,800						100 Persen	25,000,000	
2 08 07 2.01	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	persentase kekerasan terhadap anak yang tertangani	Persen		Persen	100 Persen	19,999,800						100 Persen	25,000,000	
2 08 07 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota  Jumlah Kegiatan Forum anak yang terselenggara				0 Dokumen 1 Kali	19,999,800	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Anak Kewenangan Kabupaten Kota	0 Dokumen 1 Kali	25,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>							3,730,055,333						5,275,000,000	
2 14 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Layanan Operasional Kantor	Persen		Persen	100 Persen	3,011,927,707						100 Persen	2,935,000,000	
2 14 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	2,640,047,654						100 Persen	2,475,240,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan				25 Orang	2,533,887,654	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Administrasi perangkat daerah	25 Orang	2,368,240,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan honorinya				7 Orang	106,160,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Administrasi perangkat daerah	7 Orang	107,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>2.14.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>209,943,729</b>						100 Persen	<b>297,760,000</b>	
2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	peralatan listrik yang disediakan				5 Jenis	4,997,341	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Administrasi Umum perangkat daerah	5 Jenis	5,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK yang disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Jenis 0 Paket	29,975,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Administrasi Umum perangkat daerah	10 Jenis 0 Paket	59,160,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Peralatan rumah tangga yang disediakan				0 Paket 10 Jenis	4,989,488	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Administrasi Umum perangkat daerah	0 Paket 10 Jenis	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	bahan cetak yang disediakan Jumlah penggandaan yang disediakan				7 Jenis 20000 Lembar	14,999,900	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Administrasi Umum perangkat daerah	7 Jenis 20000 Lembar	15,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Makan Minum tamu yang disediakan				0 Laporan 111 Kotak	4,995,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Administrasi Umum perangkat daerah	0 Laporan 111 Kotak	18,600,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makan minum rapat yang disediakan Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan				110 Kotak 86 Kali	149,987,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Administrasi Umum perangkat daerah	110 Kotak 86 Kali	200,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 14 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia	Persen		Persen	100 Persen	<b>26,938,750</b>						100 Persen	<b>27,000,000</b>	
2 14 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia				200 Buah	2,000,000		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Kegiatan Administrasi Kantor	200 Buah	2,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemakaian air Jumlah pemakaian jasa listrik Jumlah pemakaian telpon/internet				1500 Kubik 8276 KWh 1000 GB	14,998,750		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Kegiatan Administrasi Kantor	1500 Kubik 8276 KWh 1000 GB	15,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan dan perlengkapan Kantor				10 Unit	9,940,000		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Kegiatan Administrasi Kantor	10 Unit	10,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Persen		Persen	100 Persen	<b>134,997,574</b>						100 Persen	<b>135,000,000</b>	
2 14 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional				12 Unit 12 Unit	114,998,100		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Barang Milik Daerah	12 Unit 12 Unit	115,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan yang dipelihara				1 Unit	19,999,474		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Barang Milik Daerah	1 Unit	20,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 03	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	Cakupan Akseptor KB aktif	Persen		Persen	82.25 Persen	<b>553,627,926</b>						82.25 Persen	<b>2,200,000,000</b>	
2 14 03 2.01	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	persentase pelaksanaan advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB	Persen		Persen	100 Persen	<b>137,979,176</b>						100 Persen	<b>593,601,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah sarana dan distribusi sarana KIE Program KKBPK yang tersedia dan didistribusikan Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				3 Unit 0 Unit	12,999,376	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Pasangan Usia Subur	3 Unit 0 Unit	13,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	jumlah kegiatan promosi KIE Program KKBPK				4 Kegiatan	49,999,800	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Pasangan Usia Subur	4 Kegiatan	140,015,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	jumlah pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK MELALUI rakorcam, Rakordes dan Minilok di setiap kecamatan				7 Kali	74,980,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Pasangan Usia Subur	7 Kali	151,086,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.03.2.02	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	persentase tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB) yang ditingkatkan kapasitasnya	Persen		Persen	100 Persen	<b>277,180,000</b>						100 Persen	<b>287,200,000</b>	
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang digerakkan				385 Orang	277,180,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	PKB,PLKB,PPKB D dan Sub PPKBD	385 Orang	287,200,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.03.2.03	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	persentase ketersediaan obat dan alat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten	Persen		Persen	100 Persen	<b>124,980,000</b>						100 Persen	<b>917,373,000</b>	
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	jumlah peserta KB yang menggunakan MKJP				8500 Orang	124,980,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	kelompok Penduduk usia produktif	8500 Orang	168,568,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 14 03 2.04	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	persentase peningkatan peran serta organisasi masyarakat tingkat daerah kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	Persen		Persen	100 Persen	<b>13,488,750</b>						100 Persen	<b>401,826,000</b>	
2 14 03 2.04 01	Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	jumlah organisasi masyarakat dan mitra kerja lainnya yang berperan serta dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				7 Organisasi 0 Organisasi	13,488,750	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	organisasi masyarakat daerah kab solok selatan	7 Organisasi 0 Organisasi	13,500,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 04	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	Persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera	Persen		Persen	35.1 Persen	<b>164,499,700</b>						35.1 Persen	<b>120,000,000</b>	
2 14 04 2.01	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	jumlah peran serta organisasi masyarakat tingkat daerah kab/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Organisasi		Organisasi	7 Organisasi	<b>144,499,800</b>						7 Organisasi	<b>100,000,000</b>	
2 14 04 2.01 01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah kegiatan pemilihan duta genre yang diikuti Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk				2 Kali 0 Kelompok	144,499,800	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	BKB, BKR dan BKL	2 Kali 0 Kelompok	100,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 14 04 2.02	<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	jumlah peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kab/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Organisasi		Organisasi	7 Organisasi	<b>19,999,900</b>						7 Organisasi	<b>20,000,000</b>	
2 14 04 2.02 02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) jumlah sosialisasi / pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga terhadap organisasi masyarakat yang dilakukan				0 Laporan 7 Kali	19,999,900	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Organisasi kemasyarakatan Kab solok selatan	0 Laporan 7 Kali	20,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
<b>2 15</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>						<b>6,953,928,940</b>							<b>4,764,500,000</b>	
2 15 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Cakupan Layanan Operasional Kantor	Persen		Persen	100 Persen	<b>6,096,708,055</b>						100 Persen	<b>3,650,000,000</b>	
2 15 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>5,812,330,234</b>						100 Persen	<b>3,052,953,750</b>	
2 15 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Yang Dibarkan Gaji dan Tunjangannya				54 Orang	5,785,391,584	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Selatan	54 Orang	2,957,953,750	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Pengelola Keuangan Yang Dibayarkan Honorarium				3 Orang	26,938,650	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Selatan	3 Orang	92,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>7,499,907</b>						100 Persen	<b>273,458,750</b>	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Jenis	7,499,907	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Selatan	6 Jenis	5,227,500	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Yang Tersedia	Persen		Persen	100 Persen	<b>25,499,964</b>						100 Persen	<b>28,462,500</b>	
2 15 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pemakaian Air Jumlah Pemakaian Jasa Listrik Yang Terpakai				350 M3 14000 Kwh	25,499,964	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Selatan	350 M3 14000 Kwh	26,362,500	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	Persen		Persen	100 Persen	<b>251,377,950</b>						100 Persen	<b>250,125,000</b>	
2 15 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Yang Terpelihara Jumlah perizinan kendaraan dinas/operasional				36 Unit 36 Unit	151,379,350	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Selatan	36 Unit 36 Unit	210,125,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Direhabilitasi				2 Unit	99,998,600	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Selatan	2 Unit	30,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota Penerunan Rasio Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas Rasio konektifitas	Rasio Rasio Rasio		Rasio Rasio Rasio	0.304 Rasio 0.23 Rasio 0.49 Rasio	<b>857,220,885</b>						0.304 Rasio 0.23 Rasio 0.49 Rasio	<b>1,114,500,000</b>	
2 15 02 2.01	<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>	Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten / Kota	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	<b>99,990,000</b>						1 Dokumen	<b>0</b>	
2 15 02 2.01 01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten / Kota				1 Dokumen	99,990,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Selatan	1 Dokumen	0	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.02	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	Persentase Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Telah Disediakan	Persen		Persen	100 Persen	<b>99,993,000</b>						100 Persen	<b>150,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 02 2.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan Pemasangan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas				2 Unit 24 Unit	99,993,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Pengguna Lalu Lintas Di Kabupaten Solok Selatan	2 Unit 24 Unit	150,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.03	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	Jumlah Terminal Type C Yang Beroperasi	Lokasi		Lokasi	2 Lokasi	<b>99,997,470</b>						2 Lokasi	<b>200,000,000</b>	
2 15 02 2.03 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Direhab				2 Lokasi	99,997,470	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Masyarakat Pengguna Angkutan Umum di Kabupaten Solok Selatan	2 Lokasi	100,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.05	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	Persentase Jumlah Kendaraan Yang Telah Diuji	Persen		Persen	100 Persen	<b>160,991,200</b>						100 Persen	<b>300,000,000</b>	
2 15 02 2.05 01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Alat Uji Yang Disediakan				4 Unit	67,995,200	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Solok Selatan	4 Unit	165,500,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.05 03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Yang Sudah Teregistrasi				12 Bulan	61,496,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Solok Selatan	12 Bulan	70,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.05 04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Kartu Wajib Uji Yang Disediakan				1260 Buah	31,500,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Solok Selatan	1260 Buah	32,500,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.06	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	Persentase Kegiatan MRLL Yang Dilaksanakan	Persen		Persen	100 Persen	<b>359,999,450</b>						100 Persen	<b>329,500,000</b>	
2 15 02 2.06 01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen WTN Jumlah Rapat Koordinasi Forum Lalu Lintas				1 Dokumen 2 Kegiatan	119,999,700	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Masyarakat Pengguna Lalu Lintas Di Kabupaten Solok Selatan	1 Dokumen 2 Kegiatan	27,500,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.06 04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengamanan dan Pengawasan MRLL				6 Kegiatan	239,999,750	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Masyarakat Pengguna Lalu Lintas Di Kabupaten Solok Selatan	6 Kegiatan	302,000,000	Dinas Perhubungan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 02 2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Andalalin yang disetujui	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	9,999,990						2 Dokumen	30,000,000	
2 15 02 2.07 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah ANDALALIN Yang Dinilai				2 Dokumen	9,999,990	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Pembangunan Yang Wajib Dokumen Andalalin di Kabupaten Solok Selatan	2 Dokumen	10,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Angkutan Yang Dilaksanakan	Persen		Persen	100 Persen	26,249,775						100 Persen	35,000,000	
2 15 02 2.09 02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan dan Penertiban Angkutan Umum Barang dan Orang				12 Bulan	26,249,775	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kawasan pertumbuhan dan mitigasi bencana	Masyarakat Pengguna Angkutan Umum di Kabupaten Solok Selatan	12 Bulan	35,000,000	Dinas Perhubungan
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
2 16	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>						<b>7,844,986,507</b>						<b>9,321,348,958</b>		
2 16 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Administrasi Keangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen Orang Persen Persen		Persen Orang Persen Persen	100 Persen 36 Orang 100 Persen 100 Persen	<b>3,758,910,859</b>						100 Persen 36 Orang 100 Persen 100 Persen	<b>5,498,598,958</b>	
2 16 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya Ketersedian dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu Persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah Tertib administrasi keuangan	Orang persen persen persen		Orang persen persen persen	36 Orang 100 persen 100 persen 100 persen	<b>3,267,739,489</b>						36 Orang 100 persen 100 persen 100 persen	<b>4,572,515,984</b>	
2 16 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	3,183,659,489	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Diskominfo	34 Orang/bulan	4,475,403,584	Dinas Komunikasi dan Informatika

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah tenaga pengelola keuangan yang dibayarkan honorarium				0 Dokumen 10 orang	84,080,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Diskominfo	0 Dokumen 10 orang	97,112,400	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan kinerja pelayanan adminstrasi umum perangkat daerah Tertib administrasi keuangan	persen persen		persen persen	100 persen 100 persen	<b>207,480,600</b>						100 persen 100 persen	<b>353,852,500</b>	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Jenis	4,999,861	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Diskominfo	7 Jenis	3,465,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK yang disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				33 Jenis 6 Paket	25,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Diskominfo	33 Jenis 6 Paket	80,850,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan peralatan rumah tangga yang disediakan				0 Paket 23 Jenis	4,990,839	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Diskominfo	0 Paket 23 Jenis	9,817,500	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bahan cetak yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				23 Jenis 29872 lembar	17,499,900	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Diskominfo	23 Jenis 29872 lembar	22,220,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah makan minum tamu yang disediakan				80 Laporan 155 Porsi	4,995,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Diskominfo	80 Laporan 155 Porsi	6,500,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah jamuan makan dan minuman rapat yang disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan				155 Kotak 80 Laporan 75 Kali	149,995,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Diskominfo	155 Kotak 80 Laporan 75 Kali	231,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 16 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase barang milik daerah yang tersedia "Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah" Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	persen persen persen		persen persen persen	100 persen 100 persen 100 persen	44,992,350						100 persen 100 persen 100 persen	200,000,000	
2 16 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	44,992,350	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Diskominfo	5 Unit	200,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen persen		persen persen	100 persen 100 persen	41,449,000						100 persen 100 persen	48,510,000	
2 16 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai yang disediakan				0 Laporan 410 lembar	2,500,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Diskominfo	0 Laporan 410 lembar	4,620,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan jumlah pemakaian jasa listrik				0 Laporan 25000 Kwh	38,949,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Diskominfo	0 Laporan 25000 Kwh	43,890,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 16 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase barang milik daerah yang terpelihara Persentase sarana prasarana perkantoran yang terpeliharaan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah Persentase sarana prasarana perkantoran yang terpeliharaan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	persen persen persen		persen persen persen	100 persen 100 persen 100 persen	<b>197,249,420</b>					100 persen 100 persen 100 persen	<b>323,720,474</b>		
2 16 01 2.09 04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara Jumlah perizinan kendaraan dinas/operasional				0 Unit 12 Unit 12 Unit	152,250,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Diskominfo	0 Unit 12 Unit 12 Unit	173,250,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin kantoryang terpelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit 0 Unit	15,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Diskominfo	5 Unit 0 Unit	115,470,474	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	29,999,420	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Diskominfo	1 Unit	35,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen		Persen	85 Persen	<b>1,742,425,150</b>					85 Persen	<b>1,051,050,000</b>		



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 16 02 2.01	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	persen persen persen		persen persen persen	85 persen 50 persen 50.22 persen	<b>1,742,425,150</b>					85 persen 50 persen 50.22 persen	<b>1,051,050,000</b>		
2 16 02 2.01 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah Layanan Akses Informasi Interaktif Masyarakat dan Penambahan Penguatan Radio Penambahan Penguatan Radio				0 Dokumen 1 website 4 radio	75,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Diskominfo	0 Dokumen 1 website 4 radio	86,625,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 02 2.01 06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik Jumlah OPD yang telah memiliki website dan aktif				0 Dokumen 33 OPD	39,999,900	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Diskominfo	0 Dokumen 33 OPD	109,725,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 02 2.01 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan Terjalannya kerjasama dengan media dan kehumasan				0 Dokumen 35 Media	1,357,425,360	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Diskominfo	0 Dokumen 35 Media	623,700,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Penyebarluasan Informasi dan Kumubikasi publik yang disediakan Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan prasarana Pendukung, Penyebarluasan Informasi dan komunikasi publik yang disediakan				6 jenis 0 Unit 20 Item	269,999,890	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Diskominfo	6 jenis 0 Unit 20 Item	231,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Dilingkungan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>2,343,650,498</b>						100 Persen	<b>2,771,700,000</b>	
2.16.03.2.01	<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Kominfo	persen		persen	100 persen	<b>2,014,361,498</b>						100 persen	<b>2,136,750,000</b>	
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sub Domain pemerintah daerah yang ditata dan diawasi				0 Dokumen 12 Subdomain	29,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan. Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Diskominfo	0 Dokumen 12 Subdomain	34,650,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang terhubung dengan internet Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				33 OPD 0 Unit	1,985,361,498	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Diskominfo	33 OPD 0 Unit	2,102,100,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.02	<b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Aplikasi SPBE yang dikelola Persentase penurunan jumlah blankspot	persen persen		persen persen	88.88 persen 7.8 persen	<b>329,289,000</b>						88.88 persen 7.8 persen	<b>634,950,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 16 03 2.02 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi Jumlah tenaga pengamanan Sistem server dan Aplikasi				0 Dokumen 1 Orang	66,028,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan. Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Diskominfo	0 Dokumen 1 Orang	56,700,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 03 2.02 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan Jumlah Tenaga Programmer yang dibayarkan				0 Unit 7 Orang	230,261,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Diskominfo	0 Unit 7 Orang	510,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 03 2.02 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Jumlah Internet Satelit (Vsat) yang terdata, Jumlah Menara Telekomunikasi yang terdata				0 Dokumen 26 Vsat 57 Menara	33,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Diskominfo	0 Dokumen 26 Vsat 57 Menara	68,250,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>2 20</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>							<b>100,000,000</b>						<b>115,500,000</b>	
<b>2 20 02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen		Persen	100 Persen	<b>100,000,000</b>						100 Persen	<b>115,500,000</b>	
<b>2 20 02 2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	persen		persen	100 persen	<b>100,000,000</b>						100 persen	<b>115,500,000</b>	
2 20 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen Database Statistik Sektoral OPD yang valid Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Jumlah dokumen sektoral yang disediakan (Kecamatan dalam angka, PDRB, Solok Selatan dalam angka)				1 Dokumen 0 Dokumen 9 Dokumen	100,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Diskominfo	1 Dokumen 0 Dokumen 9 Dokumen	115,500,000	Dinas Komunikasi dan Informatika



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor yang disediakan				20 Jenis	25,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	DPMPTSP	20 Jenis	43,758,225	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga yang disediakan				10 Jenis	4,999,780	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	DPMPTSP	10 Jenis	9,075,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bahan Cetak yang disediakan Bahan Penggandaan yang disediakan Bahan Penjilidan yang disediakan				5 Jenis 25000 Lembar 3 Jenis	25,128,700	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	DPMPTSP	5 Jenis 25000 Lembar 3 Jenis	36,300,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan Minum Tamu yang disediakan				300 kotak	9,990,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	DPMPTSP	300 kotak	32,400,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makan dan Minum Rapat yang disediakan Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan				770 kotak 25 Kali	134,985,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	DPMPTSP	770 kotak 25 Kali	149,100,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia	Persen		Persen	100 Persen	<b>302,839,900</b>						100 Persen	<b>0</b>	
2 18 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor				1 Unit	202,339,900	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	DPMPTSP	1 Unit	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Teralis				1 unit kantor	100,500,000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	DPMPTSP	1 unit kantor	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang yang tersedia	Persen		Persen	100 Persen	<b>32,999,650</b>						100 Persen	<b>37,620,000</b>	
2 18 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia				200 buah	2,000,000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	DPMPTSP	200 buah	2,420,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pemakaian Air Jumlah Pemakaian Jasa Listrik Jumlah Pemakaian Telepon/Internet				35 Kubik 20.95 Kwh 1200 Gb	20,999,650	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	DPMPTSP	35 Kubik 20.95 Kwh 1200 Gb	23,100,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				18 unit	10,000,000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	DPMPTSP	18 unit	12,100,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	Persen		Persen	100 Persen	<b>109,988,228</b>						100 Persen	<b>121,000,000</b>	
2 18 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional/lapangan yang terpelihara				12 unit	109,988,228	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	DPMPTSP	12 unit	121,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 03	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Jumlah Investor yang Berminat	Investor		Investor	1 Investor	<b>49,999,800</b>						1 Investor	<b>50,000,000</b>	
2 18 03 2.01	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Pameran Investasi	Event		Event	1 Event	<b>49,999,800</b>						1 Event	<b>50,000,000</b>	
2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pameran Investasi				1 Event	49,999,800	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	Investor	1 Event	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 04	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Jumlah Dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	Izin		Izin	100 Izin	<b>164,175,700</b>						100 Izin	<b>300,000,000</b>	
2 18 04 2.01	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Jumlah Dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	Izin		Izin	100 Izin	<b>164,175,700</b>						100 Izin	<b>300,000,000</b>	
2 18 04 2.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Frekuensi Kunjungan Perizinan Keliling				7 Kecamatan	60,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	Masyarakat	7 Kecamatan	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
2 18 04 2.01 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Izin dalam Pengawasan dan Pemantauan				100 Izin	49,999,800	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	Masyarakat	100 Izin	150,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 04 2.01 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	IKM				81.9 Indeks	54,175,900	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	Masyarakat	81.9 Indeks	100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Persentase Perusahaan yang patuh terhadap Penerapan Regulasi	Persen		Persen	95 Persen	<b>119,999,800</b>						95 Persen	<b>518,000,000</b>		
2 18 05 2.01	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM	Persen		Persen	75 Persen	<b>119,999,800</b>						75 Persen	<b>518,000,000</b>		
2 18 05 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Koordinasi dengan Forum TJSLP dan Perusahaan Jumlah Perda/Perbup yang direvisi				3 Kali 1 Dokumen	90,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	Perusahaan dan UMKM	3 Kali 1 Dokumen	225,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan				1 Kegiatan	29,999,800	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	Perusahaan dan UMKM	1 Kegiatan	186,400,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Persentase Data Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola	Persen		Persen	100 Persen	<b>52,796,000</b>						100 Persen	<b>80,000,000</b>		
2 18 06 2.01	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Data Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola	Persen		Persen	100 Persen	<b>52,796,000</b>						100 Persen	<b>80,000,000</b>		
2 18 06 2.01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Data Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola				100 Persen	52,796,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	Masyarakat	100 Persen	80,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
2 23	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>						<b>3,511,247,048</b>							<b>3,511,249,383</b>		
2 23 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Layanan Operasional Kantor	Persen		Persen	100 Persen	<b>3,049,247,148</b>							100 Persen	<b>3,056,249,383</b>	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 23 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah ASN yang dibayar Gajinya dan Tunjangannya Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan honorinya Persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan Perangkat Daerah	Orang Orang persen		Orang Orang persen	23 Orang 8 Orang 100 persen	<b>2,365,809,383</b>						23 Orang 8 Orang 100 persen	<b>2,370,249,383</b>	
2 23 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	2,297,289,383	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	ASN yang akan menerima Gaji Dan Tunjangan	23 Orang/bulan	2,297,289,383	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan honorinya				8 Orang	68,520,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	ASN yang akan menerima Gaji Dan Tunjangan	8 Orang	72,960,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah ATK yang disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Peralatan listrik yang disediakan Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan Persentase pemenuhan kinerja pelayanan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis Persen Jenis Jenis persen		Jenis Persen Jenis Jenis persen	7 Jenis 100 Persen 5 Jenis 5 Jenis 100 persen	<b>201,941,000</b>						7 Jenis 100 Persen 5 Jenis 5 Jenis 100 persen	<b>204,000,000</b>	
2 23 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Peralatan listrik yang disediakan				5 Jenis	5,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Layanan Operasional Kantor	5 Jenis	5,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan				7 Jenis	17,940,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Layanan Operasional Kantor	7 Jenis	20,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
2	23	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan				5 Jenis	10,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Layanan Operasional Kantor	5 Jenis	10,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak yang Disediakan Jumlah Penggandaan yang disediakan				10 Unit 32000 Lembar	15,003,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Layanan Operasional Kantor	10 Unit 32000 Lembar	15,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum tamu yang disediakan				114 Kotak	4,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Layanan Operasional Kantor	114 Kotak	4,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makan minum rapat yang disediakan Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan				200 Kotak 350 Kali	149,998,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Layanan Operasional Kantor	200 Kotak 350 Kali	150,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah meubeleur yang disediakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya Persentase barang milik Daerah yang tersedia	Unit Unit persen	Unit Unit persen		10 Unit 20 Unit 100 persen	<b>299,999,800</b>						10 Unit 20 Unit 100 persen	<b>300,000,000</b>	
2	23	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah meubeleur yang disediakan				10 Unit	200,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 Unit	200,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20 Unit	99,999,800	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20 Unit	100,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 23 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Materai yang tersedia Jumlah Pemakaian Air Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Peramakaian Jasa Listrik Persentase Jasa Penunjang yang tersedia	Unit Buah Kubik Persen Kwh persen		Unit Buah Kubik Persen Kwh persen	34 Unit 350 Buah 1800 Kubik 100 Persen 2500 Kwh 100 persen	<b>57,000,000</b>					34 Unit 350 Buah 1800 Kubik 100 Persen 2500 Kwh 100 persen	<b>57,000,000</b>		
2 23 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia				350 buah	2,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	350 buah	2,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pemakaian Air Jumlah pemakaian jasa listrik Jumlah Pemakaian Telpon				1800 Kubik 2500 KWH 9516 GB	50,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1800 Kubik 2500 KWH 9516 GB	50,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor				34 Unit	5,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34 Unit	5,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Unit persen		Unit persen	5 Unit 100 persen	<b>124,496,965</b>						5 Unit 100 persen	<b>125,000,000</b>	
2 23 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara				5 Unit	105,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Pemeliharaan dan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Unit	105,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara				1 Unit	19,496,965	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Pemeliharaan dan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	20,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 23 02	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	Jumlah Kunjungan Perpustakaan ( pustaka Konvensional dan Digital)	Orang		Orang	3500 Orang	<b>431,999,900</b>						3500 Orang	<b>425,000,000</b>	
2 23 02 2.01	<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah perpustakaan yang dikelola Jumlah Titik Layanan Perpustakaan Keliling Junlah MOU yang di hasilakan	pustaka Orang Pustaka		pustaka Orang Pustaka	15 pustaka 250 Orang 12 Pustaka	<b>431,999,900</b>						15 pustaka 250 Orang 12 Pustaka	<b>425,000,000</b>	
2 23 02 2.01 02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah MOU yang dihasilkan Jumlah pemustaka di Solok Selatan Jumlah Perpustakaan nagari yang dibina jumlah titik layanan perpustakaan keliling				1 MOU 250 Orang 3 Pustaka 2 Layanan	376,999,900	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pengelolaan Perpustakaan	1 MOU 250 Orang 3 Pustaka 2 Layanan	370,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 02 2.01 03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Karya Cetak Yang terhimpun				8 Judul	25,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Pengelolaan Perpustakaan	8 Judul	25,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 02 2.01 04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah lomba perpustakaan sekolah Jumlah Perpustakaan yang terakreditasi Jumlah Perpustakaan sekolah yang dibina Jumlah peserta FGD Pengelola perpustakaan				7 Kali 2 Pustaka 12 Pustaka 15 Orang	30,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Pengelolaan Perpustakaan	7 Kali 2 Pustaka 12 Pustaka 15 Orang	30,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 03	<b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>	Jumlah Naskah Kuno didokumentasikan	Naskah Kuno		Naskah Kuno	4 Naskah Kuno	<b>30,000,000</b>						4 Naskah Kuno	<b>30,000,000</b>	
2 23 03 2.01	<b>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Naskah Kuno yang didaftarkan Jumlah Naskah Kuno yang di olah	naskah kuno Naskah Kuno		naskah kuno Naskah Kuno	1 naskah kuno 1 Naskah Kuno	<b>30,000,000</b>						1 naskah kuno 1 Naskah Kuno	<b>30,000,000</b>	
2 23 03 2.01 02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah naskah kuno yang di olah				1 Naskah Kuno	30,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Pelestarian Naskah Kuno	1 Naskah Kuno	30,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 24	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>							<b>80,000,000</b>						<b>115,000,000</b>	
2 24 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	Persentase arsip dinamis yang dikelola	Persen		Persen	60 Persen	<b>55,000,000</b>						60 Persen	<b>90,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 24 02 2.01	<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah arsip dinamis Nagari Yang telah tertata dengan baik Jumlah arsip dinamis OPD Yang telah tertata dengan baik Jumlah arsip dinamis Sekolah Yang telah tertata dengan baik Persentase Arsip Dinamis yang dikelola	Nagari OPD Sekolah persen		Nagari OPD Sekolah persen	6 Nagari 10 OPD 6 Sekolah 100 persen	40,000,000					6 Nagari 10 OPD 6 Sekolah 100 persen	60,000,000		
2 24 02 2.01 02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis Nagari Yang terpelihara Jumlah arsip dinamis OPD Yang terpelihara Jumlah arsip dinamis Sekolah Yang terpelihara				7 Nagari 1 OPD 5 Sekolah	40,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Pengelolaan Arsip Dinamis	7 Nagari 1 OPD 5 Sekolah	40,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 24 02 2.02	<b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Arsip Statis bernilai sejarah Kabupaten Solok Selatan Jumlah Arsip Statis bernilai sejarah yang terkumpul	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	15,000,000					1 Dokumen 1 Dokumen	15,000,000		
2 24 02 2.02 02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis bernilai sejarah yang terkumpul				1 Dok	15,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Pengelolaan Arsip Statis	1 Dok	15,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 24 03	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>	Persentase OPD yang telah melakukan pengelolaan arsip secara baku	Persen		Persen	100 Persen	25,000,000					100 Persen	25,000,000		
2 24 03 2.03	<b>Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan</b>	Jumlah Arsip Pemekaran Daerah yang diselamatkan	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	25,000,000					1 Dokumen 1 Dokumen	25,000,000		
2 24 03 2.03 03	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Arsip Pemekaran Daerah yang diselamatkan				1 dokumen	25,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah	1 dokumen	25,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
2 22	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>							625,000,000						1,245,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 22 02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	Persentase kesenian dilestarikan Persentase lembaga adat aktif	persen persen		persen persen	100 persen 100 persen	<b>435,000,000</b>					100 persen 100 persen	<b>472,000,000</b>		
2 22 02 2.02	<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Pengelolaan Kegiatan Kebudayaan Daerah	Sanggar		Sanggar	150 Sanggar	<b>300,000,000</b>					150 Sanggar	<b>287,000,000</b>		
2 22 02 2.02 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah event tradisi budaya Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				6 event 2 Objek	300,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Lembaga Kesenian	6 event 2 Objek	287,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2 22 02 2.03	<b>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata adat	persen		persen	100 persen	<b>135,000,000</b>					100 persen	<b>185,000,000</b>		
2 22 02 2.03 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah pelaku adat yang dibina/dilatih Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				60 orang 0 Orang	85,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	0	60 orang 0 Orang	85,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2 22 02 2.03 03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah lembaga adat dibantu sarana prasaarana Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				4 Lembaga 0 Unit	50,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	0	4 Lembaga 0 Unit	100,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2 22 03	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	Jumlah lembaga kesenian tradisional yang aktif	lembaga		lembaga	60 lembaga	<b>90,000,000</b>					60 lembaga	<b>115,000,000</b>		
2 22 03 2.01	<b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah sanggar kesenian yang dibina	Sanggar		Sanggar	60 Sanggar	<b>90,000,000</b>					60 Sanggar	<b>115,000,000</b>		
2 22 03 2.01 01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah SDM kesenian tradisional dilatih Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				120 orang 0 Orang	40,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Lemabga Kesenian	120 orang 0 Orang	65,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif								
										Nasional	Daerah											
2	22	03	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah sanggar seni yang ditingkatkan kapasitas tatakemelolanya						0 Lembaga 16 sanggar	50,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Lemabga Kesenian	0 Lembaga 16 sanggar	50,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
2	22	05			<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	Jumlah cagar budaya dilestarikan	Unit			Unit	133 Unit	<b>100,000,000</b>							133 Unit	<b>658,000,000</b>		
2	22	05	2.01		<b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	Unit			Unit	133 Unit	<b>50,000,000</b>							133 Unit	<b>293,000,000</b>		
2	22	05	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Dokumen Master Plan Cagar Budaya disusun Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan Jumlah peserta Diklat dan Sertifikasi SDM Cagar Budaya					0 dokumen 0 Objek 50 orang	50,000,000		Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Objek Yang akan ditetapkan sebagai cagar budaya	0 dokumen 0 Objek 50 orang	253,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
2	22	05	2.02		<b>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>	Jumlah atraksi budaya daerah yang dilestarikan	atraksi			atraksi	13 atraksi	<b>50,000,000</b>							13 atraksi	<b>365,000,000</b>		
2	22	05	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi					1 Objek	50,000,000		Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	0	1 Objek	265,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
3					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>																	
3	26				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>							<b>4,535,701,541</b>								<b>7,158,000,000</b>		
3	26	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Layanan Operasional Kantor	Persen			Persen	100 Persen	<b>3,871,015,541</b>								100 Persen	<b>4,194,000,000</b>	
3	26	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah	persen			persen	100 persen	<b>3,454,015,541</b>								100 persen	<b>3,468,000,000</b>	
3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					30 Orang/bulan	3,355,555,541			Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	30 Orang/bulan	3,368,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah tenaga pendukung operasional kantor yang gdbayarkan honorinya Jumlah ternaga administrasi keuangan yang dibayarkan honorinya				0 Dokumen 0 orang 15 orang	98,460,000		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	0 Dokumen 0 orang 15 orang	100,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
<b>3 26 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>190,000,000</b>						100 Persen	<b>280,000,000</b>	
3 26 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah peralatan listrik yang disediakan				0 Paket 5 jenis	5,000,000		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0 Paket 5 jenis	10,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 26 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 jenis 0 Paket	15,000,000		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	8 jenis 0 Paket	30,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 26 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah peralatan rumah tanga yang disediakan				0 Paket 5 jenis	5,000,000		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0 Paket 5 jenis	15,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 26 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah penggandaan yang disediakan				5 jenis 0 Paket 10000 lembar	15,000,000		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	5 jenis 0 Paket 10000 lembar	25,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 26 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Rapat yang disediakan Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Tamu yang disediakan Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi				0 Laporan 850 kotak 50 kotak 120 kali	150,000,000		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0 Laporan 850 kotak 50 kotak 120 kali	200,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang yang Tersedia	persen		persen	100 persen	<b>37,000,000</b>						100 persen	<b>46,000,000</b>	
3 26 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai yang tersedia				0 Laporan 200 buah	2,000,000		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	0	0 Laporan 200 buah	6,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 26 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah pemakaian air Jumlah pemakaian jasa listrik Jumlah Pemakaian Telekomunikasi				0 Laporan 3000 kubik 9655 KWH 500000 Menit	35,000,000		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	0	0 Laporan 3000 kubik 9655 KWH 500000 Menit	40,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 26 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Persen		Persen	100 Persen	<b>190,000,000</b>						100 Persen	<b>210,000,000</b>	
3 26 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah kendaraan yang terpelihara Jumlah pajak dan perijinan kendaraan dinas/operasional				0 Unit 9 Unit 9 unit	150,000,000		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	0	0 Unit 9 Unit 9 unit	150,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 26 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dilaksanakan pemeliharaan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit 0 Unit	30,000,000		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	0	1 Unit 0 Unit	40,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 26 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah saraana/prasarana gedung kantor dilaksanakan pemeliharaan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit 0 Unit	10,000,000		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	0	10 Unit 0 Unit	20,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 26 02	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	Jumlah Destinasi Wisata yang dikelola	Objek		Objek	13 Objek	<b>357,000,000</b>						13 Objek	<b>2,133,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 02 2.03	<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Destinasi Pariwisata Dikelola	Destinasi		Destinasi	13 Destinasi	<b>342,000,000</b>						13 Destinasi	<b>1,733,000,000</b>	
3 26 02 2.03 04	Pengadaan/Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah objek wisata yang telengkap sarana prasarana pengelolaannya Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				3 objek 0 Unit	242,000,000		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	0	3 objek 0 Unit	600,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 26 02 2.03 06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Pembinaan terhadap kelompok penggiat pariwisata (Bimbingan Teknis)				0 Laporan 4 kali	100,000,000		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	0	0 Laporan 4 kali	520,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 26 02 2.04	<b>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Perusahaan Swasta Berinvestasi pada sektor Pariwisata	Perusahaan		Perusahaan	3 Perusahaan	<b>15,000,000</b>						3 Perusahaan	<b>150,000,000</b>	
3 26 02 2.04 03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Jumlah Perikatan kerjasama /MoU Pemda dengan Swasta				0 Laporan 1 kerjasama	15,000,000		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	0	0 Laporan 1 kerjasama	150,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 26 03	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	Jumlah Destinasi Wisata Dipasarkan	Destinasi		Destinasi	13 Destinasi	<b>114,686,000</b>						13 Destinasi	<b>256,000,000</b>	
3 26 03 2.01	<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	Jumlah pelaksanaan Pemasaran Pariwisata	Kali		Kali	5 Kali	<b>114,686,000</b>						5 Kali	<b>256,000,000</b>	
3 26 03 2.01 01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah aplikasi pemasaran pariwisata yang dikelola Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				1 aplikasi 0 Dokumen	20,000,000		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	Destinasi Tujuan Wisata Unggulan	1 aplikasi 0 Dokumen	40,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 03 2.01 02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Event Promosi dan Pemasaran yang dilaksanakan/diikuti Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				3 Event 0 Laporan	50,000,000		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	Destinasi Tujuan Wisata Unggulan	3 Event 0 Laporan	136,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 26 03 2.01 03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen data kepariwisataan yang dipublikasikan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				2 Dokumen 0 Dokumen	28,500,000		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	Destinasi Tujuan Wisata Unggulan	2 Dokumen 0 Dokumen	40,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 26 03 2.01 04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Jumlah kerjasama pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri yang dikembangkan				0 Dokumen 2 kerjasama	16,186,000		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	Destinasi Tujuan Wisata Unggulan	0 Dokumen 2 kerjasama	40,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 26 04	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	Jumlah Ruang Kreatif Dikelola	Kawasan		Kawasan	1 Kawasan	<b>50,000,000</b>						1 Kawasan	<b>153,000,000</b>	
3 26 04 2.01	<b>Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Ruang Kreatif Dilengkapi Sarana dan Prasarana	Kawasan		Kawasan	1 Kawasan	<b>50,000,000</b>						1 Kawasan	<b>153,000,000</b>	
3 26 04 2.01 01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah ruang kreatif yang dikembangkan Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia				1 kawasan 0 Unit	50,000,000	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Koto Baru	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	1 kawasan 0 Unit	153,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 26 05	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	Persentase objek wisata yang dikelola Pokdarwis	persen		persen	43 persen	<b>143,000,000</b>						43 persen	<b>422,000,000</b>	
3 26 05 2.01	<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>	Jumlah Pelatihan untuk SDM Pariwisata dan Ekraf	Kali		Kali	3 Kali	<b>143,000,000</b>						3 Kali	<b>422,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 05 2.01 01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya				70 Orang	62,000,000		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	70 Orang	70,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 26 05 2.01 02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah event pada objek wisata yang dikelola Pokdarwis Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata				3 kali 0 Orang	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	3 kali 0 Orang	70,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 26 05 2.01 04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Jumlah SDM Pariwisata yang diikuti Sertifikasi				0 Orang 15 orang	21,000,000		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	0 Orang 15 orang	70,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 26 05 2.01 05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif Jumlah Pelaku Industri Ekraf yang difasilitasi				0 Laporan 10 usaha	30,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	0 Laporan 10 usaha	70,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>														
<b>3 27</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>						<b>26,191,122,643</b>							<b>36,746,752,177</b>	
<b>3 27 01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan layanan operasional kantor	Persen		Persen	100 Persen	<b>10,513,844,137</b>						100 Persen	<b>10,974,452,177</b>	
<b>3 27 01 2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	persen		persen	100 persen	<b>9,955,307,177</b>						100 persen	<b>10,011,407,177</b>	
3 27 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				96 Orang/bulan	9,726,407,177	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	ASN	96 Orang/bulan	9,726,407,177	Dinas Pertanian
3 27 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai yang mendapatkan honorium jasa administrasi keuangan/Pengelola Kegiatan barang dan jasa				28 Orang	228,900,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	ASN	28 Orang	230,000,000	Dinas Pertanian
<b>3 27 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>256,079,048</b>						100 Persen	<b>336,725,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Jenis	9,998,658	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	ASN	3 Jenis	9,800,000	Dinas Pertanian
3 27 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Jenis	36,100,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	ASN	1 Jenis	44,000,000	Dinas Pertanian
3 27 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Jenis	4,991,390	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	ASN	1 Jenis	9,075,000	Dinas Pertanian
3 27 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan disediakan Jumlah fotocopy Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				5 Jenis 40000 Lembar 0 Paket	25,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	ASN	5 Jenis 40000 Lembar 0 Paket	42,350,000	Dinas Pertanian
3 27 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu				100 Laporan	4,995,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	ASN	100 Laporan	6,000,000	Dinas Pertanian
3 27 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah makan minum rapat				70 Laporan 0 Laporan 1500 Kotak	174,994,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	ASN	70 Laporan 0 Laporan 1500 Kotak	225,500,000	Dinas Pertanian
3 27 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang disediakan	Jenis		Jenis	2 Jenis	<b>62,500,000</b>						2 Jenis	<b>75,020,000</b>	
3 27 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai yang tersedia				0 Laporan 200 Lembar	2,500,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Dinas	0 Laporan 200 Lembar	2,420,000	Dinas Pertanian

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah pemakaian air Jumlah pemakaian listrik Jumlah pemakaian telpon				0 Laporan 5100 meter kubik 18000 Kwh 3000000 byte	60,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Dinas	0 Laporan 5100 meter kubik 18000 Kwh 3000000 byte	72,600,000	Dinas Pertanian
3 27 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase pengadaan barang milik daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>239,957,912</b>						100 Persen	<b>446,300,000</b>	
3 27 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya				112 Unit	199,990,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Dinas	112 Unit	280,000,000	Dinas Pertanian
3 27 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				55 Unit	9,970,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	Dinas	55 Unit	36,300,000	Dinas Pertanian
3 27 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				2 Unit	29,997,912	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Dinas	2 Unit	130,000,000	Dinas Pertanian



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 02	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	Meningkatnya populasi ternak besar Meningkatnya produksi bawang merah Meningkatnya produksi cabe Meningkatnya produksi durian Meningkatnya produksi jagung Meningkatnya produksi kacang tanah Meningkatnya produksi kapulaga Meningkatnya produksi kelapa sawit Meningkatnya produksi kopi Meningkatnya produksi manggis Meningkatnya produksi padi Meningkatnya produksi porang Meningkatnya produksi telur	Ekor Ton Ton Ton Ton Ton Ton 0 Ton Ton Ton Ton Ton Ton		Ekor Ton Ton Ton Ton Ton Ton 0 Ton Ton Ton Ton Ton Ton	22263 Ekor 4474 Ton 7274 Ton 33 Ton 93369 Ton 803 Ton 5417 0 61416 Ton 3502 Ton 464 Ton 110362 Ton 182 Ton 451,78 Ton							22263 Ekor 4474 Ton 7274 Ton 33 Ton 93369 Ton 803 Ton 5417 0 61416 Ton 3502 Ton 464 Ton 110362 Ton 182 Ton 451,78 Ton	22,368,000,000	
3 27 02 2.01	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persen		Persen	100 Persen	1,344,999,800						100 Persen	316,000,000	
3 27 02 2.01 02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah bantuan alsintan yang diawasi (brigade alsintan) Jumlah kelembagaan UPJA (Unit Pelayanan Jasa Alsintan) yang terbentuk Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah petani yang didampingi penyusunan RDKK, update dan entry data e-RDKK, serta verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi Jumlah petani yang mengikuti pelatihan penggunaan sarana pasca panen komoditi tanaman pangan				100 unit 15 buah 0 Laporan 13000 Orang 50 Orang	1,344,999,800	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	Kelompok	100 unit 15 buah 0 Laporan 13000 Orang 50 Orang	316,000,000	Dinas Pertanian

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 02 2.02	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Persentase pemakaian bibit bersertifikat	Persen		Persen	100 Persen	<b>1,739,998,790</b>						100 Persen	<b>975,000,000</b>	
3 27 02 2.02 01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian Jumlah varietas komoditi tanaman hortikultura yang dimurnikan pada penangkar (cabe kaput, manggis dan durian) Jumlah varietas komoditi tanaman pangan yang di murnikan (padi sawah dan padi ladang), 2 MT setiap tahun				0 VUB 1 VARIETAS 1 VARIETAS	219,998,960	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	Kelompok Tani	0 VUB 1 VARIETAS 1 VARIETAS	110,000,000	Dinas Pertanian
3 27 02 2.02 02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Angka Pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				3000 Ekor 0 Dokumen	74,999,870	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	Kelompok Tani	3000 Ekor 0 Dokumen	85,000,000	Dinas Pertanian
3 27 02 2.02 03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah luasan bibit unggul tanaman hortikultura Jumlah luasan bibit unggul tanaman perkebunan Jumlah luasan pemakaian bibit unggul tanaman pangan Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				26 HEKTAR 140 HEKTAR 6320 HEKTAR 0 Dokumen	1,444,999,960	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	Kelompok Tani	26 HEKTAR 140 HEKTAR 6320 HEKTAR 0 Dokumen	780,000,000	Dinas Pertanian
3 27 02 2.06	<b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</b>	Persentase pelaksanaan Penyediaan Benih / Bibit Ternak dan Hijauan Makanan ternak	Persen		Persen	100 Persen	<b>10,251,454,200</b>						100 Persen	<b>21,077,000,000</b>	
3 27 02 2.06 01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				500 Ekor	10,201,454,300	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	Kelompok Tani	500 Ekor	21,000,000,000	Dinas Pertanian

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 02 2.06 02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				3750 Ton	49,999,900	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	Kelompok Tani	3750 Ton	77,000,000	Dinas Pertanian
<b>3 27 03</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	Meningkatnya produktifitas padi	Ton/Ha		Ton/Ha	5.41 Ton/Ha	<b>1,348,850,694</b>						5.41 Ton/Ha	<b>1,258,800,000</b>	
3 27 03 2.01	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	Persentase pengembangan Prasarana Pertanian yang dimanfaatkan	Persen		Persen	100 Persen	<b>119,999,750</b>						100 Persen	<b>199,800,000</b>	
3 27 03 2.01 01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Jumlah luasan kawasan LP2B, KP2B dan LCP2B sesuai lokasi Jumlah pelaksanaan ubinan swakarsa Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola				8921.55 HEKTAR 12 Kali 0 Dokumen 12 Dokumen	66,999,850	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	Kelompok Tani	8921.55 HEKTAR 12 Kali 0 Dokumen 12 Dokumen	146,800,000	Dinas Pertanian
3 27 03 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	52,999,900	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	Kelompok Tani	1 Laporan	53,000,000	Dinas Pertanian
<b>3 27 03 2.02</b>	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian yang dimanfaatkan	Persen		Persen	100 Persen	<b>1,228,850,944</b>						100 Persen	<b>1,009,000,000</b>	
3 27 03 2.02 01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara Terlaksannya pendampingan dan pembinaan Jaringan Irigasi Usaha tani				1 Unit 1 Kegiatan	319,999,800	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	Kelompok Tani	1 Unit 1 Kegiatan	200,000,000	Dinas Pertanian

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Terlaksananya pendampingan dan pengawasan jalan usaha tani				0 Unit 1 Kegiatan	119,999,800	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	Kelompok Tani	0 Unit 1 Kegiatan	200,000,000	Dinas Pertanian
3	27	03	2.02	04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Terlaksananya pendampingan dan pembinaan dam parit				0 Unit 1 Kegiatan	19,999,800	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	Kelompok Tani	0 Unit 1 Kegiatan	132,000,000	Dinas Pertanian
3	27	03	2.02	06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Terlaksananya pendampingan dan pengawasan pintu air				0 Unit 1 Kegiatan	35,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	Kelompok Tani	0 Unit 1 Kegiatan	105,000,000	Dinas Pertanian
3	27	03	2.02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	69,999,963	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	Kelompok Tani	1 Unit	80,000,000	Dinas Pertanian
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	663,851,581	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	Kelompok Tani	1 Unit	292,000,000	Dinas Pertanian
3	27	04			<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	Cakupan penanggulangan kasus penyakit menular (hewan)	Persen		Persen	100 Persen	<b>281,979,406</b>						100 Persen	<b>452,500,000</b>	
3	27	04	2.01		<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota</b>	Pesentase penjaminan Kesehatan Hewan	Persen		Persen	100 Persen	<b>106,999,956</b>						100 Persen	<b>204,000,000</b>	
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah hewan yang di vaksin Rabies Jumlah hewan yang di vaksin SE Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis Persentase hewan yang tervaksin				2500 ekor 1500 Ekor 0 Laporan 50 persen	106,999,956	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	Kelompok Tani	2500 ekor 1500 Ekor 0 Laporan 50 persen	204,000,000	Dinas Pertanian

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 04 2.02	<b>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Pos pelayanan lalulintas ternak yang dikelola	Persen		Persen	100 Persen	29,999,800						100 Persen	50,000,000	
3 27 04 2.02 02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Jumlah pos pelayanan lalu lintas ternak yang dikelola				0 Laporan 2 Unit	29,999,800	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	Kelompok Tani	0 Laporan 2 Unit	50,000,000	Dinas Pertanian
3 27 04 2.03	<b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Pelayanan Jasa Labortorium dan jasa medik Veteriner	Persen		Persen	100 Persen	94,999,595						100 Persen	118,500,000	
3 27 04 2.03 01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium Jumlah sampel penyakit ternak yang diperiksa				0 Laporan 30 sampel	39,999,801	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	Kelompok Tani	0 Laporan 30 sampel	58,000,000	Dinas Pertanian
3 27 04 2.03 02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah ternak yang mendapatkan jasa kesehatan hewan				0 Laporan 8000 ekor	54,999,794	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	Kelompok Tani	0 Laporan 8000 ekor	60,500,000	Dinas Pertanian
3 27 04 2.04	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	Persentase unit usaha yang memenuhi persyaratan teknis	Persen		Persen	100 Persen	49,980,055						100 Persen	80,000,000	
3 27 04 2.04 01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pelaku/Unit Usaha yang Mendapatkan Pendampingan kelayakan teknis Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan				8 orang 0 Laporan	29,980,600	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	Kelompok Tani	8 orang 0 Laporan	50,000,000	Dinas Pertanian
3 27 04 2.04 02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Jumlah Sampel Produk Peternakan yang di Uji				0 Laporan 5 sampel	19,999,455	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	Kelompok Tani	0 Laporan 5 sampel	30,000,000	Dinas Pertanian
3 27 05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	Cakupan penanggulangan bencana pertanian	Persen		Persen	100 Persen	49,995,900						100 Persen	62,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 05 2.01	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	Persentase bencana pertanian yang ditanggulangi	Persen		Persen	100 Persen	<b>49,995,900</b>						100 Persen	<b>62,000,000</b>	
3 27 05 2.01 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Cakupan wilayah pengendalian OPT tanaman pangan (padi) Cakupan wilayah pengendalian OPT tanaman perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				7 WILAYAH 3 WILAYAH 0 Ha	24,995,900	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	Masyarakat	7 WILAYAH 3 WILAYAH 0 Ha	30,000,000	Dinas Pertanian
3 27 05 2.01 05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Luas lahan sawah yang ikut Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan				100 HEKTAR 0 Laporan	25,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	Masyarakat	100 HEKTAR 0 Laporan	32,000,000	Dinas Pertanian
3 27 06	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	Persentase rekomendasi yang dikeluarkan	Persen		Persen	100 Persen	<b>10,000,000</b>						100 Persen	<b>105,000,000</b>	
3 27 06 2.01	<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen		Persen	100 Persen	<b>10,000,000</b>						100 Persen	<b>53,000,000</b>	
3 27 06 2.01 03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi Jumlah perusahaan perkebunan yang diawasi				0 Laporan 18 perusahaan	10,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	Kelompok Tani	0 Laporan 18 perusahaan	53,000,000	Dinas Pertanian
3 27 07	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	Persentase Kelompok tani berdasarkan kelas lanjut Persentase Kelompok tani berdasarkan kelas madya Persentase Kelompok tani berdasarkan kelas pemula Persentase Kelompok tani berdasarkan kelas utama Persentase ketersediaan penyuluh	Persen Persen Persen Persen		Persen Persen Persen Persen	22.66 Persen 1.19 Persen 76.06 Persen 0.08 Persen 77.19 Persen	<b>649,999,716</b>						22.66 Persen 1.19 Persen 76.06 Persen 0.08 Persen 77.19 Persen	<b>1,526,000,000</b>	





**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
3	27						209,990,955							100,000,000		
3	27	04					209,990,955						100 Persen	100,000,000		
3	27	04	2.01				209,990,955						100 Persen	100,000,000		
3	27	04	2.01	01			3000 Ekor 0 Laporan	209,990,955	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	Masyarakat dan Keltan	3000 Ekor 0 Laporan	100,000,000	Dinas Pertanian
3																
3	27							199,999,680						197,000,000		
3	27	02						199,999,680						197,000,000		
3	27	02	2.02					199,999,680					100 Persen	197,000,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 02 2.02 02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah BBI yang dikelola Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				1 unit 0 Dokumen	99,999,886	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	Kelompok Tani	1 unit 0 Dokumen	120,000,000	Dinas Pertanian
3 27 02 2.02 03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah bibit dihasilkan dan distribusikan Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				10000 batang 0 Dokumen	99,999,794	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	Kelompok Tani	10000 batang 0 Dokumen	77,000,000	Dinas Pertanian
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
2 17	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>						<b>1,992,153,400</b>							<b>593,000,045</b>	
2 17 03	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	Persentase Koperasi Aktif	persen		persen	65,22 persen	<b>45,000,000</b>						65,22 persen	<b>25,000,045</b>	
2 17 03 2.01	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Persentase koperasi aktif	persen		persen	65.22 persen	<b>45,000,000</b>						65.22 persen	<b>25,000,045</b>	
2 17 03 2.01 01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah koperasi sektor rill yang dibina Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah KSP/USP koperasi yang dibina				74 Unit 0 Unit Usaha 53 Unit	45,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	Koperasi	74 Unit 0 Unit Usaha 53 Unit	45	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 04	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	Persentase KSP/USP Koperasi	persen		persen	16,95 persen	<b>43,609,000</b>						16,95 persen	<b>81,000,000</b>	
2 17 04 2.01	<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah KSP/USP koperasi sehat	unit		unit	10 unit	<b>43,609,000</b>						10 unit	<b>81,000,000</b>	
2 17 04 2.01 01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah koperasi KSP/USP yang dinilai kesehatannya				13 unit	18,187,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	Koperasi	13 unit	40,500,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 04 2.01 02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah koperasi yang berprestasi				3 unit	25,421,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	Koperasi	3 unit	40,500,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 05	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	Persentase Koperasi yang memiliki Laporan Keuangan baik	persen		persen	35,65 persen	<b>54,544,400</b>						35,65 persen	<b>65,000,000</b>	
2 17 05 2.01	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	persen pengurus/pengelola koperasi yang diberikan pelatihan	persen		persen	1 persen	<b>54,544,400</b>						1 persen	<b>65,000,000</b>	
2 17 05 2.01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Anggota/Pengurus Koperasi yang mengikuti Pelatihan Perkoperasiann				30 Orang	54,544,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	Koperasi	30 Orang	65,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 07	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	Persentase Pertumbuhan UMKM	persen		persen	1 persen	<b>389,000,000</b>						1 persen	<b>270,000,000</b>	
2 17 07 2.01	<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi standarisasi produk, sertifikasi dan perijinan serta kemitraan	UMKM		UMKM	144 UMKM	<b>389,000,000</b>						144 UMKM	<b>270,000,000</b>	
2 17 07 2.01 01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah UMKM yang diinput ke aplikasi ODS Jumlah Usaha Mikro				0 Dokumen 9800 UMKM 9800 UMKM	55,000,000		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	UMKM	0 Dokumen 9800 UMKM 9800 UMKM	55,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 07 2.01 02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang bermitra				0 Unit Usaha 85 usaha mikro	35,000,000		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	UMKM	0 Unit Usaha 85 usaha mikro	35,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 07 2.01 03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	jumlah usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi Jumlah Usaha Mikro yang diberi dukungan Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				10 halal/UMKM 15 merk/UMKM 0 Unit Usaha	59,000,000		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	UMKM	10 halal/UMKM 15 merk/UMKM 0 Unit Usaha	60,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 07 2.01 04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah lembaga/kelompok pelaku usaha yang difasilitasi Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				2 Lembaga 0 Unit Usaha	170,000,000		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	UMKM	2 Lembaga 0 Unit Usaha	40,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 07 2.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	jumlah peserta inkubasi Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				2 orang 0 Orang	20,000,000		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	UMKM	2 orang 0 Orang	20,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 07 2.01 06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				30 Orang	50,000,000		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	UMKM	30 Orang	60,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 08	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	Persentase Peningkatan Skala Usaha	persen		persen	0,15 persen	<b>1,460,000,000</b>						0,15 persen	<b>121,000,000</b>	
2 17 08 2.01	<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	Jumlah Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya menjadi Usaha Kecil	UMKM		UMKM	15 UMKM	<b>1,460,000,000</b>						15 UMKM	<b>121,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 08 2.01 01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi Pelatihan jumlah usaha mikro yang difasilitasi produksi jumlah usaha mikro yang difasilitasi sarana pemasaran				0 Unit Usaha 880 usaha mikro 10 usaha mikro 10 usaha mikro	1,460,000,000		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	UMKM	0 Unit Usaha 880 usaha mikro 10 usaha mikro 10 usaha mikro	121,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>														
3 30	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>						<b>1,099,570,000</b>							<b>2,167,000,000</b>	
3 30 03	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	Persentase pemanfaatan sarana distribusi perdagangan	persen		persen	80,17 persen	<b>449,570,000</b>						80,17 persen	<b>395,000,000</b>	
3 30 03 2.01	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola	persen		persen	85 persen	<b>379,570,000</b>						85 persen	<b>275,000,000</b>	
3 30 03 2.01 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Kios yang dibangun atau direhabilitasi Jumlah Los yang dibangun atau rehabilitasi Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				6 Unit 4 Unit 0 Unit	379,570,000		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	pasar	6 Unit 4 Unit 0 Unit	275,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3 30 03 2.02	<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>	Persentase Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang dibina	persen		persen	100 persen	<b>70,000,000</b>						100 persen	<b>120,000,000</b>	
3 30 03 2.02 01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Yang diBina dan diberdayakan				0 Dokumen 33 pengelola	70,000,000		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	0	0 Dokumen 33 pengelola	120,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3 30 04	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	Koefisien Harga barang Kebutuhan Pokok Antar Waktu	koefisien		koefisien	11- 13 koefisien	<b>217,000,000</b>						11- 13 koefisien	<b>313,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 04 2.01	<b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota	persen		persen	100 persen	<b>50,000,000</b>						100 persen	<b>100,000,000</b>	
3 30 04 2.01 03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat  Jumlah lokasi yang diawasi ketersediaan barang pokok				0 Laporan 7 lokasi	50,000,000		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	0	0 Laporan 7 lokasi	50,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3 30 04 2.02	<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	koefisien harga barang kebutuhan pokok antar waktu	persen		persen	65 persen	<b>137,000,000</b>						65 persen	<b>163,000,000</b>	
3 30 04 2.02 03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota  Jumlah Lokasi Pelaksanaan Operasi Pasar  jumlah paket bazar				0 Laporan 7 lokasi 3300 paket	137,000,000		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	0	0 Laporan 7 lokasi 3300 paket	138,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3 30 04 2.03	<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Pupuk dan Pestisida bersubsidi yang tersalurkan	persen		persen	100 persen	<b>30,000,000</b>						100 persen	<b>50,000,000</b>	
3 30 04 2.03 03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%  persentase penyaluran pupuk bersubsidi terhadap alokasi pupuk bersubsidi				0 Laporan 100 persen	30,000,000		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	0	0 Laporan 100 persen	50,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3 30 06	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya bertanda tera sah	persen		persen	43,30 persen	<b>358,000,000</b>						43,30 persen	<b>1,273,000,000</b>	
3 30 06 2.01	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	jumlah alat standar metrologi dan perlengkapan yang tersedia	unit		unit	1200 unit	<b>358,000,000</b>						1200 unit	<b>1,273,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 06 2.01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	jumlah alat metrologi yang dikalibrasi Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang jumlah gedung metrologi yang dibangun				331 Unit 0 Unit 1 bangunan	281,000,000		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	pedagang	331 Unit 0 Unit 1 bangunan	1,193,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3 30 06 2.01 02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina jumlah pelaku usaha/pemilik UTTP yang dilakukan penyuluhan				0 Orang 80 UTTP	77,000,000		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	pedagang	0 Orang 80 UTTP	80,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3 30 07	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk dalam Daerah (lokal)	persen		persen	56 persen	<b>75,000,000</b>						56 persen	<b>101,000,000</b>	
3 30 07 2.01	<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	Persentase Peningkatan Penggunaan produk dalam daerah (lokal)	persen		persen	56 persen	<b>75,000,000</b>						56 persen	<b>101,000,000</b>	
3 30 07 2.01 01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Even Promosi yang dilaksanakan Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				5 EVENT 0 UMKM	50,000,000		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	0	5 EVENT 0 UMKM	51,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3 30 07 2.01 02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Produk yang dipasarkan dan digunakan Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Lokal Melalui Kemitraan dengan Retail, Market Place, Perhotelan, dan Jasa Akomodasi				4 PRODUK 0 UMKM 4 UMKM	25,000,000		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	0	4 PRODUK 0 UMKM 4 UMKM	25,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3 31	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>						<b>4,122,902,424</b>						<b>5,895,000,000</b>		
3 31 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	cakupan layanan operasional kantor Terlaksananya operasional pelayanan kantor	persen persen		persen persen	100 persen 100 persen	<b>3,169,053,024</b>						100 persen 100 persen	<b>3,334,000,000</b>	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
3	31	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah	persen		persen	100 persen	<b>2,726,562,950</b>					100 persen	<b>2,747,650,000</b>		
3	31	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 orang 0 Orang/bulan	2,617,002,950		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	0	24 orang 0 Orang/bulan	2,602,650,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3	31	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan honorinya				0 Dokumen 11 orang	109,560,000		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	0	0 Dokumen 11 orang	125,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3	31	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum perangkat daerah	persen		persen	100 persen	<b>239,990,699</b>					100 persen	<b>319,750,000</b>		
3	31	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peralatan listrik yang disediakan				5 jenis	4,995,699		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	0	5 jenis	5,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3	31	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK yang disediakan				17 jenis	25,000,000		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	0	17 jenis	60,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3	31	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Peralatan rumah tangga yang disediakan				0 Paket 2 jenis	5,000,000		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	0	0 Paket 2 jenis	8,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3	31	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetak yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan penggandaan yang disediakan				6 jenis 0 Paket 6000 lembar	25,000,000		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	0	6 jenis 0 Paket 6000 lembar	40,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3	31	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah makan dan minum tamu yang disediakan				0 Laporan 150 kotak	4,995,000		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	0	0 Laporan 150 kotak	6,750,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 31 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah makan minum rapat yang disediakan Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan				0 Laporan 1125 kotak 48 kali	175,000,000		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	0	0 Laporan 1125 kotak 48 kali	200,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3 31 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia	persen		persen	100 persen	<b>52,500,000</b>						100 persen	<b>63,000,000</b>	
3 31 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai yang tersedia				0 Laporan 300 Buah	2,500,000		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	0	0 Laporan 300 Buah	3,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3 31 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Pemakaian Air Jumlah Pemakaian jasa Listrik Jumlah Pemakaian jasa Telepon/Internet				0 Laporan 2250 Kubik 16.51724137931 KWH 105 GB	50,000,000		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	0	0 Laporan 2250 Kubik 16.51724137931 KWH 105 GB	60,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3 31 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	persen		persen	100 persen	<b>149,999,375</b>						100 persen	<b>163,600,000</b>	
3 31 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional				0 Unit 17 unit 17 unit	115,000,000		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	0	0 Unit 17 unit 17 unit	115,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3 31 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang terpelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 unit 0 Unit	5,000,000		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	0	20 unit 0 Unit	8,600,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 31 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah gedung kantor dan bangunan lainya yang terpelihara				0 Unit 2 unit	29,999,375		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	0	0 Unit 2 unit	30,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3 31 02	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	Jumlah Sentra Industri Kabupaten yang dibangun dan dikembangkan	sentra		sentra	4 sentra	<b>858,849,400</b>						4 sentra	<b>2,380,000,000</b>	
3 31 02 2.01	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Sentra Industri Kabupaten yang dibangun dan dikembangkan	sentra		sentra	1 sentra	<b>858,849,400</b>						1 sentra	<b>2,380,000,000</b>	
3 31 02 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri Jumlah Sentra Industri yang akan dikembangkan				0 Dokumen 4 sentra	83,849,400		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	0	0 Dokumen 4 sentra	100,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3 31 02 2.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah IKM yang dilatih Jumlah lembaga pemerhati dan pencinta produk kerajinan daerah yang dikerjasamakan Jumlah sentra industri yang representatif				0 Dokumen 220 IKM 1 Lembaga 1 sentra	775,000,000		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	0	0 Dokumen 220 IKM 1 Lembaga 1 sentra	2,280,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3 31 03	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>	Persentase Kepatuhan Perusahaan dalam Pelaporan ke Aplikasi SIINAS	persen		persen	100 persen	<b>95,000,000</b>						100 persen	<b>181,000,000</b>	
3 31 03 2.01	<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	izin iindustri		izin iindustri	109 izin iindustri	<b>95,000,000</b>						109 izin iindustri	<b>181,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 31 03 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Izin perizinan (IUI) yang terintegrasikan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS				30 izin 0 Dokumen	20,000,000		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	0	30 izin 0 Dokumen	25,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3 31 03 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data base IKM Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah industri yang di pantau izin industri				1 dokumen 0 Dokumen 150 industri	75,000,000		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	0	1 dokumen 0 Dokumen 150 industri	156,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>														
3 30	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>														
3 30 03	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	Persentase pemanfaatan sarana distribusi perdagangan	persen		persen	80,17 persen	<b>589,000,000</b>						80,17 persen	<b>415,000,000</b>	
3 30 03 2.01	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola	persen		persen	85 persen	<b>589,000,000</b>						85 persen	<b>415,000,000</b>	
3 30 03 2.01 02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah UPT Pasar yang difasilitasi				1 UPT	589,000,000		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	0	1 UPT	415,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
4	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
4 01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>														
4 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Layanan Operasional Kantor	Persen		Persen	100 Persen	<b>74,990,920</b>						100 Persen	<b>85,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>54,992,000</b>						100 Persen	<b>60,000,000</b>	
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan				30 Kali	54,992,000		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	30 Kali	60,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Persen		Persen	100 Persen	<b>19,998,920</b>						100 Persen	<b>25,000,000</b>	
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional yang terpelihara				1 Unit	19,998,920		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	1 Unit	25,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 02	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Persentase kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	Persen		Persen	100 Persen	<b>499,999,750</b>						100 Persen	<b>610,000,000</b>	
4 01 02 2.01	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	Jumlah dokumen LKPJ dan LPPD yang disusun tepat waktu Persentase kebijakan yang ditetapkan dan dievaluasi	Dokumen Persen		Dokumen Persen	2 Dokumen 100 Persen	<b>499,999,750</b>						2 Dokumen 100 Persen	<b>610,000,000</b>	
4 01 02 2.01 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah kebijakan bidang administrasi pemerintahan yang dirumuskan dan dievaluasi				4 Dokumen	100,000,000		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	4 Dokumen	100,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Pembakuan Rupa Bumi yang disusun Jumlah Kecamatan yang dibina				1 Dokumen 7 Kecamatan	69,999,850		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	1 Dokumen 7 Kecamatan	100,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen LKPJ dan LPPD yang disusun Jumlah Dokumen Pencapaian Pelaksanaan SPM Jumlah Hari Besar Nasional yang difasilitasi peringatannya Jumlah Kerjasama Daerah				2 Dokumen 1 Dokumen 3 HBN 20 Buah	329,999,900		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	2 Dokumen 1 Dokumen 3 HBN 20 Buah	410,000,000	Sekretariat Daerah
5	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
5 06	<b>PENGLOLAAN PERBATASAN</b>							<b>39,999,900</b>						<b>50,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 06 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN</b>	Persentase segmen batas Nagari yang diselesaikan	Persen		Persen	100 Persen	<b>39,999,900</b>						100 Persen	<b>50,000,000</b>	
5 06 02 2.02	<b>Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan</b>	Persentase segmen batas kecamatan dan dokumen batas yang terselesaikan	Persen		Persen	100 Persen	<b>39,999,900</b>						100 Persen	<b>50,000,000</b>	
5 06 02 2.02 01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Nagari yang difasilitasi kesepakatan penyelesaian segmen Batasnya				24 Nagari	39,999,900		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Nagari	24 Nagari	50,000,000	Sekretariat Daerah
4	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
4 01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						<b>551,996,390</b>						<b>443,000,000</b>		
4 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Layanan Operasional Kantor	Persen		Persen	100 Persen	<b>76,996,390</b>						100 Persen	<b>85,000,000</b>	
4 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>54,997,000</b>						100 Persen	<b>60,000,000</b>	
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan				30 Kali	54,997,000		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	30 Kali	60,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Persen		Persen	100 Persen	<b>21,999,390</b>						100 Persen	<b>25,000,000</b>	
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara				2 Unit	21,999,390		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	2 Unit	25,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 02	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Persentase kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	Persen		Persen	100 Persen	<b>475,000,000</b>						100 Persen	<b>358,000,000</b>	
4 01 02 2.03	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	Persentase Terfasilitasinya penyusunan produk hukum daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>475,000,000</b>						100 Persen	<b>358,000,000</b>	
4 01 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Nagari Yang dimonitoring dan dievaluasi produk hukumnya Jumlah produk hukum yang diharmonisasi				39 Nagari 12 Ranperda	150,000,000		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	39 Nagari 12 Ranperda	150,000,000	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 02 2.03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah keluarga sadar hukum yang dibina Jumlah Pendapat hukum yang diberikan dan ditindaklanjuti Jumlah perkara yang tertangani				7 Kelompok 10 Pendapat Hukum 3 Perkara	225,000,000		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	7 Kelompok 10 Pendapat Hukum 3 Perkara	108,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Peraturan Daerah yang diinventarisasi Jumlah Peraturan Daerah yang disosialisasikan Jumlah Peraturan Daerah yang tertata melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum				7 Perda 7 Perda 7 Perda	100,000,000		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	7 Perda 7 Perda 7 Perda	100,000,000	Sekretariat Daerah
4	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
4 01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						<b>19,411,822,979</b>							<b>5,617,000,000</b>	
4 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Layanan Operasional Kantor	Persen		Persen	100 Persen	<b>91,982,000</b>						100 Persen	<b>85,000,000</b>	
4 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>69,984,000</b>						100 Persen	<b>60,000,000</b>	
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan				30 Kali	69,984,000		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	30 Kali	60,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Persen		Persen	100 Persen	<b>21,998,000</b>						100 Persen	<b>25,000,000</b>	
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara				1 Unit	21,998,000		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	1 Unit	25,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 02	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Persentase kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	Persen		Persen	100 Persen	<b>19,319,840,979</b>						100 Persen	<b>5,532,000,000</b>	
4 01 02 2.02	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	Persentase Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan	Persen		Persen	100 Persen	<b>19,319,840,979</b>						100 Persen	<b>5,532,000,000</b>	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
4 01 02 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Event keagamaan yang difasilitasi Jumlah Fasilitasi Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Jumlah Guru Tahfidz yang dibina Jumlah Kafilah yang Fasilitasi Jumlah Kegiatan Hari Besar Islam yang diperingati Jumlah lembaga keagamaan yang diberikan bantuan operasional Jumlah Masjid yang dikunjungi dan diberi bantuan Jumlah Ulama, Dai, Khatib, Imam Masjid dan Guru MDA yang dibina				0 Dokumen 3 Event 2 Kali 170 Orang 120 Orang 8 PHBI 5 Lembaga 35 Masjid 150 Orang	18,384,899,979		Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Masyarakat	0 Dokumen 3 Event 2 Kali 170 Orang 120 Orang 8 PHBI 5 Lembaga 35 Masjid 150 Orang	5,332,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 02 2.02 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Beasiswa Bagi Masyarakat Kurang Mampu Tingkat Perguruan Tinggi yang diberikan Jumlah Beasiswa Bagi Masyarakat Kurang Mampu Tingkat SMA yang diberikan Jumlah kebijakan bidang Kesejahteraan Sosial yang dirumuskan dan dievaluasi Jumlah UKS yang di Fasilitasi				50 Orang 95 Orang 4 Dokumen 3 UKS	100,000,000		Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Masyarakat	50 Orang 95 Orang 4 Dokumen 3 UKS	100,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 02 2.02 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah kebijakan bidang kesejahteraan masyarakat yang dirumuskan dan dievaluasi				4 Dokumen	834,941,000		Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Masyarakat	4 Dokumen	100,000,000	Sekretariat Daerah	
4	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>															
4 01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						<b>415,998,320</b>							<b>420,000,000</b>		
4 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Layanan Operasional Kantor	Persen		Persen	100 Persen	<b>415,998,320</b>							100 Persen	<b>420,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>74,999,000</b>						100 Persen	<b>100,000,000</b>	
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan				0 Laporan 30 Kali	74,999,000		Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	0 Laporan 30 Kali	80,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Persen		Persen	100 Persen	<b>21,999,520</b>						100 Persen	<b>30,000,000</b>	
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional yang terpelihara				2 Unit	21,999,520		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	2 Unit	30,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.14	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	Persentase pelayanan keprotokolan yang dilaksanakan sesuai standar keprotokolan	Persen		Persen	100 Persen	<b>318,999,800</b>						100 Persen	<b>290,000,000</b>	
4 01 01 2.14 01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah pelayanan keprotokolan yang dilaksanakan sesuai standar keprotokolan				100 Kali	88,999,800		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan. Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	100 Kali	90,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.14 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Media Publikasi publik yang mengakomodir kegiatan pimpinan				1 Media Publikasi	100,000,000		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan. Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	1 Media Publikasi	100,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Kegiatan Pimpinan yang didokumentasikan dan dipublikasikan				100 Kali	130,000,000		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	100 Kali	100,000,000	Sekretariat Daerah
4	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
4 01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						<b>179,984,652</b>						<b>225,000,000</b>		
4 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Layanan Operasional Kantor	Persen		Persen	100 Persen	<b>79,984,652</b>						100 Persen	<b>135,000,000</b>	
4 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>54,991,000</b>						100 Persen	<b>60,000,000</b>	
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan				30 Kali	54,991,000		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	30 Kali	60,000,000	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Persen		Persen	100 Persen	<b>24,993,652</b>						100 Persen	<b>25,000,000</b>	
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara				2 Unit	24,993,652		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	2 Unit	25,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 03	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	Persentase Kebijakan bidang Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	Persen		Persen	100 Persen	<b>100,000,000</b>						100 Persen	<b>90,000,000</b>	
4 01 03 2.02	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	Persentase kebijakan pengendalian kegiatan pembangunan yang diterbitkan	Persen		Persen	100 Persen	<b>100,000,000</b>						100 Persen	<b>90,000,000</b>	
4 01 03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah rumusan kebijakan terkait pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program pembangunan				4 Dokumen	50,000,000		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	4 Dokumen	40,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah dokumen evaluasi dan laporan atas pelaksanaan Program dan Kegiatan				12 Dokumen	50,000,000		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	12 Dokumen	50,000,000	Sekretariat Daerah
4	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
4 01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>							<b>356,951,432</b>						<b>385,000,000</b>	
4 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Layanan Operasional Kantor	Persen		Persen	100 Persen	<b>356,951,432</b>						100 Persen	<b>385,000,000</b>	
4 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>54,962,000</b>						100 Persen	<b>60,000,000</b>	
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan				30 Kali	54,962,000		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	30 Kali	60,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Persen		Persen	100 Persen	<b>21,989,532</b>						100 Persen	<b>25,000,000</b>	
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas Operasional yang terpelihara				1 Unit	21,989,532		Dana Perimbangan			Perangkat Daerah	1 Unit	25,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.13	<b>Penataan Organisasi</b>	Persentase Jabatan Yang Memiliki Standar Kompetensi Jabatan	Persen		Persen	100 Persen	<b>279,999,900</b>						100 Persen	<b>300,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
4 01 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Anjab yang disusun dan Dievaluasi Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Regulasi Kelembagaan dan Analisa Jabatan yang dibentuk dan dievaluasi Jumlah Regulasi terkait penetapan standar kompetensi manajerial yang ditetapkan dan Dievaluasi				33 Dokumen 0 Dokumen 33 dokumen 1 dokumen	99,999,900		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	33 Dokumen 0 Dokumen 33 dokumen 1 dokumen	100,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen IKM dan Dokumen Standar Pelayanan OPD yang disusun dan dievaluasi Jumlah Dokumen Peta proses dan SOP yang disusun dan Dievaluasi Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang difasilitasi untuk mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik				33 Dokumen 33 Dokumen 1 Dokumen	80,000,000		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	33 Dokumen 33 Dokumen 1 Dokumen	100,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah yang disusun Jumlah Dokumen Road Map RB Kabupaten Solok Selatan yang disusun dan dievaluasi				2 Dokumen 1 Dokumen	100,000,000		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	2 Dokumen 1 Dokumen	100,000,000	Sekretariat Daerah	
<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>															
<b>4 01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						<b>18,422,825,577</b>							<b>14,989,000,000</b>		
<b>4 01 01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Layanan Operasional Kantor	Persen		Persen	100 Persen	<b>18,422,825,577</b>							100 Persen	<b>14,989,000,000</b>	
<b>4 01 01</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>10,401,318,932</b>							100 Persen	<b>11,719,000,000</b>	
4 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan				94 Orang	10,084,278,932		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	94 Orang	9,879,000,000	Sekretariat Daerah	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga Administrasi Keuangan yang dibayarkan honorinya				27 Orang	317,040,000		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	27 Orang	1,820,000,000	Sekretariat Daerah
<b>4 01 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>2,287,708,009</b>						100 Persen	<b>1,170,000,000</b>	
4 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Peralatan listrik yang disediakan				0 Paket 16 Jenis	119,998,307		Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	0 Paket 16 Jenis	20,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK yang disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Jenis 0 Paket	179,999,802		Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	20 Jenis 0 Paket	20,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bahan cetak yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Penggandaan yang disediakan Jumlah Plakat yang disediakan				20 Jenis 0 Paket 38000 Lembar 100 Buah	80,000,000		Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	20 Jenis 0 Paket 38000 Lembar 100 Buah	30,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Makan minum Tamu yang disediakan Jumlah Souvenir VIP yang disediakan				0 Laporan 1000 Kotak 4 Jenis	445,209,900		Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	0 Laporan 1000 Kotak 4 Jenis	100,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah makan dan minum kegiatan yang disediakan Jumlah makan dan minum rapat yang disediakan Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan				0 Laporan 2500 Kotak 500 Kotak 400 Kali	1,462,500,000		Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	0 Laporan 2500 Kotak 500 Kotak 400 Kali	1,000,000,000	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	<b>4,198,799,900</b>						100 Persen	<b>270,000,000</b>	
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan				2000 Buah	8,000,000		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	2000 Buah	20,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pemakaian Telpon/internet Jumlah pemakaian air Jumlah pemakaian jasa listrik				1250 GB 2500 Kubik 5000 KWH	316,800,000		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	1250 GB 2500 Kubik 5000 KWH	200,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan Kantor				100 Unit	3,873,999,900		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	100 Unit	50,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Persen		Persen	100 Persen	<b>1,434,998,936</b>						100 Persen	<b>1,230,000,000</b>	
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara Jumlah perizinan kendaraan dinas/operasional				25 Unit 45 Unit	799,999,750		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	25 Unit 45 Unit	200,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara				1 Unit	484,999,236		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	1 Unit	1,000,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara				1 Unit	149,999,950		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	1 Unit	30,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.12	<b>Fasilitas Kerumahtangaan Sekretariat Daerah</b>	Persentase layanan kedinasan Sekretaris Daerah yang terfasilitasi	Persen		Persen	100 Persen	<b>99,999,800</b>						100 Persen	<b>70,000,000</b>	
4 01 01 2.12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah kebutuhan rumah tangga sekda yang tersedia				15 Jenis	99,999,800		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	15 Jenis	70,000,000	Sekretariat Daerah
4	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
4 01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						<b>4,936,999,460</b>							<b>4,026,000,000</b>	
4 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Layanan Operasional Kantor	Persen		Persen	100 Persen	<b>4,936,999,460</b>						100 Persen	<b>4,026,000,000</b>	
4 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>1,769,999,460</b>						100 Persen	<b>1,660,000,000</b>	
4 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peralatan Listrik yang disediakan				20 Jenis	39,999,460		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	20 Jenis	20,000,000	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK yang disediakan				40 Jenis	90,000,000		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	40 Jenis	20,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bahan Cetak Yang disediakan Jumlah Penggandaan yang disediakan				20 Jenis 3000 Lembar	50,000,000		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	20 Jenis 3000 Lembar	20,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan minum Tamu yang disediakan Jumlah Souvenir VIP yang disediakan				1000 Kotak 4 Jenis	90,000,000		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	1000 Kotak 4 Jenis	100,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makan-Minum rapat yang disediakan Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan				100 Kotak 150 Kali	1,500,000,000		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	100 Kotak 150 Kali	1,500,000,000	Sekretariat Daerah
<b>4 01 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia	Persen		Persen	100 Persen	<b>320,000,000</b>						100 Persen	<b>215,000,000</b>	
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Yang tersedia				2000 Buah	6,000,000		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	2000 Buah	20,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pemakaian Air Jumlah pemakaian jasa listrik Jumlah pemakain telpon / internet				1200 Kubik 6000 KWH 2000 GB	234,000,000		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	1200 Kubik 6000 KWH 2000 GB	120,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				200 Unit 0 Laporan	80,000,000		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	200 Unit 0 Laporan	75,000,000	Sekretariat Daerah
<b>4 01 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Persen		Persen	100 Persen	<b>641,000,000</b>						100 Persen	<b>325,000,000</b>	
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara Jumlah perizinan kendaraan dinas/operasional				8 Unit 8 Unit	600,000,000		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	8 Unit 8 Unit	300,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional				8 Unit 8 Unit	41,000,000		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	8 Unit 8 Unit	25,000,000	Sekretariat Daerah



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
4 01 01 2.11	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	Persentase layanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terfasilitasi	Persen		Persen	100 Persen	<b>1,006,000,000</b>						100 Persen	<b>826,000,000</b>			
4 01 01 2.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dibayarkan gaji dan tunjangan				2 Orang	166,000,000		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	166,000,000	Sekretariat Daerah		
4 01 01 2.11 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pakaian Dinas dan atribut yang disediakan				40 Stel	350,000,000		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	40 Stel	200,000,000	Sekretariat Daerah		
4 01 01 2.11 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah layanan medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah				6 Kali	90,000,000		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6 Kali	60,000,000	Sekretariat Daerah		
4 01 01 2.11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tersedia				24 Kali	400,000,000		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Kali	400,000,000	Sekretariat Daerah		
4 01 01 2.12	<b>Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	Persentase layanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terfasilitasi	Persen		Persen	100 Persen	<b>1,200,000,000</b>						100 Persen	<b>900,000,000</b>			
4 01 01 2.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang tersedia				18 Jenis	700,000,000		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	18 Jenis	500,000,000	Sekretariat Daerah		
4 01 01 2.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang tersedia				18 Jenis	500,000,000		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	18 Jenis	400,000,000	Sekretariat Daerah		
4	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																
4 01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						<b>184,890,380</b>						<b>195,000,000</b>				
4 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Layanan Operasional Kantor	Persen		Persen	100 Persen	<b>74,890,480</b>								100 Persen	<b>85,000,000</b>	
4 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>54,892,000</b>								100 Persen	<b>60,000,000</b>	
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan				30 Kali	54,892,000		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	30 Kali	60,000,000	Sekretariat Daerah		
4 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Persen		Persen	100 Persen	<b>19,998,480</b>								100 Persen	<b>25,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara				1 Unit	19,998,480		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	1 Unit	25,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 03	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	Persentase Kebijakan bidang Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	Persen		Persen	100 Persen	<b>109,999,900</b>						100 Persen	<b>110,000,000</b>		
4 01 03 2.01	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	Persentase rumusan kebijakan perekonomian yang dilaksanakan	Persen		Persen	100 Persen	<b>89,999,900</b>						100 Persen	<b>90,000,000</b>		
4 01 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah koordinasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan BUMD dan BLUD				24 Kali	30,000,000		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	24 Kali	30,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah pengendalian dan distribusi perekonomian yang dilaksanakan				10 Kali	30,000,000		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	10 Kali	30,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 03 2.01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil yang dilaksanakan				12 Kali	29,999,900		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	12 Kali	30,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 03 2.04	<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	Persentase pemantauan kebijakan sumber daya alam yang ditetapkan dan dievaluasi	Persen		Persen	100 Persen	<b>20,000,000</b>						100 Persen	<b>20,000,000</b>		
4 01 03 2.04 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang dilaksanakan				8 Kali	20,000,000		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	8 Kali	20,000,000	Sekretariat Daerah	
4	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>															
4 01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>							<b>306,923,810</b>							<b>335,000,000</b>	
4 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Layanan Operasional Kantor	Persen		Persen	100 Persen	<b>76,923,810</b>						100 Persen	<b>85,000,000</b>		
4 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>54,931,000</b>						100 Persen	<b>60,000,000</b>		
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan				30 Kali	54,931,000		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	30 Kali	60,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Persen		Persen	100 Persen	<b>21,992,810</b>						100 Persen	<b>25,000,000</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara				1 Unit	21,992,810		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	1 Unit	25,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 03	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	Persentase Kebijakan bidang Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	Persen		Persen	100 Persen	<b>230,000,000</b>						100 Persen	<b>250,000,000</b>		
4 01 03 2.03	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	Persentase realisasi pengadaan barang dan jasa tepat waktu	Persen		Persen	100 Persen	<b>230,000,000</b>						100 Persen	<b>250,000,000</b>		
4 01 03 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Tender yang terlaksana melalui ULP				100 Buah	150,000,000		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	100 Buah	170,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa dengan Aplikasi (SPSE)				100 Buah	55,000,000		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	100 Buah	55,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 03 2.03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Perbup PBJ yang ditetapkan dan dievaluasi Jumlah snggah dan pengaduan yang diproses				2 Perbup 2 Dokumen	25,000,000		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	2 Perbup 2 Dokumen	25,000,000	Sekretariat Daerah	
4	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>															
4 02	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>							<b>25,859,539,017</b>							<b>25,930,000,000</b>	
4 02 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Layanan Operasional Kantor	Persen		Persen	100 Persen	<b>15,927,562,017</b>						100 Persen	<b>15,675,000,000</b>		
4 02 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>13,700,226,375</b>						100 Persen	<b>13,144,840,000</b>		
4 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan Anggota DPRD yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan				58 Orang	13,555,776,375		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Sekretariat DPRD	58 Orang	13,000,000,000	Sekretariat DPRD	
4 02 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang dibayarkan Honorinya				13 orang	144,450,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Sekretariat DPRD	13 orang	144,840,000	Sekretariat DPRD	
4 02 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah	Perssen		Perssen	100 Perssen	<b>75,000,000</b>						100 Perssen	<b>100,000,000</b>		
4 02 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				33 Orang	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Sekretariat DPRD	33 Orang	100,000,000	Sekretariat DPRD	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>780,346,552</b>						100 Persen	<b>880,000,000</b>	
4 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peralatan Listrik yang disediakan				20 Jenis	29,999,699		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Sekretariat DPRD	20 Jenis	30,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK yang disediakan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				50 Paket 0 Unit	124,973,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Sekretariat DPRD	50 Paket 0 Unit	150,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga yang disediakan				10 Jenis	29,999,803		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Sekretariat DPRD	10 Jenis	50,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik yang disediakan				20 Jenis	149,997,050		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Sekretariat DPRD	20 Jenis	120,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bahan cetak yang disediakan Jumlah penggandaan yang disediakan				15 Jenis 1500000 Lembar	120,390,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Sekretariat DPRD	15 Jenis 1500000 Lembar	120,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan Minum Tamu yang disediakan				3997 Kotak	149,995,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Sekretariat DPRD	3997 Kotak	200,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makan Minum Rapat yang disediakan Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan				702 Kotak 60 Kali	174,992,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Sekretariat DPRD	702 Kotak 60 Kali	160,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang yang tersedia	Persen		Persen	100 Persen	<b>233,999,994</b>						100 Persen	<b>210,000,000</b>	
4 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia				5000 Buah	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Sekretariat DPRD	5000 Buah	10,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pemakaian Air Jumlah Pemakaian Jasa Listrik Jumlah Pemakaian Telpon / Internet				20716 Kubik 53001 Kwh 75 GB	198,999,994	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Sekretariat DPRD	20716 Kubik 53001 Kwh 75 GB	150,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15 Unit	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Sekretariat DPRD	15 Unit	50,000,000	Sekretariat DPRD

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Persen		Persen	100 Persen	<b>337,990,296</b>						100 Persen	<b>280,000,000</b>	
4 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan				1 Unit 1 Unit	149,998,050		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Sekretariat DPRD	1 Unit 1 Unit	100,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional				6 Unit 6 Unit	157,992,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Sekretariat DPRD	6 Unit 6 Unit	100,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	29,999,946		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Sekretariat DPRD	4 Unit	80,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.15	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang terfasilitasi	Persen		Persen	100 Persen	<b>399,999,800</b>						100 Persen	<b>425,000,000</b>	
4 02 01 2.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang tersedia				150 Stel	349,999,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Sekretariat DPRD	150 Stel	375,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang mendapatkan pelayanan Medical Check Up				25 Orang	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Sekretariat DPRD	25 Orang	50,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.16	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	Persentase Layanan Administrasi DPRD	Persen		Persen	100 Persen	<b>399,999,000</b>						100 Persen	<b>391,940,000</b>	
4 02 01 2.16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat-rapat DPRD yang difasilitasi				120 Kali	399,999,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Sekretariat DPRD	120 Kali	391,940,000	Sekretariat DPRD
4 02 02	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	Jumlah Ranperda Inisiatif yang diterbitkan Persentase Usulan Ranperda OPD yang dibahas menjadi Perda	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	<b>9,931,977,000</b>						100 Persen 100 Persen	<b>10,255,000,000</b>	
4 02 02 2.01	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	Persentase Ranperda Usulan Pemda yang dibahas DPRD menjadi Perda	Persen		Persen	100 Persen	<b>3,999,995,000</b>						100 Persen	<b>4,463,829,500</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 02 2.01 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Ranperda Usulan Pemda yang dibahas DPRD menjadi Perda				6 Perda	3,999,995,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Sekretariat DPRD	6 Perda	4,413,829,500	Sekretariat DPRD
<b>4 02 02 2.02</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang disahkan	Persen		Persen	100 Persen	<b>600,000,000</b>						100 Persen	<b>630,000,000</b>	
4 02 02 2.02 01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah KUA dan PPAS yang dibahas Jumlah Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang dibahas				2 Kali 2 Kali	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	0	2 Kali 2 Kali	250,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.02 03	Pembahasan APBD	Jumlah APBD yang dibahas Jumlah Perubahan APBD yang dibahas				2 Kali 2 Kali	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	0	2 Kali 2 Kali	280,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.02 05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Laporan Semester yang dibahas				2 Kali	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	0	2 Kali	50,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.02 06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Pertanggungjawaban APBD yang dibahas				2 Kali	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	0	2 Kali	50,000,000	Sekretariat DPRD
<b>4 02 02 2.03</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan	Persen		Persen	100 Persen	<b>436,000,000</b>						100 Persen	<b>430,000,000</b>	
4 02 02 2.03 01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum yang dilaksanakan				2 Kali	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Sekretariat DPRD	2 Kali	60,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.03 02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Pengawasan Urusan Bidang Infrastruktur yang dilaksanakan				2 Kali	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Sekretariat DPRD	2 Kali	60,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.03 03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pengawasan Urusan Bidang Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan				2 Kali	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Sekretariat DPRD	2 Kali	60,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.03 04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Pengawasan Urusan Bidang Perekonomian yang dilaksanakan				2 Kali	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Sekretariat DPRD	2 Kali	60,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.03 05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Pengawasan Urusan Bidang Sumber Daya Alam yang dilaksanakan				2 Kali	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Sekretariat DPRD	2 Kali	60,000,000	Sekretariat DPRD

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 02 2.03 06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang dilaksanakan				1 Kali	56,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Sekretariat DPRD	1 Kali	50,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.03 07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Pengawasan Penggunaan Anggaran yang dilaksanakan				1 Kali	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Sekretariat DPRD	1 Kali	40,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.03 08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Pengawasan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang dilaksanakan				1 Kali	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Sekretariat DPRD	1 Kali	40,000,000	Sekretariat DPRD
<b>4 02 02 2.04</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang dilaksanakan	Persen		Persen	100 Persen	<b>1,459,992,500</b>						100 Persen	<b>1,232,474,000</b>	
4 02 02 2.04 02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti BIMTEK				25 Orang	999,992,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Sekretariat DPRD	25 Orang	752,474,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah tersebarluasnya Informasi Kegiatan-kegiatan DPRD				12 Kali	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Sekretariat DPRD	12 Kali	120,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli				3 Orang	108,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Sekretariat DPRD	3 Orang	108,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				7 Orang	252,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Sekretariat DPRD	7 Orang	252,000,000	Sekretariat DPRD
<b>4 02 02 2.05</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD	Persen		Persen	100 Persen	<b>849,992,800</b>						100 Persen	<b>725,000,000</b>	
4 02 02 2.05 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilaksanakan				2 Kali	249,993,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Sekretariat DPRD	2 Kali	250,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.05 03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Aspirasi Masyarakat dan Jumlah Terlaksananya Reses				3 Kali	599,999,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Sekretariat DPRD	3 Kali	400,000,000	Sekretariat DPRD
<b>4 02 02 2.08</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	Persentase Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Persen		Persen	100 Persen	<b>2,585,996,700</b>						100 Persen	<b>2,723,696,500</b>	
4 02 02 2.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi DPRD yang dilaksanakan				6 Kali	2,199,997,150		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Sekretariat DPRD	6 Kali	2,413,696,500	Sekretariat DPRD



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 02 2.08 04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD yang dilaksanakan				5 Kali	385,999,550		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Sekretariat DPRD	5 Kali	310,000,000	Sekretariat DPRD
5	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
5 01	<b>PERENCANAAN</b>							<b>5,457,859,972</b>						<b>5,456,000,000</b>	
5 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Layanan Operasional Kantor	Persen		Persen	100 Persen	<b>3,673,561,472</b>						100 Persen	<b>3,303,000,000</b>	
5 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan kinerja keuangan perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>3,187,760,287</b>						100 Persen	<b>2,331,750,000</b>	
5 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	3,096,620,287		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	ASN Bappeda	27 Orang/bulan	2,230,750,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang dibayarkan honorinya				10 Orang	91,140,000		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	ASN Bappeda	10 Orang	90,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>244,985,329</b>						100 Persen	<b>324,250,000</b>	
5 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				11 Jenis	4,999,130		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Bappeda	11 Jenis	10,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor yang disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Jenis 0 Paket	35,000,000		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Bappeda	2 Jenis 0 Paket	50,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang disediakan				11 Jenis	4,997,399		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Bappeda	11 Jenis	10,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bahan cetak yang disediakan Jumlah penggandaan yang disediakan				5 Jenis 30136 Lembar	19,999,800		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Bappeda	5 Jenis 30136 Lembar	36,250,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum tamu yang disediakan				218 Kotak	4,995,000		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Bappeda	218 Kotak	4,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makan minum rapat yang disediakan Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan				718 Kotak 89 Kali	174,994,000		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Bappeda	718 Kotak 89 Kali	213,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia	Persen		Persen	100 Persen	<b>53,494,000</b>						100 Persen	<b>65,600,000</b>	
5 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang Disediakan				250 Buah	2,500,000		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Bappeda	250 Buah	3,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan 3 Laporan	41,074,000		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Bappeda	0 Laporan 3 Laporan	45,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	9,920,000		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Bappeda	0 Laporan	17,600,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Persen		Persen	100 Persen	<b>187,321,856</b>						100 Persen	<b>259,400,000</b>	
5 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	157,324,413		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Bappeda	8 Unit	159,400,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	29,997,443		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Bappeda	1 Unit	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Persentase Capaian Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah RKPD dan RPJMD	Persen Persen		Persen Persen	88 Persen 100 Persen	<b>848,899,200</b>						88 Persen 100 Persen	<b>1,050,000,000</b>	
5 01 02 2.01	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tepat Waktu (RKPD, RKPD P, RPJMD, RPJPD)	Persen		Persen	100 Persen	<b>730,899,500</b>						100 Persen	<b>930,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 02 2.01 01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen rumusan Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Pembangunan Daerah				1 Dokumen	95,000,000		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	1 Dokumen	135,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	19,999,900		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	1 Berita Acara	27,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	24,000,000		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	1 Berita Acara	33,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	78,000,000		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	1 Berita Acara	80,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 2.01 06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Terfasilitasinya Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan				7 Kecamatan	31,999,800		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	7 Kecamatan	45,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)				4 Dokumen	481,899,800		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	4 Dokumen	584,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 2.02	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>57,999,900</b>						100 Persen	<b>40,000,000</b>	
5 01 02 2.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	19,999,900		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	1 Dokumen	20,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 2.02 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah OPD yang dibina terkait pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah				33 OPD	38,000,000		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	33 OPD	20,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 2.03	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Persentase Ketersediaan Dokumen Evaluasi dan Pengendalian	Persen		Persen	100 Persen	<b>59,999,800</b>						100 Persen	<b>80,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah				1 Dokumen	30,000,000		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	1 Dokumen	40,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersusun dan terlaporkannya capaian pembangunan daerah (IKU,IKK dan DAK)				3 Laporan	29,999,800		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	3 Laporan	40,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Daerah Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen Persen		Persen Persen	80 Persen 100 Persen	<b>935,399,300</b>						80 Persen 100 Persen	<b>1,103,000,000</b>	
5 01 03 2.01	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen Persen		Persen Persen	80 Persen 100 Persen	<b>361,400,000</b>						80 Persen 100 Persen	<b>372,000,000</b>	
5 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	98,000,000		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	OPD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (21 OPD)	2 Dokumen	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				4 Laporan	47,000,000		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	OPD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (21 OPD)	4 Laporan	20,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	168,400,000		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	OPD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (21 OPD)	2 Dokumen	82,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 03 2.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				4 Laporan	48,000,000		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	OPD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (21 OPD)	4 Laporan	28,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.02	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persen Persen		Persen Persen	80 Persen 100 Persen	<b>323,999,600</b>						80 Persen 100 Persen	<b>385,000,000</b>	
5 01 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	94,000,000		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	OPD Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	2 Dokumen	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				4 Laporan	129,999,800		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	OPD Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	4 Laporan	80,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	44,999,800		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	OPD Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	2 Dokumen	40,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				4 Laporan	55,000,000		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	OPD Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	4 Laporan	30,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 03 2.03	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen Persen		Persen Persen	80 Persen 100 Persen	<b>249,999,700</b>						80 Persen 100 Persen	<b>346,000,000</b>	
5 01 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	88,000,000		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah Lingkup Bidang Ren IPW	2 Dokumen	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				4 Laporan	51,999,800		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah Lingkup Bidang Ren IPW	4 Laporan	35,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	71,000,000		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah Lingkup Bidang Ren IPW	2 Dokumen	85,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				4 Laporan	38,999,900		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah Lingkup Bidang Ren IPW	4 Laporan	18,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
<b>5 05</b>		<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>					<b>275,999,600</b>							<b>355,000,000</b>	
5 05 02	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kelitbangan dalam Perumusan Kebijakan Daerah	Persen		Persen	40 Persen	<b>275,999,600</b>						40 Persen	<b>355,000,000</b>	
5 05 02 2.01	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kelitbangan dalam Perumusan Kebijakan Daerah Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persen		Persen	75 Persen	<b>199,999,900</b>						75 Persen	<b>250,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 05 02 2.01 02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah dokumen hasil penelitian Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				1 dokumen 0 Laporan	199,999,900	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Masyarakat	1 dokumen 0 Laporan	250,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 05 02 2.04	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	Indeks Inovasi Daerah	Indeks		Indeks	580 Indeks	<b>75,999,700</b>						580 Indeks	<b>105,000,000</b>	
5 05 02 2.04 03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Rekomendasi Inovasi Daerah				4 Inovasi	36,999,900		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	4 Inovasi	55,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 05 02 2.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Hasil-hasil Kelitbangan yang Disosialisasikan				5 Penelitian	38,999,800		Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Perangkat Daerah	5 Penelitian	50,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
5 02	<b>KEUANGAN</b>						<b>113,718,855,698</b>							<b>123,989,133,045</b>	
5 02 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan layanan operasional kantor	%		%	100 %	<b>19,028,158,998</b>						100 %	<b>19,538,536,295</b>	
5 02 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Cakupan layanan operasional kantor	%		%	100 %	<b>18,386,530,423</b>						100 %	<b>18,549,471,395</b>	
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah anggota BPJS Solok Selatan yg dibayarkan (Kepala Daerah, DPRD, P3K dan ASN) ( Jumlah ASN BPKD yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan				3446 Orang 60 Orang	17,972,350,423	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Cakupan layanan operasional kantor	3446 Orang 60 Orang	17,964,471,395	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang dibayarkan honorinya				0 Dokumen 24 Orang	414,180,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Cakupan layanan operasional kantor	0 Dokumen 24 Orang	535,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Cakupan layanan operasional kantor	%		%	100 %	<b>214,437,775</b>						100 %	<b>471,473,400</b>	
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Peralatan listrik yang disediakan				0 Paket 10 Jenis	4,954,075	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Cakupan layanan operasional kantor	0 Paket 10 Jenis	50,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor yang disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Jenis 1 Paket	40,050,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Cakupan layanan operasional kantor	15 Jenis 1 Paket	30,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang disediakan				1 Paket 20 Jenis	19,444,900	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Cakupan layanan operasional kantor	1 Paket 20 Jenis	5,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bahan cetak yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah penggandaan yang disediakan				7 Jenis 1 Paket 20000 Lembar	15,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Cakupan layanan operasional kantor	7 Jenis 1 Paket 20000 Lembar	32,340,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				6 Laporan	4,999,800	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Cakupan layanan operasional kantor	6 Laporan	5,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah makan minum rapat yang disediakan Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan				1 Laporan 100 Kotak 100 Kali	129,989,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Cakupan layanan operasional kantor	1 Laporan 100 Kotak 100 Kali	349,133,400	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Cakupan layanan operasional kantor	%		%	100 %	<b>113,181,400</b>						100 %	<b>113,181,500</b>	
5 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai yang disediakan				1 Laporan 500 Buah	5,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Cakupan layanan operasional kantor	1 Laporan 500 Buah	5,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan minyak genset Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah pemakaian air Jumlah pemakaian jasa listrik Jumlah pemakaian telepon/internet				2000 Liter 1 Laporan 8000 Kubik 60000 Kwh 3000000 Gb	83,181,400	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Cakupan layanan operasional kantor	2000 Liter 1 Laporan 8000 Kubik 60000 Kwh 3000000 Gb	83,181,500	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Unit 0 Laporan	25,000,000		Dana Perimbangan	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Cakupan layanan operasional kantor	12 Unit 0 Laporan	25,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.02.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Cakupan layanan operasional kantor	%		%	100 %	<b>314,009,400</b>						100 %	<b>314,010,000</b>	
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara (roda 4 dan roda 2) Jumlah kendaraan dinas operasional yg terpelihara. Jumlah kendaraan dinas yg dibayarkan pajak Jumlah perizinan kendaraan dinas/operasional				1 Unit 26 Unit 9 unit 26 Unit 9 unit	164,010,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Cakupan layanan operasional kantor	1 Unit 26 Unit 9 unit 26 Unit 9 unit	164,010,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Gedung 1 Unit	99,999,400	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Cakupan layanan operasional kantor	2 Gedung 1 Unit	100,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan rumah jabatan yg disewa Jumlah Paket Pindahan Arsip dan dokumen negara Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit 3 Paket 1 Unit	50,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Cakupan layanan operasional kantor	2 Unit 3 Paket 1 Unit	50,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Opini BPK	WTP		WTP	1 WTP	<b>91,216,342,600</b>						1 WTP	<b>102,884,779,250</b>	
5 02 02 2.01	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	Tersedianya jasa administrasi keuangan	%		%	100 %	<b>1,456,624,500</b>						100 %	<b>1,525,429,200</b>	
5 02 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun Jumlah dokumen KUA PPAS Awal yg disahkan				1 Dokumen 2 Dokumen	188,786,900	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1 Dokumen 2 Dokumen	190,297,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun Jumlah KUPA PPAS Perubahan Tahun yg disahkan				1 Dokumen 2 Dokumen	184,013,900	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1 Dokumen 2 Dokumen	185,400,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 02 2.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA OPD yang diverifikasi Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				33 Dokumen, OPD 33 Dokumen	49,814,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	33 Dokumen, OPD 33 Dokumen	50,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 02 2.01 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumla Dokumen DPPA OPD yg disahkan Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				33 Dokumen, OPD 33 Dokumen	49,814,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	33 Dokumen, OPD 33 Dokumen	50,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Perda tentang APBD dan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD TA 2021 tepat waktu sesuai aturan dan terdistribusinya APBD TA 2021 ke pihak terkait Jumlah Ranperda tentang APBD dan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Perubahan APBD tahun 2021				2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen	393,390,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen	396,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Perda tentang APBD dan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD Perubahan Th Anggaran 2021 tepat waktu sesuai aturan dan terdistribusinya APBD 2021 Jumlah Ranperbup Solok Selatan tentang Perubahan pertama penjabaran APBD TA 2021				2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen	355,391,900	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen	393,252,200	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Perbup Standar Harga, Standar Biaya, Hak Keuangan DPRD, KKD, dan HSPK Jumlah Regulasi tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yg ditetapkan				0 Dokumen 5 Perbup 5 Dokumen	235,413,800	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	0 Dokumen 5 Perbup 5 Dokumen	260,480,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.02.02.2.02	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	akurasi pengelolaan perbendaharaan daerah	%		%	90 %	<b>313,794,000</b>						90 %	<b>438,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 02 2.02 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya  Jumlah laporan realisasi dan konsolidasi dana transfer/DAK sesuai JUKNIS.				0 Dokumen 2 Laporan	28,622,500	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	OPINI BPK	0 Dokumen 2 Laporan	30,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 02 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)  Prosentase akurasi data gaji pegawai yang dapat diakses melalui sistem aplikasi gaji				0 Laporan 100 Persen	76,299,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	OPINI BPK	0 Laporan 100 Persen	100,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 02 2.02 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota  Jumlah SP2D yang telah diterbitkan dan disahkan BUD.				0 Orang 8000 Dokumen	208,872,500	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	OPINI BPK	0 Orang 8000 Dokumen	308,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 02 2.03	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	WTP		WTP	1 WTP	<b>454,999,800</b>						1 WTP	<b>526,300,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi Jumlah Laporan Konsolidasi Keuangan SKPD, BLUD. Jumlah SKPD yg melakukan Konsolidasi Laporan Keuangan.				0 Laporan 2 Laporan 33 OPD	250,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Opini BPK	0 Laporan 2 Laporan 33 OPD	160,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Ranperda tentang Petanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disahkan.				0 Dokumen 1 Dokumen	75,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Opini BPK	0 Dokumen 1 Dokumen	100,650,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Jumlah RANPERDA tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah yg disahkan. Jumlah Standar Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kab. Solok Selatan yg disahkan.				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Buku	50,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Opini BPK	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Buku	106,150,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah SISDUR tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yg disahkan. Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen 0 Dokumen	30,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Opini BPK	1 Dokumen 0 Dokumen	55,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 02 2.03 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD peserta pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/ kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Persentase Penerapan Aplikasi dalam Penatausahaan Keuangan Daerah.				33 OPD 0 Orang 100 Persen	49,999,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Opini BPK	33 OPD 0 Orang 100 Persen	104,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 02 2.04	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	Terkelolanya Dana Darurat dan tersalurnya bantuan keuangan	%		%	100 %	<b>88,990,924,300</b>						100 %	<b>100,395,050,050</b>	
5 02 02 2.04 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				7 Laporan	87,990,924,300	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Opini BPK	7 Laporan	98,661,675,400	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dan Mendesak				0 Laporan 1 Laporan	1,000,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Opini BPK	0 Laporan 1 Laporan	1,733,374,650	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Persentase BMD yang berkondisi baik	%		%	75,76 %	<b>456,354,200</b>						75,76 %	<b>996,017,500</b>	
5 02 03 2.01	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	Persentase BMD yang berkondisi baik	%		%	75.76 %	<b>456,354,200</b>						75.76 %	<b>996,017,500</b>	
5 02 03 2.01 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen RKBD dan RKPBD tahun 2021 sesuai disusun. Jumlah dokumen RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah) dan RKPBD (Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah ) Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen 2 Dokumen 0 Dokumen	18,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Persentase BMD yang berkondisi baik	2 Dokumen 2 Dokumen 0 Dokumen	18,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 03 2.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah OPD yang telah berbasis aplikasi dalam penatausahaan aset				0 Laporan 33 OPD	20,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Persentase BMD yang berkondisi baik	0 Laporan 33 OPD	22,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 03 2.01 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				2 Laporan	20,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Persentase BMD yang berkondisi baik	2 Laporan	20,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 03 2.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah Prosentase pengamanan asset daerah baik secara fisik maupun bukti legal kepemilikan Pemda kab. Solok Selatan.				1 Laporan 75.76 Persen	39,122,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Persentase BMD yang berkondisi baik	1 Laporan 75.76 Persen	55,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 03 2.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Persentase Jumlah BMD yg dilakukan Pemusnahan dan Penghapusan Persentase kesesuaian data rincian total BMD dengan aktiva tetap di neraca Pemda Solok Selatan				0 Dokumen 100 Persen 100 Persen	152,763,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Persentase BMD yang berkondisi baik	0 Dokumen 100 Persen 100 Persen	152,763,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 03 2.01 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah OPD peserta Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan BMD				1 Laporan 0 Laporan 33 OPD	31,469,200	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Persentase BMD yang berkondisi baik	1 Laporan 0 Laporan 33 OPD	44,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 03 2.01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD peserta pembinaan penerapan E-BMD  Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota  Persentase pendayagunaan dan pemanfaatan BMD				33 OPD 0 Orang 100 Persen	175,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Persentase BMD yang berkondisi baik	33 OPD 0 Orang 100 Persen	356,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	Persentase Capaian Target Pajak dan Retribusi.	%		%	96 %	<b>3,017,999,900</b>						96 %	<b>569,800,000</b>	
5 02 04 2.01	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	Persentase Capaian Target Pajak dan Retribusi.	%		%	98 %	<b>3,017,999,900</b>						98 %	<b>569,800,000</b>	
5 02 04 2.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah  Jumlah regulasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah yg diupdate				2 Dokumen 2 Regulasi	56,500,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Persentase Capaian Target Pajak dan Retribusi.	2 Dokumen 2 Regulasi	62,150,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 04 2.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah  Jumlah Objek Pajak pendataan dan evaluasi NJOP PBB P2				4 Laporan 4 Kecamatan	2,606,499,900	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Persentase Capaian Target Pajak dan Retribusi.	4 Laporan 4 Kecamatan	117,150,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 04 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah  Jumlah realisasi PBB P2,PBB P3 dan BPHTB  Jumlah WP pajak PBB P2,PBB P3 dan BPHTB yg telah dilakukan pemungutan.				0 Dokumen 8 Milyar 90000 OP	270,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Persentase Capaian Target Pajak dan Retribusi.	0 Dokumen 8 Milyar 90000 OP	297,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 04 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PBB P2 Jumlah Pelaporan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Provinsi dan Pusat				0 Dokumen 12 Kali 12 Dokumen	85,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Persentase Capaian Target Pajak dan Retribusi.	0 Dokumen 12 Kali 12 Dokumen	93,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
5 03	<b>KEPEGAWAIAN</b>						<b>28,476,215,359</b>							<b>131,329,500</b>	
5 03 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan peningkatan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>26,914,695,359</b>						100 Persen	<b>0</b>	
5 03 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>26,518,212,300</b>						100 Persen	<b>0</b>	
5 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah PPPK yang dibayarkan gaji dan tunjangannya				172 Orang 12 Orang/bulan 245 Orang	17,865,252,300	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	BKPSDM Kab. Solok Selatan	172 Orang 12 Orang/bulan 245 Orang	<b>0</b>	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang dibayarkan honorusnya Jumlah TKD yang dibayarkan Honorusnya				12 Orang 600 Orang	8,652,960,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	BKPSDM Kab. Solok Selatan	12 Orang 600 Orang	<b>0</b>	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>236,034,062</b>						100 Persen	<b>0</b>	
5 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Peralatan Listrik yang disediakan				0 Paket 20 Jenis	4,999,783	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	BKPSDM Kab. Solok Selatan	0 Paket 20 Jenis	<b>0</b>	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
															Nasional					Daerah	
5	03	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				60 Jenis	25,782,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	BKPSDM Kab. Solok Selatan	60 Jenis	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	03	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Peralatan Kebersihan yang disediakan				0 Paket 20 Jenis	4,999,479	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	BKPSDM Kab. Solok Selatan	0 Paket 20 Jenis	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	03	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah penggandaan yang disediakan				15 Jenis 0 Paket 30000 Lembar	20,265,800	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	BKPSDM Kab. Solok Selatan	15 Jenis 0 Paket 30000 Lembar	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	03	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu jumlah makanan dan minuman tamu yang disediakan				0 Laporan 100 Kotak	4,995,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	BKPSDM Kab. Solok Selatan	0 Laporan 100 Kotak	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	03	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Makan dan Minuman Rapat yang disediakan Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan				0 Laporan 150 Kotak 100 Kali	174,992,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	BKPSDM Kab. Solok Selatan	0 Laporan 150 Kotak 100 Kali	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	03	01	2.08			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	persentase Ketersediaan Jasa Penunjang yang tersedia	Persen		Persen	100 Persen	<b>39,490,000</b>							100 Persen	<b>0</b>	
5	03	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Matrai yang disediakan Jumlah Pengiriman Paket yang terfasilitasi				0 Laporan 150 Buah 5 Kali	2,500,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	BKPSDM Kab. Solok Selatan	0 Laporan 150 Buah 5 Kali	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Pemakaian Air Jumlah Pemakaian jasa listrik jumlah pemakaian telpon/ internet				0 Laporan 80 Kubik 550 kwh 100 GB	27,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	BKPSDM Kab. Solok Selatan	0 Laporan 80 Kubik 550 kwh 100 GB	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Peralatan Kantor yang terpelihara				0 Laporan 10 Unit	9,990,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	BKPSDM Kab. Solok Selatan	0 Laporan 10 Unit	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	Persen		Persen	100 Persen	<b>120,958,997</b>						100 Persen	<b>0</b>	
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara Jumlah Perizinan Kendaraan dinas operasional				0 Unit 7 Unit 7 Unit	90,960,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	BKPSDM	0 Unit 7 Unit 7 Unit	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	29,998,997	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	BKPSDM	1 Unit	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Indeks Sistem Merit	Angka		Angka	250 Angka	<b>1,561,520,000</b>						250 Angka	<b>131,329,500</b>	
5.03.02.2.01	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	Jumlah Sistem Informasi yang Aktif Persentase Perencanaan & Pengadaan pegawai yang sesuai dengan Anjab dan ABK	Aplikasi Persen		Aplikasi Persen	1 Aplikasi 100 Persen	<b>357,520,000</b>						1 Aplikasi 100 Persen	<b>0</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 02 2.01 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Terpenuhinya Kebutuhan PNS dan terisinya formasi jabatan pada SOTK Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Terwujudnya PNS yang melaksanakan tugas dengan penuh kesetiaan dan sadar akan tanggungjawab				0 Dokumen 5 Tahap 150 Orang	202,520,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	BKPSDM Kab. Solok Selatan	0 Dokumen 5 Tahap 150 Orang	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Terlaksananya Administrasi ASN yang Pensiun maupun yang akan Pensiun Terselesaikannya Administrasi Kepegawaian dan terpenuhinya hak-hak Pegawai				0 Dokumen 98 Orang 150 Orang	30,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	BKPSDM Kab. Solok Selatan	0 Dokumen 98 Orang 150 Orang	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah PNS yang terlayani Pembuatan Karpeg, Karis dan Karsu Terkelolanya Informasi Data Kepegawaian				0 Dokumen 500 Orang 3467 Pegawai	125,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	BKPSDM Kab. Solok Selatan	0 Dokumen 500 Orang 3467 Pegawai	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.02	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	Persentase Pegawai yang Promosi dan Mutasi berdasarkan Talent Pool	Persen		Persen	50 Persen	<b>490,000,000</b>						50 Persen	<b>0</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah Jumlah Dokumen Terkait Regulasi Mutasi Jumlah Mutasi yang dilaksanakan Jumlah Surat Keputusan JP hdn JF yang telah disusun Persentase				0 Dokumen 1 Dokumen 5 Kali 50 SK	350,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	BKPSDM Kab. Solok Selatan	0 Dokumen 1 Dokumen 5 Kali 50 SK	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah PNS yang difasilitasi kenaikan pangkatnya secara tepat waktu jumlah pns yang difasilitasi pelaksanaan ujian dinas dan ujian pi di kabupaten solok selatan jumlah pns yang diproses izin pemakaian gelar dan perhitungan masa kerjanya				0 Dokumen 600 orang 120 orang 30 orang	140,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	BKPSDM Kab. Solok Selatan	0 Dokumen 600 orang 120 orang 30 orang	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.03	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	Persentase Penempatan Pegawai yang sesuai dengan Kompetensi dan Kinerja	Persen		Persen	50 Persen	<b>325,000,000</b>						50 Persen	<b>0</b>	
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center Jumlah Pegawai yang dinilai kompetensinya Jumlah TKD yang dinilai Kompetensinya Junlah Blueprint Assesment Center				0 Dokumen 40 Orang 600 orang 1 Dokumen	225,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	BKPSDM Kab. Solok Selatan	0 Dokumen 40 Orang 600 orang 1 Dokumen	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Bantuan dan difasilitasi Tugas Belajarnya Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan Persentase ASN yang dinatu dan difasilitasi izin belajarnya				2 Orang 0 Orang 100 Persen	60,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	BKPSDM Kab. Solok Selatan	2 Orang 0 Orang 100 Persen	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.03.02.2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina jumlah pegawai fungsional yang diangkat melakului perpindahan jabatan Jumlah Pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional melalui impasing Jumlah pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional melalui mekanisme pengangkatan pertama				0 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang	40,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	BKPSDM Kab. Solok Selatan	0 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pegawai dengan Nilai SKP "Sangat Baik" Persentase Penilaian Kinerja Pegawai berdasarkan Indikator Kinerja Individu	Persen Persen		Persen Persen	90 Persen 60 Persen	389,000,000						90 Persen 60 Persen	131,329,500	
5.03.02.2.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah dokumen indikator kinerja ASN yang disusun secara akuntabel JUmlah dokumen pola dan pengembangan karir ASN				0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	39,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	BKPSDM Kab. Solok Selatan	0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	40,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa Jumlah Pegawai yang diberi Penghargaan Tanda Jasa (Satya lencana Karya Satya) Jumlah PNS yang diberikan Penghargaan Karena memasuki masa Purna bhakti Jumlah PNS yang diberi Penghargaan karena berprestasi				0 Orang 200 Orang 68 Orang 20 Orang	75,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	BKPSDM Kab. Solok Selatan	0 Orang 200 Orang 68 Orang 20 Orang	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan Jumlah Regulasi terkait Disiplin, kode etik, dan kode perilaku Persentase ASN yang tidak melanggar disiplin				0 Orang 3 Dokumen 95 Persen	150,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	BKPSDM Kab. Solok Selatan	0 Orang 3 Dokumen 95 Persen	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN persentase pelanggaran disiplin yang ditindak lanjuti Persentase Pelanggaran Kode Etik yang ditindak Lanjuti Persentase Pelanggaran Kode Prilaku yang ditindak lanjuti				0 Laporan 100 Persen 100 Persen 100 Persen	75,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	BKPSDM Kab. Solok Selatan	0 Laporan 100 Persen 100 Persen 100 Persen	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani Persentase Pelanggaran Kode Etik yang ditindak lanjuti				0 Dokumen 100 Persen	50,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	BKPSDM Kab. Solok Selatan	0 Dokumen 100 Persen	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
<b>6</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
<b>6.01</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>						<b>5,157,213,220</b>							<b>5,380,000,000</b>	
<b>6.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	cakupan layanan operasional kantor	Persen		Persen	100 Persen	<b>4,014,720,220</b>						100 Persen	<b>4,100,000,000</b>	
<b>6.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>3,230,660,825</b>						100 Persen	<b>3,400,425,000</b>	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangann				28 Orang/bulan	3,145,660,825		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Kabupaten Solok Selatan	28 Orang/bulan	3,275,425,000	Inspektorat
6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan honorinya				8 orang	85,000,000		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Kabupaten Solok Selatan	8 orang	100,000,000	Inspektorat
<b>6.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	persentase pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>329,999,600</b>						100 Persen	<b>250,000,000</b>	
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah peserta pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi				10 Orang	129,999,800		Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Kabupaten Solok Selatan	10 Orang	100,000,000	Inspektorat
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah peserta bimtek implementasi peraturan perundang-undangan				15 Orang	199,999,800		Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Kabupaten Solok Selatan	15 Orang	150,000,000	Inspektorat

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>202,393,893</b>						100 Persen	<b>155,950,000</b>	
6 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peralatan Listrik yang disediakan				5 Jenis	4,999,751		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Kabupaten Solok Selatan	5 Jenis	6,000,000	Inspektorat
6 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor yang disediakan				5 Jenis	25,000,000		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Kabupaten Solok Selatan	5 Jenis	10,000,000	Inspektorat
6 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga yang disediakan				10 Jenis	4,999,242		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Kabupaten Solok Selatan	10 Jenis	6,500,000	Inspektorat
6 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bahan Cetak yang disediakan Jumlah Penggandaan yang disediakan				4 Jenis 35000 Lembar	12,399,900		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Kabupaten Solok Selatan	4 Jenis 35000 Lembar	16,000,000	Inspektorat
6 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan dan Minum Tamu yang disediakan				120 Kotak	4,995,000		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Kabupaten Solok Selatan	120 Kotak	4,000,000	Inspektorat
6 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makanan dan Minum Rapat yang disediakan Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan				600 Kotak 109 Kali	150,000,000		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Kabupaten Solok Selatan	600 Kotak 109 Kali	113,450,000	Inspektorat
6 01 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia	Persen		Persen	100 Persen	<b>14,791,946</b>						100 Persen	<b>0</b>	
6 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin kantor yang disediakan				2 Unit	14,791,946		Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Kabupaten Solok Selatan	2 Unit	0	Inspektorat
6 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang yang Tersedia	Persen		Persen	100 Persen	<b>27,890,000</b>						100 Persen	<b>27,625,000</b>	
6 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang disediakan				250 Buah	2,500,000		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Kabupaten Solok Selatan	250 Buah	3,650,000	Inspektorat
6 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pekamakaian Air Jumlah pemakaianan Jasa Listrik Jumlah pemakaian Telpon / Internet				21000 Kubik 3200 kwh 21000 gb	17,880,000		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Kabupaten Solok Selatan	21000 Kubik 3200 kwh 21000 gb	18,975,000	Inspektorat
6 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa perbaikan peralatan Kantor				10 Unit	7,510,000		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Kabupaten Solok Selatan	10 Unit	5,000,000	Inspektorat

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
6	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase barang milik Daerah yang terpelihara	Persen		Persen	100 Persen	<b>208,983,956</b>					100 Persen	<b>226,000,000</b>		
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara Jumlah Perizinan Kendaraan Oeparsional				12 Unit 12 Unit	178,984,230		Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Kabupaten Solok Selatan	12 Unit 12 Unit	206,000,000	Inspektorat
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara				1 Unit	29,999,726		Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Kabupaten Solok Selatan	1 Unit	20,000,000	Inspektorat
6	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	Maturitas SPIP	Nilai		Nilai	2.8 Nilai	<b>1,017,495,000</b>						2.8 Nilai	<b>1,100,000,000</b>	
6	01	02	2.01		<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	Persentase Pengawasan Internal yang dilakukan	Persen		Persen	100 Persen	<b>797,500,000</b>						100 Persen	<b>865,000,000</b>	
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				3 Dokumen	45,000,000		Dana Perimbangan		Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Kabupaten Solok Selatan	3 Dokumen	400,000,000	Inspektorat
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengawasan Keuangan internal secara berkala				21 Dokumen	277,500,000		Dana Perimbangan		Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Kabupaten Solok Selatan	21 Dokumen	50,000,000	Inspektorat
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Reviu Laporan Kinerja				15 Laporan	200,000,000		Dana Perimbangan		Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Kabupaten Solok Selatan	15 Laporan	257,000,000	Inspektorat
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Reviu Laporan Keuangan				6 Dokumen	75,000,000		Dana Perimbangan		Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Kabupaten Solok Selatan	6 Dokumen	25,000,000	Inspektorat
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Nagari/Desa yang diawasi				18 Nagari	120,000,000		Dana Perimbangan		Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Kabupaten Solok Selatan	18 Nagari	50,000,000	Inspektorat
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP				85 Persen	80,000,000		Dana Perimbangan		Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Kabupaten Solok Selatan	85 Persen	83,000,000	Inspektorat
6	01	02	2.02		<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	Persentase Pengawasan dan Penanganan kasus yang di tangani	Persen		Persen	100 Persen	<b>219,995,000</b>						100 Persen	<b>235,000,000</b>	
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	persentase penyelesaian kerugian Negara/Daerah yang tertangani				100 Persen	19,995,000		Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Kabupaten Solok Selatan	100 Persen	35,000,000	Inspektorat
6	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Pengawasan dengan tujuan tertentu				15 Laporan	200,000,000		Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Kabupaten Solok Selatan	15 Laporan	200,000,000	Inspektorat

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6 01 03	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	Level Kapabilitas APIP	Level		Level	III Level	<b>124,998,000</b>						III Level	<b>180,000,000</b>	
6 01 03 2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	Persentase rumusan kebijakan teknis pengawasan	Persen		Persen	100 Persen	<b>30,000,000</b>						100 Persen	<b>30,000,000</b>	
6 01 03 2.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	jumlah kebijakan teknis yang ditetapkan Level kapabilitas APIP				3 Dokumen 3 Level.	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Kabupaten Solok Selatan	3 Dokumen 3 Level.	30,000,000	Inspektorat
6 01 03 2.02	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	jumlah kebijakan teknis yang ditetapkan Jumlah laporan hasil pelaksanaan pendampingan dan asistensi Persentase Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi	Dokumen Laporan Persen		Dokumen Laporan Persen	3 Dokumen 33 Laporan 100 Persen	<b>94,998,000</b>						3 Dokumen 33 Laporan 100 Persen	<b>150,000,000</b>	
6 01 03 2.02 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Maturitas SPIP				2.8 Nilai	30,000,000		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Kabupaten Solok Selatan	2.8 Nilai	50,000,000	Inspektorat
6 01 03 2.02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Nilai RB				70 Nilai	30,000,000		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Kabupaten Solok Selatan	70 Nilai	50,000,000	Inspektorat
6 01 03 2.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Nilai MCP				85 Nilai	34,998,000		Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Kabupaten Solok Selatan	85 Nilai	50,000,000	Inspektorat
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>3,041,133,872</b>							<b>1,136,711,500</b>	
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan layanan operasional kantor Cakupan layanan operasional kantor	Persen orang		Persen orang	100 Persen 23 orang	<b>2,612,664,282</b>						100 Persen 23 orang	<b>726,711,500</b>	
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Cakupan layanan operasional kantor Persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah	orang Persen		orang Persen	23 orang 100 Persen	<b>2,291,231,530</b>						23 orang 100 Persen	<b>281,711,500</b>	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	2,234,711,530	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi pemerintah Kecamatan	23 Orang/bulan	224,711,500	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
7	01	01	2.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang di bayarkan honornya Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 orang	56,520,000	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi pemerintah Kecamatan	6 orang	57,000,000	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh
7	01	01	2.06			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan umum perangkat daerah	persen	persen	100 persen	<b>186,196,804</b>							100 persen	<b>205,000,000</b>	
7	01	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan listrik yang disediakan				10 jenis	2,990,468	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi pemerintah Kecamatan	10 jenis	4,000,000	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh
7	01	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan				10 jenis	15,000,000	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi pemerintah Kecamatan	10 jenis	17,000,000	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh
7	01	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan				10 jenis	2,996,490	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi pemerintah Kecamatan	10 jenis	4,000,000	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh
7	01	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak yang Disediakan Jumlah Penggandaan yang Disediakan				5 jenis 5000 lembar	10,210,946	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi pemerintah Kecamatan	5 jenis 5000 lembar	15,000,000	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh
7	01	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum tamu yang disediakan				333.33 kotak	9,999,000	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi pemerintah Kecamatan	333.33 kotak	15,000,000	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh
7	01	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan				250 kali	144,999,900	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi pemerintah Kecamatan	250 kali	150,000,000	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh
7	01	01	2.08			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia	persen	persen	100 persen	<b>40,290,000</b>							100 persen	<b>50,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan				150 buah	1,500,000	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi pemerintah Kecamatan	150 buah	6,000,000	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemakaian air Jumlah pemakaian listrik Jumlah pemakaian telepon				2000 kubik 1500 kwh 550 GB	21,000,000	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi pemerintah Kecamatan	2000 kubik 1500 kwh 550 GB	24,000,000	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor				8 unit	17,790,000	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi pemerintah Kecamatan	8 unit	20,000,000	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh
7.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	persen		persen	100 persen	<b>94,945,948</b>						100 persen	<b>130,000,000</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara				6 Unit	64,987,392	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi pemerintah Kecamatan	6 Unit	70,000,000	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunanyang Dipelihara				1 Unit	29,958,556	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi pemerintah Kecamatan	1 Unit	60,000,000	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh
7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase Layanan PATEN	persen		persen	40 persen	<b>50,000,000</b>						40 persen	<b>120,000,000</b>	
7.01.02.2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	Persentase kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Persen		Persen	40 Persen	<b>50,000,000</b>						40 Persen	<b>55,000,000</b>	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah layanan PATEN yang dilaksanakan				9 layanan	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	9 layanan	55,000,000	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	kali		kali	6 kali	<b>45,000,000</b>						6 kali	<b>50,000,000</b>	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
														Nasional					Daerah	
7	01	03	2.01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	kali		kali	6 kali	<b>45,000,000</b>					6 kali	<b>50,000,000</b>			
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan yang dilaksanakan				6 kali	45,000,000	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat nagari	6 kali	50,000,000	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh	
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Cakupan penegakan Perda yang difasilitasi	persen		persen	100 persen	<b>120,000,000</b>						100 persen	<b>25,000,000</b>		
7	01	04	2.01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Persentase penyelesaian masalah-masalah terkait ketenteraman dan ketertiban umum	persen		persen	100 persen	<b>120,000,000</b>						100 persen	<b>25,000,000</b>		
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah rapat koordinasi trantib yang dilaksanakan				3 kali	120,000,000	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi pemerintah Kecamatan	3 kali	25,000,000	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh	
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan	persen		persen	100 persen	<b>178,470,000</b>							100 persen	<b>170,000,000</b>	
7	01	05	2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang difasilitasi	persen		persen	100 persen	<b>178,470,000</b>							100 persen	<b>170,000,000</b>	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah yang dilaksanakan				2 kali	50,000,000	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat nagari	2 kali	60,000,000	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh	
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan Keagamaan dan jumlah festival budaya yang dilaksanakan				3 kali	68,470,000	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat nagari	3 kali	55,000,000	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Caa fre day yang di Laksanakan Jumlah kegiatan pemuda dan olah raga yang dilaksanakan Jumlah kegiatan pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan Jumlah rapat koordinasi bidang kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan Jumlah rapat koordinasi ekonomi pembangunan yang dilaksanakan Jumlah rapat rapat koordinasi pimpinan di kecamatan yang dilaksanakan				45 kali 2 kali 3 kali 2 kali 2 kali 12 kali	60,000,000	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat nagari	45 kali 2 kali 3 kali 2 kali 2 kali 12 kali	55,000,000	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh
7 01 06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	persen		persen	100 persen	<b>34,999,590</b>						100 persen	<b>45,000,000</b>	
7 01 06 2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Jumlah desa yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	nagari		nagari	8 nagari	<b>34,999,590</b>						8 nagari	<b>45,000,000</b>	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah rapat rapat koordinasi pimpinan di kecamatan yang dilaksanakan				8 Nagari	7,999,800	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat nagari	8 Nagari	10,000,000	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah nagari yang terfasilitasinya pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa				8 Nagari	14,999,990	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat nagari	8 Nagari	20,000,000	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	11,999,800	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat nagari	1 Dokumen	15,000,000	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>2,977,305,292</b>						<b>2,669,000,000</b>		
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan layanan operasional kanto	persen		persen	100 persen	<b>2,569,319,947</b>						100 persen	<b>2,341,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah	persen		persen	100 persen	2,306,926,534						100 persen	1,960,000,000	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan 0 Orang/bulan	2,256,826,534	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	22 Orang/bulan 0 Orang/bulan	1,900,000,000	Kecamatan Sungai Pagu
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah tenaga administrasi keuangan yang di bayarkan honorumyaediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen 6 orang	50,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	0 Dokumen 6 orang	60,000,000	Kecamatan Sungai Pagu
7.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan umum perangkat daerah	persen		persen	100 persen	167,498,800						100 persen	167,000,000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan listrik yang disediakan				10 jenis	2,999,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	10 jenis	3,500,000	Kecamatan Sungai Pagu
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Jenis 0 Paket	15,000,000	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	10 Jenis 0 Paket	13,000,000	Kecamatan Sungai Pagu
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 jenis	3,000,000	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	10 jenis	4,000,000	Kecamatan Sungai Pagu
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bahan Cetak yang disediakan yang Disediakan Jumlah Penggandaan yang disediakan				5 jenis 5000 lembar	14,499,400	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	5 jenis 5000 lembar	8,500,000	Kecamatan Sungai Pagu
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan Minum Tamu yang disediakan				100 Kotak	3,000,000	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	100 Kotak	8,000,000	Kecamatan Sungai Pagu

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makan minum Rapat yang disediakan Jumlah rapat Koordinasi & Konsultasi yang dilaksanakan				233 Kotak 200 kali	129,000,000	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	233 Kotak 200 kali	130,000,000	Kecamatan Sungai Pagu
7 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia	Persen		Persen	100 Persen	<b>17,899,900</b>						100 Persen	<b>17,000,000</b>	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang Tersedia				200 Buah	3,400,000	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	200 Buah	2,000,000	Kecamatan Sungai Pagu
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pemakaian Air Jumlah Pemakaian Listrik Jumlah Pemakaian Telp/Wifi				1600 Kubik 1700 KWH 360 GB	14,499,900	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	1600 Kubik 1700 KWH 360 GB	15,000,000	Kecamatan Sungai Pagu
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia	persen		persen	100 persen	<b>76,994,713</b>						100 persen	<b>77,000,000</b>	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	57,000,000	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	7 Unit	57,000,000	Kecamatan Sungai Pagu
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	19,994,713	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	1 Unit	20,000,000	Kecamatan Sungai Pagu
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase Layanan PATEN	persen		persen	50 persen	<b>50,000,000</b>						50 persen	<b>50,000,000</b>	
7 01 02 2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	Persentase kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	persen		persen	50 persen	<b>50,000,000</b>						50 persen	<b>50,000,000</b>	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Layanan PATEN yang dilaksanakan				9 Layanan	50,000,000	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	9 Layanan	50,000,000	Kecamatan Sungai Pagu

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kali kegiatan		Kali kegiatan	6 Kali 6 kegiatan	<b>34,993,701</b>						6 Kali 6 kegiatan	<b>48,000,000</b>	
7 01 03 2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	kali Kali		kali Kali	6 kali 6 Kali	<b>34,993,701</b>						6 kali 6 Kali	<b>48,000,000</b>	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				2 kali 0 Lembaga Kemasyarakatan	5,000,000	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Nagari	2 kali 0 Lembaga Kemasyarakatan	8,000,000	Kecamatan Sungai Pagu
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan yang dilaksanakan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 kali 0 Laporan	29,993,701	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Nagari	6 kali 0 Laporan	40,000,000	Kecamatan Sungai Pagu
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Cakupan Penegakkan Perda yang Difasilitasi	persen		persen	100 persen	<b>120,000,000</b>						100 persen	<b>20,000,000</b>	
7 01 04 2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan kepala daerah yang difasilitasi Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	<b>120,000,000</b>						100 Persen 100 Persen	<b>20,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Rapat Koordinasi Masalah Trantib yang Dilaksanakan				0 Laporan 4 kali	120,000,000	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Nagari	0 Laporan 4 kali	20,000,000	Kecamatan Sungai Pagu
7 01 05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	persen		persen	100 persen	<b>162,999,144</b>						100 persen	<b>160,000,000</b>	
7 01 05 2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan kepala daerah yang difasilitasi Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan kepala daerah yang difasilitasi Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	persen Persen Persen		persen Persen Persen	100 persen 100 Persen 100 Persen	<b>162,999,144</b>						100 persen 100 Persen 100 Persen	<b>160,000,000</b>	
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah yang Dilaksanakan				0 Orang 2 kali	50,000,000	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Nagari	0 Orang 2 kali	30,000,000	Kecamatan Sungai Pagu
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan Keagamaan dan Jumlah Kegiatan-Kegiatan Festival/Budaya yang Dilaksanakan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				3 kali 0 Orang	53,000,000	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Nagari	3 kali 0 Orang	100,000,000	Kecamatan Sungai Pagu

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Bidang Kesejahteraan sosial yang dilaksanakan Jumlah Kegiatan Car Free Day yang dilaksanakan Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Kesehatan yang dilaksanakan Jumlah Koordinasi Pembinaan Pemuda dan Olahraga yang dilaksanakan Jumlah Rapat Koordinasi Ekonomi dan Pembangunan yang dilaksanakan Jumlah Rapat Koordinasi yang Dilaksanakan				2 Kali 45 Kali 1 Kali 1 Kali 4 Kali 6 kali	59,999,144	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Nagari	2 Kali 45 Kali 1 Kali 1 Kali 4 Kali 6 kali	30,000,000	Kecamatan Sungai Pagu
7 01 06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persen		persen	100 persen	<b>39,992,500</b>						100 persen	<b>50,000,000</b>	
7 01 06 2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Jumlah Nagari yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	Nagari		Nagari	11 Nagari	<b>39,992,500</b>						11 Nagari	<b>50,000,000</b>	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari yang difasilitasi dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				11 Nagari	20,999,900	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Nagari	11 Nagari	30,000,000	Kecamatan Sungai Pagu
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Nagari yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				11 nagari	3,992,600	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Nagari	11 nagari	5,000,000	Kecamatan Sungai Pagu
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Musrenbang Kecamatan yang dihasilkan				1 Dokumen	15,000,000	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Nagari	1 Dokumen	15,000,000	Kecamatan Sungai Pagu
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>2,486,002,551</b>							<b>2,603,722,552</b>	
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Layanan Operasional Kantor	Persen		Persen	100 Persen	<b>2,036,002,551</b>						100 Persen	<b>2,223,722,552</b>	
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>1,642,602,551</b>						100 Persen	<b>1,719,722,552</b>	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan				17 Orang/bulan	1,594,722,551	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	ASN di Kecamatan Sangir	17 Orang/bulan	1,594,722,552	Kecamatan Sangir
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang dibayar Honorinya Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi Kantor yang dibayar honorinya				6 orang 6 Orang	47,880,000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	ASN di Kecamatan Sangir	6 orang 6 Orang	125,000,000	Kecamatan Sangir
<b>7 01 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>122,000,000</b>						100 Persen	<b>122,000,000</b>	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Peralatan Listrik yang tersedia				10 Jenis	1,000,000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Kantor Camat Sangir	10 Jenis	1,000,000	Kecamatan Sangir
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan				54 Jenis	20,000,000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Kantor Camat Sangir	54 Jenis	20,000,000	Kecamatan Sangir
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Jenis	1,000,000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Kantor Camat Sangir	10 Jenis	1,000,000	Kecamatan Sangir
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah bahan cetak yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan jumlah pengadaan yang disediakan				3 jenis 0 Paket 5000 lembar	10,000,000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Kantor Camat Sangir	3 jenis 0 Paket 5000 lembar	10,000,000	Kecamatan Sangir
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah makan minum rapat yang disediakan jumlah makan tamu yang disediakan terlaksananya rakor dan konsultasi yang dilaksanakan				0 Laporan 320 kotak 200 kotak 246 kali	90,000,000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Kantor Camat Sangir	0 Laporan 320 kotak 200 kotak 246 kali	90,000,000	Kecamatan Sangir
<b>7 01 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang yang tersedia	Persen		Persen	100 Persen	<b>21,500,000</b>						100 Persen	<b>12,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia				180 Buah	2,820,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Kantor Camat Sangir	180 Buah	1,500,000	Kecamatan Sangir
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan jumlah pemakaian air jumlah pemakaian listrik jumlah pemakaian tlpn/wifi				0 Laporan 170 kubik 1400 kwh 250 gb	10,000,000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Kantor Camat Sangir	0 Laporan 170 kubik 1400 kwh 250 gb	10,000,000	Kecamatan Sangir
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jasa peralatan kerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				26 unit 0 Laporan	8,680,000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Kantor Camat Sangir	26 unit 0 Laporan	500,000	Kecamatan Sangir
7.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	Persen		Persen	100 Persen	<b>249,900,000</b>						100 Persen	<b>350,000,000</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya jumlah pemeliharaan kendaraan dinas				5 unit 0 Unit 4 unit	50,000,000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Kantor Camat Sangir	5 unit 0 Unit 4 unit	50,000,000	Kecamatan Sangir
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah jasa pemeliharaan rutin / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit 0 Unit	199,900,000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Kantor Camat Sangir	1 unit 0 Unit	300,000,000	Kecamatan Sangir
7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase Layanan Paten	Persen		Persen	40 Persen	<b>60,000,000</b>						40 Persen	<b>60,000,000</b>	
7.01.02.2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	persentase kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	persen		persen	100 persen	<b>60,000,000</b>						100 persen	<b>60,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah layanan paten yang dilaksanakan				9 laporan	60,000,000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Camat Sangir	9 laporan	60,000,000	Kecamatan Sangir
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kali		Kali	6 Kali	<b>50,000,000</b>						6 Kali	<b>60,000,000</b>	
7 01 03 2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	kali		kali	6 kali	<b>50,000,000</b>						6 kali	<b>60,000,000</b>	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan				3 kali	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 kali	60,000,000	Kecamatan Sangir
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Kecakupan Penegakan Perda yang difasilitasi	Persen		Persen	100 Persen	<b>120,000,000</b>						100 Persen	<b>40,000,000</b>	
7 01 04 7.03	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	persentase penyelesaian masalah- masalah terkait ketenteraman dan ketertiban umum	persen		persen	100 persen	<b>120,000,000</b>						100 persen	<b>40,000,000</b>	
7 01 04 7.03 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan  jumlah rapat koordinasi trantib yang dilaksanakan				0 Laporan 5 kali	120,000,000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Kepolisian dan Tentara Nasional	0 Laporan 5 kali	40,000,000	Kecamatan Sangir
7 01 05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum tingkat kecamatan	Persen		Persen	100 Persen	<b>170,000,000</b>						100 Persen	<b>150,000,000</b>	
7 01 05 2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Efisiensi kepada Kepala Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>170,000,000</b>						100 Persen	<b>150,000,000</b>	
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah yang dilaksanakan				2 kali	50,000,000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Masyarakat	2 kali	40,000,000	Kecamatan Sangir

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan Keagamaan dan jumlah kegiatan vestifal/budaya yang dilaksanakan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				2 kali 0 Orang	60,000,000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Masyarakat	2 kali 0 Orang	60,000,000	Kecamatan Sangir
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan jumlah kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan jumlah Kegiatan Pendidikan dan Kesehatan yang dilaksanakan jumlah Koordinasi dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga yang dilaksanakan jumlah rapat koordinasi ekonomi dan pembangunan yang dilaksanakan Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan				0 Dokumen 5 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 Kali	60,000,000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Masyarakat	0 Dokumen 5 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 Kali	50,000,000	Kecamatan Sangir
7 01 06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen		Persen	100 Persen	<b>50,000,000</b>							100 Persen	<b>70,000,000</b>	
7 01 06 2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Jumlah Nagari yang difasilitasi di Monitoring dan Dievaluasi	Nagari		Nagari	7 Nagari	<b>50,000,000</b>							7 Nagari	<b>70,000,000</b>	
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa jumlah nagari yang difasilitasi dalam penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa				0 Dokumen 7 nagari	15,000,000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Nagari Kecamatan Sangir	0 Dokumen 7 nagari	35,000,000	Kecamatan Sangir

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Nagari terfasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset				7 Nagari	15,000,000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Nagari Kecamatan Sangir	7 Nagari	15,000,000	Kecamatan Sangir
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Musrembang Kecamatan yang dihasilkan				1 Dokumen	20,000,000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan			Nagari Kecamatan Sangir	1 Dokumen	20,000,000	Kecamatan Sangir
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>2,168,087,439</b>							<b>2,529,656,086</b>	
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	0Cakupan pelayanan Operasional Kantor	Persen		Persen	100 Persen	<b>1,772,087,939</b>						100 Persen	<b>2,129,906,086</b>	
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan keuangan Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat daerah	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	<b>1,449,026,085</b>						100 Persen 100 Persen	<b>1,449,506,086</b>	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Yang Dibayarkan Gaji dan Tunjangan				16 Orang	1,401,506,085	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	ASN Kantor Camat Sangir Jujuan	16 Orang	1,401,506,086	Kecamatan Sangir Jujuan
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi Kantor yang dibayarkan honorinya				6 Orang	47,520,000	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	ASN Kantor Camat Sangir Jujuan	6 Orang	48,000,000	Kecamatan Sangir Jujuan
7 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi Kantor	Persen		Persen	100 Persen	<b>193,932,712</b>						100 Persen	<b>195,200,000</b>	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Peralatan Listrik yang disediakan				4 Jenis	2,982,794	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Kecamatan	4 Jenis	3,000,000	Kecamatan Sangir Jujuan
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan				28 Jenis	20,000,000	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Kecamatan	28 Jenis	20,000,000	Kecamatan Sangir Jujuan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
															Nasional					Daerah	
7	01	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				17 Jenis	3,999,918	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Kecamatan	17 Jenis	4,000,000	Kecamatan Sangir Jujuan	
7	01	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bahan cetak yang disediakan Jumlah Penggandaan yang disediakan				4 Jenis 8000 Lembar	13,200,000	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Kecamatan	4 Jenis 8000 Lembar	13,200,000	Kecamatan Sangir Jujuan	
7	01	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah makan Minum Tamu yang disediakan				0 Laporan 175 Kotak	3,900,000	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Kecamatan	0 Laporan 175 Kotak	4,000,000	Kecamatan Sangir Jujuan	
7	01	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Makan Minum Rapat yang disediakan Jumlah Rapat Koordinasi konsultasi yang dilaksanakan				0 Laporan 660 Kotak 225 Kali	149,850,000	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Kecamatan	0 Laporan 660 Kotak 225 Kali	151,000,000	Kecamatan Sangir Jujuan	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Barang milik daerah yang tersedia	Persen		Persen	100 Persen	<b>49,964,892</b>							100 Persen	<b>250,000,000</b>	
7	01	01	2.07	11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	49,964,892	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi terpadu kecamatan	4 Unit	50,000,000	Kecamatan Sangir Jujuan	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia	Persen		Persen	100 Persen	<b>22,914,000</b>							100 Persen	<b>25,200,000</b>	
7	01	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia				2000 Buah	1,980,000	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan	2000 Buah	2,000,000	Kecamatan Sangir Jujuan	
7	01	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah BBM Genset yang tersedia Jumlah Pemakaian Jasa Listrik Jumlah Pemakaian Telfon				153 Liter 1680 KWH 680 GB	10,944,000	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan	153 Liter 1680 KWH 680 GB	13,200,000	Kecamatan Sangir Jujuan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor				30 Unit	9,990,000	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan	30 Unit	10,000,000	Kecamatan Sangir Jujuan
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Barang Milik daerah yang dipelihara	Persen		Persen	100 Persen	<b>56,250,250</b>						100 Persen	<b>210,000,000</b>	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara				7 Unit	56,250,250	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan kwalitas pelayanan Administrasi terpadu kecamatan	7 Unit	60,000,000	Kecamatan Sangir Jujuan
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase Layanan PATEN	Persen		Persen	75 Persen	<b>50,000,000</b>						75 Persen	<b>50,000,000</b>	
7 01 02 2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	Persentase kegiatan pelayanan kepada masyarakat	Persen		Persen	75 Persen	<b>50,000,000</b>						75 Persen	<b>50,000,000</b>	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah layanan PATEN				30 Layanan	50,000,000	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan	30 Layanan	50,000,000	Kecamatan Sangir Jujuan
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Jumlah kegiatan pemberdayaan	kali		kali	6 kali	<b>49,999,800</b>						6 kali	<b>55,000,000</b>	
7 01 03 2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kali		Kali	6 Kali	<b>49,999,800</b>						6 Kali	<b>55,000,000</b>	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa yang difasilitasi				1 Kali	5,000,000	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta ekonomi kreatif.	Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Nagari	1 Kali	5,000,000	Kecamatan Sangir Jujuan
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan yang dilaksanakan				6 Kali	44,999,800	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Nagari	6 Kali	50,000,000	Kecamatan Sangir Jujuan
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	0Cakupan penegakan perda yang difasilitasi Cakupan penegakan perda yang dfasilitasi	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	<b>120,000,000</b>						100 Persen 100 Persen	<b>120,000,000</b>	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04 7.03	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Jumlah kegiatan rapat koordinasi masalah trantib yang dilaksanakan Persentase penyelesaian masalah terkait ketenteraman dan ketertiban	kali Persen		kali Persen	6 kali 100 Persen	<b>120,000,000</b>						6 kali 100 Persen	<b>120,000,000</b>	
7 01 04 7.03 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan rapat koordinasi masalah trantib yang dilaksanakan				6 Kali	120,000,000	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan kualitas pelayanan terpadu Kecamatan	6 Kali	120,000,000	Kecamatan Sangir Jujuan
7 01 05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan	Persen		Persen	100 Persen	<b>145,999,700</b>						100 Persen	<b>136,000,000</b>	
7 01 05 2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Terfasilitasinya Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>145,999,700</b>						100 Persen	<b>136,000,000</b>	
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan hari besar nasional dan daerah yang dilaksanakan				2 Kali	49,999,800	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Masyarakat Kecamatan Sangir Jujuan	2 Kali	40,000,000	Kecamatan Sangir Jujuan
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan				2 Kali	36,000,000	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	Masyarakat Kecamatan Sangir Jujuan	2 Kali	36,000,000	Kecamatan Sangir Jujuan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan Car Free Day yang dilaksanakan Jumlah kegiatan koordinasi bidang kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan Jumlah kegiatan pemuda dan olah raga yang dilaksanakan Jumlah kegiatan pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan Jumlah kegiatan rapat koordinasi pimpinan di kecamatan yang dilaksanakan Jumlah rapat koordinasi ekonomi pembangunan yang dilaksanakan				44 Kali 3 Kali 1 Kegiatan 1 Kegiatan 4 kali 3 Kali	59,999,900	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Sangir Jujuan	44 Kali 3 Kali 1 Kegiatan 1 Kegiatan 4 kali 3 Kali	60,000,000	Kecamatan Sangir Jujuan	
7 01 06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase pembinaan dan pengawasaan pemerintahan desa	Persen		Persen	100 Persen	<b>30,000,000</b>					100 Persen	<b>38,750,000</b>		
7 01 06 2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Jumlah Desa yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	Nagari		Nagari	5 Nagari	<b>30,000,000</b>					5 Nagari	<b>38,750,000</b>		
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	terfasilitasinya Administrasi tata Pemerintahan Desa Terfasilitasinya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan FungsiBadan Permusyawaratan Desa terfasilitasinya pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Terfasilitasinya Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa terfasilitasinya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa terfasilitasi penerapan Penegakan peraturan Perundang Undangan				5 Nagari 5 Nagari 5 Nagari 5 Nagari 5 Nagari 5 Nagari	14,000,000	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Nagari	5 Nagari 5 Nagari 5 Nagari 5 Nagari 5 Nagari 5 Nagari	22,750,000	Kecamatan Sangir Jujuan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terfasilitasinya Pengelolaan Keuangan Desadan Pemberdayaan Asset Desa				5 Nagari	2,000,000	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Nagari	5 Nagari	2,000,000	Kecamatan Sangir Jujuan
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	TJumlah dokumen Musrenbang Kecamatan yang dihasilkan				1 Dokumen	14,000,000	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Nagari	1 Dokumen	14,000,000	Kecamatan Sangir Jujuan
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>							<b>2,450,924,007</b>						<b>3,363,100,000</b>	
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan layanan operasional kantor	%		%	100 %	<b>2,155,924,007</b>						100 %	<b>2,980,600,000</b>	
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	orang %		orang %	18 orang 100 %	<b>1,887,430,968</b>						18 orang 100 %	<b>2,550,000,000</b>	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan				18 Orang/bulan	1,837,330,968	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	18 Orang/bulan	2,500,000,000	Kecamatan Sangir Batang Hari
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan honorinya				6 Orang/Bulan	50,100,000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	6 Orang/Bulan	50,000,000	Kecamatan Sangir Batang Hari
7 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	<b>172,781,096</b>						100 %	<b>208,000,000</b>	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan listrik yang disediakan				10 Jenis	1,881,416	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan			Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	10 Jenis	5,500,000	Kecamatan Sangir Batang Hari
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan				40 Jenis	18,000,000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	40 Jenis	45,000,000	Kecamatan Sangir Batang Hari

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
															Nasional					Daerah	
7	01	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan				20 Jenis	4,999,680	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	20 Jenis	7,500,000	Kecamatan Sangir Batang Hari	
7	01	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bahan cetak yang disediakan Jumlah Penggandaan yang disediakan				9 Jenis 15000 Lembar	5,000,000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan			Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	9 Jenis 15000 Lembar	5,000,000	Kecamatan Sangir Batang Hari	
7	01	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makan minum rapat yang disediakan Jumlah makan minum tamu yang disediakan Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan				200 Kotak 40 Kotak 600 Kali	142,900,000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	200 Kotak 40 Kotak 600 Kali	145,000,000	Kecamatan Sangir Batang Hari	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia	%	%		100 %	<b>16,600,000</b>							100 %	<b>17,600,000</b>	
7	01	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia				150 Buah	1,500,000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	150 Buah	2,500,000	Kecamatan Sangir Batang Hari	
7	01	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemakaian air Jumlah pemakaian jasa listrik Jumlah pemakaian paket pulsa				250 Kubik 3975 Kwh 250 GB	10,100,000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	250 Kubik 3975 Kwh 250 GB	10,100,000	Kecamatan Sangir Batang Hari	
7	01	01	2.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor				10 Unit	5,000,000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	10 Unit	5,000,000	Kecamatan Sangir Batang Hari	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	%	%		100 %	<b>79,111,943</b>							100 %	<b>105,000,000</b>	
7	01	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara Jumlah perizinan kendaraan dinas/operasional				5 Unit 5 Unit	54,116,000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	5 Unit 5 Unit	55,000,000	Kecamatan Sangir Batang Hari	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung pertemuan (Aula) yang dipelihara				1 Unit	24,995,943	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	1 Unit	50,000,000	Kecamatan Sangir Batang Hari
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	%		%	70 %	<b>15,000,000</b>						70 %	<b>62,500,000</b>	
7 01 02 2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	Jumlah layanan PATEN Persentase kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	% %		% %	70 % 0 %	<b>15,000,000</b>						70 % 0 %	<b>15,000,000</b>	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah layanan PATEN				20 Layanan	15,000,000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	20 Layanan	15,000,000	Kecamatan Sangir Batang Hari
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Jumlah kegiatan pemberdayaan	Kali		Kali	4 Kali	<b>35,000,000</b>						4 Kali	<b>40,000,000</b>	
7 01 03 2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Terkoordinasinya kegiatan pemberdayaan desa	Kali		Kali	4 Kali	<b>35,000,000</b>						4 Kali	<b>40,000,000</b>	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Festival Durian yang dilaksanakan Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan PKK di wilayah kecamatan yang dilaksanakan				1 Kali 3 Kali	35,000,000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat nagari	1 Kali 3 Kali	40,000,000	Kecamatan Sangir Batang Hari
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	cakupan penegakan Perda yang difasilitasi	%		%	100 %	<b>10,000,000</b>						100 %	<b>20,000,000</b>	
7 01 04 2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Persentase penyelesaian masalah-masalah terkait ketenteraman dan ketertiban umum	%		%	100 %	<b>10,000,000</b>						100 %	<b>20,000,000</b>	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah rapat koordinasi masalah trantib yang dilaksanakan				3 Kali	10,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat nagari	3 Kali	20,000,000	Kecamatan Sangir Batang Hari
7 01 05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	%		%	100 %	<b>140,000,000</b>						100 %	<b>155,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
7	01	05	2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	%		%	100 %	<b>140,000,000</b>						100 %	<b>155,000,000</b>	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terfasilitasinya kegiatan hari besar nasional dan daerah				3 Kali	50,000,000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat nagari	3 Kali	55,000,000	Kecamatan Sangir Batang Hari
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan				3 Kali	30,000,000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat nagari	3 Kali	35,000,000	Kecamatan Sangir Batang Hari
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah car fre day yang dilaksanakan Jumlah kegiatan koordinasi bidang kesejahteraan sosial Jumlah kegiatan koordinasi ekonomi pembangunan. Jumlah kegiatan pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan Jumlah kegiatan rapat koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah koordinasi pembinaan pemuda dan olahraga				48 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 5 Kali 2 Kali	60,000,000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat nagari	48 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 5 Kali 2 Kali	65,000,000	Kecamatan Sangir Batang Hari
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/nagari	%		%	100 %	<b>95,000,000</b>						100 %	<b>105,000,000</b>	
7	01	06	2.01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Jumlah Nagari yang difasilitasi dimonitoring dan evaluasi	Nagari		Nagari	7 Nagari	<b>95,000,000</b>						7 Nagari	<b>105,000,000</b>	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari yang difasilitasi dalam penyusunan administrasi tata pemerintahan desa				7 Nagari	35,000,000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat nagari	7 Nagari	35,000,000	Kecamatan Sangir Batang Hari

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah nagari yang difasilitasi dalam pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa				7 Nagari	40,000,000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat nagari	7 Nagari	45,000,000	Kecamatan Sangir Batang Hari
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen Musrenbang Kecamatan yang dihasilkan				1 Dokumen	20,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat nagari	1 Dokumen	25,000,000	Kecamatan Sangir Batang Hari
<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
<b>7 01</b>	<b>KECAMATAN</b>						<b>2,427,238,709</b>							<b>2,251,830,000</b>	
<b>7 01 01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	cakupan layanan operasional kantor	persen		persen	100 persen	<b>2,034,839,259</b>						100 persen	<b>2,006,830,000</b>	
<b>7 01 01</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah	persen		persen	100 persen	<b>1,763,877,812</b>						100 persen	<b>1,735,000,000</b>	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang 0 Orang/bulan	1,719,777,812	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan	20 Orang 0 Orang/bulan	1,680,000,000	Kecamatan Pauh Duo
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan honorinya				0 Dokumen 6 orang	44,100,000		Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan	0 Dokumen 6 orang	55,000,000	Kecamatan Pauh Duo
<b>7 01 01</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum perangkat daerah	persen		persen	100 persen	<b>179,998,380</b>						100 persen	<b>182,410,000</b>	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan listrik yang disediakan				10 jenis	3,099,989	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan	10 jenis	3,410,000	Kecamatan Pauh Duo
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan				10 jenis	15,986,400	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan	10 jenis	16,000,000	Kecamatan Pauh Duo





**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 unit 0 Laporan	5,499,910	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan	20 unit 0 Laporan	5,000,000	Kecamatan Pauh Duo
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	persentase barang milik daerah yang dipelihara	persen		persen	100 persen	<b>76,963,507</b>						100 persen	<b>72,000,000</b>	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizannya Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara jumlah perizinan kendaraan dinas/operasional				0 Unit 4 unit 4 unit	46,993,070	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan	0 Unit 4 unit 4 unit	47,000,000	Kecamatan Pauh Duo
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	29,970,437	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan	2 Unit	25,000,000	Kecamatan Pauh Duo
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	persentase layanan paten	persen		persen	50 persen	<b>55,000,000</b>						50 persen	<b>55,000,000</b>	
7 01 02 2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	persentase kegiatan pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	persen persen		persen persen	100 persen 100 persen	<b>55,000,000</b>						100 persen 100 persen	<b>55,000,000</b>	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah layanan PATEN				0 Laporan 32 layanan	55,000,000	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan	0 Laporan 32 layanan	55,000,000	Kecamatan Pauh Duo
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	kegiatan kali		kegiatan kali	6 kegiatan 6 kali	<b>39,999,900</b>						6 kegiatan 6 kali	<b>45,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	terkoordinasinya kegiatan pemberdayaan desa	kali		kali	6 kali	39,999,900						6 kali	45,000,000	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah festival durian yang dilaksanakan Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan PKK diwilayah kecamatan yang dilaksanakan pembinaan PKK diwilayah kecamatan yang dilaksanakan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 kali 6 kali 0 Laporan	39,999,900	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia.	meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat nagari	1 kali 6 kali 0 Laporan	45,000,000	Kecamatan Pauh Duo
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	cakupan penegakan perda yang difasilitasi	persen		persen	100 persen	117,400,000						100 persen	40,000,000	
7 01 04 2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	persentase penyelesaian masalah -masalah terkait ketenteraman dan ketertiban umum	persen		persen	100 persen	117,400,000						100 persen	40,000,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah rapat koordinasi masalah trantib yang dilaksanakan				0 Laporan 3 kali	117,400,000	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat nagari	0 Laporan 3 kali	40,000,000	Kecamatan Pauh Duo
7 01 05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan	persen		persen	100 persen	139,999,650						100 persen	55,000,000	
7 01 05 2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	terfasilitasinya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	persen		persen	100 persen	139,999,650						100 persen	55,000,000	
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Terfasilitasinya kegiatan peringatan hari besar nasional dan daerah				0 Orang 2 kali	49,999,750	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat nagari	0 Orang 2 kali	20,000,000	Kecamatan Pauh Duo

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				2 kali 0 Orang	30,000,000	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat nagari	2 kali 0 Orang	15,000,000	Kecamatan Pauh Duo
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah car free day yang dilaksanakan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan jumlah kegiatan koordinasi bidang kesejahteraan sosial Jumlah kegiatan pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan Jumlah kegiatan rapat koordinasi pimpinan di kecamatan Jumlah koordinasi dan pembinaan pemuda dan olah raga yang dilaksanakan Jumlah rapat koordinasi ekonomi pembangunan				45 kali 0 Dokumen 2 kali 2 kali 6 kali 1 kali 4 kali	59,999,900	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat nagari	45 kali 0 Dokumen 2 kali 2 kali 6 kali 1 kali 4 kali	20,000,000	Kecamatan Pauh Duo
7 01 06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/nagari	persen		persen	100 persen	<b>39,999,900</b>						100 persen	<b>50,000,000</b>	
7 01 06 2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	jumlah nagari yang difasilitasi dimonitoring dan dievaluasi	nagari		nagari	5 nagari	<b>39,999,900</b>						5 nagari	<b>50,000,000</b>	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah nagari yang difasilitasi dalam penyusunan administrasi tata pemerintahan desa				0 Dokumen 5 nagari	10,000,000	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat nagari	0 Dokumen 5 nagari	15,000,000	Kecamatan Pauh Duo

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah nagari yang difasilitasi dalam pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa				0 Dokumen 5 nagari	5,000,000	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat nagari	0 Dokumen 5 nagari	5,000,000	Kecamatan Pauh Duo
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen musrenbang kecamatan yang dihasilkan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 dokumen 0 Dokumen	24,999,900	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat nagari	1 dokumen 0 Dokumen	30,000,000	Kecamatan Pauh Duo
7		<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>													
7 01		<b>KECAMATAN</b>					<b>2,083,342,075</b>							<b>2,045,000,000</b>	
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Layanan Operasional Kantor	Persen		Persen	100 Persen	<b>1,788,342,075</b>						100 Persen	<b>1,700,000,000</b>	
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>1,493,162,075</b>						100 Persen	<b>1,313,600,000</b>	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan				14 Orang	1,443,062,075	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	14 Orang	1,263,600,000	Kecamatan Sangir Balai Janggo
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang dibayarkan honorinya				0 Dokumen 6 orang	50,100,000	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	0 Dokumen 6 orang	50,000,000	Kecamatan Sangir Balai Janggo
7 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>192,289,900</b>						100 Persen	<b>252,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Peralatan Listrik yang Disediakan				0 Paket 5 Jenis	4,000,000	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	0 Paket 5 Jenis	4,000,000	Kecamatan Sangir Balai Janggo
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Jenis 0 Paket	17,000,000	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	10 Jenis 0 Paket	17,000,000	Kecamatan Sangir Balai Janggo
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket 5 Jenis	4,000,000	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	0 Paket 5 Jenis	4,000,000	Kecamatan Sangir Balai Janggo
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bahan Cetak yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Penggandaan yang disediakan				7 Jenis 0 Paket 15000 Lembar	12,816,900	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	7 Jenis 0 Paket 15000 Lembar	12,000,000	Kecamatan Sangir Balai Janggo
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Makanan dan Minuman Tamu yang disediakan				0 Laporan 150 Kotak	4,500,000	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	0 Laporan 150 Kotak	4,500,000	Kecamatan Sangir Balai Janggo
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Makanan dan Minuman Rapat yang disediakan Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan				0 Laporan 350 Kotak 385 Kali	149,973,000	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	0 Laporan 350 Kotak 385 Kali	210,500,000	Kecamatan Sangir Balai Janggo
7.01.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia	Persen		Persen	100 Persen	<b>20,000,000</b>						100 Persen	<b>50,000,000</b>	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit 0 Unit	20,000,000	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	6 Unit 0 Unit	50,000,000	Kecamatan Sangir Balai Janggo

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
7	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia	Persen		Persen	100 Persen	<b>12,900,000</b>					100 Persen	<b>14,400,000</b>		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai yang disediakan				0 Laporan 150 Buah	1,500,000	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	0 Laporan 150 Buah	3,000,000	Kecamatan Sangir Balai Janggo
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pemakaian Alr Jumlah Pemakaian Jasa Listrik Jumlah Pemakaian Telepon				180 Kubik 1350 KWH 1220 GB	6,400,000	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	180 Kubik 1350 KWH 1220 GB	6,400,000	Kecamatan Sangir Balai Janggo
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6 Unit	5,000,000	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	6 Unit	5,000,000	Kecamatan Sangir Balai Janggo
7	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	Persen		Persen	100 Persen	<b>69,990,100</b>						100 Persen	<b>70,000,000</b>	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional				7 Unit 7 Unit	69,990,100	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	7 Unit 7 Unit	70,000,000	Kecamatan Sangir Balai Janggo
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase Layanan PATEN	Persen		Persen	70 Persen	<b>35,000,000</b>						70 Persen	<b>60,000,000</b>	
7	01	02	2.02		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	Persentase kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Persen		Persen	70 Persen	<b>35,000,000</b>						70 Persen	<b>60,000,000</b>	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Layanan PATEN yang dilaksanakan				0 Laporan 32 Layanan	35,000,000	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	0 Laporan 32 Layanan	60,000,000	Kecamatan Sangir Balai Janggo
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Jumlah kegiatan pemberdayaan	Kali		Kali	6 Kali	<b>40,000,000</b>						6 Kali	<b>40,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
7	01	03	2.01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Terkoordinasinya kegiatan pemberdayaan desa	Kali		Kali	6 Kali	<b>40,000,000</b>					6 Kali	<b>40,000,000</b>		
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan yang dilaksanakan  Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Kali 0 Laporan	40,000,000	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Nagari	3 Kali 0 Laporan	40,000,000	Kecamatan Sangir Balai Janggo
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Cakupan penegakan Perda yang difasilitasi	Persen		Persen	100 Persen	<b>20,000,000</b>					100 Persen	<b>100,000,000</b>		
7	01	04	2.01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Persentase penyelesaian masalah-masalah terkait ketenteraman dan ketertiban umum	Persen		Persen	100 Persen	<b>20,000,000</b>					100 Persen	<b>100,000,000</b>		
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan rapat koordinasi masalah trantib yang dilaksanakan  Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				3 Kali 0 Laporan	20,000,000	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	3 Kali 0 Laporan	100,000,000	Kecamatan Sangir Balai Janggo
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan	Persen		Persen	100 Persen	<b>155,000,000</b>					100 Persen	<b>100,000,000</b>		
7	01	05	2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Terfasilitasinya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>155,000,000</b>					100 Persen	<b>100,000,000</b>		
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa  Terfasilitasinya kegiatan hari besar nasional dan daerah				0 Orang 2 Kali	50,000,000	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	0 Orang 2 Kali	40,000,000	Kecamatan Sangir Balai Janggo

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				5 Kali 0 Orang	20,000,000	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	5 Kali 0 Orang	20,000,000	Kecamatan Sangir Balai Janggo
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Car Free Day yang dilaksanakan Jumlah kegiatan koordinasi bidang kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan Jumlah kegiatan pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan Jumlah kegiatan rapat koordinasi pimpinan di kecamatan yang dilaksanakan Jumlah rapat koordinasi ekonomi pembangunan yang dilaksanakan Terfasilitasinya kegiatan pemuda dan olah raga				45 Kali 1 Kali 2 Kali 4 Kali 2 Kali 1 Kali	85,000,000	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	45 Kali 1 Kali 2 Kali 4 Kali 2 Kali 1 Kali	40,000,000	Kecamatan Sangir Balai Janggo
7 01 06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen		Persen	100 Persen	<b>45,000,000</b>						100 Persen	<b>45,000,000</b>	
7 01 06 2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Jumlah desa yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	Nagari		Nagari	4 Nagari	<b>45,000,000</b>						4 Nagari	<b>45,000,000</b>	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya Administrasi Tata Pemerintahan Desa				4 Nagari	26,000,000	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	4 Nagari	26,000,000	Kecamatan Sangir Balai Janggo
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terfasilitasinya pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa				4 Nagari	4,000,000	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	4 Nagari	4,000,000	Kecamatan Sangir Balai Janggo



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Musrenbang Kecamatan yang dihasilkan				1 Dokumen	15,000,000	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	1 Dokumen	15,000,000	Kecamatan Sangir Balai Janggo
8	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>														
8 01	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>							<b>3,900,431,585</b>						<b>152,915,830,883</b>	
8 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Layanan Operasional Perkantoran	%		%	100 %	<b>1,779,726,585</b>						100 %	<b>1,851,830,883</b>	
8 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	<b>1,453,706,585</b>						100 %	<b>1,456,456,582</b>	
8 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan 0 Orang/bulan	1,380,146,585	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Stakeholder terkait	13 Orang/bulan 0 Orang/bulan	1,380,146,582	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan honoronya				0 Dokumen 8 Orang	73,560,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Stakeholder terkait	0 Dokumen 8 Orang	76,310,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	<b>192,020,000</b>						100 %	<b>252,374,301</b>	
8 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Peralatan Listrik yang disediakan				0 Paket 6 Jenis	1,520,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Stakeholder terkait	0 Paket 6 Jenis	1,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Jenis 0 Paket	40,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Stakeholder terkait	10 Jenis 0 Paket	32,960,676	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket 10 Jenis	2,500,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Stakeholder terkait	0 Paket 10 Jenis	2,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bahan cetak yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah penggandaan yang disediakan				6 Jenis 0 Paket 12000 Lembar	15,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Stakeholder terkait	6 Jenis 0 Paket 12000 Lembar	15,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Makan Minum Tamu yang disediakan				0 Laporan 180 Kotak	8,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Stakeholder terkait	0 Laporan 180 Kotak	10,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah makan minum rapat yang disediakan Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakannasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan 180 Kotak 175 Kali	125,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Stakeholder terkait	0 Laporan 180 Kotak 175 Kali	191,413,625	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 01 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Barang milik daerah yang tersedia	%		%	100 %	<b>35,000,000</b>					100 %	<b>35,000,000</b>		
8 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun / disewa Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit 0 Unit	35,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Stakeholder terkait	1 Unit 0 Unit	35,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia	%		%	100 %	<b>24,000,000</b>					100 %	<b>33,000,000</b>		
8 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai yang tersedia				0 Laporan 250 Lembar	2,500,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Stakeholder terkait	0 Laporan 250 Lembar	3,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah pemakaian air Jumlah pemakaian jasa listrik Jumlah pemakaian telpon				0 Laporan 180 Kubik 1350 KWH 1120 Giga	17,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Stakeholder terkait	0 Laporan 180 Kubik 1350 KWH 1120 Giga	20,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Penyediaan Karangan Bunga				6 Unit 0 Laporan 10 unit	4,500,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Stakeholder terkait	6 Unit 0 Laporan 10 unit	10,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%		%	100 %	<b>75,000,000</b>						100 %	<b>75,000,000</b>	
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional				4 Unit 4 Unit	75,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Stakeholder terkait	4 Unit 4 Unit	75,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	Jumlah Penyimpangan Ideologi Pancasila Persentase Penyimpangan Ideologi Pancasila	% %		% %	0 % 0 %	<b>95,705,000</b>						0 % 0 %	<b>124,000,000</b>	
8.01.02.2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	Persentase pencegahan gangguan keamanan berlatar belakang ideologi radikal dan isu separatisme di daerah	%		%	100 %	<b>95,705,000</b>						100 %	<b>124,000,000</b>	
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi				70 Orang	95,705,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Stakeholder terkait	70 Orang	124,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03	<b>PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	Persentase Parpol yang mendapat Pembinaan	%		%	100 %	<b>1,500,000,000</b>						100 %	<b>30,400,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 03 2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	Persentase pencegahan terhadap perkembangan politik di daerah yang tidak sesuai dengan etika dan budaya politik yang demokratis	%		%	100 %	1,500,000,000						100 %	30,400,000,000	
8 01 03 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Partai Politik yang mendapat Bantuan Keuangan Partai Politik Dari APBD Kabupaten Solok Selatan Jumlah Peserta Sosialisasi				10 Parpol 40 Orang	1,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Stakeholder terkait	10 Parpol 40 Orang	30,400,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 04	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	Persentase Ormas yang diawasi	%		%	100 %	25,000,000						100 %	40,000,000	
8 01 04 2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	"Persentase pencegahan terhadap aktivitas ormas yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku Persentase pencegahan terhadap aktivitas ormas yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku Persentase Ormas yang diawasi	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	25,000,000						100 % 100 % 100 %	40,000,000	
8 01 04 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Ormas yang diawasi				0 Orang 25 Ormas	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Stakeholder terkait	0 Orang 25 Ormas	40,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 05	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	Persentase Kasus Narkoba yang tertangani	%		%	100 %	100,000,000						100 %	120,000,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 05 2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	Persentase pencegahan konflik sosial yang berkembang di tengah masyarakat Persentase pencegahan potensi konflik akibat gejala ekonomi, masalah sosial dan budaya di kalangan masyarakat	% %		% %	100 % 100 %	<b>100,000,000</b>					100 % 100 %	<b>120,000,000,000</b>		
8 01 05 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi P4GN Jumlah Rapat FKUB dalam 1 Tahun Jumlah Rapat Tim P4GN dalam 1 Tahun				50 Orang 2 Kali 2 Kali	100,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Stakeholder terkait	50 Orang 2 Kali 2 Kali	120,000,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 06	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	Persentase Penanganan Konflik Sosial	%		%	100 %	<b>400,000,000</b>					100 %	<b>500,000,000</b>		
8 01 06 2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	Persentase pencegahan konflik sosial yang berkembang di tengah masyarakat	%		%	100 %	<b>400,000,000</b>					100 %	<b>500,000,000</b>		
8 01 06 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi Manajemen Penanganan Konflik Jumlah Rapat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Jumlah Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Jumlah Rapat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD) Jumlah Rapat Tim Penanganan Konflik Sosial (PKS)				50 Orang 2 Kali 12 Kali 2 Kali 2 Kali	400,000,000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	Stakeholder terkait	50 Orang 2 Kali 12 Kali 2 Kali 2 Kali	500,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
<b>TOTAL</b>							<b>810,587,983,283</b>						<b>1,024,702,085,389</b>		

## BAB VI

### KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah. Penetapan indikator pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023-2024 ini ditujukan untuk menjadi panduan bagi kinerja Perangkat Daerah dalam menyusun dan menjalankan program dan kegiatan. Untuk target kinerjanya disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026. Penetapan indikator ini terdiri dari Indikator dari Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah, Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan publik.

#### 6.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama ini ditujukan untuk melihat sejauh mana keberhasilan dari pencapaian target dari Visi dan Misi Kepala Daerah. Sesuai RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Solok Selatan yang menjadi target kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan pada Tahun 2023-2024 adalah:

**Tabel 6.1.**

#### Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023-2024

Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Capaian	
		2023	2024
<b>Misi 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkarakter, Produktif dan Kompetitif</b>			
<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>	<b>Indeks</b>	<b>70,37</b>	<b>70,92</b>
Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,57	8,66
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,20	13,31
Persentase Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar (7 -15) Hafiz Qur'an			
a). 1 Juz	Persen	5,00	5,83
b). 2 Juz	Persen	0,56	0,62
c). Lebih atau sama 3 Juz	Persen	0,56	0,62
Angka Harapan Hidup	Tahun	68,41	68,61
Prevalensi Balita Stunting	Persen	13,4	13,3
Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	Rp. Juta /Tahun	73,20	77,20
<b>Misi 2. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Daerah</b>			
<b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b>	<b>Persen</b>	<b>5,26</b>	<b>5,17</b>
<b>Persentase Penduduk Miskin</b>	<b>Persen</b>	<b>7,07</b>	<b>6,94</b>
<b>Indeks Gini Ratio</b>	<b>Indeks</b>	<b>0,291</b>	<b>0,286</b>
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,07	4,41
<b>Misi 3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani</b>			

Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Capaian	
		2023	2024
<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>Indeks</b>	<b>72,00</b>	<b>76,00</b>
Indeks SPBE	Indeks	2,34	2,54
Nilai/Predikat SAKIP	Nilai/ Prediket	70 B	80 BB
Opini BPK terhadap LKPD	Opini	WTP	WTP
Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai	3,08	3,10
<b>Indek Pelayanan Publik</b>	<b>Indeks</b>	<b>3,9</b>	<b>4,3</b>
Indek Pelayanan Publik	Indeks	3,9	4,3
<b>Misi 4. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pertumbuhan, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana</b>			
<b>Indek Infastruktur Wilayah</b>	<b>Indeks</b>	<b>44</b>	<b>46</b>
Indeks Ketersediaan Infrastruktur dasar	Indeks	74,30	76,28
Indeks Kesulitan Geografis (IKG) /Rata-Rata Kab	Indeks	25,1	23,4
Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,36	0,38
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	79,75	79,76
<b>Misi 5. Pelestarian Seni, Budaya, Olahraga dan Penanganan Permasalahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat</b>			
<b>Peningkatan jumlah lembaga kesenian</b>	<b>Persen</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Peningkatan jumlah Klub/ Perkumpulan Olahraga</b>	<b>Persen</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
Persentase lembaga Adat yang aktif (KAN, LKAAM dan Bundo Kandung)	Persen	68,42	78,95
Persentase lembaga Seni dan budaya yang aktif	Persen	48,39	53,76
Persentase Klub/ Perkumpulan Olahraga yang aktif	Persen	100	100
<b>Persentase PPKS yang Ditangani</b>	<b>Persen</b>	<b>76,00</b>	<b>79,00</b>
Persentase PPKS yang Ditangani	Persen	76,00	79,00
<b>Indeks Desa Membangun</b>	<b>Indeks</b>	<b>0,812</b>	<b>0,834</b>
Persentase Nagari Mandiri	Persen	29,78	36,17
<b>Indeks Pembangunan Gender</b>	<b>Indeks</b>	<b>97,15</b>	<b>97,70</b>
Indeks Pembangunan Gender	Indeks	97,15	97,70
<b>Persentase Perusahaan yang memenuhi kewajibannya dalam bentuk CSR</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Perentase Nagari Mandiri	Persen	29,78	36,17
Indeks Pembangunan Gender	Indeks	97,15	97,70
Persentase pemamfaatan CSR yang mendukung program pemerintah daerah	Persen	100,0	100,0

Sumber : Perda RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026

## 6.2. Indikator Penyelenggaran Pemerintah Daerah

Indikator Utama ini ditujukan untuk melihat sejauh mana keberhasilan dari pencapaian penyelenggaraan pemerintah daerah. Indikator dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 target Indikator Kunci penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2023-2024 adalah:

Tabel 6.2.

## Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023-2024

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian	
			2023	2024
<b>ASPEK KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI</b>				
1	Indek Pembangunan Manusia	Indeks	70,37	70,92
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,07	4,41
3	PDRB per kapita (Harga Berlaku)	Juta/ Tahun	35,16	37,09
4	PDRB per kapita (Harga Konstan)	Juta/ Tahun	22,85	23,45
5	Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan	Ribu/ Tahun	10.686	10.910
6	Indek Gini Ratio	Indek	0,291	0,286
7	Tingkat Pengangguran	%	5,26	5,17
8	Tingkat Kemiskinan	%	7,07	6,94
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>				
<b>I</b>	<b>Pelayanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>			
<b>1.</b>	<b>Pendidikan</b>			
1	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,57	8,66
2	Angka harapan lama sekolah	Tahun	13,2	13,31
3	Angka Melanjutkan			
	a.SD/MI ke SMP/MTs	%	99,15	99,75
	b.SMP/MTs ke SMA/AM/SMK	%	100	100
4	Angka Melek Huruf	%	97,5	98,8
5	Angka Partisipasi Kasar (APK)			
	a. TK/PAUD	%	63,48	67,28
	b.SD/MI/SDLB/Paket A	%	102,25	105,75
	c.SMP/MTs/SMPLB/Paket B	%	100	100
	d.SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C	%	83	85,75
6	Angka Partisipasi Murni (APM)			
	a.SD/MI/SDLB/Paket A	%	99,75	100
	b.SMP/MTs/SMPLB/Paket B	%	80,75	82,35
	c.SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C	%	69,25	72,65
7	Persentase guru bersertifikat Pendidik			
	a. SD/MI	%	94,35	95,25
	b. SMD/MTs	%	96,75	97
	c. SMA/MA	%	98,75	99
8	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	96	100
9	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	97	100
10	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	88	100
10	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	1,3	0,9
<b>2.</b>	<b>Kesehatan</b>			
1	Umur Harapan Hidup; (UHH)	Tahun	68,41	68,61



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian	
			2023	2024
2	Angka Kematian Ibu Melahirkan	Orang per 100.000 KH	180	174
3	Angka Kematian Bayi;	Bayi per 1.000 KH	6,7	6,4
4	Prevalensi Gizi Buruk pada Anak Balita	%	0,01	0,01
5	Prevalensi Balita Stunting	%	13,4	13,3
6	Peningkatan Type Rumah Sakit	Type	C	C
7	Rasio daya tampung RS Rujukan	%	0,80	0,80
8	Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	%	100	100
9	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	81,8	84,2
10	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	84	89
11	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	89	91
12	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	91	93
13	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	93,4	94,7
14	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	92,4	94,7
15	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	74,5	76
16	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	66	70
17	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100
18	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	71	74
19	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100
20	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	14	16
<b>3.</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>			
1	Persentase kesesuaian pemamfaatan ruang dengan rencana tata ruang	%	100	100
2	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten	%	40	45
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	29,1	30,2

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian	
			2023	2024
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kota (Akses air minum layak)	%	82,50	85,00
5	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (akses sanitasi layak)	%	63,27	64,47
6	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten	%	100	100
7	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	%	46,49	47,69
8	Tingkat Kemantapan jembatan	%	82	85
9	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100	100
10	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100
<b>4.</b>	<b>Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>			
1	Persentase Rumah layak huni	%	91,50	91,75
2	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	%	97,88	98,44
3	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	%	100	100
4	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	%	100	100
5	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%	100	100
6	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	8,5	8,25
7	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	53,39	54,64
<b>5</b>	<b>Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>			
1	Cakupan Penanganan Perda	%	100	100
2	Persentase Ketersediaan Satlinmas	%	100	100
3	Pencapaian Respon time	%	56,85	57,85
4	Persentase Penurunan Jiwa terdampak bencana	%	9,00	8,00
5	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100
6	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	1000	2000
7	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	100	100
8	Persentase daerah pasca bencana yang ditindaklanjuti	%	80	80
9	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100
<b>6</b>	<b>Urusan Sosial</b>			

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian	
			2023	2024
1	Persentase Cakupan Pelayanan PPKS	%	76	80
2	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	100	100
3	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	%	100	100
<b>II</b>	<b>Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar</b>			
<b>1</b>	<b>Urusan Ketenagakerjaan</b>			
1	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	1,96	2,04
2	Persentase tenaga kerja yang terdaftar ditempatkan	%	20,82	21,82
3	Persentase Kasus Tenaga Kerja yang ditangani	%	100	100
4	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100
5	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Berdasarkan ADHK)	%	46,9	46,9
6	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	17,95	17,95
<b>2</b>	<b>Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Masyarakat</b>			
1	Indek Pembangunan Gender	indeks	97,15	97,7
2	Persentase Penyelesaian Kasus Terhadap Anak dan Perempuan	%	100	100
3	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	%	12,67	12,67
4	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	%	0,0032	0,0030
5	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	0.50	0.30
<b>3</b>	<b>Urusan Pangan</b>			
1	Penguatan Cadangan Pangan	ton	10	10
2	Skor Pola Pangan Harapan	%	79	84
3	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	123,42	127,12
<b>4</b>	<b>Urusan Pertanahan</b>			
1	Persentase tanah garapan yang telah diselesaikan masyarakat dengan perusahaan/ pemerintah)	%	50	50
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	100	100
3	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100
<b>5</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>			

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian	
			2023	2024
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	79,75	79,76
2	Persentase pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	%	60	65
3	Persentase pengurangan sampah di wilayah kab	%	5	5
4	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	%	100	100
<b>6</b>	<b>Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil</b>			
1	Persentase rumah tangga yang memiliki Kartu Keluarga (KK)	%	98	100
2	Perekaman KTP Elektronik	%	100	100
3	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) yang memiliki KIA	%	50	60
4	Kepemilikan akta kelahiran	%	100	100
5	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	OPD	18	25
<b>7</b>	<b>Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>			
1	Jumlah Desa Mandiri	Desa /Nagari	14	18
2	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	7,69	7,69
3	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	35,90	46,15
<b>8</b>	<b>Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>			
1	Cakupan akseptor KB aktif	%	85,2	86,5
2	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,35	0,3
3	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	2,2	2,1
4	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	69	70,5
5	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	0	0
<b>9</b>	<b>Urusan Perhubungan</b>			
1	Penurunan Rasio Fatalitas Kecelakaan lalin	Korban Meninggal Per 100 Kecelakaan	0,23	0,21
2	Rasio konektivitas Kabupaten	Rasio	0,49	0,51
3	Persentase kinerja lalu lintas (V/C Ratio di jalan Kabupaten)	%	40,4	30,4
<b>10</b>	<b>Urusan Komunikasi dan Informasi</b>			
1	Nilai Indeks SPBE	Nilai	2,34	2,54
2	Persentase Jorong Yang dilayani akses telekomunikasi	%	92,2	94,8
3	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas	%	100	100

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian	
			2023	2024
	Kominfo			
4	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	33	35
5	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten	%	35	40
<b>11</b>	<b>Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</b>			
1	Persentase Pertumbuhan Koperasi yang meningkat kekuatan usaha dan kelebihannya (Koperasi Berkualitas)	%	5,22	6,96
2	Persentase KSP/USP Koperasi berprestasi	%	13,51	18,92
3	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	5	5
<b>12</b>	<b>Urusan Penanaman Modal</b>			
4	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	%	1,2	1,5
<b>13</b>	<b>Urusan Kepemudaan dan Olahraga</b>			
1	Persentase Organisasi Kepemudaan aktif	%	43	45
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	10,55	15,75
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	10,35	15,55
4	Peningkatan prestasi olahraga Ø emas Ø Perak Ø Perunggu	Buah Buah Buah	5 6 8	7 8 11
<b>13</b>	<b>Urusan Statistik</b>			
1	Persentase jumlah elemen data sektoral yang dikelola	%	100	100
2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100
3	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100
<b>14</b>	<b>Urusan Persandian</b>			
1	Persentase perangkat daerah yang memiliki keamanan informasi	%	24	26
2	Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	%	100	100
<b>15</b>	<b>Urusan Kebudayaan</b>			
1	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	CB	136	136
2	Jumlah Sanggar Budaya dibina	Sanggar	93	93
3	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	100	100

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian	
			2023	2024
<b>16</b>	<b>Urusan Perpustakaan</b>			
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Orang	3500	3700
2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	69	70
3	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	21	22
<b>17</b>	<b>Urusan Kearsipan</b>			
1	Persentase OPD yang menerapkan arsip secara baku	%	33,33	45,45
2	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Nilai Rata	34	39
3	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Nilai Rata	3,02	3,16
<b>III</b>	<b>Urusan Pilihan</b>			
<b>1</b>	<b>Urusan Kelautan dan Perikanan</b>			
1	Kontribusi Subsektor Perikanan thd Sektor Pertanian	Persen	1,24	1,33
2	Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/kapita/tahun	32,6	33,40
3	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Ton	2343	2542
<b>2</b>	<b>Urusan Pariwisata</b>			
1	Jumlah Objek Wisata Unggulan yang siap dipasarkan	Objek	4	5
2	Persentase Pelaku ekraf yang dibina	%	13	14
3	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	10	10
4	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kota	%	10	15
5	Tingkat hunian akomodasi	%	50	55
6	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	25,6	25,7
7	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	1,8	1,9
<b>3</b>	<b>Urusan Pertanian</b>			
1	Kontribusi sektor pertanian	Persen	33,32	34,98
2	Jumlah Produksi Pertanian dan Perkebunan dan Peternakan Unggulan			
	- Padi	Ton	110362	115755
	- Jagung	Ton	93369	97141
	- Kacang tanah	Ton	886	898
	- Manggis	Ton	464	472
	- Cabe	Ton	7.274	7401
	- Bawang Merah	Ton	4.474	4564
	- Kopi	Ton	3.502	3678
	- Porang	Ton	182	200



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian	
			2023	2024
	- Kelapa sawit - Populasi ternak besar - Telor	Ton ekor Ton	61416 22668 451,78	66943 23688 460,82
3	Jumlah Kelompok Tani berdasarkan kelas: a. Pemula b. Lanjut c. Madia d. Utama	Keltan Keltan Keltan Keltan	893 266 14 1	953 322 17 2
4	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	5,41	5,56
5	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	32,13	33,34
<b>4</b>	<b>Urusan Energi Sumber Daya Mineral</b>			
1	Cakupan pemanfaatan langsung panas bumi yang dibina	%	100	100
<b>5</b>	<b>Urusan Perdagangan</b>			
1	Kontribusi Sektor Perdagangan	%	21	21,3
2	Persentase peningkatan produk unggulan daerah (Lokal)	%	60	70
3	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	77	85
4	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	30	35
5	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	56	58
<b>6</b>	<b>Urusan Perindustrian</b>			
1	Kontribusi Sektor Perindustrian	%	4,98	5
2	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kota	%	5	5,5
3	Persentase pertumbuhan izin Industri	%	15	20
4	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industry dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	40	42
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	90	100
6	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100
7	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kota	%	100	100

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian	
			2023	2024
8	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	100	100
<b>IV</b>	<b>Fungsi Penunjang</b>			
<b>1</b>	<b>Perencanaan</b>			
1	Persentase Pencapaian Nilai SAKIP (Perencanaan)	%	80,00	83,33
2	Persentase Capaian Sasaran Pembangunan Daerah (IKU)	%	86	88
3	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah RKPD dan RPJMD	%	100	100
4	Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	%	100	100
5	Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Daerah	%	84	86
6	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0
<b>2</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>			
1	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam perumusan kebijakan daerah	%	30	40
<b>3</b>	<b>Keuangan</b>			
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP
2	Persentase Pencapaian Target PAD	%	100	100
3	Kontribusi PAD Terhadap Belanja Daerah	%	9,37	9,58
4	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	30,2	30,3
5	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	2	2
6	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	64,5	64,75
7	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	0,94	0,94
8	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	0	0
9	Assets Management	Nilai	4	4
10	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	1,24	1,24
11	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	100	100
12	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100	100
<b>4</b>	<b>Kepegawaian</b>			
1	Indeks Sistem Merit	indeks	250	300
2	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	65	70
3	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	36,59	40,5
4	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	48,16	52,07
5	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	58,95	62,86



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian	
			2023	2024
<b>5</b>	<b>Pelayanan Pemerintahan lainnya</b>			
1	Nilai LAKIP/SAKIP	Nilai	72	75
2	Nilai LPPD	Nilai	3,0763	3,1000
3	Persentase pencapaian SPM per-urusan	%	100	100
4	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indek	Baik	Baik
5	Persentase Usulan Ranperda OPD yang dibahas oleh DPRD menjadi Perda	%	100	100
6	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	%	28	34
7	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	97	98
8	Jumlah Perda Inisiatif DPRD	Perda	1	1
9	Maturitas SPIP	nilai	3	3,1
10	Level Kapabilitas Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP)	Level	III	III

Sumber : Perda RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026

### 6.3. Indikator Penyelenggaran Pemerintah Daerah

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimal yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara. Untuk melihat keberhasilan pemerintah dalam penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakatnya maka dapat dilihat dari seberapa besar pencapaian indikator SPM dapat tercapai sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang target dan indikatornya dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 6.3.**  
**Indikator Standar Pelayanan Minimum Pelayanan Publik**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal	
		Indikator	Target (%)
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTS)	100
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100
4	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100
5	Pelayanan Kesehatan	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal	
		Indikator	Target (%)
	Ibu Bersalin	layanan kesehatan	
6	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100
7	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100
8	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100
9	Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100
10	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100
11	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100
12	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100
13	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Warga Negara dengan Gangguan Jiwa Berat yang Terlayani Kesehatan	100
14	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	Jumlah Warga Negara Terduga Tuberculosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100
15	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100
16	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga	100
17	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	persentase rumah tangga yang memiliki akses pengolahan air limbah domestik	100
18	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	persentase rumah korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100
19	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	persentase rumah tangga yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal	
		Indikator	Target (%)
20	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda dan perkara	100
21	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100
22	Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar diluar panti	% Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya diluar panti	100
23	Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar diluar panti	% Penyandang Disabilitas yang Terpenuhi Kebutuhannya diluar panti	100
24	Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar diluar panti;	% Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya diluar panti	100
25	Rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis diluar panti	% Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya diluar panti	100
26	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / Kota	% Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya diluar panti	100

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal



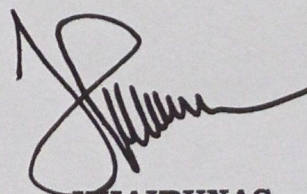
## **BAB VII PENUTUP**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 disusun dengan mempedomani dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan tahun 2005-2025 serta mempedomani penjabaran dari Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati yang telah dijabarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026. RKPD merupakan perencanaan operasional pembangunan untuk tahun 2023, dan merupakan pedoman untuk penyusunan Renja OPD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), RAPBD Tahun 2023.

Tersusunnya dokumen ini melalui tahapan-tahapan sebagaimana telah diatur, serta koordinasi baik kepada instansi dalam lingkup Pemda Kabupaten Solok Selatan, Instansi Vertikal, masyarakat, ataupun dengan instansi pada Pemerintahan Provinsi dan Pusat. Koordinasi dilaksanakan dalam bentuk forum-forum, antara lain Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan, Forum OPD, serta Musrenbang Kabupaten.

Diharapkan RKPD Kabupaten Solok Selatan ini mampu memberikan akselerasi dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang akan dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026, dalam bentuk lebih terkoordinir dan terintegrasinya peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta sinergitas pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

**BUPATI SOLOK SELATAN**



**KHAIRUNAS**



